

Continuously Supporting Infrastructure Development in Indonesia

Dukungan Berkelanjutan Terhadap Pembangunan Infrastruktur di Indonesia



2016
Laporan Tahunan
Annual Report



PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
Indonesia Infrastructure Guarantee Fund

Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab

Disclaimer

Laporan tahunan ini memuat pernyataan kondisi keuangan, hasil operasi, proyeksi, rencana, strategi, kebijakan, dan tujuan Perusahaan, yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan Perundang-undangan yang berlaku, kecuali hal-hal yang bersifat historis. Seluruh pernyataan tersebut memiliki prospek risiko, ketidakpastian, serta dapat mengakibatkan perkembangan aktual secara material berbeda dari yang dilaporkan.

Pernyataan-pernyataan prospektif dalam laporan tahunan ini dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini dan kondisi mendatang Perusahaan serta lingkungan bisnis di mana Perusahaan menjalankan kegiatan usaha. Perusahaan tidak menjamin bahwa dokumen-dokumen yang telah dipastikan keabsahannya akan membawa hasil-hasil tertentu sesuai harapan.

Laporan tahunan ini memuat kata "PT PII" dan "Perusahaan" yang didefinisikan sebagai PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) yang menjalankan bisnis dalam bidang Penjaminan Infrastruktur dalam proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

This annual report contains financial condition, operation results, projections, plans, strategies, policy, as well as the Company's objectives, which is classified as forward-looking statements in the implementation of the prevailing laws, excluding historical matters.

Such forward-looking statements are subject to known and unknown risks (prospective), uncertainties, and other factors that could cause actual results to differ materially from expected results. Prospective statements in this annual report is prepared based on numerous assumptions concerning current conditions and future events of the Company and the business environment where the Company conducts business. The Company shall have no obligation to guarantee that all the valid document presented will bring specific results as expected.

This annual report contains the words "PT PII" and "Company", hereinafter referred to as PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), as the company that runs business in Infrastructure Guarantee in Public-Private Partnership (PPP) Project.

Penjelasan Tema

Theme Explanation



Continuously Supporting Infrastructure Development in Indonesia

Dukungan Berkelanjutan Terhadap Pembangunan Infrastruktur di Indonesia

Pemerintah terus mendorong pengembangan infrastruktur di berbagai wilayah untuk meningkatkan daya saing Indonesia di persaingan ekonomi dunia.

The Government continues supporting infrastructure development in several regions to advance competitive advantages of Indonesia in the global economic competition.

PT PII berkomitmen untuk fokus mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia dengan memberikan penjaminan atas proyek-proyek yang berkualitas melalui kerangka evaluasi, strukturisasi dan pengelolaan mitigasi risiko dalam tahapan pemantauan guna memastikan keberlanjutan dari pembangunan proyek yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia.

PT PII is committed to focus on supporting infrastructure development in Indonesia by providing guarantee on qualified projects through framework of evaluation, structuring and risk mitigation management that are under monitoring process to ensure continuity of the project development that will provide benefit for all Indonesian people.

Komitmen yang ditunjukkan PT PII merupakan upaya perwujudan visi dan misi Perusahaan dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia.

The commitment of PT PII manifested initiative to achieve vision and mission of the Company to accelerate national economic growth.

Kesinambungan Tema

Theme Continuity



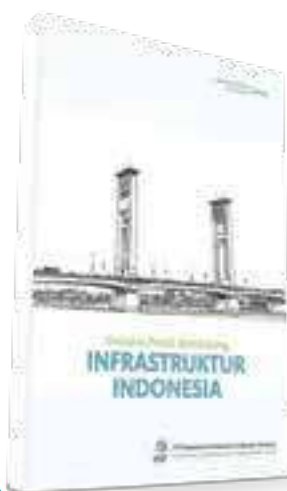
2015

Memacu Investasi, Mempercepat Pembangunan Infrastruktur

Encouraging Investment, Accelerating Infrastructure Development

Pemerintah Indonesia mencanangkan program percepatan pembangunan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. PT PII yang memiliki kredibilitas tinggi bagi penjaminan keamanan investasi di bidang pembangunan infrastruktur, diharapkan mampu memberikan kepercayaan dan minat yang bagus bagi para investor untuk menanamkan modalnya di sektor infrastruktur.

The Government launched an infrastructure development acceleration program. The role and presence of highly credible IIGF for investment security guarantee in infrastructure development, both internationally and nationally, is expected to provide investor with confidence and great interest to invest their capital in infrastructure sector.



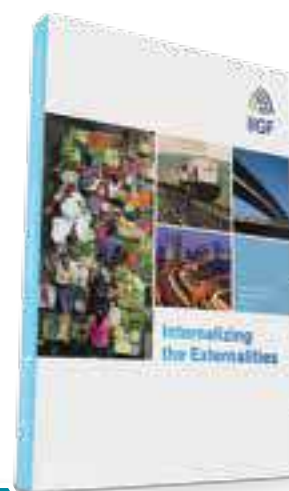
2014

Kesiapan Penuh Mendukung Infrastruktur Indonesia

Maximum Readiness to Support Indonesian Infrastructure

PT PII siap mendukung pembangunan infrastruktur nasional melalui penyediaan program penjaminan atas proyek-proyek infrastruktur yang dikembangkan melalui skema KPBU. Keberadaan penjaminan PT PII dapat menarik partisipasi swasta dalam proyek infrastruktur nasional sehingga menjembatani kesenjangan pendanaan bagi pembangunan infrastruktur.

IIGF supported infrastructure development in Indonesia by developing PPP scheme so that it may attract private sector participation in national infrastructure project to bridge funding gap for infrastructure development.



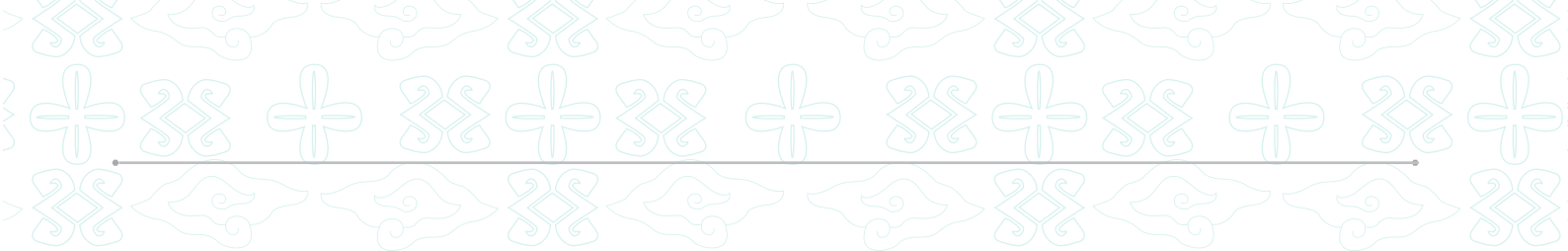
2013

Internalizing the Externalities

Internalizing the Externalities

Di tengah berbagai hambatan dari faktor eksternal, PT PII memperoleh peluang untuk mengembangkan dan memperkuat kapasitas internal Perusahaan pada arah yang tepat, termasuk dengan proaktif berkontribusi pada pembangunan kapasitas eksternal. PT PII menggalang momentum pertumbuhan ke depan dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Amidst challenges from externalities, IIGF had opportunities to develop and strengthen internal capacity towards the right direction, including contribute actively in external capacity development. IIGF initiated future growth momentum to support acceleration of infrastructure development in Indonesia.



Visi dan Misi Perusahaan

Vision and Mission



Visi

Vision

“Menjadi penyedia penjaminan yang memainkan peran penting dalam menarik modal swasta untuk pembangunan infrastruktur dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia.”

“To be the sole guarantee provider that plays a pivotal role in attracting private sector participation for infrastructure development to accelerate Indonesia’s economic growth”.



Makna Visi Perusahaan

Meaning of Vision:

"Menjadi satu-satunya penyedia penjaminan..."

PT PII merupakan satu-satunya Badan Usaha Milik Negara yang memperoleh mandat untuk memberikan penjaminan atas proyek proyek infrastruktur Pemerintah yang dikembangkan dengan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).

"...yang memiliki peran penting dalam menarik partisipasi swasta untuk pembangunan infrastruktur"

Penjaminan PT PII diharapkan dapat memberikan kepastian terhadap komitmen Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) sehingga swasta merasa aman dalam berinvestasi kepada proyek infrastruktur Pemerintah.

"...dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia"

Keberadaan infrastruktur yang merata mendukung usaha Pemerintah untuk dapat meningkatkan kemajuan ekonomi negara dan kesejahteraan masyarakat.

"Being the sole guarantee provider ..."

IIGF is the only State-Owned Enterprise that receives the mandate from Government to provide guarantees for infrastructure projects developed using Public Private Partnership (PPP) scheme.

"...that has a pivotal role in attracting private sector participation for infrastructure development"

IIGF's guarantee is expected to provide the certainty of Contracting Agencies' (CA) commitment so the private sector feels secure to invest in the Government infrastructure projects.

"... to accelerate Indonesia's economic growth"

The existence of equitable infrastructure supports the Government efforts to improve economic growth and public welfare.



Misi

Mission

- Menyediakan produk-produk penjaminan melalui proses bisnis yang transparan dan baik.
- Melaksanakan kebijakan satu pelaksana dalam proses pemberian jaminan dengan modal yang kuat dan manajemen yang profesional.
- Meningkatkan kelayakan kredit proyek Infrastruktur Indonesia.
- To provide guarantee products through transparent and robust business processes.
- To implement a "Single Window" policy in guarantee provision through a solid capital base and professional management.
- To improve the creditworthiness of infrastructure projects in Indonesia.

Nilai-Nilai Utama Perusahaan

Corporate Values

"In TIME"

PT PII meyakini pentingnya pemahaman dan keseragaman prinsip yang harus dianut oleh seluruh karyawan demi terwujudnya suatu hubungan yang solid dan terciptanya lingkungan pekerjaan yang nyaman. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut Perusahaan senantiasa memegang teguh tata nilai budaya "In Time", yakni *Integrity, Team Work, Think Big, Mutual Trust, dan Excellence*.

PT PII believes necessary understanding and uniformity of principles to be adhered by all employees to establish a solid relationship and convenience working environment. To achieve this purpose, the Company upholds "In TIME" corporate values, including Integrity, Team Work, Think Big, Mutual Trust and Excellence.

Integrity

Nilai-nilai:

1. Bekerja dengan standar etika tertinggi.
2. Jujur terhadap diri sendiri maupun orang lain dalam segala urusan.
3. Mengutamakan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi, golongan dan/atau pihak-pihak lain.
4. Menjaga komitmen dalam melaksanakan tugas.
5. Mentaati aturan Perusahaan.
6. Bertanggung jawab dalam seluruh tindakan.

Team Work

Nilai-nilai:

1. Beroperasi sebagai sebuah tim.
2. Memberi kontribusi keterampilan dan pengetahuan demi kepentingan tim.
3. Mengutamakan kepentingan tim untuk mencapai tujuan Perusahaan.

Integrity

Values:

1. To work with the highest standard of ethics.
2. To be honest with oneself or other persons in all interactions.
3. To uphold the interest of the Company above the interest of the individual, group and/or other parties.
4. To maintain the commitment in executing duties.
5. To always comply with company regulations.
6. To always be responsible in all actions.

Teamwork

Values:

1. To operate as a team.
2. To contribute in skills and knowledge for the benefit of the team.
3. To uphold the interest of the team in striving for company's objectives.



Think Big

Nilai-nilai:

1. Memiliki pemikiran luas dan mutakhir.
2. Mempertimbangkan berbagai alternatif untuk hasil yang lebih baik bagi Perusahaan dan bagi pemangku kepentingan.
3. Menggali secara terus menerus ide-ide baru untuk perkembangan Perusahaan.
4. Terbuka terhadap berbagai perkembangan yang ada di lingkungan demi hasil terbaik tanpa meninggalkan prinsip tata kelola yang baik.

Mutual Trust

Nilai-nilai:

1. Memegang teguh etika bisnis bersama seluruh komponen internal Perusahaan maupun dengan mitra Perusahaan.
2. Konsisten memenuhi standar layanan yang dijanjikan.
3. Mempercayai dan menghormati satu sama lain dengan itikad baik untuk mendapatkan kepercayaan dari rekan-rekan kerja dan mitra bisnis.

Excellence

Nilai-nilai:

1. Berkomitmen untuk menjadi yang terunggul dalam melaksanakan apapun yang dilakukan.
2. Berusaha untuk melakukan perbaikan yang terus menerus.
3. Memiliki pengetahuan mendalam guna mendukung kegiatan dan mendapatkan hasil yang melebihi harapan.

Think Big

Values:

1. To be broad-minded and cognizant of the latest issues.
2. To consider alternatives that can lead to improved results for the benefit of the company and stakeholders.
3. To continuously strive for innovation towards the Company's development.
4. To be receptive to various developments in the work environment that can lead to the best results while adhering to the principles of good governance.

Mutual Trust

Values:

1. To uphold the highest of business ethics with all components within the company as well as with business partners.
2. To consistently fulfill the agreed service level standard.
3. To trust and respect one another in good faith in order to earn the confidence of co-workers and business partners.

Excellence

Values:

1. To commit to be the best in all of one's endeavor.
2. To strive for continuous improvement.
3. To develop comprehensive and thorough knowledge that can support one's work and deliver results that are above expectation.

Peristiwa Penting

Event Highlights

1 Januari/January



Sosialisasi Revisi PMK 260
Socialization of PMK 260 Revision

28-29 Januari 2016

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)/PT PII mengadakan sosialisasi terkait rencana revisi PMK 260 dengan mengundang Direktorat DJKN, PDPPI, dan PRKN Kementerian Keuangan.

January 28 – 29, 2016

Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (Persero)/IIGF organized a socialization regarding PMK 260 Revision plan by inviting DJKN, PDPPI and PRKN from Ministry of Finance.

2 Februari



Seminar Pembangunan Infrastruktur
Infrastructure Development Seminar

6 Februari 2016

PT PII turut mendukung terselenggaranya seminar bertajuk "Peran Pembangunan Infrastruktur untuk Mendorong Perekonomian di Sumedang", yang diselenggarakan oleh LPM Citra Tandang Pembangunan. Seminar ini dihadiri oleh anggota Komisi XI DPR RI dan Kepala Bina Marga dan SDM wilayah Sumedang.

February 6, 2016

IIGF participated in seminar entitled "Role of Infrastructure Development to Support Economics in Sumedang" organized by LPM Citra Tandang Pembangunan. The seminar was attended by members of XI Commission, DPR RI and Bina Marga & Human Capital Chief of Sumedang Area.



Penandatanganan Proyek Palapa Ring Barat
West Ring Palapa Project Signing

29 Februari 2016

Penandatanganan Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres untuk proyek Palapa Ring Barat dilakukan oleh PT PII dengan PT Palapa Ring Barat selaku Badan Usaha dan antara PT PII dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK)

February 29, 2016

Regres Guarantee and Agreement Signing for West Ring Palapa Project between IIGF and PT Palapa Ring Barat as Business Entity and between IIGF and Ministry of Communication and Information as Supervisor of the Partnership Project (PJPK).

3 Maret/March



PT PII Sambut Hangat *Benchmarking* Delegasi Myanmar
Iigf Welcomed Benchmarking Delegates From Myanmar

2 Maret 2016

Perwakilan Pemerintah Myanmar melakukan kunjungan ke PT PII untuk membahas skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di Indonesia. Acara ini diisi dengan penyampaian materi dan *sharing* mengenai bagaimana proses implementasi skema KPBU di Indonesia.

March 2, 2016

Myanmar Government Delegates visited IIGF to discuss Public-Private Partnership (PPP) in Indonesia. The event was followed by presentation and sharing on how PPP scheme process and implementation in Indonesia.



Penandatanganan Proyek Palapa Ring Paket Tengah
Ring Palapa Project Signing – Center Package

4 Maret 2016

Penandatanganan Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres untuk proyek Palapa Ring Tengah dilakukan antara PT PII dengan PT Len Telekomunikasi Indonesia selaku Badan Usaha dan Kementerian Komunikasi dan Informasi selaku PJPK.

March 4, 2016

Regres Guarantee and Agreement Signing for Ring Palapa Project Center Package between PT IIGF and PT Len Telekomunikasi Indonesia as Business Entity and Ministry of Communication and Information as PJPK.

4 April



Penandatanganan MoU Antara PT PII - Universitas
Negeri Sebelas Maret / Mou Signing Between PT PII-
Universitas Negeri Sebelas Maret

15 April 2016

Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara PT PII dengan Universitas Negeri Sebelas Maret, Surakarta, dilaksanakan pada tanggal 15 April 2016, untuk pengembangan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

April 15, 2016

MoU Signing between IIGF with Universitas Negeri Sebelas Maret, Surakarta on April 15, 2016 for education and research development and community service.



Capacity Building Pemerintah Daerah Trenggalek
Trenggalek Local Government Capacity Building

14 April 2016 2016

PT PII mengadakan acara Peningkatan Kapasitas (*Capacity Building*) yang diikuti oleh jajaran pejabat pemerintah daerah Trenggalek. Acara ini berjalan dengan lancar dan mendapat respons positif dari Pemda Trenggalek yang sangat antusias untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur di daerah Trenggalek.

April 14, 2016

IIGF organized Capacity Building program participated by Officials of Trenggalek Local Government. The event was held smoothly and received positive response from Trenggalek Local Government who is very interested on infrastructure development in Trenggalek.



Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Annual General Meetings Of Shareholders

22 April 2016

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT PII dilaksanakan pada 22 April 2016, dengan agenda antara lain: persetujuan Laporan Tahunan 2015, penetapan keputusan gaji/honorarium dan tunjangan fasilitas Direksi & Dewan Komisaris Perusahaan untuk tahun buku 2016, penetapan keputusan penggunaan laba bersih Perusahaan tahun buku 2015 serta pembayaran *tantiem*, dan penetapan KAP untuk tahun buku 2016.

April 22, 2016

IIGF Annual General Meetings of Shareholders was held on April 22, 2016 with agenda including: Approval to Annual Report 2015, stipulation of salary/wage and facility allowance for Board of Directors and Board of Commissioners in fiscal year 2016, stipulation of Net Income Fiscal Year 2015 distribution and bonus payment, and Public Accountant Firm appointment for fiscal year 2016.



Penandatanganan Proyek Jalan Tol Batang-Semarang
Batang – Semarang Toll Road Project Signing

27 April 2016

PT PII menandatangani Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres untuk proyek Tol Batang-Semarang yang bertempat di Graha Sawala Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

April 27, 2016

IIGF signed Regres Guarantee and Agreement for Batang – Semarang Toll project located at Graha Sawala, Coordinative Ministry of Economics.

5

Mei/May



**Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 88/PMK.06/2015/Socialization Of Finance
Minister Act No. 88/Pmk.06/2015**

12 Mei 2016

PT PII turut mendukung terlaksanannya acara sosialisasi PMK No. 88 Tahun 2015 mengenai Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. Acara ini diikuti oleh 5 (lima) BUMN/Lembaga di bawah pembinaan dan pengawasan Kementerian Keuangan dan dihadiri oleh perwakilan Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan dan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.

May 12, 2016

IIGF supported socialization event of PMK No. 88 of 2015 on Good Corporate Governance. The event was participated by 5 (five) SOE/ Institutions under development and supervision of Ministry of Finance and attended by representatives of General Inspector Finance Ministry and State Assets General Directorate, Ministry of Finance.



**Pameran Sidang Tahunan Islamic Development Bank (IDB)
Islamic development bank (IDB) annual plenary exhibition**

15-19 Mei 2016

Sebagai bagian dari rangkaian Sidang Tahunan IDB yang ke-41, PT PII bersama 5 (lima) BUMN/Lembaga di bawah pembinaan dan pengawasan Kementerian Keuangan berpartisipasi dalam kegiatan pameran bertema pembangunan infrastruktur, keuangan inklusif, inovasi, dan lain-lain.

May 15 – 19, 2016

As part of IDB 41st Annual Plenary event, IIGF collaborated with 5 (five) SOEs/Institutions under development and supervision of Ministry of Finance participating in exhibition with theme infrastructure development, inclusive finance, innovation and others.



**Seminar Sidang Tahunan IDB Ke-41
IDB 41st Annual Plenary Seminar**

17 Mei 2016

Direktur Utama PT PII mengisi seminar Sidang Tahunan IDB ke-41 dan menjelaskan bagaimana peran perusahaan dalam mengurangi dampak risiko yang berpotensi merugikan proyek dan melakukan penjaminan pembangunan proyek infrastruktur melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

May 17, 2016

President Director of IIGF gave presentation session at IDB 41st Annual Plenary Seminar and explained role of the company to mitigate risks with project loss potential and to guarantee infrastructure project development under Government Partnership and Business Entity (KPBU) scheme.



Penandatanganan MoU antara PT PII dengan Universitas Airlangga/Mou Signing Between IIGF with Universitas Airlangga

20 Mei 2016

Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara PT PII dengan Universitas Negeri Airlangga Surabaya, dilaksanakan untuk menjalin kerjasama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

May 20, 2016

Memorandum of Understanding (MoU) signing between IIGF with Universitas Negeri Airlangga Surabaya to engage partnership in education, research and community services.

6 Juni/June



Indonesia Infrastructure Roundtable ke-13
13th Indonesia Infrastructure Roundtable

2 Juni 2016

PT PII melalui IIGF Institute menggelar acara *Indonesia Infrastructure Roundtable* (IIR) yang ke-13 dengan topik "Mewujudkan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin sebagai *The World Center of Airport City in Makassar*". Acara ini dihadiri oleh Kepala Bidang Udara Dinas Perhubungan Sulawesi Selatan, Bappeda Sulawesi Selatan dan perwakilan Angkasa Pura I.

June 2, 2016

IIGF via IIGF Institute organized 13th Indonesia Infrastructure Roundtable (IIR) with topic "Developing Sultan Hasanuddin International Airport as The World Center of Airport City in Makassar." The event was attended by Head of Air Division, Transportation Agency of South Sulawesi, Regional Revenue Agency of South Sulawesi and representative of Angkasa Pura I.



Seremonial Penandatanganan Milestone Enam Proyek Infrastruktur Strategis/Prioritas Nasional
Six National Strategic/Priority Infrastructure Projects Milestone Signing Ceremony

9 Juni 2016

Seremonial penandatanganan *milestone* enam proyek Infrastruktur Strategis/Prioritas Nasional yang bertempat di Istana Negara RI pada 9 Juni 2016 antara lain terdiri dari: (i) Seremonial *Financial Close* PLTU Batang Jawa Tengah, yang memperoleh penjaminan pemerintah bersama dengan PT PII dan (ii) Penandatanganan perjanjian kerjasama untuk lima proyek tol dengan tiga diantaranya (Manado-Bitung, Balikpapan-Samarinda, dan Pandaan-Malang) merupakan proyek KPBU yang memperoleh penjaminan PT PII.

June 9, 2016

Six National Strategic/Priority Infrastructure Projects Milestone Signing Ceremony at State Palace on June 9, 2016, including: (i) PLTU Batang Central Java Financial Close Ceremony that acquired Government Loan with IIGF and (ii) Memorandum of Understanding Signing for five toll road projects, three of them are (Manado – Bitung, Balikpapan – Samarinda, and Pandaan – Malang) as KPBU projects with guarantee from IIGF.



Syukuran Pencapaian Proyek dan Buka Bersama Menteri Keuangan/ End Of Project Celebration And Break Fasting Event with Minister of Finance

16 Juni 2016

Sebagai bentuk rasa syukur telah tercapainya *financial close* proyek PLTU Batang Jawa Tengah dan telah ditandatanganinya perjanjian kerjasama penjaminan untuk 3 (tiga) proyek jalan tol (Pandaan-Malang, Manado-Bitung dan Balikpapan-Samarinda), PT PII mengadakan syukuran pencapaian proyek dengan turut mengundang Menteri Keuangan, *stakeholders* terkait dan anak-anak yatim piatu.

June 16, 2016

As celebration of PLTU Batang Central Java Final Close achievement and signing of Guarantee Partnership Agreement for 3 (three) toll road projects (Pandaan – Malang, Manado – Bitung and Balikpapan – Samarinda), IIGF held end of project celebration by inviting Minister of Finance, related stakeholders and marginal children.



Buka Bersama dan Silaturahmi Kementerian Keuangan Bersama BUMN di Bawah Kementerian Keuangan
Ministry Of Finance Break Fasting And Gathering Event With Soes Under The Ministry Of Finance

23 Juni 2016

PT PII bersama dengan Lembaga/BUMN lain di bawah pembinaan Kementerian Keuangan RI melaksanakan acara buka puasa di Hotel Kempinski, Jakarta. Selain untuk menjalin silaturahmi dan keakraban antar sesama, acara ini juga bertujuan untuk saling berbagi kepada anak-anak yang kurang mampu.

June 23, 2016

IIGF altogether with other Institutions/SOEs under the development of The Republic of Indonesia Ministry of Finance organized Break Fasting Event at Kempinski Hotel, Jakarta. Besides to build togetherness and solidarity with others, the event was also intended to share with marginal children.

7 Juli/July



Penandatanganan Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres Proyek SPAM Umbulan/ SPAM Umbulan Project Regres Guarantee Agreement Signing

21 Juli 2016

Penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara PT PII dengan PT Meta Adhya Tirta dan Perjanjian Regres antara PT PII dengan Gubernur Jawa Timur, dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2016 untuk menjamin proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan.

July 21, 2016

Guarantee Agreement Signing between PT PII and PT Meta Adhya Tirta and Regres Agreement between IIGF and Governor of East Java that was held on July 21, 2016 to guarantee Drinking Water Supply System (SPAM) Umbulan Project.



Financial Close Proyek Palapa Ring Barat
Financial Close Palapa Ring West Project

25 Juli 2016

Penandatanganan *Financial Close* Proyek Palapa Ring Barat antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., dengan PT Palapa Ring Barat pada 25 Juli 2016 di Jakarta.

July 25, 2016

Financial Close Signing for Palapa Ring West Project between PT Bank Mandiri (Persero) Tbk with PT Palapa Ring Barat on July 25, 2016 in Jakarta.

8 Agustus



Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Jaksa Agung Muda dan Tata Usaha Negara
Memorandum Of Understanding Signing With Civil And State Administration Solicite General

2 Agustus 2016

PT PII menandatangani Nota Kesepahaman dengan Jaksa Agung Muda dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) terkait dengan pendampingan/pertimbangan di bidang hukum. Pendampingan yang dilakukan oleh JAMDATUN diharapkan dapat memberikan kepastian agar proyek yang dijamin oleh PT PII tidak terkendala persoalan hukum. Kerjasama ini juga merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 untuk mendukung percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sesuai dengan tugas dan kewenangan setiap institusi terkait.

August 2, 2016

IIGF signed Memorandum of Understanding with Civil and State Administration Solicite General (JAMDATUN) in the course of legal assistance/advisory. The JAMDATUN's assistance is expected to give assurance that projects guaranteed by IIGF will not encounter any legal issue. This partnership is also part of Presidential Instruction No. 1 of 2016 implementation to support acceleration of National Strategic Project Implementation in accordance with duty and authority of every related institution.



Symposium Infrastruktur Kerjasama PT PII dan UNIID
IIGF and UNIID Infrastructure Partnership Symposium

3 Agustus 2016

Bertempat di Graha Sepuluh November ITS Surabaya, telah diselenggarakan simposium bertajuk Inovasi dalam Rangka Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia. Acara ini digelar di bawah naungan *University Network for Indonesian Infrastructure Development* (UNIID) atau Jaringan Perguruan Tinggi untuk Pembangunan Infrastruktur (JPIT) dan didukung penuh oleh PT PII.

August 3, 2016

A symposium event entitled "Innovation to Accelerate Infrastructure Development in Indonesia" was held at Graha Sepuluh November ITS Surabaya. The event was under *University Network for Indonesian Infrastructure Development* (UNIID) or *University Network for Infrastructure Development* (JPIT) and fully supported by IIGF.

9

September



Financial Close Proyek Palapa Ring Paket Tengah
Palapa Ring Project Central Packet Financial Close

29 September 2016

PT PII mengikuti seremonial *Financial Close* untuk proyek Palapa Ring Paket Tengah yang dilaksanakan di Istana Negara tanggal 29 September 2016. Sebelumnya, PT PII telah menandatangani Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres untuk proyek ini pada bulan Maret 2016.

September 29, 2016

Following agreement signing and Regres Agreement for Palapa Ring Project Central Package in March 2016, Financial Closing ceremony is organized for the project that was held at State Place on September 29, 2016.



Penandatanganan Perjanjian Proyek Palapa Ring Paket Timur/Palapa Project Agreement East Package Signing

29 September 2016

PT PII menandatangani Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres untuk proyek Palapa Ring Paket Timur. Penandatanganan dilakukan di Istana Negara dengan disaksikan oleh Presiden Joko Widodo, Menteri Perekonomian dan Menteri Komunikasi dan Informasi.

September 29, 2016

IIGF signed Refress Agreement for Palapa Project East Package, the signing was held at State Palace and witnessed by President Joko Widodo, Minsiter of Economics and Minister of Communication and Information.

10

Oktober



Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan
Commission XI DPR RI Work Meeting With Minister of Finance

12 Oktober 2016

Direktur Utama PT PII mengikuti Raker komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan guna membahas pengambilan keputusan atas PMN Tahun 2017 dan perkembangan APBN 2017.

October 12, 2016

President Director of IIGF participated in Work Meeting with Commission XI DPR RI with Minister of Finance, discussing decision for Government Investment (PMN) 2017 and progress of State Budget (APBN) 2017.



Rekor MURI Pembersihan Karang Gigi
MURI Record For Dental Scaling

24 Oktober 2016

PT PII dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) bekerjasama dengan Yayasan Inspirasi Anak Bangsa (YIAB) dalam melaksanakan kegiatan CSR Pembersihan Karang Gigi gratis pada tanggal 13-17 Oktober 2016 lalu. Kegiatan ini diikuti oleh lebih dari 500 orang peserta dan berhasil memecahkan rekor MURI.

October 24, 2016

IIGF and PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) collaborated with Inspirasi Anak Bangsa Foundation (YIAB) to organize CSR activity as free Dental Scaling on October 13 – 17, 2016. The event was participated by over 500 participants and broke the MURI Record.



Indonesia Infrastructure Roundtable ke-14
14th Indonesia Infrastructure Roundtable

26 Oktober 2016

Forum IIR ke-14 membahas persiapan Pemerintah untuk jalan-jalan akses ke dan dari proyek Jalan Tol Pandaan-Malang sebagai kelanjutan dari proyek Jalan Tol Gempol-Pandaan. Forum ini difasilitasi oleh PT PII dan *University Network for Indonesia Infrastructure Development* (UNIID) serta Universitas Brawijaya Malang selaku tuan rumah.

October 26, 2016

The 14th IIR Forum discussed preparation of the Government for access roads to and from Toll Pandaan - Malang Toll Road project as continuation of Gempol - Pandaan Toll Road project. This forum was facilitated by IIGF and University Network for Indonesia Infrastructure Development (UNIID) and Universitas Brawijaya Malang as the Host.

11 November



Indonesian PPP Day 2016

24 November 2016

PT PII bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) menyelenggarakan acara *Indonesian Public Private Partnership Day 2016* yang bertema *Innovative Fiscal Support for Better Public Services*. Acara ini dihadiri oleh berbagai PJPk proyek KPBU, *lenders*, investor, dan lembaga-lembaga perbankan.

November 24, 2016

Collaborated with General Directorate of Finance and Risk Management, Ministry of Finance and PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) hosted Indonesian Public Private Partnership Day 2016 with theme Innovative Fiscal Support for Better Public Services. The event was attended by numbers of PPP Project PJPk, lenders, investors and banking institutions.

12 Desember



ASEAN Risk Awards 2016

8 Desember 2016

PT PII berhasil meraih penghargaan sebagai *runner up* kategori "*Risk Advocate*" dalam ajang bergengsi *ASEAN Risk Awards 2016*. Penyerahan penghargaan dilakukan di Nusa Dua Bali pada 8 Desember 2016, yang dihadiri oleh 23 perusahaan dan organisasi dari seluruh Asia Tenggara. PT PII juga masuk dalam tiga nominasi lain, yaitu: *GRC Award*, *Risk Innovation*, dan *Public Risk*.

December 8, 2016

IIGF won as runner up in "Risk Advocate" category in ASEAN Risk Awards 2016, a precious event. The awarding ceremony was held in Nusa Dua, Bali on December 8, 2016 attended by 23 companies and organizations across Southeast Asia. IIGF was also nominated for other three categories such as GRC Award, Risk Innovation and Public Risk.



IIR-15: Potensi Masalah pada Pengoperasian Jalan Tol Manado – Bitung/15th IIR: Manado – Bitung Toll Road Operational Issues

14 Desember 2016

IIGF Institute bekerjasama dengan Universitas Sam Ratulangi Manado menyelenggarakan IIR-15 yang membahas potensi masalah pada pengoperasian Jalan Tol Manado-Bitung, khususnya untuk masalah tidak tercapainya bangkitan volume lalu-lintas sesuai jadwal yang direncanakan karena pembangunan jalan alternatif yang melayani rute yang sama. Proyek Jalan Tol Manado-Bitung sendiri merupakan satu-satunya proyek infrastruktur dengan skema KPBU di Sulawesi Utara

December 14, 2016

Collaborated with Universitas Sam Ratulangi Manado, IIGF Institute organized 15th IIR to discuss Manado – Bitung Toll Road operational issues, particularly failure to achieve on time traffic volume generation due to construction of alternative road that serves the same route. Manado – Bitung Toll Road project is the only infrastructure project under PPP scheme in North Sulawesi.



Seminar Nasional/National Seminar

22 Desember 2016

PT PII melaksanakan Seminar Nasional dengan tema “Mendukung Percepatan Penyediaan Infrastruktur Nasional Melalui Penjaminan Infrastruktur” yang merupakan bagian dari rangkaian acara ulang tahun PT PII ke-7 pada 30 Desember 2016.

December 22, 2016

IIGF organized National Seminar as part of 7th Anniversary of IIGF on December 30, 2016.



**Financial Close SPAM Umbulan/
Financial Close SPAM Umbulan**

30 Desember 2016

Penandatanganan *Financial Close* proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan yang merupakan proyek air dan proyek daerah pertama dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang telah diberikan penjaminan pemerintah melalui PT PII.

December 30, 2016

Financial Close Signing for Drinking Water Provision System (SPAM) Umbulan Project as the first drinking water project and regional project under Public - Private Partnership (PPP) scheme that is supported by Government Guarantee via IIGF.

Daftar Isi

Table of Contents

1

Ikhtisar Keuangan dan Operasional Financial and Operational Highlights



- 24 Ikhtisar Keuangan
Financial Highlights
- 28 Ikhtisar Operasional
Operational Highlights
- 29 Ikhtisar Saham
Shares Highlights
- 29 Ikhtisar Surat Berharga
Bonds Highlights

2

Laporan Manajemen Report from The Management



- 32 Laporan Dewan Komisaris
Report from The Board of Commissioners
- 42 Laporan Direksi
Report from the Board of Directors
- 51 Pernyataan Tanggung Jawab
Laporan Tahunan 2016
Statement of Responsibility for
2016 Annual Report

3

Profil Perusahaan Company Profile



- 54 Identitas Perusahaan
Corporate Identity
- 55 Sejarah Singkat Perusahaan
Brief History
- 55 Perubahan Nama Perusahaan
Change to Company Name
- 56 Jejak Langkah Perusahaan
Milestones
- 61 Bidang Usaha
Line of Business
- 62 Tujuan, Sasaran dan Strategi
Perusahaan
Objectives, Targets and Strategy
- 72 Struktur Organisasi Perusahaan
Organization Structure
- 76 Profil Dewan Komisaris
Profile of the Board of Commissioners
- 80 Profil Direksi
Profile of the Board of Directors
- 84 Pejabat Senior
Senior Management

- 94 Struktur dan Komposisi Pemegang Saham
Shareholders Structure and Composition
- 95 Entitas Anak dan Entitas Asosiasi
Subsidiary and Association
- 95 Struktur Grup Perusahaan
Corporate Group Structure
- 95 Kronologis Pencatatan Saham
Shares Listing Chronology
- 96 Kronologis Pencatatan Efek Lainnya
Other Securities Listing Chronology
- 97 Informasi Website Perusahaan
Official Website Information
- 98 Wilayah Operasional Perusahaan
Operational Area



Fungsi Penunjang Bisnis

Business Supporting Function



- 102 Sumber Daya Manusia
Human Capital
- 103 Manajemen SDM
Human Capital Management
- 104 Roadmap Pengelolaan SDM
Human Capital Management Roadmap
- 105 Rekrutmen
Recruitment
- 106 Sistem Manajemen Kinerja
Performance Management System
- 107 Pensiun
Retirement
- 108 Program Pengembangan Kompetensi
Competency Development Program
- 110 Biaya yang Dikeluarkan
Budget
- 110 Statistik Karyawan
Employee Static
- 113 Rencana Pengembangan SDM 2017
Human Capital Development Plan 2017
- 116 Teknologi Informasi
Information Technology
- 117 Roadmap Pengembangan TI
IT Development Roadmap
- 117 Pengembangan TI 2016
IT Development 2016
- 119 Tata Kelola TI
IT Governance
- 120 Rencana Pengembangan TI 2017
IT Development Plan 2017

Daftar Isi

Table of Contents



Analisa dan Pembahasan Manajemen

Management's Discussion and Analysis



- 124 Tinjauan Ekonomi
Economic Review
- 127 Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha
Operational Review by Business Segment
- 146 Tinjauan Keuangan
Financial Review



Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance



- 165 Tujuan Penerapan Tata Kelola Perusahaan
Objectives of Corporate Governance Implementation
- 166 Dasar Acuan Penerapan Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance Implementation Framework
- 168 Prinsip Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance Principle
- 171 Roadmap Penerapan Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance Road Map
- 172 Penilaian Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance Assessment
- 175 Struktur dan Mekanisme Penerapan Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance Structure and Mechanism
- 184 Rapat Umum Pemegang Saham
General Meetings of Shareholders

- 191 Realisasi Keputusan RUPS Tahun Sebelumnya
Realization of Previous Year's GMS Resolutions
- 192 Dewan Komisaris
Board of Commissioners
- 206 Komisaris Independen
Independent Commissioner
- 207 Direksi
Board of Directors
- 216 Mekanisme dan Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
Board of Commissioners and Board of Directors Remuneration Mechanism and Structure
- 217 Hubungan Afiliasi Antara Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali
Affiliation Among Board of Commissioners, Board of Directors and Controlling Shareholders
- 218 Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi
Board of Commissioners and Board of Directors Performance Assessment
- 219 Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi
Diversity of Board of Commissioners and Board of Directors Composition
- 222 Komite Audit
Audit Committee
- 234 Komite Nominasi dan Remunerasi
Nomination and Remuneration Committee
- 234 Tenaga Ahli Manajemen Risiko
Risk Management Expert Staff
- 237 Sekretaris Dewan Komisaris
Board of Commissioners Secretary
- 240 Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

- 243 Internal Audit
Internal Audit
- 248 Audit Eksternal
External Audit
- 250 Sistem Pengendalian Internal
Internal Control System
- 252 Manajemen Risiko
Risk Management
- 263 Perkara Hukum dan Sanksi
Administratif
Legal Case and Administrative Sanction
- 263 Kode Etik
Code of Conducts
- 266 Sistem Pelaporan Pelanggaran
Whistle Blowing System
- 266 Penyimpangan Internal
Internal Fraud
- 266 Benturan Kepentingan
Conflict of Interest
- 267 Akses Data Dan Informasi Perusahaan
Access To Corporate Data And Information



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility



- 271 Dasar Acuan Pelaksanaan Program CSR
CSR Program Frameworks
- 271 Tujuan Pelaksanaan Program CSR
Objectives of CSR Program Implementation
- 272 Pengelolaan CSR PT PII
IIGF CSR Management
- 272 Perencanaan Program CSR
CSR Program Planning

- 273 Sumber Dana CSR
Source of CSR Budget
- 274 Alokasi dan Penggunaan Anggaran Dana CSR
CSR Budget Allocation and Disbursement
- 276 Tanggung Jawab Terhadap Pelestarian
Lingkungan Hidup
Responsibility Towards The Preservation
Of The Environment
- 277 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Yang
Terkait Ketenagakerjaan, Kesehatan dan
Keselamatan Kerja
Corporate Social Responsibility Related with
Occupational Health, Safety and Employment
- 280 Tanggung Jawab Pengembangan
Sosial Masyarakat
Social Community Development
Responsibility
- 283 Tanggung Jawab Kepada Pelanggan
Responsibility to Customers



Laporan Keuangan





Ikhtisar Keuangan dan Operasional

Financial and Operational Highlights





Jumlah Ekuitas Perusahaan tahun 2016 sebesar Rp8.823,86 Miliar Naik 21,09 % dari tahun sebelumnya sebesar Rp7.287,11 Miliar. Jumlah Ekuitas Perusahaan naik secara konsisten dalam 5 tahun terakhir.

In 2016, the Company booked Total Equity of Rp8,823.86 billion that increased 21.09% from Total Equity of Rp7,287.11 billion booked in previous year. Total Equity is increasing consistently within 5 recent years.



- 24 Ikhtisar Keuangan
Financial Highlights
- 28 Ikhtisar Operasional
Operational Highlights
- 29 Ikhtisar Saham
Shares Highlights
- 29 Ikhtisar Surat Berharga
Bonds Highlights



Ikhtisar Keuangan

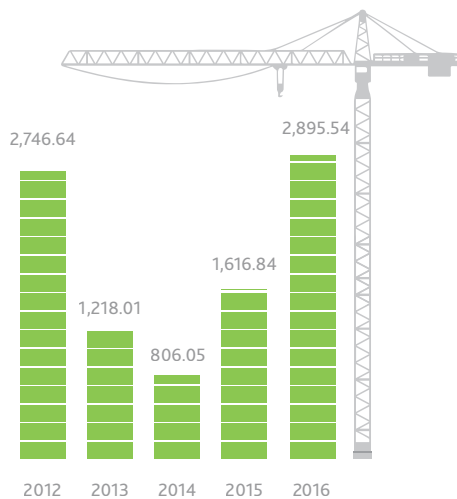
Financial Highlights

Dalam Jutaan Rupiah/ In Million Rupiah

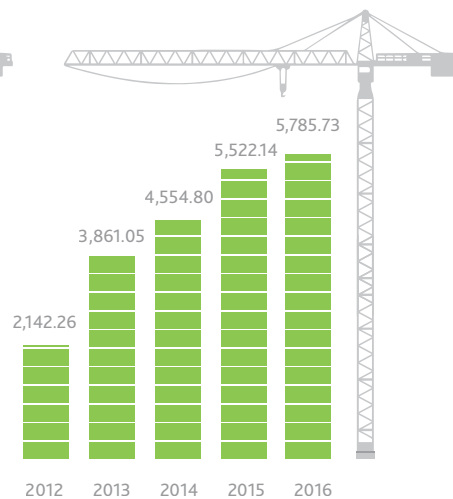
Neraca						Balance Sheet
Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	Description
Aset/Assets						
Kas dan Setara Kas	2.746.643,43	1.218.009,77	806.051,51	1.616.841,31	2.895.544,65	Cash and Cash Equivalents
Investasi pada Entitas Asosiasi	2.142.262,85	3.861.052,81	4.554.802,80	5.522.138,54	5.785.731,16	Investment in Associates
Piutang Usaha	15.448,23	22.230,07	24.095,02	72.248,32	68.688,72	Account Receivables
Piutang Lainnya	268,64	329,18	620,24	980,58	3.936,28	Other Receivables
Biaya Dibayar Dimuka Dan Uang Muka	1.637,31	3.299,04	3.422,82	8.316,93	4.685,28	Prepaid Expenses and Advance
Aset Tetap	3.164,51	2.869,41	1.781,22	1.913,08	20.650,25	Fixed Assets
Aset Tak Berwujud	189,46	1.892,03	2.747,82	2.375,85	1.690,18	Intangible assets
Beban Tangguhan	41.460,28	37.345,61	55.882,66	74.593,13	57.940,73	Accrued Expense
Beban <i>Front End</i>	-	763,38	763,38	763,38	763,38	Front-end Fee
Pajak Dibayar Dimuka	505,86	12.124,92	11.619,07	-	-	Prepaid Taxes
Aset Pajak Tangguhan	14.353,37	35.353,76	58.788,38	79.350,07	77.009,79	Deferred Tax Assets
Uang Jaminan Yang Dapat Dikembalikan	903,40	1.198,12	1.235,85	1.886,01	7.788,93	Refundable Deposits
Jumlah Aset	4.966.837,34	5.196.468,10	5.521.810,77	7.381.407,20	8.924.429,35	Total Assets
Liabilitas/Liabilities						
Utang Usaha	2.596,06	8.798,17	6.888,89	9.510,25	4.960,27	Account Payables
Utang Pajak	1.786,61	3.034,43	2.748,45	3.052,96	2.482,67	Taxes Payables
Biaya Yang Masih Harus Dibayar, Penyisihan dan Utang Lain-lain	21.407,13	9.820,26	20.355,77	27.992,75	37.597,39	Accrued Expenses, Provisions and Other Payables
Pendapatan Tangguhan	22.312,50	22.312,50	22.312,50	22.312,50	5.384,67	Unearned Revenue
Pinjaman Penerusan	-	-	9.686,43	21.980,96	35.805,46	Two-Step Loans
Liabilitas Imbalan Kerja	1.617,77	4.512,57	8.254,12	9.444,85	14.335,41	Employee Benefits Obligation
Jumlah Liabilitas	49.720,07	48.477,93	70.246,16	94.294,27	100.565,87	Total Liabilities
Ekuitas/Equity						
Modal Saham	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	6.000.000,00	7.000.000,00	Shares Capital
Rugi Belum Direalisasi atas Kepemilikan Aset Keuangan	1.917,10	(15.519,98)	(57.988,91)	(61.303,03)	(25.878,43)	Unrealized Loss on Available-for-sale Financial Assets
Rugi Aktuarial	-	-	-	(593,04)	(1.713,86)	Actuarial Loss
Saldo Laba	-	-	-	-	-	Retained Earnings
- Ditentukan Penggunaannya	10.150,00	20.800,00	33.300,00	50.800,00	67.800,00	Appropriated
- Tidak Ditentukan Penggunaannya	405.050,17	642.710,15	976.253,52	1.298.209	1.783.655,77	Unappropriated
Jumlah Ekuitas	4.917.117,27	5.147.990,17	5.451.564,61	7.287.112,93	8.823.863,48	Total Equity
Jumlah Liabilitas & Ekuitas	4.966.837,34	5.196.468,1	5.521.810,77	7.381.407,2	8.924.429,35	Total Liabilities and Equity



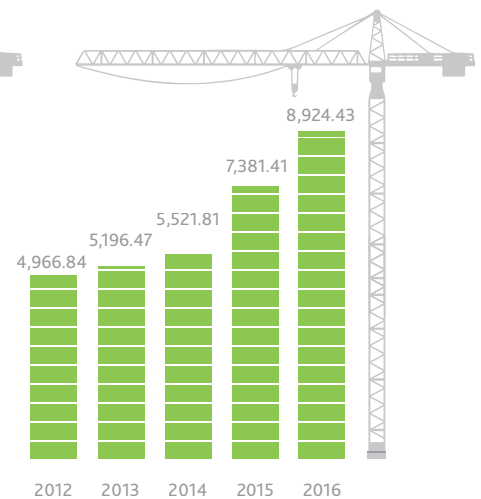
Kas/Cash
(Dalam Miliar Rupiah)/(in billion Rupiah)



Investasi/Investment
(Dalam Miliar Rupiah)/(in billion Rupiah)



Total Aset/Total Assets
(Dalam Miliar Rupiah)/(in billion Rupiah)

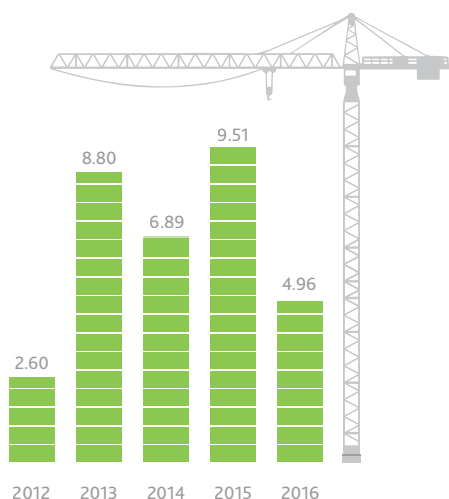


20,90%

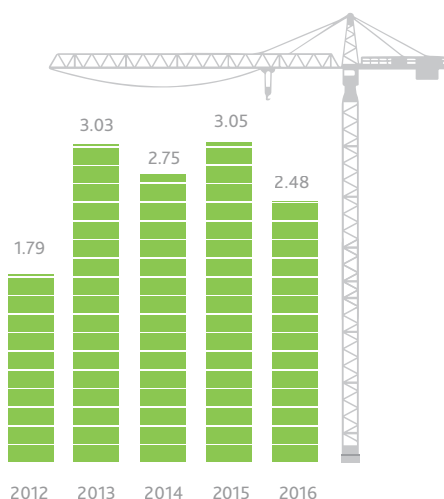
Total Aset Perusahaan tahun 2016 Rp8.924,43 Miliar naik 20,90% dari Total Aset tahun 2015 Rp7.381,4 Miliar

In 2016 the Company booked Total Assets Rp 8,924.43 billion that increased 20.90% from Rp7,381.4 billion Total Assets booked in 2015

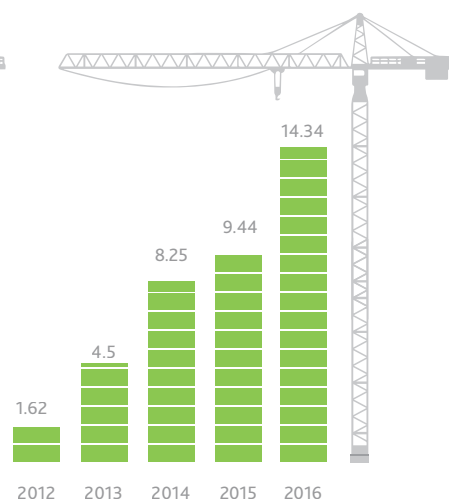
Liabilitas Usaha/Business Liabilities
(Dalam Miliar Rupiah)/(in billion Rupiah)



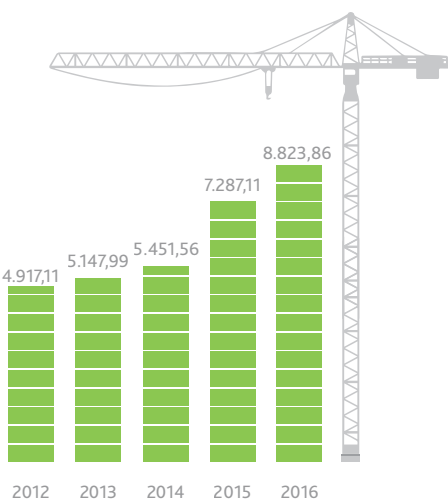
Liabilitas Pajak/Tax Liabilities
(Dalam Miliar Rupiah)/(in billion Rupiah)



Liabilitas Imbalan Kerja/Post-Employment Liabilities
(Dalam Miliar Rupiah)/(in billion Rupiah)



Ekuitas/Equity
(Dalam Miliar Rupiah)/(in billion Rupiah)



Jumlah Liabilitas Perusahaan tahun 2016 Rp100,57 Miliar naik 6,66 % dari Jumlah Liabilitas tahun 2015 Rp94,29 Miliar

In 2016, the Company booked Total Liabilities of Rp100.57 billion that increased 6.66% from Total Liabilities of Rp94.29 billion booked in 2015."



Jumlah Ekuitas Perusahaan tahun 2016 sebesar Rp8.823,86 Miliar Naik 21,09 % dari tahun sebelumnya sebesar Rp7.287,11 Miliar. Jumlah Ekuitas Perusahaan naik secara konsisten dalam 5 tahun terakhir.

In 2016, the Company booked Total Equity of Rp8,823.86 billion that increased 21.09% from Total Equity of Rp7,287.11 billion booked in previous year. Total Equity is increasing consistently within 5 recent years."



Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Statements of Profit or loss and Other Comprehensive Income

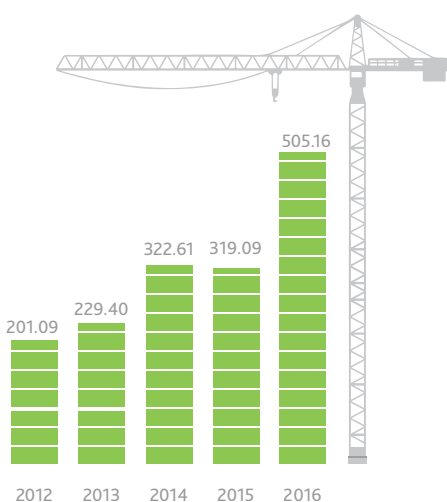
Dalam Jutaan Rupiah/ In Million Rupiah

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	Description
Pendapatan	312.240,46	392.961,43	529.991,94	533.064,68	821.107,80	Revenues
Beban Usaha	(111.155,01)	(163.562,81)	(207.383,20)	(213.973,21)	(315.946,15)	Operating Expenses
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	201.085,45	229.398,62	322.608,74	319.091,47	505.160,65	Profit Before Income Tax
Laba Tahun Berjalan	213.378,07	249.759,98	346.043,36	339.455,48	502.446,77	Profit For The Year
Penghasilan (beban) komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak	1.400,71	(17.437,07)	(42.468,92)	(3.907,15)	34.303,78	Other Comprehensive Loss for the year, Net
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	214.778,78	232.322,91	303.574,44	335.548,33	536.750,55	Total Comprehensive Income for the Year

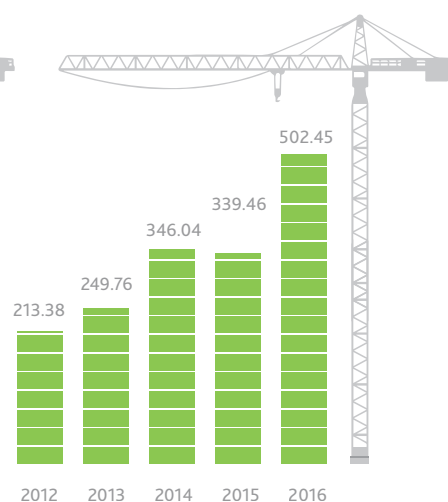
Pendapatan/Income
(Dalam Miliar Rupiah)/(in billion Rupiah)



Laba Sebelum Pajak Penghasilan
Profit for The Year
(Dalam Miliar Rupiah)/(in billion Rupiah)



Penghasilan Komprehensif
Profit Before Income Tax
(Dalam Miliar Rupiah)/(in billion Rupiah)



48,01%

Laba Tahun Berjalan tahun 2016 Rp502,45 Miliar naik 48,01% dari Laba Tahun Berjalan tahun 2015 Rp339,46 Miliar

In 2016, Profit for the year achieved Rp502.45 billion, that was 48.01% higher than Rp335.54 billion profit for the year booked in 2015.

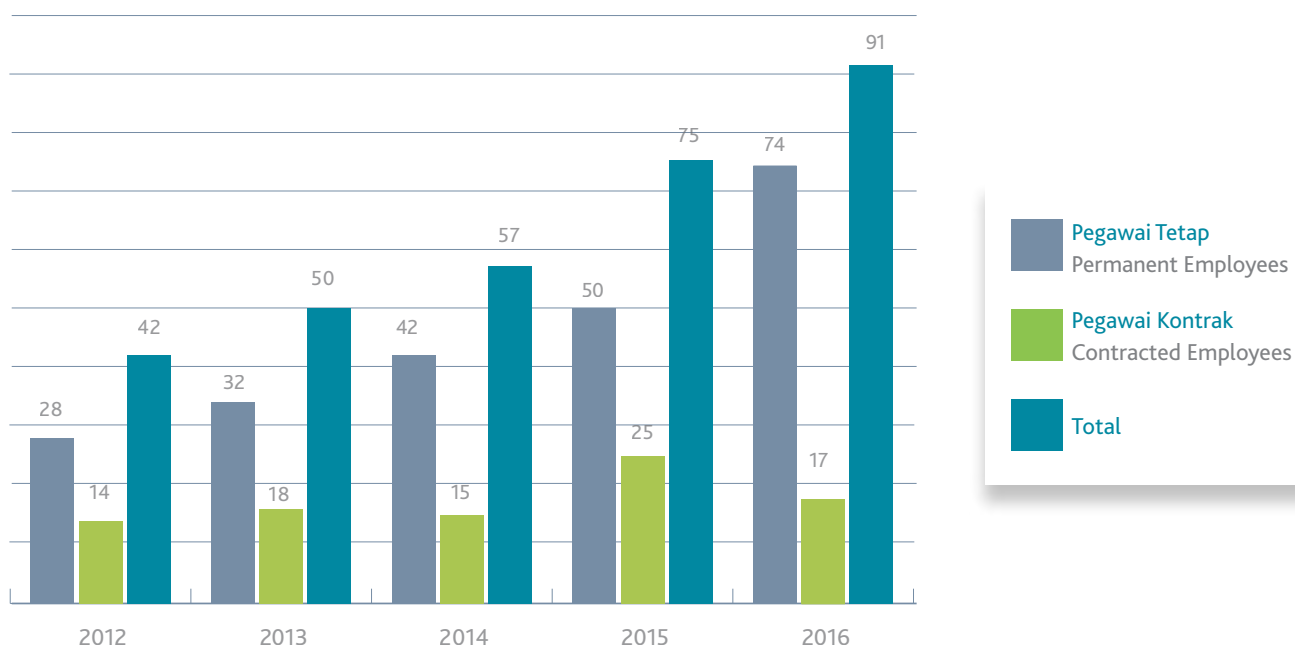
Rasio-Rasio Keuangan Financial Ratio

Dalam %

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	Description
Marjin Laba Operasional	64,40	77,54	60,87	59,96	61,52	Net Operating Margin
Marjin Laba Bersih	68,30	63,60	65,29	63,68	61,19	Net Income Margin
ROE	5,47	4,96	6,51	5,99	6,53	Return on Equity
ROA	5,27	4,91	6,45	5,79	6,47	Return on Assets
BOPO	16,30	22,30	20,20	20,95	23,02	Operating Expense to Operating Income Ratio

Ikhtisar Operasional Operational Highlights

Jumlah Karyawan/Total Employees





Ikhtisar Saham

Shares Highlights

Sampai dengan akhir tahun 2016, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) tidak melakukan perdagangan saham sehingga tidak ada informasi terkait dengan jumlah saham yang beredar, kapitalisasi pasar, harga saham tertinggi, harga saham terendah dan harga saham penutupan serta volume saham yang diperdagangkan.

As end of 2016, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) did not trade any shares, therefore, the information related to total shares outstanding, market capitalization, highest, lowest and closing shares price and volume of shares traded are irrelevant.

Ikhtisar Surat Berharga

Bonds Highlights

Sampai dengan akhir tahun 2016, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) tidak menerbitkan obligasi, sukuk dan obligasi konversi sehingga tidak ada informasi terkait dengan jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar, tingkat bunga/imbalan, tanggal jatuh tempo dan peringkat obligasi/sukuk.

As end of 2016, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) did not issue any bonds, sukuk and converted bonds, therefore, the information about total issued bonds/sukuk/converted bonds, interest/yield rate, maturity date and bonds/sukuk rating are irrelevant.

Laporan Manajemen

Report from The Management





Terdapat sembilan proyek yang telah ditandatangani perjanjian penjaminannya di tahun 2016, dengan nilai total investasi sebesar Rp82,192 triliun dengan exposure penjaminan PT PII atas proyek-proyek tersebut mencapai sebesar Rp25,98 triliun.

There were nine projects whose guarantee contracts were signed in 2016 with total investment of Rp82.192 trillion and guarantee exposure of IIGF on the projects achieved Rp25.98 trillion.



- 32 **Laporan Dewan Komisaris**
Report from The Board of Commissioners
- 42 **Laporan Direksi**
Report from the Board of Directors
- 51 **Pernyataan Tanggung Jawab Laporan Tahunan 2016**
Statement of Responsibility for 2016 Annual Report



Laporan Dewan Komisaris

Report from The Board of Commissioners

Kinerja operasional yang dicapai oleh PT PII di tahun 2016 sangat baik, baik dilihat dari jumlah proyek yang dijamin maupun pendapatan penjaminan yang meningkat secara signifikan, tidak hanya dibandingkan dengan tahun 2015 tetapi juga di dalam 5 (lima) tahun terakhir.

IIGF booked a satisfying operational performance as indicated by number of guaranteed projects and Revenue from Guarantee that increased significantly, not only comparable with 2015 but also within the last 5 (five) years.

Laba setelah pajak
tahun 2016

Rp502,45 Miliar
mengalami
peningkatan sebesar

45% 



Net Profit in 2016 achieved
Rp502.45 billion or grew by
45%

Luky Alfirman
Komisaris Utama



Pemegang Saham dan Para Pemangku Kepentingan yang Kami Hormati,

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan suatu hal yang harus dicapai. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh Pemerintah. Namun, di tengah kinerja pertumbuhan ekonomi global yang masih banyak diliputi ketidakpastian, hal tersebut bukanlah sesuatu yang mudah untuk dicapai. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah mengimplementasikan strategi mengedepankan perekonomian domestik sebagai tulang punggung, yaitu mendorong komponen investasi sebagai sumber kunci pertumbuhan. Hal ini dilakukan antara lain dengan mempercepat pembangunan proyek-proyek infrastruktur. Oleh karena itu, di dalam beberapa kali kesempatan Presiden Joko Widodo senantiasa mengingatkan bahwa saat ini pemerintah masih fokus dan prioritas untuk membangun infrastruktur.

Penilaian Kinerja Direksi

Kebutuhan akan sumber-sumber pembiayaan infrastruktur sendiri sangatlah besar, dana yang dibutuhkan tidak kurang dari Rp4.796,2 Triliun (2015 - 2019). Dari jumlah tersebut sumber pendanaan yang diharapkan berasal dari BUMN dan sektor swasta tidak kurang dari 58,7%, sisanya dari APBN/APBD. Untuk mendorong keterlibatan swasta tersebut, pemerintah telah mengeluarkan beragam fasilitas antara lain *Viability Gap Fund* (VGF), *Project Development Fund* (PDF), skema *availability payment* dan penjaminan.

Sebagai *Single Window* di dalam pemberian penjaminan pemerintah untuk proyek-proyek infrastruktur serta *ring fencing* APBN, PT PII mempunyai peran yang strategis, yaitu mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Di tahun 2016, Dewan Komisaris berpandangan merupakan suatu momentum yang sangat baik bagi PT PII di dalam menunjukkan peran strategisnya tersebut. Di tahun 2016 ini, PT PII berhasil meningkatkan jumlah proyek-proyek yang dijamin secara signifikan, tidak hanya dibanding dengan tahun 2015, akan tetapi juga di dalam 5 (lima) tahun terakhir. Peningkatan ini tercermin di dalam kinerja keuangan dan kinerja operasional. Upaya Direksi di dalam melaksanakan proses penjaminan atas proyek-proyek tersebut sangat mewarnai pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris. Kegiatan lain yang menjadi fokus pengawasan Dewan Komisaris selama tahun 2016 adalah

Our Distinguished Shareholders and Stakeholders,

To achieve welfare for all society, high economic growth is necessary to be achieved. Therefore, economic growth is one of development target to be accomplished by the Government. However, amidst major uncertainty in the global economic growth performance, achievement of this target was uneasy. Responding to this condition, the Government has implemented strategies that promote domestic economy as backbone, to encourage investment components as engine of growth. The initiatives were done namely through acceleration of infrastructure projects development. Therefore, in some occasions, President Joko Widodo always reminded that the Government is focusing and having priority to build the infrastructures.

Evaluation on Board of Directors Performance

There is a huge demand on the sources of infrastructure financing with required funds over Rp4,796.2 trillion (2015 - 2019). From the amount, expected source of financing is from SOE and private sector to cover not less than 58.7% and remaining funds are expected to be allocated from APBN/APBD. To encourage participation from private sector, the Government had provided various facilities, such as *Viability Gap Fund* (VGF), *Project Development Fund* (PDF), *availability payment* and guarantee schemes.

As the *Single Window* in the provision of Government's Guarantee for infrastructure projects as well as *ring fencing* of the APBN, IIGF has strategic role to accelerate infrastructure development by emphasizing prudent principle. In 2016, the Board of Commissioners viewed a very favorable momentum for IIGF to manifest its strategic role. In the year of 2016, IIGF successfully increased number of guaranteed projects significantly, not only comparable with 2015 but also within the last 5 (five) years. Growth was reflected in the financial and operational performances. Initiatives that were taken by the Board of Directors in the implementation of guarantee process for the projects brought major impact on the supervisory duty that was carried out by the Board of Commissioners. Other activities as focus of the Board of Commissioners' supervision throughout 2016 included the preparation of new organization structure as well as improvement of Good Corporate



Dari Kiri ke Kanan
Left to Right

Iskandar
Komisaris
Commissioner

Ayu Sukorini
Komisaris
Commissioner

Luky Alfirman
Komisaris Utama
President Commissioner



penyiapan struktur organisasi baru serta peningkatan *Good Corporate Governance (GCG)*, dan Penyusunan *Risk-based Capital Framework ("RBCF")*.

Tahun 2016 juga ditandai dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PP Nomor 35 Tahun 2009 pada tanggal 3 November 2016. Terbitnya PP ini melengkapi dua produk hukum, yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 38 Tahun 2015 dan Perpres Nomor 82 tahun 2015, yang telah dikeluarkan pada tahun sebelumnya. Dewan Komisaris berpandangan, dengan diterbitkannya PP ini dapat, memberikan pondasi hukum yang lebih kuat bagi PT PII di dalam melaksanakan penugasan-penugasan yang telah diberikan oleh pemerintah, terutama penjaminan atas proyek dengan skema non-KPBU.

Peningkatan jumlah proyek yang dijamin oleh PT PII dan penetapan PP Nomor 50 tahun 2016, menurut hemat kami merupakan salah satu wujud pengakuan atas keberadaan Perusahaan, serta kepercayaan dan harapan yang telah terbangun sejak berdirinya PT PII. Hal ini juga merupakan momen strategis yang harus dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Perusahaan, dalam menunjukkan kiprah dan kontribusinya dalam pembangunan infrastruktur di masa mendatang.

Terkait dengan pelaksanaan RKAP tahun 2016, secara umum dapat dikatakan kinerja keuangan Perusahaan lebih baik dibandingkan dengan kinerja keuangan tahun 2015. Secara lebih rinci dapat kami sampaikan realisasi angka-angka pendapatan, beban maupun laba.

1. Realisasi pendapatan pada tahun 2016 mencapai Rp821,11 miliar mengalami peningkatan sebesar 54% dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp533,06 miliar. Peningkatan ini terutama oleh karena adanya pendapatan penjaminan yang mulai dapat direalisasikan di tahun 2016 sebesar Rp177,65 miliar dan peningkatan pendapatan pengelolaan dana sebesar Rp643,46 miliar.
2. Realisasi beban usaha pada tahun 2016 sebesar Rp315,95 miliar mengalami peningkatan sebesar 47,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp213,98 miliar.
3. Laba komprehensif setelah pajak tahun 2016 mencapai Rp536,75 miliar mengalami peningkatan sebesar 60% dibandingkan tahun lalu, yaitu dari sebesar Rp335,55 miliar.

Governance (GCG) and Risk-Based Capital Framework ("RBCF") formulation.

2016 was also marked by the stipulation of Government Regulation (PP) No. 50 of 2016 as Amendment to PP No. 35 of 2009 on November 3, 2016. This PP enactment completed two other legal products, that are Presidential Regulation (Perpres) No. 38 of 2015 and Perpres No. 82 of 2015 that were issued in the previous year. The Board of Commissioners views that issuance of this PP will provide stronger legal framework for IIGF to carry out the assignments as mandated by the Government, primarily guarantee for projects with Non-PPP scheme.

In our opinion, increasing number of guaranteed projects booked by IIGF and stipulation of PP No. 50 of 2016 reflected acknowledgement of the Company's existence as well as trust and aspiration that have been built since the establishment of IIGF. These also became strategic momentum to be addressed optimally by the Company to present its role and contribution on the infrastructure development in the future.

Concerning the implementation of RKAP 2016, the Company's recorded financial performance that is generally higher than financial performance booked in 2015. More comprehensive explanation about realization of the revenues, expense and profit are as follows:

1. In 2016, Revenues realization achieved Rp821.11 billion that increased 54% if compared with Rp533.06 billion booked in the previous year. Increase was primarily contributed from revenue of guarantee that was started to be realized in 2016 amounting to Rp177.65 billion and increasing of investments income amounted to Rp643.46 billion.
2. In 2016, operating expenses realization amounted to Rp315.95 billion that increased 47.7% if compared with Rp213.98 billion booked on the same period in the previous year.
3. In 2016, net comprehensive income achieved Rp536,75 billion that increased 60% if compared with Rp335,55 billion booked in the previous year.

4. Dengan demikian, kinerja keuangan tahun 2016 jika dibandingkan dengan tahun 2015 menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Hal ini terutama dikarenakan pendapatan penjaminan yang mulai dapat direalisasikan di tahun 2016.
5. Sementara itu, penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1,00 triliun sebagaimana yang dialokasikan dalam APBN-P tahun 2016 telah diterima oleh PT PII pada tanggal 31 Desember 2016. Penambahan PMN tersebut akan digunakan PT PII untuk meningkatkan kapasitas penjaminan yang dimiliki, mengingat semakin meningkatnya kegiatan proyek-proyek infrastruktur yang membutuhkan penjaminan.

Atas hasil yang dicapai dan kepercayaan yang diterima dari para *stakeholder* tersebut, kami, Dewan Komisaris memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Direksi dan Karyawan, yang tetap bersikap optimis dan bekerja dengan semangat yang tinggi sehingga dapat mencapai kinerja yang patut untuk dibanggakan, baik dari sudut keuangan maupun operasional. Kinerja tersebut dapat dicapai meskipun di tengah meningkatnya tantangan dalam kondisi perekonomian domestik yang belum kondusif, serta belum mendukungnya perangkat peraturan perundangan yang terkait erat dengan pembangunan infrastruktur pada umumnya.

Sejalan dengan kinerja keuangan, kinerja operasional yang dicapai oleh PT PII di tahun 2016 juga sangat baik. Peningkatan kinerja ini juga tercermin dari peningkatan pendapatan penjaminan yang meningkat signifikan dibandingkan dengan tahun 2015 bahkan di dalam 5 (lima) tahun terakhir. Terdapat sembilan proyek yang telah ditandatangani perjanjian penjaminannya di tahun 2016, dengan nilai total investasi sebesar Rp82,192 triliun dengan exposure penjaminan PT PII atas proyek-proyek tersebut mencapai sebesar Rp25,98 triliun.

Selain itu, terdapat empat proyek jalan tol yang telah diterbitkan *In-principal Approval*/IPA dan prosesnya sudah masuk tahap lelang. Penjaminan keempat proyek jalan tol tersebut menggunakan skema penjaminan bersama antara PT PII dengan Menteri Keuangan berdasarkan *risk sharing*. Estimasi nilai investasi keempat proyek jalan tol tersebut adalah sebesar Rp37,33 triliun dengan nilai exposure penjaminan PT PII sebesar Rp3,28 triliun.

Terkait dengan Indeks Kinerja Utama (IKU), Dewan Komisaris berpandangan Direksi telah mencapai IKU melebihi target yang telah ditetapkan oleh RUPS. Berdasarkan hasil audit yang dilakukan KAP, capaian IKU PT PII tahun 2016 adalah sebesar 104,12%. Hanya satu IKU, yaitu "Jumlah Proyek Yang Dijamin Dengan Skema Non-KPBU" belum dapat terealisasi hingga akhir

4. Therefore, if compared with 2015, financial performance in 2016 achieved a significant growth. This was primarily contributed from revenue of guarantee that was started to be realized in 2016.
5. On the other hand, additional Government Investment (PMN) of Rp1 trillion that was allocated in the APBN-P 2016 had been received by IIGF on December 31, 2016. The additional PMN is planned to be disbursed by IIGF to increase capacity of the guarantee considering increasing infrastructure projects activities that require the guarantee.

For the achieved results and trusts from the Stakeholders, as the Board of Commissioners, We express utmost appreciation to all of the Management, the Board of Directors and Employees for being optimistic and working with high spirit to accomplish a proud achievement, both in terms of financial and operational aspects. The performance was recorded amidst sluggish domestic economy as well as less supportive legal framework that is generally related with infrastructure development.

In line with the financial performance, IIGF also recorded positive operational performance in 2016. The performance growth was reflected from significantly increasing revenue of guarantee if compared with 2015 and even for the last 5 (five) years. There were nine projects whose guarantee contracts were signed in 2016 with total investment of Rp82.192 trillion and guarantee exposure of IIGF on the projects achieved Rp25.98 trillion.

In addition, there were four toll road projects which In-Principal Approval (IPA) had been issued and currently under tender process. Guarantee for those four toll road projects are using collective guarantee scheme between IIGF and Minister of Finance based on risk-sharing. Investment value estimation on those four toll road projects amounted to Rp37.33 trillion with value of IIGF's guarantee exposure achieved Rp3.28 trillion.

In terms of Key Performance Indicators (KPI), the Board of Commissioners evaluated the Board of Directors had achieved the KPI exceeding the target that was set by the GMS. According to KAP audit result, IIGF KPI achievement was 104.12% in 2016. There was only one KPI, "Total Project Guarantee With Non-PPP Scheme" that failed to be implemented until the end of



tahun 2016. Hal ini terjadi karena regulasi yang dibutuhkan PT PII untuk melaksanakan penjaminan Non-KPBU, saat ini masih dalam proses penyempurnaan di Kementerian Keuangan sebagai regulator kegiatan usaha PT PII. Namun pun demikian, terkait dengan hal ini, Dewan Komisaris telah memberikan arahan kepada Direksi untuk secara aktif berkoordinasi dan memberikan masukan-masukan untuk penyempurnaan regulasi yang sedang dilakukan.

Sementara itu, dalam rangka pelaksanaan amanat Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.06/2015, Dewan Komisaris juga telah memiliki IKU berdasarkan penetapan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dewan Komisaris telah melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam IKU tersebut.

Pandangan Atas Prospek Usaha Perusahaan

Pemerintah telah menetapkan untuk terus melakukan pengembangan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Hingga tahun 2019, Pemerintah telah merencanakan pengembangan sejumlah proyek infrastruktur strategis. Hal ini merupakan potensi yang sangat baik bagi Perusahaan.

Dewan Komisaris menilai Perusahaan memiliki potensi yang sangat besar untuk terus berkembang seiring dengan gencarnya Pemerintah dalam melakukan pengembangan proyek infrastruktur. Sejalan dengan itu, Dewan Komisaris terus mengingatkan manajemen Perusahaan untuk menggali potensi-potensi yang ada sesuai dengan Perpres 38 tahun 2015 yang memperluas cakupan usaha Perusahaan untuk dapat menjamin 19 sektor infrastruktur yang dikembangkan melalui skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).

Dewan Komisaris mendukung penuh upaya yang dilakukan manajemen untuk terus mendorong pengembangan sistem yang *governed*, *credible* dan *accountable* termasuk pengembangan kapasitas internal. Hal tersebut akan semakin meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan kepada Perusahaan.

Pengawasan Dewan Komisaris

Selanjutnya, dalam rangka menjalankan fungsinya, Dewan Komisaris secara rutin telah melakukan pengawasan atas pengelolaan Perusahaan secara aktif. Di antaranya atas kegiatan penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban RKAP 2016. Kami, secara rutin setiap bulannya telah bertemu dengan Direksi untuk membahas laporan manajemen bulanan yang berisi

2016. This was due to the regulation required by IIGF to execute the Non-PPP Guarantee is under revision process in Ministry of Finance as regulator of IIGF business activity. However, related to this condition, the Board of Commissioners had provided recommendation to the Board of Directors to coordinate actively and submit suggestions to enhance the current regulation.

Thus, as the implementation of mandate in Article 24 of Finance Minister Regulation No. 88/PMK.06/2015, the Board of Commissioners also had formulated KPI based on the General Meetings of Shareholders (GMS) resolution. The Board of Commissioners had carried out the duties as disclosed in the KPI.

View on Company's Business Prospect

The Government had stipulated to continuously performed infrastructure development to support national economy growth. As of 2019, the Government has planned strategic infrastructure projects development. This is a very good potential for the Company.

The Board of Commissioners evaluated the Company has a huge potential to continuously grow in line with Government's perpetual efforts in developing the infrastructure projects. In line with this condition, the Board of Commissioners continuously suggests the Management to optimize existing potentials according to Presidential Regulation Number 38 of 2015 that expanded the Company's business scope to guarantee 19 infrastructure sectors that are developed under Public Private Partnership (PPP).

The Board of Commissioners fully supports initiatives taken by the Management to continuously support a governed, credible and accountable system development including internal capacity building. This will increase trusts of the Stakeholders to the Company.

Board of Commissioners Supervision

Furthermore, in the course of function implementation, the Board of Commissioners had conducted the monitoring over the Company's management actively and periodically. It is included supervision on the RKAP 2016 preparation, implementation and accountability report. We had organized monthly meeting with the Board of Directors to discuss monthly management report





perkembangan pelaksanaan RKAP dan informasi-informasi lain, terutama terkait mandat yang diberikan kepada Perusahaan yang perlu dibahas bersama Dewan Komisaris.

Pada pertemuan-pertemuan tersebut atau dalam berbagai kesempatan lain, Dewan Komisaris selalu memberikan arahan-arahan yang diperlukan untuk dapat membantu Direksi dalam rangka mencapai target-target yang ditentukan di RKAP maupun Kontrak Manajemen. Di samping itu, kami juga selalu melakukan pemantauan atas pelaksanaan strategi Perusahaan, termasuk membantu manajemen PT PII dalam mengupayakan solusi atas masalah-masalah yang masih menghambat realisasi proyek-proyek infrastruktur selama ini.

Dalam rangka pengawasan atas kinerja keuangan dan operasional, kami dengan dibantu oleh Komite Audit, telah mengusulkan Kantor Akuntan Publik (KAP) kepada RUPS yang akan ditunjuk untuk melakukan audit keuangan atas Laporan Keuangan PT PII tahun 2016. Sesuai dengan usulan Kami, KAP yang ditunjuk oleh RUPS adalah KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC). Audit keuangan atas Laporan Keuangan PT PII tahun 2016 telah diselesaikan oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC) pada tanggal 3 Maret 2017 dengan opini Wajar Tanpa Modifikasi (WTP).

Tata Kelola Perusahaan

Dewan Komisaris telah melakukan pembahasan dan memberikan persetujuan kepada Direksi untuk menetapkan perubahan struktur organisasi, sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan. Perubahan struktur organisasi ini dibutuhkan Perusahaan untuk menyesuaikan dengan dinamika kondisi usaha yang dihadapi. Dewan Komisaris berpandangan penyesuaian organisasi diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional Perusahaan dalam rangka pencapaian maksud dan tujuan pendirian Perusahaan. Untuk itu, Dewan Komisaris telah memberikan beberapa arahan kepada Direksi, bahwa proses *check and balance* dalam *value chain* pemrosesan penjaminan, yang menjadi *core business* Perusahaan tetap terjaga dan dapat diimplementasikan dengan baik, sesuai praktik bisnis yang berlaku dan dengan tetap menjaga *corporate governance*. Struktur organisasi yang baru juga diharapkan dapat mendukung terciptanya *knowledge management* yang berkesinambungan terkait kegiatan usaha Perusahaan, di antara individu di lingkungan internal Perusahaan.

Di samping penyiapan organisasi, peningkatan jumlah proyek yang dijamin serta perluasan mandat dan sektor yang menuntut

regularly which presented progress of RKAP implementation and other information, primarily related with the mandate assigned to the Company that needs to be discussed altogether with the Board of Commissioners.

In the meetings and other occasions, the Board of Commissioners provided necessary recommendations to help the Board of Directors achieving targets as set in RKAP and Management Contract. Furthermore, We also oversight implementation of the Company's strategy including assisting the IIGF Management to seek solution on several issues that constrained realization of current infrastructure projects.

As financial and operational performance monitoring, We were also assisted by Audit Committee to propose Public Accountant Firm (KAP) to the GMS to be appointed and conduct financial audit on IIGF Financial Statements 2016. According to our recommendation, GMS appointed Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners (PwC) Public Accountant Firm. The IIGF Financial Statements Audit had been completed by Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners (PwC) Public Accountant Firm on March 3, 2017 with Unqualified Opinion.

Corporate Governance

The Board of Commissioners had discussed and granted approval to the Board of Directors to revise the organization structure as regulated in the Articles of Association. Change in the organization structure is required by the Company to align with dynamics in the current business condition. The Board of Commissioners views that the organization structure revision will improve operational effectiveness and efficiency to achieve purpose and objectives of the Company establishment. Therefore, the Board of Commissioners had provided suggestions to the Board of Directors that the check and balance process in the guarantee process value chain, that will become core business of the Company to be well maintained and implemented according to applicable business practice and upholding the corporate governance. The new organization structure is also expected to support sustainable knowledge management in relation with the Company's business activity among the Company's internal personnel.

Besides organizational readiness, increasing number of guaranteed projects as well as extension of mandate and

adanya kesiapan sumber daya manusia, Dewan Komisaris juga senantiasa memberi arahan kepada Direksi untuk menyiapkan sumber daya manusia yang tepat, baik dari sisi jumlah maupun kualifikasi. Peningkatan jumlah proyek yang dijamin, misalnya memerlukan adanya SDM yang cukup untuk dapat melakukan *monitoring* proyek (termasuk menyiapkan kerangka kerja, identifikasi faktor-faktor risiko serta mitigasi risiko). Dengan demikian, PT PII dapat senantiasa mengetahui perkembangan proyek-proyek yang dijamin dan menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan dalam hal terdapat potensi pengajuan klaim penjaminan.

Dalam rangka pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (GCG), PT PII dalam tahun 2016 ini telah berhasil menyelesaikan penyusunan Pedoman GCG. Di samping itu, dalam tahun 2016 ini juga telah dilakukan *self assessment* atas penerapan GCG di lingkup Perusahaan yang hasilnya direncanakan dapat diperoleh pada triwulan I tahun 2017. Hasil *self assessment* ini nantinya akan menjadi panduan bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk melakukan penyempurnaan-penyempurnaan pelaksanaan praktik GCG di lingkup Perusahaan.

PT PII juga telah menyusun *Risk-Based Capital Framework* ("RBCF"), yang merupakan salah satu kajian strategis bagi bisnis penjaminan yang dilakukan oleh PT PII. Kajian ini dilaksanakan dengan beberapa pertimbangan. Pertama, merujuk Pasal 21 Perpres 78 tahun 2010 yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan menetapkan ketentuan mengenai kecukupan modal dari BUPI dan meninjau kembali rasio kecukupan modal tersebut selambat-lambatnya setiap dua tahun, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan program nasional percepatan penyediaan infrastruktur atau usulan BUPI. Kedua, memastikan PT PII mempunyai kapasitas penjaminan yang cukup untuk mengantisipasi potensi proyek baru yang akan masuk. Kajian tersebut telah disampaikan kepada Dewan Komisaris pada kuartal keempat, yang antara lain berisi besaran rasio kecukupan modal PT PII yang optimal, serta definisi dan rasio kecukupan modal PT PII yang perlu diatur dalam suatu regulasi. Hasil kajian ini akan disampaikan ke Kementerian Keuangan untuk dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan penyusunan regulasi kecukupan modal PT PII.

Whistle Blowing Systems

Salah satu praktik GCG yang didorong Dewan Komisaris untuk diimplementasikan adalah Sistem Pelaporan Pelanggaran (*whistleblowing systems*/WBS). Untuk itu, perlu disusun kebijakan dan mekanismenya. Dewan Komisaris berpandangan bahwa kepastian perlindungan kepada saksi atau pelapor atas suatu

sectors which require people readiness, the Board of Commissioners deliberately suggests the Board of Directors to prepare appropriate personnel in terms of quantity and qualification. The increasing number of guaranteed projects, among others, requires sufficient personnel to perform project monitoring (including preparation of working framework and identification of risk factors and risk mitigation). Therefore, IIGF will always acknowledge progress of the guaranteed projects and prepare necessary actions for any possibility of guarantee claim submission.

As the implementation of Good Corporate Governance (GCG), IIGF had completed preparation of Code of GCG in 2016. In addition, GCG Self-Assessment had also been done in 2016 at corporate level with result will be published in the 1st quarter of 2016. The self-assessment result will be treated as guideline for the Board of Directors and Board of Commissioners to improve implementation of GCG practice in the Company's circumstances.

IIGF had also formulated Risk-Based Capital Framework ("RBCF") as a strategic review for guarantee business operated by IIGF. The review was done under several considerations. First, referring to Article 21 Perpres 78 of 2010 declaring that the Minister of Finance stipulated capital adequacy provision of BUPI and reviews the capital adequacy ratio the latest in every two years by considering the economic condition and infrastructure development acceleration national program or recommendation from BUPI. Second, to ensure IIGF having sufficient guarantee capacity to anticipate new potential projects. The review has been submitted to the Board of Commissioners in the fourth quarter, namely disclosing level of optimum capital adequacy ratio for IIGF as well as capital adequacy definition and ratio of IIGF that shall be specified under particular regulation. Result of the review will be submitted to Ministry of Finance to be used as one of considerations in the formulation of capital adequacy regulation for IIGF.

Whistle Blowing Systems

One of GCG practices that is encouraged by the Board of Commissioners to be implemented is Whistle Blowing System (WBS). Therefore, the policy and mechanism shall be formulated. The Board of Commissioners viewed that assurance of protection to the witness or whistle bower on fraud indication committed



indikasi pelanggaran yang dilakukan karyawan atau manajemen merupakan salah satu unsur WBS yang baik. Berdasarkan informasi yang diterima Dewan Komisaris, sampai saat ini PT PII masih menyusun WBS. Penyusunan dilakukan dengan mengacu pada best practice yang ada. Oleh karena itu, Dewan Komisaris terus mendorong Direksi untuk segera menyelesaikannya. Penyusunan dan penerapan kebijakan sistem tersebut akan berdampak pada pembentukan budaya tata kelola perusahaan yang baik.

Dengan mempertimbangkan bahwa sistem WBS masih di dalam proses penyusunan, Dewan Komisaris dan Organ Dewan Komisaris akan berperan aktif untuk memberikan masukan, antara lain dengan mempertimbangkan kesesuaiannya dengan *best practice* yang ada, termasuk memastikan adanya mekanisme pelaporan yang baik kepada Dewan Komisaris.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2016, komposisi Dewan Komisaris PT PII tidak mengalami perubahan.

Apresiasi

Akhir kata, mewakili Dewan Komisaris, sekali lagi Kami menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada Direksi dan seluruh jajaran karyawan PT PII atas kerja keras, dedikasi dan prestasi yang telah dilakukan dan dicapai sepanjang tahun 2016. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pemegang Saham serta semua pemangku kepentingan di sektor publik maupun swasta, atas kepercayaan, dukungan dan kerja sama yang terus diberikan kepada PT PII dalam mewujudkan misi yang diamanatkan, demi semakin meningkatnya laju pembangunan ekonomi Indonesia di masa mendatang.

Jakarta, 10 Maret 2017

Jakarta, March 10, 2017

Luky Alfirman
Komisaris Utama
President Commissioner

by the employees or management becomes an element of appropriate WBS. According to information received by the Board of Commissioners, IIGF is currently formulating the WBS system. The formulation is referring to current best practice. Therefore, the Board of Commissioners continuously encourages the Board of Directors to finish the process. This system formulation and policy implementation will contribute to establishment of good corporate governance culture.

By considering that WBS system is under formulation process, the Board of Commissioners and our Supporting Structure will take active role to provide recommendations, namely by concerning the consistency with current best practice, including to ensure availability of appropriate reporting mechanism to the Board of Commissioners.

Change in Board of Commissioners Composition

There was no change in terms of IIGF Board of Commissioners throughout 2016.

Appreciation

Last but not least, on behalf of the Board of Commissioners, We express high appreciation to the Board of Directors and all Employees of IIGF for their perseverance, dedication and achievement throughout 2016. We also thank our Shareholders and Stakeholders in public and private sectors for every trust, support and partnership given to IIGF to achieve the mandated mission and to accelerate national economic development in the future.

Laporan Direksi

Report from the Board of Directors

Aset PT PII tahun 2016 juga mengalami peningkatan sebesar 20,90% menjadi Rp8.924,43 miliar dibandingkan jumlah aset tahun 2015 yang sebesar Rp7.381,41 miliar.

In 2016, Assets of IIGF also grew 20.90% to Rp8,924.43 billion if compared with total assets booked in 2015 that was Rp7,381.41 billion.

Pendapatan Perusahaan
tahun 2016

Rp821,11 Miliar
mengalami
peningkatan sebesar

54,04% ^



In 2016, Revenues achieved Rp82.11 billion that grew 54.04%.

Sinthya Roesly
Direktur Utama
President Director



Pemegang Saham dan Para Pemangku Kepentingan Yang Terhormat,

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga PT PII dapat melewati tahun 2016 dengan capaian kinerja yang baik.

Bersama ini kami sampaikan laporan pertanggungjawaban Direksi atas pengelolaan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016 beserta Laporan Keuangan PT PII yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC) dan mendapat opini wajar tanpa modifikasi.

Kondisi Ekonomi Indonesia dan Perkembangan Infrastruktur

Di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi global, pada tahun 2016 Indonesia berhasil membukukan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02%. Walau pencapaian tersebut masih berada di bawah target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 sebesar 5,3%, namun pertumbuhan ekonomi tersebut tercatat sebagai pertumbuhan tertinggi dalam 3 tahun terakhir.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2016 dipengaruhi oleh faktor domestik. Keberhasilan Pemerintah menjaga tingkat inflasi yang rendah sepanjang tahun 2016 juga menjadi faktor yang cukup mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Tingkat inflasi sepanjang tahun 2016 adalah sebesar 3,02% yang merupakan angka terendah dalam satu dekade terakhir.

Faktor domestik lainnya yakni realisasi belanja pemerintah yang mencapai 89,3% atau Rp1.859,46 triliun dari yang ditargetkan dalam APBN-P sebesar Rp2.082,95 triliun. Meskipun tidak mencapai target, namun belanja negara pada tahun 2016 lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp1.806,5 triliun.

Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang cukup baik tersebut tidak dibarengi dengan pertumbuhan sektor riil. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, sepanjang tahun 2016 pertumbuhan industri hanya mencapai 4,4%. Pencapaian tersebut lebih rendah dari pertumbuhan industri pada tahun 2015 sebesar 5,05%.

Our Distinguished Shareholders and Stakeholders,

Praise The Almighty God for bestowing His blessing and grace to us and enabled IIGF to pass 2016 with a satisfying performance achievement.

We, herewith, present the Board of Directors accountability report on the Company's management for fiscal year ended on December 31, 2016 and Financial Statements of IIGF as audited by Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners (PwC) Public Accountant Firm with Unqualified Opinion.

Indonesian Economy Outlook and Infrastructure Growth

Amidst the slow down of global economic growth, throughout 2016, Indonesia managed to achieve 5.02% economic growth. Despite the achievement was below the target set in State Budget - Revision (APBN-P) 2016 that targeted 5.3%, the economic growth is the highest within the last 3 years.

In 2016, Indonesian economic growth was influenced by domestic factors. Success of the Government to control low inflation rate throughout 2016 also became another factor that supported national economic growth. Throughout 2016, inflation rate stood at 3.02% as the lowest level within the last decade.

Other domestic factors included realization of Government expenditure that achieved 89.3% or Rp1,859.46 trillion from Rp2,082.95 trillion targeted in the APBN-P. Despite it was below the target, the Government expenditure in 2016 was higher than Rp1,806.5 trillion spent in the previous year.

However, this positive economic growth was not followed with growth in real sector. According to data published by Ministry of Industry, industry growth only achieved 4.4% throughout 2016. The achievement was below the industry growth in 2015 that was 5.05%.



Dari Kiri ke Kanan
Left to Right

Armand Hermawan
Direktur Keuangan dan
Manajemen Risiko
*Director of Finance and
Risk Management*

Sinthya Roesly
Direktur Utama
President Director

Salusra Satria
Direktur Operasi
Director of Operations



Pemerintah sangat menyadari bahwa salah satu faktor yang menjadi hambatan bagi pertumbuhan ekonomi nasional adalah minimnya infrastruktur penunjang bisnis yang dimiliki Indonesia. Karena itu, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Pemerintah terus meningkatkan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah, mulai dari pembangunan jalan, pelabuhan, bandara dan infrastruktur penunjang lainnya.

Pemerintah Indonesia telah melakukan sejumlah upaya seperti perbaikan regulasi, fiskal, dan kelembagaan guna mendorong investasi untuk beragam sektor infrastruktur dan pencapaian *milestone* proyek prioritas.

Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur prioritas, Pemerintah melalui Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) menetapkan 30 proyek infrastruktur senilai Rp851 triliun sebagai proyek prioritas periode 2016-2019 yang akan mendapat fasilitas jaminan politik, perizinan, dan finansial sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Pemerintah telah menetapkan 225 Proyek Strategis Nasional yang antara lain terdiri dari proyek jalan tol, jalan nasional, kereta api, bandara, pelabuhan, program 1 juta rumah dan berbagai proyek lainnya.

Selain itu, melalui Perpres 4 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, Pemerintah juga mendorong percepatan pembangunan ketenagalistrikan, termasuk di dalamnya pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW dan jaringan transmisi sepanjang 46.000 Km.

Strategi dan Inisiatif Strategis

Terbitnya Perpres Nomor 38 tahun 2015 memperluas cakupan usaha PT PII untuk dapat menjamin 19 sektor infrastruktur yang dikembangkan melalui skema KPBU, termasuk infrastruktur sosial. PT PII menyadari bahwa dalam upaya menjaga keberlangsungan usaha dibutuhkan kesungguhan untuk terus mendorong dan mendukung proyek-proyek KPBU yang prospektif sekaligus *bankable*, dengan pula mengacu pada rancangan proyek yang telah disusun melalui proses yang akuntabel. PT PII terus berproses untuk meningkatkan kapasitas penjaminan melalui perolehan PMN dan kerja sama dengan Kementerian Keuangan sebagai mitra penjamin atau *co-guarantor*. Peningkatan kapasitas Perusahaan juga dilakukan melalui aliansi strategis dengan berbagai perguruan tinggi di Indonesia yang bertujuan untuk dapat memberikan informasi, masukan, pembelajaran atas pembangunan

The Government was highly realized that one of the factors that constrained national economic growth was lack of business supporting infrastructure in Indonesia. Therefore, under the reign of President Joko Widodo, the Government is encouraging infrastructure development in various regions starting from construction of roads, ports, airports and other supporting infrastructures.

Government of Indonesia had implemented couples of initiatives such as improvement of regulation, fiscal and institutional aspect to drive investment in various infrastructure sectors and achieve milestone of the priority projects.

To accelerate priority infrastructure development, through The Committee of Infrastructure Priorities Development Acceleration (KPPIP), the Government had listed 30 infrastructure projects with value of Rp851 trillion as priority projects for 2016 - 2019 period that will acquire guarantee facilities on political, permits and financial aspects as regulated under Presidential Regulation (Perpres) No. 3 of 2016 regarding Acceleration of National Strategic Project Implementation.

The Government had also stipulated 225 National Strategic Projects comprising of, among others, toll roads, national roads, trains, airports, ports, 1 million houses program and other projects.

In addition, through the implementation of Perpres 4 of 2016 regarding Acceleration of Electricity Infrastructure Development, the Government also supports acceleration of electricity construction including the development of 35,000 MW power plant and 46,000 Km transmission network.

Strategy and Strategic Initiatives

Issuance of Perpres No. 38 of 2015 expanded scope of IIGF business to guarantee 19 infrastructure sectors that are developed under PPP scheme, including the social infrastructure. IIGF is aware that in its attempt to maintain business sustainability, commitment to encourage and support prospective and bankable PPP projects is needed by also referring to project blueprint that was designed in an accountable process. IIGF continuously evolves to upgrade guarantee capacity through PMN proceeds and partnership with Ministry of Finance as Co-Guarantor. The Company's capacity upgrade was also done via strategic alliance with universities in Indonesia aiming to provide information, recommendation, lesson-learned on the infrastructure

infrastruktur melalui skema KPBU. Melalui peningkatan kapasitas penjaminan, PT PII dapat berkontribusi lebih luas untuk mendorong percepatan penyediaan infrastruktur nasional.

Di sisi lain, Perusahaan menyadari bahwa suksesnya suatu proyek KPBU juga dipengaruhi oleh komitmen PJPk yang tinggi. Namun seringkali komitmen PJPk menjadi salah satu faktor eksternal yang seringkali tidak dapat dikontrol. Menyikapi hal tersebut, PT PII secara konsisten berupaya untuk menjaga komitmen PJPk terhadap proyek dengan pula meningkatkan pemahaman dan kapasitas mereka melalui berbagai program *capacity building*.

Tahun 2016 kemudian ditargetkan untuk dapat membukukan suatu kinerja memuaskan dengan dilakukannya berbagai pengembangan proyek KPBU khususnya pada sektor baru. Beberapa inisiatif strategis yang telah diambil oleh manajemen sepanjang tahun 2016 antara lain sebagai berikut:

1. Aktif memberi nilai tambah dari proses pengadaan badan usaha (lelang) proyek.
PT PII turut serta mengawal jalannya proses lelang untuk penetapan Badan Usaha.
2. Aktif melakukan monitoring proyek yang dilaksanakan oleh PJPk atau Bidang Usaha.
Untuk proyek yang telah dijamin, Perusahaan turut serta menjadi anggota dari *Joint Monitoring Committee (JMC)* bersama PJPk, Badan Usaha, dan lembaga lainnya yang terlibat.
3. Aktif melakukan kajian infrastruktur pada berbagai sektor baru.
PT PII mengkaji proyek-proyek pembangunan infrastruktur potensial dari sektor-sektor yang diamanatkan dalam PP No. 38 tahun 2015.
4. Upaya peningkatan pemahaman pemangku kepentingan.
PT PII melalui IIGF Institute (IIGFI) meningkatkan pemahaman berbagai pemangku kepentingan terhadap skema KPBU dan penjaminan Pemerintah melalui PT PII.

Kendala yang Dihadapi

Ada dua kendala utama yang seringkali dihadapi dalam proyek KPBU, yakni eksekusi pembebasan lahan dan minimnya pemahaman PJPk atas skema KPBU. Sebagaimana kita ketahui, pembebasan lahan seringkali diasosiasikan dengan suatu proses yang rumit. Meskipun lahan yang akan digunakan untuk proyek

development with PPP scheme. By increasing the guarantee capacity, IIGF will contribute higher to support acceleration of national infrastructure development.

On the other hand, the Company realized that success of a PPP project is depended on high commitment from the Contracting Agency (CA) as one of uncontrollable external factors. Responding to this condition, IIGF seeks to consistently maintain commitment of the CA to the projects and also develop their understanding and capacity through capacity building programs.

In 2016, the Company was also targeted to book a satisfying performance through PPP project developments, especially in the new sectors. Some of strategic initiatives taken by the Management in 2016 are as follows:

1. Actively providing added-value from the project bidding (tender) process.
IIGF participated in escorting the bidding process to select the Enterprise.
2. Actively monitoring the project implemented by Contracting Agencies or Business Sector.
For the guaranteed projects, the Company participated as member of Joint Monitoring Committee (JMC) altogether with the CA, Enterprise and other involved institutions.
3. Actively conducting infrastructure review in various new sectors.
IIGF reviewed potential infrastructure development projects from sectors that are mandated in PP No. 38 of 2015.
4. Efforts to develop Stakeholders' understanding.
Through IIGF Institute (IIGFI), IIGF developed understanding of various stakeholders on PPP and Government Guarantee scheme via IIGF.

Issues

There were two major issues in PPP projects that were execution of land acquisition and low understanding of CA on the PPP scheme. As broadly acknowledged, land acquisition was often associated with a complicated process. Despite the land was planned to be used for Government's project, land dispute and ownership issues



pemerintah, isu sengketa dan kepemilikan tanah nampaknya masih menjadi kendala, khususnya terkait lahan konservasi, fasum dan tanah adat. Oleh karena itu, peran aktif Pemerintah sangat dibutuhkan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Kendala yang lain adalah terkait masih cenderung minimnya pemahaman PJKP terhadap skema KPBU. Hal ini berdampak pada maraknya asumsi di kalangan PJKP bahwa skema KPBU merupakan skema kerja sama yang rumit untuk diimplementasikan. Akibatnya PJKP belum benar-benar memahami skema KPBU dan mekanisme kerja sama serta tanggung jawab dan/atau kewajiban masing-masing pihak yang terlibat.

Isu lainnya yang tidak kalah penting adalah perihal kelengkapan data dan informasi kelayakan finansial proyek serta isu-isu tentang identifikasi dan analisis risiko yang masih sangat minim. Kompleksitas masalah hukum dan peraturan perundang-undangan yang seringkali menyebabkan terjadinya konflik kepentingan juga turut menjadi kendala yang dihadapi dalam proyek KPBU.

Kinerja PT PII 2016

Tahun 2016, PT PII berhasil membukukan kinerja keuangan dan operasional yang cukup membanggakan. Dari sisi *bottom line*, PT PII mampu mempertahankan kinerja baik tercermin dari dua indikator utama, yakni pendapatan dan laba komprehensif yang seluruhnya mampu membukukan hasil positif dan bertumbuh.

Pendapatan Perusahaan tahun 2016 tercatat sebesar Rp821,11 miliar, tumbuh 54,04% dibandingkan pendapatan tahun sebelumnya yang sebesar Rp533,065 miliar. Pendapatan Perusahaan tahun 2016 sebagian besar masih berasal dari pendapatan pengelolaan dana, yakni sebesar Rp643,46 miliar. Namun demikian, di tahun 2016 PT PII berhasil membukukan pendapatan penjaminan dari beberapa proyek yang telah efektif dijamin, salah satunya PLTU Jawa Tengah (CJPP), sebesar Rp177,65 miliar atau meningkat 100% dibandingkan tahun sebelumnya.

Realisasi laba komprehensif PT PII tahun 2016 mencapai Rp536,75 miliar, meningkat Rp201,20 miliar atau sebesar 59,96% dari realisasi penghasilan komprehensif tahun 2015 sebesar Rp335,55 miliar. Peningkatan laba komprehensif pada 2016 disebabkan pengakuan pendapatan penjaminan, peningkatan hasil pengolahan dana, efisiensi biaya dan perolehan manfaat komprehensif lain yang diperoleh Perusahaan pada 2016.

Aset PT PII tahun 2016 juga mengalami peningkatan sebesar 20,90% menjadi Rp8.924,43 miliar dibandingkan jumlah aset

were still become the major challenge, especially related with conservation land, public facility and customary land. Therefore, active role from the Government is highly expected both at central and local levels.

Another issue was related with low understanding of the CA on PPP scheme. This will affect massive assumption in the CA's circumstances that the PPP scheme is a complicated scheme to be implemented. As the consequence, CA do not have comprehensive understanding on PPP scheme in terms of partnership mechanism and responsibility and/or obligation of each involved party.

Another important issue is related with completeness of data and information about financial feasibility of the project as well as risk identification and analysis issues that remained low. Complexity of legal and law issues also often led to conflict of interest and was also being one of the issues occurred in the PPP project.

Performance of IIGF 2016

IIGF managed to book proud financial and operational performances in 2016. From the bottom line indicators, IIGF maintained positive performance as reflected from two key indicators, such as revenues and comprehensive income that booked positive and progressive results.

The Company booked Rp821.11 billion revenues in 2016 that grew 54.04% if compared with Rp533.065 billion revenues booked in the previous year. In 2016, revenues of the Company was mainly contributed from income from investments of Rp643.46 billion. However, IIGF also booked revenue from guarantee from several projects which guarantee had been effective, such as PLTU Central Java (CJPP) amounted to Rp177.65 billion or increased 100% from the previous year.

Realization of IIGF comprehensive income achieved Rp536.75 billion in 2016 that increased Rp201.20 billion or 59.96% from Rp335.55 billion comprehensive income realization in 2015. Increasing comprehensive income in 2016 was driven by recognition of revenue from guarantee, increasing income from investments and gain on other comprehensive benefits that were booked by the Company in 2016.

In 2016, Assets of IIGF also grew 20.90% to Rp8,924.43 billion if compared with total assets booked in 2015 that was Rp7,381.41

tahun 2015 yang sebesar Rp7.381,41 miliar. Peningkatan aset tersebut utamanya disebabkan adanya tambahan dana PMN sebesar Rp1 triliun yang diterima pada 31 Desember 2016.

Prospek Usaha PT PII

Secara umum, ekonomi nasional tahun 2017 diproyeksikan akan mengalami perbaikan dan peningkatan. Hal tersebut merupakan akumulasi dari berbagai upaya dan inisiatif pemerintah dalam mendorong belanja pemerintah khususnya bidang infrastruktur yang diharapkan dapat mendorong pergerakan dan pertumbuhan sektor riil. Kondisi demikian diharapkan berimbas pada perbaikan berbagai indikator ekonomi baik makro maupun mikro, yang pada akhirnya akan berdampak positif bagi bisnis Perusahaan.

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 yang mengalami peningkatan didukung oleh akselerasi belanja pemerintah seiring dengan realisasi proyek-proyek infrastruktur dan paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun 2017 berada pada kisaran 5 - 5,4%. Proyeksi tersebut didasarkan pada peningkatan realisasi berbagai proyek infrastruktur pemerintah yang akan meningkatkan aktivitas dunia kerja dan dunia usaha. Pertumbuhan ekonomi pada level tersebut diharapkan akan berdampak positif bagi peningkatan daya beli domestik dan akan mendorong perbaikan pada berbagai indikator ekonomi nasional.

Semenjak diterbitkannya Perpres 38 tahun 2015, PT PII dapat memperluas cakupan usahanya untuk dapat menjamin 19 sektor infrastruktur yang dikembangkan melalui skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). Optimisme yang terbangun pada tahun selanjutnya juga berangkat dari terus didorongnya pembangunan infrastruktur di Indonesia oleh Pemerintah. Peraturan Presiden No 3 Tahun 2016 yang telah menetapkan 225 proyek infrastruktur sebagai Proyek Prioritas Nasional telah memberikan angin segar kepada bisnis PT PII dengan pembangunan infrastruktur yang lebih terarah.

Upaya selama 6 tahun terakhir dalam mempersiapkan sistem yang *governed, credible* dan *accountable* termasuk pengembangan kapasitas internal sekaligus memperkenalkan serta meyakinkan manfaat serta nilai tambah Penjaminan kepada para pemangku kepentingan telah membuahkan hasil yang menggembirakan pada tahun 2016. Hingga bulan September 2016, pencapaian tahapan penandatanganan perjanjian penjaminan dicapai atas 9 proyek pada 4 sektor infrastruktur, serta pencapaian *financial close* untuk 3 proyek termasuk diantaranya Proyek PLTU Batang Jawa Tengah (CJPP) merupakan suatu peristiwa monumental dalam sejarah usaha PT PII

billion. Higher assets was contributed from additional PMN proceeds of Rp1 trillion on December 31, 2016.

IIGF Business Prospect

In general, national economy is projected to recover and grow in 2017. This becomes accumulation of various Government's plan and initiatives in supporting Government expenditure, especially in infrastructure sector that is expected to encourage real sector development and growth. This condition is expected to contribute on economic indicators improvement both macro and macroeconomics that will finally bring positive impact on the Company's business.

Economic growth was recovered in 2016 as underpinned by acceleration of Government expenditure accompanying realization of infrastructure projects and economic policy package issued by the Government. Bank Indonesia estimated economic growth in 2017 will achieve 5 - 5.4% level. The projection considered increasing realization of government's infrastructure projects that will stimulate activity in professional and business sectors. In this level, economic growth is expected to have positive contribution on higher domestic buying power and encourage improvement of national economy indicators.

Since the issuance of Presidential Regulation Number 38 of 2015, IIGF expanded its business scope to guarantee 19 infrastructure sectors that was developed under Public Private Partnership (PPP) scheme. The optimism which has been fostered since previous year was also departed from consistent support by the Government to the infrastructure development in Indonesia. Presidential Government Number 3 of 2016 has stipulated 225 infrastructure projects as National Priority Project and brought promising opportunity to IIGF's business within more-directed infrastructure development.

Initiatives that have been implemented in the last 6 years in preparing a governed, credible and accountable system including internal capacity building as well as introducing and ensuring benefit and added-value of the Guarantee to the Stakeholders that had contributed satisfactory result in 2016. As of September 2016, realization of guarantee agreement signing stage had been completed for 9 projects in 4 infrastructure sectors, and financial close for 3 projects including PLTU Batang Project, Central Java (CJPP) as a monumental event in IIGF's history.



Sebagai prioritas utama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, penyediaan infrastruktur memerlukan partisipasi swasta untuk mengisi gap pendanaan yang tidak bisa dipenuhi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebagaimana diindikasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Pemerintah akan membutuhkan pembangunan investasi untuk infrastruktur dalam kurun waktu hingga 2019 mendatang mencapai USD 358 miliar, dengan kekurangan pendanaan sekitar USD 131 miliar yang diharapkan datang dari sektor swasta yang salah satunya dengan skema KPBU.

Berdasarkan indikator pertumbuhan ekonomi tersebut, PT PII yakin bahwa pengembangan infrastruktur terus menjadi prioritas bagi Pemerintah. Sebagai badan usaha penjaminan infrastruktur, PT PII optimis untuk dapat berkontribusi lebih luas kepada kebijakan Pemerintah mendorong percepatan penyediaan infrastruktur nasional seiring dengan peningkatan kapasitas penjaminan yang dimiliki Perusahaan.

Tata Kelola Perusahaan

PT PII meyakini bahwa prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) merupakan aspek yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan dan keberlanjutan Perusahaan. Prinsip GCG memberikan kepastian terpenuhi dan terlindunginya hak dan kepentingan *stakeholders* maupun *shareholder*.

PT PII berkomitmen penuh melaksanakan GCG di seluruh tingkatan dan jenjang organisasi dengan berpedoman pada beberapa ketentuan yang ada sebagaimana tertuang dalam *Board Manual*, *Code of Conduct*, dan Pedoman GCG.

Di tahun 2016, PT PII secara nyata berupaya melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap struktur dan mekanisme penerapan GCG di Perusahaan. Komitmen PT PII tercermin dari telah dilakukannya *self-assessment* untuk mengetahui kualitas penerapan GCG di Perusahaan serta sebagai bagian dari pemenuhan PMK Nomor 88 Tahun 2015.

Perubahan Komposisi Direksi

Pada tahun 2016, komposisi Direksi PT PII mengalami perubahan sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan selaku Rapat Umum Pemegang Saham nomor KMK 465/KMK.06/2016 tanggal 16 Juni 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), dengan komposisi sebagai berikut:
Periode 1 Januari-16 Juni 2016

As main priority to support economic growth, infrastructure provision required private participation to bridge financing gap that can not be fulfilled by State Budget (APBN). As indicated in the National Medium-Term Development Plan 2015 - 2019, the Government will require investment development for infrastructure sector up to next 2019 achieving USD358 billion with financing shortage around USD131 billion that is expected from the private sector, namely through the PPP scheme.

Based on the economic growth indicator mentioned above, IIGF is confident that the infrastructure development will continuously become priority for the Government. As an infrastructure guarantee agency, IIGF is optimistic will contribute higher to the Government's policy in supporting acceleration of national infrastructure development concurrently with increasing capacity of guarantee provided by the Company.

Corporate Governance

IIGF believes that Good Corporate Governance (GCG) principle is a very important aspect to determine success and sustainability of the Company. GCG principle provides assurance on the fulfillment and protection of rights and interests of our Stakeholders and Shareholders.

IIGF is fully committed to implement GCG at entire organization level and structure by referring to existing regulations as disclosed in the Board Manual, Code of Conducts and Code of GCG.

In 2016, IIGF took concrete improvement and revision of the GCG structure and mechanism in the Company. Commitment of IIGF was reflected from the implementation of self-assessment to evaluate quality of GCG practice in the Company as well as to comply with PMK No. 88 of 2015.

Change in Board of Directors Composition

In terms of IIGF Board of Directors composition, there was a change in 2016 according to Finance Minister Decree as General Meetings of Shareholders No. KMK. 465/KMK.06/2016 dated June 16, 2016 regarding Board of Directors Members Appointment and Discharge in Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), with composition as follows:
January 1 - June 16, 2016 Period:

Direktur Utama : Sinthya Roesly
Direktur Keuangan & Manajemen Risiko : Armand Hermawan
Direktur Operasi : Yadi J. Ruchandi

Periode 16 Juni-31 Desember 2016

Direktur Utama : Sinthya Roesly
Direktur Keuangan & Manajemen Risiko : Armand Hermawan
Direktur Operasi : Salusra Satria

Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Sdr. Yadi J Ruchandi atas kontribusi yang diberikan selama menjabat sebagai Direktur Operasi Perusahaan.

Apresiasi

Akhir kata, atas nama Direksi, kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh karyawan PT PII atas dedikasi dan kerja keras yang ditunjukkan sehingga Perusahaan dapat melalui tahun 2016 yang penuh tantangan dengan pencapaian kinerja yang membanggakan.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham atas kepercayaan dan nasihat yang diberikan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh mitra bisnis dan regulator di Indonesia, atas dukungan dan kontribusi sepanjang tahun 2016.

Kami terus berkomitmen untuk maju mencapai pertumbuhan berkelanjutan demi mewujudkan visi dan misi Perusahaan.

President Director : Sinthya Roesly
Director of Finance & Risk Management : Armand Hermawan
Director of Operations : Yadi J. Ruchandi

June 16 - December 31, 2016 Period

President Director : Sinthya Roesly
Director of Finance & Risk Management : Armand Hermawan
Director of Operations : Salusra Satria

We herewith thank and highly appreciate Mr. Yadi J. Ruchandi for his contribution during his serving period as Operations Director in the Company.

Appreciation

To close, on behalf of the Board of Directors, We sincerely express our appreciation to all employees of IIGF for their dedication and hard work to bring the Company overcoming the challenging 2016 with proud performance achievement.

We also thank the Board of Commissioners and Shareholders for their given trust and advises. Our appreciation is also addressed to our business partners and regulatory bodies in Indonesia for support and contribution throughout 2016.

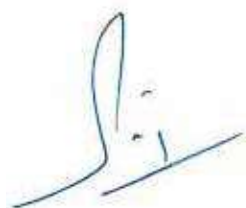
We will continuously maintain our commitment to achieve sustainable growth and achieve the Company's vision and mission.

Jakarta, 10 Maret 2017

Atas nama Direksi,

Jakarta, March 10, 2017

On behalf of the Board of Directors



Sinthya Roesly
Direktur Utama
President Director



Pernyataan Tanggung Jawab Laporan Tahunan 2016

Statement of Responsibility for 2016 Annual Report

Surat Pernyataan Tentang Tanggung Jawab Atas Kebenaran Isi Laporan Tahunan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Tahun Buku 2016

Laporan Tahunan ini, termasuk Laporan Tata Kelola Perusahaan, Laporan Keuangan dan Informasi terkait lainnya merupakan tanggung jawab Manajemen PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) dan telah disetujui oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi melalui penandatanganan masing-masing di bawah ini.

Accountability Statement of The Board of Commissioners and Directors for the 2016 Annual Report of Indonesia Infrastructure Guarantee Fund

The Annual Report, including the Corporate Governance Report, the Financial Report and other relevant information is the Indonesia Infrastructure Guarantee Fund management accountability and has been approved by all the undersigned members of the Board of Commissioners and Board of Directors below.

Jakarta, 10 Maret 2017
Jakarta, March 10, 2017

Dewan Komisaris, Board of Commissioners,



Ayu Sukorini
Komisaris
Commissioner



Luky Alfirman
Komisaris Utama
President Commissioner



Iskandar
Komisaris
Commissioner

Direksi, Directors,



Armand Hermawan
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
Director of Finance and Risk Management



Sinthya Roesly
Direktur Utama
President Director



Salusra Satria
Direktur Operasi
Director of Operations

Profil Perusahaan

Company Profile





Kehadiran PT PII diharapkan mampu mewujudkan akuntabilitas, transparansi serta konsistensi dalam pemberian jaminan dan pemrosesan klaim, guna meningkatkan kepercayaan investor untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek infrastruktur di Indonesia

Existence of IIGF is expected to build accountability, transparency as well as consistency in guarantee provision and claim processing to increase trust from the investors to participate in Indonesian infrastructure projects

54	Identitas Perusahaan Corporate Identity	84	Pejabat Senior Senior Management
55	Sejarah Singkat Perusahaan Brief History	94	Struktur dan Komposisi Pemegang Saham Shareholders Structure and Composition
55	Perubahan Nama Perusahaan Change to Company Name	95	Entitas Anak dan Entitas Asosiasi Subsidiary and Association
56	Jejak Langkah Perusahaan Milestones	95	Struktur Grup Perusahaan Corporate Group Structure
61	Bidang Usaha Line of Business	95	Kronologis Pencatatan Saham Shares Listing Chronology
62	Tujuan, Sasaran dan Strategi Perusahaan Objectives, Targets and Strategy	96	Kronologis Pencatatan Efek Lainnya Other Securities Listing Chronology
72	Struktur Organisasi Perusahaan Organization Structure	97	Informasi Website Perusahaan Official Website Information
76	Profil Dewan Komisaris Profile of the Board of Commissioners	98	Wilayah Operasional Perusahaan Operational Area
80	Profil Direksi Profile of the Board of Directors		



Identitas Perusahaan

Corporate Identity



Nama Perusahaan
Name of Company

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)/PT PII
Indonesia Infrastructure Guarantee Fund/IIGF

Bidang Usaha
Line of Business

Penjaminan Infrastruktur dalam proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)
Infrastructure Guarantee for Public-Private Partnership (PPP) Projects

Status Perusahaan
Status of the Company

Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
State-Owned Enterprise (SOE)

Kepemilikan
Ownership

Pemerintah Indonesia 100%
100% Owned by Government of Indonesia

Tanggal Pendirian
Date of Establishment

30 Desember 2009
December 30, 2009

Dasar Hukum Pendirian
Establishment Legal Framework

- Akta Pendirian oleh: Notaris Lolani Kurniati Irdham-Idroes, SH. LLM No. 29 tanggal 30 Desember 2009.
- Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir dirubah dengan Akta Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. No. 59 tanggal 11 April 2013.
- Establishment Deeds by Notary Lolani Kurniati Irdham-Idroes, SH. LLM No. 29 dated December 30, 2009
- Articles of Association has been amended several times with the latest amendment under Notarial Deeds by Aryanti Artisari, SH., M.Kn. No. 59 dated April 11, 2013.

Modal Dasar
Authorized Capital

Rp9.000.000.000.000, terdiri dari 9.000.000 lembar saham dengan nominal Rp1.000.000 per saham
Rp9,000,000,000,000 comprised of 9,000,000 shares with par value of Rp1,000,000 per share

Modal Disetor
Paid-in Capital

Rp7.000.000.000.000, terdiri dari 7.000.000 lembar saham dengan nominal Rp1.000.000 per saham
Rp7,000,000,000,000 comprised of 7,000,000 shares with par value of Rp1,000,000 per share

Jumlah Karyawan
Total Employees

91 Orang
91 employees

Alamat Kantor Pusat
Head Office Address

Capital Place, Lt 7 & 8
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 18
Jakarta 12710 – Indonesia
Telp. 021-5795 0550, Fax. 021-5795 0040

Capital Place, Lt 7 & 8
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 18
Jakarta 12710 – Indonesia
Telp. 021-5795 0550, Fax. 021-5795 0040

Website

www.iigf.co.id
Berisikan antara lain/Contents, among others:
- Profil Perusahaan/Company Profile
- Profil Dewan Komisaris dan Direksi/ Board of Commissioners and Board of Directors Profile
- Model Bisnis dan Layanan Perusahaan/Business Model and Services
- Struktur Pemegang Saham/Shareholders Structure
- Laporan Tahunan 5 Tahun Terakhir/5 Recent Years Annual Reports
- Dokumen Good Corporate Governance/Good Corporate Governance Documents



Sejarah Singkat Perusahaan

Brief History

Sebagai bagian dari upaya Pemerintah untuk mendukung percepatan pengembangan ekonomi Indonesia, Kementerian Keuangan telah menghasilkan beberapa inisiatif dan kebijakan yang dirancang untuk memberikan dukungan fiskal pada proyek infrastruktur pemerintah yang dibiayai oleh swasta. Sebagai bagian dari inisiatif tersebut, Kementerian Keuangan membentuk PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)/PT PII pada tanggal 30 Desember 2009 sebagai layanan Satu Pintu (*Single Window*) dalam mengevaluasi, menyusun struktur penjaminan serta memberikan jaminan bagi proyek infrastruktur berskema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).

Penjaminan PT PII dimaksudkan untuk meningkatkan kepastian dalam mencapai perolehan pembiayaan (*financial close*) proyek-proyek KPBU, melalui peningkatan kelayakan kredit atau *bankability*. Penjaminan infrastruktur sebagai bentuk dukungan fiskal dari Kementerian Keuangan, dimaksudkan untuk memberikan kepastian kepada swasta terkait komitmen Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dalam memenuhi kewajiban finansialnya dalam perjanjian KPBU.

Kehadiran PT PII diharapkan mampu mewujudkan akuntabilitas, transparansi serta konsistensi dalam pemberian jaminan dan pemrosesan klaim, guna meningkatkan kepercayaan investor untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek infrastruktur di Indonesia, namun dengan tetap menjaga kepentingan Pemerintah, utamanya terkait kewajiban kontinjensi yang mungkin timbul kepada Pemerintah.

Untuk menjalankan fungsi penjaminan sebagai bidang usaha utama, hingga saat ini, Pemerintah telah melakukan penyertaan modal dari APBN ke PT PII sebesar Rp6 triliun. PT PII secara bertahap akan mengurangi ketergantungan pada APBN dan akan meningkatkan kapasitas penjaminannya melalui kerja sama dengan berbagai institusi keuangan, baik institusi multilateral (Bank Dunia, ADB, IDB, MIGA), institusi bilateral, dan lainnya.

As part of Government's initiative to support acceleration of Indonesian economic development, Ministry of Finance has formulated couples of initiatives and policies to provide fiscal support in Government infrastructure project backed by private sector. As part of the initiatives, Ministry of Finance established Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF) on December 30, 2009 as Single Window to evaluate, formulate guarantee structure and provide guarantee for infrastructure project with Public-Private Partnership (PPP) scheme.

Guarantee from IIGF is intended to give assurance in achieving financial close for PPP projects through improvement of bankability. Infrastructure guarantee as fiscal support from Ministry of Finance aims to give assurance to private sector in the course of commitment from Supervisor of Contracting Agencies (CA) in fulfilling financial liabilities stated in the PPP contract.

Existence of IIGF is expected to build accountability, transparency as well as consistency in guarantee provision and claim processing to increase trust from the investors to participate in Indonesian infrastructure projects, while keep protecting interests of the Government that are primarily related to possibility of contingency liability with the Government.

To exercise guarantee function as our primary business line, the Government has invested capital from State Budget amounted Rp6 trillion to IIGF nowadays. IIGF will gradually reduce dependency on State budget and will increase guarantee capacity through partnership with various financial institutions, including multilateral (World Bank, ADB, IDB, MIGA), bilateral and other institutions.



Perubahan Nama Perusahaan

Change to Company Name

Sejak pertama kali berdiri tanggal 30 Desember 2009, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)/PT PII tidak pernah mengalami perubahan nama.

Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF) has never changed its name since its establishment on December 30, 2009.

Jejak Langkah Perusahaan Milestones

2009

Pembentukan PT PII

Pada tanggal 30 Desember 2009, Pemerintah Indonesia mendirikan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)/PT PII sebagai sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Penyertaan Modal Negara sebesar Rp1 triliun sesuai PP No. 35 tahun 2009.

Establishment of IIGF

On December 30, 2009, the Government of Indonesia established Indonesia Infrastructure Guarantee Fund or IIGF, as a State-Owned Enterprise (SOE) through the Placement of State Capital of Rp1 Trillion in accordance with the PP No. 35 of 2009, as authorized, issued and fully paid capital.

2010

Peresmian Operasional PT PII

Pada tanggal 11 Mei 2010, PT PII secara resmi mulai beroperasi sesuai mandatnya untuk menyediakan penjaminan bagi proyek-proyek infrastruktur berskema KPBU sebagai salah satu upaya percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

IIGF Operations Launching

On May 11, 2010, IIGF launched its official operation in accordance with its mandate to provide guarantee for infrastructure projects using Public Private Partnership (PPP) scheme as an effort to accelerate Indonesia's infrastructure development.

Perpres No. 78/2010 dan PMK 260/2010

Terbitnya Perpres No. 78/2010 tgl 21 Desember 2010 dan PMK No. 260/2010 tanggal 31 Desember 2010 menjadi Pedoman PT PII selaku BUPI untuk menjamin proyek infrastruktur.

Presidential Regulation No. 78/2010 and PMK No. 260/2010

Issuance of Presidential Regulation No. 78/2010 on December 21, 2010 and PMK No. 260/2010 on December 31, 2010 were treated as Guideline for IIGF as Infrastructure Guarantee Business Entity (BUPI) to back infrastructure project.

Penambahan PMN Tahun 2010

Pada akhir Desember 2010, Pemerintah RI menambah PMN di PT PII sebesar Rp1 triliun merujuk pada PP No. 88/2010 sehingga total PMN Perusahaan menjadi Rp2 triliun.

Additional Government Investment (PMN) 2010

As end of 2010, Government of RI injected additional PMN of Rp1 trillion to IIGF referring to PP No. 88/2010 that brought total PMN achieving Rp2 trillion.



2011

- Acuan Alokasi Risiko**
Maret 2011, PT PII menerbitkan dokumen Acuan Alokasi Risiko yang berisi kategori dan distribusi risiko infrastruktur yang akan menjadi rujukan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam skema KPBU untuk proyek infrastruktur.
- PLTU Jawa Tengah**
Tanggal 6 Oktober 2011, PT PII menandatangani Perjanjian Penjaminan untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jawa Tengah 2 x 1.000 MW dengan nilai investasi +/- US \$4 miliar.
- Penambahan PMN Tahun 2011**
Pada tanggal 31 Desember 2011, PT PII memperoleh PMN sebesar Rp1,5 triliun dari Pemerintah RI sesuai dengan PP No. 55/2011 untuk memperkuat kapasitas penjaminan Perusahaan menjadi total Rp3,5 triliun.
- Risk Allocation Guideline**
In March 2011, IIGF published the Risk Allocation Guideline which disclosed the distribution and categories of infrastructure risks, as a guideline for the involving parties in infrastructure projects under PPP scheme.
- Central Java Power Plant**
On October 6, 2011, IIGF signed the Guarantee Agreement for the Power Plant project (PLTU) of 2 x 1.000 MW in Batang, Central Java, with total investment value of +/- USD4 billion.
- Additional Government Investment 2011**
On December 31, 2011, the Government of Indonesia injected additional Government Investment (PMN) of Rp1.5 trillion to IIGF under PP no. 55/2011, to strengthen the guarantee capacity of the Company.

2012

- Penyertaan Modal Negara 2012**
Perusahaan telah menerima PMN sebesar Rp1 triliun pada tanggal 17 Desember 2012 sehingga total kapasitas penjaminan PT PII menjadi Rp4,5 triliun.
- Penandatanganan Nota Kesepahaman**
PT PII menandatangani Nota Kesepahaman dengan PT PLN (Persero) untuk persiapan proyek PLTU Mulut Tambang Sumatera Selatan 9a, 9b & 10.
- World Bank Loan**
Stand-by loan facility dari World Bank efektif pada tanggal 19 November 2012 sejumlah US \$29.6 juta dapat dipergunakan apabila terjadi klaim atas proyek yang dijamin PT PII dan peningkatan kapasitas institusi atau disebut IGFP.
- Government Investment 2012**
the Company received Rp1 trillion Government Investment (PMN) on December 17, 2012 that brought IIGF total lending capacity to Rp4.5 trillion.
- Memorandum of Understanding Signing**
IIGF signed Memorandum of Understanding with PT PLN (Persero) for the preparation of PLTU Mulut Tambang 9a, 9b & 10 projects, South Sumatera.
- World Bank Loan**
Stand-by loan facility from World Bank that was effective on November 19, 2012 amounted USD29.6 million that was ready to be used for any claim upon projects guaranteed by IIGF and to strengthen institutional capacity or IGFP.

2013

- **Peringkat Kredit PT PII BBB-**
PT PII memperoleh peringkat kredit BBB- (*stable outlook*) dari *Fitch Ratings* sebagai kredibilitas tambahan bagi PT PII di mata investor dan kreditor.
- **IIGF Credit Rating BBB-**
IIGF was awarded BBB- (*Stable Outlook*) Credit Rating by Fitch Ratings as additional credibility for IIGF among the investors and creditors.

2014

- **Proyek SPAM Umbulan Jawa Timur**
PT PII menerbitkan Surat Dukungan (*Letter of Intent*) atas penjaminan proyek SPAM Umbulan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK).
- **Project SPAM Umbulan, East Java**
IIGF issued Letter of Intent on SPAM Umbulan project guarantee for East Java Provincial Government as Contracting Agencies (CA).
- **Buku Optimisme KPBU**
PT PII meluncurkan Buku Optimisme KPBU di Indonesia yang membahas mengenai infrastruktur di Indonesia, implementasi KPBU dan peranan PT PII di dalam pembangunan infrastruktur.
- **Optimism of PPP Book**
IIGF launched Optimism of PPP in Indonesia Book to discuss infrastructure in Indonesia, implementation of PPP and contribution of IIGF in infrastructure development.
- **Perjanjian Kerjasama dengan Universitas**
PT PII melalui IIGF Institute menandatangani Nota Kesepahaman dengan Universitas Sriwijaya (18 Agustus 2014) dan Universitas Hasanuddin (17 Oktober 2014) untuk kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, peningkatan kapasitas serta kemitraan dalam bina lingkungan, sosial dan masyarakat.
- **Partnership with Universities**
Through IIGF Institute, IIGF signed memorandum of understanding with Universitas Sriwijaya Palembang (August 18, 2014) and Universitas Hasanuddin Makassar (October 17, 2014) for partnership in Education, Research, Community Service, Capacity Building as well as Partnership in Environment, Social and Community Development.



2015

• **Terbitnya Perpres No. 38/2015**

Terbitnya Perpres No. 38/2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur memperluas sektor proyek infrastruktur berskema KPBU yang dapat dijamin PT PII menjadi 19 sektor termasuk sektor infrastruktur sosial.

• **Construction Kick Off PLTU Jawa Tengah (CJPP)**

Pada tgl 28 Agustus 2015 telah dilakukan *Construction Kick Off* Proyek PLTU Jawa Tengah yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Proyek ini merupakan proyek KPBU pertama di Indonesia yang mendapatkan penjaminan PT PII.

• **Penerbitan Pernyataan Kesediaan Penjaminan untuk Proyek Jalan Tol Soreang-Pasir Koja**

Penerbitan pernyataan kesediaan penjaminan (*In-Principle Approval/IPA*) PT PII untuk proyek Jalan Tol Soreang-Pasir Koja di Bandung, Jawa Barat pada bulan Mei 2015 yang dikembangkan oleh Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian PUPERA.

• **Penerbitan Pernyataan Kesediaan Penjaminan untuk Proyek Palapa Ring**

PT PII menerbitkan Pernyataan Kesediaan Penjaminan IPA untuk proyek telekomunikasi Palapa Ring yang dikembangkan oleh Kementerian Kominfo pada 20 November 2015.

• **Pembentukan UNIID**

PT PII melalui IIGF Institute memfasilitasi pembentukan *University Network for Indonesia Infrastructure Development (UNIID)* pada 16 Desember 2015 beranggotakan 33 Universitas Nasional untuk berpartisipasi mendorong pengembangan infrastruktur nasional.

• **Peluncuran Masyarakat Infrastruktur Indonesia (MII)**

Tanggal 17 Desember 2015, PT PII bersama para ahli di bidang infrastruktur meresmikan "Masyarakat Infrastruktur Indonesia/MII" sebagai suatu lembaga profesional untuk membahas berbagai hal terkait infrastruktur di Indonesia.

• **Issuance of Presidential Regulation No. 38/2015**

Issuance of Presidential Regulation No. 38/2015 on Public-Private Partnership in Infrastructure Support to expand IIGF capacity guarantee for infrastructure project sector with PPP scheme up to 19 sectors including social infrastructure sector.

• **PLTU Jawa Tengah – Batang (CJPP) Construction Kick Off**

PLTU Batang – Central Java Project Construction Kick Off was done on August 28, 2015 attended by President Joko Widodo. The project is the first PPP project in Indonesia with guarantee facility from PT IIGF.

• **Issuance of In-Principle Approval (IPA) for Soreang – Pasir Koja Toll Road Project**

Issuance of IIGF In-Principle Approval (IPA) for Soreang – Pasir Koja Toll Road Project in Bandung, West Java in May 2015 that is developed by Toll Road Manager Agency, Ministry of Public Work and Public Housing.

• **Issuance of In-Principle Approval for Palapa Ring Project**

IIGF issued In-Principle Approval (IPA) for Palapa Ring Telecommunication Project developed by Ministry of Communication and Information on November 20, 2015.

• **Establishment of UNIID**

Through IIGF Institute, IIGF facilitated establishment of University Network for Indonesia Infrastructure Development (UNIID) on December 16, 2015, with 33 national universities as members to participate in supporting national infrastructure development.

• **Launching of Indonesia Infrastructure Community (IIC)**

On December 17, 2015, IIGF collaborated with infrastructure experts launched "Indonesia Infrastructure Community/IIC" as a professional organization to discuss various infrastructure-related issues in Indonesia.

2016

- Ekspansi Penjaminan PT PII**
 Ekspansi penjaminan PT PII di tahun 2016 tercermin dari telah dijaminnya 4 proyek di Sektor Jalan Tol (Batang-Semarang, Balikpapan-Samarinda, Pandaan-Malang, Manado-Bitung), 3 proyek di sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi/ICT (Palapa Ring Paket Barat, Tengah, dan Timur), 1 proyek di Ketenagalistrikan (PLTU Jawa Tengah), dan 1 proyek di Sektor Air Minum (SPAM Umbulan Jawa Timur). Hingga tahun 2016, terdapat 7 (tujuh) proyek dalam proses penjaminan PT PII.
- Financial Close PLTU Jawa Tengah 2 x 1.000 MW**
 Pada tanggal 6 Juni 2016, telah dicapai tahap *financial close* untuk proyek PLTU Batang Jawa Tengah berkapasitas 2 x 1.000 MW dengan nilai investasi sekitar US\$4 miliar (~Rp52 triliun). Proyek ini telah mendapatkan penjaminan pemerintah melalui Kementerian Keuangan bersama dengan PT PII.
- Penandatanganan MoU dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara**
 PT PII menandatangani kesepakatan bersama dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) pada tanggal 2 Agustus 2016 untuk saling bersinergi dalam memberikan pendampingan hukum demi mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia.
- Financial Close Proyek Palapa Ring Barat**
 Pada tanggal 25 Juli 2016, telah dilaksanakan *financial close* proyek Palapa Ring Barat yang merupakan proyek KPBU pertama dengan skema pembayaran *Availability Payment* (AP) dan memperoleh penjaminan PT PII.
- Financial Close Proyek Palapa Ring Tengah**
 Pada tanggal 29 September 2016, telah dilaksanakan *financial close* proyek Palapa Ring Tengah yang memperoleh penjaminan pemerintah melalui PT PII.
- Terbitnya PP No. 50 Tahun 2016 terkait Perluasan Mandat PT PII**
 Terbitnya PP No. 50 Tahun 2016 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur memperluas mandat PT PII untuk dapat pula menjamin proyek-proyek infrastruktur di luar proyek KPBU.
- IIGF Guarantee Expansion**
 In 2016, expansion of IIGF Guarantee was seen from guarantee facilities to four toll road projects (Batang – Semarang, Balikpapan – Samarinda, Pandaan – Malang, Manado – Bitung), three Information and Communication Technology (ICT) projects (Palapa Ring West, Central and East Packages), one Electricity Project (PLTU Batang Central Java), and one Drinking Water Project (SPAM Umbulan, East Java). As of 2016, there were 7 (seven) projects under IIGF guarantee process.
- PLTU Batang Jawa Tengah 2 x 1,000 MW Financial Close**
 On June 6, 2016, Financial Close phase for PLTU Batang Central Java project with capacity of 2 x 1,000 MW and investment value approximately US\$4 billion (Rp52 trillion) had been achieved. The project was granted government guarantee facility in collaboration between Finance Ministry and IIGF.
- MoU Signing with Civil and State Administration Solicite General**
 IIGF signed Memorandum of Understanding with Civil and State Administration Solicite General (Jamdatun) on August 2, 2016 to build synergy in providing legal assistance to accelerate infrastructure development in Indonesia.
- Palapa Project West Ring Financial Close**
 On July 25, 2016, Palapa Ring Project West Ring Financial Close was done as the first PPP Project under Availability Payment (AP) scheme and guarantee facility from IIGF.
- Palapa Project Central Ring Financial Close**
 On September 2016, Palapa Ring Project Central Ring Financial Close was done with government guarantee facility via IIGF.
- Issuance of PP No. 50 of 2016 concerning Expansion to IIGF Mandate**
 Issuance of PP No. 50 of 2016 as amendment to Government Regulation No. 35 of 2009 regarding Republic of Indonesia Government Investment to Establish Perusahaan Perseroan (Persero) in Infrastructure Guarantee sector, expanding mandate of IIGF to guarantee non-PPP infrastructure projects.



Bidang Usaha

Line of Business

Sesuai Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 3, bidang usaha PT PII adalah sebagai berikut:

1. Penjaminan kewajiban finansial pemerintah dalam PPP Agreement.
2. Kerjasama dengan pihak lain termasuk lembaga keuangan multilateral dalam rangka pelaksanaan pemberian penjaminan.
3. Usaha patungan atau penyertaan modal pada badan hukum lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sejenis dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
4. Jasa konsultasi dan penyediaan informasi untuk meningkatkan kualitas alokasi risiko dan struktur pembiayaan proyek dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Perusahaan.
5. Kegiatan lainnya untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan sesuai peraturan-perundangan.

Dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, ruang lingkup yang diatur dalam Rancangan Peraturan Pemerintah adalah ketentuan mengenai maksud dan tujuan pendirian PT PII adalah untuk melakukan penjaminan di bidang infrastruktur dan kegiatan terkait penjaminan di bidang infrastruktur, meliputi:

1. Penjaminan pada proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di bidang infrastruktur.
2. Penjaminan pada proyek di luar skema KPBU meliputi antara lain: penjaminan atas penugasan kepada BUMN dan/atau BUMD dan penjaminan atas pinjaman BUMN dan/atau BUMD dari lembaga Keuangan.
3. Kegiatan terkait penyediaan penjaminan antara lain penilaian kelayakan, pemantauan risiko dan dukungan fasilitasi penyiapan proyek infrastruktur.

Pursuant to Articles of Association, Business Line of IIGF includes:

1. Government financial liability guarantee under PPP Agreement.
2. Partnership with other parties as the guarantee implementation.
3. Joint venture/investment with other legal entities with similar vision and mission.
4. Consultancy and information services to improve quality of risk allocation and project financing structure to achieve purpose and objectives of the Company.
5. Other activities to achieve purpose and objective of the Company in compliance with the Law.

By referring to Law Number 19 of 2003 in State-Owned Enterprise, the scope that is regulated in Government Regulation Draft refers to provision about purpose and objectives of IIGF establishment that is to provide guarantee in infrastructure sector and guarantee-related activities in infrastructure sector, including:

1. Guarantee on Public-Private Partnership (PPP) Project in Infrastructure Sector
2. Guarantee on Non-PPP Scheme Project, including: Guarantee on Assignment to SOE and/or ROE and Guarantee on SOE and/or ROE loans from Financial Institution.
3. Activity related to guarantee provision, among others, feasibility appraisal, risk monitoring and infrastructure project preparation facility support.

Tujuan, Sasaran dan Strategi Perusahaan

Objectives, Targets and Strategy

Tujuan Perusahaan

1. Meningkatkan kelayakan kredit (*creditworthiness*) dan kualitas proyek-proyek infrastruktur KPBU melalui kerangka evaluasi dan pengelolaan klaim atas penjaminan.
2. Meningkatkan tata kelola dan transparansi pelaksanaan penyediaan penjaminan.
3. Memfasilitasi keberhasilan transaksi bagi PJKP (Kementerian, BUMN, Pemerintah Daerah) melalui penyediaan penjaminan bagi proyek KPBU yang distruktur dengan baik.
4. Memagari kewajiban kontinen Pemerintah dan meminimalkan kejutan langsung kepada APBN.

Objectives

1. To improve bankability and quality of PPP infrastructure projects through evaluation and claim management on the guarantee facility.
2. To improve governance and transparency in the implementation of guarantee facility.
3. To facilitate successful transactions for Contracting Agencies (i.e. Ministries, SOEs, regional governments) by providing guarantees for well-structured PPP projects.
4. To ring-barrier government contingent liability and minimize direct bump against the State Budget.

Sasaran Perusahaan

Sejalan dengan tujuan Perusahaan untuk memberikan penjaminan pada proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha di bidang infrastruktur, maka tahun 2016 menjadi momentum Perusahaan untuk menorehkan proyek-proyek yang berhasil dijamin PT PII. Momentum ini juga diharapkan dapat menjadi suatu titik tolak pengakuan pengembangan proyek KPBU. Untuk itu, beberapa sasaran yang hendak dicapai dengan berfokus pada penjaminan proyek adalah sebagai berikut:

1. Proyek yang Dapat Mencapai Tahapan Penjaminan.
Pada tahun 2016, PT PII memproyeksikan akan memperoleh pendapatan Penjaminan dengan dasar asumsi sebagai berikut:
 - a. Proyek-proyek yang telah berproses di tahun 2015 dan akan mencapai tahapan penyelesaian proses lelang pada tahun 2016. Adapun proyek-proyek tersebut diperkirakan sebagai berikut:
 - i) Proyek CJPP sebagai proyek yang sudah ditandatangani Perjanjian Penjaminannya dan telah diakui sebagian *fee*-nya pada pendapatan penjaminan pada tahun 2011, menjadi salah satu proyek yang diperkirakan akan memberikan kontribusi yang signifikan pada pendapatan penjaminan pada saat terjadinya perolehan pembiayaan (FC).

Targets

In line with general objectives of the Company to provide guarantee for Public-Private Partnership in Infrastructure Sector, 2016 was viewed as momentum to book projects guaranteed by IIGF. This is expected to be a milestone of project development under PPP scheme. Therefore, several targets are formulated to be achieved focusing on guarantee facility for the projects, including:

1. Project Achieving Guarantee Phase
In 2016, IIGF projected will acquire guarantee revenue with following assumptions:
 - a. Projects operating in 2015 and will achieve tender completion process in 2016. The projects forecast is below:
 - i) CJPP Project as a project with signed fee agreement on guarantee revenue in 2011, as a project that is estimated to give significant contribution to guarantee revenue during the Financial Close (FC) phase.



- ii) Proyek *Minemouth* Sumsel 9 & 10. Proyek ini telah memasuki tahapan penyerahan dokumen penawaran oleh peserta lelang (*bid submission*). Pada saat PLN selaku PJPK melanjutkan proses ini, maka dalam waktu tiga bulan akan dapat ditentukan pemenang lelang dan penandatanganan perjanjian penjaminan akan dapat dilaksanakan.
- iii) Proyek Air Minum Way Sekampung. Memasuki tahapan penerbitan *Request for Proposal*, proyek ini diestimasi dapat mencapai tahapan penentuan pemenang lelang pada awal kuartal pertama tahun 2016, sehingga dapat mencapai tahapan penandatanganan perjanjian penjaminan.
- iv) Proyek Air Minum Umbulan. Memasuki tahapan penerbitan, proyek ini diestimasi akan dapat mencapai tahapan penentuan pemenang lelang pada awal kuartal pertama tahun 2016, sehingga dapat mencapai tahapan penandatanganan perjanjian penjaminan.
- v) Proyek Palapa Ring. Proyek ini pada bulan Oktober 2015 akan menerbitkan *Request for Proposal*, sehingga sesuai dengan jadwal lelang yang disampaikan oleh PJPK, penetapan pemenang lelang dapat dilakukan pada akhir tahun 2015 dan penandatanganan perjanjian penjaminan pada awal kuartal pertama tahun 2016 juga.
- vi) Proyek Jalan Tol Manado-Bitung. Proyek ini baru akan diproses pada kuartal ke-empat tahun 2015 dan proses lelang diharapkan dapat diselesaikan pada kuartal pertama tahun 2016. Sehingga dapat diperkirakan bisa mencapai tahapan penandatanganan perjanjian penjaminan pada tahun 2016.

Keseluruhan asumsi di atas menggunakan informasi terbaik yang tersedia pada saat Perusahaan menyusun RKAP. Pada pelaksanaannya, hal tersebut sangat bergantung kepada kondisi, keadaan PJPK selaku pemilik proyek dan kesiapan dan minat pihak swasta untuk melaksanakan proyek-proyek tersebut. Sesuai perkembangannya, PT PII selalu melakukan penyesuaian

- ii) Minemouth 9 & 10 Project South Sumatera. The project has entered tender document submission by the tender participants (*bid submission*). PLN as CA is currently continuing this process and will choose the tender winner and sign guarantee agreement within the next three months.
- iii) Way Sekampung Drinking Water Project. The project has entered Request for Proposal phase, the project is estimated to achieve final tender winner phase at the first quarter of 2016 that will enter guarantee agreement signing stage.
- iv) Umbulan Drinking Water Project. The project has entered issuance phase, and is estimated will arrive at final tender winner phase at the first quarter of 2016 that will enter guarantee agreement signing stage.
- v) Palapa Ring Project. In October 2015, this project would issue Request for Proposal, according to tender schedule submitted by CA, final tender winner announcement would be done as end of 2015 and the agreement signing ceremony would also be held at first quarter of 2016.
- vi) Manado – Bitung Toll Road Project. This new project would be processed at fourth quarter of 2015 and tender process was expected to be done by the first quarter of 2016. The project was expected to enter agreement signing ceremony in 2016.

Above assumptions were overall utilizing best information available during the Budget Plan preparation process. In the implementation phase, the execution relies on condition and situation of the CA as Project owner and readiness as well as interest of private sector to execute the projects. During the progress, IIGF keeps adjusting with the externalities and presenting report to

dengan kondisi eksternalitas tersebut dan melaporkan secara berkala kepada Pemegang Saham terkait kemajuan masing-masing proyek.

2. Proyek Masih dalam Pemrosesan Hingga Akhir Tahun.

Selain proyek-proyek yang disebutkan di atas, Perusahaan secara aktif akan melakukan upaya pemrosesan beberapa proyek yang saat ini telah diidentifikasi dan juga proyek yang masih dalam target penentuan. Masing-masing proyek ini apabila dikelompokkan dalam sektornya adalah sebagai berikut:

a. Sektor Air Minum

Pada sektor air minum, contoh-contoh proyek yang akan dilakukan pemrosesan antara lain, Proyek Air Semarang Barat, Proyek Air Pondok Gede, Proyek Air Kota Palu. Khusus Proyek Air Semarang Barat walau telah dalam pemrosesan sejak awal tahun 2015, proyek ini diperkirakan mundur ke tahun 2017 dikarenakan belum dapat dikonfirmasi status pengembangan proyek ini apakah akan tetap melalui mekanisme KPBU sebagaimana awal dibentuk atau dengan anggaran belanja negara.

b. Sektor Jalan Tol

Beberapa contoh proyek yang sudah diidentifikasi hingga saat ini berdasarkan informasi yang masuk dari BPJT, antara lain adalah:

- i) Proyek Jalan Tol Cisumdawu;
- ii) Proyek Jalan Tol Serpong-Balaraja;
- iii) Proyek Jalan Tol Batang-Semarang; dan
- iv) Proyek Jalan Tol Pandaan-Malang.

c. Sektor Sarana & Prasarana Olahraga dan Kesenian.

Sektor ini adalah sektor baru yang digagas melalui Perpres 38/2015. Contoh dari proyek yang telah teridentifikasi antara lain adalah proyek pembangunan stadion *Aquatic* di Bali.

d. Sektor Persampahan & Limbah.

Model contoh proyek yang sudah diinisiasi pada tahun 2015 ini diperkirakan dapat dilakukan pemrosesannya pada tahun 2016, antara lain adalah Proyek Sistem Limbah Jakarta dan Proyek Persampahan Jakpro.

e. Sektor Fasilitas Perkotaan.

Sektor baru yang digagas melalui Perpres 38/2015. Saat ini, contoh-contoh target proyek yang dapat dikembangkan antara lain adalah proyek sistem lampu jalan Kota Bandung dan juga Proyek Rapid Bus Bandung.

the Shareholders periodically regarding progress of each project.

2. End of Year Project Under Progress

Besides above projects, the Company also done processing efforts actively to existing identified projects as well as other projects under decision target. Project classification by sector is below:

a. Drinking Water Sector.

In the drinking water sector, some of projects under progress are including West Semarang Water Project, Pondok Gede Water Project, Palu City Water Project. The West Semarang Water Project, particularly, despite had been processed since beginning of 2015, the project is estimated to be delay to 2017 due to unconfirmed project development status whether will remain under PPP mechanism as stated at the initial establishment or finance with State Budget.

b. Toll Road Sector.

Some of existing identified projects based on information from BPJT are including:

- i) Cisumdawu Toll Road Project;
- ii) Serpong – Balaraja Toll Road Project;
- iii) Batang – Semarang Toll Road Project; and
- iv) Pandaan – Malang Toll Road Project.

c. Sports & Art Facilities & Infrastructures Sector.

The Sector is new sector pioneered under Perpres 38/2015. Some of the identified projects including Aquatic Stadium development project in Bali.

d. Garbage & Waste Sector. Sampling project that had been initiated in 2015 and had the execution forecasted in 2016 were including Jakarta Waste System Project and Jakpro Waste Project.

e. Urban Facility Sector.

A new sector initiated under Perpres No. 38/2015. Example of currently developed project target including Bandung City Street Light System and Bandung Rapid Bus Project.



f. Sektor-sektor dengan skema *Availability Payment*.

Salah satu upaya percepatan pembangunan infrastruktur yang terus digulirkan oleh Kementerian Keuangan adalah pengembangan skema *Availability Payment* (AP). PT PII bersama Kementerian Keuangan telah melakukan sosialisasi dan mencari proyek-proyek yang dapat dikembangkan dengan skema ini. Hingga saat ini, telah diidentifikasi beberapa contoh proyek AP, antara lain; pengembangan Proyek Jalan Non-Tol Medan dan Proyek Pengembangan Rumah Sakit di Medan. Keduanya akan menjadi proyek percontohan dalam pengembangan skema *Availability Payment*.

f. Sectors under *Availability Payment* scheme. One of the latest infrastructure development acceleration efforts driven by Ministry of Finance was *Availability Payment* scheme development. PT PII and Ministry of Finance has done socialization and seek targeted projects to be developed under this scheme. Several projects example have been identified recently including Medan Non-Toll Road Project Development and Hospital Development Project in Medan. Both will be treated as pilot projects for development using *Availability Payment* scheme.

Sesuai perkembangannya, PT PII akan selalu melakukan penyesuaian, termasuk melakukan perubahan-perubahan target proyek dan sektor yang dapat diproses sesuai permintaan dari potensial PJPK selama tidak melebihi batas pagu anggaran yang diberikan pada pos aset tangguhan tahun berjalan.

During the progress, IIGF keeps adjusting with changing project targets and potential sectors to be processed based on potential demand from CA as long not exceeding budget limit stipulated in current year deferred assets account.

3. Proyek Penjaminan dari Kegiatan Perluasan Bisnis dan Mandat (non-KPBU).

Tahun 2016 adalah tahun pertama PT PII dalam melakukan implementasi dari upaya perluasan mandat dan kegiatan bisnis usaha yang digagas sejak awal tahun 2015. Persiapan secara operasional akan dilakukan dari pemenuhan kebutuhan sumber daya hingga tahapan manual operasi dan proses bisnisnya. Dan sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa mengacu kepada kerangka peraturan perundangan yang berlaku saat ini, ruang lingkup PT PII masih terbatas dan belum secara aktif dapat mengupayakan pemrosesan suatu proyek, namun sebatas penugasan yang dapat diberikan pemerintah dalam memberikan penjaminan atas beberapa pinjaman-pinjaman BUMN yang menyelenggarakan pembangunan proyek infrastruktur.

3. Guarantee Project from Business Expansion and Mandatory (Non-PPP) Activities

2016 was the first year of IIGF implementing expansion of mandatory initiative and business activities that had been initiated since beginning of 2015. Operational preparation will be done from resource fulfillment until business operational manual and process. As explained previously, referring to current prevailing Law, scope of IIGF is limited and has not actively driven processing phase of a project, where limitedly only assignment from the Government in providing guarantee for Loans of SOEs who performed infrastructure project development.

Saat ini, berdasarkan informasi yang diterima, proyek-proyek yang berpotensi untuk dapat dijamin antara lain adalah:

- PT Utama Karya untuk Proyek Trans-Sumatera, dengan ruas Pekanbaru – Dumai.
- PT PLN untuk proyek transmisi yang didanai JICA.

According to available information, recently, projects with potential guarantee plan are:

- PT Utama Karya for Trans-Sumatera Project in Pekanbaru – Dumai section.
- PT PLN for transmission project financed by JICA.

Proyek-proyek di atas masih akan bergantung dari kesiapan PJPK dalam memulai pembangunan proyek, ketersediaan dana dari pihak pemberi pinjaman dan penugasan dari Pemerintah kepada PT PII dalam menjamin proyek-proyek tersebut pada akhirnya.

Above projects will heavily rely on readiness of CA in starting the project development, availability of fund from the creditors and assignment from the Government to IIGF in providing guarantee facility to those projects, at the end.

4. Pengembangan Sektor.

PT PII juga terus berupaya untuk memastikan *pipeline* proyek yang dapat diproses tidak terhenti dalam lintasan satu atau dua tahun ke depan. Sehingga dalam hal ini, PT PII secara berkesinambungan melakukan upaya nyata berupa pengembangan sektor. Sektor yang saat ini diperkirakan belum memiliki eksposur yang memadai untuk skema KPBU namun memiliki potensi yang besar ke depan, mudah untuk direplikasi menjadi target utama pengembangan sektor. Adapun sektor-sektor tersebut antara lain adalah sektor Pendidikan, Pengembangan Kawasan, Kesehatan, Lembaga Masyarakat, Sarana & Prasarana olahraga dan Fasilitas Kota.

Pengembangan sektor ini bertujuan untuk melakukan *review* terhadap *regulatory*, aspek kebijakan dan institusi terkait, identifikasi masalah yang akan terjadi, hambatan dan kebutuhan-kebutuhan di masing-masing sektor, *stakeholder mapping*, serta identifikasi model bisnis awal yang bisa ditawarkan.

Diharapkan pada tahun 2017, akan muncul proyek-proyek yang sudah bisa diproses untuk dilakukan dengan skema KPBU.

Di luar dari yang telah disebutkan di atas, PT PII telah dimintakan persiapan mega proyek *refinery*/kilang yang diperkirakan akan membutuhkan penjaminan. Hal ini mengharuskan PT PII untuk mengkaji dan menganalisa kepatuhan atas peraturan perundang-undangan yang ada saat ini, sebelum dapat melaksanakan hal tersebut.

5. Penyiapan Proyek.

Sebagai salah satu upaya tambahan guna mempercepat kesiapan proyek-proyek yang dapat dibangun oleh PJPK, PT PII bekerja sama dengan Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur (PDPPPI) memberikan bantuan finansial kepada PJPK yang berpotensi dalam pengembangan proyek infrastruktur dengan skema KPBU. Hal ini tentu masih bergantung kepada peraturan perundangan yang akan diterbitkan oleh Pemerintah mengenai mekanisme dan tata cara pemberian bantuan tersebut, termasuk pertanggungjawaban dan *recoverability* dari bantuan tersebut.

4. Sector Development

IIGF also strives to ensure project pipeline to be processed and continued on track within upcoming one or two years. In this case, IIGF will consistently undertake concrete sector development efforts. The sectors which today are estimated not having sufficient exposure for PPP scheme yet but hold promising opportunity in the future, easy to be replicated as sectoral development main target. The sectors include Education, Regional Development, Health, Penitentiary, Sports Facilities & Infrastructures and City Facilities.

Development of this sector aims to review related regulatory, policy and institutional aspects, identify actual issue, constraint and requirement of each sector, stakeholder mapping as well as identification of initial business model to be offered.

In 2017, eligible projects are expected to appear to be processed under PPP scheme.

Besides above projects, IIGF had been also requested on refinery mega project preparation that was projected needing guarantee facility. This requires IIGF to review and examine feasibility against current prevailing Law, prior executing the guarantee facility.

5. Project Preparation

As an additional effort to speed up readiness of projects developed by CA, in collaboration with Ministry of Finance particularly Government Support and Infrastructure Financing Management Directorate (PDPPPI), IIGF provided financial support for potential CA in infrastructure project development with PPP scheme. This will surely rely on upcoming Law issued by the Government regarding the support mechanism and implementation, including accountability and recoverability of the supports.



6. Asumsi Pendapatan Pengelolaan Dana.

Untuk imbal hasil dari pengelolaan dana diasumsikan berkisar rerata BI rate pada tingkat 7,50% ditambah 100–125 bps (*low rate interest environment*) dengan pertimbangan peraturan baru OJK yang akan mengatur batas atas tingkat suku bunga dibandingkan BI rate yang berlaku sebesar 2,0%-2,25% atau 200–225 bps. Dalam lingkungan investasi di awal pemerintahan yang baru dimana kebutuhan likuiditas memiliki tingkat tertinggi (*peak*) yang berfluktuasi, akan sangat agresif apabila memperkirakan bank akan selalu menawarkan suku bunga pada batas atas. Estimasi wajar akan berkisar di 100–150 bps. Namun dari sudut pandang PT PII yang menekankan bahwa pengembalian dana dari investasi ini tidak semata-mata ditujukan untuk maksimalisasi pengembalian, sehingga kebijakan yang diambil oleh PT PII adalah yang bersifat konservatif, penempatan pada instrumen yang memiliki risiko rendah. Asumsi tersebut juga sangat bergantung pada kondisi makro ekonomi pada 2016, ketersediaan instrumen yang diperlukan dan kebutuhan likuiditas Perusahaan.

7. Perluasan Mandat serta Kegiatan Usaha.

Beberapa proyek yang saat ini telah dapat diidentifikasi adalah terkait penjaminan PDAM untuk sektor air minum, penjaminan BUMN terkait *direct lending* dan penjaminan PT Hutama Karya dalam pembangunan Trans-Sumatera. Tidak tertutup kemungkinan bahwa akan ada perubahan-perubahan atas kondisi ke depan dan PT PII akan melakukan penyesuaian-penyesuaian tersebut.

6. Revenue and Budget Management Assumption

In terms of fund management return, assuming average BI rate at 7.50% added 100 – 15 bps (*low rate interest environment*) with consideration of new OJK Regulation that governs interest rate ceiling limit compared with effective BI Rate at 2.0% - 2.25% or 200 – 225 bps. In the investment environment at beginning of new Government reign, where liquidity requirement hit a volatile peak, this will be very aggressive estimating the Bank will offer interest rate at the ceiling limit. Fair estimation will stand at 100 – 150 bps. However, from IIGF perspective emphasizing that return of the investment is not only aimed to optimize the yield, so that policy taken by IIGF remains conservative, placement with low-risk instrument. The assumption will also heavily rely on macroeconomics landscape in 2016, availability of required instruments as well as liquidity requirement of the Company.

7. Expansion of Mandatory and Business Activities

Currently identified projects are related to guarantee facility with PDAM in Drinking Water sector, with SOE related for direct lending and with PT Hutama Karya for Trans-Sumatera Development. There is also a possibility of changing conditions in the future where IIGF will undertake several adjustments.

Gambar berikut merupakan ringkasan sasaran yang hendak dicapai, mencerminkan upaya berkelanjutan dalam menghantarkan dan menyelesaikan proyek yang sudah diproses selama lima tahun terakhir. Kesemuanya menunjukkan kesiapan internalitas PT PII dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Following illustration summarizes the Company's targets, reflecting an ongoing efforts to bring and finish prejects under processed for five recent years. All of these indicate internal readiness of IIGF in carrying out its duties and functions.

	Sampai Dengan 2016 <i>Up to 2016</i>	Target Peningkatan <i>Increment Target</i>	Sasaran di Tahun 2017 <i>Targets in 2017</i>
Proyek yang telah masuk tahapan RFP <i>Project under RFP Stage</i>	9 Proyek (- Rp135 triliun)	- 2,5x	21 Proyek (- Rp174 triliun)
Penandatanganan Perjanjian Penjaminan <i>Guarantee Agreement Signing</i>	9 Proyek (- Rp30 triliun)	> 1,5x	21 Proyek (- Rp174 triliun)
Kapasitas Penjaminan <i>Guarantee Capacity</i>	Rp9 triliun/trillion	- 1,5x	-Rp9 triliun/ trillion
Leveraging Factor	>2x	On Target	>2x
Peringkat Kredit <i>Credit Rating</i>	BBB-(Fitch Ratings)	On Target	Min. equl to Sovereign Rating
Sumber Daya Manusia <i>Human Resource</i>	91 Orang dgn > 20 Key Person 91 Person with > 20 Key Person	On Target	50 Orang dgn > 20 Key Person 50 Person with > 20 Key Person

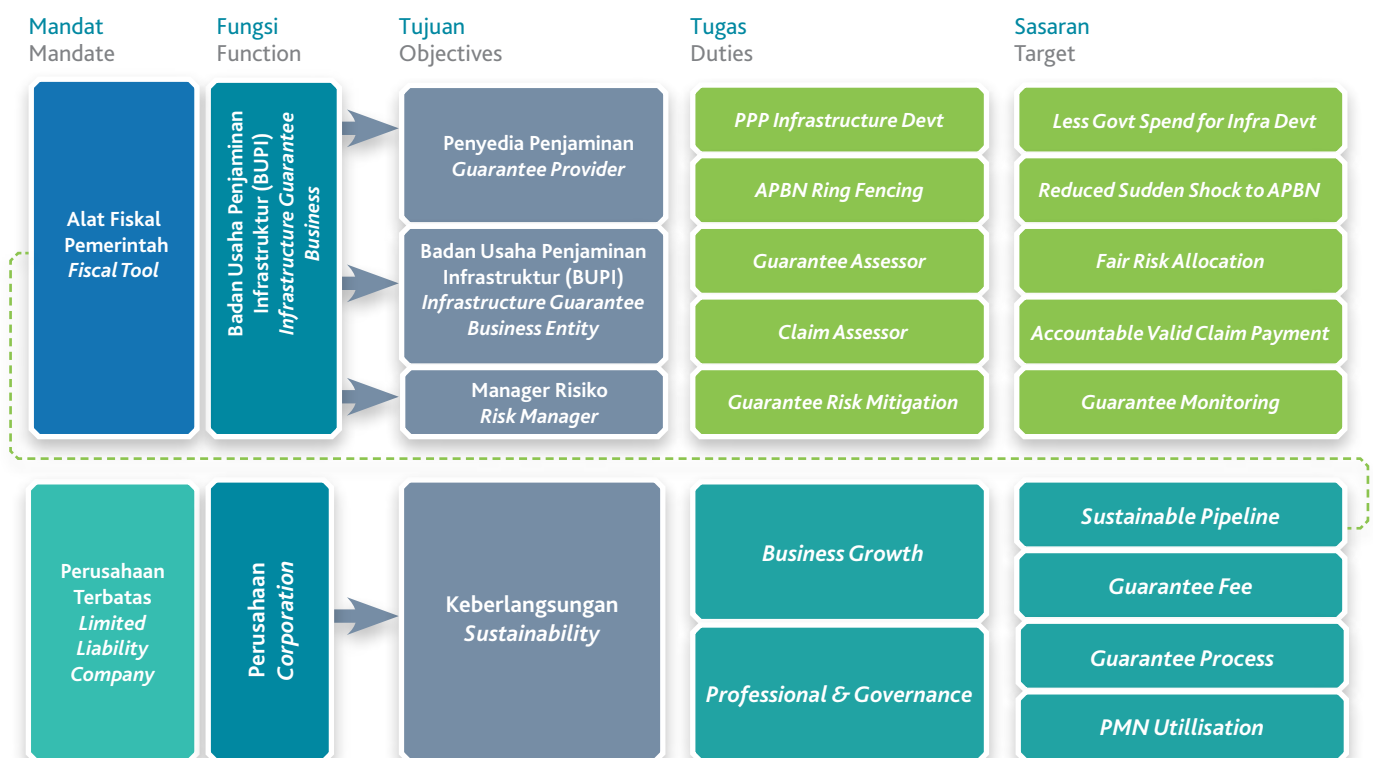
Akan tetapi, dalam menentukan strategi jangka pendek, PT PII kembali kepada mandat dan dua fungsi pokok PT PII sebagai *fiscal tools* dan Perusahaan Terbatas. Mandat dan fungsi utama ini memaksa PT PII untuk fokus pada melanjutkan penyelesaian proyek yang sudah ada secepatnya di tahun 2015 namun tetap berada pada koridor kehati-hatian dan proses penjaminan yang berkualitas. Hal ini penting agar PT PII tidak kehilangan momentum dan kepercayaan yang telah didapatkan dari pasar atas pembangunan infrastruktur dengan skema KPBU.

However, in determining short-term strategy, IIGF will focus on mandate and two main functions of IIGF as fiscal tools and Limited Company entity. These mandate and main functions enforced IIGF to focus to finish existing projects immediately in 2015 while remain in prudent corridor and high quality guarantee process. These are important for IIGF not to loose momentum and trust from the market on infrastructure development with PPP scheme.



Saat ini, PT PII sedang melakukan kajian mengenai Rencana Jangka Panjang Tahun 2017-2022 untuk menyesuaikan dengan kondisi perkembangan bisnis dan kondisi saat ini. Secara umum, dua fungsi yang tertanam dalam tubuh PT PII sebagai *fiscal tool* dan korporasi dapat digambarkan sebagai berikut:

IIGF is currently reviewing Business Plan 2017 – 2022 to adjust with actual business condition and situation. Two functions that are internalized in IIGF, generally, as fiscal and corporate tools are illustrated below:



Satu hal yang ditekankan dalam pelaksanaan proses penjaminan PT PII adalah kualitas, kehati-hatian penilaian, kesesuaian struktur penjaminan, alokasi risiko yang *fair* adalah merupakan hal yang paling penting dan ini mengalahkan kepentingan penyelesaian proyek tepat waktu. Pertimbangannya adalah walau pembentukan berupa Perusahaan Terbatas dimaksudkan untuk dapat beroperasi lebih profesional. Namun perlu dipastikan aspek *sustainability* guna mendukung kredibilitas sebagai penjamin/*fiscal tool* dan peran *ring-fencing*.

Focus of IIGF guarantee process are quality, prudent appraisal, compatibility of guarantee structure, fair risk allocation that become important aspects and beyond on-time project completion interest. The consideration is although establishment of some Limited Company entities are intended to have more professional operation, sustainability aspect shall be ensured to support credibility as insurer/*fiscal tool* and ring-fencing role.

Strategi Perusahaan

PT PII dalam melaksanakan mandatnya memandang penting Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) untuk memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai skema KPBU dan skema penjaminan PT PII. Hal ini dimaksudkan agar sebuah proyek infrastruktur dapat dikembangkan dengan skema KPBU secara efektif. Untuk itu, PT PII melakukan strategi untuk melaksanakan

Strategies

In carrying out its mandate, IIGF regards the importance of Contracting Agency (CA) to have comprehensive understanding on PPP and IIGF guarantee schemes. This aims to develop an infrastructure project under PPP scheme effectively. Therefore, IIGF implements a strategy to build capacity of CA and related key stakeholders such as Legislator, Academia, and other parties

program peningkatan kapasitas PJK dan *key stakeholder* terkait seperti legislatif, akademis, dan lainnya melalui program *workshop* maupun *training* secara intensif. Pendekatan ini dipandang efektif diterapkan di beberapa proyek infrastruktur yang sedang dalam proses penjaminan PT PII.

Seiring dengan penugasan Pemerintah kepada BUMN untuk beberapa proyek infrastruktur prioritas, PT PII juga sedang menjajaki rencana perluasan mandatnya dengan Kementerian Keuangan sehingga kedepannya PT PII diharapkan dapat pula menyediakan penjaminan untuk proyek-proyek dengan skema non-KPBU.

Model Bisnis PT PII

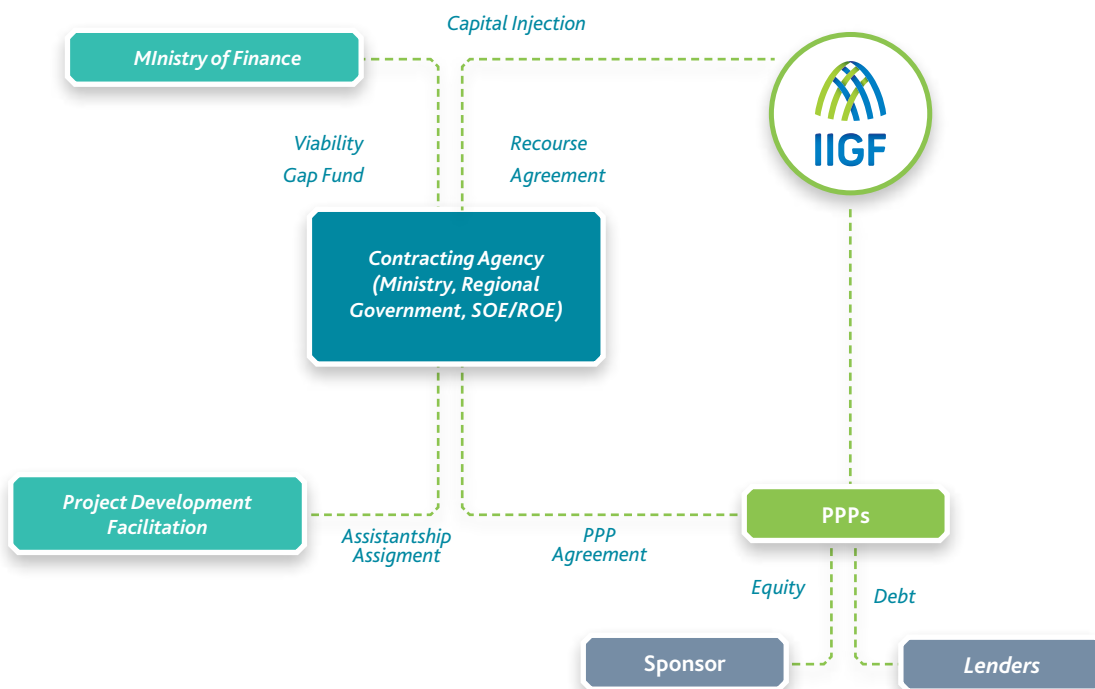
Model bisnis PT PII ini dirancang untuk menjadikan proses penyediaan penjaminan yang konsisten, transparan, dan efisien.

through intensive workshop and training programs. This approach is evaluated effective to be applied in several infrastructure projects under guarantee process by IIGF.

As the Government's assignment to SOE for priority infrastructure projects, IIGF is also exploring expansion plan to its mandate with Ministry of Finance, so that, IIGF is expected to provide guarantee for non-PPP projects in the future.

IIGF Business Model

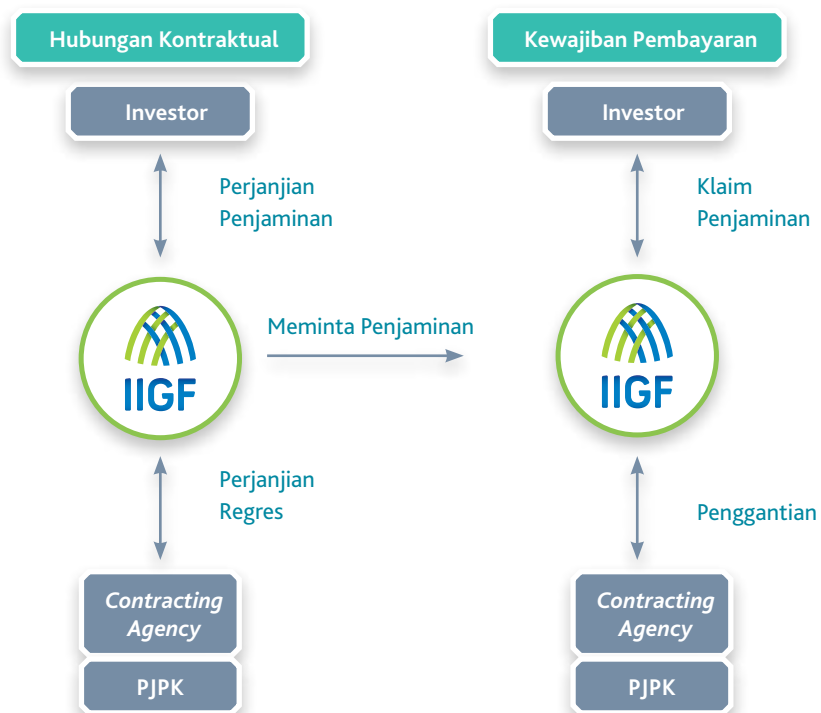
IIGF business model is designed to deliver consistent, transparent and efficient guarantee facility process.





Penjaminan yang diberikan PT PII disiapkan secara khusus untuk mendukung komitmen dari Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dalam Perjanjian Kerjasama.

Guarantee provided by IIGF is especially prepared to support commitment of Contracting Agency (CA) in the Agreement Contract.



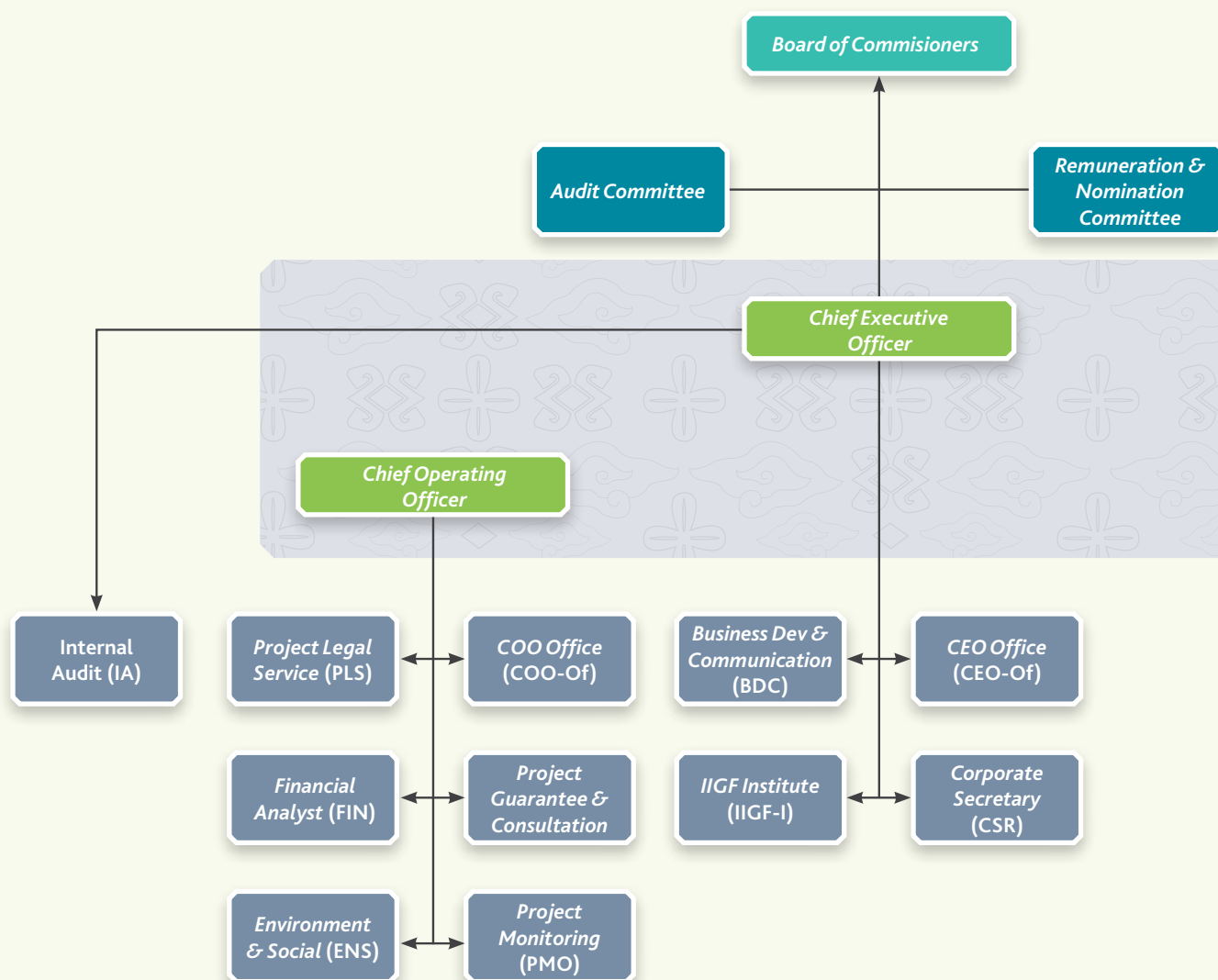
PT PII dapat menjamin berbagai kewajiban finansial PJPK yang telah dialokasikan kepada PJPK berdasarkan Perjanjian KPBU.

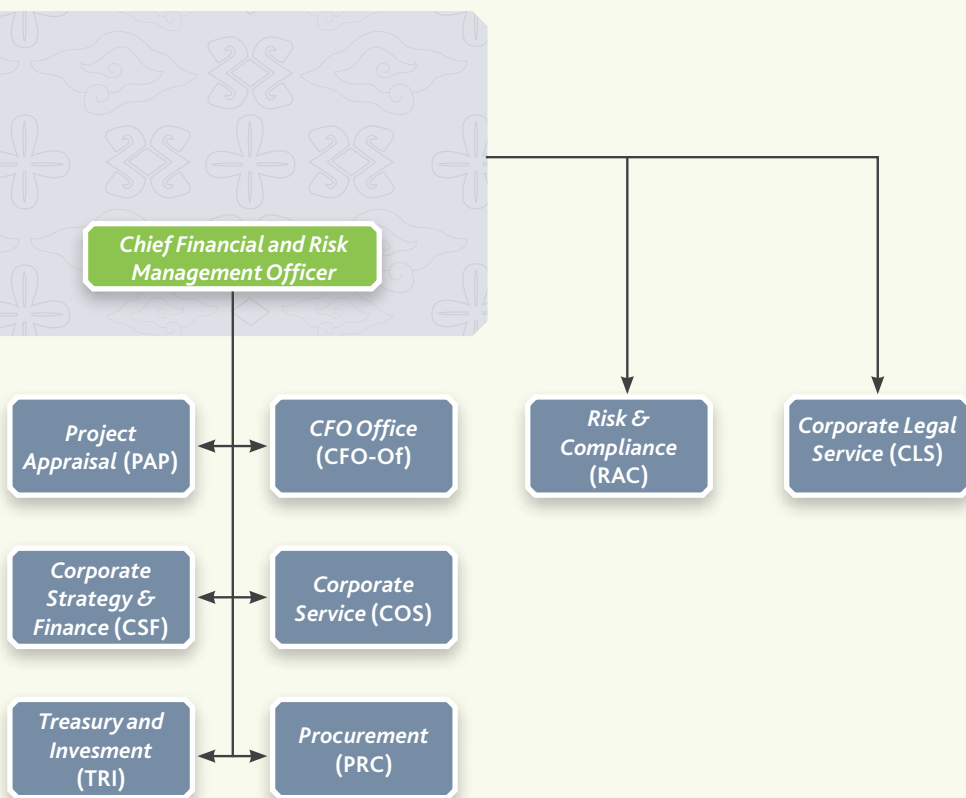
IIGF is eligible to guarantee financial liabilities of CA after allocated to the CA based on PPP Contract.

Struktur Organisasi Perusahaan Organization Structure

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) No: SK-033/DIR/COS/HR/0916, struktur organisasi PT PII pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Pursuant to PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Board of Directors Decree No. SK-003/DIR/COS/HR/0115, organization structure of IIGF in 2016 is below:





Keterangan

Description

Board of Commissioners Luky Alfirman Ayu Sukorini Iskandar Audit Committee Iqbal Islami Tarkosunaryo Remuneration & Nomination Committee None Tenaga Ahli Manajemen Risiko Ferry Irawan Business Development & Communication (BDC) Indra Pradana Singawinata Chief Executive Officer Sinthya Roesly Internal Audit (IA) I Gede Susila Aryana Corporate Secretary (CSR) Pratomo Ismujatmika Chief Operating Officer Salusra Satria Chief Financial & Risk Management Officer Armand Hermawan IIGF Institute (IIGFI) Pratomo Ismujatmika COO Office Herman Sulistyio Risk & Compliance (RAC) Andre Permana	Environmental & Social (ENS) Project & Guarantee Consultation (PGC) Djoko Sarwono Tanti Hidayati Erwin Sukandar Project Legal Ria Frilina Project & Appraisal Structuring (PAS) Ari Firmandi Project Monitoring & Claim (PMC) Muhammad Ridho Renova Visky Treasury & Investment (TRI) Ma'mun Zuberi Corporate Strategy & Finance (CSF) Donny Hamdani Corporate Service (COS) Shiddarta Procurement (PRC) Sahurdi, Haryo Dewanto Legal Counsel (LEC) Yunan Novaris CFO Office Donny Hamdani



Profil Dewan Komisaris

Profile of the Board of Commissioners





Luky Alfirman

Komisaris Utama

President Commissioner

Warga negara Indonesia, 47 tahun, berdomisili di Jakarta Selatan. Meraih gelar Sarjana Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung (ITB) tahun 1994, gelar *Master of Art (MA)* di bidang Ekonomi dari University of Colorado, Boulder, Amerika Serikat tahun 2000 dan gelar Doktor (PhD) di bidang Ekonomi dari University of Colorado, Boulder, Amerika Serikat tahun 2004

Beliau mengawali Karir di Kementerian Keuangan tahun 1995. Dalam perjalanan karirnya, beliau pernah menduduki berbagai jabatan strategis, antara lain Kepala Sub Direktorat Manajemen Transformasi, Direktorat Transformasi Proses Bisnis - Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan tahun 2010-2011, Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Juli-Desember 2011, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro - Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan tahun 2012-2015. Saat ini, beliau masih menjabat sebagai Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan (PUSHAKA) Kementerian Keuangan sejak tahun 2015.

Beliau diangkat sebagai Komisaris Utama PT PII sejak 19 Agustus 2013, berdasarkan keputusan RUPS tanggal 4 September 2013 yang dituangkan dalam KMK 315/KMK.06/2013 tanggal 19 Agustus 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Komisaris PT PII.

Luky Alfirman, He is 47 years old and lives in South Jakarta. He earned Bachelor Degree of Industrial Engineering from Institut Teknologi Bandung (ITB) in 1994, Master of Art (MA) in economics from University of Colorado, Boulder, United States in 2000 and Ph.D degree in economics from University of Colorado, Boulder, United States in 2004.

He started his career at Ministry of Finance in 1995. During his career, He served in strategic positions, among others, Head of Transformation Management Sub-Directorate, Business Process Transformation Directorate – Taxation General Directorate, Ministry of Finance from 2010 – 2011, Center of State Revenue and Expenditure Policy Director from July – December 2011, Center of Macroeconomics Policy Director – Fiscal Policy Agency, Ministry of Finance from 2012 – 2015. He currently serves as the Head of Center for Analysis and Policy Harmonization of Secretariat-General, Ministry of Finance (PUSHAKA) since 2015.

He is appointed as President Commissioner of IIGF since August 19, 2013 pursuant to GMS resolution dated September 4, 2013 as declared in KMK 315/KMK.06/2013 dated August 19, 2013 regarding IIGF Board of Commissioners Appointment and Discharge.



Ayu Sukorini

Komisaris

Commissioner

Warga negara Indonesia, 50 tahun, berdomisili di Depok, Jawa Barat. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Satya Wacana, Salatiga tahun 1990 dan gelar *Master of Arts (MA)* di bidang Ekonomi dari Universitas Colorado, Denver, Amerika Serikat tahun 1998.

Beliau mengawali karir di Kementerian Keuangan tahun 1991. Dalam perjalanan karirnya, beliau pernah menduduki sejumlah jabatan strategis, antara lain Kepala Divisi Pusat Manajemen Obligasi Negara tahun 2002-2006, Direktur Strategi Porfolio Utang pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang tahun 2006-2011. Saat ini, beliau masih menjabat sebagai Direktur Pinjaman dan Hibah di Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan Republik Indonesia sejak tahun 2011.

Beliau diangkat sebagai Komisaris PT PII sejak 6 Januari 2010, berdasarkan keputusan RUPS tanggal 14 Januari 2010 yang dituangkan dalam KMK 11 /KMK.06/2010 tanggal 6 Januari 2010 tentang Pengangkatan Anggota Direksi dan Komisaris PT PII.

Indonesian Citizen, She is 50 years old and lives in Depok, West Java. She earned Bachelor Degree of Economics from Universitas Satya Wacana, Salatiga in 1990 and Master of Arts (MA) in Economics from University of Colorado, Denver, United States in 1998.

She started her career at Ministry of Finance in 1991. During her career, She served in strategic positions, among others, Head of Division, Government Securities Management from 2002-2006, Director for Debt Portfolio and Strategy, Directorate General of Debt Management from 2006-2011. She currently serves as Director of Debt and Grants at Financing and Risk Management General Directorate, Ministry of Finance Republic of Indonesia since 2011.

She is appointed as Commissioner of IIGF since January 6, 2010, pursuant to GMS resolution on January 14, 2010 as declared in KMK No. 11/KMK.06/2010 dated January 6, 2010 regarding IIGF Board of Directors and Board of Commissioners members appointment.



Iskandar

Komisaris

Commissioner

Warga negara Indonesia, 63 tahun, berdomisili di Depok, Jawa Barat. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Sriwijaya, Palembang tahun 1983, dan telah mengikuti berbagai pendidikan kedinasan baik di dalam maupun di luar negeri.

Beliau mengawali karir di Direktorat Anggaran Kementerian Keuangan sebagai Pelaksana tahun 1975. Dalam perjalanan karirnya, beliau pernah menduduki sejumlah jabatan strategis, antara lain Kepala Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan Provinsi DI. Yogyakarta (2009), Propinsi Sulawesi Utara (2011), Propinsi Sumatera Selatan (2012) dan Direktur Sistem Perbendaharaan (2013).

Beliau diangkat sebagai Komisaris PT PII sejak 19 Agustus 2014 berdasarkan keputusan RUPS tanggal 12 September 2014 yang dituangkan dalam KMK No 388/KMK.06/2014 tanggal 19 Agustus 2014 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT PII.

Indonesian Citizen, He is 63 years and lives in Depok, West Java. He earned Bachelor Degree of Economics from Universitas Sriwijaya, Palembang in 1983 and participated in various domestic and overseas official courses.

He started his career at Budget Directorate, Ministry of Finance as Staff in 1975. During his career, He served in several strategic positions, among others, Region Head, General Directorate of Treasury, DI Yogyakarta Province (2009), North Sulawesi Province (2011), South Sumatera Province (2012) and Director of Treasury System (2013).

He is appointed as Commissioner of IIGF since August 19, 2014 pursuant to GMS resolution dated September 12, 2014 as declared in KMK No. 388/KMK.06/2014 dated August 19, 2014 regarding IIGF Board of Directors and Board of Commissioners members appointment.

Profil Direksi

Profile of the Board of Directors





Sinthya Roesly

Direktur Utama

President Director

Sinthya Roesly menjabat sebagai Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) sejak Desember 2009. Beliau pernah bekerja di PT PLN (Persero) selama 19 tahun dengan penugasan di berbagai bidang mulai dari keuangan korporat, pendanaan, perencanaan korporat dan strategi, komersial, operasi sistem tenaga listrik dan transmisi, serta konstruksi proyek.

Beliau terlibat penuh dalam mendapatkan pembiayaan untuk proyek-proyek PLN, termasuk program percepatan pembangkit 10.000 MW, serta pembiayaan dari obligasi maupun perbankan domestik dan internasional. Pada akhir 1990-an hingga awal 2000-an, beliau terlibat dalam pengembangan *electricity trading mechanism* untuk sistem tenaga listrik Jawa-Bali serta penyiapan sistem operasi untuk IPP generasi pertama di Indonesia.

Sinthya Roesly pernah menjadi Ketua Kelompok Kerja untuk Energy Market Reform – World Energy Council, Indonesia National Committee dari tahun 2005 – 2006.

Sinthya Roesly menyelesaikan program Master of Management dari IPMI Business School dan MBA dari Monash University, Australia; MEngSc dalam Power Systems dari Faculty of Electrical Engineering, University of New South Wales, Australia; Sarjana Teknik Elektro dari Universitas Indonesia; serta Diploma dalam bidang Sastra Inggris dari Universitas Indonesia. Saat ini beliau merupakan *Council Member* dari International Project Finance Association Asia Branch dan *Board Member* dari United Nations Public Private Partnership Business Advisory Boards. Sinthya Roesly adalah *Certified Holder* dari INSEAD International Directorship Program (IDP-Cs).

Sinthya Roesly is appointed as President Director of Indonesia Infrastructure Guarantee Fund since December 2009. Previously, She worked at PT PLN (Persero) for 19 years with assignments in various sectors starting from corporate finance, financing, corporate and strategic planning, commercial, electricity system operation and transmission and project construction.

She was fully in charge and acquired financing for PLN projects including 10,000 MW power plant acceleration program as well as financing from domestic and international bonds and banking sectors. By the end of 1990s up to the beginning of 2000s, She was involved in the electricity trading mechanism development for Jawa – Bali electricity system and preparation of operation system for first generation IPP in Indonesia.

Sinthya Roesly was also appointed as Chairman of Energy Market Reform – World Energy Council Task Force, Indonesia National Committee from 2005 – 2006.

Sinthya Roesly Master Degree of Management from IPMI International Business School and MBA from Monash University, Australia; MEngSc in Power Systems from Faculty of Electrical Engineering, University of New South Wales, Australia; Bachelor Degree of Electrical Engineering from Universitas Indonesia; and Diploma of English Literature from Universitas Indonesia. She is serving as Council Member of International Project Finance Association Asia Branch and Board Member of United Nations Public Private Partnership Business Advisory Boards. Sinthya Roesly also a Certified Holder by INSEAD International Directorship Program (IDP-Cs).



Armand Hermawan

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
Director of Finance and Risk Management

Warga negara Indonesia, 48 tahun, berdomisili di Jakarta Selatan. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Padjajaran, Bandung tahun 1991, gelar *Master of Commerce and Management (MCM)* dari *University of Lincoln*, Selandia Baru tahun 1999, dan gelar PhD di bidang keuangan dari *University of Newcastle*, NSW, Australia tahun 2002. Beliau juga memiliki sejumlah sertifikat profesi, yaitu *Chartered Accountant (CA)*, *Certified Public Accountant (CPA)* dan *Certified Management Accountant (CMA)*.

Beliau memulai karir di PT Indosat Tbk. Dalam perjalanan karirnya, beliau pernah menduduki sejumlah jabatan strategis, antara lain *Investor Relation* PT Indosat Tbk. tahun 2006-2007, *Chief of Controller* tahun 2008-2009.

Beliau diangkat sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT PII sejak Desember 2009 berdasarkan keputusan RUPS tanggal 20 April 2010 yang dituangkan dalam KMK 129/KMK.06/2010 tanggal 22 Maret 2010.

Indonesian Citizen. He is 48 years and lives in South Jakarta. He earned Bachelor Degree of Economics from Universitas Padjajaran, Bandung in 1991, Master of Commerce and Management (MCM) from University of Lincoln, New Zealand in 1999 and Ph.D Degree in Finance from University of Newcastle, NSW, Australia in 2002. He also holds professional certifications, such as Chartered Accountant (CA), Certified Public Accountant (CPA) and Certified Management Accountant (CMA).

He started his career at PT Indosat Tbk. During his career, He served in strategic positions, among others, Investor Relation at PT Indosat Tbk. from 2006 – 2007, Chief of Controller from 2008 – 2009.

He is appointed as Finance and Risk Management Director of IIGF since December 2009 pursuant to GMS resolution dated April 20, 2010 as declared in KMK No. 129/KMK.06/2010 dated December 22, 2010.



Salusra Satria

Direktur Operasi
Director of Operation

Warga Negara Indonesia, 51 tahun, berdomisili di Jakarta Selatan. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia (FEUI) tahun 1990 dan gelar Master of Finance dari Macquarie University, Sydney, Australia tahun 1993. Beliau juga telah menyelesaikan Diploma Programme in Business Strategy & Leadership di Rotterdam School of Management, Erasmus University, Negeri Belanda pada tahun 2016.

Beliau mengawali karir di Kementerian Keuangan dan ditugaskan sebagai Kepala Sub Direktorat pada Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan pada tahun 1999 yang kemudian mendapat penugasan di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada tahun 2005. Jabatan terakhir beliau di LPS adalah sebagai Direktur Eksekutif Penjaminan & Manajemen Risiko dan sebelumnya sebagai Direktur Eksekutif Klaim & Resolusi Bank.

Beliau diangkat sebagai Direktur Operasi PT PII sejak 16 Juli 2016 berdasarkan keputusan RUPS tanggal 16 Juni 2016 yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan RI No. 465/KMK.06/2016 tertanggal 16 Juni 2016.

Indonesian Citizen, He is 51 years and lives in Central Jakarta. He earned Bachelor Degree of Economics from Universitas Indonesia in 1990 and Master Degree of Finance from Macquarie University, Sydney, Australia in 1993. He was also graduated from Diploma Programme in Business Strategy & Leadership in Rotterdam School of Management, Erasmus University, Netherland in 2016.

He started his career at Ministry of Finance and was assigned as Head of Sub-Directorate, Financial Institutions General Directorate in 2006 that was later assigned at Deposit Insurance Corporation (LPS) in 2005. His latest position at LPS was Executive Director of Guarantee & Risk Management after serving as Executive Director of Claim and Bank Resolution.

He is appointed as Operation Director of IIGF since June 2016 pursuant to GMS resolution dated June 23, 2016 as declared in KMK No. 465/KMK.06/2016 dated June 16, 2016.

Pejabat Senior

Senior Management



Andre Permana

SVP Risk and Compliance
SVP Risk and Compliance

Andre Permana, *SVP Risk & Compliance* di PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) pada bulan Juni tahun 2010. Pria 40 tahun yang lahir di Cirebon ini merupakan lulusan S1 Teknik Sipil di Universitas Indonesia Tahun 1993, kemudian beliau melanjutkan pendidikan Magister Teknik (*Project Management*) di Universitas Indonesia pada tahun 2001 dan pendidikan Doktorat di bidang *Project Finance and Risk Management* pada tahun 2010 di Nanyang Technological University of Singapore.

Andre Permana serves as SVP Risk & Compliance at Indonesia Infrastructure Guarantee Fund since June 2010. He is 40 years man, was born in Cirebon and earned Bachelor Degree of Civil Engineering from Universitas Indonesia in 1993, and continued Master Degree of Engineering (Project Management) at Universitas Indonesia in 2001 and Ph.D Degree in Project Finance and Risk Management in 2010 at Nanyang Technological University of Singapore.

Yunan Novaris

SVP Legal Counsel
SVP Legal Counsel

Yunan Novaris, *SVP Legal Counsel* di PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Beliau bergabung dengan PT PII pada bulan April tahun 2013. Pria berusia 44 tahun yang lahir di Yogyakarta ini adalah lulusan S1 Hukum Perdata di Universitas Gadjah Mada tahun 1997.

Yunan Novaris serves as SVP Legal Counsel at Indonesia Infrastructure Guarantee Fund. He joined IIGF in April 2013. He is 44 years, was born in Yogyakarta and earned Bachelor Degree of Civil Law from Universitas Gadjah Mada in 1997.



Indra Pradana Singawinata

SVP Business Development and Communication
SVP Business Development and Communication

Pratomo Ismujatmika

SVP Corporate Secretary
SVP Corporate Secretary

Indra Pradana Singawinata, *SVP Business Development and Communication* di PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Beliau bergabung dengan PT PII pada bulan Agustus tahun 2015. Latar belakang pendidikan beliau yaitu S1 Ekonomi di Universitas Trisakti, S2 Manajemen Audit di Universitas Indonesia dan S3 *Political Economic and Development Sociology* di *Asia Pacific University* (APU), Beppu-Jepang. Beliau lahir di Jakarta dan saat ini berusia 42 tahun.

Indra Pradana Singawinata serves as SVP Business Development and Communication at Indonesia Infrastructure Guarantee Fund. He joined with IIGF in August 2015. His educational background includes Bachelor Degree of Economics from Universitas Trisakti, Master Degree of Audit Management from Universitas Indonesia and Ph.D Degree in Economics from Asia Pacific University (APU), Beppu – Japan. He was born in Jakarta and is currently 42 years old.

Pratomo Ismujatmika, *SVP Corporate Secretary* di PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Beliau bergabung dengan PT PII pada bulan Juni tahun 2013 dan saat ini berusia 40 tahun. Pria kelahiran Gresik ini adalah lulusan S1 Teknik dari Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya tahun 1999 kemudian mengambil Magister Manajemen di Universitas Gajah Mada tahun 2001. Beliau kemudian meneruskan pendidikan pada *Graduate Exchange Program* di Gatton College of Business, University of Kentucky Lexington, USA tahun 2001-2003 dan memperoleh *Master of Business Administration* di Sullivan University, Lexington, USA pada tahun 2005.

Pratomo Ismujatmika serves as SVP Corporate Secretary at Indonesia Infrastructure Guarantee Fund. He joined with IIGF in June 2013 and aged 40 years. He was born in Gresik and earned Bachelor Degree of Engineering from Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya in 1999 and continued to Master Degree of Management from Universitas Gajah Mada in 2001. He continued his education at Graduate Exchange Program at Gatton College of Business, University of Kentucky Lexington, USA from 2001-2003 and earned Master of Business Administration at Sullivan University, Lexington, USA in 2005.



Erwin Setiadi Sukandar

SVP Project and Guarantee Consultation 1

SVP Project and Guarantee Consultation 1

Erwin Setiadi Sukandar, *SVP Project and Guarantee Consultation* di PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Beliau bergabung dengan PT PII pada bulan Januari tahun 2011. Sebelumnya, menjabat sebagai *SVP Business Development* hingga tahun 2013. Pria kelahiran Jakarta, 53 tahun lalu ini, memenangkan beasiswa *Fullbright* dari AUSAID hingga menyelesaikan pendidikan *Master of Business Administration* di Monash University, Australia tahun 1996 dan memiliki gelar S1 Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung (ITB).

Erwin Setiadi Sukandar serves as SVP Project and Guarantee Consultation at Indonesia Infrastructure Guarantee Fund. He joined with IIGF in January 2011. He previously served as SVP Business Development until 2013. A man born in Jakarta and aged 53 years won Fullbright scholarship from AUSAID that brought him continuing his education to Master of Business Administration at Monash University, Australia in 1996 and after graduated Bachelor Degree of Civil Engineering from Institut Teknologi Bandung (ITB).

Djoko Sarwono

SVP Project and Guarantee Consultation 2

SVP Project and Guarantee Consultation 2

Djoko Sarwono, *SVP Project and Guarantee Consultation* di PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Beliau bergabung dengan PT PII pada bulan Februari tahun 2011. Sebelum menjadi *SVP Project and Guarantee Consultation* di tahun 2013, beliau sempat menjadi *SVP Business Development*. Beliau lahir di Tulungagung 53 tahun yang lalu. Latar belakang dari pendidikan beliau adalah *Master of Business Administration* di LPPM jurusan Keuangan dan Sarjana Teknik Pertanian di Institut Pertanian Bogor.

Djoko Sarwono serves as SVP Project and Guarantee Consultation at Indonesia Infrastructure Guarantee Fund. He joined with IIGF in February 2011. Prior appointed as SVP Project and Guarantee Consultation in 2013, He served as SVP Business Development. He was born in Tulungagung 53 years ago. His educational background includes Master of Business Administration from LPPM majoring Finance and Bachelor Degree of Agriculture Engineering from Institut Pertanian Bogor.



Tanti Hidayati

SVP Project and Guarantee Consultation 3
SVP Project and Guarantee Consultation 3

Tanti Hidayati, *SVP Project and Guarantee Consultation* di PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Lahir di Bogor 44 tahun yang lalu, beliau bergabung dengan PT PII pada bulan Oktober tahun 2011. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 Agribisnis di Institut Pertanian Bogor (IPB).

Tanti Hidayati serves as SVP Project and Guarantee Consultation at Indonesia Infrastructure Guarantee Fund. She was born in Bogor 44 years ago and joined with IIGF in October 2011. She graduated Bachelor Degree of Agribusiness from Institut Pertanian Bogor (IPB).

Ria Frilina

SVP Project Legal
SVP Project Legal

Ria Frilina, *SVP Project Legal* di PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), bergabung dengan PT PII pada bulan September tahun 2010. Lahir 46 tahun yang lalu di Jakarta, beliau lulus sebagai sarjana dari Fakultas Hukum dan Diploma dari Sastra Inggris di Universitas Indonesia, kemudian melanjutkan pendidikan S2 di jurusan Hukum Ekonomi Universitas Indonesia.

Ria Frilina serve as SVP Project Legal at Indonesia Infrastructure Guarantee Fund, joining IIGF in September 2010. She was born 46 years ago in Jakarta and graduated from Faculty of Law and Diploma of English Lecture from Universitas Indonesia, before continued to Master Degree of Economic Law at Universitas Indonesia.



Ari Firmandi

SVP Project Appraisal and Structuring
SVP Project Appraisal and Structuring

Ari Firmandi, *SVP Project Appraisal & Structuring* di PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Bergabung dengan PT PII pada bulan September 2014. Beliau memiliki latar belakang pendidikan S1 Teknik Sipil di Institut Teknologi Bandung tahun 1997, S2 Teknik Sipil di USC, Los Angeles tahun 1999 dan S2 Administrasi Bisnis di USC, Los Angeles tahun 2006. Di usianya yang menginjak 43 tahun, beliau sedang mengemban pendidikan S3 di *Strategic Management*, Universitas Indonesia.

Ari Firmandi serves as SVP Project Appraisal & Structuring at Indonesia Infrastructure Guarantee Fund. He joined with IIGF in September 2014. He has educational background includes Bachelor Degree of Civil Engineering from Institut Teknologi Bandung in 1997, Master Degree of Civil Engineering from USC, Los Angeles in 1999 and Master Degree of Business Administration from USC, Los Angeles in 2006. In his age of 43 years, He is currently enrolling Ph.D Degree of Strategic Management, Universitas Indonesia.

I Gede Susila Aryana

SVP Internal Audit
SVP Internal Audit

I Gede Susila Aryana, *SVP Internal Audit* di PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) lahir di Singaraja, 48 tahun yang lalu. Beliau bergabung dengan PT PII pada bulan Juni tahun 2011. Sebelumnya, beliau mengenyam pendidikan di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Balai Pendidikan dan Latihan Keuangan, Kementerian Keuangan. Selain itu, beliau sudah bersertifikasi CISA (*Certified Information System Auditor*) dari *Information System Audit and Control Association* (ICASA).

I Gede Susila Aryana serve as SVP Internal Audit at Indonesia Infrastructure Guarantee Fund and was born in Singaraja, 48 years ago. He joined with IIGF in June 2011. He previously graduated from Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Finance Education and Training Agency, Ministry of Finance. In addition, He holds CISA (*Certified Information System Auditor*) Certification by Information System Audit and Control Association (ICASA).



Ma'mun Zuberi

SVP Treasury and Investment
SVP Treasury and Investment

Ma'mun Zuberi, *SVP Treasury and Investment* di PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), bergabung pada bulan September 2015. Beliau lahir di Semarang 44 tahun lalu. Meski terhitung baru bergabung, beliau sudah memiliki pengalaman di bidang terkait dengan latar belakang pendidikan S1 Bisnis Administrasi di Islamic University of Assyafi'iyah Jakarta tahun 1997 dan S2 *Financial Economics* di University Putra Malaysia (UPM), Selangor Malaysia tahun 2003.

Ma'mun Zuberi serves as SVP Treasury and Investment at Indonesia Infrastructure Guarantee Fund and joining in September 2015. He was born in Semarang 44 years ago. Despite he's currently joining, He holds extensive experiences in relation with his experiences holding Bachelor Degree of Business Administration at Islamic University of Assyafi'iyah Jakarta in 1997 and Master Degree of Financial Economics at University Putra Malaysia (UPM), Selangor Malaysia in 2003.

Donny Hamdani

SVP CFO Office - Plt SVP Corporate Strategy & Finance
SVP CFO Office - Plt SVP Corporate Strategy & Finance

Donny Hamdani, *SVP CFO Office* PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Pria kelahiran Jakarta 38 tahun lalu ini bergabung di PT PII pada bulan April tahun 2012. Sejak tahun 2015 sampai sekarang, beliau juga menjabat sebagai Plt. SVP CSF. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Donny Hamdani serves as SVP CFO Office at Indonesia Infrastructure Guarantee Fund. He was born in Jakarta 38 years ago and joining IIGF since April 2012. In 2015, He also served as Interim VP CSF. He earned Bachelor Degree of Accounting from Faculty of Economics, Universitas Indonesia.



Shiddarta

SVP Corporate Service
SVP Corporate Service

Shiddarta, SVP Corporate Service di PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Beliau bergabung dengan PT PII pada bulan Januari tahun 2012. Di tahun 2011-2012, beliau menjadi SVP Human Resources dan General Affair, kemudian di tahun 2012 berubah menjadi SVP Resource and Consultant Management dan di tahun 2013 hingga saat ini menjadi SVP Corporate Service yang juga membawahi fungsi Information Technology (IT). Latar belakang pendidikannya adalah S1 Teknik Elektro dan S1 Ekonomi Universitas Indonesia. Beliau saat ini berusia 49 tahun lahir di Jakarta.

Shiddarta serves as SVP Corporate Service at Indonesia Infrastructure Guarantee Fund. He joined with IIGF in January 2012. From 2011 – 2012, He was appointed as SVP Human Resources dan General Affair, and transferred into SVP Resource and Consultant Management before serving as SVP Corporate Service from 2013 until now, who supervises Information Technology (IT) function. He earned Bachelor Degree of Electrical Engineering and Bachelor Degree of Economics from Universitas Indonesia. He is 49 years old and was born in Jakarta.

Sahurdi

VP Procurement
VP Procurement

Sahurdi, VP Procurement PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Beliau bertugas di Divisi Procurement dan merupakan salah satu karyawan yang bergabung pertama kali dengan PT PII di awal pembentukan PT PII pada tahun 2010. Lahir di Bukittinggi, 44 tahun yang lalu. Beliau mengenyam pendidikan Teknik Sipil di Universitas Andalas, Padang tahun 1991-1996.

Sahurdi serves as VP Procurement at Indonesia Infrastructure Guarantee Fund. He is in charge at Procurement Division and is one of first IIGF employees since establishment in 2010. He was born in Bukittinggi, 44 years ago. He graduated from Civil Engineering Degree from Universitas Andalas, Padang from 1991 – 1996.



Haryo Dewanto

VP Procurement

VP Procurement

Haryo Dewanto, *VP Procurement* PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Beliau bergabung dengan PT PII pada bulan Desember tahun 2011 dan saat ini bertugas di Divisi *Procurement*. Pria berusia 49 tahun ini lahir di Kota Wonosobo. Beliau menyelesaikan pendidikan Geofisika di Institut Teknologi Bandung tahun 1994 dan melanjutkan pendidikan *Master Degree Administration and Business Policy* di Universitas Indonesia tahun 2006.

Haryo Dewanto serves as VP Procurement at Indonesia Infrastructure Guarantee Fund. He joined with IIGF in December 2011 and is currently in charge at Procurement Division. He is 49 years and was born in Wonosobo. He earned Geophysics Degree from Institut Teknologi Bandung in 1994 before continued to Master Degree of Administration and Business Policy at Universitas Indonesia in 2006.

Mahdi Manfaluthi

VP Project and Guarantee Consultation 4

VP Project and Guarantee Consultation 4

Mahdi Manfaluthi, *VP Project and Guarantee Consultation* di PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Beliau bergabung dengan PT PII pada bulan Mei tahun 2012. Mengawali tahun 2015, diberikan tugas sebagai *Plt. Head of PGC 4*. Lahir di Jakarta 36 tahun yang lalu ini, memiliki latar belakang pendidikan S1 Teknik Metalurgi Universitas Indonesia dan S2 *Magister Management* di Universitas yang sama.

Mahdi Manfaluthi serves as VP Project and Guarantee Consultation at Indonesia Infrastructure Guarantee Fund. He joined with IIGF since May 2012. He started his career in 2015, assigned as Interim Head of PGC 4. He was born in Jakarta 36 years ago, and graduated from Bachelor Degree of Metallurgy Engineering, Universitas Indonesia and Master Degree of Management in the same university.



Muhammad Ridho

VP Project Monitoring and Claim
VP Project Monitoring and Claim

Muhammad Ridho, *VP Project Monitoring and Claim* di PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Beliau bergabung dengan PT PII pada bulan Oktober tahun 2014. Pria berusia 41 tahun yang lahir di Demak ini adalah lulusan S1 Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota di Universitas Diponegoro tahun 1998 kemudian melanjutkan studi S2 dan S3 di bidang *Urban Environmental Engineering* di Kyushu University, Fukuoka, Jepang tahun 2003-2008.

Muhammad Ridho serves as VP Project Monitoring and Claim at Indonesia Infrastructure Guarantee Fund. He joined with IIGF in October 2014. He is 41 years and was born in Demak, graduated from Bachelor Degree of Planology Engineering from Universitas Diponegoro Semarang in 1998, and continued Master and Ph.D Degrees in Urban Environmental Engineering at Kyushu University, Fukuoka, Japan from 2003 – 2008.

Renova Visky

VP Project Monitoring and Claim
VP Project Monitoring and Claim

Renova Visky, *VP Project Monitoring* di PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) pada bulan April 2016. Pria 38 tahun yang lahir di Jakarta ini merupakan lulusan S1 Teknik Industri di STT Telkom Tahun 2000, kemudian beliau melanjutkan pendidikan Magister Manajemen Keuangan FEUI di Universitas Indonesia pada tahun 2004.

Renova Visky serves as VP Project Monitoring at Indonesia Infrastructure Guarantee Fund since April 2016. He is 38 years and was born in Jakarta, earned Bachelor Degree of Industrial Engineering from STT Telkom in 2000, He continued his Master Degree of Management from Faculty of Economics, Universitas Indonesia in 2004.



Susatyo Kuncahyono

SVP COO Office

SVP COO Office

Susatyo Kuncahyono, *SVP COO Office* bergabung di PT PII pada bulan Desember 2016. Beliau yang tahun ini berusia 52 tahun, menyelesaikan pendidikan S1-nya di Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Gadjah Mada, dan selanjutnya mengambil gelar Master Manajemen di Universitas Indonesia.

Susatyo Kuncahyono the SVP COO Office is joined with IIGF since December 2016. He is 52 years old this year and earned Bachelor Degree of Management from Faculty of Economics, Universitas Gadjah Mada and continued to Master Degree of Management at Universitas Indonesia.

Struktur dan Komposisi Pemegang Saham

Shareholders Structure and Composition

Kepemilikan Saham PT PII 100% dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.

IIGF Shares are 100% owned by Republic of Indonesia Government.



100%



PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
Indonesia Infrastructure Guarantee Fund

Kepemilikan Saham yang Mencapai 5% atau Lebih
per 31 Desember 2016

5% or Higher Shares Ownership as of December 31, 2016

Nama Pemegang Saham Name of Shareholders	Jumlah Saham Total Shares	Persentase Percentage	Jumlah Modal Disetor Total Paid-in Capital
Pemerintah Republik Indonesia	7.000.000 lembar	100%	Rp7.000.000.000.000

Kepemilikan Saham oleh Dewan Komisaris dan Direksi

Saham PT PII sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia, sehingga tidak terdapat kepemilikan saham oleh Dewan Komisaris dan Direksi PT PII di Perusahaan.

Board of Commissioners and Board of Directors Shares Ownership

Shares of IIGF are fully owned by Republic of Indonesia Government, therefore, the Board of Commissioners and Board of Directors in the Company do not have any shares ownership in the Company.



Entitas Anak dan Entitas Asosiasi

Subsidiary and Association

Hingga 31 Desember 2016, PT PII tidak memiliki Entitas Anak, Entitas Asosiasi, *Joint Venture* dan *Special Purpose Vehicle Company*.

As of December 31, 2016, IIGF did not have either Subsidiary, Association, Joint Venture or Special Purpose Vehicle Company.

Struktur Grup Perusahaan

Corporate Group Structure

Hingga 31 Desember 2016, PT PII tidak memiliki Entitas Anak, Entitas Asosiasi, *Joint Venture* dan *Special Purpose Vehicle Company*, sehingga tidak ada hal yang dapat dilaporkan terkait Grup Perusahaan.

As of December 31, 2016, IIGF did not have either Subsidiary, Association, Joint Venture or Special Purpose Vehicle Company, therefore, information about Corporate Group Structure is irrelevant.

Kronologis Pencatatan Saham

Shares Listing Chronology

Hingga 31 Desember 2016, saham PT PII sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia dan belum pernah dicatitkan di bursa saham manapun, sehingga tidak terdapat informasi mengenai kronologis pencatatan saham, *corporate action*, perubahan jumlah saham dan nama bursa dimana saham Perusahaan dicatitkan.

As of December 31, 2016, shares of IIGF are fully owned by Republic of Indonesia Government and never been listed at any Stock Exchange, therefore, information about shares listing chronology, corporate action, change in total shares outstanding and name of stock exchange are irrelevant.

Kronologis Pencatatan Efek Lainnya

Other Securities Listing Chronology



Hingga 31 Desember 2016, PT PII belum pernah menerbitkan efek dalam bentuk apapun yang diperdagangkan di bursa manapun, sehingga tidak terdapat informasi mengenai kronologis pencatatan efek lainnya, aksi korporasi, perubahan jumlah efek lainnya, nama bursa dimana efek lainnya dicatatan, serta peringkat efek.

As of December 31, 2016, IIGF had not issued any securities nor had the securities traded at any stock exchange, therefore, information about other securities listing chronology, corporate action, change in total other securities and name of stock exchange are irrelevant.

Lembaga dan Profesi Penunjang Perusahaan

Supporting Agency and Profession

Keterangan Description	Nama Kantor Office Name	Alamat Address
Kantor Akuntan Publik Public Accountant Firm	Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan/ PwC	Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-7 No. 6 Jakarta 12940 - INDONESIA P.O. Box 2473 JKP 10001
Notaris Notary	Kumala Tjahjani Widodo, SH., NH., M.Kn.	Jl. Biak Raya No. 7D, Jakarta Pusat
Konsultan Hukum Legal Consultant	Malaming & Partners	Ruko Garden Shopping Arcade B/8 DH Jl. S. Parman kav. 28 Kel. Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat



Informasi Website Perusahaan

Official Website Information

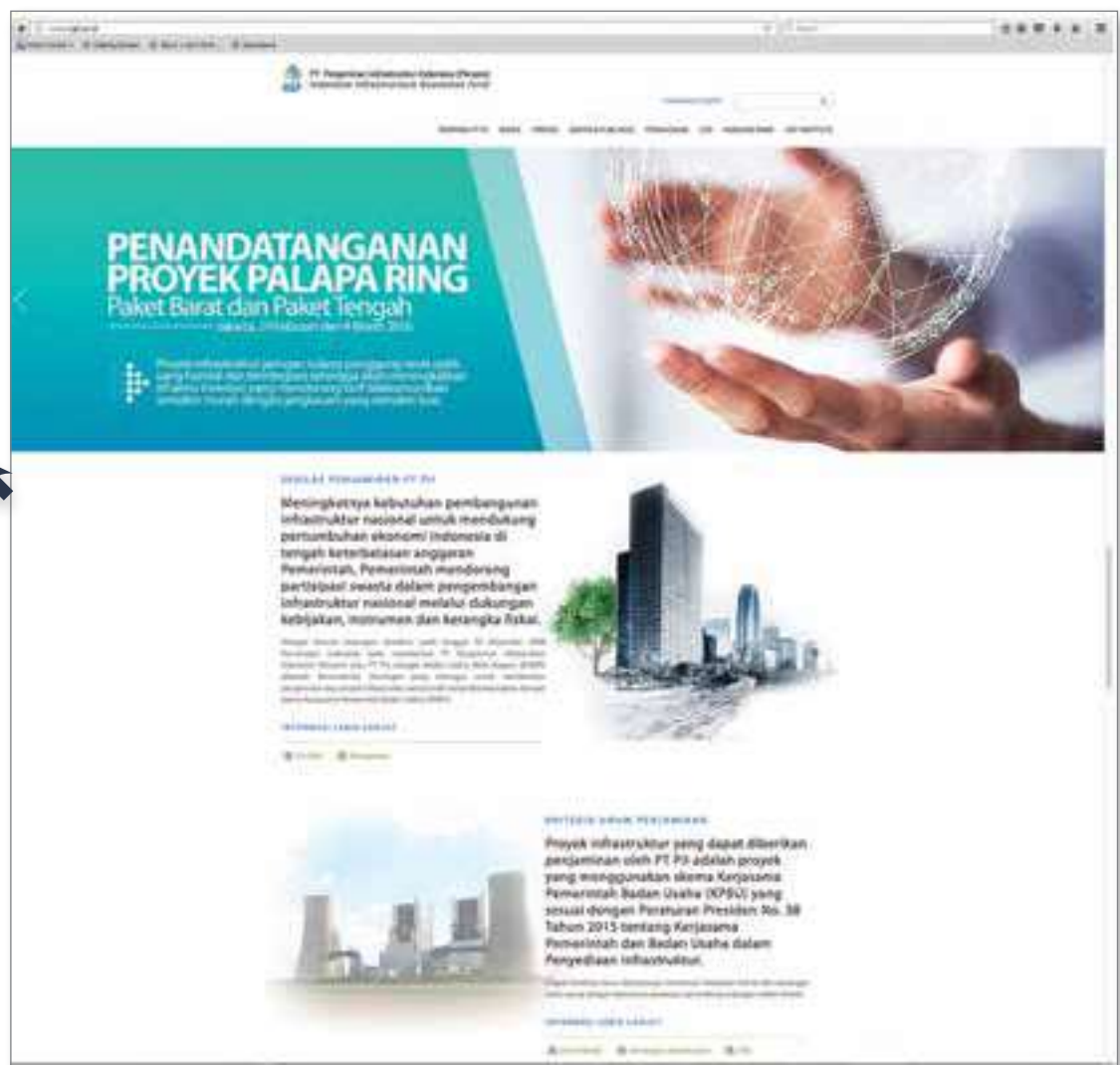
Perusahaan telah menyiapkan berbagai media komunikasi untuk mempermudah *stakeholders* memperoleh berbagai informasi tentang Perusahaan, salah satunya melalui *website* yang dapat diakses kapan pun dan di mana pun.

The Company has provided various communication channels to support the Stakeholders acquiring various information about the Company, including official website accessible anytime and anywhere.



Untuk informasi
lebih lanjut,
silakan kunjungi situs
/
For further
information,
please visit

www.iigf.co.id



Website PT PII antara lain berisikan:

- Profil Perusahaan.
- Komposisi Pemilik Saham.
- Profil Dewan Komisaris dan Direksi.
- Model Bisnis dan Layanan PT PII.
- Laporan Tahunan Perusahaan.

PT PII Website includes:

- Company Profile
- Shareholders Structure
- Board of Commissioners and Board of Directors Profile
- Business Model and Services
- Annual Reports

Wilayah Operasional Perusahaan

Operational Area

Wilayah operasional PT PII adalah di seluruh wilayah Indonesia. Namun berdasarkan pertimbangan efektivitas operasional, seluruh kegiatan usaha PT PII masih dikendalikan dari Kantor Pusat PT PII yang beralamat di:

Operational area of IIGF is across Indonesia. However, considering operational effectiveness, entire business activity of IIGF is controlled from IIGF Head Office at:



Gedung Capital Place, Lantai 7 & 8

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 18
Jakarta 12710 - Indonesia
Telp +62 21 5795 0550
Fax +62 21 5795 0040
Email: info@iigf.co.id

Gedung Capital Place, 7th & 8th Floor

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 18
Jakarta 12710 - Indonesia
Phone +62 21 5795 0550
Fax +62 21 5795 0040
Email: info@iigf.co.id



Fungsi Penunjang Bisnis

Business Supporting Function





PT PII telah menjalankan sistem pengembangan SDM berbasis kompetensi yang dijalankan secara terintegrasi. Sistem pengembangan ini mencakup seluruh proses dalam pengembangan SDM, yaitu meliputi proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian aktivitas tenaga kerja secara optimal mulai dari tahap rekrutmen sampai dengan terminasi (pengunduran diri atau pensiun).

IIGF has implemented competency-based Human Capital development system in integrated way. This development system covers entire Human Capital development process including employee planning, implementation and activity controlling optimally starting from recruitment until termination (resigned or retired) phase.

102 Sumber Daya Manusia
Human Capital

103 Manajemen SDM
Human Capital Management

104 Roadmap Pengelolaan SDM
Human Capital Management Roadmap

105 Rekrutmen
Recruitment

106 Sistem Manajemen Kinerja
Performance Management System

107 Pensiun
Retirement

108 Program Pengembangan Kompetensi
Competency Development Program

110 Biaya yang Dikeluarkan
Budget

110 Statistik Karyawan
Employee Static

113 Rencana Pengembangan SDM 2017
Human Capital Development Plan 2017

116 Teknologi Informasi
Information Technology

117 Roadmap Pengembangan TI
IT Development Roadmap

117 Pengembangan TI 2016
IT Development 2016

119 Tata Kelola TI
IT Governance

120 Rencana Pengembangan TI 2017
IT Development Plan 2017





Sumber Daya Manusia Human Capital

Strategi bisnis yang dijalankan oleh PT PII pada tahun 2016 merupakan kelanjutan dari strategi jangka panjang yang telah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya. Sepanjang tahun 2016, PT PII secara aktif mendorong perluasan kegiatan usaha dengan tidak hanya terbatas pada penjaminan proyek infrastruktur di 19 sektor, namun juga penjaminan untuk proyek non-KPBU melalui penugasan kepada BUMN dan/atau BUMD dan penjaminan atas pinjaman BUMN dan/atau BUMD dari lembaga Keuangan.

PT PII menyadari, untuk mendukung berjalannya strategi tersebut dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan memiliki dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, PT PII terus mendorong terwujudnya program pengembangan SDM yang efektif di lingkungan PT PII.

IIGF implemented a business strategy in 2016 as sequence of long-term strategy which has been implemented since the previous years. Throughout 2016, IIGF actively encouraged business activity expansion not only limited on guarantee for infrastructure projects in 19 sectors but also guarantee facilities for non-PPP projects through assignment to the SOE and/or ROE and guarantee for SOE and/or ROE loans that was provided by the Financial Institution.

IIGF realizes to support implementation of this strategy, personnel with high quality and education is needed to carry out their duties and responsibilities. Therefore, IIGF encourages establishment of effective human capital development program consistently in IIGF organization circumstances.



Manajemen SDM

Human Capital Management

PT PII sangat menyadari bahwa SDM merupakan aspek strategis dalam proses pencapaian visi dan misi Perusahaan. Oleh karena itu PT PII senantiasa memberikan perhatian khusus terhadap pengelolaan SDM yang berada di bawah Divisi *Corporate Service* dengan melakukan penyempurnaan kebijakan secara berkala dan optimalisasi pelaksanaan praktik ketenagakerjaan sepanjang siklus kepegawaian. Kesadaran tersebut dilandasi atas pemahaman PT PII bahwa kualitas, kompetensi dan profesionalisme SDM-nya akan menentukan masa depan Perusahaan.

Pengembangan SDM di PT PII telah dilaksanakan sejak Perusahaan berdiri. Manajemen telah menetapkan dan melaksanakan kebijakan pengembangan SDM sebagai penerapan atas pengembangan organisasi untuk mendukung dan mengakselerasi kinerja bisnis. Sejak tahun 2015, pengembangan SDM lebih dipertajam lagi dengan tujuan untuk mendukung penuh pencapaian visi dan misi Perusahaan.

Tugas dan tanggung jawab Divisi *Corporate Service* yang berkaitan dengan pengelolaan SDM, antara lain:

1. Berkontribusi dalam meningkatkan optimalisasi dan produktivitas unit kerja.
2. Memastikan pemenuhan kebutuhan SDM Perusahaan melalui proses rekrutmen dan seleksi SDM yang sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
3. Memastikan efektivitas pelaksanaan program pengembangan berdasarkan arahan strategis organisasi sehingga program pengembangan kompetensi memenuhi kebutuhan perusahaan maupun individu karyawan.
4. Memastikan terselenggaranya sistem penilaian kinerja yang transparan, objektif dan adil di seluruh unit kerja dalam organisasi.
5. Memastikan terselenggaranya sistem kompensasi dan benefit yang berlandaskan prinsip *internally fair & externally competitive*.
6. Berkontribusi dalam mencapai sasaran unit kerja yang telah ditetapkan serta melakukan pengembangan.

IIGF highly concerns Human Capital (HC) as strategic aspect in the Company's vision and mission achievement process. Therefore, IIGF pays special attention upon Human Capital management by improving policy regularly and optimizing implementation of employment practice along the employment cycle. The awareness is adapting IIGF's understanding that quality, competency and professionalism of Human Capital will determine future of the Company.

In IIGF, Human Capital development has been done since the Company's establishment era. The Management has stipulated and exercised Human Capital Management as the implementation on organization development to support and accelerate business performance. Since 2015, Human Capital development has been sharpened to fully support achievement of Company's vision and mission.

Duty and responsibility of Corporate Service related with Human Capital management are as follows:

1. To contribute in improving working unit optimization and productivity.
2. To ensure fulfillment of man power requirement through employee recruitment and selection process based on stipulated procedure.
3. To ensure effectiveness of development program implementation based on organization strategic direction to ensure every competency development program to fulfill requirement of both the Company generally and employee individually.
4. To ensure implementation of transparent, objective and fair performance assessment system in entire working unit of the organization.
5. To ensure implementation of compensation and benefit system based on internally fair and externally competitive principles.
6. To contribute on the achievement of working unit target as stipulated and performed development program.

Roadmap Pengelolaan SDM

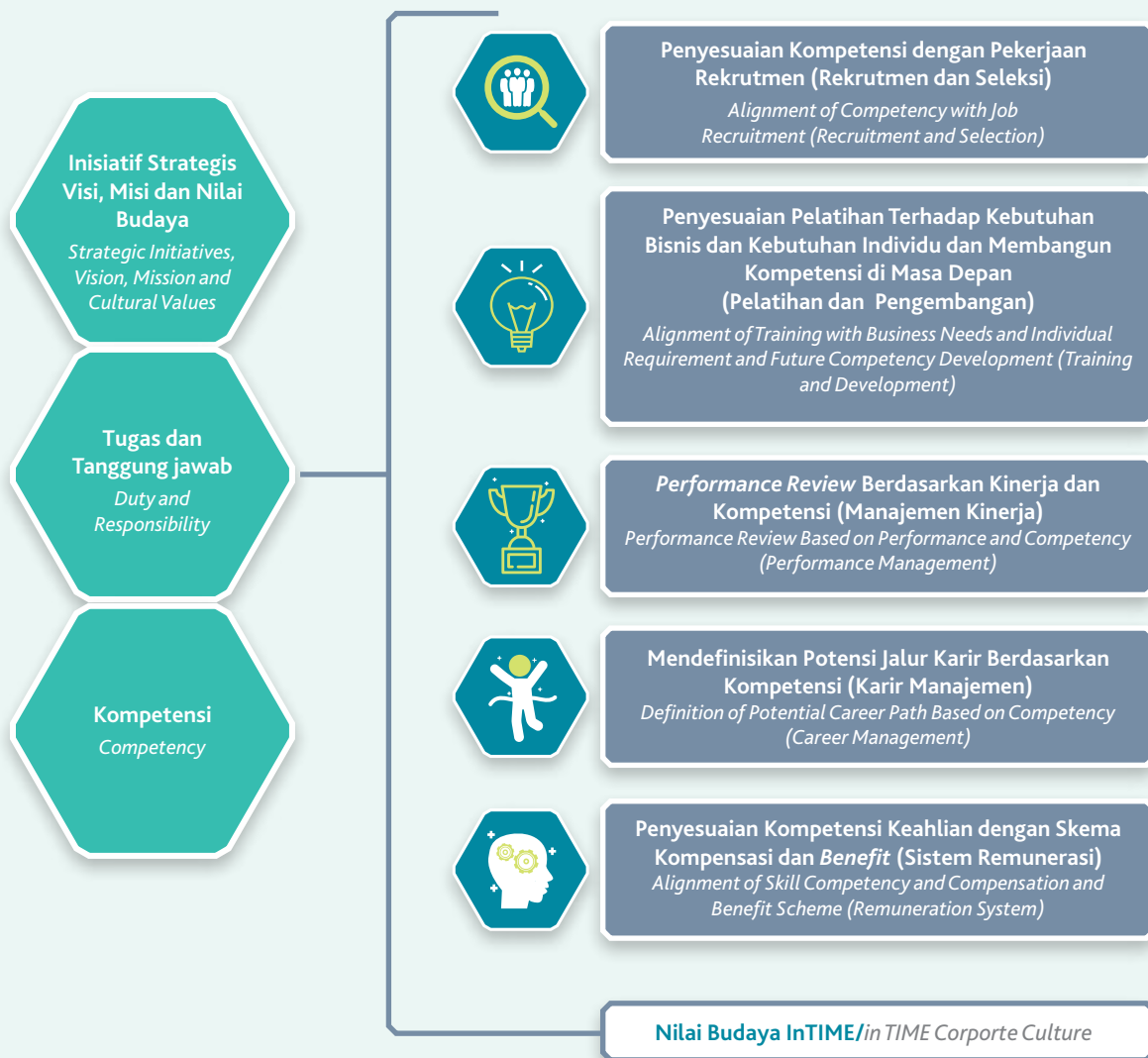
Human Capital Management Roadmap

PT PII telah menyusun *roadmap* pengembangan SDM yang telah disesuaikan dengan strategi dan tujuan jangka panjang perusahaan. Adapun *roadmap* pengembangan SDM PT PII periode tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IIGF has designed Human Capital development roadmap aligned with corporate long-term strategy and target. IIGF Human Capital Development roadmap for 2016 – 2020 period is illustrated below:

Rencana Strategis SDM periode tahun 2016 - 2020

Human Capital Strategic Plan 2016 - 2020





Rekrutmen

Recruitment

Dalam menunjang rencana pengembangan perusahaan, PT PII membutuhkan karyawan yang memiliki kemampuan dan karakteristik sesuai dengan spesifikasi pekerjaannya. Selain melalui program pengembangan karyawan, hal tersebut juga dapat dicapai dengan melaksanakan rekrutmen dan seleksi karyawan.

PT PII melakukan berbagai upaya untuk memperoleh karyawan berpotensi yang sesuai dengan kebutuhan, antara lain:

1. Metode *Sourcing*

PT PII menerapkan asas kesamaan kesempatan dalam proses rekrutmen. Oleh karenanya rekrutmen karyawan PT PII dilakukan secara terbuka. Untuk mendapatkan calon karyawan berkualitas dan bertalenta terbaik untuk mengisi posisi tertentu, PT PII menerapkan 2 pola rekrutmen, yakni rekrutmen internal dan rekrutmen umum. Pada tahun 2016, PT PII bekerja sama dengan beberapa *Headhunter* dan situs lowongan kerja terkemuka untuk menginformasikan lowongan pekerjaan serta mencari kandidat yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan.

2. Metode Seleksi

Untuk mendapatkan kandidat yang tepat, PT PII menggunakan beberapa metode seleksi, diantaranya psikotes, wawancara dan tes kesehatan. Adapun untuk alat *test* yang digunakan pada tahun 2016 mencakup tes kepribadian, tes intelegensi dan tes kecepatan kerja. Sedangkan untuk proses *interview*, PT PII tidak hanya menekankan pada kompetensi atau keterampilan teknis kandidat, namun juga pada kepribadian dan perilaku.

Tahun 2016, PT PII merekrut 24 karyawan baru, baik yang berstatus *pro-hire* maupun *fresh graduate*, untuk mengisi berbagai posisi yang ada di Perusahaan.

In supporting the Company's development plan, IIGF requires employee with capability and characteristics based on job specification. Besides through employee development program, this will be also done by conducting employee recruitment and selection.

IIGF has implemented initiatives to recruit potential employees based on needs, among others:

1. Sourcing Method

IIGF adopts equality principle in the recruitment process. Therefore, employee recruitment in IIGF is open for public. To recruit employee with excellent quality and talent to be assigned in particular position, IIGF implemented two recruitment schemes, internal recruitment and public recruitment. In 2016, IIGF collaborated with Jobstreet and LinkedIn as media to publish job vacancy and seek the perfect candidate based on requirements.

2. Selection Method

To recruit the right candidate, IIGF applies several types of selection method including psychological test, interview and medical check up. In 2016, the selection tools applied comprising of personality test, intellegency test and work speed test. However, for the interview test, IIGF did not only emphasize on technical competency or skill but also personality and attitude of the candidate.

IIGF recruited 24 new employees in 2016, both for *pro-hire* and *fresh graduate* status to be assigned in various positions in the Company.

Sistem Manajemen Kinerja Performance Management System

PT PII telah menjalankan sistem pengembangan SDM berbasis kompetensi yang dijalankan secara terintegrasi. Sistem pengembangan ini mencakup seluruh proses dalam pengembangan SDM, yaitu meliputi proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian aktivitas tenaga kerja secara optimal mulai dari tahap rekrutmen sampai dengan terminasi (pengunduran diri atau pensiun).

Dalam sistem pengembangan SDM berbasis kompetensi, seluruh proses pengambilan keputusan dilandaskan pada informasi kebutuhan kompetensi yang terdiri dari kompetensi inti, kompetensi kepemimpinan dan kompetensi keluarga jabatan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan standar kinerja yang telah ditetapkan.

Kompetensi yang dimiliki oleh karyawan secara individual harus dapat mendukung pelaksanaan visi dan misi Perusahaan melalui kinerja Perusahaan tersebut. Kinerja individu dalam Perusahaan merupakan jalan untuk meningkatkan produktivitas sehingga pengembangan SDM berbasis kompetensi dapat meningkatkan produktivitas karyawan dan mencapai kualitas kerja yang optimal, yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan dalam menjalankan penugasan sesuai mandat.

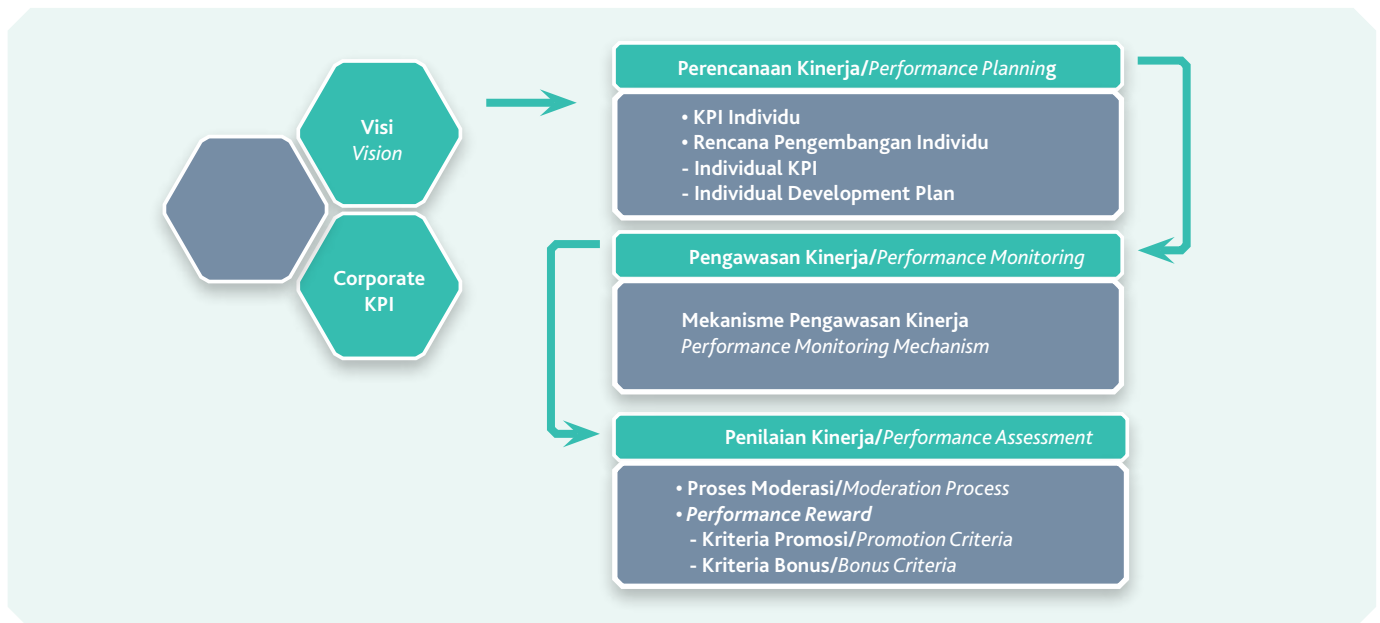
Proses evaluasi kinerja dilakukan secara berkala menggunakan *Key Performance Indicator (KPI)* berbasis *Balanced Score Card (BSC)* atau lebih dikenal dengan istilah BSC KPI. Selain itu, perusahaan juga melakukan *assessment* bagi karyawan di tingkat senior (tingkat SVP/EVP) dengan menggunakan jasa konsultan *assessment* yang kompeten di bidangnya. Tindak lanjut penilaian kinerja dan kompetensi adalah perencanaan dan pelaksanaan program pengembangan, rotasi, mutasi dan promosi bagi karyawan bersangkutan.

IIGF has implemented competency-based Human Capital development system in integrated way. This development system covers entire Human Capital development process including employee planning, implementation and activity controlling optimally starting from recruitment until termination (resigned or retired) phase.

In this competency-based Human Capital development system, every decision-making process referring to competency requirement information comprising of core competency, leadership competency and position group competency to achieve Company's objectives with expected performance standard.

Individual competency of the employee has to support implementation of organization's vision and mission through the organization performance. In the organization, individual performance is a course to increase productivity of the organization so that competency-based Human Capital development will increase employee productivity and achieve optimum working quality, to bring higher customer satisfaction in carrying out the mandate.

Performance evaluation process is done regularly using Key Performance Indicators (KPI) based on Balanced Score Card (BSC) or known as BSC KPI. In addition, the Company also conducted employee assessment at senior (SVP/EVP) level assisted by competent assessment service consultant. Performance and competency assessment will be followed up by planing and implementation of employee development, rotation, mutation and promotion.



Pensiun Retirement

Sesuai dengan Peraturan Perusahaan, usia pensiun karyawan PT PII ditetapkan 56 tahun dengan waktu kerja terakhir jatuh pada akhir bulan saat karyawan menginjak usia 56 tahun. Perusahaan juga mengikutsertakan karyawan dalam program wajib BPJS Ketenagakerjaan, salah satunya adalah Jaminan Pensiun. Selain itu, PT PII juga menyelenggarakan program pensiun melalui DPLK bagi seluruh karyawan tetap di PT PII, dengan kontribusi sebesar 7% (tujuh persen) dari THP karyawan. Diharapkan dengan adanya DPLK ini dapat membantu kesinambungan penghasilan bagi karyawan yang telah mencapai usia pensiun.

In accordance with IIGF Company Regulation, pension age is regulated at 56 years with the last working tenure by end of month the employee entering age of 56 (fifty six) years. The Company also participated the employees in BPJS Ketenagakerjaan mandatory program, such as Pension Insurance. Moreover, IIGF also provides pension program via DPLK for all permanent employees of IIGF with 7% contribution from the Take Home Pay. Through the DPLK, the Company is expected to help a sustain income for employees in pension age.

Program Pengembangan Kompetensi

Competency Development Program

PT PII sangat menyadari arti penting SDM bagi kelangsungan usaha perusahaan. Untuk itu, PT PII melakukan upaya untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan SDM yang dimilikinya secara berkesinambungan. Dalam rangka mewujudkan visi dan misinya, PT PII memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh karyawan dalam mendapatkan program pelatihan. Program pelatihan bagi karyawan didasarkan pada kebutuhan pengembangan individu untuk menunjang keberhasilan Perusahaan atau organisasi. Pelatihan yang diberikan kepada karyawan selalu berdasarkan kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang baik itu *soft skill* atau *hard skill*.

Program pelatihan karyawan merupakan bagian penting dari rencana strategis pengembangan SDM di PT PII dan memainkan peran sentral dalam upaya perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya.

Upaya pengembangan kompetensi karyawan dilakukan melalui pengadaan berbagai pelatihan, lokakarya maupun seminar bagi karyawan mengenai berbagai topik di bidang penjaminan dan risiko terkait konsep KPBU maupun kompetensi yang relevan dengan bidang kerja karyawan di berbagai fungsi atau posisi.

PT PII melakukan evaluasi secara kontinu terhadap kompetensi yang dimiliki SDM, khususnya untuk kompetensi yang mengalami perubahan dalam alur proses kerja/teknologi baru/mekanisme baru.

Kesempatan yang Sama pada Seluruh Pegawai

PT PII menerapkan Sistem Manajemen SDM berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan dan adil. Setiap pegawai mendapatkan kesempatan yang sama dalam berbagai hal, mulai dari penerimaan karyawan, pelaksanaan tugas secara profesional, memperoleh kompensasi, pelatihan dan jenjang karir sesuai dengan kompetensinya masing-masing.

IIGF realize important means of employees for the Company's business going concern. Therefore, IIGF also undertakes employee competency and skill development in ongoing basis. To achieve its vision and mission, IIGF provides equal opportunity for employees to participate in training program. Employee training program considers individual development needs to support success of the Company or organization. The training provided to employee is designed based on short-term and long-term needs both in terms of soft-skill or hard-skill.

Employee training program is essential part of Human Capital development strategic plan at IIGF with central role in the Company's initiative to improve its performance.

Employee competency development plan is executed through various training, workshop and seminar arrangement for employees about topics related to insurance and risk.

IIGF performed continuous evaluation on the employee's competency, primarily changing competency in working process/new technology/new mechanism schemes.

Fair Opportunity

The Company exercises Human Capital Management System based on transparency and fairness principles. Every employee will have equal opportunity in various aspects starting from employee recruitment, to carry out their duties professionally, receive compensation, training and career path based on individual competency.



PT PII menjamin tidak terjadi tindakan diskriminasi dalam memperlakukan karyawan sehingga tercipta perlakuan yang adil dan jujur sesuai dengan potensi, kemampuan, pengalaman dan keterampilan masing-masing untuk mencapai kinerja yang *excellence*.

PT PII merekrut, mempertahankan, dan mengembangkan insan yang memiliki kemampuan dan kinerja *excellence*. Dengan demikian, PT PII berupaya melakukan proses pengelolaan SDM berdasarkan faktor kemampuan (*competency*) dan kinerja (*performance*) yang sejalan dengan aspek *fairness*.

Pelatihan yang Diberikan

PT PII memberikan kesempatan yang sama kepada semua karyawan untuk mengikuti pelatihan/*workshop* yang diperlukan. Sepanjang tahun 2016, terdapat 91 orang yang mengikuti pelatihan baik di dalam negeri maupun di dalam negeri

Tabel Training Menurut Jenis Pelatihan di Tahun 2016

No.	Jenis Pelatihan Training Type	Jumlah Judul/ Title Number
1.	<i>Inhouse Training</i>	15
2.	<i>Public Training</i>	70

*) diluar data pelatihan Dewan Komisaris dan Direksi

*) *data training outside of the Board of Commissioners and Board of Directors*

IIGF guarantees there will be no discrimination in the employee treatment that will establish fair and honest treatment based on potential, capability, experience and skill of each employee to achieve performance excellence.

IIGF recruits, retains and develops personnel with excellent competency and performance. Therefore, IIGF strives to perform Human Resources Management process based on competency and performance factors that are in line with fairness aspect.

Training Programs

IIGF provides fair opportunity to all employees to participate in desired training/workshop. Throughout 2016, there were 91 employees who participated in the domestic and international trainings.

Training based on Type 2016

Biaya yang Dikeluarkan Budget

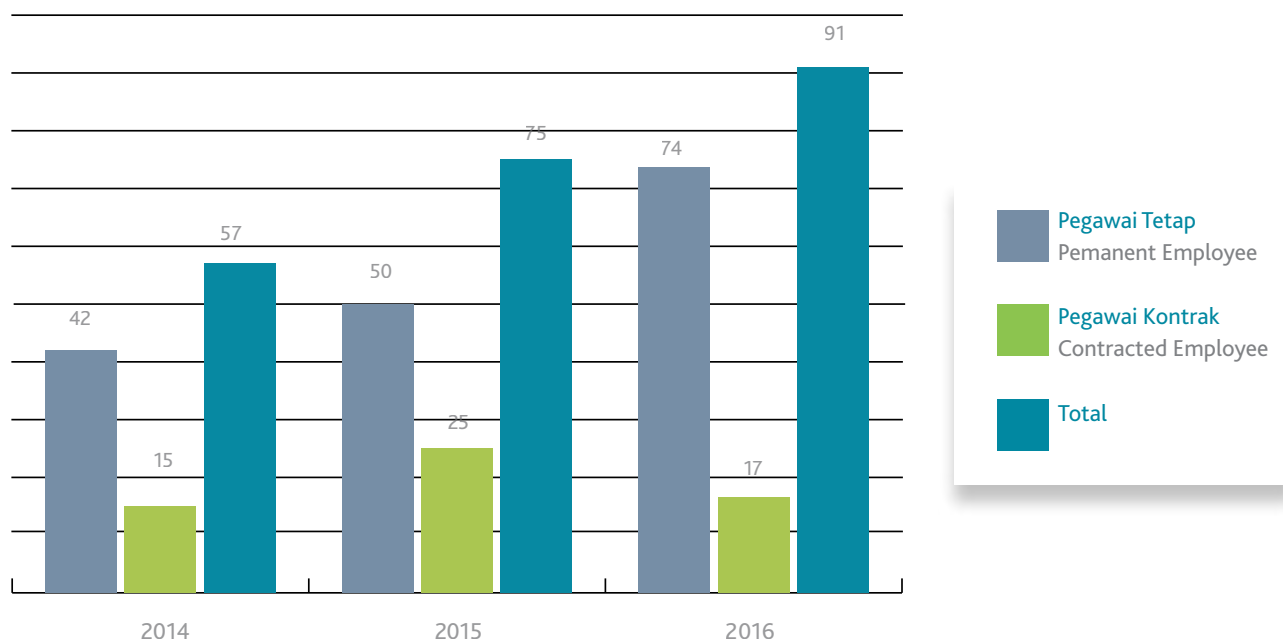
PT PII mempercayai bahwa investasi di bidang pengembangan SDM dapat meningkatkan daya saing Perusahaan di masa depan. Untuk itu, PT PII tidak ragu dalam melakukan investasi yang berkaitan dengan pengembangan karyawan. Sepanjang tahun 2016, investasi di bidang pengembangan SDM yang dikeluarkan PT PII mencapai Rp2.809.961.108.

IIGF believes that investment in Human Capital development sector will increase the Company's competitiveness in the future. Therefore, IIGF certainly allocates investment in employee development aspect. Throughout 2016, IIGF allocated Rp2,809,961,108 as investment in Human Capital Development sector.

Statistik Karyawan Employee Stastic

Seiring dengan perkembangan usaha, jumlah karyawan PT PII juga mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Statistik jumlah karyawan PT PII dalam 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

As IIGF's business grows, number of employees is also increasing. IIGF employee statistics in 3 (three) recent years are as follows:





Seiring dengan perkembangan usaha Perusahaan, jumlah karyawan PT PII juga bertambah dalam 3 tahun terakhir. Penambahan jumlah karyawan ini telah melalui analisis kebutuhan dan rencana pengembangan Perusahaan ke depan.

Komposisi karyawan PT PII didominasi oleh karyawan tetap. Hal ini merupakan salah satu bentuk ketaatan PT PII terhadap Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

As the Company's business growth, numbers of employee increased as the Company's business grew. Higher number of employees was referring to man power planning and The Company's development plan in the future.

IIGF employee composition is dominated by permanent employees. This manifests our compliance to Law No. 13 of 2003 on Employment.

Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia

Employee profile by Age

Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia/Employee profile by Age				
Rentang Usia Age Group	2015		2016	
	Jumlah/ Total	%	Jumlah/ Total	%
18 - 25 tahun/years	10	13.3%	17	18.7%
26 - 35 tahun/years	35	46.7%	44	48.4%
36 - 45 tahun/years	24	32.0%	24	26.4%
46 - 54 tahun/years	5	6.7%	6	6.6%
di atas 55 tahun/over 55 years	1	1.3%	0	0.0%
Jumlah/Total	75	100.0%	91	100.0%

Komposisi karyawan PT PII didominasi oleh karyawan dengan usia emas, yaitu karyawan dengan rentang usia di bawah 35 tahun dengan komposisi sebesar 67,1%. Komposisi tersebut dilengkapi dengan karyawan dengan rentang usia di atas 35 tahun yang sudah sarat pengalaman dengan komposisi sebesar 32,9%. Komposisi ini merupakan perpaduan yang sangat baik untuk kondisi saat ini dan untuk menunjang rencana jangka panjang perusahaan.

IIGF employee composition is dominated with employee in golden age, or employees with age below 35 years with 67.1% composition. The composition also has employees with age older than 35 years or well-experienced employees with 32.9% composition. This is a very good composition for current condition and to support the Company's long-term plan.

Komposisi Karyawan Berdasarkan Pendidikan

Employee profile by education

Komposisi Karyawan Berdasarkan Pendidikan/Employee profile by education

Jenjang Pendidikan Education Level	2015		2016	
	Jumlah/ Total	%	Jumlah/ Total	%
Doktor (S3) /Ph.D Degree	4	5.3%	4	4.4%
Pasca Sarjana (S2)/Post Graduate	26	34.7%	32	35.2%
Sarjana (S1) & Diploma/ Bachelor Degree & Diploma	45	60.0%	55	60.4%
Jumlah/Total	75	100.0%	91	100.0%

Tingkat pendidikan karyawan PT PII paling rendah adalah tingkat Diploma. Dengan tingkat pendidikan yang semakin tinggi akan menunjang pelaksanaan strategi perusahaan, baik strategi jangka pendek maupun jangka menengah dan panjang.

The lowest employee by education level at IIGF is contributed by Diploma level. The higher education level will support execution of the Company's short, medium and long-term strategies.

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Jabatan

Employee profile by Position Level

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jabatan/Employee profile by Position Level

Kategori Jabatan Position Category	2015		2016	
	Jumlah/ Total	%	Jumlah/ Total	%
Staff	24	32.0%	23	25.3%
Junior Manager (AM-M)	9	12.0%	21	23.1%
Middle Manager (DSM-AVP)	17	22.7%	17	18.7%
Senior Manager (VP-SVP)	24	32.0%	30	33.0%
Executive Manager (EVP)	1	1.3%	0	0.0%
Jumlah/Total	75	100.0%	91	100.0%

PT PII memberikan kesempatan yang sama bagi setiap karyawan untuk mengembangkan karir di perusahaan sesuai kapasitas dan kompetensinya. PT PII menyiapkan jenjang karir dan sistem manajemen karir yang jelas bagi setiap karyawan.

IIGF provides equal career development opportunity for the employees based on capacity and competency. IIGF has prepared transparent career path and career management system for all employees.



Rencana Pengembangan SDM 2017

Human Capital Development Plan 2017



Sesuai rencana strategis pengembangan SDM PT PII periode tahun 2016-2020, beberapa program utama yang akan dijalankan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan program rekrutmen.

Untuk mendukung strategi pengembangan usaha perusahaan, PT PII membutuhkan SDM yang memiliki kapasitas dan karakteristik sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Untuk itu, PT PII akan melakukan penyesuaian kompetensi dengan program rekrutmen yang dijalankan perusahaan.

2. Penguatan program pelatihan.

PT PII sangat menyadari bahwa pengembangan SDM merupakan proses yang kontinu. Oleh karena itu, PT PII akan melakukan penguatan program pelatihan karyawan yang disesuaikan dengan tujuan perusahaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Penguatan program pelatihan dengan berlandaskan pada visi, misi dan nilai budaya perusahaan untuk menciptakan SDM yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan.

In accordance with IIGF Human Capital development strategic plan 2016-2020, main programs to be implemented in 2017 are including:

1. Recruitment program enforcement

To support corporate business development strategy, IIGF requires employees with suitable capacity and characteristics to the Company's needs. Therefore, IIGF will align competency requirement with recruitment program implemented in the Company.

2. Training Program Improvement

IIGF highly realizes that Human Capital development is an endless process. Therefore, IIGF will continue to improve employee training program in accordance with the Company's short-term and long-term objectives. Improvement of the training program adapts vision, mission and corporate values to create employee with competency based on the requirement.

Visi, Misi dan Nilai Budaya
Vision, Mission and Corporate Culture



Jangka Panjang
Long-Term

Jangka Panjang
Long-Term

- Produktivitas Tinggi
- Operasional Efektif dan Efisien
- Tingkat Kesehatan Tinggi
- Tanggung Jawab Seimbang
- Komunikasi Terintegrasi (*Integrated Communication*)

- *High Productivity*
- *Effective and Efficient Operation*
- *High Health Level*
- *Balance Responsibility*
- *Integrated Communication*

Tujuan Bisnis
Business Target

- Pertumbuhan berkelanjutan
- Unggul/Kompetitif
- Sustainable Development
- Excellence/Competitive

- Kapabilitas teknis yang baik
- Kapabilitas Manajerial dan Kepemimpinan Baik
- Kerjasama tim dan Komunikasi Efektif
- Manajemen Proyek Baik
- Menjalani Nilai-nilai budaya Perusahaan

- *Good Technical Capability*
- *Good Managerial and Leadership Capability*
- *Effective Team Work and Communication*
- *Good Project Management*
- *Manifestation of Corporate Culture Values*

Kebutuhan SDM
Human Resources Requirement

- Berorientasi untuk Selalu Unggul
- Kepemimpinan Strategis yang Kuat
- Superior-Oriented
- Strong Strategic Leadership

Kompetensi

- Inti
- Kepemimpinan
- Keluarga Jabatan
- Teknis

Competency

- Core
- Leadership
- Position Cluster
- Technical

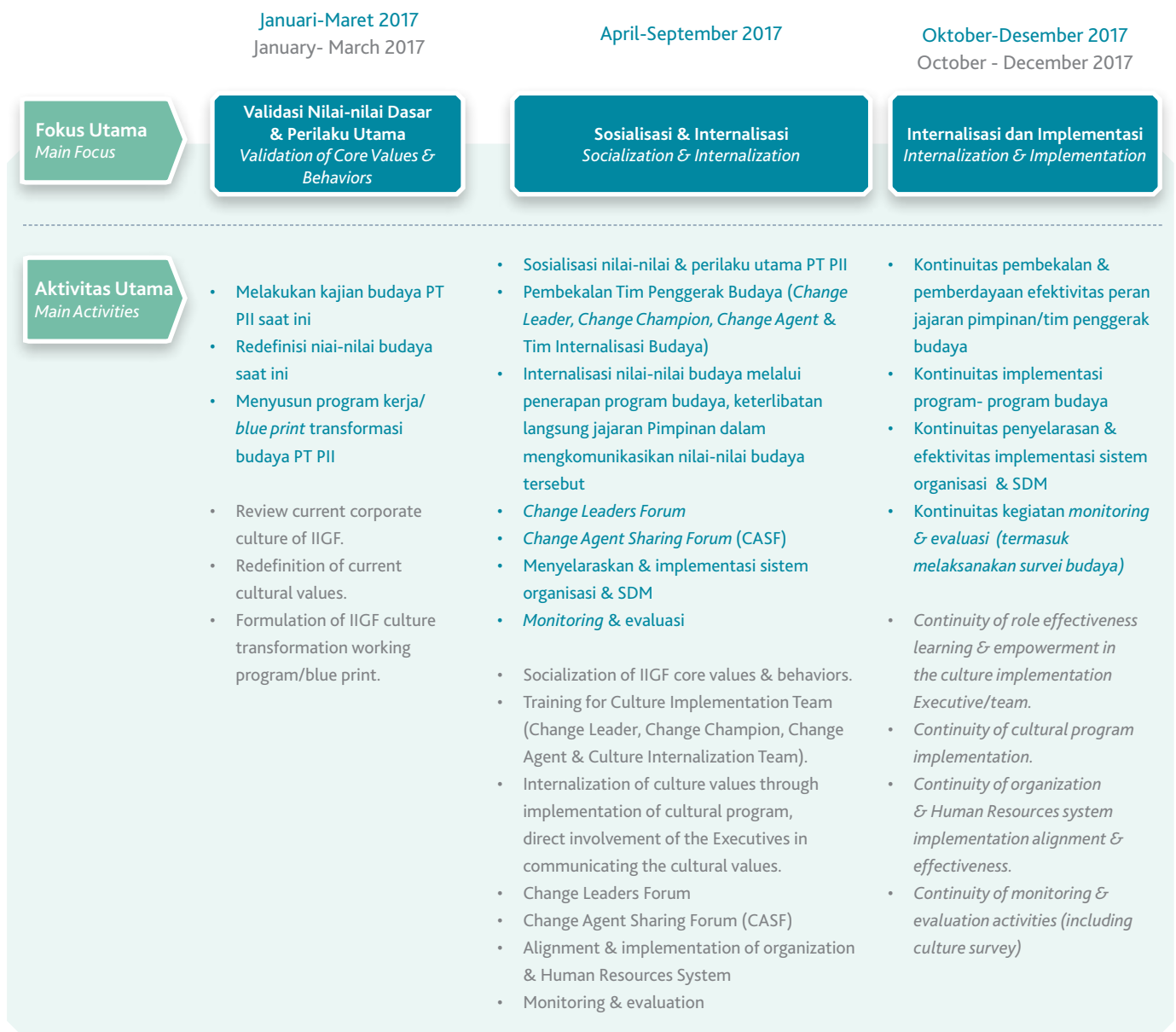


3. Transformasi budaya perusahaan.

Salah satu yang menjadi fokus pengembangan SDM hingga tahun 2017 adalah transformasi program budaya dengan *milestones* di bawah ini.

3. Corporate Culture Transformation

One of Human Capital development focus in 2017 is culture transformation program with milestones as illustrated below:





Teknologi Informasi Information Technology

Peranan Teknologi Informasi (TI) di dunia usaha kian strategis. TI telah menjadi instrumen yang sangat diandalkan dunia usaha untuk kelancaran dan efisiensi operasional secara keseluruhan. Lebih dari itu, TI juga dapat menjadi jembatan untuk menciptakan bisnis baru bagi perusahaan.

Berlandaskan pada hal itu, PT PII senantiasa melakukan pengembangan di bidang TI dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi tantangan usaha di masa depan. Untuk itu, Perusahaan melakukan banyak hal terkait pengembangan di bidang TI.

Pengembangan TI di PT PII merupakan tanggung jawab Divisi *Corporate Service*.

Information Technology (IT) has more strategic role in the business sector. IT has become an instrument with high reliability in the business sector to support overall operational continuity and efficiency. Moreover, IT also bridges new business creation for the Company.

Departing from this perspective, IIGF provides great opportunity for IT development. In addition, IIGF also performs continuous IT development to prepare the Company to deal with future business challenge. Therefore, the Company has done numbers of initiatives in terms of IT development.

IT development in the Company is under responsibility of *Corporate Service Division*.



Roadmap Pengembangan TI

IT Development Roadmap

Sesuai dengan keputusan Dewan Direksi melalui SK No. SK-001/DIR/HR/IT/07/2011, saat ini PT PII telah memiliki *roadmap* sebagai dokumen panduan dalam pengembangan Sistem Informasi dan Implementasi TI Perusahaan.

Akan tetapi dengan perkembangan bisnis yang semakin meningkat dan kebutuhan akan teknologi dan sistem TI yang lebih baik, maka dalam waktu dekat PT PII akan melakukan penelaahan dan pembaruan atas *Roadmap* yang ada untuk pengembangan TI dalam 3 (tiga) hingga 5 (lima) tahun ke depan.

Pursuant to Board of Directors Decree No. SK-001/DIR/HR/IT/07/2011, IIGF has IT Roadmap as Information System Development and IT Implementation in the Company.

However, considering rapid business growth and higher technology and better IT system needs, IT Roadmap is planned to be reviewed and revised in the mean time for IT development in the next 3 (three) to 5 (five) years.

Pengembangan TI 2016

IT Development 2016

Untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan operasional perusahaan, pada tahun 2016 telah dilakukan beberapa pengembangan TI dari sisi infrastruktur dan aplikasi diantaranya:

A. Infrastruktur

1. *Data centre* saat ini sudah memenuhi *standard* atau *best practice* dengan kelengkapan ruangan diantaranya:
 - a. *Akses door*. Akses hanya diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sehingga dapat dipastikan setiap orang yang masuk ke dalam *data centre* adalah orang yang memiliki hak akses.
 - b. *Fire and alarm system*. Saat ini, *data centre* sudah memiliki fasilitas *fire and alarm system FM200* untuk mencegah terjadinya kerusakan yang lebih besar pada *data centre*, apabila ada kejadian yang tidak diinginkan.
 - c. Pendingin ruangan. Untuk memenuhi standar suhu dan kelembaban pada *data centre*, saat ini *data centre* Perusahaan sudah menggunakan sistem pendingin ruang (*Precision air conditioning*) dengan tipe *Down flow* sebagai pendingin utama dan AC VRV *Wallmounted 2 PK* sebanyak 2 unit sebagai *backup* bilamana pendingin utama sedang dilakukan perawatan (*maintenance*).

To fulfill business and operational needs, IT development initiatives had been done in 2016 including infrastructure and application aspects, as follows:

A. Infrastructure

1. Data Centre has meet current standard or best practice with room equipment, as follows:
 - a. Access Door. The access is only available for authorized parties to ensure the people who enter the data centre are they who have the access rights.
 - b. Fire and alarm system. The data centre has FM 200 fire and alarm system to prevent greater damage on data centre if any unexpected calamity occurred.
 - c. Room chiller. To fulfill requirement of data centre temperature and humidity standard, we have used Precision air conditioning system with Down Flow type as Main Chiller and 2 units AC VRV Wallmounted 2 PK as backup when the Main Chiller is under maintenance.

2. Untuk memaksimalkan <i>resource hardware</i> yang dimiliki, saat ini perusahaan sudah memiliki infrastruktur <i>data centre</i> dengan teknologi virtualisasi, dengan kelebihanannya antara lain: a. Mengurangi biaya dalam hal konsumsi listrik dan tempat. b. Memudahkan dalam hal <i>maintenance</i>. c. Meningkatkan kehandalan layanan TI karena memiliki fitur <i>High availability</i>. 3. Setelah menggunakan teknologi virtualisasi, perusahaan juga memiliki <i>storage</i> sebagai tempat atau lokasi penyimpanan data yang tersentralisasi dimana sebelumnya lokasi penyimpanan masih berada di masing-masing fisik <i>server (Disk Drive)</i>. 4. Dalam rangka meningkatkan sistem keamanan jaringan dari pihak luar dan mencakup lebih banyak lagi <i>user</i> dikarenakan bertambahnya karyawan setiap tahunnya, saat ini perusahaan juga telah melakukan peningkatan spesifikasi <i>Firewall</i>. 5. Perusahaan telah memiliki sistem <i>Audio video</i> dan <i>Room booking system</i> untuk menunjang kegiatan operasional kantor, dalam kaitannya rapat internal, eksternal hingga <i>workshop</i> dengan <i>stakeholders</i>. B. Aplikasi/Software 1. Pengembangan sistem <i>Corporate Risk Management</i> yang dilakukan oleh Divisi <i>Corporate Service - IT</i> dan Divisi <i>Risk & Compliance</i> untuk meningkatkan <i>awareness</i> karyawan dalam hal pemantauan risiko yang mungkin terjadi di Perusahaan. 2. Pengembangan sistem <i>Document and Knowledge Management</i> untuk mempermudah pertukaran data/ dokumen dan pengetahuan antar karyawan.	2. To optimize existing hardware resource, the Company has data centre infrastructure facility with virtual technology that has following features: a. More efficient cost in terms of electricity and space consumption. b. Support the maintenance. c. Improve IT service reliability supported by High Availability Feature. 3. After using virtual technology, the Company also has storage as centralized data centre location where previously the storage location is at separated physical server (Disk Drive). 4. To improve network security system from external parties and to cover more users due to increasing number of employees annually, the Company has also upgraded Firewall specification nowadays. 5. The Company has also equipped Audio Video System and Room Booking System to support office operational activities, related with internal and external meetings as well as workshop with the stakeholders. B Application/Software 1. Corporate Risk Management System development that was implemented by Corporate Service – IT Division and Risk & Compliance Division to increase awareness of the employees in the Company’s potential risk monitoring. 2. Document and Knowledge Management System Development to ease data/document and knowledge sharing among the employees.



Tata Kelola TI

IT Governance

Dalam tata kelola TI, Perusahaan telah memiliki dokumen kebijakan TI (*IT Policy*) yang telah disetujui oleh seluruh direksi, dengan pembaruan terakhir dilakukan pada bulan Oktober 2015.

Kebijakan Pengelolaan TI, diantaranya:

1. Pengelolaan SDM.
2. Keamanan informasi.
3. Investasi TI.
4. Fasilitas TI.

Kebijakan Operasional TI antara lain:

1. Aset.
2. Pengendalian akses.
3. Keamanan fasilitas TI.
4. Komputer dan jaringan.
5. Kinerja dan kapasitas.
6. Manajemen kejadian.

Implementasi kebijakan yang juga telah berhasil dijalankan Perusahaan adalah terkait pengendalian akses, dimana konfigurasi sandi setiap karyawan harus memenuhi standar ketentuan TI seperti: jumlah sandi minimal 8 karakter, usia sandi maksimum 180 hari, kompleksitas sandi, dan sebagainya, guna meningkatkan keamanan akses informasi.

In terms of Governance, the Company has Indonesia Infrastructure Guarantee Fund IT Policy signed by the Board of Directors with the latest revision in October 2015.

The policy also governs IT Management and IT Operational policies.

1. Human Capital Management
2. Information Security
3. IT Investment
4. IT Facility

IT Operational Policy, among others:

1. Assets
2. Access Control
3. Computer and Network
4. Performance and Capacity.
5. Event Management.

Policy implementation that had been successfully executed by the Company was related with access controlling where the password configuration for every employee shall meet the IT provisions standard, such as: password shall have minimum 8 characters, password maturity shall be no longer than 180 days, password complexity and others to increase the safety of information access.

Rencana Pengembangan TI 2017

IT Development Plan 2017

Dalam rangka menunjang bisnis dan mempermudah operasional perusahaan, pada tahun 2017 PT PII melalui Divisi *Corporate Service* akan melakukan beberapa pengembangan TI antara lain:

1. Implementasi *Virtual Private Network* (VPN) – membangun sistem jaringan yang aman untuk dapat digunakan oleh setiap karyawan, yang memungkinkan karyawan dapat berkomunikasi melalui jaringan luar pada saat karyawan tidak berada di kantor, tetapi tetap dapat menggunakan peralatan jaringan kantor seperti:
 - a. Mengakses *sharing folder*.
 - b. Melakukan cetak dokumen.
 - c. Menjalankan aplikasi yang hanya dapat diakses melalui jaringan internal.
2. Implementasi *Disaster Recovery Centre* (DRC) – membangun *data centre* yang hampir serupa dengan *data centre* yang ada saat ini tetapi di lokasi yang berbeda, sehingga memungkinkan untuk dilakukan pemindahan *data centre* bilamana *data centre* saat ini tidak dapat diakses atau digunakan, utamanya pada saat bencana seperti: gempa bumi, banjir, badai, maupun huru-hara.
3. Implementasi oleh PT PII *Data Cloud* – membangun sistem penyimpanan data pekerjaan karyawan yang aman untuk dapat digunakan dan diakses oleh setiap karyawan pada saat berada di luar kantor, dimana penyimpanan ini akan selalu tersinkronisasi dengan penyimpanan data yang ada di *data centre* melalui *internet*, sehingga meminimalisir kemungkinan hilangnya data dokumen bilamana terjadi kehilangan *laptop/komputer* yang digunakan karyawan pada saat berada di luar kantor.
4. Implementasi *Backup Server* – membangun sistem *backup server* yang handal untuk mengantisipasi kerusakan data jika terjadi gangguan atau kerusakan pada *data centre*, dimana pada saat ini *backup server* yang berjalan masih menggunakan fitur standar *backup operating system*.

To support business and operational aspects, through Corporate Service Division, the Company will execute IT development initiatives in 2017, including:

- (1) Implementation of Virtual Private Network (VPN).
Developing a secure network to be used by every employee that enables the employee to communicate via external network when out of office, while still using resource or office network equipment (intra office), such as:
 - a. Accessing sharing folder.
 - b. Printing documents.
 - c. Running application that is only accessible via internal network.
- (2) Implementation of Disaster Recovery Center (DRC).
Developing data centre which is similar with existing data centre, in different location to enable data centre relocation if the data centre is not accessible or during the calamity such as earthquake, flood, storm or riot.
- (3) Implementation of IIGF Data Cloud. Building a secure employee work data center system to be used and accessed by all employees when outside the office, where the storage will always be synchronized with data storage at data centre via internet to minimize data/document loss if there is any case of laptop/computer lost when used by the employees outside the office.
- (4) Implementation of Backup Server. Building a reliable backup server system to anticipate data damage during any data centre disruption or error occurred when backup server is running and using backup operating system standard feature.



Analisa dan Pembahasan Manajemen

Management's Discussion and Analysis





Jumlah Aset Perusahaan tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 20,90% atau sebesar Rp1.543,02 miliar menjadi Rp8.924,43 miliar dibandingkan Jumlah Aset tahun 2015 yang sebesar Rp7.381,41 miliar.

In 2016, total assets of the Company increased 20.90% or Rp1,543.02 billion to Rp8,924.43 billion if compared with total assets booked in 2015 that was Rp7,381.41 billion.



124 Tinjauan Ekonomi
Economic Review

127 Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha
Operational Review by Business Segment

146 Tinjauan Keuangan
Financial Review





Tinjauan Ekonomi Economic Review

Kondisi Ekonomi Indonesia

Laju pertumbuhan ekonomi global tahun 2016 kembali mengalami perlambatan. Tidak tercapainya target pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju menjadi faktor utama melambatnya pertumbuhan ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat pada tahun 2016 hanya mencapai 1,6% atau mengalami penurunan dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang sebesar 2,6%. Demikian juga dengan pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang sebesar 6,7%, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 6,9%.

Indonesian Economic Outlook

In 2016, global economic growth pace was decelerated. Economic growth in advanced countries were below the expectation and became the main factors of the global economic slow down. United States only achieved 1.6% growth in 2016 or was lower than 2.6% economic growth achieved in the previous year. Similarly, China only posted 6.7% economic growth that was lower than previous year's economic growth of 6.9%.



Perlambatan pertumbuhan ekonomi di berbagai negara telah membuat otoritas moneter di negara-negara maju mengeluarkan kebijakan yang terkait dengan suku bunga acuan, atau Bank Sentral Eropa (European Central Bank/ECB) telah memangkas suku bunga acuan menjadi 0,0% sejak bulan Maret 2016 untuk menggerakkan perekonomian di kawasan Uni Eropa. Sebaliknya, ekspektasi atas penguatan ekonomi di masa mendatang menyebabkan *The Fed* akhirnya menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 0,75% pada bulan Desember 2016.

Di tengah kondisi tersebut, Indonesia berhasil membukukan pertumbuhan ekonomi yang positif. Sepanjang tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,02% lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 4,79%. Ini adalah kali pertama dalam 5 tahun terakhir Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi yang positif.

Mulai membaiknya harga komoditas non migas di pasar internasional menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) naik dari US \$30,20 per barel pada kuartal II 2016 menjadi US \$42,13 pada kuartal II 2016. Demikian juga dengan harga batu bara dan komoditas lainnya yang cenderung mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Realisasi investasi tahun 2016 berhasil melampaui target, yaitu mencapai Rp612,8 triliun. Realisasi investasi PMDN dari Januari hingga Desember 2016 meningkat 20,5% sebesar Rp216,2 triliun, sementara realisasi investasi PMA naik 8,4% sebesar Rp396,6 triliun.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh faktor domestik. Keberhasilan Pemerintah menjaga tingkat inflasi yang rendah sepanjang tahun 2016 menjadi faktor yang cukup mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Tingkat inflasi sepanjang tahun 2016 adalah sebesar 3,02%, atau menjadi yang terendah dalam satu dekade terakhir. Faktor domestik lainnya yakni realisasi belanja pemerintah (APBN) yang mencapai 89,3% atau Rp1.859,46 triliun dari yang ditargetkan dalam APBN-P sebesar Rp2.082,95 triliun. Meskipun tidak mencapai target, namun belanja negara pada 2016 lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp1.806,5 triliun.

The slow-down of economic growth in several countries had encouraged the monetary authority in the advanced countries to issue policies related with reference rate, or the European Central Bank (ECB) had cut the reference rate to 0.0% since March 2016 to drive economy in European Union region. On the other hand, expectation on economic recovery in the future brought The Fed to adjust its reference rate by 25 basis points (bps) to 0.75% in December 2016.

Amidst this condition, Indonesia successfully booked a positive economic growth. Throughout 2016, Indonesia's economic growth stood at 5.02% that was higher than economic growth booked in previous year which was closed at 4.79% level. This is the first time Indonesia recorded positive economic growth within the last 5 years.

Recovering price of non-oil and gas commodities in international market also became a driving factor of national economic growth. Average price of Indonesian crude oil price (ICP) increased from US\$30.20 per barrel in the 2nd quarter of 2016 to US\$42.13 in the 2nd quarter of 2016. Price of coal and other commodities also showed progressive trends if compared with previous year.

Realization of investment also exceeded the target in 2016 that achieved Rp612.8 trillion. PMDN investment realization grew 20.5% from January to December 2016 amounted to Rp216.2 trillion, however, PMA investment realization increased 8.4% or amounted to Rp396.6 trillion.

In addition, economic growth was also influenced by domestic factors. The Government also successfully maintained low inflation rate in 2016 that became major contributing factor for national economy growth. Inflation rate was 3.02% throughout 2016 or the lowest in the last decade. Another domestic factor was realization of Government Expenditure (APBN) that achieved 89.3% or Rp2,082.95 trillion. Despite the Government expenditure was still below the target, the realization was higher than expenditure in the previous year that only booked Rp1,806.5 trillion.

Pertumbuhan Sektor Infrastruktur

Dalam 5 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya berkisar di angka 4% - 5%. Sementara untuk menjadi negara maju pada tahun 2025, Indonesia harus mampu mencapai pertumbuhan ekonomi minimal sebesar 7%. Salah satu faktor penghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah masih rendahnya kualitas dan pertumbuhan infrastruktur.

Pemerintah Indonesia telah melakukan sejumlah upaya perbaikan regulasi, fiskal, dan kelembagaan guna mendorong investasi untuk beragam sektor infrastruktur dan pencapaian *milestones* proyek prioritas.

Realisasi anggaran pembangunan infrastruktur pada beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan berarti. Dalam Nota Keuangan 2016, anggaran pembangunan infrastruktur pada APBN 2016 naik menjadi Rp313,5 triliun, delapan persen atau dari APBN 2016. Jumlah ini lebih besar dari anggaran APBN-P 2015 sebesar Rp290,3 triliun.

Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur prioritas, Pemerintah melalui Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) telah menetapkan 30 proyek infrastruktur senilai Rp851 triliun sebagai proyek prioritas periode 2016 - 2019. Proyek-proyek tersebut mendapat fasilitas jaminan politik, perizinan, dan finansial yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Infrastructure Sector Growth

Within the last 5 years, Indonesia economic growth only shifted around 4% - 5%. However, to become an advanced country in 2025, Indonesia has to achieve economic growth minimum 7%. One of the factor that constrained Indonesia economic growth is low infrastructure quality and development.

Government of Indonesia had implemented initiatives to improve regulation, fiscal and institutional aspect to encourage investment for various infrastructure sectors and to achieve priority projects milestones.

Realization of infrastructure development budget is showing significant growth in these couple of years. The Financial Notes 2016 disclosed that infrastructure development budget in APBN 2016 increased to Rp313.5 trillion, eight per cent of the APBN 2016. The figure is higher than budget set in APBN-P 2015 that was Rp290.3 trillion.

To accelerate the priority infrastructure development, through Priority Infrastructure Development Acceleration Committee (KPPIP) had specified 30 infrastructure projects valued Rp851 trillion as priority projects for 2016 – 2019 period. The projects will be provided by facilities including political assurance, permits and financial facility as stipulated in Presidential Regulation (Perpres) No. 3 of 2016 regarding National Strategic Project Implementation Acceleration.



Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha

Operational Review by Business Segment

Operasional PT PII terbagi ke dalam 2 segmen utama, yaitu segmen usaha penjaminan dan segmen usaha pengelolaan dana. Kinerja dari masing-masing segmen usaha tersebut adalah sebagai berikut:

Segmen Usaha Penjaminan

PT PII dibentuk dengan mandat untuk menyediakan penjaminan bagi proyek-proyek infrastruktur berskema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) sebagai salah satu upaya percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Bentuk Penjaminan Infrastruktur pada proyek kerjasama dapat terdiri dari Penjaminan Pemerintah yang dilakukan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Pemerintah dan Penjaminan Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) yang dilakukan berdasarkan Penjaminan BUPI. Hal ini dapat dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut:

- Penjaminan hanya oleh BUPI yang mencakup seluruh atau sebagian risiko infrastruktur dalam satu proyek kerjasama; atau
- Penjaminan BUPI bersama-sama dengan Penjaminan Pemerintah untuk risiko infrastruktur yang berbeda dalam satu proyek kerjasama (Penjaminan BUPI dan Pemerintah), yang didasarkan pada suatu pembagian risiko infrastruktur antara BUPI dan Menteri Keuangan.

Pada tahun 2015, Presiden Republik Indonesia telah menerbitkan Perpres Nomor. 38/2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Terbitnya Perpres ini telah memperluas sektor infrastruktur yang dapat dijamin oleh PT PII dari delapan menjadi 19 sektor. Selain itu, terbitnya Perpres Nomor. 82/2015 tentang Jaminan Pemerintah Pusat atas Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara, telah memberikan kesempatan bagi PT PII untuk dapat melakukan penjaminan kredit pinjaman.

Hal-hal tersebut di atas menjadi dasar penguat bagi PT PII untuk melebarkan sayap dan kegiatan usahanya pada tahun 2016.

Operational of IIGF is divided into 2 main segments, that are guarantee business segment and investment business segment. Performance of each business segment is explained below:

Guarantee Business Segment

IIGF was established with a mandate to provide guarantee for infrastructure projects under Public-Private Partnership (PPP) as one effort of infrastructure development acceleration in Indonesia.

Infrastructure guarantee facility in the partnership project comprises of Government Guarantee under Government Guarantee Agreement and Infrastructure Guarantee Business Entity (BUPI) that is provided based on BUPI Guarantee. The facilities are implemented through methods, as follows:

- BUPI Guarantee that covers entire or part of infrastructure risk in a partnership project; or
- Joint Guarantees between BUPI and Government for different infrastructure risks in a partnership project (BUPI and Government Guarantee) based on classification of infrastructure risk between BUPI and Ministry of Finance.

In 2015, President of Republic of Indonesia issued Perpres No. 38/2015 regarding Partnership Between Government and Enterprise in Infrastructure Provision. Issuance of this Perpres has expanded infrastructure sectors that are guaranteed by IIGF from eight to 19 sectors. In addition, the implementation of Perpres No. 82/2015 regarding Central Government Guarantee on Infrastructure Financing through Direct Loans from International Financial Institution to State-Owned Enterprise that brought opportunity for IIGF to provide guarantee for the credit loans.

The factors mentioned above become the driving factors for IIGF to expand coverage and business activity in 2016.

Hingga akhir tahun 2016, PT PII telah terlibat dalam penyelesaian 16 proyek dengan status sebagai berikut:

By the end of 2016, IIGF had been involved in the completion of 16 projects with status as follows:

No.	Sektor/ Sector	Nama Proyek Name of Project	Nilai Proyek Project Value	Status Terakhir Current Status
1.	Ketenagalistrikan Electricity	PLTU Jawa Tengah	US \$4 juta/million	Tahap Konstruksi Construction phase
2.	Ketenagalistrikan Electricity	PLTU Mulut Tambang 9A, 9B &10	US \$4,040 juta/ million	Menunggu proses lelang Badan Usaha Waiting the Enterprise tender
3.	Air Minum Drinking Water	Proyek Air Minum Lampung	Rp1,08 Triliun/trillion	Penunjukkan PT SMI sebagai <i>Transaction Advisor</i> Appointment of PT SMI as Trans- action Advisor
4.	Air Minum Drinking Water	KPBU SPAM Umbulan	Rp2,05 Triliun/Trillion	Penandatanganan perjanjian pembiayaan proyek telah dilaksanakan. Project financing MOU signing has been completed
5.	Air Minum Drinking Water	KPBU SPAM Semarang Barat	Rp1,1 Triliun/Trillion	Penerbitan Persetujuan Prinsip VGF dari Kementerian Keuangan dan persiapan lelang Badan Usaha Issuance of VGF Principle Approval from Ministry of Finance and Enterprise tender preparation
6.	ICT	Palapa Ring Proyek Paket Barat	Rp1,28 Triliun/Trillion	Tahap Konstruksi Construction phase
7.	ICT	Palapa Ring Proyek Paket Tengah	Rp1,38 Triliun/Trillion	<i>Financial Close</i> Financial Close
8.	ICT	Palapa Ring Proyek Paket Timur	Rp5,09 Triliun/Trillion	Persiapan <i>Financial Close</i> Financial Close preparation
9.	Jalan Tol Toll Road	Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan Cileunyi-Sumedang-Dawuan Toll Road	Rp8,2 Triliun/Trillion	Proses Lelang Tender process
10.	Jalan Tol Toll Road	Tol Jakarta-Cikampek II Elevated Jakarta-Cikampek II Elevated Toll Road	Rp14,7 Triliun/Trillion	Proses Lelang Tender process
11.	Jalan Tol Toll Road	Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar Krian-Legundi-Bunder-Manyar Toll Road	Rp9,01 TRiliun/Trillion	Penandatanganan PPJT antara BPJT dengan BUJT PPJT signing between BPJT and BUJT
12.	Jalan Tol Toll Road	Tol Serang-Panimbang Serang-Panimbang Toll Road	Rp5,3 Triliun/Trillion	MoU Menteri Keuangan dan PUPR MOU between Minister of Finance and Minister of PUPR
13.	Jalan Tol Toll Road	Tol Balikpapan-Samarinda Balikpapan-Samarinda Toll Road	Rp10 Triliun/Trillion	Pengadaan Lahan Land acquisition
14.	Jalan Tol Toll Road	Tol Pandaan-Malang Pandaan-Malang Toll Road	Rp6 Triliun/Trillion	Pengadaan Lahan Land acquisition
15.	Jalan Tol Toll Road	Tol Manado-Bitung Manado-Bitung Toll Road	Rp5,1 Triliun/Trillion	Pengadaan Lahan Land acquisition
16.	Jalan Tol Toll Road	Tol Batang-Semarang Batang-Semarang Toll Road	Rp9,8 Triliun/Trillion	Pengadaan Lahan Land acquisition



Sektor Ketenagalistrikan Electricity Sector

Pada sektor ketenagalistrikan, PT PII turut berpartisipasi dalam penjaminan penyediaan infrastruktur pembangkit listrik dengan menandatangani Perjanjian Penjaminan dengan PT PLN selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) untuk pengembangan proyek-proyek kelistrikan nasional.

Peran serta, tersebut diharapkan mampu membantu Pemerintah dalam memenuhi peningkatan kebutuhan listrik nasional. Sampai dengan akhir tahun 2016, PT PII telah melakukan kerja sama penjaminan terhadap pembangunan pembangkit Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kabupaten Batang Jawa Tengah dan PLTU di area Mulut Tambang Sumatera Selatan. Proyek PLTU Jawa Tengah dirancang dan dibangun dengan menggunakan teknologi *ultra-super critical pressure* yang ramah lingkungan.

In electricity sector, IIGF also participated in guarantee facility for power plant infrastructure provision by signing Guarantee MOU with PT PLN as Supervisor of Contracting Agency (PJPK) for national electricity projects development.

The participation is support to help the Government in fulfilling increasing national electricity demand. As the end of 2016, IIGF had engaged in guarantee partnership on Gas and Steam Power Plant (PLTU) construction in Batang Municipal, Central Java and PLTU in Mulut Tambang area, South Sumatera. The Central Java PLTU Project is designed and built using eco-friendly ultra-super critical pressure technology.

Proyek PLTU Jawa Tengah

Central Java PLTU Project

Lokasi/Location	Jawa Tengah/Central Java
Nilai Proyek/Project Value	US \$4 miliar/Billion
Lama Pengerjaan/Project duration	25 tahun/ Years
Dukungan/Facility	Penjaminan bersama dengan Pemerintah/ Joint Guarantee with Government
Badan Usaha/Company	PT Bhimasena Power Indonesia
Penanggung Jawab Proyek/Project Supervisor	PT PLN

Proyek PLTU Jawa Tengah merupakan proyek pembangkit listrik tenaga batu bara berkapasitas 2 x 1.000 MW berlokasi di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. PLTU senilai US \$4 miliar atau lebih dari Rp40 triliun tersebut akan dibangun oleh konsorsium PT Bimasena Power Indonesia (BPI) dengan skema *Build-Operate-Transfer* (BOT) selama masa konsesi 25 tahun. PLTU Jawa Tengah merupakan proyek KPBU infrastruktur pertama yang berhasil diwujudkan dengan memperoleh fasilitas penjaminan bersama Pemerintah (Kementerian Keuangan) dan PT PII sesuai Perpres Nomor. 78/2010.

Empat tahun kemudian, pada tanggal 28 Agustus 2015, telah dilakukan *construction kick-off* yang dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Pada tanggal 6 Juni 2016, proyek PLTU Jawa Tengah telah mencapai tahap *Financial Close* dan ditargetkan akan mulai beroperasi pada awal tahun 2020. Hingga akhir tahun 2016, proyek PLTU Jawa Tengah sudah memasuki tahap konstruksi dengan progres pengerjaan 16,9%.

PLTU Jawa Tengah adalah salah satu bukti komitmen Pemerintah dalam pembangunan infrastruktur berskema KPBU. Diharapkan PLTU Jawa Tengah menjadi contoh sukses proyek hasil kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha untuk mendukung target pencapaian Nawacita.

Proyek PLTU Mulut Tambang

Lokasi/Location	Sumatera Selatan/ South Sumatera
Nilai Proyek/Project Value	US \$4,040 miliar/billion
Lama Pengerjaan/Project duration	-
Dukungan/Facility	Penjaminan bersama dengan Kemenkeu (<i>Risk sharing</i>) Joint Guarantee with Ministry of Finance (Risk sharing)
Badan Usaha/Company	-
Penanggung Jawab Proyek/Project Supervisor	PT PLN

Proyek pembangunan infrastruktur pembangkit listrik PLTU Mulut Tambang Sumatera Selatan 9A, 9B dan 10 merupakan salah satu bagian dari program Pemerintah untuk membangun pembangkit listrik baru dengan kapasitas 35 ribu MW hingga tahun 2019. PLTU Mulut Tambang Sumatera Selatan 9A, 9B dan 10 yang berlokasi di Sumatera Selatan ini merupakan PLTU dengan kapasitas daya sebesar 2 x 600 MW dan 1 x 600 MW.

Central Java PLTU Project is coal power plant project with capacity of 2 x 1,000 MW located in Batang Municipal, Central Java. The PLTU is valued over US\$40 billion and will be built by PT Bimasena Power Indonesia (BPI) consortium with Build-Operate-Transfer (BOT) consortium in 25 years concession period. The Central Java PLTU is the first PPP infrastructure project that is successfully executed after acquiring Joint Guarantee Facility from the Government (Ministry of Finance) and IIGF according to Perpres No.78/2010.

In the next four years, on August 28, 2015, construction kick-off was held and attended by Joko Widodo, President of Republic of Indonesia. On June 6, 2016, the Central Java PLTU Project arrived at Financial Close phase and is targeted to commence operation at beginning of 2020. By the end of 2016, Central Java PLTU Project entered construction phase with construction progress was 16.9%.

Central Java PLTU is a manifestation of Government's commitment in infrastructure development with PPP scheme. Central Java PLTU is expected to be a success story of Government and Enterprise partnership project to support the realization of Nawa Cita.

PLTU Mulut Tambang Project

PLTU Mulut Tambang South Sumatera 9A, 9B and 10 power plant infrastructure development project is part of Government's Program to build new power plants with capacity of 35 thousand MW until 2019. Mulut Tambang South Sumatera 9A, 9B and 10 are located in South Sumatera and will be operated as PLTU with power capacity of 2 x 600 MW and 1 x 600 MW.



Salah satu keunggulan proyek ini adalah lokasinya yang berada di area tambang batu bara, sehingga biaya pasokan batu bara yang menjadi sumber energi PLTU tersebut dapat ditekan. Keberadaan PLTU ini bertujuan untuk meningkatkan penyerapan cadangan batu bara kalori rendah di Sumatera Selatan yang diperkirakan mencapai 9,3 miliar ton.

Proyek PLTU Mulut Tambang dikembangkan dengan skema KPBU seperti halnya PLTU Jawa Tengah. Produksi listrik dari proyek ini akan dialokasikan untuk wilayah Jawa - Bali melalui jaringan interkoneksi transmisi Sumatera - Jawa sebesar 500 Kv dengan sistem *High Voltage Direct Current* (HVDC) yang akan dibangun PT PLN secara paralel. Selain itu, pembangunan PLTU ini merupakan bagian dari upaya diversifikasi pembangkit non-BBM, untuk menurunkan biaya pokok penyediaan listrik yang berpengaruh pada pengurangan subsidi listrik kepada masyarakat.

PT PII memberikan penjaminan atas proyek PLTU Mulut Tambang Sumatera Selatan 9A, 9B & 10 tersebut bersama Pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Hal ini dilakukan berdasarkan pertimbangan nilai proyek yang besar dan untuk meningkatkan daya tarik proyek terhadap pemodal.

PT PII telah menyampaikan Pernyataan Kesediaan Penjaminan pada tanggal 20 November 2015 sebagai revisi surat Nomor. 225/PII/DRU/1214 tanggal 18 Desember 2014 kepada PT PLN. Pada tanggal 13 Januari 2016, PT PLN menyampaikan surat Nomor. 0040/DAN.02.04/KSIPP/2016 kepada PT PII dan Kementerian Keuangan perihal penundaan jadwal *bid submission* dari tanggal 12 Januari 2016 menunggu pemberitahuan lebih lanjut. Kemudian tanggal 29 Juni 2016, PT PII telah mengirimkan surat kepada PT PLN perihal Permohonan Informasi terkait Proses Pengadaan Badan Usaha Proyek Proyek PLTU Mulut Tambang Sumatera Selatan 9A, 9B, dan 10, namun hingga akhir tahun belum ada informasi lebih lanjut dari PT PLN atas proyek ini.

A feature of this project is its location in coal mine area that reduced cost of coal supply as source of energy for the PLTU. Establishment of this PLTU aims to increase low-calory coal reserves absorbtion in South Sumatera that is estimated achieving 9.3 billion ton.

PLTU Mulut Tambang Project is developed with PPP scheme similarly with PLTU Central Java. Electricity production from this project will be allocated for Java – Bali area through 500 Kv Sumatera – Java transmission interconnection network with High Voltage Direct Current (HVDC) system that will be developed in parallel by PT PLN. In addition, development of this PLTU is also part of non-oil fuel power plant diversification program, to reduce cost of electricity provision that affected to reduction of electricity subsidy for the society.

IIGF provides joint guarantee on PLTU Mulut Tambang South Sumatera 9A, 9B & 10 Project in cooperation with the Government via Ministry of Finance. This is done considering high project value and to increase attractiveness of the project to the investors.

IIGF had delivered Guarantee Consent Statements on November 20, 2015 as revision to Letter No. 225/PII/DRU/1214 dated December 13, 2014 to PT PLN. On January 13, 2016, PT PLN sent letter No. 0040/DAN/02/04/KSIPP/2016 to IIGF and Minsitry of Finance concerning bid-submission schedule postpone from January 12, 2016 until further announcement. Next, on June 29, 2016, IIGF had sent letter to PT PLN concerning Information Inquiry related with Enterprise Procurement of PLTU Mulut Tambang South Sumatera 9A, 9B and 10 Project, however, until end of the year, PT PLN had not given any further information about this project.



Sektor Air Minum Drinking Water Sector

Pada sektor air minum, PT PII telah memberikan penjaminan proyek infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Sampai dengan akhir tahun 2016 terdapat tiga proyek KPBU sektor Air Minum yang telah memperoleh penjaminan PT PII, yaitu proyek SPAM Bandar Lampung (Lampung), proyek SPAM Umbulan (Jawa Timur) dan proyek SPAM Semarang Barat (Jawa Tengah).

In drinking water sector, IIGF had provided guarantee for Drinking Water Supply System Infrastructure (SPAM) Project. As the end of 2016, there were three PPP projects in Drinking Water sector that acquired guarantee from IIGF, among others, SPAM Bandar Lampung (Lampung), SPAM Umbulan Project (East Java) and SPAM West Semarang Project (Central Java).

Proyek SPAM Bandar Lampung - Lampung

Lokasi/Location	Bandar Lampung, Lampung
Nilai Proyek/Project Value	Rp1 triliun/trillion
Lama Pengerjaan/Project duration	-
Dukungan/Facility	Viability Gap Funding (VGF) oleh Pemerintah Viability Gap Funding (VGF) by Government
Badan Usaha/Company	-
Penanggung Jawab Proyek/Project Supervisor	Pemerintah Kota Lampung Lampung City Government

Proyek SPAM Bandar Lampung, diharapkan dapat memenuhi ketersediaan pasokan air bersih olahan berkualitas dan layak konsumsi bagi masyarakat Kota Bandar Lampung, karena fasilitas yang telah tersedia kini belum cukup memadai untuk mengimbangi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Melalui proyek ini, diperkirakan ada perluasan cakupan sambungan pipa air minum sebanyak 60.000 sambungan untuk mampu menyediakan air minum dengan kapasitas 750 liter/detik untuk 300.000 penduduk di delapan kecamatan di Kota Bandar Lampung.

SPAM Bandar Lampung Project - Lampung

Bandar Lampung, Lampung
Rp1 triliun/trillion
-
Viability Gap Funding (VGF) oleh Pemerintah Viability Gap Funding (VGF) by Government
-
Pemerintah Kota Lampung Lampung City Government

SPAM Bandar Lampung Project is expected to fulfill high-quality and consumable processed-clean water supply for people of Bandar Lampung City due to capacity of existing facility is insufficient to fulfill increasing demand of the society. Through this project, scope of drinking water pipeline extension is estimated to achieve 60,000 extensions and will supply drinking water with capacity of 750 litre/second for 30,000 inhabitants in eight districts of Bandar Lampung City.



Nilai investasi untuk proyek SPAM Bandar Lampung adalah sebesar Rp1,08 triliun. Proyek ini dibangun dengan model investasi *Built-Operate-Transfer* (BOT) dengan masa konsesi selama 27 tahun. PT PII telah memberikan penjaminan untuk membantu para pemodal dalam upaya mendapatkan dukungan pembiayaan dari perbankan sehingga dapat menekan biaya permodalan untuk mendanai proyek.

Proyek SPAM Bandar Lampung merupakan proyek KPBU pertama yang akan memperoleh Fasilitas Dukungan Keuangan (DK) Pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Pada tahun 2013, Pemerintah Kota Bandar Lampung selaku PJP telah mengajukan permohonan DK kepada Kementerian Keuangan untuk dapat menekan tarif air minum ke tingkat yang terjangkau oleh masyarakat.

Pada tahun 2015, PT PII telah menerbitkan pernyataan kesediaan penjaminan (*In-Principle Approval/IPA*) untuk penjaminan proyek SPAM Bandar Lampung. Pada tahun 2016, proyek ini telah mencapai sejumlah kemajuan yang berarti, antara lain:

- Kementerian Keuangan menunjuk PT SMI sebagai "*Transaction Advisor*" untuk proyek SPAM Bandar Lampung.
- PT SMI telah menunjuk konsultan untuk menyiapkan dokumen pra studi kelayakan baru.

Dengan kemajuan tersebut, diharapkan proyek ini akan memasuki tahap *Financial Close* pada Juni 2018 dan mulai tahap pembangunan konstruksi pada Juli 2018.

Proyek SPAM Semarang Barat - Jawa Tengah

Lokasi/Location	Semarang Barat, Jawa Tengah West Semarang, Central Java
Nilai Proyek/Project Value	Rp1 triliun/tirllion
Lama Pengerjaan/Project duration	-
Dukungan/Facility	a. Dukungan Kelayakan (<i>Viability Gap Funding</i>) / Viability Gap Funding b. Penjaminan Pemerintah (PT PII) / Government Guarantee (IIGF) c. Pengadaan Lahan/ Land Acquisition
Badan Usaha/Company	-
Penanggung Jawab Proyek/Project Supervisor	Pemerintah Kota Semarang Barat

Proyek pembangunan SPAM Semarang Barat direncanakan dan dilaksanakan menggunakan KPBU. SPAM Semarang Barat direncanakan untuk disalurkan kepada 60.000 rumah tangga di wilayah tersebut. Adapun sumber air berasal dari Waduk Jatibarang.

Investment Value for SPAM Bandar Lampng project is Rp1.08 trillion. The project is built with Built-Operate-Transfer (BOT) investment scheme in 27 years concession period. IIGF has provided guarantee to help the investors in obtaining financial support from banking sector to decrease cost of capital to finance the project.

SPAM Bandar Lampung Project is the first PPP Project that acquired Government Financial Support (DK) Facility via Ministry of Finance. In 2013, the Bandar Lampung City Government as CA had proposed DK to the Minsitry of Finance to implement lower and affordable drinking water tariff for the society.

In 2015, IIGF had published Guarantee Consent Statements (*in-Principle Approval/IPA*) for SPAM Bandar Lampung project guarantee, the project has recorded major progress, among others:

- Ministry of Finance has appointed PT SMI as "*Transaction Advisor*" for SPAM Bandar Lampung project.
- PT SMI has appointed consultant to prepare new pre-feasibility study documents.

Considering these progress, the project is scheduled to enter *Financial Close* phase in June 2018 and start the construction phase by July 2018.

SPAM West Semarang Project – Central Java

SPAM West Semarang project development is planned and executed under PPP scheme. SPAM West Semarang is planned to be distributed to 60,000 households in the area.

Pembangunan proyek ini adalah salah satu upaya Pemerintah Kota Semarang untuk meningkatkan pelayanan penyediaan air bersih untuk masyarakat di wilayah Kota Semarang. Proyek pembangunan SPAM Semarang Barat memiliki kapasitas 1.050 liter/detik dengan kontrak *Build Operate and Transfer (BOT)* dengan jangka waktu 25 tahun. Nilai proyek tersebut ditaksir mencapai US \$1.108 juta.

This project development is an initiative of Semarang City Government to improve clean water provision service for people who live in Semarang City area. The SPAM West Semarang development project has capacity of 1,050 litre/second under Build-Operate-Transfer (BOT) contract and 25 years project period. The project value is estimated achieving US\$1,108 million.

Pada tahun 2016, proyek ini telah mencapai kemajuan yang berarti, antara lain:

In 2016, the project achieved major projects, as follows:

- Penerbitan Persetujuan Prinsip VGF dari Kementerian Keuangan.
- Persiapan pelaksanaan Prakualifikasi Pengadaan Badan Usaha.
- Penyusunan Struktur dan Perjanjian Penjaminan dalam rangka finalisasi Perjanjian Kerjasama Proyek.
- Penyusunan perangkat hukum (misalnya Peraturan Daerah) dan penyelesaian pembebasan lahan.
- Pemerintah telah menawarkan skema Pendanaan melalui APBN kepada PJP, hal ini berpotensi terhadap tidak dilanjutkannya proses lelang melalui skema KPBU.

- Issuance of VGF Principle Approval by Ministry of Finance.
- Preparation of Enterprise Tender Pre-Qualification Implementation.
- Formulation of Guarantee Structure and Contract as the finalization of Project Partnership Agreement.
- Formulation of legal infrastructure (such as Local Regulation) and land acquisition settlement.
- The Government has offered Financing Scheme via APBN to the CA, this may potentially postpone the bidding process under PPP scheme.

Proyek SPAM Umbulan - Jawa Timur

SPAM Umbulan Project – East Java

Lokasi/Location	Jawa Timur/East Java
Nilai Proyek/Project Value	Rp2,05 triliun/trillion
Lama Pengerjaan/Project duration	-
Dukungan/Facility	a. Dukungan Kelayakan (<i>Viability Gap Funding</i>) dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia b. Penjaminan Pemerintah dari PT PII c. Pembiayaan dan pembangunan pipa dari titik <i>offtake</i> sampai ke distribusi utama dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) d. Pembiayaan dan pembangunan fasilitas instalasi pengolahan air dari Kali Rejoso dengan kapasitas 300/detik dari Kementerian PUPR e. Penempatan pipa pada jalan tol yang dilalui, antara lain ruas Pasuruan – Gempol, Gempol – Pandaan, Surabaya – Gempol, Surabaya – Mojokerto, dan Surabaya – Gresik dari Kementerian PUPR f. Pengurangan biaya sewa lahan di jalan tol dari Kementerian PUPR



Dukungan/Facility	a. Feasibility Support (Viability Gap Funding) from Ministry of Finance Republic of Indonesia b. Government Guarantee by IIGF c. Pipeline Guarantee and construction from off-take point up to main distributor from the Ministry of Public Work and Public Housing (Ministry of PUPR) d. Water treatment installation facility financing and construction from Rejoso River with capacity of 300/second from Ministry of PUPR e. Pipe placement at toll road route, among others Pasuruan – Gempol, Gempol – Pandaan, Surabaya – Gempol, Surabaya – Mojokerto, and Surabaya – Gresik from Ministry of PUPR f. Reduction of land rental price at toll road by Ministry of PUPR
Badan Usaha/Company	PT Meta Adhya Tirta Umbulan
Penangguhan Jawab Proyek/Project Supervisor	Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Keterbatasan pasokan air minum untuk beberapa kota utama di Jawa Timur, yakni Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Pasuruan dan Kota Pasuruan, membuat pemerintah Provinsi Jawa Timur memulai pembangunan proyek transmisi penyediaan air bersih dari mata air Umbulan di Kabupaten Pasuruan ke 16 bendungan milik PDAM dan PDAB yang terletak di berbagai kabupaten dan kota tersebut. Proyek ini kemudian dinamakan Proyek Sistem Penyediaan Air Minum Umbulan (SPAM Umbulan).

Proyek SPAM Umbulan berkapasitas 4.000 liter/detik dibangun menggunakan skema KPBU antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur selaku PJPB dengan PT Meta Adhya Tirta Umbulan selaku Badan Usaha. Nilai proyek SPAM Umbulan mencapai Rp2 triliun dan memperoleh dukungan kelayakan sebesar Rp818 miliar dari Kementerian Keuangan melalui *Project Development Fund* (PDF).

Pada tanggal 21 Juli 2016, PT PII telah menandatangani Perjanjian Penjaminan dengan PT Meta Adhya Tirta dan Perjanjian Regres dengan Gubernur Jawa Timur untuk Proyek SPAM Umbulan. Proyek ini merupakan proyek SPAM dan proyek daerah pertama yang menerima penjaminan pemerintah melalui PT PII. Sehingga sampai tahun 2016 PT PII telah memberikan penjaminan kepada delapan proyek infrastruktur.

Limited drinking water supply in major cities of East Java, such as Surabaya City, Sidoarjo Municipal, Gresik Municipal, Pasuruan Municipal and Pasuruan City encouraged the Provincial Government of East Java started clean water provision transmission project construction from Umbulan Spring in Pasuruan Municipal to 16 dams of PDAM and PDAB that are located in several municipals and cities. The project was named Umbulan Drinking Water Provision System Project (SPAM Umbulan).

SPAM Umbulan Project has capacity of 4,000 litre/second and built under PPP scheme between Provincial Government of East Java as CA with PT Meta Adhya Tirta Umbulan as an Enterprise. SPAM Umbulan Project Value achieved Rp2 trillion and acquired feasibility support of Rp818 billion from Ministry of Finance via Project Development Fund (PDF).

On July 21, 2016, IIGF signed Guarantee Contract with PT Meta Adhya Tirta and Recovery Agreement with Governor of East Java for SPAM Umbulan Project. This project is the first SPAM Project and Local Project supported by Government Guarantee via IIGF. As of 2016, IIGF has provided guarantee for eight infrastructure projects.



Sektor Information and Communication Technology (ICT)

Information and Communication Technology (ICT) Sector

Proyek Palapa Ring Paket Barat

Palapa Ring West Package Project

Lokasi/Location	Kota-kota di Barat Indonesia/ Cities in Western Indonesia
Nilai Proyek/Project Value	Rp1,28 triliun/trillion
Masa Konsesi/Project duration	15 tahun/years
Dukungan/Facility	Penjaminan proyek/Project guarantee
Penanggung Jawab Proyek Kerjasama/Project Supervisor	Kementerian Komunikasi dan Informasi Ministry of Communication and Information
Badan Usaha/Company	PT Palapa Ring Barat

Proyek Palapa Ring merupakan salah satu proyek pengembangan jaringan *backbone* yang dirancang dan dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Komunikasi Kabel Laut dan Sistem Komunikasi Serat Optik ke 57 kota/kabupaten yang belum terlayani. Proyek ini adalah proyek Infrastruktur Strategis Nasional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor. 3 Tahun 2013, yang juga dikategorikan sebagai Proyek Prioritas Nasional.

Proyek Palapa Ring dikembangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dengan dukungan penjaminan oleh PT PII. Proses pengadaan Badan Usaha dibagi menjadi tiga paket yaitu, Paket Barat, Paket Tengah dan Paket Timur dengan perkiraan jangkauan wilayah sepanjang 8.479 Km. Proyek ini diharapkan mampu menyediakan jaringan *broadband* dengan kecepatan 10 Mbps di daerah pedesaan dan 20 Mbps di daerah perkotaan.

Palapa Ring Project is one of backbone network development projects that is designed and implemented using Sea Wire Communication System and Optical Fiber Communication System to 57 cities/municipals that are not yet covered. This project is a National Strategic Infrastructure Project as stipulated in Presidential Decree (Perpres) No. 3 of 2013 that is also classified as National Priority Project.

Palapa Ring Project is developed by Ministry of Communication and Information (Kominfo) with guarantee support by IIGF. The Enterprise procurement process is divided into three packages that are West Package, Central Package and East Package with coverage area estimation covers 8,479 Km. This project is expected to provide broadband network with speed of 10 Mbps in rural area and 20 Mbps in urban area.



Proyek Palapa Ring menjadi pelopor proyek di sektor telekomunikasi yang memakai fasilitas *Availability Payment* (AP) yang ditawarkan oleh pemerintah dengan skema KPBU. Berdasarkan skema AP ini, Pemerintah melalui Kementerian Kominfo mulai membayar cicilan ketersediaan layanan kepada pemenang lelang saat proyek sudah beroperasi. Skema yang digunakan untuk proyek tersebut berbeda dengan skema penjaminan proyek-proyek KPBU lainnya yang menggunakan *Viability Gap Fund* (VGF). Jika VGF menggunakan dana tunai di awal proyek, maka *Availability Payment* dibayar berdasarkan kinerja pemegang lelang. Oleh karena itu, dana pembangunan proyek sepenuhnya ditanggung oleh swasta dengan nilai proyek pembangunan Palapa Ring ditaksir mencapai US \$452 juta (*initial EPC capex*).

Pada tanggal 29 Februari 2016, Menteri Kominfo selaku PJKP telah melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan PT Palapa Ring Barat (konsorsium Moratel – Ketrosden Triasmitra) untuk Proyek Palapa Ring Paket Barat dengan nilai proyek sebesar Rp1,28 triliun. Pada kesempatan yang sama pula, PT PII juga menandatangani Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres untuk proyek Palapa Ring Paket Barat.

Proyek Palapa Ring Paket Tengah

Lokasi/Location	Kalimantan, Sulawesi dan Maluku Utara hingga Kepulauan Sangihe, Talaud Kalimantan, Sulawesi and North Maluku until Sangihe Island Talaud
Nilai Proyek/Project Value	Rp1,38 triliun/trillion
Masa Konsesi/Project duration	15 tahun/years
Dukungan/Facility	Penjaminan proyek/Project guarantee
Badan Usaha/Company	PT Len Telekomunikasi Indonesia PT Len Telekomunikasi Indonesia
Penanggung Jawab Proyek Kerjasama/Project Supervisor	Kementerian Komunikasi dan Informatika Ministry of Communication and Information

Proyek Palapa Ring merupakan salah satu proyek pengembangan jaringan *backbone* yang dirancang dan dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Komunikasi Kabel Laut dan Sistem Komunikasi Serat Optik ke 57 kota/kabupaten yang belum terlayani. Proyek Palapa Ring dikembangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dengan dukungan penjaminan oleh PT PII. Proses pengadaan Badan Usaha dibagi menjadi tiga paket yaitu, Paket Barat, Paket Tengah dan Paket Timur dengan perkiraan jangkauan wilayah sepanjang 8.479 km. Proyek ini direncanakan mampu menyediakan jaringan *broadband* dengan kecepatan 10 Mbps di daerah pedesaan dan 20 Mbps di daerah perkotaan.

The Palapa Ring Project becomes pilot project in telecommunication sector using *Availability Payment* (AP) facility that is offered by the Government under PPP scheme. Based on this AP scheme, through Ministry of Communication and Information, the Government started to pay installment of service provision to the tender winner when the project has been operated. The project implements different scheme with guarantee scheme applied in other PPP projects that used *Viability Gap Funding* (VGF). If the VGF disbursed cash at beginning of the project, *Availability Payment* is paid based on performance of the tender winner. Therefore, the project development fund is fully paid by Private sector with Palapa Ring development project value is estimated achieving US\$452 million (*initial EPC Capex*).

On February 29, 2016, Minister of Communication and Information as CA signed Memorandum of Understanding signing with PT Palapa Ring Barat (Moratel – Ketrosden Triasmitra consortium) for Palapa Ring West Package Project with project value of Rp1.28 trillion. In the same occasion, IIGF also signed Guarantee Agreement and Recovery Agreement for Palapa Ring West Package Project.

Palapa Ring Centre Package Project

The Palapa Ring Project is one of backbone network development projects that is designed and implemented using Sea Wire Communication System and Optical Fiber Communication System to 57 cities/municipals that are not yet covered. The Palapa Ring Project is developed by Ministry of Communication and Information (Kominfo) with guarantee support by IIGF. The Enterprise procurement process is divided into three packages that are West Package, Central Package and East Package with coverage area estimation covers 8,479 Km. This project is expected to provide broadband network with speed of 10 Mbps in rural area and 20 Mbps in urban area.

Proyek Palapa Ring merupakan proyek Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) pertama dalam sektor telekomunikasi dengan menerapkan skema pembayaran ketersediaan layanan atau *Availability Payment* (AP). Skema *availability payment* diprakarsai oleh Kementerian Keuangan yang sumber dananya berasal dari Dana Kontribusi *Universal Service Obligation* (USO).

Pada tanggal 4 Maret 2016, Menteri Komunikasi dan Informatika selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) telah melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan PT Len Telekomunikasi Indonesia untuk Proyek Palapa Ring Paket Tengah dengan nilai proyek sebesar Rp1,38 triliun. Proyek ini adalah proyek Infrastruktur Strategis Nasional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor. 3 Tahun 2013, yang juga dikelompokkan sebagai Proyek Prioritas Nasional. Pada kesempatan yang sama, PT PII juga menandatangani Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres untuk proyek Palapa Ring Paket Barat.

Palapa Ring Project is the first Public-Private Partnership (PPP) Project in telecommunication sector that implements Availability Payment (AP) scheme. The Availability Payment scheme is initiated by Ministry of Finance with source of funds acquired from Proceeds from Universal Service Obligation (USO) Contribution.

On March 4, 2016, as Contracting Agency (CA), the Minister of Communication and Information signed Memorandum of Understanding with PT Len Telekomunikasi Indonesia for Palapa Ring Central Package Project with project value of Rp1.38 trillion. This project is National Strategic Infrastructure project as stipulated in Presidential Regulation (Perpres) No. 3 of 2013 that is also classified as National Priority Project. In the same occasion, IIGF also signed Guarantee Agreement and Recovery Agreement for Palapa Ring West Package Project.



Sektor Transportasi Transportation Sector

Proyek Jalan Tol Pandaan - Malang

Pandaan – Malang Toll Road Project

Lokasi/Location	Provinsi Jawa Timur/East Java Province
Nilai Proyek/Project Value	Rp6 triliun/trillion
Masa Konsesi/Project duration	35 tahun/years
Penanggung Jawab Proyek Kerjasama/Project Supervisor	Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Ministry of Public Work and Public Housing
Badan Usaha/Company	PT Jasa Marga Pandaan Malang PT Jasa Marga Pandaan Malang

Ruas jalan tol Pandaan-Malang merupakan bagian dari rencana koridor jalan/utara-selatan di Provinsi Jawa Timur sebagai kelanjutan dari ruas jalan tol Gempol-Pandaan, yaitu sepanjang 37,62 Km. Ruas jalan tol ini akan melalui tiga daerah penting di Jawa Timur, yaitu Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang dan Kota Malang sehingga diprediksi bahwa ruas jalan tol ini akan menjadi arteri utama dari banyak pilihan ruas jalan non-tol yang menghubungkan kawasan utara dengan kawasan selatan wilayah Jawa Timur.

Pandaan – Malang Toll Road section is part of north-south/road corridor plan in East Java Province as sequence of Gempol – Pandaan toll road along 37.62 Km. The toll road section will pass three major area in East Java that are Pasuruan Municipal, Malang Municipal and Malang City that the toll road section is projected to be main arterial road from other non-toll roads that connect northern area with southern area of East Java.

Pembangunan jalan tol ini akan dilakukan secara bertahap dengan asumsi pembangunan awal empat lajur dua arah. Rencana penambahan kapasitas menjadi enam lajur dua arah diperkirakan akan dilakukan pada tahun ke 16, dengan pembangunan lajur tambahan dilakukan ke arah dalam (ke arah median). Direncanakan terdapat enam *interchange* untuk jalan tol sepanjang 37,62 Km ini, yaitu: Madyopuro, Pakis I, Pakis II, Lawang, Purwodadi dan Tamandayu.

Pembangunan ruas jalan tol Pandaan-Malang diharapkan dapat memperlancar lalu lintas pengangkutan penumpang dan industri dari wilayah Pandaan dan Malang yang terhubung langsung dengan Kota Surabaya dan sebaliknya. Selain itu, diharapkan dengan adanya ruas jalan tol Pandaan Malang, tingkat perekonomian masyarakat di wilayah tersebut dapat meningkat dan juga dapat meningkatkan volume pengunjung ke daerah tujuan wisata di Kota Malang.

Hingga saat ini, PT PII telah menjamin pembangunan empat ruas jalan tol, yakni Manado-Bitung, Balikpapan-Samarinda, Pandaan-Malang dan Batang-Semarang yang akan menjadi tanggung jawab Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dilaksanakan oleh Badan Pengatur Jalan Tol ("BPJT").

Proyek Jalan Tol Manado - Bitung

Lokasi/Location	Provinsi Sulawesi Utara/ North Sulawesi Province
Nilai Proyek/Project Value	Rp8,745 triliun/ trillion
Masa Konsesi/Project duration	40 tahun/ years
Penanggung Jawab Proyek Kerjasama/Project Supervisor	Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Minister of Public Work and Public Housing
Badan Usaha/Company	PT Jasa Marga Manado Bitung PT Jasa Marga Manado Bitung

Jalan Tol Manado-Bitung terletak di wilayah Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor. 32 tahun 2011 tentang *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025, Pelabuhan Bitung akan dikembangkan menjadi pelabuhan yang melayani kegiatan ekspor impor dari dan ke wilayah provinsi Sulawesi Utara. Proyek ini juga telah dicantumkan sebagai proyek prioritas Kementerian Koordinator Perekonomian tahun 2015 dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri/ Kepala Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor. 82/M. PPN/05/2015 tentang penetapan daftar rencana proyek infrastruktur tahun 2015.

This toll road development will be done in stages with initial development assumption of two-ways four lanes. The plan to upgrade the capacity into two-ways six lanes is planned to be executed in the 16th years through the development of additional inward lanes (towards the median). Six interchange is planned to be equipped for this 37.62 Km toll road, among others: Madyopuro, Pakis I, Pakis II, Lawang, Purwodadi and Tamandayu.

Pandaan – Malang toll road development is expected to unleash the passenger and industrial transportation traffic from Pandaan and Malang area that will be directly connected with Surabaya City and *vice versa*. In addition, development of Pandaan – Malang toll road is expected to increase public economy in the area and also to boost number of visitors to tourism sites in Malang City.

IIGF has guaranteed four toll road sections development nowadays, among others, Manado-Bitung, Balikpapan-Samarinda, Pandaan-Malang and Batang-Semarang that will become responsibility of the Government or, in this case, Ministry of Public Work and Public Housing that is carried out by Toll Road Regulatory Agency.

Manado – Bitung Toll Road Project

Manado – Bitung Toll Road is located in North Minahasa Municipal and Bitung City. Pursuant to Presidential Regulation No. 32 of 2011 regarding Acceleration and Extension of Indonesia Economy Development 2011 – 2025, Bitung Port will be developed into a port which serves export-import activities from and to North Sulawesi Province area. This project is also included as priority project of Coordinative Ministry of Economy in 2015 and had been stipulated under Chairman of Minister/Chairman of National Development Planning No. 82/M.PPN/05/2015 regarding Stipulation of Infrastructure Project Plan List 2015.



Pada saat ini, jalan yang menghubungkan Kota Manado dengan Kota Bitung tergolong sudah sangat padat dan tidak memiliki pilihan langsung sehingga menyebabkan peningkatan waktu tempuh perjalanan dan risiko kecelakaan. Oleh karena itu, dibutuhkan sarana penghubung untuk mendorong pergerakan penumpang dan barang dari Kota Manado sebagai pusat kegiatan perekonomian di Sulawesi Utara ke Kota Bitung.

Proyek Pembangunan Jalan Tol antara Manado-Bitung dengan nilai investasi mencapai Rp8,745 triliun ini bertujuan meningkatkan keterhubungan antar wilayah di Provinsi Sulawesi Utara. Jalan tol sepanjang 39 Km ini terbagi ke dalam dua seksi, yaitu Seksi I sepanjang 13,5 Km dari Manado-Airmadidi yang akan dibangun pemerintah dan Seksi II sepanjang 25,5 Km yang akan dibangun oleh pihak swasta.

Proyek ini dikerjakan dengan skema SBOT (*Supported Build Operate Transfer*) dengan masa konsesi 40 tahun, dimana Pemerintah menyediakan bantuan berupa dukungan konstruksi untuk Seksi I sepanjang 13,5 Km, untuk membuat proyek ini layak secara finansial.

Pembangunan ruas jalan tol ini diharapkan mampu mengurangi waktu tempuh dan mengurangi risiko kecelakaan untuk wilayah Sulawesi Utara.

The road that bridges Manado City and Bitung City is considered very crowded today without direct alternative that caused longer travelling time and higher accident risk. Therefore, connecting facility is required to support passenger and commodities mobility from Manado City as center of economic activity in North Sulawesi to Bitung City.

Manado – Bitung Toll Road Development Project has investment value of Rp8.745 trillion aims to increase inter-region connectivity in North Sulawesi Province. This 39 Km toll road is divided into two sections, that are 1st Section along 13.5 Km from Manado – Airmadidi that will be built by the Government and 2nd Section along 25.5 Km that will be built by Private company.

This project will be implemented under SBOT (*Supported Build-Operate-Transfer*) scheme with 40 years concession period where the Government provides support as construction facility for the 1st section along 13.5 Km to make the project financially feasible.

Development of this toll road section is expected to reduce travelling time and accident risk for North Sulawesi area.

Proyek Jalan Tol Balikpapan – Samarinda

Balikpapan – Samarinda Toll Road Project

Lokasi/Location	Provinsi Kalimantan Timur/ East Kalimantan Province
Nilai Proyek/Project Value	Rp10 Triliun/ trillion
Masa Konsesi/Project duration	40 tahun/ years
Penanggung Jawab Proyek Kerjasama/Project Supervisor	Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Minister of Public Work and Public Housing
Badan Usaha/Company	PT Jasa Marga Balikpapan Samarinda PT Jasa Marga Balikpapan Samarinda

Jalan Tol Balikpapan-Samarinda terletak di wilayah administratif Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda. Kota Samarinda dan Balikpapan adalah dua kota dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Kota Samarinda adalah ibu kota Provinsi Kalimantan Timur sebagai pusat pemerintahan dan Kota Balikpapan adalah sebagai pusat perdagangan sebagai pintu masuk utama ke Kalimantan Timur.

Balikpapan – Samarinda Toll Road is located in Balikpapan Administrative City, Kutai Kartanegara Municipal and Samarinda City area. The Samarinda and Balikpapan cities are two cities with high population density. Samarinda City is Capital of East Kalimantan Province as center of government and Balikpapan City is center of commerce and main entrance to East Kalimantan.

Ruas jalan tol Balikpapan-Samarinda merupakan salah satu koridor penting bagi lalu lintas pergerakan orang dan barang di Provinsi Kalimantan Timur, dan merupakan bagian dari tujuh jalan tol sistem transportasi Provinsi Kalimantan Timur.

Tol sepanjang 99,35 Km ini terdiri dari 2 paket pembangunan, Paket 1 adalah pembangunan Seksi 1 (Balikpapan-Samboja) sepanjang 22,03 Km dan Seksi 5 (Balikpapan-Sepinggan) sepanjang 11,09 Km. Paket 2 adalah Seksi 2 (Samboja-Muarajawa) sepanjang 30,98 Km, Seksi 3 (Muarajawa-Palaran) sepanjang 17,30 Km serta Seksi 4 (Palaran-Jembatan Mahkota Samarinda) sepanjang 17,95 Km.

Ruas tol Balikpapan-Samarinda dapat menjadi pilihan menyelesaikan kepadatan lalu lintas. Pembangunan ruas tol ini juga diharapkan meningkatkan pertumbuhan sosial dan ekonomi di wilayah Kalimantan Timur dan meningkatkan layanan pergerakan warga Kalimantan Timur.

Pendapatan Penjaminan

Pengakuan pendapatan dari penjaminan dibagi menjadi dua waktu yaitu pada saat:

1. Pendapatan premi

Pendapatan premi terdiri dari *guarantee fee* dan *processing fee*.

- *Guarantee fee* merupakan pendapatan yang diterima atas jaminan yang diberikan kepada penerima manfaat berdasarkan jaminan *exposure* oleh Perusahaan dan diakui berdasarkan jangka waktu dari periode penjaminan tergantung dari pengaturan dalam kontrak
- *Processing fee* merupakan pendapatan yang diterima atas adanya aktivitas pemrosesan yang dilakukan jika klaim disampaikan kepada pihak penjamin yang diakui pada saat pendapatan diperoleh.

2. Pendapatan provisi dan komisi

Pendapatan provisi dan komisi terdiri dari *arranging fee*, *ceded commission*, *upfront fee* dan pendapatan provisi dan komisi lainnya.

- *Arranging fee* terdiri dari bagian yang dapat dikembalikan dan bagian yang tidak dapat dikembalikan. Pendapatan dari bagian yang tidak dapat dikembalikan dari *arranging fee* diakui pada saat kontrak penjaminan ditandatangani, sementara pendapatan dari bagian yang dapat dikembalikan

Balikpapan – Samarinda Toll Road section is one of the most important corridor for people and commodities transportation in East Kalimantan Province and part of seven toll road transportation systems in East Kalimantan Province.

This 99.35 Km Toll Road consists of 2 development packages, the 1st Package is development of 1st Section (Balikpapan – Samboja) along 22.03 Km and 5th Section (Balikpapan – Sepinggan) along 11.09 Km. 2nd Package includes 2nd Section (Samboja-Muarajawa) along 30.98 Km, 3rd Section (Muarajawa – Palaran) along 17.30 Km and 4th Section (Palaran – Jembatan Mahkota Samarinda) along 17.95 Km.

The Balikpapan – Samarinda Toll Road is an alternative to solve traffic jam. This toll road construction is also expected to increase social and economic growth in East Kalimantan area and improve transportation service for East Kalimantan people.

Revenue from Guarantee

Recognition of revenue from guarantee is divided into two periods, as follows:

1. Premium Income

Premium income consists of guarantee fee and processing fee

- Guarantee fee as revenue from guarantee that is provided to the beneficiaries on the basis of guarantee exposures of the Company and recognized based on maturity period of the guarantee period depended on provisions in the contract.
- Processing fee is earned for services process if there is a claim submitted to the guarantor that is recognized during the revenue acquisition.

2. Fees and Commission

Fees and commissions consist of arranging fee, ceded commission, upfront fee and other fees and commissions.

- Arranging fee consists of a refundable and non-refundable fee portion. Revenue from a non-refundable portion of arranging fee is recognized upon signing of the guarantee contract, while revenue from a refundable portion of arranging fee is recognized upon



dari *arranging fee* diakui pada saat proyek dimulai (*financial close*), terlepas dari kelangsungan penjaminan proyek itu sendiri di masa yang akan datang.

- *Ceded commission* adalah pendapatan dari peningkatan struktur penjaminan yang dilakukan dengan pihak penjamin lain. Pendapatan dari *ceded commission* dan pendapatan provisi dan komisi lainnya diakui pada saat diperoleh.
- *Upfront fee* adalah pendapatan yang diterima pada saat kontrak penjaminan ditandatangani dan tidak dapat dikembalikan.

Hingga akhir tahun 2016, pendapatan penjaminan yang diperoleh PT PII adalah sebesar Rp177,6 miliar, yang diperoleh dari pendapatan provisi dan komisi sebesar Rp172,1 miliar dan pendapatan premi sebesar Rp5,5 miliar.

the commencement of the project (*financial close*), regardless the continuance of the guarantee projects itself in the future.

- *Ceded commission* is revenue earned from the enhancement of guarantee structure with other guarantor/insurance parties. Revenue from *ceded commission* and other fees and commissions is recognized as incurred.
- *Upfront fee* is recognized upon signing of guarantee contract and nonrefundable.

As end of 2016, revenue from guarantee that is acquired by IIGF amounted to Rp177.6 billion and that is obtained from fee and commission amounted to Rp172.1 billion and premium income amounted to Rp5.5 billion.

Dalam Jutaan Rupiah/ In million Rupiah

Uraian Description	Realisasi 2015 Realization 2015	2016		Pencapaian Achievement	Pertumbuhan Growth
		Anggaran Budget	Realisasi Realization		
Pendapatan Penjaminan/ Revenue from Guarantee	0	255.573	177.649	70%	100%

Segmen Usaha Pengelolaan Dana

Selain menjalankan kegiatan penjaminan, PT PII juga melakukan kegiatan pengelolaan dana modal yang dimiliki dengan melakukan penempatan ke dalam berbagai instrumen keuangan yang memberikan imbal hasil yang optimal tanpa mengabaikan faktor risiko yang ada. Kegiatan ini dilakukan agar PT PII dapat membiayai kegiatan operasionalnya secara mandiri sekaligus untuk meningkatkan modal usahanya.

Penempatan dana pada instrumen keuangan tersebut meliputi instrumen investasi Pasar uang dan Obligasi dengan komposisi yang disesuaikan mengikuti kondisi pasar yang ada dengan tingkat pengembalian yang optimum. Kebijakan yang telah diambil oleh PT PII dalam penempatan dana antara lain:

- Mengoptimalkan penempatan pada bank sesuai dengan kebijakan dan limit yang telah ditetapkan dengan terus memperhatikan kecenderungan pergerakan tingkat suku bunga.
- Menempatkan dana pada instrumen obligasi yang meliputi obligasi Pemerintah atau BUMN, dan obligasi korporasi swasta dengan *minimum rating* idAA- (Pefindo/Fitch Rating).

Investment Business Management

Besides guarantee activity, IIGF also operates investment management of the internal funds by placing investments in various financial instruments with optimum return without ignoring existing risk factor. This activity is done to enable IIGF financing its operational activity independently as well as to increase its business capital.

Fund placement in the financial instrument includes investment instruments in money market and bonds with compositions that are adjusted following the current market condition with optimum return. The policies that is implemented by IIGF in the fund placement are among others:

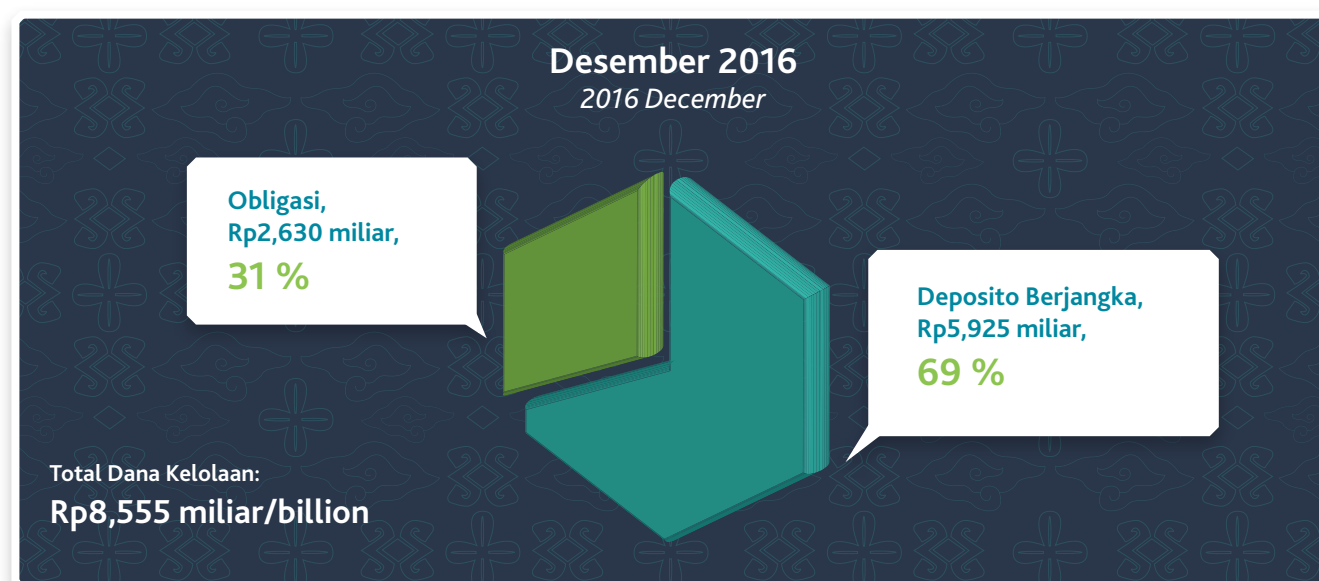
- Optimizing placement with Banks according to stipulated policy and limit by continuously considering interest rate shifting trend.
- Fund placement in bonds instrument that includes Government or SOE Bonds, and private corporate bonds with minimum rating of iidAA- (Pefindo/Fitch Rating).

Pendapatan Pengelolaan Dana

Portofolio investasi yang dikelola PT PII pada tahun 2016 masih pada dua pilihan yang tersedia, berupa deposito berjangka dan obligasi. Komposisi penempatan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Income from Investment

Investment portfolio that is managed by IIGF in 2016 still focused on two available alternatives as saving plans and bonds. Investment composition as of December 31, 2016 is as follows:



Masih pada strategi investasi yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya, portofolio deposito berjangka tetap memiliki porsi terbesar dan menggunakan mekanisme tender untuk menjaga tata kelola yang baik (*good governance*), menghilangkan bias keputusan dan memperoleh tingkat pengembalian yang optimal (besaran tingkat suku bunga, keamanan tempat investasi serta likuiditas). Sedangkan untuk portofolio obligasi difokuskan kepada penempatan dengan portofolio AFS dan HTM dengan tingkat pengembalian yang tinggi dan tidak bertujuan untuk *trading*.

Tingkat rata-rata pengembalian pada Desember 2016 ini adalah sebesar 8,56%, menurun dibandingkan tahun lalu sebesar 9,51%. Sedangkan basis tumpuan berupa 7 Days Repo Rate yang dijadikan acuan pada bulan ini adalah sebesar 4,75%, dengan demikian tingkat pengembalian ini lebih tinggi sebesar 381 basis poin.

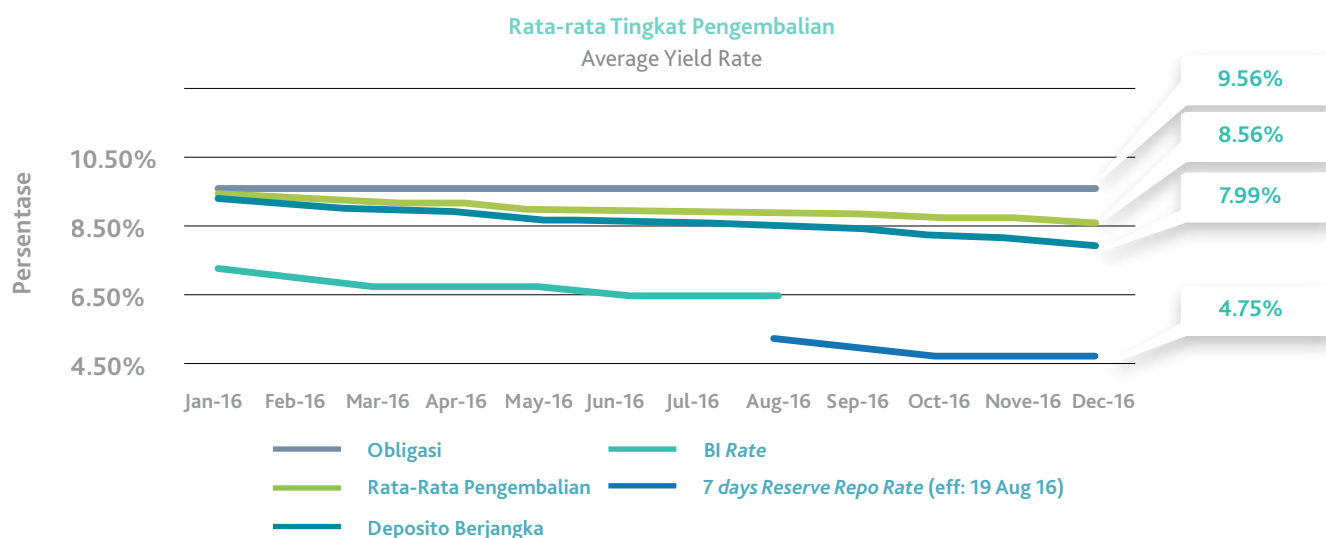
With the same investment strategy for these 2 years, saving plans time deposit portfolio still provided the highest contribution and using tender mechanism to maintain good governance, eliminate deviation in the decision and to acquire optimum return (interest rate level, investment institution security and liquidity). However, the bonds portfolio focused on investment with AFS and HTM portfolio with high yield rate and not available for sale.

In December 2016, the average return was 8.56% that decreased if compared with 9.51% in the previous year. However, basis foundation as 7 Days Repo Rate as benchmark in this year stood at 4.75%, therefore, the yield was higher by 381 basis points.



Tren tingkat rata-rata pengembalian selama 12 bulan terakhir ditunjukkan melalui grafik di bawah:

Average yield rate tren in recent 12 months is illustrated in chart below:



Hingga akhir tahun 2016, PT PII berhasil memperoleh pendapatan sebesar Rp643,5 miliar dari total dana kelolaan sebesar Rp8,555 miliar (termasuk Rp1 triliun PMN yang baru diterima pada tanggal 31 Desember 2016). Jumlah tersebut berasal dari bunga deposito sebesar Rp399 miliar dan bunga kupon obligasi sebesar Rp244,5 miliar. Walaupun terdapat *trend* penurunan tingkat suku bunga acuan dari BI rate yang pada awal tahun sebesar 7.25% menjadi 7 Days repo rate sebesar 4,75% pada akhir tahun 2016 atau turun hampir separuhnya, Perusahaan masih dapat mencapai target anggaran hingga sebesar 98% yakni sebesar Rp654,4 miliar.

As the end of 2016, IIGF managed to book revenues of Rp643.5 billion from total investments amounted to Rp8.555 billion (including PMN of Rp1 trillion that was acquired on December 31, 2016). The amount was contributed from time deposit of Rp399 billion and bonds coupon interest of Rp244.5 billion. Despite decreasing trend of benchmark rate and BI rate that stood at 7.25% at beginning of the year to 7 Days Repo Rate of 4.75% by the end of 2016 or was decreasing entirely, the Company still successfully achieved the budget target up to 98% amounting to Rp654.4 billion.

Dalam Jutaan Rupiah/ In million Rupiah

Uraian Description	Realisasi 2015 Realization 2015	2016		Pencapaian Achievement	Pertumbuhan Growth
		Anggaran Budget	Realisasi Realization		
Pendapatan Pengelolaan Dana Income from Investments	533.064	654.381	643.457	98%	21%

Tinjauan Keuangan

Financial Review

Uraian mengenai kinerja keuangan ini disusun berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan yang disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku umum di Indonesia untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Laporan keuangan tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan/ (PwC) dengan opini wajar tanpa modifikasi.

Bahasan kinerja keuangan Perusahaan, disampaikan dengan memperhatikan penjelasan pada catatan Laporan Keuangan dari pihak auditor eksternal sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini.

Laporan Posisi Keuangan

Aset

The following financial performance discussion is prepared based on Financial Statements that is presented according to Statements of Financial Accounting Standard (SFAS) that is generally applied in Indonesia for year ended on December 31, 2016. The Financial Statements had been audited by Tanudiredja, Wibisana, Rintis and Partners/ (PwC) Public Accountant Firm with Unqualified Opinion.

Discussion on the Company's financial performance is presented by considering explanation in the Financial Statements notes from the external audit as integrated part of this Annual Report.

Statements of Financial Position

Assets

Dalam Jutaan Rupiah/ In million Rupiah

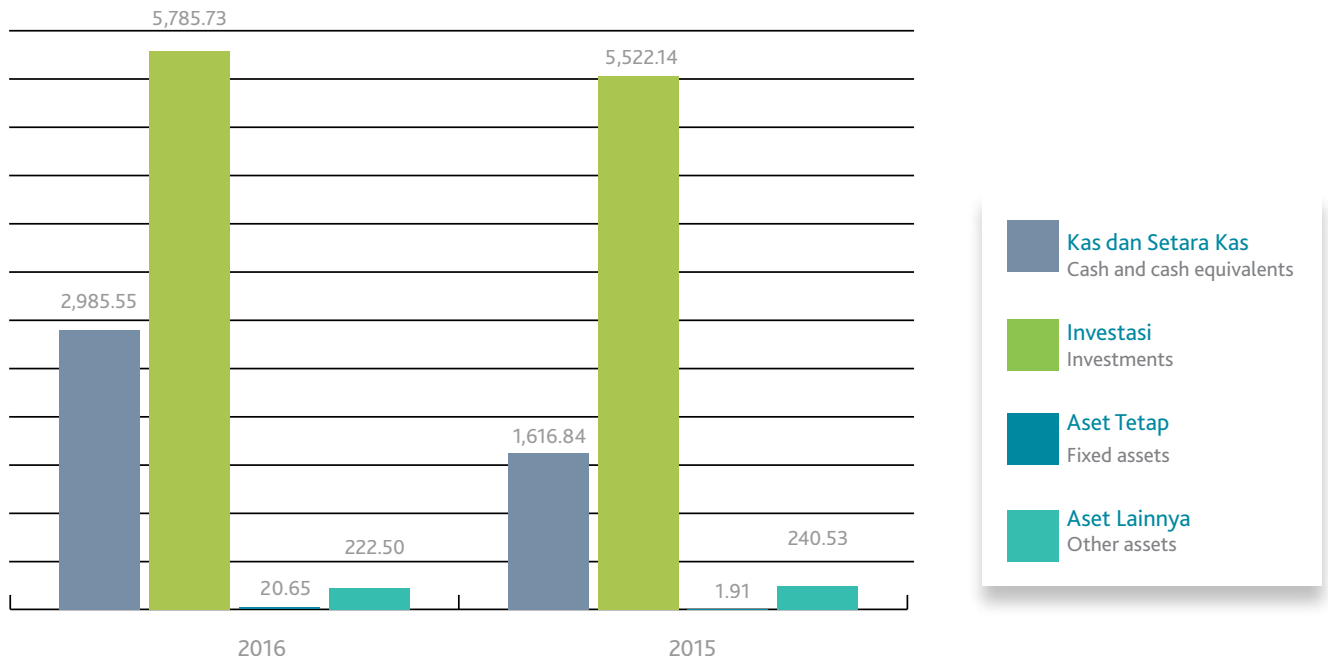
Aset PT PII/IICF Assets				
Uraian Description	Tahun/ Years		Pertumbuhan/(Penurunan) Increase/(Decrease)	
	2016	2015	Rp	%
Kas dan setara kas/ Cash and cash equivalents	2.895.545	1.616.841	1.278.704	79,09%
Investasi/ Investments	5.785.731	5.522.139	263.592	4,77%
Piutang usaha (bersih)/ Account receivables (Net)	68.689	72.248	(3.559)	(4,93%)
Piutang lainnya/ Other receivables	3.936	981	2.955	301,22%
Biaya dibayar dimuka Dan uang muka Prepaid expenses and advances	4.685	8.317	(3.632)	(43,67%)
Aset tetap/ Fixed assets	20.650	1.913	18.737	979,46%
Aset tak berwujud/ Intangible assets	1.690	2.376	(686)	(28,87%)
Beban tangguhan/ Deferred expenses	57.941	74.593	(16.652)	(22,32%)
Beban front end/ Front-end fees	763	763	-	0,00%
Aset pajak tangguhan/ Deferred tax assets	77.010	79.350	(2.340)	(2,95%)
Uang jaminan yang dapat dikembalikan/ Refundable deposits	7.789	1.886	5.903	312,99%
Jumlah Aset/ Total Assets	8.924.429	7.381.407	1.543.022	20,90%

Jumlah Aset Perusahaan tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 20,90% atau sebesar Rp1.543,02 miliar menjadi Rp8.924,43 miliar dibandingkan Jumlah Aset tahun 2015 yang sebesar Rp7.381,41 miliar. Peningkatan aset tersebut utamanya disebabkan adanya tambahan dana PMN sebesar Rp1 triliun yang diterima pada 31 Desember 2016.

In 2016, total assets of the Company increased 20.90% or Rp1,543.02 billion to Rp8,924.43 billion if compared with total assets booked in 2015 that was Rp7,381.41 billion. Increasing assets was primarily contributed from additional PMN proceeds of Rp1 trillion that was disbursed on December 31, 2016.



(dalam Miliar Rupiah)/(In billion Rupiah)



Komposisi aset Perusahaan didominasi oleh komponen investasi yaitu mencapai 64,83% dari total aset Perusahaan dan kas 32,45%. Hal ini menandakan bahwa likuiditas Perusahaan terjaga dengan sangat baik.

The Company's assets composition was dominated by investment components achieving 64.83% of total assets and cash with 32.45% composition. This is evaluated as very appropriate composition.

Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas pada akhir tahun 2016 tercatat mengalami peningkatan sebesar 79,09% atau sebesar Rp1.278,71 miliar dari Rp1.616,84 miliar menjadi Rp2.895,55 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya deposito dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang menghasilkan pendapatan dengan tingkat suku bunga berkisar antara 6,75% - 9,00% per tahun di 2016 (2015: 9,25% - 9,75%).

Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents recorded 79.09% or Rp1,278.71 billion growth by the end of 2016 from Rp1,616.84 billion to Rp2,895.55 billion. Growth was driven by increasing time deposit with three months maturity or less earnings with interest rate around 6.75% - 9.00% per annum in 2016 (2015: 9.25% - 9.75%).

Investasi

Jumlah investasi tahun 2016 tercatat sebesar Rp5.785,73 miliar, meningkat 4,77% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp5.522,14 miliar. Tidak terdapat peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun lalu dikarenakan penempatan investasi cukup konsisten.

Investments

In 2016, the Company posted total investments of Rp5,785.73 billion that increased 4.77% if compared with Rp5,522.14 billion booked in the previous year. There was no significant increase from previous year due to consistent investments placement.

Liabilitas

Liabilities

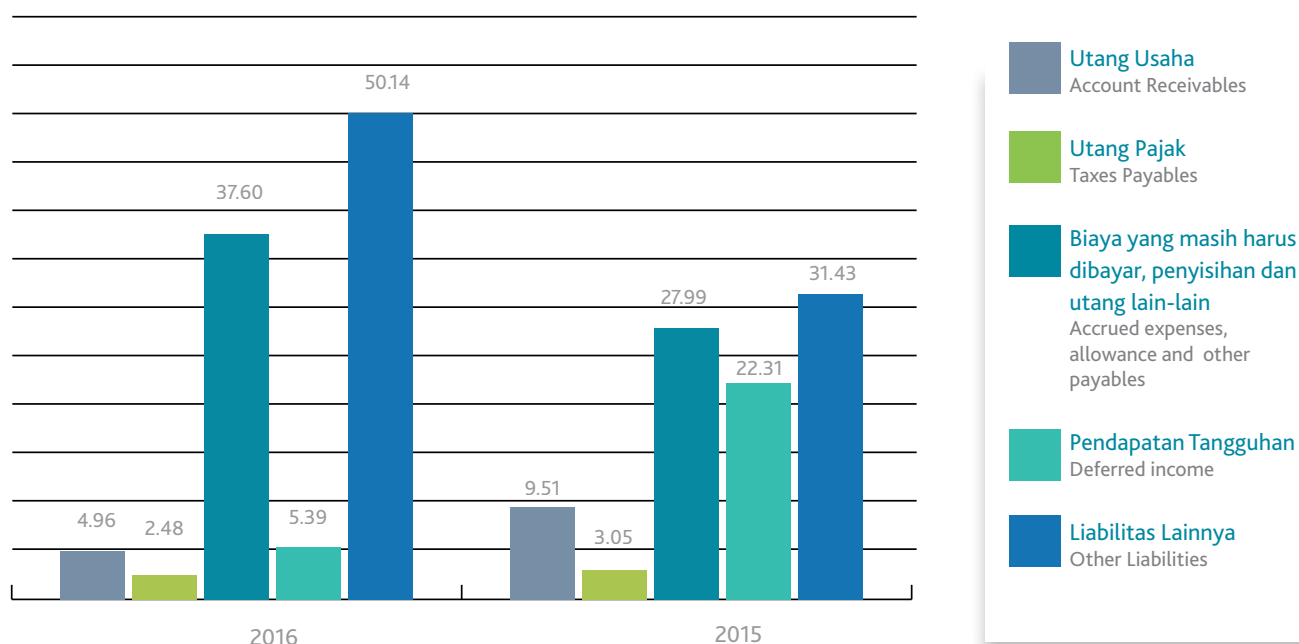
Dalam Jutaan Rupiah/ In million Rupiah

Liabilitas PT PII/IIGF Liabilities				
Uraian Description	Tahun/ Years		Pertumbuhan/(Penurunan) Increase/(Decrease)	
	2016	2015	Rp	%
Utang Usaha/ Account Receivables	4.960	9.510	(4.550)	(47,85%)
Utang Pajak/ Taxes Payables	2.483	3.053	(570)	(18,67%)
Biaya yang masih harus dibayar, penyisihan dan utang lain-lain/ Accrued expenses, allowance and other payables	37.597	27.993	9.604	34,31%
Pendapatan tangguhan/ Deferred income	5.385	22.312	(16.927)	(75,87%)
Pinjaman penerusan/ Two-steps loan	35.805	21.981	13.824	62,89%
Liabilitas imbalan kerja/ Employment benefit liabilities	14.335	9.445	4.890	51,77%
Jumlah Liabilitas / Total Liabilities	100.565	94.294	6.270	6,65%

Jumlah Liabilitas Perusahaan pada 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp6,27 miliar atau setara dengan 6,65%, yaitu dari Rp94,29 miliar pada akhir tahun 2015 menjadi Rp100,57 miliar pada akhir tahun 2016. Peningkatan tersebut disebabkan utamanya oleh peningkatan pinjaman penerusan, komponen biaya yang masih harus dibayar, dan liabilitas imbalan kerja.

Total liabilities were increasing by Rp6.27 billion in 2016 or 6.65%, from Rp94.29 billion by the end of 2015 to Rp100.57 billion by the end of 2016. Increase was primarily due to increasing amount of two-steps loan, accrued expense components and employment benefit liabilities.

(dalam Miliar Rupiah)/(In billion Rupiah)





Utang usaha

Jumlah utang usaha PT PII tahun 2016 tercatat sebesar Rp4,96 miliar mengalami penurunan sebesar 47,84% atau Rp4,55 miliar dibandingkan jumlah utang usaha tahun sebelumnya yang sebesar Rp9,51 miliar.

Pinjaman Penerusan

Pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah penarikan pinjaman penerusan adalah Rp35,81 miliar, meningkat sebesar Rp13,82 miliar atau 62,89% terhadap jumlah penarikan pinjaman penerusan pada 31 Desember 2015 sebesar Rp21,98 miliar. Tingkat suku bunga pinjaman penerusan menggunakan SUN *Benchmark* dengan tenor 20 tahun.

Ekuitas

Account Payables

In 2016, IIGF posted total trade payables of Rp4.96 billion that decreased 47.84% or Rp4.55 billion if compared with total trade payables in the previous year that was Rp9.51 billion.

Two-Steps Loan

As of December 31, 2016, total two-steps loan withdrawal achieved Rp35.81 billion that increased Rp13.82 billion or 62.89% to total two-steps loan withdrawal of Rp21.98 billion as of December 31, 2015. Two-steps loan interest rate applied SUN *Benchmark* with 20 years terms.

Equity

Dalam Jutaan Rupiah/ In million Rupiah

Ekuitas PT PII				
Uraian Description	Tahun/ Years		Pertumbuhan/(Penurunan) Increase/(Decrease)	
	2016	2015	Rp	%
Modal Saham/ Share Capital	7.000.000	6.000.000	1.000.000	16,67%
Rugi Belum direalisasi atas kepemilikan aset keuangan tersedia untuk dijual/ Unrealized loss on ownership of available-for-sale financial assets	(25.878)	(61.303)	35.425	(57,79%)
Rugi aktuarial/ Loss from actuarial	(1.714)	(593)	(1.121)	189,02%
Saldo Laba/ Retained earnings				
- Ditentukan penggunaannya/ Appropriated, statutory reserve	67.800	50.800	17.000	33,46%
- tidak ditentukan penggunaannya/ Unappropriated	1.783.656	1.298.209	485.447	37,39%
Jumlah Ekuitas/ Total Equity	8.823.864	7.287.113	1.536.751	21,09%

Jumlah Ekuitas Perusahaan pada 2016 tercatat sebesar Rp8.823,86 miliar, naik sebesar Rp1.536,75 miliar atau 21,09% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp7.287,11 miliar. Peningkatan tersebut adalah gabungan dari hasil laba komprehensif selama tahun 2016 sejumlah Rp536,75 Miliar dan tambahan setoran modal sebesar Rp1 triliun.

Total equity was booked Rp8,823.86 billion in 2016 that increased Rp1,536.75 billion or 21.09% from Rp7,287.11 billion booked in the previous year. Increase in equity was due to merged of total comprehensive income for 2016 of Rp536.75 billion and additional paid-in capital of Rp1 trillion.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Incomes

Dalam Jutaan Rupiah/ In million Rupiah

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain PT PII/ IIGF Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Incomes				
Uraian Description	Tahun/ Years		Pertumbuhan/(Penurunan) Increase/(Decrease)	
	2016	2015	Rp	%
Pendapatan / Revenues	821,107	533,065	288,042	54.04%
Beban Usaha/ Operating expenses	(315,946)	(213,973)	(101,973)	47.66%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan/ Profit before income tax	505,161	319,092	186,069	58.31%
(Beban) Manfaat Pajak Penghasilan Income Tax Benefit (Expense)	(2,340)	20,364	(23,078)	(113.33%)
Laba Tahun Berjalan/ Profit for the Year	502,447	339,455	162,992	48.02%
Penghasilan (Beban) Komprehensif Tahun berjalan Comprehensive Income (Loss) For The Year	34,304	(3,907)	38,211	(978.01%)
Jumlah Penghasilan komprehensif tahun berjalan Total Comprehensive Income For The Year	536,751	335,548	201,203	59.96%

Pada tahun 2016, Perusahaan berhasil membukukan penghasilan komprehensif tahun berjalan sebesar Rp536,75 miliar. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan penghasilan komprehensif tahun berjalan tahun sebelumnya yang sebesar Rp335,55 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan peningkatan pendapatan Perusahaan, khususnya yang diperoleh dari pendapatan penjaminan dan pendapatan pengelolaan dana.

Pendapatan

Pendapatan Perusahaan bersumber dari pendapatan penjaminan dan pendapatan pengelolaan dana. Tahun 2016, jumlah pendapatan Perusahaan mencapai Rp821,11 miliar. Pendapatan tersebut sebagian besar masih berasal dari pendapatan pengelolaan dana, yaitu sebesar Rp643,46 miliar. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah pendapatan Perusahaan tahun 2016 meningkat sebesar 54,04%.

Tahun 2016, Perusahaan berhasil membukukan pendapatan penjaminan sebesar Rp177,65 miliar. Pendapatan penjaminan tersebut diperoleh dari beberapa penjaminan proyek infrastruktur yang sebagian telah efektif.

Sedangkan pendapatan dari pengelolaan dana pada tahun 2016 mengalami pertumbuhan sebesar 20,71%, dari Rp533,06 miliar pada tahun 2015 menjadi Rp643,46 miliar. Peningkatan pendapatan pengelolaan dana disebabkan meningkatnya dana

In 2016, the Company booked comprehensive income for the year of Rp536.75 billion. The amount was higher than comprehensive income for the year booked in previous year amounted to Rp335.55 billion. Increase was contributed from higher revenue from guarantee and income from investments.

Revenues

Revenues were acquired from revenue from guarantee and income from investments. In 2016, the Company booked total revenues of Rp821.11 billion. Revenues were mainly contributed from income from investments of Rp643.46 billion. If compared with previous year, total revenues in 2016 grew by 54.04%.

In 2016, the Company managed to book revenue from guarantee of Rp177.65 billion. The revenue from guarantee was acquired from several infrastructure project guarantee which had been effective partly.

However, income from investments grew by 20.71% in 2016 from Rp533.06 billion in 2015 to Rp643.46 billion. Increasing income from investments due to higher investment proceeds of the



modal kelolaan yang dimiliki Perusahaan dan juga dari pemilihan instrumen investasi yang tepat yang dapat memberikan imbal hasil yang lebih baik.

Beban Usaha

Sepanjang tahun 2016, beban usaha Perusahaan meningkat sebesar 47,66% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari Rp213,97 miliar pada tahun 2015 menjadi Rp315,95 miliar. Peningkatan beban usaha tersebut utamanya disebabkan meningkatnya beban penjaminan dan beban administrasi dan umum seiring peningkatan kegiatan usaha Perusahaan.

Beban usaha Perusahaan terdiri dari beban pajak final, beban penjaminan, beban administrasi dan umum, beban pengembangan usaha dan beban lainnya.

Company as well as from the selection of effective investment instruments that generated higher return.

Operating Expenses

Throughout 2016, operating expenses of the Company increased 47.66% if compared with previous year from Rp213.97 billion in 2015 to Rp315.95 billion. Increasing operating expenses was primarily driven by increasing guarantee expenses as well as administrative and general expenses as in line with the Company's business activity expansion.

Operating expenses comprised of final tax expenses, guarantee expense, administrative and general expenses, business development expense and other expenses.

Dalam Jutaan Rupiah/ In million Rupiah

Beban Usaha PT PII/ IIGF Operating Expenses				
Uraian Description	Tahun/ Years		Pertumbuhan/(Penurunan) Increase/(Decrease)	
	2016	2015	Rp	%
Beban Pajak Final/ Final tax expenses	(126.934)	(102.307)	(24.627)	24,07%
Penjaminan/ Guarantee	(80.561)	(41.217)	(39.344)	95,46%
Administrasi dan Umum/Administrative and general expenses	(92.484)	(59.720)	(32.764)	54,86%
Pengembangan Usaha/ Business development	(9.409)	(7.578)	(1.831)	24,16%
Penyusutan/ Depreciation	(2.367)	(2.219)	(148)	6,67%
Amortisasi/ Amortization	(1.008)	(971)	(37)	3,81%
Penghasilan Keuangan, kotor/ Finance income, gross	1.263	1.239	24	1,94%
Keuntungan (Kerugian) kurs bersih/ Foreign exchange gain/(loss), net	(1.216)	504	(1.720)	(3,41%)
Lain-lain/ Others	(3.230)	(1.704)	(1.526)	89,55%
Jumlah Beban Usaha/ Total operating expenses	(315.946)	(213.973)	(101.972)	47,66%

Beban Penjaminan

Beban penjaminan terdiri dari biaya pegawai terkait kegiatan operasi sampai dengan akhir tahun 2016 sebesar Rp31,3 miliar, Biaya konsultan proyek sebesar Rp42,37 miliar, biaya *workshop* terkait proyek sebesar Rp3,3 miliar, biaya penyelenggaraan konferensi dan rapat sebesar Rp2 miliar dan biaya perjalanan dinas terkait proyek sebesar Rp1,5 miliar.

Guarantee Expense

Guarantee expense comprised of employee expense related with operational activity as end of 2016 that amounted to Rp31.3 billion, Project Consultant fee of Rp42.37 billion, project-related workshop expense of Rp3.3 billion, conference and meeting expenses of Rp2 billion and project-related business trip expense of Rp1.5 billion.

Laba Sebelum Pajak

Laba Sebelum Pajak tahun 2016 meningkat sebesar 58,31% atau Rp186,07 miliar menjadi Rp505,16 miliar, dimana Laba Sebelum Pajak tahun 2015 adalah Rp391,09 miliar. Peningkatan Laba sebelum pajak ini sejalan dengan peningkatan pendapatan Perusahaan.

Penghasilan Komprehensif

Pada tahun 2016, realisasi laba komprehensif mencapai Rp536,75 miliar, meningkat Rp201,20 miliar atau sebesar 59,96% dari realisasi penghasilan komprehensif tahun 2015 sebesar Rp335,55 miliar. Peningkatan laba komprehensif pada 2016 disebabkan perolehan manfaat komprehensif lain yang diperoleh Perusahaan pada 2016.

Laporan Arus Kas

Profit Before Income Tax

In 2016, Profit before income tax increased 58.31% or Rp186.07 billion to Rp505.16 billion where the Profit before income tax booked in 2015 was Rp391.09 billion. Increasing profit before income tax was in line with higher revenues achieved by the Company.

Comprehensive Income

In 2016, comprehensive income realization achieved Rp536.75 billion that increased Rp201.20 billion or 59.96% from comprehensive income realization in 2015 that was Rp335.55 billion. Increasing comprehensive income booked in 2016 was contributed from acquisition of other comprehensive income by the Company throughout 2016.

Statements of Cash Flows

Dalam Jutaan Rupiah/ In million Rupiah

Laporan Arus Kas PT PII/IIGF Statements of Cash Flows				
Uraian Description	Tahun/ Years		Pertumbuhan/(Penurunan) Increase/(Decrease)	
	2016	2015	Rp	%
Arus kas diperoleh dari aktivitas operasi Cash flow from operating activities	520.377	273.399	246.978	90,34%
Arus kas digunakan untuk aktivitas investasi Cash flow from investing activities	(255.498)	(974.251)	718.753	(73,77%)
Arus kas diperoleh dari aktivitas pendanaan Cash flow from financing activities	1.013.825	1.511.641	(497.816)	(32,93%)
Kenaikan bersih kas dan setara kas Net increase in cash and cash equivalents	1.278.704	810.789	467.913	57,71%
Kas dan Setara Kas Awal Tahun Cash and cash equivalents at beginning of year	1.616.841	806.052	810.789	100,59%
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Cash and cash equivalents at end of year	2.895.545	1.616.841	1.278.704	79,09%

Arus Kas Diperoleh dari Aktivitas Operasi

Pada 2016, arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp520,38 miliar, meningkat tajam (90,34%) dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp273,40 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan laba sebelum pajak penghasilan yang dibukukan Perusahaan pada tahun 2016.

Cash Flows Form Operating Activities

In 2016, net cash flows from operating activities amounted to Rp520.38 billion, significantly increased (90.34%) if compared with Rp273.40 billion booked in the previous year. Increase was driven by increasing profit before income tax booked by the Company in 2016.



Arus Kas dari Aktivitas Operasi/Cash Flows From Operating Activities

Uraian Description	Tahun/ Years		Pertumbuhan/(Penurunan) Increase/(Decrease)	
	2016	2015	Rp	%
Laba sebelum pajak penghasilan/ Profit before income tax	505.161	319.091	186.070	58,31%
Ditambah unsur yang tidak mempengaruhi kas: Add items not affecting cash flows:				
- Beban penyusutan/ Depreciation	2.367	2.220	147	6,62%
- Beban amortisasi/ Amortization	1.009	971	38	3,91%
- Beban penyesuaian imbalan kerja Provision for employee benefits obligation	4.756	694	4.062	585,3%
- Beban lain-lain/Other expenses	727	-	727	100,00%
Arus kas operasi sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi Operating cash flows before changes in operating assets and liabilities	514.020	322.976	191.044	59,15%
Perubahan dalam aset operasi Changes in operating assets and liabilities				
Kenaikan (penurunan) aset operasi Decrease/(increase) in operating assets				
- Piutang usaha/ Account receivables	3.559	(48.153)	51.712	(107,39%)
- Piutang lainnya/ Other receivables	(2.955)	(361)	(2.594)	718,56%
- Biaya dibayar dimuka dan uang muka/Prepaid expenses and advances	3.632	(4.894)	8.526	(174,21%)
- Beban tangguhan/ Deferred expenses	16.652	(18.710)	35.362	(189,00%)
(Penurunan) kenaikan liabilitas operasi (Decrease)/Increase in operating liabilities				
- Utang usaha/ Account payables	(4.550)	2.621	(7.171)	(273,60%)
- Utang Pajak/ Taxes payable	(570)	305	(875)	(286,89%)
- Biaya masih harus dibayar, penyesuaian dan utang lain-lain Accrued expenses, provisions and other payables	8.877	8.290	587	7,08%
- Pembayaran manfaat imbalan kerja/ Payment of employee benefit	(1.360)	(294)	(1.066)	362,59%
- Pendapatan tangguhan/ Unearned income	(16.928)		(16.928)	100,00%
- Pengembalian pajak dibayar dimuka/ Return for prepaid tax	-	11.619	(11.619)	(100,00%)
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi Net cash flow provided from operating activities	520.377	273.399	246.978	90,34%

Arus Kas Digunakan untuk Aktivitas Investasi

Perusahaan mencatat arus kas digunakan untuk aktivitas investasi senilai Rp255,5 miliar, turun sebesar 73,77% dari tahun sebelumnya senilai Rp974,25 miliar. Penurunan tersebut disebabkan penerimaan PMN diakhir tahun belum ditempatkan pada investasi instrumen keuangan dikarenakan baru diterima pada tanggal 31 Desember 2016, disamping terdapat pembelian aset tetap dan aset tak berwujud serta peningkatan uang jaminan pendanaan.

Cash Flows From Investment Activities

The Company booked cash flow for investing activities of Rp255.5 billion, that decreased 73.77% from Rp974.25 billion booked in the previous year. Decrease was due to decreasing revenues from PMN by the end of the year that had not been placed in any financial instrument investment due the proceeds were received on December 31, 2016, besides the acquisition of fixed assets and intangible assets as well as increasing guarantee deposits.

Arus Kas Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan selama 2016 sebesar Rp1.013,83 miliar. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 32,93% dibandingkan 2015 yang membukukan kas keluar untuk aktivitas pendanaan senilai Rp1.511,64 miliar.

Kemampuan Membayar Utang

Perusahaan tidak memiliki hutang jangka panjang dalam jumlah yang signifikan. Hutang jangka panjang yang dimiliki Perusahaan hanya berupa pinjaman penerusan yang pada 31 Desember 2016 berjumlah Rp35,81 miliar yang dipergunakan untuk peningkatan dan pengembangan kapasitas dan teknis operasional Perusahaan melalui dukungan *World Bank*. Selebihnya adalah liabilitas imbalan kerja sebesar Rp14,34 miliar. Pokok pinjaman akan dilunasi dengan angsuran semesteran setelah masa tenggang selama sembilan tahun dan akan jatuh tempo pada berbagai tanggal sampai dengan tahun 2029.

Pada tanggal 22 Februari 2016, Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan surat Nomor. No.S-1504/MK.5/2016 sebagai amandemen atas perjanjian penerusan pinjaman Nomor. SLA-1251/DSMI/2013 antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Perusahaan, dengan perubahan pada tingkat suku bunga, yaitu menggunakan *SUN Benchmark* dengan tenor 20 tahun.

Tingkat Kolektabilitas Piutang Perusahaan

Sampai akhir tahun 2016, Piutang Perusahaan berasal dari piutang penjaminan atas imbal jasa terkait *guarantee fee* proyek Tol Batang Semarang dan piutang bunga yang berasal dari investasi dalam deposito maupun obligasi dimana Perusahaan menempatkan deposito dengan mekanisme tender dan penempatan obligasi dengan memperhatikan standar yang diperbolehkan dalam Operasional Manual Perusahaan sehingga tingkat kolektibilitasnya tinggi.

Struktur Modal dan Kebijakan Struktur Modal

Struktur Modal

Tujuan Perusahaan dalam mengelola permodalan adalah untuk melindungi kemampuannya dalam mempertahankan kelangsungan usaha sehingga Perusahaan dapat tetap memberikan imbal hasil bagi pemegang saham dan manfaat bagi pemangku kepentingan lainnya serta menjaga struktur modal

Cash Flows From Financing Activities

In 2016, Cash flows from financing activities amounted to Rp1,013.08 billion. The figure decreased by 32.93% if compared with outflow cash for financing activities booked in 2015 that was Rp1,511.64 billion.

Solvency

The Company did not book long-term loans with significant amount. As of December 31, 2016, long-term loans of the Company was two-step loans amounted to Rp35.81 billion that was disbursed to increase and develop the Company's operational capacity and technical ability supported by the World Bank. Remaining loans comprised of Rp14.34 billion employment benefit liabilities. The loans principal will be fully paid with semester installment after nine years grace period and will be due on various dates until 2029.

On February 22, 2016, Finance Ministry of Republic of Indonesia issued Letter No. No. S-1504/MK.5/2016 as Amendment to Two-Step Loan Agreement No. SLA-1251/DSMI/2013 between Government of Republic of Indonesia with the Company with a revision in the interest rate using *SUN Benchmark* with 20 years term.

Receivables Collectability Ratio

As end of 2016, the Company booked receivables from guarantee receivables on fees related with guarantee fee from Batang Semarang Toll project and interest receivables from investment in time deposit and bonds where the Company invested time deposits with tender mechanism and bonds investment by considering eligible standards in Corporate Manual Operations to ensure high collectibility ratio.

Capital Structure and Capital Structure Policy

Capital Structure

The Company's objective when managing capital is to safeguard its ability to continue as a going concern in order to provide returns for shareholders and benefits for other stakeholders and to maintain an optimal capital structure to reduce the cost of



yang optimal untuk mengurangi biaya modal. Struktur modal merupakan perimbangan antara penggunaan modal sendiri dengan pinjaman/liabilitas yang terdiri dari liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang.

Aset Perusahaan saat ini sebagian besar didanai dari ekuitas Perusahaan berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) oleh Pemerintah. Berdasarkan hasil keputusan pemegang saham yang dituangkan dalam Akta Notaris Aryanti Artisari, Sh, MKn Nomor. 145 tanggal 30 Agustus 2012, Pemerintah selaku pemegang saham menyetujui peningkatan modal dasar Perusahaan menjadi sebesar Rp9 triliun (nilai penuh). Pemerintah kemudian melakukan penambahan PMN sebesar Rp1 triliun pada Desember 2012 dan Rp1,5 triliun pada Desember 2015.

Pada tanggal 30 Desember 2016, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 79 tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan, telah disetorkan tambahan modal saham sebesar Rp1 triliun yang diterima pada tanggal 31 Desember 2016, sehingga pada posisi 31 Desember 2016 modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan tercatat sebesar Rp7 triliun. Selain modal ditempatkan, per akhir tahun 2016 Perusahaan memiliki saldo laba sebesar total Rp1.852 miliar sebagai bagian dari ekuitas.

capital. The capital structure is a balance between the use of equity capital and loan consisting of short-term liabilities and long-term liabilities.

Currently, the Company's financial assets solely relied on the Company's equity in the form of State Capital Injection (PMN) from the Government. Based on the shareholders' decision as outlined in the Notarial Deed of Aryanti Artisari, Sh, MKn No.145 dated August 30, 2012, the Government as shareholder agreed to increase the Company's authorized capital to Rp9 trillion (full amount). The government then gave the State Capital Injection to IIGF by Rp1 trillion in December 2012 and Rp1.5 trillion in December 2015 so that the position of the Company's issued and fully paid capital recorded at Rp 6 trillion on December 31, 2015.

On December 30, 2016, according to Government Regulation No. 79 of 2016 regarding Additional Capital Investment of Republic of Indonesia Government, additional paid-in capital amounted to Rp1 trillion had been received on December 31, 2016, therefore, as of December 31, 2016 the position of Company's subscribed and fully paid-in capital amounted to Rp7 trillion. Other than the subscribed capital, as end of 2016, the Company booked retained earnings of Rp1,852 billion as part of equity.

Uraian Description	2016		2015	
	Nominal Amount	%	Nominal Amount	%
Liabilitas/Liabilities	100.565	1,13%	94.294	1,28%
Ekuitas/Equity	8.823.864	98,87%	7.287.113	98,72%
Total/Total	8.924.429	100,00%	7.381.407	100,00%

Kebijakan Atas Struktur Modal

PT PII membutuhkan penguatan struktur permodalan untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menjamin proyek infrastruktur dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur nasional. Untuk itu, Perusahaan telah memperoleh tambahan PMN sebesar Rp1.000 Miliar pada tahun 2016 dan memperoleh persetujuan dari DPR RI terkait alokasi penambahan PMN sejumlah Rp1.000 Miliar pada tahun 2017 mendatang. Dengan peningkatan kapasitas dan kemampuan Perusahaan ini, diharapkan Perusahaan dapat menjalankan perannya secara aktif untuk menjamin lebih banyak proyek infrastruktur nasional.

Secara nominal, struktur modal Perusahaan diperkuat oleh penambahan modal hingga sebesar Rp8.000 miliar pada akhir 2017 mendatang.

Capital Structure Policy

IIGF requires capital structure strengthening to upgrade its capacity to guarantee the infrastructure projects in order to accelerate national economic development. Therefore, the Company has acquired additional PMN of Rp1,000 billion in 2016 and approval from DPR RI regarding the allocation of additional PMN of Rp1,000 billion in the upcoming 2017. With increasing capacity and capability, the Company is expected to exercise its role actively to guarantee higher number of national infrastructure project.

By amount, capital structure of the Company is strengthened by the additional capital of Rp8,000 billion by the end of 2017.

Ikatan Material

Pada tanggal 22 Agustus 2016, Perusahaan mengadakan perjanjian sewa dengan PT Mahkota Prima Properti. Periode sewa adalah untuk empat (4) tahun dimulai dari 1 September 2016 dan berakhir pada 31 Agustus 2020.

Perjanjian sewa ini meliputi area yang digunakan untuk ruangan kantor. Berdasarkan perjanjian ini, Perusahaan mempunyai kewajiban untuk membayar sewa, jasa pemeliharaan dan biaya lainnya terkait sewa ke PT Mahkota Prima Properti. Pembayaran untuk seluruh jumlah sewa dan jasa pemeliharaan dibayarkan setiap bulan. Sebagai tambahan, Perusahaan juga membayar dimuka atas deposit sekuriti yang ditahan oleh PT Mahkota Prima Properti tanpa kewajiban untuk membayar bunga kepada Perusahaan. Seluruh deposit tersebut akan dikembalikan pada waktu berakhirnya perjanjian sewa ini, jika Perusahaan tidak berniat untuk melanjutkan sewa.

Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal

Sepanjang tahun 2016, Perusahaan tidak memiliki ikatan yang material untuk investasi belanja modal dengan pihak mana pun.

Investasi Barang Modal yang Direalisasikan pada Tahun Buku Terakhir

Selama 2016, Perusahaan telah melakukan investasi barang modal yang dibutuhkan yang ditujukan untuk kegiatan operasional Perusahaan dengan jumlah biaya perolehan mencapai Rp21,10 miliar. Kegiatan investasi barang modal tersebut dalam bentuk penyelesaian aset, peralatan komputer dan peralatan kantor, perabotan dan perlengkapan.

Material Commitment

On 22 August 2016, the Company entered into a lease agreement with PT Mahkota Prima Properti. The lease period is for four (4) years starting from 1 September 2016 and expires on 31 August 2020.

This lease agreement covers an area that is used for office space. Based on this agreement, the Company has an obligation to pay rent, service charges and other charges to PT Mahkota Prima Properti. Payment for the full amount of rent and service charges was charged monthly. In addition, the Company also paid in advance for security deposit, which is held by the PT Mahkota Prima Properti without liability to the Company for interest. All deposits will be refunded on the expiration of this lease, if the Company does not intend to continue the lease.

Material Commitment for Capital Expenditure

Throughout 2016, the Company did not book any material commitment for capital expenditure with any party.

Capital Expenditure Realization in Recent Fiscal Year

Throughout 2016, the Company had invested capital expenditures that were required for the Company's operational activity with total acquisition cost amounted to Rp21.10 billion. The capital expenditure investment activities were including assets under construction, computer and office supplies, stationary and equipment.

Dalam Jutaan Rupiah/ In million Rupiah

Jenis Barang Modal/ Type of Goods	Nilai/Value
Aset dalam penyelesaian/ Assets under construction	18.193
Peralatan komputer/ Computers	387
Peralatan kantor, perabotan dan perlengkapan Office supplies, stationary and equipment	2.524
Jumlah/Total	21.104



Perbandingan Target dan Realisasi

Pada tahun 2016, Perusahaan telah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang memuat target pencapaian Perusahaan pada tahun buku 2016. Adapun asumsi yang digunakan Perusahaan dalam menyusun RKAP 2016 adalah sebagai berikut:

- Nilai tukar Rupiah terhadap US\$: Rp13.900
- Tingkat Inflasi : 4,7%
- BI Rate : 7,50%

Comparison Between Target and Realization

In 2016, the Company had prepared Company Budget Plan (RKAP) that stipulates the Company's achievement target for fiscal year 2016. The underlying assumptions for RKAP 2016 preparation are as follows:

- Rupiah to US\$ exchange rate : Rp13.900
- Inflation Rate : 4,7%
- BI Rate : 7,50%

Indikator Indicators	Target	Realisasi Realization	Pencapaian Achievement
Pendapatan/ Revenues	Rp909.954 juta	Rp821.107 juta	90,24%
Beban Usaha/ Operating Expenses	Rp293.197 juta	Rp189.013 juta	64,47%
Laba Tahun Berjalan/ Profit For The Year	Rp502.176 juta	Rp502.447 juta	100,05%

Proyeksi Tahun 2017

Menghadapi tahun 2017, PT PII telah merumuskan beberapa target pencapaian kinerja dengan rasa optimisme yang tinggi:

1. Pemantauan aktif atas proyek-proyek yang telah efektif penjaminan guna dapat mengantisipasi serta memitigasi secara bersama-sama dengan para PJPK.
2. Pemrosesan proyek baru dengan cakupan sektor yang lebih luas, dalam hal ini termasuk sektor sosial, sebagai bagian "Double down" proyek infrastruktur yang dijamin.
3. Standarisasi proses bisnis terkait pemantauan proyek termasuk potensi perubahan (amandemen) perjanjian, proses klaim ataupun mekanisme regres serta perkuatan analisis kapasitas penjaminan serta faktor leveraging.
4. Persiapan pengembangan bisnis dan opsi baru terkait perluasan mandat sejalan dengan rencana perubahan RJPP PT PII 2017-2022.

Projection in 2017

Approaching 2017, IIGF has formulated performance achievement targets with high optimism, among others:

1. Active monitoring on projects which guarantee had been effective to anticipate and mitigate altogether with the CAs.
2. New project processing with broader sector scope, in this course also covers social sector, as "Double Down" part in the guaranteed infrastructure project.
3. Business process standardization related to project monitoring including possibility of revision (amendment) of the claim agreement, process or regress mechanism as well as strengthening guarantee capacity analysis and leveraging factors.
4. Business development and new option preparation related to extension of mandate that are in line with IIGF Business Plan 2017 - 2022 revision plan.

Prospek Usaha

Optimisme yang terbangun pada tahun 2016 berangkat dari terus didorongnya pembangunan infrastruktur di Indonesia oleh Pemerintah Indonesia. Peraturan Presiden Nomor. 3 Tahun 2016 yang telah menetapkan 225 proyek infrastruktur sebagai Proyek Prioritas Nasional telah memberikan angin segar kepada bisnis PT PII dengan pembangunan infrastruktur yang lebih terarah.

Business Prospect

Optimism that was built in 2016 was departed from consistent support from the Government of Republic of Indonesia to the infrastructure development in the country. Presidential Regulation No. 3 of 2016 that has stipulated 225 infrastructure projects as National Priority Project has brought a breath of fresh air to IIGF's business towards a more directed infrastructure development.

Untuk memanfaatkan momentum sebagai institusi penjaminan yang lebih dikenal dan dipercaya, fasilitas penjaminan yang ditawarkan PII harus dapat meningkatkan kepercayaan investor dan *financier* dalam bekerjasama dengan pihak pemerintah membangun suatu proyek infrastruktur. Opsi yang dipilih sebagai pengembangan usaha ke depan adalah untuk tetap fokus kepada pemantapan bisnis Penjaminan di sektor KPBU dengan mentargetkan untuk dapat meningkatkan jumlah proyek ("double down") yang dapat diberikan dukungan penjaminan. Seiring dengan hal tersebut, dalam tahapan pengembangan strategi jangka menengah, PT PII akan dapat mengembangkan bisnis inti Perusahaan menuju Penjaminan untuk proyek-proyek non KPBU, penasihat transaksi untuk para PJPB yang memiliki potensi hingga peningkatan kapasitas ekosistem termasuk pelaku usaha di sektor infrastruktur.

Atas perkembangan kondisi tersebut, secara terstruktur PT PII akan melakukan 4 besaran aktivitas secara simultan dalam pelaksanaan penjaminan proyek infrastruktur, yakni:

1. Pemrosesan proyek baru dengan cakupan sektor yang lebih luas, dalam hal ini termasuk sektor sosial, sebagai bagian "Double down" proyek infrastruktur yang dijamin.
2. Pemantauan aktif atas proyek-proyek yang telah efektif penjaminan guna dapat mengantisipasi serta memitigasi secara bersama-sama dengan para PJPB.
3. Standardisasi proses bisnis terkait pemantauan proyek termasuk potensi perubahan (amandemen) perjanjian, proses klaim ataupun mekanisme regres serta penguatan analisis kapasitas penjaminan serta faktor *leveraging*.
4. Persiapan pengembangan bisnis dan opsi baru terkait perluasan mandat.

Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/Manajemen

Perusahaan tidak memiliki program kepemilikan saham oleh karyawan (*Employee Stock Option Program/ESOP*) dan manajemen (*Management Stock Option Program/MSOP*).

Informasi Transaksi dengan Pihak Afiliasi

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor. 7 (revisi 2010), tentang "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi" yang didefinisikan antara lain:

To address the momentum as a reputable and trusted guarantee institution, the guarantee facility that is offered by IIGF shall bring higher trust from the investor and financier in cooperating with the Government to build an infrastructure project. The selected option as future business development is to stay focus on Guarantee Business consolidation in PPP sector by targeting to increase number of projects ("double down") that are eligible to be guaranteed. In line with this condition, in the medium-term strategic development phase, IIGF will also develop core business of the Company towards Guarantee for Non-PPP projects, transaction advisory for potential CA up to upgrading capacity of the ecosystem including business players in infrastructure sector.

Considering process of this condition, IIGF will structurally implement 4 scope of activities simultaneously in the implementation of infrastructure project guarantee, among others:

1. New project processing with broader scope of the sectors, including social sector, as part of guaranteed "double down" infrastructure project.
2. Active monitoring on the projects which guarantees have been effective to anticipate and mitigate altogether with the CA.
3. Standardization of business process related with project monitoring including potential of addendum (amendment) of the agreement, claim process or regress mechanism as well as strengthening guarantee capacity analysis and leveraging factors.
4. Preparation of business development and new option that are related with mandate extension.

Employee and/or Management Stock Option Program

The Company does not offer any Employee Stock Option Program/ESOP) and Management (Management Stock Option Program/MSOP).

Information of Affiliated Party Transaction

The Company conducted affiliated party transactions as defined in the Statements of Financial Accounting Standard (SFAS) No. 7 (revised 2010), "Affiliated Party Disclosure" with definition as follows:



Sifat pihak berelasi:

- Pemerintah Republik Indonesia adalah pemegang saham Perusahaan.
- Direksi adalah orang-orang yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk perencanaan, pengarahan dan pengendalian aktivitas-aktivitas Perusahaan.
- Bank dan Badan Usaha Milik Negara merupakan entitas sepengendali dimana Perusahaan melakukan penempatan investasi dalam bentuk deposito dan obligasi.

Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Transaksi-transaksi tersebut meliputi antara lain:

- Perusahaan menempatkan dana dalam bentuk deposito dan obligasi dari pihak pihak berelasi yang dilakukan dengan syarat dan kondisi yang disepakati. Rincian pendapatan pengelolaan dana kepada pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Nature of Relationship

- The Government of the Republic of Indonesia is a shareholder of the Company.
- The directors are persons who have authority and responsibility for planning, directing and controlling the Company's activities.
- Banks and State-Owned Enterprise are entities under common controls where the Company places its investments in time deposits and bonds.

In the normal course of business, the Company enters into certain transactions with related parties, including the following:

- The Company invested their funds in time deposit and bonds from related parties which were made according to agreed terms and conditions. The details of investments income from related parties is as follows:

Dalam Jutaan Rupiah/ In million Rupiah

Jenis Transaksi Type of Transaction	Tahun/ Years		Pertumbuhan/(Penurunan) Increase/(Decrease)	
	2016	2015	Rp	%
Kas dan setara kas/Cash and Cash Equivalent	2.118.384	1.615.940	502.444	31,09
Investasi/ Investment	3.568.700	3.752.924	(184.224)	(4,91)
Piutang usaha/ Account Receivables	56.940	65.454	(8.514)	(13,01)
Persentase terhadap jumlah aset Percentage to Total Assets	64,36%	73,62%		
Pendapatan/ Revenues	351.520	294.759	56.761	19,26
Persentase terhadap jumlah pendapatan Percentage to Total Revenues	42,81%	55,30%		

Kebijakan Dividen

Pemegang Saham Perusahaan, melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham memutuskan bahwa Perusahaan belum berkewajiban untuk membayarkan dividen kepada Pemegang Saham, sehingga saldo laba yang diperoleh Perusahaan dapat diperuntukkan untuk meningkatkan kapasitas penjaminan.

Dividend Policy

Through the General Meetings of Shareholders, the Shareholders decided that the Company has not yet obliged to pay dividend to the Shareholders, therefore, retained earnings that was booked by the Company can be allocated to increase the guarantee capacity.

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Hingga 31 Desember 2016, Perusahaan tidak pernah melakukan Penawaran Umum dalam bentuk penjualan saham atau surat hutang.

Realization of Public Offering Proceeds

As of December 31, 2016, the Company had not executed any Public Offering either as shares or other securities trading.

Perubahan Peraturan Perundang-Undangan

Diterbitkannya Perpres Nomor. 38/2015 yang pada intinya telah memperluas sektor yang dapat dijamin dari 8 sektor menjadi 19 sektor, termasuk infrastruktur sosial. Hal ini tentu membuka kesempatan yang luas bagi PT PII untuk dapat melakukan pendekatan-pendekatan ke berbagai calon PJPJ-PJPJ terkait.

Diterbitkannya Perpres Nomor. 82/2015 tentang Jaminan Pemerintah Pusat atas Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara, yang memberikan kesempatan kepada PT PII untuk melakukan penjaminan kredit pinjaman tersebut.

- Proses perubahan Anggaran Dasar PT PII guna memberikan ruang kegiatan perluasan mandat sebagaimana diindikasikan oleh Perpres diatas.

Pada akhir tahun 2016, dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor. 50 tahun 2016, PT PII memiliki maksud dan tujuan yang lebih luas sebagai Perusahaan yang memberikan penjaminan pemerintah di bidang infrastruktur. Hal ini berdampak kepada lingkup bisnis yang tidak lagi hanya dapat menjamin proyek infrastruktur dengan skema KPBU, namun bisa lebih luas lagi menjamin instrumen keuangan yang dipergunakan oleh PJPJ dalam membangun suatu proyek infrastruktur, seperti penjaminan kredit atau obligasi.

Hal-hal tersebut diatas merupakan penguatan dasar PT PII dapat melebarkan sayap dan kegiatan usahanya pada tahun 2016.

Standar Akuntansi Keuangan Baru

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan beberapa standar baru, revisi dan interpretasi, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015 adalah sebagai berikut:

- PSAK 1 (Revisi 2015): Penyajian Laporan Keuangan
- PSAK 4 (Revisi 2015): Laporan Keuangan Tersendiri
- PSAK 5 (Revisi 2015): Segmen Operasi
- PSAK 7 (Revisi 2015): Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi
- PSAK 13 (Revisi 2015): Properti Investasi
- PSAK 15 (Revisi 2015): Investasi Pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama

Amendment of the Legislation

Issuance of Perpres No. 38/2015 was principally has expanded eligible sectors to be guaranteed from 8 sectors to 19 sectors, including social infrastructure. This surely opened broad opportunity for IIGF to approach various related Contractor Agencies.

The issuance of Perpres No. 82/2015 regarding Central Government Guarantee on Infrastructure Financing through Direct Loans from International Financial Institution to State-Owned Enterprise that provided opportunity to IIGF to provide guarantee for the loans.

- IIGF Articles of Association Revision Process to provide opportunity of mandate extension activity as indicated by Perpres that is mentioned above.

By the end of 2016, as the implementation of Government Regulation No. 50 of 2016, IIGF has broader purpose and objective as a Company that provides Government Guarantee in infrastructure sector. This will affect on scope of business which is no longer limited in providing guarantee for infrastructure project under PPP scheme but also for broader business activity by providing guarantee to financial instruments that are used by CA in building an infrastructure project, such as loans or bonds guarantee.

The issues mentioned above become the strengthening factors for IIGF's foundation to expand its coverage and business activity in 2016.

Revised Financial Accounting Standard

Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountant (DSAKIAI) has issued the following new standards, amendments and interpretations which were effective on or after 1 January 2016 as follows:

- SFAS 1 (revised 2015): Financial Statements Presentation
- SFAS 4 (revised 2015): Separate Financial Statement
- SFAS 5 (revised 2015): Operating Segment
- SFAS 7 (revised 2015): Related Party Disclosures
- SFAS 13 (revised 2015): Investment Property
- SFAS 15 (revised 2015): Investment in Associates and Joint Ventures



- PSAK 16 (Revisi 2015): Aset Tetap
- PSAK 19 (Revisi 2015): Aset Tak berwujud
- PSAK 22 (Revisi 2015): Kombinasi Bisnis
- PSAK 24 (Revisi 2015): Imbalan Kerja
- PSAK 25 (Revisi 2015): Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan
- PSAK 53 (Revisi 2015): Pembayaran Berbasis Saham
- PSAK 65 (Revisi 2015): Laporan Keuangan Konsolidasian
- PSAK 66 (Revisi 2015): Pengaturan Bersama
- PSAK 67 (Revisi 2015): Pengungkapan Kepentingan Dalam Entitas Lain
- PSAK 68 (Revisi 2015): Pengukuran Nilai Wajar
- ISAK 30 (Revisi 2015): Pungutan
- ISAK 31 (Revisi 2015): Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK 13: Properti Investasi

PSAK 1 and ISAK 31 berlaku untuk tahun buku yang dimulai sejak 1 Januari 2017 dan penerapan dini diperkenankan, sedangkan revisi dan standar baru lainnya akan berlaku efektif pada tahun buku yang dimulai 1 Januari 2016.

Pada saat penerbitan laporan keuangan, Perusahaan masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan Perusahaan.

Informasi Kelangsungan Usaha

Selama tahun 2016, tidak terdapat informasi mengenai hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan.

- SFAS 16 (revised 2015): Ifixed assets
- SFAS 19 (revised 2015): Intangible Assets
- SFAS 22 (revised 2015): Business Combination
- SFAS 24 (revised 2015): Employee Benefit
- SFAS 25 (revised 2015): Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates, and Errors
- SFAS 53 (revised 2015): Share Based Payment
- SFAS 65 (revised 2015): Consolidated Financial Statements
- SFAS 66 (revised 2015): Joint Arrangements
- SFAS 67 (revised 2015): Disclosure of Interests in Other Entity
- SFAS 68 (revised 2015): Fair Value Measurements
- SFAS 110 (revised 2015): Accounting for Sukuk
- IFAS 30 (revised 2015): Levies
- IFAS 31 (revised 2015): Interpretation of Scope SFAS 13: Investment Property

SFAS 1 and IFAS 31 will become effective for annual period beginning 1 January 2017 and an early adoption is allowed, while the other new and revised standards will become effective for the annual period beginning 1 January 2016.

As at the authorisation date of this financial statements, the Company is still evaluating the potential impact of these new and revised standards to its financial statements

Information on Business Continuity

Throughout 2016, there was no information about issues with significant impact on the Company's business continuity.

Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance





165	Tujuan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Objectives of Corporate Governance Implementation	234	Tenaga Ahli Manajemen Risiko Risk Management Expert Staff
166	Dasar Acuan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Implementation Framework	237	Sekretaris Dewan Komisaris Board of Commissioners Secretary
168	Prinsip Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Principle	240	Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary
171	Roadmap Penerapan Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Road Map	243	Internal Audit Internal Audit
172	Penilaian Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance Assessment	248	Audit Eksternal External Audit
175	Struktur dan Mekanisme Penerapan Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Structure and Mechanism	250	Sistem Pengendalian Internal Internal Control System
184	Rapat Umum Pemegang Saham General Meetings of Shareholders	252	Manajemen Risiko Risk Management
191	Realisasi Keputusan RUPS Tahun Sebelumnya Realization of Previous Year's GMS Resolutions	263	Perkara Hukum dan Sanksi Administratif Legal Case and Administrative Sanction
192	Dewan Komisaris Board of Commissioners	263	Kode Etik Code of Conducts
206	Komisaris Independen Independent Commissioner	266	Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistle Blowing System
207	Direksi Board of Directors	266	Penyimpangan Internal Internal Fraud
216	Mekanisme dan Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors Remuneration Mechanism and Structure	266	Benturan Kepentingan Conflict of Interest
217	Hubungan Afiliasi Antara Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali Affiliation Among Board of Commissioners, Board of Directors and Controlling Shareholders	267	Akses Data Dan Informasi Perusahaan Access To Corporate Data And Information
218	Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors Performance Assessment		
219	Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Diversity of Board of Commissioners and Board of Directors Composition		
222	Komite Audit Audit Committee		
234	Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee		





PT PII berkomitmen untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) sebagai upaya menciptakan keberhasilan usaha guna memberikan keuntungan yang optimal bagi pemegang saham secara etis, legal, berkelanjutan, dan tetap memperhatikan kepentingan serta keadilan bagi pemangku kepentingan lainnya.

Penerapan GCG di lingkungan PT PII merupakan wujud implementasi Peraturan Menteri Keuangan No. 88/PMK.06/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik pada Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan.

Komitmen PT PII dalam membudayakan praktik GCG diwujudkan dengan senantiasa melakukan pemutakhiran terhadap pedoman, prosedur operasi dan, tata cara sesuai dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku, program transformasi dan perkembangan Perusahaan. Hal ini dimaksudkan agar kebijakan GCG yang berlaku di PT PII tetap sesuai dengan kondisi terkini dan peraturan perundangan yang berlaku. Selain itu, PT PII juga secara konsisten menerapkan praktik GCG dalam kegiatan perusahaan sehari-hari sesuai dengan seluruh ketentuan yang berlaku.

PT PII senantiasa berupaya menjadi Perusahaan yang terus tumbuh berkelanjutan. Penerapan prinsip-prinsip GCG di lingkungan Perusahaan menjadi komitmen bersama bagi seluruh Insan Perusahaan, yakni jajaran Dewan Komisaris, Direksi, pejabat, dan karyawan.

IIGF is committed to implement Good Corporate Governance (GCG) as the effort to pursue business achievement and provide optimum benefit for the shareholders in ethical, legal, sustainable manners as well as considering the interest and fairness for other stakeholders.

GCG implementation in IIGF is implementation of Minister of Finance Regulation No. 88/PMK/06/2015 regarding Good Corporate Governance Implementation in Perusahaan Perseroan (Persero) under Development and Supervision of the Minister of Finance.

Commitment of IIGF in internalizing GCG practice is carried out by updating the policy, operational procedure and mechanism in accordance with revision of prevailing Law, transformation program and progress of the Company. This is intended to ensure that currently implemented GCG policy at IIGF to be relevant with actual condition and the prevailing Law. In addition, IIGF also implements GCG practice consistently in daily activities of the Company according to every prevailing regulation.

IIGF strives to develop as a Company with sustainable growth. Implementation of GCG principles in the Company's circumstances becomes shared-commitment for all Company People including Board of Commissioners, Board of Directors, Executives and Employees.



Tujuan Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Objectives of Corporate Governance Implementation

Tujuan Penerapan GCG di PT PII adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan nilai (*value*) Perusahaan bagi Pemegang Saham dengan tetap memperhatikan kepentingan para Pemangku Kepentingan lainnya dan mendorong tercapainya kesinambungan Perusahaan dengan cara menerapkan prinsip-prinsip GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, serta kewajaran dan kesetaraan;
2. Mendorong agar organ Perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta kesadaran tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap para Pemangku Kepentingan lainnya;
3. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab Perusahaan terhadap kelestarian lingkungan terutama di sekitar Perusahaan;
4. Meningkatkan reputasi, citra, dan daya saing Perusahaan baik secara nasional dan internasional sehingga dapat meningkatkan dan memperkuat kepercayaan Pemegang Saham dan para Pemangku Kepentingan lainnya;
5. Mendorong pengelolaan Perusahaan lebih profesional, transparan, dan efisien, serta memberdayakan setiap fungsi dan organ yang ada di Perusahaan guna meningkatkan kemandirian Perusahaan;
6. Mengembangkan sikap dan perilaku serta budaya Perusahaan yang sesuai dengan tuntutan perkembangan dan perubahan lingkungan Perusahaan yang dinamis sehingga dapat mendukung pengembangan bisnis Perusahaan yang dimandatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan; dan
7. mendukung dalam mengelola sumber daya dan pengelolaan risiko secara lebih hati-hati (*prudent*), akuntabel, dan bertanggung jawab, serta mencegah terjadinya penyimpangan dan pelanggaran dalam pengelolaan Perusahaan.

Objectives of GCG implementation at IIGF are as follows:

1. To optimize the Company's value for the Shareholders by considering interests of other Stakeholders and support achievement of the Company's sustainability by implementing GCG principles, such as transparency, accountability, responsibility, independency as well as fairness and equality;
2. To encourage the Company's people in taking decision and actions based on high moral value and compliance with the Law as well as Corporate Social Responsibility awareness towards other Stakeholders;
3. To ignite the Company's awareness and responsibility on the preservation of environment, primarily in the Company's operational area;
4. To build reputation, image and competitive advantages of the Company to increase and strengthen trust of the Shareholders and other Stakeholders;
5. To support more professional, transparent and efficient management of the Company as well as to empower every function and structure in the Company to improve the Company's independency;
6. To develop corporate behavior, conducts and culture according to dynamic progress and shifting of the Company's environment to encourage business development that is mandated to support sustainable national economic growth; and
7. To support more prudent, accountable and responsible resource and risk management as well as to prevent fraud and violation in the Company's management.

Dasar Acuan Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Implementation Framework

Penerapan prinsip-prinsip GCG di PT PII mengacu pada peraturan perundangan-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4286);
2. Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor. 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4297);
3. Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor. 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4756);
4. Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor. 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4556);
5. Peraturan Pemerintah Nomor. 50 tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor. 234);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 28/PMK.06/2013 tentang Penyusunan, Penyampaian dan, Pengubahan Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 88/PMK.06/2015 perihal Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik pada Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan;

Implementation of GCG principle at IIGF refers to legal frameworks, as follows:

1. Law Number 17 of 2003 on State Finances (The State Gazette of the Republic of Indonesia Number 47 of 2003, The Supplement of State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4286);
2. Law Number 19 of 2003 on State-Owned Enterprise (The State Gazette of the Republic of Indonesia Number 70 of 2003, The Supplement of State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4297);
3. Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Company (The State Gazette of the Republic of Indonesia Number 106 of 2007, The Supplement of State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4756);
4. Government Regulation Number 45 of 2005 concerning Establishment, Management, Monitoring and, Dismissal of State-Owned Enterprise (The State Gazette of the Republic of Indonesia Number 117 of 2005, The Supplement of State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4556);
5. Government Regulation Number 50 of 2016 as Amendment to Government Regulation Number 35 of 2009 concerning Investment from the Government of Republic of Indonesia on Establishment of Perusahaan Perseroan (Persero) in Infrastructure Guarantee Business (The State Gazette of the Republic of Indonesia Number 234 of 2016);
6. Minister of Finance Regulation Number 28/PMK.06/2013 regarding Preparation, Submission and, Amendment of Corporate Plan and Business Plan of the Perusahaan Perseroan (Persero) Under Development and Supervision of the Minister of Finance;
7. Minister of Finance Regulation Number 88/PMK.06/2015 regarding Good Corporate Governance Implementation in the Perusahaan (Persero) Under Development and Supervision of Minister of Finance;



8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 78/PMK.06/2015 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 59/PMK.06/2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 78/PMK.06/2015 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan; dan
10. Anggaran Dasar Perusahaan Akta Nomor. 29 tertanggal 30-12-2009 kemudian diubah dengan Akta Nomor. 14 tertanggal 14-01-2010 kedua-duanya dibuat dihadapan Lolani Kurniati Irdham-Idroes, Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister, Notaris di Jakarta, berkedudukan di Jakarta Selatan, Akta Pendirian dan Perubahan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 27-01-2010, Nomor: AHU-04444.AH.01.01.Tahun 2010 dan terakhir diubah dengan Akta Nomor. 138 tertanggal 23-06-2016, dibuat dihadapan Arry Supratno, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, berkedudukan di Jakarta Pusat, akta perubahan terakhir telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum tertanggal 30-06-2016 Nomor: AHU-AH.01.03-0062881.
8. The Republic of Indonesia Minister of Finance Regulation Number 78/PMK.06/2015 regarding Board of Directors Appointment and Discharge Mechanism in Perusahaan Perseroan (Persero) Under Development and Supervision of Minister of Finance;
9. The Republic of Indonesia Minister of Finance Regulation Number 59/PMK.06/2016 as Amendment to Minister of Finance Regulation Number 78/PMK.06/2015 regarding Board of Directors Appointment and Discharge Mechanism in Perusahaan Perseroan (Persero) Under Development and Supervision of Minister of Finance; and
10. Articles of Associations under Deeds Number 29 dated 30-12-2009 as Amended under Deeds Number 14 dated 14-01-2010 both were drafted before Lolani Kurniati Irdham-Idroes, Bachelor of Law, Lex Legibus Magister, Notary in Jakarta, located in South Jakarta, the Establishment Deeds and its revision had been validated by Minister of Law and Human Rights Republic of Indonesia with Decree dated 27-01-2010 of 2010 as the latest amendment under Deeds Number 138 dated 23-06-2016 that was drafted before Arry Supratno, Bachelor Degree of Law, Notary in Jakarta, located in Central Jakarta, the latest amendment deeds had been accepted and administered in Legal Entity Administration System dated 30-06-2016 Number AHU-AH.01.03-0062881.

Prinsip Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Principle

Untuk mencapai tujuan dari penerapan GCG, PT PII berupaya menerapkan prinsip-prinsip dasar tata kelola yang baik, mencakup asas transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan keadilan/kesetaraan secara konsekuen di setiap kegiatan operasionalnya.

1. Transparansi atau keterbukaan (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam implementasi penerapan GCG prinsip Transparansi tersebut antara lain meliputi:

- a. Berinisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal-hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh Pemegang Saham dan para Pemangku Kepentingan lainnya;
 - b. Mengungkapkan informasi yang materiil dan relevan mengenai Perusahaan secara jelas, memadai, akurat, tepat waktu, dan dapat dibandingkan, serta memberikan kemudahan akses informasi kepada para Pemangku Kepentingan sesuai dengan haknya, seperti Laporan Keuangan, Laporan Kegiatan, kejadian penting Perusahaan, dan informasi relevan lainnya; dan
 - c. Keterbukaan informasi tidak mengurangi kewajiban Perusahaan untuk menjaga dan melindungi informasi yang bersifat rahasia mengenai Perusahaan, Manajemen Perusahaan, dan pihak-pihak terkait lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kemandirian (*independency*), yaitu Perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan, nilai-nilai etika, standar, prinsip, dan praktik-praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.

To achieve objectives of GCG practice, IIGF strives to implement good governance basic principles including transparency, accountability, responsibility, independency and fairness/equality principles consistently in every operational activity.

1. Transparency or exposure, a transparency in decision-making process and transparency in disclosing material and relevant information about the Company in accordance with the Law and regulation.

In the GCG implementation, the Transparency principle includes:

- a. Initiative to disclose not only the issue required by the Law but also other important issues in the course of decision-making by the Shareholders and other Stakeholders;
 - b. Disclosing material and relevant information about the Company clearly, sufficiently, accurately, on time and comparable as well as provides ease of information access to the Stakeholders according to their rights, such as Financial Statements, Company Activity and Event Highlights Report and other relevant information; and
 - c. The information disclosure does not eliminate obligation of the Company to preserve and protect confidential information about the Company, Management and other related parties according to the Articles of Association and prevailing Law.
2. Independency, a condition where the Company is managed professionally without conflict of interest or influence as well as pressure from any party that violate and not complying with the Law, ethical values, standard, principle and implementation of healthy business practice.



Dalam implementasi penerapan GCG prinsip Kemandirian tersebut antara lain meliputi:

- a. Dewan Komisaris, Direksi, karyawan dan/atau pihak-pihak yang diberi mandat dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya mengutamakan independensi dan obyektifitas agar terhindar dari dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, dan bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interests*) sehingga keputusan yang diambil dapat dilakukan secara obyektif; dan
- b. Organ Perusahaan melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saling menghormati hak, kewajiban, tugas, wewenang, serta tanggung jawab masing-masing pihak, dan keputusan yang diambil semata-mata hanya untuk kepentingan Perusahaan.

3. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab, serta pertanggungjawaban atas setiap keputusan yang diambil oleh organ Perusahaan sehingga tercipta keseimbangan kekuasaan dan pengelolaan Perusahaan secara transparan, wajar, efektif, dan efisien.

Dalam implementasi penerapan GCG prinsip Akuntabilitas tersebut antara lain meliputi:

- a. Akuntabilitas merujuk kepada kewajiban seseorang atau organ kerja atau fungsi di Perusahaan yang dimandatkan oleh Perusahaan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, kemampuan, dan kompetensinya, serta perannya dalam pelaksanaan GCG. Akuntabilitas tercermin dalam Struktur Organisasi Perusahaan yang telah ditetapkan;
- b. Perusahaan dikelola secara baik, benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan Perusahaan tanpa mengabaikan kepentingan Pemegang Saham dan para Pemangku Kepentingan lainnya;
- c. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang memadai, berimbang, dan berkesinambungan agar dapat memenuhi tuntutan perkembangan aktivitas usaha dan dinamika para Pemangku Kepentingan Perusahaan, termasuk juga memastikan pelaksanaan *check and balance system* dan pengendalian internal di masing-masing fungsi; dan

In the GCG implementation, the Independence principle includes:

- a. Board of Commissioners, Board of Directors and employees and/or other mandated parties to perform their functions, duty and responsibility and prioritizes independency and objectiveness to avoid domination from any party and not being influenced under particular interest, and to be free from conflict of interest to ensure objective decision; and
- b. Corporate Structures implements their functions and duties according to the Articles of Association and the prevailing Law, mutual respect to each other's rights, obligations, duties, authorities as well as responsibilities of every party and the decision is taken solely for the Company's interest.

3. Accountability, refers to accountability of function, rights, obligation, authority and responsibility as well as accountability on every decision taken by the Corporate structure that created balance of power as well as transparent, fair, effective and efficient management of the Company.

In the GCG implementation, the Accountability principle includes:

- a. Accountability that refers to obligation of person or working structure or function that is mandated by the Company in accordance with the duty, responsibility, capability and competency as well as role in the GCG implementation. Accountability is reflected in the stipulated Organization Structure;
- b. The Company is managed appropriately, correctly, achievable and according to the Company's interests without ignoring interests of the Shareholders and other Stakeholders;
- c. Accountability is precondition that is required to achieve sufficient, balance and sustainable performance to fulfill demand of the business activity progress and dynamics of the Stakeholders, including to ensure implementation of check and balance system and internal control in every function and



- d. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap Organ Perusahaan dan seluruh insan Perusahaan berpegang teguh pada etika bisnis dan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) yang telah ditetapkan.
4. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian dan kepatuhan dalam pengelolaan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, nilai-nilai etika, standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.

Dalam implementasi penerapan GCG prinsip Pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi:

- Menjalankan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perusahaan, dan peraturan Perusahaan yang telah ditetapkan;
 - Bertanggung jawab atas setiap tindakan yang diambil dalam pelaksanaan kegiatan operasi Perusahaan dengan didukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang memadai; dan
 - Bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar dimana Perusahaan beroperasi sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *Good Corporate Citizen*, yaitu menjadi warga industri maupun masyarakat sosial yang beretika dan bertanggung jawab.
5. Kewajaran dan Kesetaraan (*fairness*), yaitu perlakuan adil dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak para Pemangku Kepentingan baik internal maupun eksternal Perusahaan yang timbul karena perjanjian, peraturan perundang-undangan, kebijakan dan aturan Perusahaan yang berlaku, nilai-nilai etika, standar, prinsip, serta praktik-praktik penyelenggaraan Perusahaan yang sehat.

Dalam implementasi penerapan GCG prinsip Kewajaran dan Kesetaraan tersebut antara lain meliputi:

- Memperlakukan Pemegang Saham dan para Pemangku Kepentingan lainnya secara setara dan wajar (*equal treatment*) di dalam memenuhi haknya sesuai dengan kriteria dan proporsi yang seharusnya serta manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada Perusahaan dengan tetap memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- d. In implementing duty and responsibility, every Corporate Structure and all Company People are firmly uphold to Business Ethics and Code of Conducts as stipulated.

4. Responsibility, refers to conformity and compliance of the Company's management with the prevailing Law, ethical values, standard, principle and healthy business practice implementation.

In the GCG implementation, the Responsibility principle includes:

- Implementation of prudent principle and compliance with the Law, Articles of Association and Company Regulation as stipulated;
- Responsibility on every action that is taken during the implementation of the Company's operational activity supported by sufficient planning, implementation and evaluation; and
- Responsibility to the surrounding society and environment in the Company's operational area to maintain long-term business sustainability and to be acknowledged as Good Corporate Citizen, or ethical and responsible industry player or social community.

5. Fairness, refers to fair and equality in fulfilling rights of internal and external Stakeholders that occurs from the Law, regulation, policy as well as Company Regulation, ethical values, standard, principle as well as healthy Company management practice.

In GCG implementation, Fairness principle includes:

- Equal and fair treatment to the Shareholders and other Stakeholders in fulfilling their rights based on correct criteria and proportion that are provided to the Company by considering provisions in the Articles of Association and prevailing Law;



- b. Memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan para Pemangku Kepentingan lainnya untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Perusahaan, serta kemudahan untuk mengakses informasi mengenai Perusahaan sesuai dengan prinsip Transparansi; dan
- c. Memberikan kesempatan yang wajar dan setara dalam penerimaan karyawan, berkarir, dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, *gender*, dan kondisi fisik.

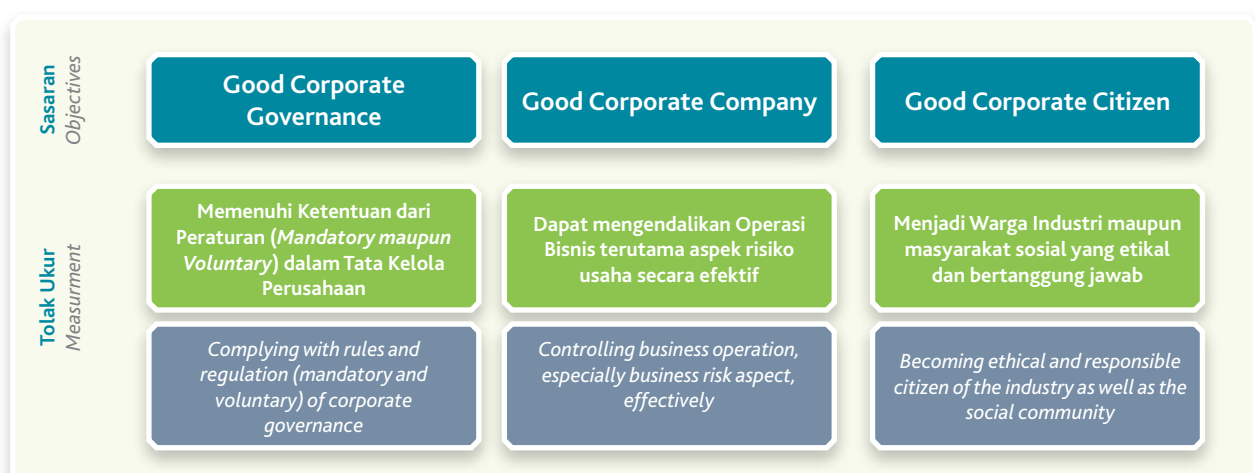
- b. Provide opportunity to the Shareholders and other Stakeholders to submit recommendation and express opinion for the Company's interest as well as facility to access information about the Company based on Transparency principle; and
- c. Provide fair and equal opportunity in employee recruitment, career and duty implementation professionally without discriminating ethnicity, religion, race, group, gender and physical condition.

Roadmap Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Road Map

Roadmap Penerapan GCG PT PII telah disusun berdasarkan roadmap GCG Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Mengacu pada roadmap GCG tersebut, sasaran akhir roadmap GCG PT PII adalah terwujudnya Perusahaan sebagai *good corporate citizen* sehingga PT PII tumbuh berkelanjutan.

IIGF GCG Implementation Road Map has been formulated based on GCG Road Map by National Committee of Governance Policy (KNKG). Referring to the GCG Road Map, final objective of the IIGF GCG Road Map is establishment of the Company as Good Corporate Citizen to ensure sustainable growth for IIGF.



Penilaian Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance Assessment

Pada tahun 2016, PT PII melakukan *self assessment* terhadap penerapan GCG. Secara umum, pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 88/PMK.06/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Pada Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan ("PMK 88"). Untuk mengetahui efektivitas penerapan GCG di PT PII dan guna mengidentifikasi pelaksanaan GCG Perusahaan sebelum dinilai oleh Penilai Independen yang mengacu pada pasal 73 PMK 88, maka PT PII telah melakukan penilaian sendiri ("*self assessment*") atas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Penilaian yang dilakukan oleh PT PII dilakukan dengan cara mengukur capaian aktual penerapan GCG Perusahaan saat ini, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip GCG yaitu Transparansi, Kemandirian, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, dan Kewajaran & Kesetaraan, guna mewujudkan nilai-nilai utama perusahaan yaitu Integritas, Kerjasama, Berpikiran Luas, Saling Percaya, dan Keunggulan.

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan, diharapkan Perusahaan dapat mengetahui area yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki dalam penerapan GCG, sehingga Perusahaan dapat beroperasi dan tumbuh secara berkelanjutan. Hasil rekomendasi yang diberikan oleh PT PII, untuk dapat dijadikan acuan dalam perbaikan penerapan GCG di Perusahaan.

Adapun aspek-aspek yang menjadi penilaian tahun ini antara lain:

1. Hak dan Tanggung Jawab Pemegang Saham/RUPS
 - a. Hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/keputusan Pemegang Saham/RUPS
 - b. Transparansi dalam proses pemilihan Dewan Komisaris dan Direksi
 - c. Konsultasi dengan instansi terkait
 - d. Peran Pemegang Saham dalam merespon pasar
 - e. Pelaksanaan RUPS berdasarkan atas ketentuan yang ada
 - f. Penilaian terhadap Dewan Komisaris
 - g. Pengangkatan anggota Direksi
 - h. Penilaian terhadap Direksi
 - i. Sistem insentif untuk Direksi dan Dewan Komisaris
2. Kebijakan *Good Corporate Governance*
 - a. Ketersediaan pedoman/kebijakan GCG
 - b. Muatan pedoman/kebijakan GCG

In 2016, IIGF conducted GCG Self-Assessment. In general, Good Corporate Governance implementation refers to Republic of Indonesia Minister of Finance Regulation Number 88/PMK.06/2015 regarding Good Corporate Governance Implementation in Perseroan (Persero) Under Development and Supervision of Minister of Finance ("PKM 88"). To evaluate effectiveness of GCG implementation at IIGF and to identify GCG implementation before assessed by the Independent Assessor according to Article 73 of PMK 88, IIGF had conducted Good Corporate Governance Self-Assessment.

The assessment that was done by IIGF evaluated actual achievement of current GCG implementation in the Company by referring to GCG principles, such as Transparency, Independency, Accountability, Responsibility and Fairness to embody core values of the Company, among others, Integrity, Team Work, Broad-Minded, Mutual Trust and Excellence.

According to the assessment result, the Company is expected to acknowledge area of improvement in the GCG implementation to ensure the Company has sustainable operation and growth. Result of the recommendation for IIGF shall be applied to improve GCG implementation in the Company.

The assessed aspects in this year are including:

1. Rights and Responsibility of Shareholders/GMS
 - a. Issues that require approval/resolution from the Shareholders/GMS
 - b. Transparency in Board of Commissioners and Board of Directors nomination process
 - c. Consulting with related institution
 - d. Role of the Shareholders in responding the market
 - e. GMS implementation based on existing regulation
 - f. Assessment on Board of Commissioners
 - g. Appointment of Board of Directors members
 - h. Assessment on Board of Directors
 - i. Incentive System for the Board of Directors and Board of Commissioners.
2. Good Corporate Governance Policy
 - a. Availability of GCG Code/Policy
 - b. Contents of the GCG Code/Policy



3. Penerapan *Good Corporate Governance* pada Komisaris

- a. Kesempatan pembelajaran bagi Dewan Komisaris
- b. Kejelasan fungsi, pembagian tugas, tanggung jawab dan otoritas
- c. Persetujuan Dewan Komisaris atas asumsi dan rencana pencapaian dalam RJPP dan RKAP
- d. Arahan Dewan Komisaris terhadap Direksi atas pelaksanaan rencana dan kebijakan Perusahaan
- e. Pengawasan Dewan Komisaris terhadap Direksi atas pelaksanaan rencana dan kebijakan Perusahaan
- f. Akses bagi Dewan Komisaris atas informasi Perusahaan
- g. Peran Dewan Komisaris dalam pemilihan calon anggota Direksi
- h. Tindakan Dewan Komisaris terhadap (potensi) benturan kepentingan yang menyangkut dirinya
- i. Keterbukaan informasi
- j. Pemantauan efektivitas praktik GCG
- k. Pertemuan rutin dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan Dewan Komisaris
- l. Peran Sekretaris Dewan Komisaris

Komite Dewan Komisaris

- a. Keberadaan Komite Dewan Komisaris sesuai peraturan perundangan yang berlaku
- b. Keanggotaan yang mendukung pelaksanaan fungsi Komite
- c. Independensi dari masing-masing komite Dewan Komisaris
- d. Kerangka Acuan pelaksanaan tugas
- e. Kegiatan masing-masing Komite Dewan Komisaris
- f. Pelaksanaan Pertemuan Rutin
- g. Pelaporan kepada Dewan Komisaris

3. Good Corporate Governance Implementation on Board of Commissioners

- a. Learning opportunity for the Board of Commissioners
- b. Accountability of function, segregation of duty, responsibility and authority
- c. Approval from the Board of Commissioners on achievement of assumption and plan that are stipulated in the RJPP and RKAP
- d. Recommendation from the Board of Commissioners to the Board of Directors on the implementation of Company plan and policy
- e. Supervision from the Board of Commissioners to the Board of Directors on the implementation of Company plan and policy
- f. Role of the Board of Commissioners on the Board of Directors members candidate nomination
- g. The role of the Board of Commissioners in the selection of candidatesMember of the Board of Directors
- h. Board of Commissioners' initiative towards conflict of interest (potential) related to their selves
- i. Information Disclosure
- j. Monitoring effectiveness of GCG practice
- k. Regular meeting and documentation of Board of Commissioners activity implementation
- l. Role of Board of Commissioners Secretary

Committees Under the Board of Commissioners

- a. Establishment of Committees under the Board of Commissioners in accordance with the prevailing Law
- b. Membership that supports implementation of the Committee's function
- c. Independency of every Committee under the Board of Commissioners
- d. Duty Implementation Framework (TOR)
- e. Activities of each Committee of the Board of Commissioners
- f. Regular Meeting Implementation
- g. Reporting to the Board of Commissioners

Direksi

- a. Kesempatan pembelajaran bagi Direksi
- b. Kejelasan fungsi, pembagian tugas, tanggung jawab, dan otoritas
- c. Peran Direksi dalam perencanaan Perusahaan
- d. Peran Direksi dalam pemenuhan target kinerja Perusahaan
- e. Pengawasan pelaksanaan terhadap rencana dan kebijakan Perusahaan
- f. Tindakan Direksi terhadap (potensi) benturan kepentingan

Internal Audit (IA)

- a. IA dilengkapi dengan faktor-faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugasnya
- b. IA menjalankan perannya sebagai pengawas dan penilai
- c. IA menjalankan peran sebagai mitra strategis manajemen

Sekretaris Perusahaan

- a. Sekretaris Perusahaan dilengkapi dengan faktor-faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugasnya
- b. Sekretaris Perusahaan menjalankan fungsinya

4. Pengungkapan Informasi (*Disclosure*)
 - a. Ketersediaan informasi Perusahaan kepada pemangku kepentingan
 - b. Kemudahan akses *stakeholders* terhadap kebijakan dan praktik GCG
5. Kelengkapan Penyajian Laporan Tahunan;
 - a. Komitmen
 - b. Penandatanganan pedoman/kebijakan
 - c. Pelaksanaan aturan *corporate governance*
 - d. Kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan yang berlaku

Board of Directors

- a. Learning opportunity for the Board of Directors
- b. Accountability of function, segregation of duty, responsibility and authority
- c. Role of the Board of Directors in Corporate Planning
- d. Role of Board of Directors on Company's performance target achievement
- e. Monitoring the implementation of corporate plan and policy
- f. Board of Directors' initiative towards conflict of interest (potential)

Internal Audit (IA)

- a. IA is equipped by supporting factors for the duty implementation success
- b. IA performs its role as supervisor and assessor
- c. IA performs its role as strategic partner for the management

Corporate Secretary

- a. Corporate Secretary is equipped by supporting factors for the duty implementation success
- b. Corporate Secretary exercises its function

4. Information Disclosure
 - a. Availability of corporate information to the Stakeholders
 - b. Easy access for the Stakeholders to GCG policy and practice
5. Completeness of Annual Report Presentation;
 - a. Commitment
 - b. Manual/policy signing
 - c. Implementation of corporate governance regulation
 - d. Compliance with prevailing Law



Struktur dan Mekanisme Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Structure and Mechanism

Struktur Tata Kelola

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 40 tahun 2007 Bab I Mengenai Ketentuan Umum Pasal 1, Organ Perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.

1. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS adalah Organ Perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang Undang dan/ atau Anggaran Dasar.
2. Dewan Komisaris adalah Organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan dan/atau sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
3. Direksi adalah Organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Organ Perusahaan tersebut memainkan peran kunci dalam keberhasilan pelaksanaan GCG. Organ Perusahaan menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perusahaan dan ketentuan lainnya atas dasar prinsip bahwa masing-masing organ mempunyai independensi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya untuk kepentingan Perusahaan.

Governance Structure

Pursuant to Law Number 40 of 2007 Chapter I on General Provisions Article 1, the Company Structure consists of General Meetings of Shareholders, Board of Directors and Board of Commissioners.

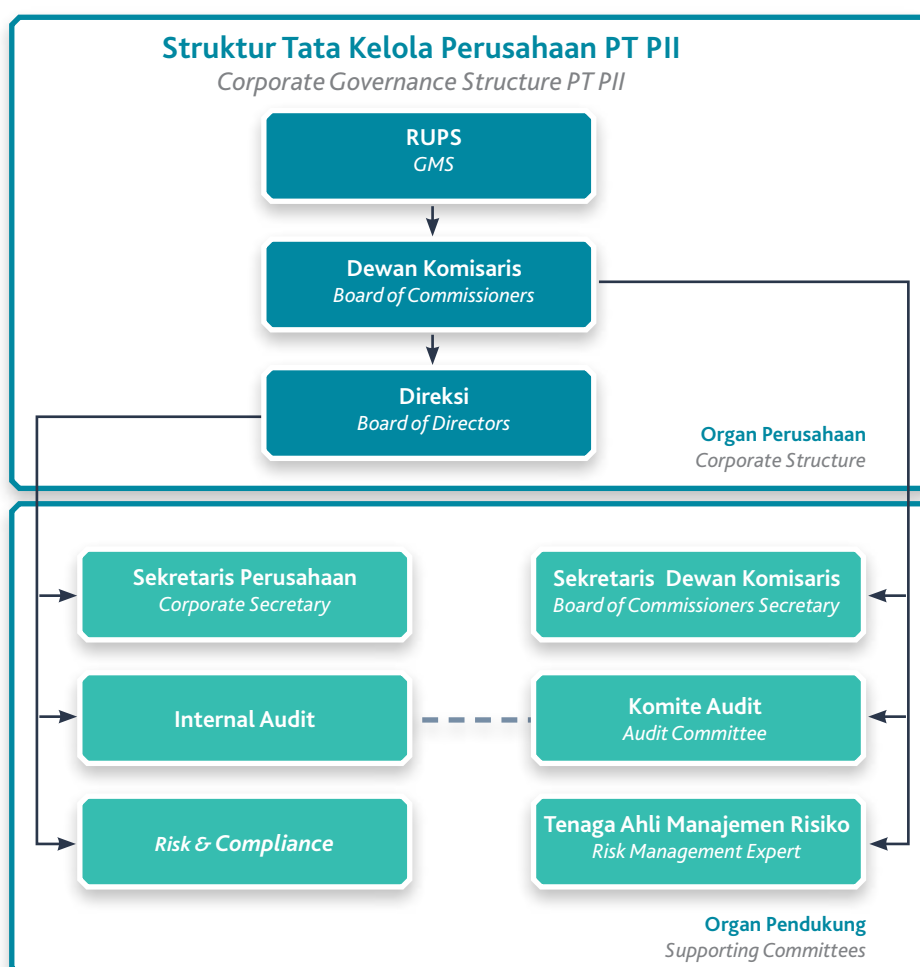
1. General Meetings of Shareholders, or later stated as GMS, is a Corporate Structure with distinctive authority that is neither delegated tot he Board of Directors and/or Board of Commissioners under particular limit specified in the Law and/or Articles of Association.
2. Board of Commissioners is Corporate Structure who is in charge to supervise and/or according to the Article sof Association and provide advise to the Board of Directors.
3. The Board of Directors is Corporate Structure who has full authority and responsibility on the Company's Management for the Company's interest according tot he purpose and objectives of the Company, both on and off the Court in accordance with provisions in the Articles of Association.

The Corporate Structure plays vital role in the success of GCG implementation. Corporate Structure exercises its function accordign to provisions in the Law, Articles of Association and other regulation based on the principle that every structure has independency in carrying out the duty, function and responsibility for the Company's interest.

Agar penerapan GCG di PT PII dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan, Dewan Komisaris dan Direksi membentuk Organ Pendukung yang bertugas membantu Dewan Komisaris dan Direksi dalam penerapan GCG di Perusahaan. Organ Pendukung tersebut terdiri dari:

To ensure GCG implementation at IIGF is well implemented and achieves its target, the Board of Commissioners and Board of Directors have established Supporting Committees who are in charge to help the Board of Commissioners and Board of Directors on the GCG implementation in the Company. The Supporting Structures consist of:

Organ Pendukung di Bawah Dewan Komisaris Supporting Structure Under the Board of Commissioners	Organ Pendukung di Bawah Direksi Supporting Structure Under the Board of Directors
Sekretaris Dewan Komisaris/Board of Commissioners Secretary	Sekretaris Perusahaan/Corporate Secretary
Komite Audit/Audit Committee	Divisi Internal Audit/Internal Audit Division
Tenaga Ahli Manajemen Risiko/Risk Management Expert	Divisi Risk & Compliance/Risk & Compliance Division





Mekanisme Tata Kelola

Governance Mechanism merupakan mekanisme implementasi *GCG* yang tercermin dalam sistem yang kuat. Hal ini menjadi penting, karena implementasi *GCG* tidak cukup hanya dengan mengandalkan pilar struktur *GCG* (*governance structure*), melainkan dibutuhkan adanya suatu mekanisme yang jelas. *Governance mechanism* dapat diartikan sebagai aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol (pengawasan) terhadap keputusan tersebut.

PT PII terus melakukan penyempurnaan kebijakan *GCG* (*soft structure GCG*) yang dimiliki agar sejalan dengan kebutuhan proses bisnis maupun ketentuan pelaksanaan *GCG* bagi Perusahaan. Selain Pedoman *GCG*, PT PII telah memiliki Tata Laksana Kerja bagi Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*), Pedoman Kode Etik Perusahaan (*Code of Conduct*), Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*), Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*), dan berbagai kebijakan dan prosedur dalam mendukung terlaksananya tata kelola yang baik. Semua kebijakan dan prosedur tersebut dimaksudkan untuk mendorong Perusahaan agar mampu melakukan *check and balance* pada setiap aktivitas bisnis berdasarkan prinsip-prinsip *GCG* yang berlaku.

Governance Mechanism

Governance Mechanism refers to mechanism of *GCG* implementation that is reflected in a robust system. This becomes important due to *GCG* implementation is not only sufficient only by relying on *GCG* structure (*governance structure*) that also requires a clear mechanism. Governance Mechanism is defined as rule of the game, clear procedure and relationship between the decision-maker who performs the controlling (monitoring) over the decision.

IIGF continuously improves existing *GCG* policy (*GCG soft-structure*) to be consistent with business process requirement and *GCG* implementation policy in the Company. Besides Code of *GCG*, IIGF also has Board Manual for the Board of Commissioners and Board of Directors, Code of Conducts, Audit Committee Charter, Internal Audit Charter as well as other policies and procedure to support good corporate governance implementation. These policy and procedures are intended to support the Company to do check and balance in every business activity based on prevailing *GCG* principles.

Soft Structure GCG PT PII/IIGF GCG Soft-Structure

No.	Nama Kebijakan GCG Policy Name	Dasar Peraturan/ Regulatory Framework	Isi/ Contents
1.	Code of GCG	a. UU Nomor. 17 Tahun 2003 b. UU Nomor. 19 Tahun 2003 c. UU Nomor. 40 Tahun 2007 d. PMK Nomor. 88 /PMK.06/2015 e. PMK Nomor. 28 /PMK.06/2013 f. Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 2005 g. Peraturan Pemerintah Nomor. 50 Tahun 2016 h. PMK Nomor. 78/PMK.06/2015 i. PMK Nomor. 59/PMK.06/2016 j. Anggaran Dasar PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)	Kebijakan dan prosedur sebagai landasan operasional penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) oleh segenap organ Perusahaan dan insan Perusahaan, meliputi: BAB I PENDAHULUAN BAB II ORGAN PERUSAHAAN 2.1 Rapat Umum Pemegang Saham 2.2 Hubungan Dewan Komisaris dengan Direksi 2.3 Dewan Komisaris 2.4 Direksi BAB III MANAJEMEN RISIKO BAB IV TATA KELOLA PENGENDALIAN INTERNAL BAB V TATA KELOLA INFORMASI BAB VI TATA KELOLA HUBUNGAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN PERUSAHAAN BAB VII RENCANA JANGKA PANJANG DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN BAB VIII PENGUKURAN DAN PELAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAB IX PENUTUP
	Code of GCG	a. Law Number 17 of 2003 b. Law Number 19 of 2003 c. Law Number 40 of 2007 d. PMK Number 88 /PMK.06/2015 e. PMK Number 28 /PMK.06/2013 f. Government Regulation Number 45 of 2005 g. Government Regulation Number 50 Tahun 2016 h. PMK Number 78/PMK.06/2015 i. PMK Number 59/PMK.06/2016 j. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Articles of Association	Policy and procedure as operational framework in the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles by all of Company Structure and Company People, including: CHAPTER I INTRODUCTION CHAPTER II CORPORATE STRUCTURE 2.1 General Meetings of Shareholders 2.2 Relationship Between Board of Commissioners and Board of Directors 2.3 Board of Commissioners 2.4 Board of Directors CHAPTER III RISK MANAGEMENT CHAPTER IV INTERNAL CONTROL GOVERNANCE CHAPTER V INFORMATION GOVERNANCE CHAPTER VI STAKEHOLDERS RELATION GOVERNANCE CHAPTER VII CORPORATE PLAN AND BUDGET PLAN CHAPTER VIII GOOD CORPORATE GOVERNANCE ASSESSMENT AND REPORTING CHAPTER IX CLOSING



Soft Structure GCG PT PII/IIGF GCG Soft-Structure

No.	Nama Kebijakan GCG Policy Name	Dasar Peraturan/ Regulatory Framework	Isi/ Contents
2.	<i>Board Manual</i>	a. PMK No. 88/PMK.06/2015 b. Anggaran Dasar PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)	Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan, meliputi: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Maksud dan Tujuan 1.2 Ruang Lingkup 1.3 Referensi BAB II DEWAN KOMISARIS 2.1 Organisasi 2.2 Tugas, Wewenang dan Kewajiban Dewan Komisaris 2.3 Pedoman Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris 2.4 Pedoman Kebijakan Pengawasan Dewan 2.5 Rapat Dewan Komisaris 2.6 Pedoman Pengambilan Keputusan Dewan Komisaris 2.7 Pedoman Penilaian Kinerja Dewan Komisaris 2.8 Organ Pendukung Dewan Komisaris BAB III DIREKSI 3.1 Organisasi 3.2 Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi 3.3 Pembagian Kerja dan Organ Pendukung Direksi 3.4 Rapat Direksi 3.5 Pengambilan Keputusan Direksi 3.6 Penilaian Kinerja Direksi 3.7 Organ Pendukung Direksi 3.8 Pengelolaan Risiko 3.9 Sistem Pengendalian Internal 3.10 Pelaporan 3.11 Penilaian, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan

Soft Structure GCG PT PII/IIGF GCG Soft-Structure

No.	Nama Kebijakan GCG Policy Name	Dasar Peraturan/ Regulatory Framework	Isi/ Contents
	<i>Board Manual</i>		BAB IV TATA HUBUNGAN KERJA ANTAR ORGAN PERUSAHAAN 4.1 Rapat 4.2 Perbuatan Direksi yang Memerlukan Persetujuan 4.3 Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai Auditor Eksternal 4.4 Pelaporan Realisasi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 4.5 Pelaporan Pengawasan Dewan Komisaris atas RKAP 4.6 Penyusunan dan Persetujuan Rencana Jangka Panjang (RJP) Perusahaan 4.7 Program Pengenalan Perusahaan 4.8 Pelaporan Khusus 4.9 Tata Komunikasi dan Korespondensi 4.10 Kekosongan Jabatan dan Pelimpahan Wewenang 4.11 Penetapan Batasan Kewenangan 4.12 Penetapan Remunerasi, Fasilitas dan Tantiem Direksi & Dewan Komisaris 4.13 Etika Berusaha dan Benturan Kepentingan Good Corporate Governance implementation in Perusahaan Perseroan (Persero) under Development and Supervision of Minister of Finance, including: CHAPTER I INTRODUCTION 1.1 Purpose and Objectives 1.2 Scope 1.3 Reference CHAPTER II BOARD OF COMMISSIONERS 2.1 Organization 2.2 Duty, Authority and Obligation of Board of Commissioners 2.3 Board of Commissioners Segregation of Duty, Authority and Responsibility Policy 2.4 Board of Commissioners Supervisory Policy 2.5 Board of Commissioners Meeting 2.6 Board of Commissioners Decision Making Policy 2.7 Board Manual for Board of Commissioners 2.8 Board of Commissioners Supporting Structure CHAPTER III BOARD OF DIRECTORS 3.1 Organization 3.2 Board of Directors Duty, Authority and Obligation 3.3 Board of Directors Segregation of Duty and Supporting Structure 3.4 Board of Directors Meeting 3.5 Board of Directors Decision Making 3.6 Board of Directors Performance Assessment 3.7 Board of Directors Supporting Structure 3.8 Risk Management 3.9 Internal Control System 3.10 Reporting 3.11 Penilaian, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan
	Board Manual	a. PMK Number 88/PMK.06/2015 b. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Articles of Association	



Soft Structure GCG PT PII/IIGF GCG Soft-Structure

No.	Nama Kebijakan GCG Policy Name	Dasar Peraturan/ Regulatory Framework	Isi/ Contents
	Board Manual		CHAPTER IV MECHANISM OF WORKING RELATION MECHANISM BETWEEN CORPORATE STRUCTURES 4.1 Meeting 4.2 Board of Directors' Action that Require Approval 4.3 Appointment of Public Accountant Firm (KAP) as External Auditor 4.4 Reporting of Budget Plan (RKAP) Realization 4.5 Reporting of Board of Commissioners Supervisory on RKAP 4.6 Preparation and Approval of Corporate Long-Term Plan (RJP) 4.7. Company Introduction Program 4.8 Special Reporting 4.9 Communication and Correspondence Governance 4.10 Vacant Position and Authority Delegation 4.11 Authority Limit Set-Up 4.12 Stipulation of Remuneration, Facility and Incentives for the Board of Directors & Board of Commissioners 4.13 Business Ethics and Conflict of Interest
3.	<i>Code of Conduct</i>	Prinsip-prinsip berkesadaran etis (<i>ethical sensibility</i>), berpikir etis (<i>ethical reasoning</i>), dan berperilaku etis (<i>ethical conduct</i>) sebagai bagian dari usaha untuk mewujudkan visi, misi, dan nilai-nilai Perusahaan.	Tata aturan hubungan internal Perusahaan (organ perusahaan dan pegawai) dan hubungan dengan pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) dalam menjalankan bisnis di perusahaan. Adapun isinya meliputi: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Visi dan Misi PT PII 1.2 Tujuan Pembentukan Perusahaan BAB II PEDOMAN PERILAKU PERUSAHAAN 2.1 Nilai-nilai Perusahaan In-TIME 2.2 Pedoman Perilaku Perusahaan BAB III PELAPORAN PELANGGARAN KODE ETIK DAN PERNYATAAN KEPATUHAN 3.1 Penanganan Pelaporan Pelanggaran Kode Etik 3.2 Konsekuensi Pelanggaran Kode Etik 3.3 Pernyataan Kepatuhan

Soft Structure GCG PT PII/IIGF GCG Soft-Structure

No.	Nama Kebijakan GCG Policy Name	Dasar Peraturan/ Regulatory Framework	Isi/ Contents
	Code of Conduct	Ethical sensibility principle, ethical reasoning and ethical conducts as part of effort to achieve the Company's vision, mission and values	Company internal relation procedure (corporate structure and employees) and relationship with stakeholders in running the business in the Company. The contents are including: CHAPTER I INTRODUCTION 1.1 Vision and Mission of IIGF 1.2 Objectives of the Company's Establishment CHAPTER II CODE OF CONDUCTS 2.1 In-TIME Corporate Values 2.2 Code of Conducts CHAPTER III ETHICAL CODE VIOLATION REPORTING AND STATEMENTS OF COMPLIANCE 3.1 Ethical Code Violation Reporting Mechanism 3.2 Consequence of Ethical Code Violation 3.3 Statements of Compliance
4.	Piagam Komite Audit	a. UU Nomor. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas b. UU Nomor. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara c. Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 88/PMK.06/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Pada Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan	Acuan dan pedoman kerja bagi Komite Audit PT PII dalam menjalankan tugas dan wewenang, yang meliputi: BAB I PENDAHULUAN BAB II TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG BAB III STRUKTUR, PERSYARATAN KEANGGOTAAN, DAN MASA JABATAN BAB IV TATA KERJA DAN PROSEDUR KERJA BAB V PENGANGGARAN DAN PEMBIAYAAN BAB VI PENUTUP
	Audit Committee Charter	a. Law Number 1 of 1995 on Limited Liability Company b. Law Number 19 of 2003 on State-Owned Enterprise c. Government Regulation Number 45 of 2005 on Establishment, Management, Supervisory and Dismissal of State-Owned Enterprise d. The Republic of Indonesia Minsiter of Finance Regulation Number 88/PMK.06/2015 regarding Good Corporate Governance Implementation in Perusahaan Perseroan (Persero) under Development and Supervision of Ministry of Finance	Working reference and framework for IIGF Audit Committee in carrying out its duty and authority are including: CHAPTER I INTRODUCTION CHAPTER II DUTY, RESPONSIBILITY AND AUTHORITY CHAPTER III STRUCTURE, REQUIREMENTS, MEMBER SHIP AND SERVING PERIOD CHAPTER IV WORKING MECHANISM AND PROCEDURE CHAPTER V BUDGETING AND FINANCING CHAPTER VI CLOSING



Soft Structure GCG PT PII/IIGF GCG Soft-Structure

No.	Nama Kebijakan GCG Policy Name	Dasar Peraturan/ Regulatory Framework	Isi/ Contents
5.	Piagam Komite Perencanaan dan Risiko Usaha Business Planning and Risk Committee Charter Usaha		Hingga 31 Desember 2016 PT PII belum memiliki Piagam Komite Perencanaan dan Risiko Usaha. As of December 31, 2016, IIGF had not drafted Business Planning and Risk Committee Charter Usaha.
6.	Piagam Internal Audit (Internal Audit Charter) Internal Audit Charter	a. Peraturan Pemerintah RI Nomor.35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di bidang Penjaminan Infrastruktur b. Anggaran Dasar PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) c. Surat Keputusan Direksi Penjaminan Infrastruktur Indonesia Nomor: SK-002/DIR/GEN/08/2010 tentang <i>Operating Manual</i> PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) a. The Republic of Indonesia Regulation Number 35 of 2009 regarding Republic of Indonesia Government Investment for Establishment of Perusahaan Perseroan (Persero) in Infrastructure Guarantee Sector b. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Articles of Association c. Penjaminan Infrastruktur Indonesia Board of Directors Decree Number SK-002/ DIR/GEN/08/2010 regarding PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Operating Manual	Prosedur operasi Internal Audit dalam menjalankan fungsinya melakukan penelaahan dan pengujian operasional PT PII sebagai organisasi bisnis, yang secara garis besar mencakup: • Proses kerja Internal Audit • Langkah-langkah pelaksanaan tugas audit • Tata cara penyeliaan tugas-tugas Internal Audit • Bentuk baku dokumen yang dipergunakan dalam tugas Internal Audit sehari-hari Internal Audit operational procedure in exercising its function to review and examine operations of IIGF as business organization that generally cover: • Internal Audit Working Process • Audit Duty Implementation Step • Internal Audit duties supervisory mechanism • Standard document used by Internal Audit in daily basis.
7.	Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistle Blowing System Policy		Hingga 31 Desember 2016 PT PII belum memiliki Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran, namun saat ini perusahaan sedang menyusun kebijakan dan mekanisme Sistem Pelaporan Pelanggaran (<i>whistleblowing system</i>) mengacu pada best <i>practice</i> yang ada sebagai implementasi GCG. As of December 31, 2016, IIGF had not yet implemented Whistle Blowing System Policy, however, the Company is formulating Whistle Blowing System Policy and Mechanism referring to current best practice as the GCG implementation.

Rapat Umum Pemegang Saham

General Meetings of Shareholders

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) selaku organ tertinggi dalam organ Perusahaan yang berfungsi sebagai wadah pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dan didasarkan pada kepentingan usaha Perusahaan. RUPS memiliki kewenangan yang tidak didelegasikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.

Mengacu kepada Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat dua jenis RUPS, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.

Penyelenggaraan RUPS Tahunan meliputi RUPS persetujuan Laporan Tahunan dan RUPS Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan, sedangkan RUPS Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perusahaan.

Wewenang RUPS

Dalam RUPS, pemegang saham berhak mendapatkan informasi berkaitan dengan Perusahaan dari Dewan Komisaris dan/atau Direksi sepanjang sejalan dengan kepentingan Perusahaan. Kewenangan RUPS antara lain:

- Menetapkan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan;
- Mengangkat dan memberhentikan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- Memberikan keputusan yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha Perusahaan dalam jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan;
- Menyetujui dan mengesahkan atau menolak Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan yang disusun oleh Direksi setelah diperiksa oleh Dewan Komisaris;
- Menetapkan besaran honorarium dan fasilitas bagi Dewan Komisaris serta gaji dan fasilitas lain bagi Direksi;
- Menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan audit Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan;
- Menyetujui atau menolak transaksi-transaksi untuk mengalihkan kekayaan atau menjadikan kekayaan Perusahaan sebagai jaminan utang yang bernilai sebesar sama dan/atau lebih dari 50% jumlah ekuitas atau kekayaan bersih Perusahaan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik

As the highest structure in the Company, General Meetings of Shareholders is functioned as forum of the Shareholders to take important resolutions that are related and based on the Company's business interests. The GMS holds distinctive authority that is neither delegated to Board of Commissioners nor Board of Directors.

Referring to Articles of Association and the prevailing Law, there are two types of GMS, Annual GMS and Extraordinary GMS.

Implementation of Annual GMS includes GMS on Annual Report Approval and GMS on Budget Plan, however, the Extraordinary GMS may be held any time based on needs for the Company's interest.

GMS Authority

In the GMS, the Shareholders are entitled to acquired information that is related with the Company from the Board of Commissioners and/or Board of Directors as long being in line with the Company's interest, among others:

- Stipulating amendment on Articles of Association;
- Appointing and discharging the Board of Directors and Board of Commissioners members;
- Providing resolutions that are required to maintain the Company's long-term and short-term business interest in accordance with the Law and Articles of Association;
- Approving and validating or rejecting Annual Report and Financial Statements that were prepared by the Board of Directors after verified by the Board of Commissioners;
- Stipulating amount of salary and facilities for the Board of Commissioners as well as salary and other facilities for the Board of Directors;
- Appointing Public Accountant Firm to audit Annual Financial Statements of the Company;
- Approving or rejecting transactions to transfer assets or place the Company's assets as guarantee for loans which amount is equal and/or more than 50% of total equity or net assets of the Company in 1 (one) transaction or more,



yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan, seperti:

- Mengagunkan atau menjaminkan aktiva tetap Perusahaan untuk penarikan kredit jangka menengah/panjang;
- Penyertaan dan/atau pelepasan penyertaan modal pada perusahaan lain, Perusahaan anak, Perusahaan patungan;
- Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan/atau pembubaran Perusahaan anak/patungan;

- h. Menyetujui atau menolak tindakan kerja sama Perusahaan dengan Badan Usaha atau entitas/pihak lain berupa penjaminan, kontrak penjaminan, kontrak manajemen, kerjasama lisensi, penyewaan aset atau kerjasama lainnya yang bernilai sama atau melebihi 50% dari nilai ekuitas Perusahaan;
- i. Menyetujui aksi korporasi Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- j. Mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan;
- k. Melaksanakan tata kelola Perusahaan yang baik sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

either related each other or not, as regulated in the Articles of Association, among others:

- Collateralize or guaranteed the Company's fixed assets to withdraw medium/long-term loans;
- Placement and/or release of capital investment in other companies, Subsidiary, Joint Venture;
- Merger, fusion, take over, spin-off and/or dismissal of subsidiary/joint venture;

- h. Approve or reject partnership between the Company with Enterprise or other entities/parties as gurantee, guarantee contract, management contract, assets rental, licensed partnership or other cooperations with value is equal or exceeding 50% of total equity of the Company;
- i. Approving corporate action according to prevailing Law;
- j. Taking decision under transparent and fair as well as accountable process;
- k. Implementing good corporate governance according to each authority and responsibility.

Pelaksanaan RUPS Tahun 2016

Sepanjang tahun 2016, PT PII menyelenggarakan RUPS sebanyak empat kali, yaitu RUPS Tahunan Persetujuan Laporan Tahunan 2015, RUPS Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2016, RUPS Tahunan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan Tahun 2017 dan RUPS Luar Biasa Penetapan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan, dengan perincian sebagai berikut:

1. RUPS Persetujuan Laporan Tahunan

RUPS tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan PT PII tahun buku 2015, dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 22 April 2016 di Jakarta.

GMS Implementation 2016

Throughout 2016, IIGF held four GMS, among others, GMS on Annual Report 2015 Approval, GMS on Revision to Budget Plan 2016, Annual GMS on Budget Plan 2017 and Extraordinary GMS on Stipulation of Articles of Association Amendment, with detail explanation as follows:

1. GMS on Annual Report Approval

GMS on Annual Report Approval and Validation of IIGF Financial Statements for Fiscal Year 2015 that was held in Friday, April 22, 2016 in Jakarta.

Hadir dalam RUPS:

1. Kuasa Pemegang Saham:
Sonny Loho, Direktur Jenderal Kekayaan Negara
2. Dewan Komisaris:
 - Komisaris Utama : Luky Alfirman
 - Komisaris : Ayu Sukorini
 - Komisaris : Iskandar
3. Direksi:
 - Direktur Utama : Sinthya Roesly
 - Direktur Keuangan & Manajemen Risiko : Armand Hermawan
 - Direktur Operasi : Yadi J Ruchandi

Attended the GMS:

1. Shareholders Attorney:
Sonny Loho, General Director of State Assets
2. Board of Commissioners
 - President Commissioner : Luky Alfirman
 - Commissioner : Ayu Sukorini
 - Commissioner : Iskandar
3. Board of Directors
 - President Director : Sinthya Roesly
 - Director of Finance & Risk Management : Armand Hermawan
 - Director of Operations : Yadi J Ruchandi

Adapun agenda dan keputusan RUPS Pengesahan Laporan Tahunan adalah sebagai berikut:

Agenda and resolutions of GMS on Annual Report Validation are as follows:

No.	Agenda	Keputusan/ Resolutions	Tindak Lanjut Keputusan Resolution Follow-Up
1.	Persetujuan Laporan Tahunan Perusahaan Tahun Buku 2015, mencakup: a. Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2015. b. Pemberian pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (<i>acquit et da charge</i>) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama tahun buku 2015. c. Usulan Persetujuan pencapaian kinerja manajemen sesuai kontrak manajemen tahun buku 2015	1. Mengesahkan Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2015 2. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (<i>acquit et da charge</i>) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama tahun buku 2015, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perusahaan 3. Menyetujui pencapaian kinerja manajemen sesuai Kontrak Manajemen Tahun Buku 2015	Telah direalisasikan



No.	Agenda	Keputusan/ Resolutions	Tindak Lanjut Keputusan Resolution Follow-Up
	Approval on Annual Report Fiscal Year 2015, including: a. Validation of Financial Statements Fiscal Year 2015. b. Assigning full dismissal and discharge (<i>acquitt et da charge</i>) to all Board of Commissioners and Board of Directors members over supervisory and managerial duties that were conducted in fiscal year 2015. c. Recommendation of Approval on Management Performance Achievement based on Management Contract Fiscal Year 2015	1. Validating Financial Statements Fiscal Year 2015 2. Assigning full dismissal and discharge (<i>acquitt et da charge</i>) to all Board of Commissioners and Board of Directors members over supervisory and managerial duties that were conducted in fiscal year 2015, as long those actions are not considered as criminal action and have been disclosed in the Annual Report and Financial Statements 3. Aprpoving management performance achievement based on Management Contract Fiscal Year 2015	Completed
2.	Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan/fasilitas bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan untuk tahun buku 2016 Stipulation of salary/honorarium and allowance/facilities for the Board of Commissioners and Board of Directors for fiscal year 2016	Persetujuan atas gaji/honorarium dan tunjangan/fasilitas bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan untuk tahun buku 2016, akan ditetapkan secara terpisah melalui Keputusan Pemegang Saham yang akan dilakukan secara sirkuler Approval on salary/honorarium and allowance/facilities for the Board of Commissioners and Board of Directors for fiscal year 2016 will be stipulated separately under circular Shareholders Resolutions	Telah direalisasikan Completed
3.	Penetapan penggunaan Laba Bersih Perusahaan untuk Tahun Buku 2015 serta pembayaran <i>tantiem</i> Stipulation of Net Income Fiscal Year 2015 realization and incentives payment	Persetujuan atas penggunaan Laba Bersih Perusahaan Tahun Buku 2015 serta pembayaran <i>tantiem</i>, akan ditetapkan secara terpisah melalui Keputusan Pemegang Saham yang akan dilakukan secara sirkuler Approval on Net Income Fiscal Year 2015 distribution and incentives payment will be stipulated separately under circular Shareholders Resolutions	Telah direalisasikan Completed

No.	Agenda	Keputusan/ Resolutions	Tindak Lanjut Keputusan Resolution Follow-Up
4.	Penetapan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik Stipulation of Public Accountant Firm Appointment	1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk mengusulkan dan melakukan proses penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan untuk Tahun Buku 2016 2. Penetapan atas Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan untuk Tahun Buku 2016 ditetapkan secara terpisah melalui Keputusan Pemegang Saham yang akan dilakukan secara sirkuler 1 Approving delegation of authority to the Board of Commissioners to propose and conduct Public Accountant Firm appointment process to audit Financial Statements for Fiscal Year 2016 2. Stipulation on the Public Accountant Firm to audit Financial Statements for Fiscal Year 2016 will be stipulated separately under circular Shareholders Resolutions	Telah direalisasikan Completed

2. RUPS Perubahan RKAP tahun 2016

RUPS tentang Perubahan RKAP tahun 2016 dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 yang bertempat di Jakarta.

Hadir dalam RUPS:

1. Kuasa Pemegang Saham:
Sonny Loho, Direktur Jenderal Kekayaan Negara

2. Dewan Komisaris:
-Komisaris Utama : Luky Alfirman
-Komisaris : Ayu Sukorini
-Komisaris : Iskandar

3. Direksi:
-Direktur Utama : Sinthya Roesly
-Direktur Operasi : Salusra Satria

2. GMS on Revision of RKAP 2016

GMS on Revision of RKAP 2016 was held in Thursday, December 29, 2016 in Jakarta. The GMS was attended by:

1. Shareholders Attorney:
Sonny Loho, General Director of State Assets

2. Board of Commissioners
-President Commissioner : Luky Alfirman
-Commissioner : Ayu Sukorini
-Commissioner : Iskandar

3. Board of Directors
-President Director : Sinthya Roesly
-Director of Operation : Salusra Satria



Adapun agenda dan keputusan RUPS Perubahan RKAP tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Agenda and resolutions of GMS on Revision of RKAP 2016 are as follows:

No.	Agenda	Keputusan Resolutions	Tindak Lanjut Keputusan Follow-Up
1.	Persetujuan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT PII Tahun 2016 Approval on Budget Plan Revision	Menyetujui dan menetapkan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT PII Tahun 2016 Approving and stipulating Budget Plan Revision	Telah direalisasikan Completed

3. RUPS RKAP tahun 2017

RUPS tentang RKAP tahun 2017 dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 yang bertempat di Jakarta. Hadir dalam RUPS:

1. Kuasa Pemegang Saham:
Sonny Loho, Direktur Jenderal Kekayaan Negara
2. Dewan Komisaris:
-Komisaris Utama : Luky Alfirman
-Komisaris : Ayu Sukorini
-Komisaris : Iskandar
3. Direksi:
-Direktur Utama : Sinthya Roesly
-Direktur Operasi : Salusra Satria

3. GMS on RKAP 2017

GMS on RKAP 2017 was held in Thursday, December 29, 2016 in Jakarta. The GMS was attended by:

1. Shareholders Attorney:
Sonny Loho, General Director of State Assets
2. Board of Commissioners
-President Commissioner : Luky Alfirman
-Commissioner : Ayu Sukorini
-Commissioner : Iskandar
3. Board of Directors
-President Director : Sinthya Roesly
-Director of Operation : Salusra Satria

Adapun agenda dan keputusan RUPS RKAP tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Agenda and resolutions of GMS on RKAP 2017 are as follows:

No.	Agenda	Keputusan Resolutions	Tindak Lanjut Keputusan Follow-Up
1.	Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT PII Tahun 2017 termasuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Approval on IIGF Budget Plan for 2017 including Partnership and Environment Development Program (PKBL) Budget Plan (RKA)	Menyetujui dan menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT PII Tahun 2017 termasuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Approving IIGF Budget Plan for 2017 including Partnership and Environment Development Program (PKBL) Budget Plan (RKA)	Telah direalisasikan Completed
2.	Persetujuan Kontrak Kinerja Manajemen PT PII Tahun 2017 Approval on IIGF Management Contract for 2017	Menyetujui dan Menetapkan Kontrak Kinerja Manajemen PT PII Tahun 2017 Approving IIGF Management Contract for 2017	Telah direalisasikan Completed
3.	Persetujuan Kontrak Kinerja Dewan Komisaris PT PII Tahun 2017 Approving IIGF Board of Commissioners Performance Contract for 2017	Menyetujui dan Menetapkan Kontrak Kinerja Dewan Komisaris PT PII Tahun 2017 Approving and Stipulating IIGF Board of Commissioners Performance Contract for 2017	Telah direalisasikan Completed

4. RUPS Penetapan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 50 tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah, Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur, PT PII menyelenggarakan RUPS Luar Biasa Penetapan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan, dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 yang bertempat di Jakarta.

Hadir dalam RUPS:

1. Kuasa Pemegang Saham:
Sonny Loho, Direktur Jenderal Kekayaan Negara
2. Dewan Komisaris:

- Komisaris Utama	: Luky Alfirman
- Komisaris	: Ayu Sukorini
- Komisaris	: Iskandar
3. Direksi:

- Direktur Utama	: Sinthya Roesly
- Direktur Operasi	: Salusra Satria

4. GMS on Stipulation of Articles of Association Amendment

In relation with implementation of The Republic of Indonesia Government Regulation Number 50 of 2016 concerning Amendment of Government Regulation Number 35 of 2009 regarding Investment from The Republic of Indonesia Government for Establishment of Perusahaan Perseroan (Persero) in Infrastructure Guarantee Sector, IIGF held Extraordinary GMS on the Amendment of Articles of Association in Thursday, December 29, 2016 in Jakarta.

The GMS was attended by:

1. Shareholders Attorney:
Sonny Loho, General Director of State Assets
2. Board of Commissioners

-President Commissioner	: Luky Alfirman
-Commissioner	: Ayu Sukorini
-Commissioner	: Iskandar
3. Board of Directors

-President Director	: Sinthya Roesly
-Director of Operation	: Salusra Satria



Realisasi Keputusan RUPS Tahun Sebelumnya

Realization of Previous Year's GMS Resolutions

Pada tahun 2015, PT PII menyelenggarakan RUPS sebanyak dua kali, yaitu RUPS Persetujuan Laporan Tahunan 2014 yang diselenggarakan pada tanggal 1 April 2015 dan RUPS Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan 2016 yang diselenggarakan pada tanggal 18 Desember 2015.

Seluruh keputusan RUPS tersebut telah dilaksanakan oleh PT PII, dengan rincian sebagai berikut:

In 2015, IIGF held two GMS, which were GMS on Approval of Annual Report 2014 that was held on April 1, 2015 and GMS on Budget Plan 2016 that was held on December 28, 2015.

Entire GMS Resolutions had been executed by IIGF with detail as follows:

1. RUPS Persetujuan Laporan Tahunan 2014

1. GMS on Approval of Annual Report 2014

No.	Keputusan RUPS/GMS Resolutions	Realisasi Keputusan RUPS Realization of Resolution
1.	- Mengesahkan Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2014 - Mengesahkan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2014 - Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama tahun buku 2014 - Menyetujui pencapaian kinerja manajemen sesuai Kontrak Manajemen Tahun buku 2014	Telah direalisasikan Completed
2.	- Validating Financial Statements Fiscal Year 2014 - Validating Partnership and Environment Development Program Financial Statements Fiscal Year 2014 - Assigning full dismissal and discharge (<i>acquit et de charge</i>) to all Board of Commissioners and Board of Directors members over supervisory and managerial duties conducted in fiscal year 2014 - Approving management performance achievement based on Management Contract Fiscal Year 2014 Menyetujui penetapan gaji/honorarium dan tunjangan/fasilitas bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan untuk Tahun Buku 2015, akan ditetapkan secara terpisah melalui Keputusan Pemegang Saham yang akan dilakukan secara sirkuler. Approval on stipulation salary/honorarium and allowance/facilities for the Board of Commissioners and Board of Directors for fiscal year 2015 to be stipulated separately under circular Shareholders.	Telah direalisasikan Completed
3.	Persetujuan atas penggunaan Laba Bersih Perusahaan Tahun buku 2014 serta pembayaran <i>tantiem</i>, akan ditetapkan secara terpisah melalui Keputusan Pemegang Saham yang akan dilakukan secara sirkuler. Approval on realization of Net Income Fiscal Year 2014 and Incentives Payment to be stipulated separately under circular Shareholders.	Telah direalisasikan Completed
4.	Penetapan kantor Akuntan Publik yang mencakup: - Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk mengusulkan dan melakukan proses penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2015 - Penetapan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik yang diusulkan oleh Dewan Komisaris sesuai pelimpahan kewenangan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada angka 4.a Stipulation of Public Accountant Firm that included: - Delegation of authority to the Board of Commissioners to propose and conduct Public Accountant Firm appointment process to audit Financial Statements Fiscal Year 2015 - Stipulation on the appointment of Public Accountant Firm who was proposed by Board of Commissioners based on delegated authority as mentioned in number 4.a	Telah direalisasikan Completed

2. RUPS Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan 2016

No.	Keputusan RUPS/GMS Resolutions	Realisasi Keputusan RUPS Realization of Resolution
1.	Menyetujui dan mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Tahun 2016 Approving and validating PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Budget Plan 2016	Telah direalisasikan Completed
2.	Menyetujui dan mengesahkan Kontrak Manajemen PT PII Tahun 2016 Approving and validating IIGF Management Contract 2016	Telah direalisasikan Completed

Dewan Komisaris Board of Commissioners

Dewan Komisaris adalah Organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Dewan Komisaris juga bertugas untuk memastikan terselenggaranya penerapan GCG sesuai dengan pedoman, prosedur, dan tata cara yang diatur oleh Perusahaan. Dewan Komisaris bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya.

Mekanisme pengawasan yang dilakukan antara lain melalui pembahasan laporan dan kinerja dan permasalahan secara berkala dengan Direksi, pengawasan dalam hal penyempurnaan infrastruktur GCG dan manajemen risiko, kendala, dan permasalahan yang dihadapi oleh unit-unit kerja di lingkungan Perusahaan.

Dalam melaksanakan tugas, Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan Perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Tenaga Ahli Manajemen Risiko.

Board of Commissioners is a Corporate Structure who is in charge to perform general and/or special supervision according to the Articles of Association and provide advise to the Board of Directors.

The Board of Commissioners is also in charge to ensure GCG implementation in accordance with the manual, procedure and mechanism regulated by the Company. The Board of Commissioners is in charge and being responsible collectively to exercise its authority and responsibility.

Mechanism of the supervision namely includes discussion of report and performance as well as issues regularly with the Board of Directors, in this course, the supervision refers to improvement of GCG infrastructure and risk management, issues and matters that were encountered by working units in the Company's circumstances.

In conducting the duties, the Board of Commissioners is responsible to the GMS. Accountability of the Board of Commissioners to the GMS manifests accountability of the supervision over the Company's management in the implementation of GCG principles.

In order to support the duty implementation, the Board of Commissioners is assisted by Board of Commissioners Secretary, Audit Committee and Risk Management Expert Staff.



Komposisi Dewan Komisaris

Hingga 31 Desember 2016, komposisi Dewan Komisaris PT PII terdiri dari 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama dan dua orang Komisaris.

Nama Name	Jabatan Position	Domisili Domicile	Tanggal Pertama Kali Diangkat Initial Date of Appointment	Tanggal Pengangkatan Kembali/ Berakhirnya Masa Jabatan Date of Reappointment/ End of Tenure
Luky Alfirman	Komisaris Utama President Commissioner	Jakarta Selatan South Jakarta	19 Agustus 2013 August 19, 2013	31 Desember 2014* December 31, 2014*
Ayu Sukorini	Komisaris Commissioner	Jakarta Timur East Jakarta	30 Desember 2009 December 30, 2009	31 Desember 2014* December 31, 2014*
Iskandar	Komisaris Commissioner	Depok, Jawa Barat Depok, West Java	19 Agustus 2014** August 19, 2014	19 Agustus 2019 August 19, 2019

* Diangkat kembali sebagai Komisaris Perusahaan sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor. 631/KMK.06/2014 tanggal 29 Desember 2014.

** Diangkat sebagai Komisaris Perusahaan sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor.388/KMK.06/2014 tanggal 19 Agustus 2014.

Board of Commissioners Composition

As of December 31, 2016, composition of IIGF Board of Commissioners consisted of 3 (three) persons comprising of 1 (one) President Commissioner and two Commissioners.

Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pedoman Kerja Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki uraian pekerjaan yang dituangkan dalam Tata Laksana Kerja Bagi Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) yang terakhir kali diperbaharui pada Maret 2016. *Board Manual* berisi panduan bagi Dewan Komisaris dan menjelaskan hubungan, komunikasi, dan aktivitas antara organ Perusahaan tersebut secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten, dapat menjadi acuan bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai visi dan misi Perusahaan, sehingga diharapkan akan tercapai standar kerja yang tinggi selaras dengan prinsip-prinsip GCG.

Board Manual disusun berdasarkan prinsip-prinsip hukum korporasi, ketentuan Anggaran Dasar, peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, arahan Pemegang Saham, serta praktik-praktik terbaik (*best practices*) GCG.

Board of Commissioners Appointment and Dismissal

Board of Commissioners members are appointed and dismissed by the GMS in accordance with the Law and regulation.

Board Manual for Board of Commissioners

Board of Commissioners has job description that is disclosed in Board Manual for Board of Commissioners and Board of Directors with the latest revision in March 2016. The Board Manual regulates guideline for the Board of Commissioners and explains relationship, communication and activity among the Corporate Structures in well-structured, systematic, easy to be understood and implemented consistently as reference for the Board of Commissioners in implementing individual duty to achieve vision and mission of the Company that is expected to achieve high working standard that is in line with the GCG principles.

The Board Manual is based on the principles of corporate law, the provisions of the Articles of Association, the applicable laws and regulations, the direction from the Shareholders and GCG best practices.

Isi *Board Manual* yang berhubungan dengan Dewan Komisaris adalah:

BAB II DEWAN KOMISARIS

- 2.1 Organisasi
- 2.2 Tugas, Wewenang dan Kewajiban Dewan Komisaris
- 2.3 Pedoman Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab
- 2.4 Pedoman Kebijakan Pengawasan
- 2.5 Rapat Dewan Komisaris
 - 2.5.1 Pengertian
 - 2.5.2 Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris
- 2.6 Pedoman Pengambilan Keputusan Dewan Komisaris
- 2.7 Pedoman Penilaian Kinerja Dewan Komisaris
- 2.8 Organ Pendukung Dewan Komisaris
 - 2.8.1 Komite Audit
 - 2.8.2 Komite Pemantau Risiko

Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris

Tugas Dewan Komisaris

Sesuai dengan isi *Board Manual*, tugas Dewan Komisaris adalah:

1. Menerapkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.
2. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sesuai prinsip-prinsip dalam setiap kegiatan usaha Perusahaan pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi.
3. Melaksanakan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
4. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dasar dan strategis.
5. Memberikan arahan tentang hal-hal penting mengenai perubahan lingkungan bisnis yang diperkirakan akan berdampak pada Perusahaan secara tepat waktu dan efisien.
6. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari auditor internal, auditor eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris dan/atau hasil pemeriksaan tertentu oleh lembaga pemeriksa lainnya.

Contents of Board Manual that is related with the Board of Commissioners are as follows:

CHAPTER II BOARD OF COMMISSIONERS

- 2.1 Organizations
- 2.2 Tasks, Authorities and Duties of the Board of Commissioners
- 2.3 Separation of Duties, Authorities and Responsibilities Guideline
- 2.4 Supervisory Policy Guideline
- 2.5 The Board of Commissioners' Meetings
 - 2.5.1 Definition
 - 2.5.2 Implementation of the Board of Commissioners Meetings
- 2.6 The Board of Commissioners' Decision-making Guideline
- 2.7 Performance Assessment Guidelines of the Board of Commissioners
- 2.8 Supporting Organs of the Board of Commissioners
 - 2.8.1 Audit Committee
 - 2.8.2 Risk Monitoring Committee

Board of Commissioners' Duty and Responsibility

Board of Commissioners' Duty

According to the Board Manual contents, Board of Commissioners' duties are as follows:

1. To implement Good Corporate Governance according to their authority and responsibility.
2. To ensure implementation of Good Corporate Governance principles in every business activity of the Company at entire organization levels and stages.
3. To supervise duty and responsibility of the Board of Directors and to provide advise to the Board of Directors.
4. To align, oversee and evaluate implementation of basic and strategic policies.
5. To provide recommendation on significant issues related with changing business environment that are estimated will influence the Company on time and efficiently.
6. To ensure that the Board of Directors has followed-up audit finding and recommendation from internal auditor, external auditor, audit report from the Board of Commissioners and/or special audit by other audit agencies.



7. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada RUPS secara triwulanan dan/atau sewaktu waktu apabila diminta oleh RUPS. 8. Melaporkan kepada Menteri selaku RUPS setiap perkembangan pelaksanaan mandat yang diberikan kepada Perusahaan. 9. Menyusun pedoman pengambilan keputusan, kebijakan pengawasan, penilaian kinerja, pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab, serta melaksanakannya. 10. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Komisaris yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. 11. Memastikan bahwa dalam Laporan Tahunan Perusahaan telah memuat informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan anggota Dewan Komisaris di perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan Direksi), serta honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari Perusahaan. 12. Memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris. 13. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal. 14. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.	7. To report duty and responsibility implementation to the GMS quarterly and/or incidentally if requested by the GMS. 8. To report to the Minister as the GMS for every progress of implementation of mandate that is assigned to the Company. 9. To prepare decision-making guideline, supervisory policy, performance assessment, segregation of duty, authority and responsibility as well as implementation of these policies. 10. To prepare Board of Commissioners Annual Budget Plan as integrated of the Company's Budget Plan (RKAP). 11. To ensure that the Annual Report has disclosed information about Board of Commissioners members' identity, main duties, position in other companies, including the meetings conducted in one fiscal year (internal meeting and Management Meeting with the Board of Directors) as well as honorarium, facilities and/or other allowances from the Company. 12. To have working guideline and procedure that is binding every Board of Commissioners member. 13. To provide sufficient time to carry out the duty and responsibility optimally. 14. To exercise other supervisory authority as long not violating the Law, Articles of Association and/or General Meetings of Shareholders Resolution.

Wewenang Dewan Komisaris

Agar Dewan Komisaris dapat melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris berwenang untuk:

1. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perusahaan.
2. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan.
3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan.

Board of Commissioners' Authority

To support the Board of Commissioners in implementing the duties, the Board of Commissioners holds following authorities:

1. To examine books, letters and other documents, cash for verification and other securities and assets of the Company.
2. To access yard, building and office used by the Company.
3. To request explanation from the Board of Directors and/or other Executives regarding any issue related with the Company's management.

4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi.	4. To acknowledge every policy and action that has and will be implemented by the Board of Directors.
5. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris.	5. To request the Board of Directors and/or other Executives under the Board of Directors with the Board of Directors' acknowledgement to attend the Board of Commissioners meeting.
6. Mengangkat dan memberhentikan sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap perlu.	6. To appoint and discharge the Board of Commissioners Secretary, if considered necessary.
7. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.	7. To discharge the Board of Directors member temporarily according to provisions in the Articles of Association.
8. Membentuk komite-komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan.	8. To establish other Committees than Audit Committee, if considered necessary by considering the Company's capability.
9. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perusahaan, jika dianggap perlu.	9. To hire Expert for particular purpose and period on the Company's budget, if considered necessary.
10. Melakukan tindakan pengurusan Perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.	10. To perform the Company's managerial action under particular condition and period in accordance with the Articles of Association.
11. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan.	11. To attend Board of Directors meeting and provide opinion to the discussed issues.
12. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.	12. To exercise other supervisory authority as long not violating the Law, Articles of Association and/or General Meetings of Shareholders Resolution.

Pembagian Tugas Dewan Komisaris

Pembagian tugas Dewan Komisaris PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan / Position	Uraian Tugas / Job Description
Luky Alfirman	Komisaris Utama President Commissioner	a. Mengkoordinasikan seluruh tugas Dewan Komisaris; dan b. Melaksanakan tugas terkait kebijakan remunerasi dan nominasi. a. To coordinate entire duty of the Board of Commissioners; and b. To perform duty related with remuneration and nomination policy
Ayu Sukorini	Komisaris	a. Sebagai Ketua Komite Audit dan bidang <i>internal audit</i> ; b. Bidang yang menjadi tugas dan kewenangan Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko; c. Bidang <i>Corporate Legal Service</i> , bidang <i>Corporate Secretary</i> dan IIGF Institute; dan d. Melaksanakan tugas terkait kebijakan remunerasi dan nominasi.

Board of Commissioners Segregation of duty

Segregation of duty for PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) is as follows:



Nama	Jabatan / Position	Uraian Tugas / Job Description
	Commissioner	a. To act as Chairman of Audit Committee and Internal Audit sector; b. Sectors as duty and responsibility of Director of Finance and Risk Management; c. Corporate Legal Service, Corporate Secretary and IIGF Institute; and d. To perform duty related with remuneration and nomination policy.
Iskandar	Komisaris	a. Bidang yang menjadi tugas dan kewenangan Direktur Operasi; b. Bidang <i>Risk and Compliance</i> dan <i>Business Development and Communication</i>; dan c. Melaksanakan tugas terkait kebijakan remunerasi dan nominasi.
	Commissioner	a. Sectors as duty and responsibility of Director of Operations; b. Risk and Compliance and Business Development and Communication; and c. To perform duty related with remuneration and nomination policy.

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Saham PT PII sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Tidak ada anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham di PT PII.

Independensi Dewan Komisaris

Seluruh anggota Dewan Komisaris PT PII bertindak independen dan bebas intervensi dari pihak manapun Untuk meminimalisir terjadinya benturan kepentingan, setiap anggota Dewan Komisaris juga diwajibkan untuk membuat Daftar Khusus, yang berisikan keterangan kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan/atau keluarganya pada Perusahaan maupun Perusahaan lain.

Rangkap Jabatan dan Benturan Kepentingan

Pada periode tahun 2016, rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris PT PII adalah sebagai berikut:

No.	Nama/ Name	Jabatan di PT PII	Jabatan Lain
1.	Luky Alfirman	Komisaris Utama President Commissioner	Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan Kementerian Keuangan/ Chairman of Policy Analysis and Harmonization, Ministry of Finance
2.	Ayu Sukorini	Komisaris Commissioner	Direktur Pinjaman dan Hibah, DJPPR Kementerian Keuangan Director of Loans and Grants, DJPPR Ministry of Finance
3.	Iskandar	Komisaris Commissioner	Tidak ada rangkap jabatan lain No Dual Position

Pendelegasian Wewenang

Pendelegasian wewenang anggota Dewan Komisaris kepada anggota Dewan Komisaris lainnya dinyatakan dengan surat kuasa tertulis. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat mewakili seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang berhalangan. Pendelegasian wewenang Dewan Komisaris kepada Komite Audit diatur dalam Piagam Komite Audit.

Board of Commissioners Shares Ownership

Shares of IIGF are fully owned by The Government of Republic of Indonesia. There is no Board of Commissioners member with shares ownership at IIGF.

Board of Commissioners Independency

All of IIGF Board of Commissioners members are independent and free from any intervention to minimize conflict of interest, every Board of Commissioners member is also regulated to prepare Special List disclosing explanation of shares ownership of the Board of Commissioners members and/or their families in the Company or other companies.

Dual Position and Conflict of Interest

In 2016 period, dual position of IIGF Board of Commissioners members are as follows:

Authority Delegation

Delegation of authority from one to another Board of Commissioners member is declared in written attorney letter. Every Board of Commissioners member is only eligible to represent another Board of Commissioners member who is not available. Delegation of authority of the Board of Commissioners to the Audit Committee is regulated in the Audit Committee Charter.

Program Kerja dan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris Tahun 2016

Dewan Komisaris telah menyusun program kerja sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2016, rincian kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

Board of Commissioners Working Program and Duty Implementation

The Board of Commissioners has prepared working program as stipulated in Budget Plan (RKAP) 2016 with detail of activity is explained below:

No.	Kegiatan/ Activity	Target/ Target	Realisasi/ Realization
1.	Menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Dewan Komisaris PT PII Untuk Tahun Buku 2017. Preparing and submitting IIGF Board of Commissioners Budget Plan for Fiscal Year 2017.	1 kali/ 15 Okt 2016 1 time/ 15 Oct 2016	1 kali/ 14 Oktober 2016 1 time/ October 14, 2016
2.	Melakukan penelaahan dan memberikan persetujuan atas rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT PII Tahun Buku 2017. Conducting review and providing approval on IIGF Company Budget Plan (RKAP) Fiscal Year 2017.	1 kali 1 time	1 kali 1 time
3.	Melakukan penilaian atas penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik oleh Perusahaan. Conducting Good Corporate Governance Assessment by the Company.	1 kali 1 time	1 Kali (<i>selfassessment</i>) 1 time (self-assessment)
4.	Melakukan penelaahan dan memberikan persetujuan atas usulan perubahan Pedoman Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris dan Direksi PT PII (boardmanual), menyesuaikan dengan ketentuan PMK Nomor. 88/PMK.06/2015. Conducting review and providing approval on proposal of IIGF Board Manual for Board of Commissioners and Board of Directors Revision, in compliance with provisions in PMK Number 88/PMK.06/2015.	1 Kali/ 31 Maret 2016 1 time / March 31, 2016	1 kali/ 18 Maret 2016 1 time /March 18,2016
5.	Memberikan tanggapan kepada Direksi terkait permohonan persetujuan atas tindakan-tindakan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. Providing feedback to the Board of Directors related with proposal of approval on Board of Directors' action that required approval from the Board of Commissioners.	95%	100 % (10 tanggapan dari 10 permohonan) 100 % (10 feedbacks to 10 proposals)
6.	Memberikan tanggapan kepada RUPS terkait permohonan persetujuan atas tindakan-tindakan Direksi yang memerlukan persetujuan RUPS. Providing feedback to the GMS related with proposal of approval on Board of Directors' action that required approval from the Board of Commissioners.	95%	100% (5 tanggapan dari 5 permohonan) 100% (5 feedbacks to 5 proposals)
7.	Melaksanakan rapat Dewan Komisaris Organizing Board of Commissioners Meeting	12 kali 12 time	24 kali 24 time
8.	Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris kepada RUPS secara triwulanan. Submission of Board of Commissioners Duty and Responsibility Implementation Report to the GMS Quarterly	4 Laporan 4 Reports	4 Laporan 4 Reports



No.	Kegiatan/ Activity	Target/ Target	Realisasi/ Realization
9.	Menyampaikan Laporan Pengawasan atas Pelaksanaan RKAP PT PII kepada RUPS secara semesteran. Submission of Supervisory Report on Implementation of IIGF Budget Plan to GMS in every semester.	2 laporan 2 Reports	2 laporan 2 Reports
10.	Menyampaikan Laporan Perkembangan Realisasi Indikator Pencapaian Kinerja Dewan Komisaris kepada RUPS. Submission of Board of Commissioners Key Performance Indicators Achievement Realization to the GMS.	1 laporan 1 Reports	1 laporan 1 Reports
11.	Melakukan pemilihan dan menyampaikan usulan penetapan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan PT PII Tahun Buku 2016 kepada RUPS. Conducting appointment and submitting recommendation for Public Accountant Firm stipulation to audit IIGF Financial Statements Fiscal Year 2016 to the GMS.	1 kali 1 time	1 kali 1 time
12.	Melaksanakan pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi anggota Dewan Komisaris. Organizing training and competency development for Board of Commissioners members.	1 kali 1 time	1 kali 1 time

Rapat Dewan Komisaris

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dewan Komisaris melaksanakan Rapat Dewan Komisaris. Sesuai dengan Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris dan Direksi, Dewan Komisaris mengadakan rapat paling sedikit satu kali dalam satu bulan atau sewaktu-waktu atas permintaan satu atau beberapa anggota Dewan Komisaris.

Sepanjang tahun 2016, Dewan Komisaris melakukan rapat gabungan bersama Direksi sebanyak 18 kali. Disamping itu, Dewan Komisaris juga melaksanakan rapat internal enam kali. Rekapitulasi kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam rapat gabungan adalah sebagai berikut:

Board of Commissioners Meeting

In order to support duty and function implementation, the Board of Commissioners conducts Board of Commissioners Meeting. According to Board Manual for Board of Commissioners and Board of Directors, the Board of Commissioners held meeting at least once in a month or anytime requested by one or more Board of Commissioners members.

Throughout 2016, the Board of Commissioners organized 18 Management Meetings with Board of Directors. On the other hand, the Board of Commissioners also held six internal meetings. Recapitulation of Board of Commissioners and Board of Directors attendance in the Management Meetings are as follows:

Nama/ Name	Jabatan/ Position	Jumlah Rapat Total Meeting	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Kehadiran (%) Attendance (%)
Luky Alfirman	Komisaris Utama President Commissioner	18	17	94%
Ayu Sukorini	Komisaris Commissioner	18	16	89%
Iskandar	Komisaris Commissioner	18	17	94%
Sinthya Roesly	Direktur Utama President Director	18	18	100%

Nama/ Name	Jabatan/ Position	Jumlah Rapat Total Meeting	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Kehadiran (%) Attendance (%)
Armand Hermawan	Direktur Keuangan & Manajemen Risiko Director of Finance & Risk Management	18	17	94%
Salusra Satria*	Direktur Operasi Director of Operations	10	10	100%
Yadi J Ruchandi**	Direktur Operasi Director of Operations	8	8	100%

*) menjabat sejak 16 Juni 2016

*) serving since June 16, 2016

**) menjabat hingga 16 Juni 2016

**) serving until June 16, 2016

Adapun agenda rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meeting (Management Meeting) Agenda are as follows:

No.	Tanggal/Date	Agenda	Kehadiran/Attendance						
			LA	AS	I	SR	AH	SS	YJR
1.	18 Januari 2016 January 18, 2016	a. Tindak lanjut arahan Pemegang Saham dalam RUPS RKAP tahun 2016 b. Arahan Menteri Keuangan kepada Direksi BUMN di bawah pembinaan dan pengawasan Menteri Keuangan c. Hasil Rapat Kerja di Yogyakarta d. Kesiapan implementasi PMK Nomor. 88 tahun 2015 e. Progress dan tindak lanjut rencana pindah kantor	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
		a. Follow-Up on Shareholders aspiration in GMS on RKAP 2016 b. Recommendation from Minister of Finance to Board of Directors of SOE under development and supervision of Minister of Finance c. Result of Coordination Meeting in Yogyakarta d. Preparation of PMK Number 88 of 2015 implementation e. Progress and follow-up of office relocation plan							
2.	5 Februari 2016 February 5, 2016	a. Presentasi untuk <i>Pre-In Principle Approval (IPA)</i> Proyek Jalan Tol Pandaan-Malang, Balikpapan-Samarinda, dan Manado-Bitung b. <i>Update</i> kesiapan Perusahaan untuk perluasan mandat c. Pembahasan strategi jangka panjang Perusahaan	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
		a. Presentation for Pre-In Principle Approval (IPA) Pandaan-Malang, Balikpapan-Samarinda, dan Manado-Bitung Toll Road Projects b. Update of the Company's preparation for mandate extension c. Discussion of Company Long-Term Strategic Plan							
3.	17 Februari 2016 February 17, 2016	a. Pembahasan Laporan Manajemen bulan Januari 2016 b. Pendalaman skema penjaminan Proyek Jalan Tol c. Pembahasan Pedoman GCG dan <i>Board Manual</i> d. Pembahasan PMN 2017	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
		a. Discussion of Management Report as of January 2016 b. Toll Road Project Guarantee Scheme Deepening c. Discussion of Code of GCG and Board Manual d. Discussion of PMN 2017							



No.	Tanggal/Date	Agenda	Kehadiran/Attendance						
			LA	AS	I	SR	AH	SS	YJR
4.	18 Maret 2016 March 18, 2016	a. Finalisasi <i>Board Manual dan Code of GCG</i> sesuai PMK Nomor. 88/2015 untuk persetujuan Dewan Komisaris dan Direksi							
		b. Paparan kajian Hay Group							
		c. Kesiapan organisasi dalam rangka perluasan mandat							
		a. Finalization of Board Manual and Code of GCG according to PMK Number 88/2015 for Approval from the Board of Commissioners and Board of Directors	√	√	√	√		-	√
		b. Presentation of Hay Group Report							
		c. Preparation of the organization regarding the mandate extension							
5.	5 April 2016 April 5, 2016	a. <i>Update</i> terkait Persiapan RUPS							
		b. Pembahasan Perubahan Anggaran Dasar							
		a. Update related with GMS Preparation	√	√	√	√		-	√
		b. Discussion of Articles of Association Amendment							
6.	29 April 2016 April 29, 2016	a. Pembahasan Laporan Triwulan I/2016							
		b. Pelaksanaan RKAP Q1							
		c. <i>Progress Project</i>							
		d. Pinjaman karyawan							
		e. Persiapan relokasi kantor							
		f. Kesimpulan dan tindak lanjut	√	√	√	√	√	-	√
		a. Discussion of 1 st Quarter/2016 Report							
		b. Implementation of Budget Plan as of 1 st Quarter							
		c. Project Progress							
7.	20 Mei 2016 May 20, 2016	d. Employee Loans							
		e. Preparation of Office Relocation							
		f. Summary and follow-up							
		a. <i>Update</i> proses penjaminan Proyek Tol dan Palapa Ring Timur							
		b. Tindak lanjut pembahasan persiapan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP)							
		c. Agenda lain-lain	√	√	√	√	√	-	√
		a. Update of Toll Road and Palapa West Ring Project Guarantee Process							
		b. Follow-Up of Corporate Plan (RKPP) Preparation Discussion							
		c. Other Agenda							
8.	26 Mei 2016 May 26, 2016	a. <i>Update</i> status tindak lanjut Rapat Dewan Komisaris dan Direksi sebelumnya							
		b. Pembahasan Laporan Manajemen periode April 2016							
		c. Pembahasan rencana pelepasan aset	√	√	√	√	√	-	√
		a. Update of previous Board of Commisisoners and Board of Directors Meeting Follow-Up							
		b. Discussion of Management Report as of April 2016 Period							
		c. Discussion of assets disposal plan							

No.	Tanggal/Date	Agenda	Kehadiran/Attendance						
			LA	AS	I	SR	AH	SS	YJR
9.	29 Juni 2016 June 29, 2016	a. Pengenalan anggota baru Direksi Perusahaan b. Tindak lanjut Rapat Dewan Komisaris dan Direksi sebelumnya c. Pembahasan Laporan Manajemen bulan Mei 2016 d. Pembahasan <i>Risk Based Capital Framework</i>							
		a. Introduction of New Board of Directors member b. Follow-up of previous Board of Commissioners and Board of Directors Meeting c. Discussion of Management Report as of May 2016 d. Discussion of Risk Based Capital Framework	√	√	√	√	√	√	-
10.	29 Juli 2016 July 29, 2016	a. Tindak lanjut Rapat Dewan Komisaris dan Direksi sebelumnya b. Pembahasan Laporan Manajemen bulan Juni 2016 c. Pembahasan agenda lainnya d. Pencapaian kinerja Semester 1 tahun 2016 dan revisi RKAP 2016 e. Aspek regulasi							
		a. Follow-up of previous Board of Commissioners and Board of Directors Meeting b. Discussion of Management Report as of June 2016 c. Discussion of other Agenda d. Performance Achievement as of 1 st Semester of 2016 and Budget Plan 2016 Revision 2016 e. Regulatory Aspect	-	√	√	√	√	√	-
11.	23 Agustus 2016 August 23, 2016	Pembahasan penjaminan Proyek Jalan Tol Serang-Panimbang, Cileunyi-Sumedang Dawuan, Krian-Legundi-Bunder-Manyar, dan Jakarta-Cikampek II (<i>Elevated</i>) Discussion of Guarantee Facility for Serang-Panimbang, Cileunyi-Sumedang Dawuan, Krian-Legundi-Bunder-Manyar, and Jakarta-Cikampek II (Elevated) Toll Road Projects	√	√	√	√	√	√	-
12.	27 Agustus 2016 August 27, 2016	a. <i>Update penyusunan Strategi Jangka Panjang bersama McKinsey</i> b. Pembahasan Aspek SDM							
		a. Update of Long-Term Strategic Plan Formulation with McKinsey b. Discussion of Human Capital Aspect	√	√	-	√	√	√	-
13.	27 September 2016 September 27, 2016	a. Laporan Manajemen bulan Agustus 2016 b. <i>Highlight Rencana Bisnis 2017</i> c. Pembahasan SOP pelepasan aset d. Pembahasan Risk Based Capital							
		a. Management Report as of August 2016 b. Business Plan Highlight 2017 c. Discussion of Assets Disposal SOP d. Discussion of Risk Based Capital	√	√	√	√	√	√	-
14.	14 Oktober 2016 October 14, 2016	a. Pembahasan RKAP 2017 b. Pembahasan <i>Risk Based Capital</i>							
		a. Discussion of Budget Plan 2017 b. Discussion of Risk Based Capital	√	-	√	√	√	√	-



No.	Tanggal/Date	Agenda	Kehadiran/Attendance						
			LA	AS	I	SR	AH	SS	YJR
15.	27 Oktober 2016 October 27, 2016	a. Tindak lanjut Rapat Dewan Komisaris dan Direksi sebelumnya b. Laporan Manajemen bulan September 2016 c. Pembahasan arah Rencana Jangka Panjang Perusahaan d. Pembahasan <i>Risk Based Capital</i>							
		a. Follow-up of previous Board of Commissioners and Board of Directors Meeting b. Management Report as of September 2016 c. Discussion of Company Long-Term Plan d. Discussion of Risk Based Capital	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
16.	28 Oktober 2016 October 28, 2016	a. Pembahasan <i>Risk Based Capital</i> b. Finalisasi RKAP 2017	✓	-	✓	✓	✓	✓	-
		a. Discussion of Risk Based Capital b. Finalization of Budget Plan 2017							
17.	30 November 2016 November 30, 2016	Pembahasan Laporan Manajemen periode Oktober 2016 Discussion of Management Report as of October 2016 Period	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
18.	28 Desember 2016 December 28, 2016	a. Pembahasan Laporan Manajemen periode bulan November 2016 b. Pembahasan Persiapan RUPS	✓	✓	✓	✓	-	✓	-
		a. Discussion of Management Report a of November 2016 period b. Discussion of GMS Preparation							

Keterangan/ Remarks:

LA = Luky Alfirman

AS = Ayu Sukorini

I = Iskandar

SR = Sinthya Roesly

AH = Armand Hermawan

YJR = Yadi J Ruchandi

Selain pembahasan Laporan Manajemen bulanan, dalam rapat-rapat tersebut juga dibahas berbagai masalah operasional dan strategis Perusahaan, antara lain mencakup:

1. Update penjaminan proyek selama tahun 2016
2. Kesiapan Perusahaan dalam rangka perluasan mandat
3. Pembahasan pelepasan aset
4. Pembahasan aspek SDM

Rekapitulasi kehadiran Dewan Komisaris dalam rapat internal adalah sebagai berikut:

Besides discussing the monthly Management Report, the meetings also discussed several operational and strategic issues of the Company, including:

1. Project guarantee update in 2016
2. Preparation of the Company on mandate extension
3. Assets disposal discussion
4. Human Capital aspect discussion

Recapitulation of Board of Commissioners attendance in the internal meetings is as follows:

Nama/Name	Jabatan/Position	Jumlah Rapat Total Meeting	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Kehadiran (%) Attendance (%)
Luky Alfirman	Komisaris Utama President Commissioner	6	6	100%
Ayu Sukorini	Komisaris/ Commissioner	6	5	83%
Iskandar	Komisaris/ Commissioner	6	5	83%

Adapun agenda rapat internal Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Agenda of the Board of Commissioners meeting agenda is as follows:

No.	Tanggal Date	Agenda	Kehadiran Attendance		
			LA	AS	I
1.	4 Februari 2016 February 4, 2016	Pembahasan persiapan Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Discussion of Board of Commissioners and Board of Directors Meeting preparation	√	√	√
2.	15 Februari 2016 February 15, 2016	a. Pemaparan hasil pembahasan Organ Dewan Komisaris dengan Tim Teknis Direksi PT PII terkait dengan 3 (tiga) proyek jalan tol b. <i>Update progress</i> penyusunan GCG Manual dan Board Manual c. Pembahasan isu-isu strategis lainnya	√	√	√
		a. Presentation of IIGF Board of Commissioners and BOD Technical Team Discussion Result on 3 (three) toll road projects b. Update of Code of GCG and Board Manual preparation <i>progress</i> c. Discussion of other strategic issues			
3.	29 April 2016 April 29, 2016	a. Pembahasan Laporan Manajemen Periode Triwulan 1 tahun 2016 b. Agenda lain-lain	√	√	√
		a. Discussion of Management Report as of 1 st Quarter of 2016 Period b. Other agenda			
4.	23 September 2016 September 23, 2016	a. Pembahasan isu strategis yang menjadi perhatian Dewan Komisaris b. Pembahasan <i>pending matters</i> dan lain-lain	√	√	-
		a. Discussion of strategic issues as the Board of Commissioners' concern b. Discussion of pending matters and others			
5.	14 Oktober 2016 October 14, 2016	Persiapan untuk pembahasan Rapat Dewan Komisaris dan Direksi terkait Rencana Jangka Panjang Perusahaan, revisi RKAP 2016, RKAP 2017, dan <i>leveraging ratio</i> Discussion of Board of Commissioners and Board of Directors discussion related with Company Long-Term Plan, Budget Plan 2016 Revision, Budget Plan 2017, and leveraging ratio	√	-	√
6.	28 Desember 2016 October 14, 2016	Persiapan untuk pembahasan Rapat Bulanan Dewan Komisaris dan Direksi Preparation of Board of Commissioners and Board of Directors Monthly Meeting discussion	√	√	√

Keterangan/Remarks:

LA = Luky Alfirmansyah

AS = Ayu Sukorini

I = Iskandar

Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2016, Dewan Komisaris telah melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya, sesuai dengan program kerja yang telah disusun. Atas pelaksanaan tugas ini, Dewan Komisaris telah melaporkan kepada RUPS secara triwulanan dan tahunan.

Board of Commissioners Working Report

Throughout 2016, the Board of Commissioners had carried out duties and responsibilities according to the designed working program. Regarding this duty implementation, the Board of Commissioners has reported to the GMS quarterly and annually.



Program Pengembangan Dewan Komisaris

Untuk menunjang pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris mengikuti Program Pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Dewan Komisaris yang dilaksanakan baik secara formal maupun secara informal. Di tahun 2016, para anggota Dewan Komisaris telah menghadiri dan berpartisipasi dalam berbagai pelatihan, *workshop*, konferensi, dan seminar, sebagai berikut:

Board of Commissioners Development Program

To support the duty implementation, the Board of Commissioners participated in Training Programs to develop Board of Commissioners competency that were organized as formal and non-formal programs. In 2016, the Board of Commissioners members attended and participated in various trainings, workshops, conferences and seminars, as follows:

No.	Anggota Dewan Komisaris Board of Commissioners Members	Pelatihan/Seminar/Workshop/Benchmarking Training/Seminar/Workshop/Benchmarking	Penyelenggara Organizer	Waktu Schedule & Location
1.	Iskandar	<i>Public Private Partnership for Infrastructure Development in Indonesia: Learning from Mutual Experience</i> Public Private Partnership for Infrastructure Development in Indonesia: Learning from Mutual Experience	Korean Development Institute	11-13 Maret 2016
2.	Ayu Sukorini	<i>Public Private Partnership for Infrastructure Development in Indonesia: Learning from Mutual Experience</i> Public Private Partnership for Infrastructure Development in Indonesia: Learning from Mutual Experience	Korean Development Institute	11-13 Maret 2016
3.	Luky Alfirman	<i>ASEAN Global Leadership Program</i> ASEAN Global Leadership Program	SRW and Co	8-13 Mei 2016
4.	Iskandar	<i>The IIA International Conference 2016 New York & Washington DC On-Site Learning</i> The IIA International Conference 2016 New York & Washington DCON-Site Learning	The Institute of Internal Auditor Indonesia	16-24 Juli 2016
5.	Ayu Sukorini	<i>Authentic Leadership: "Courage, Coaching, & Ethics"</i> Authentic Leadership: "Courage, Coaching, & Ethics"	Glomacs	12-16 Desember 2016

Program Pengenalan Dewan Komisaris

Bagi Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat diberikan Program Pengenalan. Penanggung jawab program berada pada Divisi *Corporate Secretary*. Mengacu pada PMK 88/2015 Pasal 71 Ayat 3, materi program pengenalan mencakup:

- a. Pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola oleh Perusahaan;
- b. Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya;
- c. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit; dan
- d. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.

Pada tahun 2016, tidak terdapat pengangkatan Anggota Dewan Komisaris baru, sehingga tidak terdapat Program Pengenalan yang diberikan.

Komisaris Independen Independent Commissioner

Hingga 31 Desember 2016, PT PII belum memiliki Komisaris Independen. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris, termasuk Komisaris Independen merupakan hak Pemegang Saham, dalam hal ini Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Board of Commissioners Orientation Program

For the newly-appointed Board of Commissioners members, they will be provided by Orientation Program. The program supervisor is Corporate Secretary Division. Referring to PMK 88/2015 Article 71 Point 3, material of the orientation program includes:

- a. Implementation of governance principles by the Company;
- b. Illustration about the Company related with objectives, nature, scope of activity, financial and operational performance, strategy, short-term and long-term business plan, competitive position, risk and other strategic issues;
- c. Information related with delegated authority, internal and external audits, internal control system and policy including the Audit Committee; and
- d. Information about duty and responsibility of the Board of Commissioners and Board of Directors as well as prohibited aspects.

In 2016, there was no appointment of new Board of Commissioners member, therefore, there was no Orientation Program provided.



Direksi Board of Directors

Direksi adalah Organ Perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Direksi bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif dalam mengelola Perusahaan. Direksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan Perusahaan agar dapat menghasilkan nilai tambah dan memastikan kesinambungan usaha.

Masing-masing anggota Direksi melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenang. Tugas, wewenang, dan hal-hal lain yang terkait dengan Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direksi dipilih dan diangkat melalui RUPS secara periodik. Setiap calon Direksi harus mengikuti *Fit and Proper Test* untuk memastikan integritas dan profesionalitas di bidangnya.

Komposisi Direksi

Pada periode tahun 2016, komposisi Direksi PT PII mengalami perubahan. Periode 1 Januari 2016 – 16 Juni 2016, komposisi Direksi PT PII mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor. 632/KMK.06/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Pengangkatan kembali Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), dengan komposisi sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Domisili Domicile	Tanggal Pertama Kali Diangkat Initial Date of Appointment	Tanggal Pengangkatan Kembali Date of Reappointment
Sinthya Roesly	Direktur Utama President Director	Jakarta Selatan South Jakarta	30 Desember 2009 December 30, 2009	31 Desember 2014* December 31, 2014*
Armand Hermawan	Direktur Keuangan & Manajemen Risiko Director of Finance & Risk Management	Jakarta Selatan South Jakarta	22 Maret 2010 March 22, 2010	31 Desember 2014* December 31, 2014*
Yadi J Ruchandi	Direktur Operasi Director of Operations	Jakarta Selatan South Jakarta	22 Maret 2010 March 22, 2010	31 Desember 2014* December 31, 2014*

* Diangkat kembali sesuai dengan KMK 632/KMK.06/2014 tentang pengangkatan Kembali Anggota Direksi Perusahaan PT PII tanggal 29 Desember 2014.

Sedangkan periode 16 Juni 2016 – 31 Desember 2016, komposisi Direksi PT PII mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan selaku Rapat Umum Pemegang Saham Nomor. KMK 465/KMK.06/2016 tanggal 16 Juni 2016 tentang

The Board of Directors is Corporate Structure who is fully responsible on the Company's management for the Company's interest and objectives in accordance with provisions in the Articles of Association. The Board of Directors is being responsible in managing the Company to generate added-value and ensure business sustainability.

Every Board of Directors member performs the duty and take decision based on segregation of duty and authority. The duty, authority and other aspects related with the Board of Directors have complied with the Articles of Association and prevailing Law.

The Board of Directors is selected and appointed in GMS periodically. Every Board of Directors candidate shall participate in Fit and Proper Test to ensure integrity and professionalism in each sector.

Board of Directors Composition

Throughout 2016 period, composition of IIGF Board of Directors was changed. For January 1, 2016 – June 16, 2016 period, IIGF Board of Directors composition referred to Minister of Finance Decree Number 632/KMK.06/2014 dated December 29, 2014 regarding Reappointment of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Board of Directors Member with composition as follows:

* Reappointed pursuant to KMK 632/KMK.06/2014 regarding Reappointment of IIGF Board of Directors Members on December 29, 2014.

However, for June 16 – 2016 – December 31, 2016 period, IIGF Board of Directors composition referred to Minister of Finance as the General Meetings of Shareholders Number KMK 465/KMK.06/2016 dated June 16, 2016 regarding Appointment and

Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), dengan komposisi sebagai berikut:

Appointment and Discharge of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Board of Directors members with composition as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Domisili Domicile	Tanggal Pertama Kali Diangkat Initial Date of Appointment	Tanggal Pengangkatan Kembali/ Berakhirnya Masa Jabatan Date of Reappointment/End of Tenure
Sinthya Roesly	Direktur Utama President Director	Jakarta Selatan South Jakarta	30 Desember 2009	31 Desember 2014*
Armand Hermawan	Direktur Keuangan & Manajemen Risiko Director of Finance & Risk Management	Jakarta Selatan South Jakarta	22 Maret 2010	31 Desember 2014*
Salusra Satria	Direktur Operasi Director of Operations	Jakarta Selatan South Jakarta	16 Juni 2016	-

* Diangkat kembali sesuai dengan KMK 632/KMK.06/2014 tentang pengangkatan Kembali Anggota Direksi Perusahaan PT PII tanggal 29 Desember 2014

* Reappointed pursuant to KMK 632/KMK.06/2014 regarding Reappointment of Board of Directors Members at IIGF dated December 29, 2014.

Pedoman Kerja Direksi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terkait operasional Perusahaan secara efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka Direksi menetapkan Tata Laksana Kerja Bagi Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) yang telah diperbarui pada Maret 2016.

Board Manual disusun berdasarkan prinsip-prinsip hukum korporasi, ketentuan Anggaran Dasar, peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, arahan pemegang saham serta *best practices* GCG.

Isi dari *Board Manual* yang berhubungan dengan Direksi adalah sebagai berikut:

DIREKSI

1. Organisasi
2. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Dewan Komisaris
 - 2.1 Tugas Direksi
 - 2.2 Wewenang Direksi
 - 2.3 Kewajiban Direksi
3. Pembagian Kerja dan Organ Pendukung Direksi
4. Rapat Direksi
5. Pengambilan Keputusan Direksi
6. Penilaian Kinerja Direksi
7. Organ Pendukung Direksi
 - 7.1 Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)
 - 7.2 Satuan Pengawas Internal (*Internal Auditor*)

Board Manual for Board of Directors

In carrying out duty and responsibility related with the Company's operations effectively, transparently and accountable, the Board of Directors has stipulated Board Manual for Board of Commissioners and Board of Directors that is revised in March 2016.

The Board Manual is based on the principles of corporate law, the provisions of the Articles of Association, the applicable laws and regulations, the direction from the Shareholders and GCG best practices.

Contents of the Board Manual are as follows:

BOARD OF DIRECTORS

1. Organizations
2. Task, Authorities and Duties of the Board of Directors
 - 2.1 Tasks of Directors
 - 2.2 Authorities of Directors
 - 2.3 Duties of Directors
3. Segregation of Duties and Supporting Structure
4. The Board of Directors' Meetings
5. The Board of Directors' Decision-Making
6. Assessment of Directors' Performance
7. Board of Directors' Supporting Organs
 - 7.1 Corporate Secretary
 - 7.2 Internal Audit Unit (Internal Auditor)



8. Pengelolaan Risiko
9. Sistem Pengendalian Internal
10. Pelaporan
11. Penilaian, Evaluasi, dan Pelaporan Tata Kelola Perusahaan

Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi

Tugas Direksi:

1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau pembatasan-pembatasan atau arahan-arahan lebih lanjut yang disepakati oleh Pemegang Saham berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Direksi harus melaksanakan tugasnya dengan itikad baik untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan, serta memastikan agar Perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosialnya serta memperhatikan kepentingan dari berbagai Pemangku Kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Direksi harus menyampaikan informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris di anak Perusahaan/Perusahaan patungan dan/atau Perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat intern maupun rapat gabungan dengan Dewan Komisaris), serta gaji, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari Perusahaan yang bersangkutan dan anak Perusahaan/Perusahaan patungan Perusahaan yang bersangkutan, untuk dimuat dalam Laporan Tahunan Perusahaan.

Wewenang Direksi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direksi berwenang untuk:

1. Menetapkan kebijakan pengurusan Perusahaan;
2. mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seseorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan;

8. Risk Management
9. Internal Control System
10. Reporting
11. Assessment, Evaluation, and Reporting of Corporate Governance Implementation

Board of Directors Duty, Authority and Responsibility

Board of Directors' Duties:

1. Board of Directors is in charge to perform every action related with the Company's management for the Company's interest according to purpose and objectives of the Company as well as representing the Company both on and off the Court in the course of every issue and case with limitation as regulated in the Law, Articles of Association and/or General Meetings of Shareholders Resolutions.
2. The Board of Directors shall carry out their duties with good will for the Company's interest and according to purpose and objectives of the Company, as well as to ensure that the Company has implemented its social responsibility and considered interests of various Stakeholders according to the prevailing Law.
3. The Board of Directors shall deliver information about their identity, main jobs, position as Board of Commissioners at subsidiaries/Joint Ventures and/or other Companies, including the meetings that were held in one fiscal year (internal and Management Meetings with the Board of Commissioners), as well as salary, facility and/or other allowances from the Company and Subsidiary/Joint Venture to be disclosed in the Annual Report.

Board of Directors Authority

In carrying out the duties, the Board of Directors holds authorities as follows:

1. To stipulate Company Managerial Policy.
2. To manage delegation of authority from the Board of Directors to one or more Board of Directors members to take decision on behalf of the Board of Directors or represent the Company on and off the Court;

3. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seseorang atau beberapa orang pekerja Perusahaan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan;	3. To manage delegation of authority from the Board of Directors to one or more employees both individually or collectively or to other parties, to represent the Company on and off the Court;
4. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perusahaan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja yang melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham;	4. To regulate provisions on employment including stipulation of salary, pension or retirement benefit as well as other remuneration for employee in compliance with the prevailing Law, with policy on the salary, pension or retirement benefit and other remuneration package for the employee that exceeding their obligation as stipulated in the Law and regulation shall be prior approved by the General Meetings of Shareholders;
5. Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perusahaan berdasarkan peraturan kepegawaian Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;	5. To appoint and terminate the employees in accordance with employment regulation and other prevailing Law;
6. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan; dan	6. To appoint and discharge the Corporate Secretary; and
7. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perusahaan, mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.	7. To perform other actions and initiatives regarding the managerial and ownership of the Company's assets, binding the Company with other parties and/or vice versa, as well as to represent the Company on and off the Court in the course of every issue and case with limitation as regulated in the Law, Articles of Association and/or General Meetings of Shareholders Resolutions.

Kewajiban Direksi

Direksi berkewajiban untuk:

1. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya.
2. Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, dan perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham.

Selain itu, Direksi juga wajib mengungkapkan:

1. Kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perusahaan dan Perusahaan lain, baik yang berkedudukan di dalam maupun luar negeri beserta perubahannya; dan/atau

Board of Directors' Obligation

Board of Directors has obligations as follows:

1. Seeks and guarantee implementation of Company's business and activity according to its purpose and objectives as well as line of business.
2. Prepare the Company Long-Term Plan, Budget Plan altogether with every revision on time and submit to the Board of Commissioners and Shareholders to be approved by the General Meetings of Shareholders.

In addition, the Board of Directors shall also disclose:

1. Shares ownership of the members and/or their families in the Company and other Companies that are located domestic and overseas, altogether with every change; and/or



2. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain dalam Laporan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 88/PMK.06/2015.

Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direktur Utama

Bertanggung jawab untuk memimpin Direksi, mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi-fungsi Direksi, dan memberikan arahan kepada anggota Direksi lain mengenai masalah-masalah yang dibahas dalam rapat-rapat Direksi.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko

Bertanggung jawab atas pengelolaan dana, *pricing* dan pemrosesan klaim, treasury dan akuntansi, pengelolaan sumber daya manusia, serta aspek administrasi dan umum sebagai fungsi pendukung bagi aktivitas operasional sehari-hari Perusahaan.

Direktur Operasi

Bertanggung jawab atas aktivitas bisnis Perusahaan, termasuk aktivitas pengembangan usaha, konsultasi dan pendampingan kepada PJP dan pihak swasta serta melakukan *appraisal* proyek.

Rangkap Jabatan Direksi

Seluruh anggota Direksi PT PII tidak memiliki jabatan di perusahaan lain.

Kepemilikan Saham Direksi

Saham PT PII sepenuhnya dimiliki oleh Kementerian Keuangan Negara Republik Indonesia. Tidak ada anggota Direksi yang memiliki saham di PT PII.

Independensi Direksi

Direksi ditetapkan untuk menjalankan segala tindakan pengurusan Perusahaan atau hubungan dengan pihak lain secara independen tanpa campur tangan pihak-pihak lain atau yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan yang secara material dapat mengganggu keobyektifan dan kemandirian tugas Direksi yang dijalankan semata-mata untuk kepentingan Perusahaan. Sampai

2. Financial and/or family affiliation with other members of Board of Directors in Good Corporate Governance Report as regulated in Minister of Finance Regulation Number 88/PMK.06/2015.

Segregation of Duty and Responsibility of Board of Directors

President Director

Responsible for leading the Directors, coordinating the execution of Directors' functions, and issuing instructions to the other Directors regarding the issues discussed in Board of Directors' meetings.

Director of Finance and Risk Management

Responsible for fund management, pricing and claims processes, treasury and accounting, human resources management, as well as administrative and general aspects in support of the Company's daily activities.

Director of Operations

Responsible for the Company's business activities, including business development, consultation and guidance for the Contracting Agency and the private sector, as well as project appraisal.

Board of Directors Dual Position

All of Board of Directors members at IIGF do not serve in other companies.

Board of Directors Shares Ownership

Shares of IIGF are fully owned by Ministry of Finance Republic of Indonesia. There is no Board of Directors member with shares ownership of IIGF.

Board of Directors Independency

The Board of Directors is regulated to exercise every managerial action in the Company or other relationship with other parties independently without intervention from other parties or violation against the Law and Articles of Association that has material impact towards objectiveness and independency of the Board of Directors duty that are exercised solely for the Company's interest. During the reporting period, according

periode pelaporan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan bahwa antar anggota Direksi serta antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Rapat Direksi

Rapat Direksi dapat diselenggarakan setiap saat apabila dianggap perlu oleh salah seorang anggota Direksi, atas permintaan Dewan Komisaris, atau atas permintaan sirkuler pemegang saham Perusahaan. Selama tahun 2016, Direksi menyelenggarakan rapat sebanyak 24 kali. Adapun tingkat kehadiran Direksi dalam rapat adalah sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Total Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	% Kehadiran % Attendance
Sinthya Roesly	Direktur Utama President Director	24	24	100%
Armand Hermawan	Direktur Keuangan & Manajemen Risiko Director of Finance & Risk Management	24	24	100%
Salusra Satria*	Direktur Operasi Director of Operations	18	18	100%
Yadi J Ruchandj**	Direktur Operasi Director of Operations	7	7	100%

*) menjabat sejak 16 Juni 2016

**) menjabat hingga 16 Juni 2016

to the Articles of Association, among the Board of Directors members and between the Board of Directors and Board of Commissioners members are not having family affiliation until third degree both vertically and horizontally as well as relationship due to marriage.

Board of Directors Meeting

Board of Directors Meeting is held anytime if considered necessary by a Board of Directors member as requested by the Board of Commissioners or circular shareholders aspiration. Throughout 2016, the Board of Directors held 24 meetings. Board of Directors attendance level in the meeting is as follows:

*) Serving since June 2016

**) Serving until June 16, 2016

Adapun agenda rapat Direksi adalah sebagai berikut:

Agenda of the Board of Directors meeting are as follows:

No.	Tanggal Date	Agenda Agenda	Kehadiran/Attendance			
			SR	AH	SS	YJR
1.	29 Januari 2016 January 29, 2016	Pre-IPA Proyek KPBU Jalan Tol Manado Bitung, Balikpapan Samarinda, dan Pandaan Malang Pre-IPA of Manado Bitung, Balikpapan Samarinda and Pandaan Malang Toll Road PPP Projects	√	√	-	√
2.	24 Februari 2016 February 24, 2016	Persetujuan Direksi untuk Penerbitan IPA Proyek KPBU Jalan Tol Manado Bitung, Balikpapan Samarinda, dan Pandaan Malang Board of Directors Approval for Issuance of IPA for Manado Bitung, Balikpapan Samarinda and Pandaan Malang Toll Road PPP Projects	√	√	-	√
3.	25 April 2016 April 25, 2016	Persetujuan Direksi untuk Penandatanganan Perjanjian Penjaminan Proyek KPBU Jalan Tol Batang Semarang Board of Directors Approval on Batang Semarang Toll Road PPP Project Guarantee MOU Signing	√	√	-	√
4.	May 4, 2016	Update Proyek Palapa Ring Paket Timur/Palapa Ring East Package Project Update	√	√	-	√



No.	Tanggal Date	Agenda Agenda	Kehadiran/Attendance			
			SR	AH	SS	YJR
5.	9 Mei 2016 May 9, 2016	Persetujuan Direksi untuk <i>Consent</i> atas Amandemen Perjanjian dan Dokumen untuk <i>Financial Close</i> Proyek PLTU Jawa Tengah Board of Directors Approval on <i>Consent</i> of Contract and Agreement Amendment for Central Java Steam Power Plant Project	√	√	-	√
6.	18 Mei 2016 May 18, 2016	Persetujuan Direksi untuk Penerbitan <i>IPA</i> Proyek Palapa Ring Paket Timur Board of Directors Approval on Issuance of <i>IPA</i> for Palapa Ring East Package Project	√	√	-	√
7.	31 Mei 2016 May 31, 2016	Persetujuan Direksi untuk Penandatanganan Perjanjian Penjaminan Proyek KPBU Jalan Tol Manado Bitung, Balikpapan Samarinda, dan Pandaan Malang Board of Directors Approval on Manado Bitung, Balikpapan Samarinda, and Pandaan Malang Toll Road PPP Projects Guarantee MOU Signing.	√	√	-	√
8.	14 Juli 2016 July 14, 2016	Persetujuan Direksi untuk Penerbitan <i>BOD Resolution</i> dan Persiapan Penandatanganan Perjanjian Penjaminan Proyek KPBU SPAM Umbulan Board of Directors Approval on Issuance of <i>BOD Resolution</i> and Preparation of SPAM Umbulan PPP Project Guarantee MOU Signing	√	√	√	-
9.	22 Juli 2016 July 22, 2016	Permohonan <i>Waiver Consent</i> Direksi atas Perjanjian Kerja sama Palapa Ring Paket Barat Waiver Consent Proposal from Board of Directors on Palapa Ring West Package MOU	√	√	√	-
10.	28 Juli 2016 July 28, 2016	Laporan Manajemen Bulan Juni 2016 Management Report as of June 2016	√	√	√	-
11.	10 Agustus 2016 August 10, 2016	Amandemen Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) Proyek Jalan Tol Batang-Semarang Amendment of Toll Road Concession Contract (PPJT) for Batang- Semarang Toll Road Project	√	√	√	-
12.	19 Agustus 2016 August 19, 2016	Laporan Manajemen Bulan Juli 2016 Management Report as of July 2016	√	√	√	-
13.	23 Agustus 2016 August 23, 2016	Pembahasan empat Proyek Jalan Tol yaitu Serang-Panimbang, Cileunyi-Sumedang-Dawuan, Krian Legundi Bunder Manyar, dan Jakarta-Cikampek II (<i>Elevated</i>) Discussion of four Toll Road Projects, Serang-Panimbang, Cileunyi-Sumedang-Dawuan, Krian Legundi Bunder Manyar, and Jakarta-Cikampek II (<i>Elevated</i>)	√	√	√	-
14.	5 September 2016 September 5, 2016	Persetujuan Direksi untuk Amandemen 1 PPJT Proyek Tol Batang-Semarang Board of Directors Approval on 1 st Amendment of PPJT Batang-Semarang Toll Road Project	√	√	√	-
15.	13 September 2016 September 13, 2016	Persetujuan Direksi atas Peningkatan Biaya Investasi dan Penundaan Persyaratan Pendahuluan Proyek Palapa Ring Tengah Board of Directors Approval on Increasing Investment Expense and Postpone of Pala Central Ring Project Initial Requirement	√	√	√	-

No.	Tanggal Date	Agenda Agenda	Kehadiran/Attendance			
			SR	AH	SS	YJR
16.	14 September 2016 September 14, 2016	<i>Pre-IPA Meeting-Update</i> Lanjutan Proyek KPBU Krian Legundi Bunder Manyar, dan Jakarta Cikampek II (<i>Elevated</i>) Pre-IPA Meeting-Update of Continuation of Krian Legundi Bunder Manyar and Jakarta Cikampek II PPP Project (Elevated)	√	√	√	-
17.	16 September 2016 September 16, 2016	<i>Pre-IPA Meeting-Penetapan Pricing</i> Proyek Tol Krian Legundi Bunder Manyar, dan Jakarta Cikampek II (<i>Elevated</i>) Pre-IPA Meeting – Stipulation of Krian Legundi Bunder Manyar and Jakarta Cikampek II Toll Road Pricing Set-Up (Elevated)	√	√	√	-
18.	21 September 2016 September 21, 2016	Persetujuan Direksi atas Penandatanganan Perjanjian Penjaminan Proyek Palapa Ring Paket Timur Board of Directors Approval on Palapa Ring East Package Project MOU Signing	√	√	√	-
19.	26 September 2016 September 21, 2016	Laporan Manajemen Bulan Agustus 2016 Management Report as of August 2016	√	√	√	-
20.	5 Oktober 2016 October 5, 2016	<i>Pre-IPA Meeting Update</i> Lanjutan Proses Appraisal Proyek Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan, dan Serang Panimbang Pre-IPA Meeting Update on Continuation of Cileunyi-Sumedang-Dawuan and Serang Panimbang Toll Road Project Appraisal Process	√	√	√	-
21.	14 Oktober 2016 October 14, 2016	<i>Pipeline Project 2017</i> dan RKAP 2017 Pipeline Project 2017 and Budget Plan 2017	√	√	√	-
22.	27 Oktober 2016 October 27, 2016	Laporan Manajemen Bulan September 2016 Management Report as of September 2016	√	√	√	-
23.	11 November 2016 November 11, 2016	Pembahasan Perubahan Anggaran Dasar Setelah Diundangkannya PP 50 tahun 2016 Discussion of Articles of Association Amendment after Enactment of PP 50 of 2016	√	√	√	-
24.	25 November 2016 November 25, 2016	Laporan Manajemen Bulan Oktober 2016 Management Report as of October 2016	√	√	√	-
25.	27 Desember 2016 December 27, 2016	Laporan Manajemen Bulan November 2016 Management Report as of November 2016	√	√	√	-

Keterangan/Remarks:

SR = Sinthya Roesly
AH = Armand Hermawan
YJR = Yadi J Ruchandi
SS = Salusra Satria

Pelatihan Direksi

Untuk menunjang pelaksanaan tugasnya, Direksi PT PII mengikuti program pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi Direksi yang dilaksanakan baik secara formal maupun secara informal. Di tahun 2016, Direksi PT PII

Board of Directors Training

To support the duty implementation, IIGF Board of Directors participated in training program to develop Board of Directors competency in formal and non formal programs. In 2016, IIGF



telah mengikuti berbagai pelatihan, *workshop*, konferensi, dan seminar, sebagai berikut:

Board of Directors had participated in various trainings, workshops, conferences and seminars, as follows:

No.	Nama Name	Judul Pelatihan Training Name	Penyelenggara Organizer	Tanggal & Tempat Schedule & Location
1.	Armand Hermawan	<i>Making Strategy Work Program</i> Making Strategy Work Program	Wharton Executive Education	Amerika, 11-15 Maret 2016 United States, March 11 – 15, 2016
2.	Salusra Satria	<i>World Bank – Singapore Infrastructure Finance Summit 2016</i> World Bank – Singapore Infrastructure Finance Summit 2016	World Bank	Singapura, 17 Oktober 2016 Singapore, October 17, 2016
3.	Salusra Satria	<i>PPP Implementation Capacity Development</i> PPP Implementation Capacity Development	JICA	Jepang, 27 Okt - 2 Nov 2016 Japan, 27 Oct - 2 Nov 2016
4.	Salusra Satria	<i>RSM Diploma Programme in Business Management and Leadership</i> RSM Diploma Programme in Business Management and Leadership	Erasmus Executive Education	Belanda, 28 Nov - 9 Des 2016 Netherland, 28 Nov - 9 Dec 2016

Kebijakan Suksesi Direksi

Hingga 31 Desember 2016, PT PII belum memiliki kebijakan khusus terkait suksesi Direksi. Uraian suksesi Direksi telah diatur pada PMK Nomor. 78/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan (Persero) di bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan.

Program Pengenalan Direksi

Atas pengangkatan Bapak Salusra Satria sebagai Direktur Operasi, Direksi melalui Sekretaris Perusahaan mengadakan program pengenalan Perusahaan sesuai dengan ketentuan pasal 71 PMK Nomor. 88/PMK.06/2015 pada tanggal 22 Juli 2016.

Board of Directors Succession Policy

As of December 31, 2016, IIGF had not formulated particular policy on Board of Directors succession. Disclosure of Board of Directors succession is regulated in PMK Number 78/PMK.06/2015 regarding Board of of Directors Appointment and Dischard Mechansim in Perusahaan (Persero) under Development and Supervision of Minister of Finance.

Board of Directors Orientation Program

In the course of Mr. Salusra Satria appointment as Director of Operations, via the Corporate Secretary, the Board of Directors held Orientation Program according to provisions in Article 71 of PMK Number 88/PMK.06/2015 on July 22, 2016.

Mekanisme dan Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Board of Commissioners and Board of Directors Remuneration Mechanism and Structure

Mekanisme Penetapan Remunerasi

Besaran remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan usulan yang disampaikan oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Beberapa hal yang menjadi dasar dalam penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi antara lain:

1. Kinerja keuangan dan pencapaian *Key Performance Indicator (KPI)* Perusahaan.
2. Prestasi kerja individu.
3. Kewajaran dengan perusahaan lainnya.
4. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Perusahaan.

Berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Perusahaan Terbatas Nomor. 40 tahun 2007 yang mengatur besarnya gaji dan tunjangan Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Kewenangan tersebut berdasarkan Pasal 96 ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Bentuk tunjangan dan fasilitas, serta komponen lain yang termasuk di dalam komponen penghasilan (selain gaji) ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor. PER-07/MBU/2010 tanggal 27 Desember 2010 tanggal tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN dan Peraturan Menteri BUMN Nomor. PER-04/MBU/2013 tanggal 19 April 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor. PER-07/MBU/2010.

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi PT PII telah mengikuti ketentuan tersebut.

Perusahaan memberikan remunerasi dan fasilitas untuk keperluan tugas operasional Dewan Komisaris dan Direksi.

Remuneration Procedure Mechanism

Amount of Board of Commissioners and Board of Directors remuneration is stipulated by the GMS by considering recommendation from the Board of Commissioners and Board of Directors. Some of the consideration of the Board of Commissioners and Board of Directors remuneration procedure are among others:

1. Financial Performance and Key Performance Indicators (KPI) of the Company.
2. Individual Working Achievement.
3. Fairness with other companies.
4. Considering the Company's long-term target and strategy.

According to Article 96 point (1) Limited Liability Company Law Number 40 of 2007 that regulates amount of salary and allowance for the Board of Directors, the amount is stipulated based on GMS resolutions. The authority refers to Article 96 point (2) and may be delegated to the Board of Commissioners.

Board of Commissioners and Board of Directors Remuneration Structure

Type of allowance and facilities as well as other components that are included in the (non-salary remuneration component) is stipulated by referring to provisions as regulated in Minister of SOE Regulation Number PER-07/MBU/2010 dated December 27, 2010 regarding Guideline for Board of Directors, Board of Commissioners and Supervisory Board Remuneration Package in SOE and Minister of SOE Regulation Number Per-04/MBU/2013 dated April 19, 2013 as Amendment of Minister of SOE Regulation Number PER-07/MBU/2010.

IIGF Board of Commissioners and Board of Directors Remuneration has complied with the regulation.

The Company provides remuneration and facilities for the Board of Commissioners and Board of Directors operational duty requirement.



Hubungan Afiliasi Antara Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali

Affiliation Among Board of Commissioners, Board of Directors and Controlling Shareholders

Nama Name	Hubungan Keuangan Dengan Financial Affiliation With						Hubungan Keluarga Dengan Family Affiliation With					
	Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholders		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholders	
	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Dewan Komisaris												
Luky Alfirman		X		X		X		X		X		X
Ayu Sukorini		X		X		X		X		X		X
Iskandar		X		X		X		X		X		X
Direksi												
Sinthya Roesly		X		X		X		X		X		X
Armand Hermawan		X		X		X		X		X		X
Salusra Satria		X		X		X		X		X		X

Penjelasan tabel:

Table Explanation:

1. Tidak ada anggota Dewan Komisaris yang memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan Pemegang Saham Pengendali.
2. Tidak ada anggota Dewan Komisaris yang memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan Pemegang Saham Pengendali.
3. Tidak ada anggota Direksi yang memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali.
4. Tidak ada anggota Direksi yang memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali.

1. There is no Board of Commissioners member with family affiliation with other members of Board of Commissioners, Board of Directors and Controlling Shareholders.
2. There is no Board of Commissioners members with financial affiliation with other members of Board of Commissioners, Board of Directors and Controlling Shareholders.
3. There is no Board of Commissioners members with family affiliation with other members of Board of Directors, Board of Commissioners and Controlling Shareholders.
4. There is no Board of Directors Members with financial affiliation with other members of Board of Directors, Board of Commissioners and Controlling Shareholders.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

Board of Commissioners and Board of Directors Performance Assessment

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Sesuai dengan isi *Board Manual* PT PII, pedoman penilaian kinerja Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Indikator Pencapaian Kinerja merupakan ukuran penilaian atas keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar.
2. Indikator Pencapaian Kinerja Dewan Komisaris ditetapkan RUPS setiap tahun berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris.
3. Laporan perkembangan realisasi Indikator Pencapaian Kinerja disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada para Pemegang Saham.

Penilaian Kinerja Direksi

Sesuai dengan isi *Board Manual* PT PII, pedoman penilaian kinerja Direksi adalah sebagai berikut:

1. Indikator Pencapaian Kinerja merupakan ukuran penilaian atas keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar.
2. Indikator Pencapaian Kinerja Direksi ditetapkan oleh RUPS setiap tahun berdasarkan usulan dari Direksi.
3. Laporan perkembangan realisasi Indikator Pencapaian Kinerja disampaikan oleh Direksi kepada RUPS.

Board of Commissioners Performance Assessment

According to contents of IIGF Board Manual, the Board of Commissioners performance assessment procedure is as follows:

1. Key Performance Indicators are measurement of the Board of Commissioners supervisory and advisory duty and responsibility implementation achievement according to the Law and/or Articles of Association.
2. Board of Commissioners Key Performance Indicators are formulated by the GMS in every year based on recommendation from the Board of Commissioners.
3. Key Performance Indicators Realization progress report is submitted by the Board of Commissioners to the GMS.

Board of Directors Performance

According to contents of IIGF Board Manual, Board of Directors performance assessment procedure is as follows:

1. Key Performance Indicators are measurement of the Board of Directors duty and responsibility implementation achievement according to the Law and/or Articles of Association.
2. Board of Directors Key Performance Indicators are formulated by the GMS in every year based on recommendation from the Board of Directors.
3. Key Performance Indicators Realization progress report is submitted by the Board of Directors to the GMS.



Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Diversity of Board of Commissioners and Board of Directors Composition

Hingga 31 Desember 2016, PT PII belum memiliki kebijakan khusus terkait keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi, selain karena pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi merupakan wewenang Pemegang Saham, juga disebabkan dasar pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah kompetensi dan kebutuhan Perusahaan.

As of December 31, 2016, IIGF had not formulated particular policy regarding Board of Commissioners and Board of Directors composition, this considered not only the Board of Commissioners and Board of Directors members appointment is authority of the Shareholders, but also considering the competency and Company's requirement in the Board of Commissioners and Board of Directors members appointment.

Namun demikian, komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT PII saat ini sudah memiliki komposisi yang beragam, baik dari pendidikan, pengalaman kerja, usia, dan jenis kelamin, sebagai berikut:

However, composition of IIGF Board of Commissioners and Board of Directors members currently has various composition in terms of education, career experience, age and gender, as explained below:

No.	Nama Name	Usia Age	Jenis Kelamin Gender	Pendidikan Education	Latar Belakang Pengalaman Kerja Career History and Background
1.	Luky Alfirman	46	Laki-Laki Male	a. Doktor (Ph.D.) in Economics, University of Colorado b. Master of Arts in Economics, University of Colorado, Boulder, AS c. Sarjana Teknik Industri, Institut Teknologi Bandung	Luky Alfirman memulai karirnya di Kementerian Keuangan sejak tahun 1995 dan memiliki keahlian di bidang Kebijakan Ekonomi Makro. Beliau telah mengikuti berbagai pelatihan dan pendidikan lanjutan dalam bidang Perpajakan, Manajemen Risiko, <i>Good Governance</i> dan <i>Leadership</i>, yang diselenggarakan berbagai institusi ternama di dunia. Luky Alfirman started his career at Ministry of Finance since 1995 and Expert in Macroeconomics Policy. He had participated in various trainings and advance course in Taxation, Risk Management, Good Governance and Leadership, that were organized by various reputable institutions worldwide.
2.	Ayu Sukorini	49	Perempuan Female	a. Master of Arts in Economics, University of Colorado, Denver, AS. b. Sarjana Ekonomi, Universitas Satya Wacana a. Master of Arts in Economics, University of Colorado, Denver, AS. b. Bachelor Degree of Economy, Universitas Satya Wacana	Ayu Sukorini telah bertugas selama hampir 22 tahun di Kementerian Keuangan dan memiliki keahlian dan pengalaman di bidang Pengelolaan Utang Negara terutama pada bidang Perencanaan dan Penyusunan Kebijakan. Ayu Sukorini has been in charge for almost 22 years at Ministry of Finance and Expert in State Debt Management, especially in Policy Planning and Formulation.
3.	Iskandar	62	Laki-Laki Male	a. Sarjana Ekonomi Universitas Sriwijaya, Palembang a. Bachelor Degree of Economy, Universitas Sriwijaya, Palembang	Iskandar telah berkecimpung di bidang keuangan negara dan memiliki keahlian di bidang Perbendaharaan setelah sebelumnya bertugas di Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Iskandar has involved in state finance sector and Expert in Treasury after working at General Directorate of Budget and General Directorate of Treasury, Ministry of Finance.

No.	Nama Name	Usia Age	Jenis Kelamin Gender	Pendidikan Education	Latar Belakang Pengalaman Kerja Career History and Background
1.	Sinthya Roesly	46	Perempuan Female	a. <i>Master of Management</i>, IPMI International Business School b. <i>Master of Business Administration</i>, Monash University, Australia c. <i>Master of Engineering Science in Power Systems</i>, University of New South Wales, Australia d. Sarjana Teknik Elektro, Universitas Indonesia	Sinthya Roesly memiliki keahlian dan pengalaman dalam bidang perencanaan dan manajemen keuangan di bidang ketenagalistrikan. Pengalaman selama lebih dari 16 tahun di PLN juga membuatnya ahli di bidang operasi sistem tenaga listrik dan transmisi maupun konstruksi proyek. Selama di PLN beliau juga sempat terlibat secara penuh dalam mendapatkan pembiayaan untuk proyek-proyek PLN baik dari lembaga multilateral dan bilateral. Sinthya Roesly is Expert and well-experienced in financial planning and management in electricity sector. She holds more than 16 years of experience at PLN that developed her into an Expert in electricity power system operations and transmission as well as project construction. During her career at PLN, she was also fully involved in acquiring financing for PLN projects from multilateral and bilateral organizations.
2.	Armand Hermawan	47	Laki-laki Male	a. <i>Ph.D. in Financial Management</i>, University of Newcastle, Australia b. <i>Master of Commerce and Management (MCM) in Financial Econometrics</i>, University of Lincoln, NZ c. S1 Akuntansi, Universitas Padjadjaran	Armand Hermawan berpengalaman dalam hal manajemen keuangan dengan pengalaman pada berbagai transaksi keuangan perusahaan mulai dari merger dan akuisisi, IPO, sampai penerbitan obligasi syariah. Beliau juga seorang Chartered Accountant (CA) dan <i>Certified Management Accountant (CMA)</i>. Armand Hermawan is well-experienced in Finance Management and corporate finance transactions starting from merger and acquisition, IPO until the issuance of Syariah Bonds. He is also a Chartered Accountant (CA) and Certified Management Accountant (CMA).



No.	Nama Name	Usia Age	Jenis Kelamin Gender	Pendidikan Education	Latar Belakang Pengalaman Kerja Career History and Background
3.	Salusra Satria	52	Laki-laki Male	a. <i>Master of Finance</i>, Macquarie University, Sydney, Australia b. Sarjana Ekonomi, Universitas Indonesia	Salusra Satria memiliki pengalaman yang luas di bidang keuangan dan asuransi baik di dalam maupun luar negeri. Beliau juga memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luas di bidang Manajemen Risiko.
				a. Master of Finance, Macquarie University, Sydney, Australia b. Bachelor Degree of Economy, Universitas Indonesia	Salusra Satria has broad experience in national and international Finance and Insurance sectors. He also holds extensive experience in Risk Management.
4.	Yadi J. Ruchandi*	44	Laki-laki Male	a. <i>Master of Business Administration</i>, Thunderbird-American Graduate School of International Management, USA b. Sarjana Teknik Mesin	Yadi J. Ruchandi memiliki pengalaman yang luas di bidang keuangan dan investasi perbankan mulai dari <i>merger and acquisition</i> , negosiasi dan restrukturisasi hutang korporat, <i>business turnaround</i> dan pengembangan proyek. Beliau juga pernah bekerja di berbagai perusahaan dan organisasi terkemuka seperti Bank American-Express dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional Bank Indonesia.
				a. Master of Business Administration, Thunderbird-American Graduate School of International Management, USA b. Bachelor Degree of Mechanical Engineering	Yadi J. Ruchandi has broad experience in Finance and Banking Investment starting from merger and acquisition, negotiation and corporate debts restructuring, business turnaround and project development. Previously, He also worked in various reputable companies and organizations such as Bank American-Express and National Banking Restructuring Agency, Bank Indonesia.

*) menjabat hingga 16 Juni 2016.

*) serving until June 16, 2016.

Komite Audit

Audit Committee

Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Komite Audit bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

Dasar Pembentukan Komite Audit

Pembentukan Komite Audit di PT PII merupakan bagian integral dari upaya PT PII menerapkan *good corporate governance*. Dalam implementasi GCG, peran dan fungsi Komite Audit menjadi sangat strategis untuk membantu dan meningkatkan peran Dewan Komisaris untuk menjalankan fungsi pengawasannya.

Adapun yang menjadi landasan pembentukan Komite Audit di PT PII adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 88/PMK.06/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan

Piagam Komite Audit

Agar Komite Audit dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya mempunyai acuan kerja yang jelas dan Komite Audit dapat bekerja secara independen, obyektif, mandiri, dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan, maka Dewan Komisaris telah menetapkan Piagam Komite Audit.

Adapun isi Piagam Komite Audit PT PII adalah sebagai berikut:

1. Pendahuluan
 - A. Latar Belakang
 - B. Visi dan Misi
 - C. Maksud dan Tujuan

Audit Committee is established by the Board of Commissioners to work collectively and hold function to help the Board of Commissioners in carrying out the duties. Audit Committee is independent both in the duty implementation and repoting as well as responsible directly to the Board of Commissioners.

Basis of Audit Committee Establishment

Establishment of Audit Committee at IIGF is part of integrated part and effort of IIGF to implement good corporate governance. In the GCG implementation, role and function of the Audit Committee are very strategic to help and improve role of Board of Commissioners to carry out the supervisory function.

Legal frameworks of Audit Committee establishment at IIGF are including:

1. Law Number 19 of 2003 on State-Owned Enterprise.
2. Government Regulation Number 45 of 2005 regarding Establishment, Management, Supervision and Dimissal of State-Owned Enterprise.
3. Minister of Finance Regulation Number 88/PMK.06/2015 regarding Good Corporate Governance Implementation in Perusahaan Perseroan (Persero) Under Development and Supervision of Minister of Finance.

Audit Committee Charter

In order to support Audit Committee in implementing its duty and responsibility and has accountable working guideline and Audit Committee to work independently, objectively, independently, and transparently as well as accountable according to prevailing Law to be accepted by all interested parties, the Board of Commissioners has stipulated Audit Committee Charter.

Contents of IIGF Audit Committee Charter are as follows:

1. Introduction
 - A. Background
 - B. Vision and Mission
 - C. Purpose and Objectives



2. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang
 - A. Tugas
 - B. Tugas Terkait Dengan Auditor Internal, Auditor Eksternal, dan Pelaporan Keuangan
 - C. Tanggung Jawab
 - D. Wewenang
3. Struktur, Persyaratan Keanggotaan dan Masa Jabatan
 - A. Struktur Organisasi
 - B. Struktur Keanggotaan
 - C. Persyaratan Keanggotaan
 - D. Masa Jabatan
4. Tata Kerja dan Prosedur Kerja
 - A. Program Kerja Tahunan
 - B. Rapat
 - C. Pelaporan
 - D. Evaluasi Kinerja
 - E. Program Pengenalan Anggota Baru
5. Penganggaran dan Pembiayaan
 - A. Penganggaran
 - B. Pembiayaan

6. Penutup

Struktur Keanggotaan Komite Audit

Sesuai dengan isi Piagam Komite Audit PT PII, struktur keanggotaan Komite Audit PT PII adalah sebagai berikut:

1. Komite Audit paling kurang terdiri dari tiga anggota.
2. Anggota Komite Audit dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris atau dari luar Perusahaan.
3. Seorang atau lebih anggota Komite Audit harus berasal dari anggota Dewan Komisaris dan maksimal dua anggota lainnya merupakan pihak luar Perusahaan.
4. Ketua Komite Audit adalah anggota Komite Audit yang merupakan anggota Dewan Komisaris.

2. Duty, Responsibility, and Authority
 - A. Duty
 - B. Duty Related with Internal Auditor, External Auditor and Financial Reporting
 - C. Responsibility
 - D. Authority
3. Structure, Membership Requirement, and Serving Period
 - A. Organization Structure
 - B. Membership Structure
 - C. Membership Requirement
 - D. Serving Period
4. Working Procedure and Mechanism
 - A. Annual Working Program
 - B. Meeting
 - C. Reporting
 - D. Performance Evaluation
 - E. New Member Orientation Program
5. Budget and Financing
 - A. Budget
 - B. Financing

6. Closing

Audit Committee Membership Structure

According to contents of IIGF Audit Committee Charter, membership structure of IIGF Audit Committee membership is as follows:

1. Audit Committee shall consists of minimum three members.
2. Audit Committee members may be appointed from Board of Commissioners members or external party of the Company.
3. One or more Audit Committee members shall be appointed from Board of Commissioners member and maximum other two members are appointed from the Company's external party.
4. Chairman of Audit Committee is a member of Audit Committee as also Board of Commissioners member.

Persyaratan Keanggotaan

1. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Anggota Komite Audit harus memenuhi persyaratan:
 - a. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan.
 - b. Tidak memiliki kepentingan keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan terhadap PT PII.
 - c. Mampu berkomunikasi secara efektif.
 - d. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
 - e. Memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan, proses audit, manajemen risiko, dan memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bidang kegiatan Perusahaan.
3. Salah seorang anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan atau memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan dan memahami manajemen risiko, dan salah seorang harus memahami industri dan bisnis PT PII.
4. Anggota Komite Audit yang berasal dari luar PT PII dilarang mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat tiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping dengan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.
5. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberi jasa attestasi, jasa non-attestasi dan/atau jasa konsultasi lain kepada PT PII dalam waktu enam bulan terakhir.
6. Bukan merupakan orang yang bekerja pada PT PII dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan serta mengawasi kegiatan PT PII dalam waktu enam bulan terakhir.
7. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha PT PII.
8. Tidak mempunyai hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Membership Requirements

1. Member of Audit Committee is appointed and discharged by the Board of Commissioners and reported to the General Meetings of Shareholders.
2. Audit Committee Member shall meet requirements, as follows:
 - a. Having good integrity and knowledge as well as sufficient career experience in monitoring/audit sectors.
 - b. Not having personal interest that may cause negative impact and conflict of interest against IIGF.
 - c. Capable to have effective communication.
 - d. Providing sufficient time to exercise his/her duties.
 - e. Understanding the financial statements, business of the Company, audit process, risk management and having sufficient knowledge on Law related with the Company's activity.
3. One of the Audit Committee members shall have educational background or expertise in Accounting or Finance and understanding risk management, and another member shall understand industry and business of IIGF.
4. Audit Committee member who is appointed from IIGF's external party is prohibited to have family affiliation by blood and by marriage until third degree both vertically and horizontally with members of Board of Commissioners and/or Board of Directors.
5. Not being the person in Public Accountant Firm, Legal Advisor Office or other parties providing attestation services, non-attestation services and/or other consulting services to IIGF within recent six months.
6. Not being employee of IIGF with authority and responsibility to plan, manage or control as well as supervise activity of IIGF within recent six months.
7. Not having any business affiliation both directly and indirectly with business activity of IIGF.
8. Not having other affiliations that may influence his/her independency.



Komposisi Anggota Komite Audit

Pada periode tahun 2016, komposisi anggota Komite Audit PT PII adalah sebagai berikut:

No.	Nama Name	Jabatan Position	Keterangan Remarks
1.	Ayu Sukorini	Ketua merangkap Anggota Chairman and Member	Anggota Dewan Komisaris yang memiliki keahlian di bidang Keuangan dan Akuntansi Board of Commissioners Member as Expert in Finance and Accounting
2.	Iqbal Islami	Anggota/ Member	Pihak Independen, yang memiliki keahlian di bidang Keuangan dan Akuntansi Independent Party as Expert in Finance and Accounting
3.	Tarkosunaryo*	Anggota/ Member	Pihak Independen, yang memiliki keahlian di bidang Keuangan dan Akuntansi Independent Party as Expert in Finance and Accounting
4.	Budi Taufik Wibisana**	Anggota/ Member	Pihak Independen, yang memiliki keahlian di bidang Keuangan dan Akuntansi Independent Party as Expert in Finance and Accounting

*) menjabat sejak Agustus 2016

**) menjabat hingga Juli 2016

*) Serving since August 2016

**) Serving until July 2016

Audit Committee Membersip Composition

In 2016 period, IIGF Audit Committee composition is as follows:

Profil Anggota Komite Audit

Profile of Audit Committee Members

Ayu Sukorini
Ketua/Chairman



Profil dapat dilihat di Bagian Profil Dewan Komisaris
Profile is presented in Board of Commissioners Profile section.

Iqbal Islami
Anggota/Member



Iqbal Islami saat ini menjabat juga sebagai Kepala Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan. Beliau mulai menjabat sebagai anggota Komite Audit di PT PII sejak tahun 2012. Sebelum bertugas di PT PII, Beliau telah mempunyai pengalaman yang panjang di dunia Komite Audit yaitu pernah menjadi Anggota Komite Audit di dua BUMN dan satu perusahaan terbuka. Dalam bidang akademis, beliau juga tercatat sebagai dosen di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) sejak tahun 1991. Manajemen strategik, *finance*, *corporate governance* dan keuangan negara adalah bidang yang menjadi keahliannya. Beliau memperoleh gelar akuntan dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara dan gelar *Master of Business Administration* dalam bidang *finance* dari Case Western Reserve University, Ohio, USA.

Iqbal Islami is also serving as Head of Budget and Treasury Training Center, Education and Training Agency, Ministry of Finance. He started to serve as Audit Committee member at IIGF since 2012. Prior working at IIGF, He held extensive experience in Audit Committee sector, namely Audit Committee Member in two SOEs and one listed-company. In academic sector, He is also Lecturer at Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) since 1991. Strategic Management, Finance, Corporate Governance and State Budget are his speciality. He earned Accountant Degree from Sekolah Tinggi Akuntansi Negara and Master of Business Administration in Finance from Case-Western Reserve Unifversity, Ohio, USA.

Tarkosunaryo
Anggota/Member



Tarkosunaryo saat ini adalah *Partner* pada KAP Razikun Tarkosunaryo, *member of MSI Global Alliance*, juga sebagai Ketua Umum Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan Anggota Komite Penilaian PT Bursa Efek Indonesia. Sebagai Akuntan Publik, beliau berpengalaman memberikan jasa audit dan non asuransi berbagai bidang, termasuk sebagai Wakil Penanggung Jawab pada tim pemeriksa dari KAP untuk dan atas nama BPK untuk melakukan pemeriksaan keuangan salah satu lembaga pemerintah pusat. Beliau juga berpengalaman sebagai instruktur pelatihan dan seminar di IAPI, dosen paruh waktu Program Vokasi Universitas Indonesia dan Program Magister Akuntansi Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Beliau menyelesaikan pendidikan program MBA dari Universitas Gadjah Mada dan diploma IV akuntansi PKN-STAN. Beliau mendapatkan pengakuan CPA dari IAPI, dan tercatat sebagai akuntan pasar modal di OJK.

Tarkosunaryo is currently serving as Partner at KAP Razikun Tarkosunaryo, member of MSI Global Alliance and also Chairman of Indonesia Public Accountant Institute (IAPI) amd Member of Assessment Committee PT Bursa Efek Indonesia. As a Public Accountant, He is well-experienced in providing audit and non-insurance services in various sectors, including Deputy Supervisory in asessment team from KAP to and on behalf of BPK audit Financial Statements in a central government body. He also holds experience as training and seminar instructure at IAPI, part-time lecturer at Vocation Progra, Universitas Indonesia and Master Degree of Accounting Program, Universitas Tanjung Pura, Pontianak. He graduated from his MBA Program from Unversitas Gadjah Mada and Diploma IV Accounting PKN – STAN. He earned CPA recognition by IAPI and listed as stock market accountant at OJK.



Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Komite Audit

Tugas Komite Audit

Komite Audit bertugas untuk melaksanakan tugas-tugas Komite Audit, yaitu untuk:

1. Membantu Dewan Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal, dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit, serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan auditor internal dan auditor eksternal.
3. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya.
4. Memastikan telah terdapat prosedur *review* yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan.
5. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta melaksanakan tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya.
6. Memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor.
7. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh auditor internal dan auditor eksternal.
8. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya.
9. Memastikan telah terdapat prosedur penelaahan yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan.
10. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris.
11. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Komisaris dalam rangka pelaksanaan tugas Komisaris berupa namun tidak terbatas pada:

Duty, Responsibility and Authority of Audit Committee

Duty of Audit Committee

Audit Committee is in charge to carry out Audit Committee duties, among thers, to:

1. Help the Board of Commissioners in ensuring effectiveness of internal control system and effectiveness of external and internal auditors duty implementation by doing supervision and evaluation on the audit planning and implementation, as well as monitoring on audit result follow-up to evalaute sufficiency of internal control, including sufficiency of financial reporting process.
2. Conducting monitoring and evaluation on the follow-up implementation by the Board of Directors on internal and external auditor findings result.
3. Providing recommendation on management control system and its implementation.
4. Ensuring availability of satisfactory review procedure towards every information published by the Company.
5. Identification of issues that require concern of the Board of Commissioners and implementation of other Board of Commissioners' duties.
6. Ensure effectiveness of external and internal auditors duty implementation.
7. Evalaute implementation of audit activity and result that was done by internal and external auditors.
8. Provide recommendation on the improvement of management control system and its implementation.
9. Ensure availability satisfactory review procedure towards every information published by the Company.
10. Identification of issues that require concern of the Board of Commissioners.
11. Perform other duties assigned by the Board of Commissioners in the implementation of Board of Commissioners' duties but not limited on:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan laporan tahunan, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perusahaan.
- b. Melakukan penelaahan atas Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
- c. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan.
- d. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi.
- e. Melakukan penelaahan atas pengaduan yang berkaitan dengan Perusahaan.

Tugas terkait dengan Auditor Internal, Auditor Eksternal, dan Pelaporan Keuangan:

1. Terkait dengan auditor internal, Komite Audit bertugas untuk:
 - a. Melakukan penelaahan dan memberikan masukan atas rencana audit tahunan yang disusun oleh auditor internal sebelum dimulainya tahun anggaran.
 - b. Menelaah dan merekomendasikan prosedur pemeriksaan internal dan menelaah Piagam Auditor Internal.
 - c. Melakukan penelaahan atas laporan hasil audit dari auditor internal.
 - d. Membahas temuan auditor internal dan/atau hal-hal lain yang mengandung indikasi mengenai kelemahan pengendalian internal, termasuk kekeliruan penerapan standar akuntansi keuangan.
 - e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan audit oleh auditor internal dan pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
2. Terkait dengan auditor eksternal, Komite Audit bertugas untuk:
 - a. Menyusun kerangka acuan kerja (*term of reference*) yang selanjutnya menjadi dasar panitia pengadaan auditor eksternal dalam melakukan proses pengadaan auditor eksternal.
 - b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan eksternal auditor yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan honorarium untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
 - c. Melakukan pengawasan atas proses audit yang dilakukan auditor eksternal mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaporan.
 - d. Menilai kinerja dan kualitas hasil audit yang dilakukan oleh auditor eksternal.

- a. Review the financial information that will be published by the Company such as financial statements, projection and annual report and other reports related with the Company's financial information.
- b. Review the Company's Long-Term Plan and Budget Plan.
- c. Review the Company's Compliance with the Law that is related with the Company's activity.
- d. Review risk management implementation activity that is carried out by the Board of Directors.
- e. Review any complaint that is related with the Company.

Duties that are related with Internal Auditor, External Auditor and Financial Reporting

1. Related with internal auditor, the Audit Committee is in charge to:
 - a. Review and provide recommendation on annual audit plan that is prepared by internal auditor before the beginning of fiscal year.
 - b. Review and suggest internal audit procedure and review Internal Audit Charter.
 - c. Review the audit report submitted by the internal auditor.
 - d. Discuss internal auditor findings and/or other issues with internal control weakness indication, including mistake in financial accounting standard implementation.
 - e. Review audit implementation by the internal auditor and follow-up implementation by the Board of Directors on the internal audit findings.
2. Related with External Auditor, the Audit Committee is in charge to:
 - a. Design terms of reference that will be applied as framework for the external auditor procurement committee in doing the external auditor procurement process.
 - b. Provide recommendation to the Board of Commissioners regarding appointment of external auditor based on independency, scope of assignment and honorarium to be presented in General Meetings of Shareholders.
 - c. Supervise audit process that is done by external auditor starting from planning until reporting phases.
 - d. Evaluate performance and quality of audit result as implemented by the external auditors.



- e. Memantau pelaksanaan tindak lanjut temuan dan rekomendasi auditor eksternal yang dilakukan oleh Direksi.
- f. Mengusulkan pemutusan hubungan kerja dengan auditor eksternal kepada Dewan Komisaris jika terdapat indikasi kuat bahwa independensi auditor eksternal dapat terganggu atau terbukti bahwa auditor eksternal tidak melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar pemeriksaan akuntan publik.

3. Terkait dengan pelaporan keuangan, Komite Audit bertugas untuk:

- a. Menilai kesesuaian kebijakan akuntansi yang digunakan dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
- b. Melakukan penelaahan atas proses penyusunan laporan keuangan dengan penekanan pada kepatuhan terhadap kebijakan, standar dan sistem akuntansi yang berlaku.
- c. Meyakinkan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh manajemen telah menyajikan secara wajar tentang kondisi keuangan dan hasil usaha Perusahaan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
- d. Menilai kondisi keuangan dan hasil usaha Perusahaan dan kesesuaiannya dengan rencana kerja dan anggaran Perusahaan serta rencana jangka panjang Perusahaan.
- e. Melakukan penelaahan dan penilaian atas laporan keuangan *interim* dan tahunan.
- f. Melakukan penelaahan dan penilaian atas laporan manajemen periodik.

Tanggung Jawab Komite Audit

1. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perusahaan baik dari pihak internal maupun eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.
2. Melaksanakan tugas Komite Audit secara jujur, amanah, dan profesional.
3. Menyediakan waktu yang cukup untuk pelaksanaan tugasnya.

Wewenang Komite Audit

1. Mengakses secara penuh, bebas, dan tidak terbatas terhadap dokumen, data, dan informasi tentang karyawan, aset, hutang, modal, dana, dan sumber daya Perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
2. Meminta keterangan dari pejabat dan pegawai Perusahaan dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

- e. monitor the implementation of the follow-up to the external auditor's findings and recommendations made by the Board of Directors.
- f. Provide recommendation on termination of working relation with external auditor to the Board of Commissioners if there is strong indication that independency of the external auditor may be disrupted or proven that the external auditor did not conduct the audit based on public accountant auditing standard.

Related with financial reporting, Audit Committee is in charge to:

- a. Evaluate consistency of applied accounting policy with prevailing accounting standard.
- b. Review the financial statements preparation process by focusing on compliance with policy, standard and prevailing accounting standard.
- c. Ensure that financial statements prepared by the management has presented the financial condition and operating income of the Company fairly in accordance with the prevailing financial accounting standard.
- d. Evaluate the Company's financial condition and operating income as well as consistency with the Budget Plan and Long-Term Plan.
- e. Review and evaluate interim and annual financial report.
- f. Review and evaluate periodic management report.

Responsibility of Audit Committee

1. Protect confidentiality of corporate documents, data and information both from internal and external parties that are only eligible to be used solely for the duty implementation purpose.
2. Implement duty of the Audit Committee honestly, trustworthy and professionally.
3. Provide sufficient time to perform the duties.

Authority of the Audit Committee

1. Fully, freely and unlimitedly access the document, data and information about the employees, assets, loans, capital, funds and other resources of the Company that are related with the duty implementation.
2. Request information from the Company's Executives and employees in relation with the duty implementation.

3. Melakukan komunikasi langsung atau tidak langsung dengan karyawan dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal dan audit eksternal serta manajemen risiko.
4. Melibatkan pihak independen diluar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
5. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Independensi Komite Audit

Sesuai dengan kaidah GCG, Komite Audit terdiri atas 3 orang, seorang Komisaris Perusahaan yang sekaligus bertindak sebagai ketua dan 2 orang anggota yang berasal dari pihak luar yang independen. Dua anggota Komite Audit PT PII memiliki latar belakang pendidikan formal akuntansi dan keuangan, sesuai dengan jenis aktivitas usaha Perusahaan. Seluruh anggota Komite Audit tidak memiliki afiliasi dengan anggota Direksi dan Dewan Komisaris lainnya maupun pemegang saham pengendali Perusahaan.

3. Conduct direct and non-direct communication with employees and party who performs internal audit and external audit as well as risk management functions.
4. Involve parties other than members of the independent Audit Committee is required to assist the execution of his duty (if required).
5. Exercise other authorities assigned by the Board of Commissioners.

Independency of Audit Committee

In accordance with the GCG principle, Audit Committee consists of 3 members, a Commissioner who also acts as Chairman and 2 members from independent external parties. Two Audit Committee members of IIGF have formal educational background from Accounting and Finance, based on type of the Company's business activity. Every Audit Committee Member does not have any affiliation with other members of Board of Directors and Board of Commissioners or with the Controlling Shareholders.

Aspek Independensi Independency Aspect	Ayu Sukorini	Iqbal Islami	Budi Taufik Wibawa	Tarkosunaryo
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Not having financial affiliation with Board of Commissioners and Board of Directors	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di PT PII Not having managerial affiliation at IIGF	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di PT PII Not having sharesownership affiliation at IIGF	√	√	√	√

Rapat Komite Audit

Selama tahun 2016, Komite Audit telah melakukan Rapat Komite Audit sebanyak 12 kali. Rekapitulasi kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat-rapat Komite Audit adalah sebagai berikut:

Audit Committee Meeting

In 2016, Audit Committee held 12 Audit Committee meetings. Recapitulation of Audit Committee member attendance in the Audit Committee meetings is as follows:

Nama Name	Rapat Internal Internal Meeting		
	Total Rapat Total Meetings	Kehadiran Attendance	Persentase Kehadiran Percentage
Ayu Sukorini	12	12	100%
Iqbal Islami	12	12	100%
Tarkosunaryo	5	5	100%
Budi Taufik Wibawa	7	7	100%



Selain itu, Komite Audit juga ikut hadir dalam rapat internal Dewan Komisaris yang selama tahun 2016 telah dilaksanakan sebanyak enam kali dan rapat gabungan Dewan Komisaris bersama Direksi yang telah dilaksanakan sebanyak 18 kali. Rekapitulasi kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat-rapat tersebut adalah sebagai berikut:

In addition, the Audit Committee also attended Board of Commissioners Internal Meeting which held as six meetings throughout 2016 and 18 Management Meetings. Recapitulation of Audit Committee member attendance in those meetings is as follows:

Nama Name	Rapat Internal Dewan Komisaris Board of Commissioners Internal Meeting			Rapat Gabungan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Management Meeting		
	Total Rapat Total Meeting	Kehadiran Attendance	Presentase Kehadiran Percentage	Total Rapat Total Meeting	Kehadiran Attendance	Presentase Kehadiran Percentage
Ayu Sukorini	6	5	83%	18	16	89%
Iqbal Islami	6	5	83%	18	16	89%
Tarkosunaryo*	3	2	67%	8	7	88%
Budi Taufik Wibawa**	3	2	67%	10	9	90%

*) menjabat sejak Agustus 2016

*) Serving since August 2016

**) menjabat hingga Juli 2016

**) Service until June 2016

Selama tahun 2016, Komite Audit telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja tahun 2016. Berikut ringkasan pelaksanaan tugas yang telah dilakukan oleh Komite Audit selama tahun 2016:

Throughout 2016, the Audit Committee had implemented its duties according to working program 2016. Summary of Audit Committee working report in 2016 is as follows:

1. Melakukan *review* dan evaluasi atas Laporan Manajemen periodik bulanan yang disampaikan oleh Direksi serta melakukan pembahasan dan/atau klarifikasi mengenai isi laporan tersebut dengan tim manajemen untuk hal-hal yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut.
2. Menyusun Laporan Komite Audit bulanan untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris yang berisi hasil *review* dan evaluasi Komite Audit atas pelaksanaan RKAP berdasarkan Laporan Manajemen periodik bulanan dan hal-hal lain yang membutuhkan perhatian Dewan Komisaris.
3. Melakukan kajian dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris atas usulan perbuatan-perbuatan Direksi yang membutuhkan persetujuan dari Dewan Komisaris atau mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris jika kewenangan keputusannya ada pada RUPS.
1. Reviewed and evaluated monthly Management Report that was submitted by the Board of Directors as well as discuss and/or clarify contents of the report with the management team for issues that required further explanation.
2. Prepared monthly Audit Committee Report to be submitted to the Board of Commissioners that disclosed Audit Committee review and evaluation result on RKAP implementation based on the monthly Management Report and other issues requiring the Board of Commissioners' concern.
3. Reviewed and provided recommendation to the Board of Commissioners or suggestion to the Board of Directors' action that required approval from the Board of Commissioners or written opinion from the Board of Commissioners if the approval authority is held by the GMS.



4. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan fungsi Internal Auditor yaitu dengan melakukan *review* atas program kerja Internal Auditor untuk tahun 2016, pelaksanaan program kerja audit yang dilaksanakan, dan pelaporan hasil audit yang disampaikan. Komite Audit telah memberikan sejumlah saran perbaikan kepada Internal Auditor dalam rangka peningkatan efektivitas fungsi internal auditor dan juga memastikan tindak lanjut atas hasil-hasil audit dari internal auditor.
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kegiatan audit keuangan atas laporan keuangan tahun 2016 yang dilakukan oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC) mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, sampai dengan tahap pelaporan untuk memastikan bahwa kegiatan audit telah dilakukan sesuai dengan standar audit yang berlaku. Pemantauan dan evaluasi dilakukan melalui *review* atas laporan yang disampaikan dan melakukan rapat-rapat secara berkala dengan PwC bersama-sama dengan Internal Auditor untuk membahas perkembangan audit yang telah dilakukan dan juga hasil-hasil audit yang diperoleh.
4. Supervised and evaluated implementation of Internal Auditor function by reviewing Internal Auditor working program 2016, implementation of submitted audit result and reporting of the submitted audit result. The Audit Committee had provided improvement recommendations to the Internal Auditor to improve effectiveness of Internal Auditor function as well as ensured follow-up on the audit results from the internal auditor.
5. Supervised and evaluated financial audit activity on the financial statements 2016 that was conducted by KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners (PwC) starting from planning, implementation until reporting process to ensure that the audit activity had been done according to the prevailing audit standard. The supervision and evaluation were done by reviewing the submitted reports and organized regular meeting with PwC altogether with the Internal Auditors to discuss progress of the audit as well as the acquired audit results.



6. Melakukan <i>review</i> dan evaluasi terhadap usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2017 dan menyampaikan hasilnya kepada Dewan Komisaris sebagai bahan bagi Dewan Komisaris untuk membahas usulan RKAP bersama-sama dengan Direksi sebelum diajukan kepada RUPS.	6. Reviewed and evaluated recommendation on Budget Plan (RKAP) 2017 and presented the result to the Board of Commissioners as consideration for the Board of Commissioners to discuss the RKAP proposal altogether with the Board of Directors before presented to the GMS.
7. Menyampaikan usulan kepada Dewan Komisaris auditor eksternal yang akan diusulkan oleh Dewan Komisaris kepada RUPS untuk ditunjuk melakukan audit keuangan atas Laporan Keuangan Perusahaan tahun 2016. Untuk tahun buku 2016, sesuai dengan usulan dari Dewan Komisaris, RUPS telah menunjuk KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC) untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perusahaan tahun 2016.	7. Delivered recommendation to the Board of Commissioners regarding external auditor to be recommended by the Board of Commissioners to the GMS to be appointed for financial audit on Financial Statements 2016. For Fiscal Year 2016, according to recommendation from the Board of Commissioners, the GMS had appointed KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners (PwC) to audit the Financial Statements 2016.
8. Melakukan <i>review</i> dan pembahasan bersama-sama dengan Sekretaris Dewan Komisaris dan Tenaga Ahli Dewan Komisaris untuk penyempurnaan <i>board manual</i> dan GCG manual untuk menyesuaikannya dengan PMK Nomor. 88 / PMK.06/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan.	8. Reviewed and discussed altogether with Board of Commissioners Secretary and Expert Staff to revise Board Manual and GCG Manual to adjust with PMK Number 88/PMK.06/2016 regarding Good Corporate Governance Implementation in Perusahaan Perseroan (Persero) Under Development and Supervision of Minister of Finance.
9. Melakukan <i>review</i> dan pembahasan bersama-sama dengan Tenaga Ahli Dewan Komisaris atas informasi pendahuluan yang disampaikan oleh Direksi terkait dengan proyek-proyek yang akan mendapatkan penjaminan dari Perusahaan dalam rangka mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris atau tanggapan dari Dewan Komisaris.	9. Reviewed and discussed altogether with Board of Commissioners Expert Staff on preliminary information that is submitted by the Board of Directors related with upcoming project to be guaranteed by the Company to request approval for written opinion from the Board of Commissioners.
10. Membantu Dewan Komisaris dalam menyiapkan laporan pengawasan Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada RUPS setiap triwulan dan laporan-laporan lain yang diminta oleh RUPS.	10. Assisted the Board of Commissioners in preparing Board of Commissioners supervisory report on its duty and responsibility implementation to the GMS quarterly and other reports as requested by the GMS.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Nomination and Remuneration Committee

Hingga 31 Desember 2016, PT PII belum memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi. Dewan Komisaris belum merasa perlu untuk membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi dikarenakan organisasi Perusahaan yang masih relatif kecil.

Namun demikian, fungsi nominasi dan remunerasi tetap berjalan di Perusahaan dan dilakukan oleh Dewan Komisaris dibantu oleh Divisi *Corporate Service*.

As of December 31, 2016, IIGF has not established Nomination and Remuneration Committee. The Board of Commissioners considers establishment of the Nomination and Remuneration Committee is less required due to the Company's organization is relatively lean.

However, the nomination and remuneration function is implemented in the Company by the Board of Commissioners assisted by Corporate Service Division.

Tenaga Ahli Manajemen Risiko

Risk Management Expert Staff

Tenaga Ahli Manajemen Risiko bertugas untuk membantu Dewan Komisaris dan Perusahaan untuk mengkaji hal-hal dengan fokus manajemen risiko. Pada periode tahun 2016, Tenaga Ahli Manajemen Risiko dijabat oleh Ferry Irawan. Sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. PII Nomor. KEP-03/KOM/PII/06/2016 tanggal 30 Juni 2016.

The Risk Management Expert Staff is in charge to help the Board of Commissioners and the Company to review issues focusing on risk management. In 2016, the Risk Management Expert Staff is served by Ferry Irawan. Pursuant to IIGF Board of Commissioners Decree Number KEP-03/KOM/PII/06/2016 dated June 30, 2016.

Profil Tenaga Ahli Dewan Komisaris Bidang Manajemen Risiko

Profile of Board of Commissioners Expert Staff in Risk Management

DR Ferry Irawan, S.E, M.S.E.



Ferry Irawan saat ini bertugas sebagai Kepala Bidang pada Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal. Beliau menyelesaikan pendidikan Doktor, Master Ekonomi, serta Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Beliau memulai karir pada tahun 1996 di Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Pada tahun 2006-2007 menjabat sebagai Kepala Seksi Pinjaman Sektor Industri, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, kemudian sebagai Kepala Ekonomi Sub Divisi Manajemen Risiko Fiskal, Kementerian Keuangan. Pada tahun 2011-2015 menjabat sebagai Asisten Deputi di Kementerian Keuangan. Beliau saat ini juga menjadi salah satu pengajar di Program Pasca Sarjana/Program Magister Perencanaan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia.

Ferry Irawan currently serves as Head of Division in Macroeconomics Policy Center, Fiscal Policy Agency. He graduated Ph.D Degree, Master Degree of Economics and Bachelor Degree of Economics from Faculty of Economics and Business, Universitas Indonesia. He started his career in 1996 at General Directorate of Budget, Ministry of Finance. In 2006 – 2007, He served as Head of Lending Section for Industry Sector, General Directorate of Treasury, and was later appointed as Head of Economics, Fiscal Risk Management Sub-Division, Ministry of Finance. In 201 – 2015, He was appointed as Deputy Assistant at Ministry of Finance. He is currently also Lecturer at Public Policy Planning Postgraduate/Master Degree, Faculty of Economics and Business, Universitas Indonesia.



Tugas Tenaga Ahli Manajemen Risiko

Uraian tugas Tenaga Ahli Manajemen Risiko berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris KEP-03/KOM/PII/06/2016 tanggal 30 Juni 2016 sebagai berikut:

1. Mengkaji laporan dan usulan yang disampaikan Dewan Komisaris dengan fokus pada aspek manajemen risiko.
2. Mengkaji kebijakan dan peraturan-peraturan yang terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan dengan fokus pada aspek manajemen risiko.
3. Melakukan dan mengkaji risiko-risiko atas perbuatan-perbuatan Direksi yang membutuhkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris.
4. Melakukan evaluasi dan mengkaji risiko-risiko atas perbuatan Direksi yang membutuhkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Melakukan evaluasi atas kebijakan dan strategi manajemen risiko yang disusun dan dilaksanakan oleh Perusahaan.
6. Melakukan evaluasi atas usulan RJPP dan RKAP.
7. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.
8. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris.

Laporan Pelaksanaan Tugas

Sesuai dengan tugasnya, Tenaga Ahli Dewan Komisaris Bidang Manajemen Risiko telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi, kajian, memberikan rekomendasi serta menyiapkan konsep surat persetujuan/tanggapan serta arahan Dewan Komisaris atas Penjaminan Proyek KPBU Jalan Tol Pandaan – Malang, Jalan Tol Balikpapan – Samarinda, dan Jalan Tol Manado – Bitung.
2. Melakukan evaluasi, kajian, memberikan rekomendasi serta menyiapkan konsep surat pendapat/tanggapan serta arahan Dewan Komisaris atas permohonan persetujuan penjaminan Proyek Palapa Ring Paket Timur.

Duty of Risk Management Expert Staff

Description of Risk Management Expert Staff's duties according to Board of Commissioners Decree Number KEP-03/KOM/PII/06/2016 dated June 30, 2016, as follows:

1. Reviewing report and recommendation submitted by the Board of Commissioners focusing on risk management aspect.
2. Reviewing policy and regulations that are related with the Company's business activity focusing on risk management aspect.
3. Conducting and reviewing the risks occurred from Board of Directors' actions that require written approval from the Board of Commissioners.
4. Evaluating and reviewing the risks occurred from Board of Directors' actions that require written approval from the Board of Commissioners and approval from the General Meetings of Shareholders.
5. Evaluating risk management policy and strategy that is prepared and implemented by the Company.
6. Evaluating RJPP and RKAP recommendation.
7. Identifying issues that require Board of Commissioners' concern.
8. Performing other duties assigned by the Board of Commissioners.

Duty Implementation Report

In accordance with his duties, Board of Commissioners Expert Staff in Risk Management Aspect had implemented working programs, as follows:

1. Conducting evaluation, review, providing recommendation and preparing Board of Commissioners approval/opinion letter draft on Guarantee Facility for Pandaan – Malang, Balikpapan – Samarinda and Manado – Bitung Toll Road PPP Projects.
2. Conducting evaluation, review, providing recommendation and preparing Board of Commissioners recommendation/opinion letter draft on Palapa Ring East Package Project Guarantee Approval Proposal.

3. Melakukan evaluasi, kajian, memberikan rekomendasi serta menyiapkan konsep surat tanggapan serta arahan Dewan Komisaris atas Penyampaian Usulan Awal Penjaminan Bersama Proyek Jalan Tol Serang – Panimbang, Jalan Tol Jakarta – Cikampek II, Proyek Jalan Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan, Jalan Tol Krian Legundi – Bunder – Manyar.
4. Melakukan pembahasan dan evaluasi pelaksanaan tugas unit kerja Persero yang membidangi Manajemen Risiko terutama terkait kajian pengembangan kebijakan *Risk Based Capital* PT PII.
5. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris antara lain:
 - a. Bersama dengan Organ Dewan Komisaris yang lain melakukan *review* dan evaluasi terhadap usulan RKAP tahun 2017 dan menyampaikan hasilnya kepada Dewan Komisaris sebagai bahan bagi Dewan Komisaris untuk membahas usulan RKAP bersama-sama dengan Direksi sebelum diajukan kepada RUPS.
 - b. Menyiapkan konsep surat tanggapan Dewan Komisaris kepada RUPS atas RKAP tahun 2017 yang diajukan oleh PT PII kepada RUPS serta bahan tanggapan Komisaris Utama pada RUPS pengesahan RKAP 2017.
 - c. Bersama dengan Organ Dewan Komisaris yang lain melakukan pembahasan terkait GCG PT PII
 - d. Bersama dengan Organ Dewan Komisaris yang lain melakukan *review* dan evaluasi atas Laporan Keuangan dan Laporan Manajemen periodik (bulanan, triwulanan, semester, dan tahunan) tahun 2016.
3. Conducting evaluation, review, providing recommendation as well as preparing draft of Board of Commissioners' approval/opinion and recommendation on Submission of Preliminary Recommendation on Joint Guarantee for Serang – Panimbang, Jakarta – Cikampek II, Cileunyi – Sumedang – Dawuan, Krian Legundi – Bunder – Manyar Toll Road Projects.
4. Discussing and evaluating implementation of the Company's working unit duty who supervises Risk Management, especially related with IIGF Risk-Based Capital Policy development review.
5. Performing other duties assigned by the Board of Commissioners, among others:
 - a. Reviewing and evaluating RKAP 2017 recommendation altogether with other Structures under the Board of Commissioners and submitting the result to the Board of Commissioners as consideration of the Board of Consideration to discuss the RKAP proposal altogether with the Board of Directors before submitted to the GMS.
 - b. Preparing Board of Commissioners opinion letter draft to GMS on RKAP 2017 as that is proposed by IIGF to GMS as well as material for President Commissioner's opinion in GMS of RKAP 2017 validation.
 - c. Together with other Board of Commissioners organize discussions related to GCG PT PII
 - d. Reviwing and evaluating Financial Statements and Periodic Management Report (monthly, quarter, semester and annual) in 2016 altogether with other Structures under the Board of Commissioners.



Sekretaris Dewan Komisaris

Board of Commissioners Secretary

Sekretaris Dewan Komisaris bertugas untuk mendukung tugas dan operasional Dewan Komisaris. Pada periode tahun 2016, Sekretaris Dewan Komisaris dijabat oleh Indra Safri. Sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT PII Nomor. KEP-03/KOM/PII/08/2015 tanggal 10 Agustus 2015.

Dalam struktur organisasi, Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris (AD PT PII Pasal 14 Ayat 23).

Board of Commissioners Secretary is in charge to support Board of Commissioners' duty and operational needs. In 2016 period, the Board of Commissioners Secretary is served by Indra Safri. Pursuant to IIGF Board of Commissioners Decree Number KEP-03/KOM/PII/08/2015 dated August 10, 2015.

In the organization structure, the Board of Commissioners may be assisted by the Board of Commissioners Secretary who is appointed and terminated by the Board of Commissioners (IIGF AoA Article 14 Point 23).

Profil Singkat Sekretaris Dewan Komisaris

Brief Profile of Board of Commissioners Secretary

Indra Safri



Indra Safri saat ini beliau menjabat sebagai Kasubdit Kekayaan Negara Dipisahkan 1 Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Sebelumnya beliau juga pernah menjabat sebagai Kasubdit Penilaian Bisnis dan Sumber Daya Alam di Direktorat Jenderal yang sama. Memiliki pengalaman selama 15 tahun bertugas di Direktorat Jenderal Pajak dan selama lebih dari 10 tahun bertugas di Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Beliau adalah seorang Penilai Pemerintah dan memperoleh gelar Magister Sains dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2000.

Indra Safri is served as Head of Separated State Assets Sub-Directorate 1, State Assets General Directorate, Ministry of Finance. Previously, He was also appointed as Head of Business and Natural Resources Appraisal Sub-Directorate at the same General Directorate. He holds over 15 years of experience serving at Taxation General Directorate and for 10 years serving at State Receivables and Auction General Directorate and at State Assets General Directorate, Ministry of Finance. He is a Government Assessor and obtained Master Degree of Science from Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta in 2000.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Dewan Komisaris

1. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (*briefing sheet*) Dewan Komisaris.
2. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan anggaran dasar Perusahaan.
3. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat, maupun dokumen lainnya.
4. Menyusun rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris.
5. Menyusun rancangan laporan-laporan Dewan Komisaris.
6. Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan serta menetapkan prinsip-prinsip GCG.
7. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta.
8. Mengkoordinasikan anggota komite, jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris.
9. Sebagai penghubung (*liaison officer*) Dewan Komisaris dengan pihak lain.
10. Memastikan dokumen penyelenggaraan kegiatan Dewan Komisaris tersimpan dengan baik di Perusahaan.
11. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris.

Duty and Responsibility of Board of Commissioners Secretary

1. Preparing meeting, including meeting material (*briefing sheet*) of the Board of Commissioners.
2. Preparing the Board of Commissioners minutes of meeting according to provisions in the Articles of Association.
3. Administering the Board of Commissioners' documents, including incoming letters, outgoing letters, minutes of meeting and other documents.
4. Preparing Board of Commissioners Budget Plan draft.
5. Preparing Board of Commissioners report draft.
6. Ensuring that the Board of Commissioners complies with the Law and implements GCG principle.
7. Providing information required by the Board of Commissioners.
8. Coordinating the Committee members, if necessary, to support the Board of Commissioners' duty.
9. As *liaison officer* between the Board of Commissioners with other parties.
10. Ensuring Board of Commissioners activity implementation document is well administered in the Company.
11. Performing other duties assigned by the Board of Commissioners.



Laporan Pelaksanaan Tugas Sekretaris Dewan Komisaris

Sesuai dengan tugasnya, Sekretaris Dewan Komisaris telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan rapat internal Dewan Komisaris maupun rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, termasuk membuat risalah rapat Dewan Komisaris.
2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan RUPS Tahunan pengesahan RKAP dan persetujuan Laporan Tahunan PT PII.
3. Mengkoordinasikan pengelolaan administrasi persuratan dan dokumen Dewan Komisaris lainnya.
4. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dewan Komisaris Tahun 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari RKAP PT PII Tahun 2017.
5. Mengkoordinasikan penyusunan laporan-laporan Dewan Komisaris kepada RUPS, antara lain terdiri dari Laporan Pengawasan Atas Pelaksanaan RKAP Semesteran dan Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Triwulanan.
6. Mengkoordinasikan penyusunan/perbaikan *Board Manual* Dewan Komisaris dan Direksi PT PII.
7. Mengkoordinasikan penyusunan Pedoman GCG dan pelaksanaan *self assessment GCG*.
8. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris antara lain:
 - a. Bersama dengan Organ Dewan Komisaris yang lain melakukan *review* dan evaluasi serta menyiapkan konsep persetujuan Dewan Komisaris atas permohonan pelepasan Aktiva Tetap Bergerak Di Bawah 5 Tahun Perusahaan.
 - b. Bersama dengan Organ Dewan Komisaris yang lain melakukan *review* dan evaluasi serta menyiapkan konsep persetujuan Dewan Komisaris atas perubahan struktur organisasi Perusahaan.

Board of Commissioners Secretary Duty Implementation Report

According to the duties, the Board of Commissioners Secretary had carried out working programs, as follows:

1. Organized Board of Commissioners Internal Meeting and Management Meeting (Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meeting) including prepared the Board of Commissioners Minutes of Meeting.
2. Coordinated Implementation of Annual GMS on RKAP validation and IIGF Annual Report Annual Report approval.
3. Coordinated management of mail administration and other Board of Commissioners documents.
4. Coordinated preparation of Board of Commissioners Budget Plan (RKA) 2017 as integrated part of IIGF Budget Plan (2017) 2017.
5. Coordinated preparation of Board of Commissioners Report to GMS, including Semester Supervisory Report on RKAP implementation and Quarter Board of Commissioners Duty and Responsibility Implementation Report.
6. Coordinated IIGF Board of Commissioners and Board of Directors Board Manual Preparation/Revision.
7. Coordinated preparation of GCG Code and GCG Self-Assessment Implementation.
8. Performed other duties assigned by the Board of Commissioners, among others:
 - a. Reviewed and evaluated as well as prepared Board of Commissioners approval draft, altogether with other Structures under Board of Commissioners, based on request of Below 5 Years Moveable Fixed Assets Disposal.
 - b. Reviewed and evaluated as well as prepared Board of Commissioners Approval draft altogether with other Structures under Board of Commissioners on change to the Company's Organization Structure.

Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

Dalam rangka menyelenggarakan fungsi kesekretariatan Perusahaan, Direksi mengangkat seorang Sekretaris Perusahaan. Sekretaris Perusahaan merupakan penghubung antara Direksi dengan Manajemen, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham serta wakil Perusahaan dalam berhubungan dengan Pemangku Kepentingan yang berkaitan dengan Perusahaan.

In order to implement Corporate Secretariate function, the Board of Directors appointed a Corporate Secretary. The Corporate Secretary is a liaison officer between the Board of Directors and Management, the Board of Commissioners and Shareholders as well as representatives of the Company in engaging with the Stakeholders that are related with the Company.

Kedudukan Sekretaris Perusahaan

1. Diangkat dan diberhentikan oleh Direksi berdasarkan mekanisme internal Perusahaan.
2. Bertanggung jawab langsung oleh/kepada Direktur Utama dan melaporkan kegiatannya kepada Direktur Utama secara berkala.

Position of the Corporate Secretary

1. Appointed and discharged by the Board of Directors based on the Company's internal mechanism.
2. Directly responsible to the President Director and report his activity to the President Director periodically.

Profil Singkat Sekretaris Perusahaan

Brief Profile of Corporate Secretary

Pratomo Ismujatmika



Warga negara Indonesia, 41 tahun. Beliau bergabung dengan PT PII sejak tahun 2013. Beliau adalah lulusan Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya tahun 1999, kemudian mengambil Magister Manajemen di Universitas Gadjah Mada tahun 2001 kemudian juga mengikuti *Exchange Program* pada tahun 2001-2003 di University of Kentucky Gatton College of Business, Lexington, KY, USA dan mengambil pendidikan *Master of Business Administration* di Sullivan University, Lexington, KY, USA tahun 2003-2005. Beliau pernah menjabat beberapa posisi di beberapa Bank Nasional yaitu Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan Bank ICB Bumiputera Tbk sebelum bergabung dengan PT PII. Diangkat sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan SK Direksi Nomor. 011/DRU COS/HR/0613.

Indonesian Citizen, 41 years. He is joining with IIGF since 2013. He is graduated from Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya in 1999 and continued to Master Degree of Management from Universitas Gadjah Mada in 2001 and also participated in Exchange Program in 2001 – 2003 in University of Kentucky Gatton College of Business, Lexington, KY, USA and Master of Business Administration from Sullivan University, Lexington, KY, USA in 2003 – 2005. Previously, He served in several positions at National Banks such as Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. and Bank ICB Bumiputera Tbk. before joining with IIGF. He is appointed as Corporate Secretary pursuant to Board of Directors Decree Number 011/DRU/COS/HR/00613.



Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

1. Memastikan bahwa Perusahaan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
2. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta.
3. Sebagai penghubung antara Direksi dengan Manajemen, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham serta wakil Perusahaan dalam berhubungan dengan *stakeholders* yang berkaitan dengan Perusahaan.
4. Menatausahakan serta menyimpan dokumen Perusahaan, antara lain Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan risalah Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris dan RUPS.
5. Mengadakan program pengenalan mengenai Perusahaan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang diangkat untuk pertama kalinya. Program pengenalan yang dimaksud meliputi:
 - a. Pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola oleh Perusahaan;
 - b. Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya;
 - c. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit; dan
 - d. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.
6. Program pengenalan Perusahaan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke Perusahaan dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan Perusahaan dimana program tersebut dilaksanakan.

Duty and Responsibility of Corporate Secretary

1. Ensuring that the Company complies with disclosure regulation that is in line with Good Corporate Governance principles implementation.
2. Providing information that are required by the Board of Directors and Board of Commissioners regularly and/or incidentally, if requested.
3. As liaison officer between Board of Directors and Management, Board of Commissioners and Shareholders as well as representative of the Company in engaging with Stakeholders that are related with the Company.
4. Administering and keeping the Company's documents, among others, Shareholders List, Special List and Minutes of Meetings of Board of Directors, Board of Commissioners and GMS.
5. Organizing corporate orientation program to the Board of Directors and Board of Commissioners members who are appointed for the first time. The orientation program includes:
 - a. Implementation of governance principles by the Company;
 - b. Illustration about the Company related with purpose, nature and scope of activity, financial and operational performances, short-term and long-term business plan, competitive position, risk and other strategic issues;
 - c. Explanation related with delegated authority, internal and external audits, internal control system and policy including Audit Committee; and
 - d. Information about duty and responsibility of the Board of Commissioners and Board of Directors' duty and responsibility as well as other prohibitions.
6. The corporate orientation program may be provided as presentation, meeting, visit to the Company and document review or other programs that are considered relevant with the Company where the program is implemented.

Pelatihan Sekretaris Perusahaan

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas untuk mendukung tugas dan tanggung jawabnya, Sekretaris Perusahaan PT PII mengikuti *workshop*, seminar dan pelatihan, baik yang diadakan oleh internal maupun oleh pihak eksternal. Kegiatan pelatihan, *workshop* dan seminar yang diikuti Sekretaris Perusahaan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Waktu Time	Pelatihan Training	Penyelenggara Organizer
20-21 Okt 2016 20-21 Oct 2016	<i>Leading at The Speed of Trust</i>	People Tech
3 Nov 2016 3 Nov 2016	Sesi Rekonsiliasi: <i>Training Leading at The Speed of Trust</i>	People Tech

Corporate Secretary Training

In order to develop capacity and capability to support his duty and responsibility, Corporate Secretary of IIGF participated in workshop, seminar and training both organized by internal and external parties. The training, workshop and seminar activities that are participated by the Corporate Secretary in 2016 are as follows:

Laporan Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan

1. Memastikan bahwa PT PII mematuhi segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perusahaan.
2. Pelaksanaan rapat tepat waktu (Rapat Direksi, Dewan Komisaris, Rapat Gabungan dan Rapat Umum Pemegang Saham).
3. Pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham tepat waktu.
4. Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik secara konsisten dan berkelanjutan.
5. Penyusunan pedoman dan kebijakan terkait implementasi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
6. Memastikan kelancaran komunikasi antara PT PII dengan *stakeholders* sesuai dengan kebutuhan.

Corporate Secretary Duty Implementation Report

1. Ensuring that IIGF complies with provisions in the prevailing Law and Articles of Association.
2. On time implemen of the meetings (Board of Directors Meetings, Managment Meetings and General Meetings of Shareholders).
3. On time reporting to the Board of Commissioners and Shareholders.
4. Consistent and continuous Corporate Governance Implementation.
5. Preparation of manual and policy related with Good Corporate Governance implementation.
6. Ensuring smooth communication between IIGF and the Stakeholders based on needs.



Internal Audit

Internal Audit

Internal Audit merupakan salah satu unsur dari Sistem Pengendalian Internal, yaitu sebagai *third line of defense* yang memiliki peran penting untuk menjaga dan mengamankan kegiatan usaha PT PII, serta bertanggung jawab untuk mengawal pencapaian visi dan misi PT PII. Pelaksanaan fungsi internal audit di PT PII merupakan tugas dari Internal Audit.

Internal Audit membantu organisasi mencapai tujuannya melalui pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas *internal control*, *risk management* dan *governance process*.

Kedudukan Internal Audit

Internal Audit dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal Perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris.

Piagam Internal Audit

Sesuai peraturan Bapepam Nomor. IX.1.7. yang diperbaharui melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 56/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, sejak tanggal 12 Juli 2013, Perusahaan telah memiliki Internal Audit *Charter* yang merupakan pedoman bagi Internal Audit agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara kompeten, independen dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan.

Internal Audit *Charter* Perusahaan memuat dan menjelaskan antara lain:

Bab I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Visi dan Misi
- C. Maksud dan Tujuan

Bab II Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang

- A. Tugas
- B. Tugas Terkait Dengan Auditor Internal, Auditor Eksternal, dan Pelaporan Keuangan
- C. Tanggung Jawab
- D. Wewenang

Internal Audit is one of elements of Internal Control System as third line of defense with important role to protect and secure business activity of IIGF, as well as being responsible to safeguard achievement of IIGF's vision and mission. Implementation of internal audit function at IIGF is duty of the Internal Audit.

Internal Audit supports the organization to achieve its objectives through systematic and well-ordered approach to evaluate and improve effectiveness of internal control, risk management and governance process.

Position of Internal Audit

Internal Audit is supervised by a Chief who is appointed and discharged by President Director based on internal mechanism with approval from the Board of Commissioners.

Internal Audit Charter

Pursuant to Bapepam Regulation Number IX.1.7 as revised under Financial Service Authority Regulation Number 56/POJK.04/2015 regarding Establishment and Policy on Internal Audit Charter Preparation, since July 12, 2013, the Company has an Internal Audit Charter as guideline for Internal Audit to implement duty and responsibility with competency, independency and accountable to be accepted by all of interested party.

The Internal Audit Charter discloses and explains, among others:

Chapter I Introduction

- A. Introduction
- B. Vision and Mission
- C. Purpose and Objectives

Chapter II Duty, Responsibility, and Authority

- A. Duty
- B. Duty Related with Internal Auditor, External Auditor, and Financial Reporting
- C. Responsibility
- D. Authority

Bab III Struktur, Persyaratan Keanggotaan, dan Masa Jabatan

- A. Struktur Organisasi
- B. Struktur Keanggotaan
- C. Persyaratan Keanggotaan
- D. Masa Jabatan

Bab IV Tata Kerja dan Prosedur Kerja

- A. Program Kerja Tahunan
- B. Rapat
- C. Pelaporan
- D. Evaluasi Kinerja
- E. Program Pengenalan Bagi Anggota Baru

Bab V Penganggaran dan Pembiayaan

- A. Penganggaran
- B. Pembiayaan

Bab VI Penutup

Chapter III Structure, Requirement, Membership, and Serving Period

- A. Organization Structure
- B. Membership Structure
- C. Membership Requirement
- D. Serving Period

Chapter IV Working Procedure and Procedure

- A. Annual Working Program
- B. Meeting
- C. Reporting
- D. Performance Evaluation
- E. Orientation Program for New Members

Chapter V Budget and Financing

- A. Budget
- B. Financing

Chapter VI Closing

Profil Singkat Kepala Internal Audit

Brief Profile of Head of Internal Audit Unit

I Gede Susila Aryana



Warga negara Indonesia, 48 tahun. Beliau bergabung dengan PT PII sejak tahun 2011. Sebelumnya beliau mengenyam pendidikan di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Balai Pendidikan dan Latihan Keuangan. Selain itu, beliau sudah bersertifikasi CISA (*Certified Information System Auditor*) dari Information System Audit and Control Association (ICASA). Diangkat sebagai Kepala Internal Audit berdasarkan SK Karyawan Tetap SK-012/DIR/HR/KT/08/2011 tertanggal 5 November 2011.

Indonesian Citizen, 48 years. He is joining with IIGF since 2011. Previously, He enrolled at Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Finance Education and Training Agency. In addition, He holds CISA (*Certified Information System Auditor*) certification from Information System Audit and Control Association (ICASA). He is appointed as Head of Internal Audit pursuant to Permanent Employee Decree Number SK-012/DIR/HR/KT/2011 dated November 5, 2011.



Tugas dan Tanggung Jawab Internal Audit

1. Melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan pengendalian internal, manajemen risiko, dan proses tata kelola Perusahaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Perusahaan; dan
2. melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya.

Kualifikasi dan Sertifikasi Pegawai Internal Audit

PT PII berupaya untuk memberikan pendidikan berkelanjutan bagi seluruh personel Internal Audit, antara lain pendidikan profesi yang bersertifikasi baik yang bersifat nasional maupun internasional untuk bidang audit maupun manajemen risiko. Peningkatan kompetensi dan wawasan Internal Audit dilakukan melalui berbagai program pendidikan dan rotasi penugasan untuk memenuhi kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.

Pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah pegawai Internal Audit adalah dua orang, termasuk Kepala IA. Internal Auditor PT PII telah memiliki kualifikasi dan sertifikasi profesi sebagai auditor. Berikut data mengenai sertifikasi yang telah diperoleh oleh auditor di Internal Audit sampai dengan akhir 2016:

Program Sertifikasi / Certification Program	Jumlah Auditor/ Total Auditor
Internasional/ International	
<i>Certified Information System Auditor (CISA)</i>	1

Selama tahun 2016, Internal Audit PT PII telah mengikuti beberapa pelatihan yang berkaitan dengan pengawasan sebagai berikut:

Nama/ Name	Waktu/Schedule	Pelatihan/ Training	Penyelenggara/Organizer
I Gede Susila Aryana	3 Juni 2016 June 3, 2016	<i>Basic Risk Management</i> Basic Risk Management	CRMS
I Gede Susila Aryana	6 - 8 September 2016 September 6 – 8, 2016	<i>2016 IIA Indonesia National Conference</i> 2016 IIA Indonesia National Conference	IIA Indonesia Chapter
Christine	10 - 13 Mei 2016 May 10 – 13, 2016	Seminar dan Musyawarah Nasional Forum Komunikasi Sistem Pengendalian Internal (FKSPI) Tahun 2016 Internal Control System Communication Forum (FKSPI) Seminar and National Conference 2016	FKSPI
Christine	3 Juni 2016 June 3, 2016	<i>Basic Risk Management</i> Basic Risk Management	CRMS

Duty and Responsibility of Internal Audit

1. Evaluating effectiveness of internal control, risk management and corporate governance process implementation, according to the Law and corporate policy; and
2. Evaluate and assess efficiency and effectiveness in Financial, Operations, Human Capital, Information Technology and other activities.

Internal Audit Personnel Qualification and Certification

IIGF strives to provide continuous education for all Internal Audit personnel including certified professional education both at national and international levels for audit and risk management sectors. Internal Audit competency and knowledge development is done through education and rotation program to fulfill qualification and competency in accordance with the Company's needs.

As of December 31, 2016, number of Internal Audit personnel were 2 person, including Head of the Internal Audit. The IIGF Internal Audit also have professional qualification and certification as auditors. Information about the certification of the auditor in the Internal Audit as the end of 2016:

Throughout 2016, IIGF Internal Audit participated in trainings related with audit, as follows:

Pelaksanaan Kegiatan Internal Audit Tahun 2016

Sepanjang tahun 2016, IA telah melaksanakan kegiatan audit baik rutin maupun audit bidang khusus dengan rincian sebagai berikut:

1. Audit atas Fungsi Pengelolaan Fasilitas Perusahaan Internal Auditor dan divisi *Corporate Services (COS)* telah menyepakati temuan dan saran dari audit ini untuk ditindaklanjuti dalam kurun waktu tertentu.
2. Audit atas Fungsi Pengembangan Bisnis dan Komunikasi Perusahaan Internal Auditor dan divisi *Business Development and Communication (BDC)* telah menyepakati temuan dan saran dari audit ini untuk ditindaklanjuti dalam kurun waktu tertentu.
3. Pemantauan dan tindak lanjut atas laporan audit tahun 2015 dan 2016.
Divisi Internal Audit telah menyusun dokumen untuk mencatat perkembangan tindak lanjut atas temuan dan saran yang kami berikan kepada divisi yang terkait. Perkembangan tindak lanjut yang dimaksud dapat berupa penuntasan sepenuhnya, ataupun penyelesaian sebagian dari tindak lanjut yang telah disepakati.

Selain tugas di atas, IA juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan berikut di tahun 2016:

1. Turut serta dalam kelompok kerja penyusunan dokumen Pedoman GCG.
2. Bersama dengan tim Sekretaris Perusahaan melakukan penilaian sendiri atas penerapan GCG Perusahaan.
3. Pendampingan untuk pelaksanaan Audit atas Penggunaan PMN tahun 2015 PT PII oleh auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Internal Audit Activity Implementation 2016

Throughout 2016, IA had carried out regular and special audit activities with detail information, as follows:

1. Audit on Company Facility Management Function
Internal Auditor and Corporate Services (COS) Division had approved findings and suggestions from the audit to be followed-up in particular period.
2. Audit on Business Development and Corporate Communication Function
Internal Auditor and Business Development and Communication Division (BDC) had approved findings and suggestions from the audit to be followed-up in particular period.

3. Monitoring and Follow-Up on Audit Report 2015 and 2016

The Internal Audit Division had prepared documents to record progress of submitted findings and recommendations to related division. The follow-up progress might be implemented as full or part settlement of the approved follow-up.

Other than duties mentioned above, IA was also involved in the following activities throughout 2016:

1. Participated in Code of GCG document preparation task force.
2. Cooperated with Corporate Secretary Team on GCG Self-Assessment.
3. Assistance in implementation of Audit on PMN 2015 disbursement by IIGF that was done by Financial and Development Supervisory Agency (BPKP).



4. Pendampingan untuk pelaksanaan Audit Pendahuluan Kinerja atas Pembinaan dan Pengelolaan BUMN di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2014-2016 oleh auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
5. Pendampingan untuk pelaksanaan Audit Dengan Tujuan Tertentu atas Pembiayaan dan Penjaminan Infrastruktur Tahun 2014-2016 oleh auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

4. Assistance in Preliminary Performance Audit on SOE Development and Management under the Ministry of Finance 2014 – 2016 by auditor from Supreme Audit Agency (BPK).
5. Assistance in Special Audit Implementation on Infrastructure Financing and Guarantee 2014–2016 by auditor from Supreme Audit Agency (BPK).

Rencana Kegiatan Tahun 2017

Pada tahun 2017, Internal Audit merencanakan kegiatan audit sebagai berikut:

1. Audit atas penjaminan proyek Palapa Ring.
2. Audit atas Fungsi *Treasury*.
3. Audit atas Fungsi *Project Legal*.
4. Audit atas penjaminan proyek SPAM Umbulan.
5. Audit atas Akun Biaya.
6. Audit atas Fungsi *Corporate Legal*.

Rencana kegiatan Internal Audit ini dapat berubah jika ada permintaan dan pertimbangan dari Dewan Komisaris dan atau Dewan Direksi, atau jika terdapat permintaan dari divisi atau fungsi yang diaudit karena kesibukan atau hal lain.

Activity Plan 2017

In 2017, the Internal Audit plans to conduct audit activity, as follows:

1. Audit on guarantee for Palapa Ring project.
2. Audit on Treasury Function.
3. Audit on Project Legal Function.
4. Audit on SPAM Umbulan project guarantee.
5. Audit on Expense Accounts.
6. Audit on Corporate Legal Function.

This Internal Audit activity plan by be revised under request and consideration from Board of Commissioners and or Board of Directors, or based on request from audited division or function due to work load or other issues.

Audit Eksternal

External Audit

Mekanisme Pemilihan Akuntan Publik

Sesuai Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pasal 31 bahwa Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan diaudit oleh auditor eksternal yang ditunjuk oleh RUPS dari calon-calon yang diajukan oleh Dewan Komisaris. Dewan Komisaris melalui Komite Audit melakukan proses penunjukan calon auditor eksternal sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa Perusahaan, dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan Direksi dalam proses penunjukannya.

Dalam menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) PT PII menetapkan sejumlah kriteria, antara lain:

1. Terdaftar di Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan;
2. KAP yang masuk dalam kelompok *The Big Four*; dan
3. Memiliki afiliasi internasional.

Penetapan Akuntan Publik

Menindaklanjuti pelimpahan wewenang dari RUPS kepada Dewan Komisaris untuk mengusulkan KAP yang akan ditunjuk untuk melakukan audit umum atas laporan keuangan PT PII tahun buku 2016 dan sesuai juga dengan ketentuan Pasal 56 Ayat 1 dan 2 PMK Nomor. 88 Tahun 2016, maka Dewan Komisaris menugaskan Direksi bersama-sama Komite Audit untuk melakukan proses pengadaan KAP.

Direksi dan Komite Audit telah melaksanakan proses pengadaan dan menetapkan KAP Tanudiredja Wibisana Rintis & Rekan/PwC untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan PT PII tahun buku 2016.

Periode Laporan Keuangan yang Diaudit

Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2016 telah diaudit oleh KAP Tanudiredja Wibisana Rintis & Rekan/PwC dengan opini Wajar Tanpa Modifikasi.

Public Accountant Appointment Mechanism

Pursuant to Minister of State-Owned Enterprise Regulation Number PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 regarding Good Corporate Governance Implementation article 31 regulating that Annual Financial Statements shall be audited by external auditor who is appointed by GMS from list of candidates proposed by the Board of Commissioners through Audit Committee to perform external auditor candidate appointment process in compliance with procurement policy in the Company, and if necessary, may request assistance from the Board of Directors during the appointment process.

In the Public Accountant Firm (KAP) appointment, IIGF applies set of criteria, as follows:

1. Shall be registered at Bank Indonesia and Financial Service Authority;
2. One of The Big Four Public Accountant Firm; and
3. Having international affiliation.

Public Accountant Firm Stipulation

Following-up the authority delegation from the GMS to the Board of Commissioners to propose Public Accountant Firm to be appointed and conducting general audit on the financial statements. In the Fiscal Year 2016 as well as according to provisions in Article 56 Point 1 and 2 PMK Number 88 of 2016, the Board of Commissioners had assigned the Board of Directors altogether with the Audit Committee to perform Public Accountant Firm procurement process.

The Board of Directors and Audit Committee had executed the procurement process and stipulated Tanudiredja Wibisana Rintis & Partners/PwC Public Accountant Firm to audit IIGF Financial Statements fiscal year 2016.

Period of Audited Financial Statements

Financial Statements for year ended on December 31, 2016 had been audited by Tanudiredja Wibisana Rintis & Partners/PwC Public Accountant Firm with Unqualified Opinion.



KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan/PwC melakukan audit laporan keuangan tahunan Perusahaan sebanyak dua periode. Tabel di bawah menginformasikan Akuntan dan Kantor Akuntan Publik yang memberikan Audit Keuangan untuk Perusahaan selama lima tahun serta biaya audit yang dikeluarkan:

Tanudiredja Wibisana Rintis & Partners/PwC Public Accountant Firm audited the annual financial statements for 2 periods. The below table explains information about Accountant and Public Accountant Firm to provide Financial Audit for the Company in the five years as well as the audit fee.

Kantor Akuntan Publik 5 Tahun Terakhir Public Accountant Firm in 5 Recent Years			
Tahun Years	Kantor Akuntan Publik Public Accountant Firm	Nama Akuntan (Partner Penanggung Jawab) Name of Accountant (Supervising Partner)	Fee
2016	Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan/ PwC	Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec, CPA	Rp649.000.000
2015	Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan/ PwC	Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec, CPA	Rp570.000.000
2014	Tanudiredja, Wibisana dan Rekan/ PwC	Drs. Haryanto Sahari, CPA	US \$40,900
2013	Tanudiredja, Wibisana dan Rekan/ PwC	Lucy Liciana Suhendra, S.E., Ak., CPA	US \$37,900
2012	Tanudiredja, Wibisana dan Rekan/PwC	Drs. Haryanto Sahari, CPA	US \$36,300

Jasa Lain Selain Audit Keuangan

Selama tahun 2016, Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan/PwC hanya memberikan Jasa Audit atas Laporan Keuangan kepada PT PII.

Other Non-Financial Audit Services

Throughout 2016, Tanudiredja, Wibisana, Rintis and Partners/PwC Public Accountant Firm only provided Audit Service on Financial Statements to IIGF.

Sistem Pengendalian Internal

Internal Control System

Sistem pengendalian internal merupakan suatu proses yang dirancang untuk mendukung Perusahaan dalam pencapaian tujuan usahanya. Dengan menerapkan sistem pengendalian *intern*, PT PII dapat mengarahkan, mengawasi, dan mengukur seberapa efektif dan efisien penggunaan sumber daya yang dimilikinya, serta mencegah adanya penyelewengan wewenang atau penggelapan yang dapat merugikan Perusahaan, secara *tangible* maupun *intangible*.

Sistem pengendalian internal di PT PII dijalankan secara kolektif oleh Direksi untuk memastikan bahwa semua transaksi yang dilakukan PT PII telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku.

Sistem pengendalian internal Perusahaan dibangun dengan mengadopsi kerangka pengendalian internal yang dikembangkan oleh *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO) dengan elemen-elemen utamanya yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta aktivitas pemantauan.

Sistem pengendalian internal antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Lingkungan pengendalian internal dalam Perusahaan yang dilaksanakan dengan disiplin dan terstruktur, yang terdiri dari
 - a. Integritas, nilai etika dan kompetensi karyawan;
 - b. filosofi dan gaya manajemen;
 - c. cara yang ditempuh manajemen dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya;
 - d. pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia; dan
 - e. perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi.
2. Pengkajian terhadap pengelolaan risiko usaha, yaitu suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai pengelolaan risiko yang relevan.
3. Aktivitas pengendalian, yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan Perusahaan pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi Perusahaan, antara lain mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas, dan keamanan terhadap aset Perusahaan.

Internal control system is a process that is designed to support the Company in achieving its business target. By implementing internal control system, IIGF is able to direct, oversee and evaluate effectiveness and efficiency of internal resource utilization as well as to prevent abuse of authority and fraud that may bring loss the Company both tangible and intangible loss.

Internal control system at IIGF is implemented collectively by the Board of Directors to ensure that every transaction done by IIGF had complied with prevailing policy and procedure.

In the Company, the Internal Control System is built by adopting internal control framework that is developed by Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) with main elements including controlling environment, risk assessment, information and communication controlling activity and monitoring activity.

The internal control system also includes aspects as follows:

- Internal control environment is implemented with discipline and well-structured, comprising of:
- a. Integrity, ethical values and employee competency;
 - b. Philosophy and management style;
 - c. Method that is implemented by the management in exercising authority and responsibility;
 - d. Organization and human capital development; and
 - e. Attention and recommendation from the Board of Directors.
2. Review on business risk management as a process to identify, analyze, evaluate relevant risk management.
 3. Controlling activity that refers to activities that are implemented in a controlling process on the Company's activity in every level and unit in the organization structure, among others including the authority, authorization, verification, reconciliation, evaluation on working achievement, segregation of duty and security of the Company's assets.



4. Sistem informasi dan komunikasi, yaitu suatu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial, serta ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan oleh Perusahaan.
5. *Monitoring*, yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian intern, termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi Perusahaan, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal.
4. Information and communicaiton system, a report presentation process on operational activity, financial as well as compliance with the Law and Regulation.
5. Monitoring, an assessment process on quality of the internal control system including internal audit function in every level and unit in the organization structure to be implemented optimally.

Manajemen Risiko

Risk Management

Berbagai aktivitas yang dilakukan membuat Perusahaan menghadapi berbagai macam risiko. Menyadari akan risiko-risiko yang dihadapi, Perusahaan secara pro-aktif berusaha untuk meningkatkan kemampuan manajemen risiko di Perusahaan.

Perusahaan telah melakukan integrasi dan penyesuaian pengelolaan risiko terhadap strategi dan membentuk Satuan Kerja *Enterprise Risk Management* ("ERM") yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi.

Pengelolaan Risiko Perusahaan

PT PII dibentuk Pemerintah Republik Indonesia sebagai suatu institusi yang dapat mendukung percepatan penyediaan infrastruktur melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di Indonesia. Peran utama PT PII adalah sebagai penyedia dukungan fiskal kontingen untuk proyek infrastruktur KPBU melalui penyediaan penjaminan atas risiko kontraktual terkait tindakan pemerintah, meningkatkan kualitas transaksi KPBU dan mendorong pendekatan yang baku dan akuntabel untuk implementasi KPBU, dengan keberadaannya sebagai pemroses tunggal bagi penyediaan penjaminan infrastruktur.

Dalam menjalankan fungsi tersebut, PT PII diharuskan untuk juga mempertimbangkan alokasi risiko. Pelaksanaan KPBU di Indonesia selama bertahun-tahun menunjukkan bahwa alokasi risiko merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan kesuksesan sebuah proyek KPBU. Kegagalan proyek KPBU dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mengalokasikan risiko telah membuat proyek KPBU di masa lalu tidak dapat memenuhi tujuan yang diharapkan, baik terkait dengan tujuan peningkatan kualitas layanan maupun efisiensi harga.

Sebagai salah satu BUMN, PT PII berkomitmen menjalankan seluruh peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian BUMN, termasuk ketentuan penerapan GCG pada BUMN, yang salah satunya menjalankan Manajemen Risiko dengan baik. Pengelolaan risiko dilakukan dengan mengidentifikasi risiko, melakukan evaluasi risiko, melakukan upaya memitigasi risiko-risiko tersebut dan melakukan pengawasan terhadap risiko serta pelaporannya.

Dalam fungsi pengelolaan risiko korporat, PT PII membentuk *Divisi Risk and Compliance (RAC)* di bawah *Chief Financial & Risk Management Officer* yang bertanggung jawab terhadap penyusunan kebijakan, kerangka kerja, pedoman penerapan dan

Various activities that are implemented by the Company and exposed to various risks. Considering these risks, the Company strives to proactively improve risk management capability in the Company.

The Company has integrated and aligned risk management on strategy and established Enterprise Risk Management ("ERM") Unit who is directly responsible to the Board of Directors.

Risk Management

IIGF is established by The Republic of Indonesia Government as an institution to support infrastructure provision acceleration under Public – Private Partnership (PPP) scheme in Indonesia. Main role of IIGF is as provider of contingent fiscal support for PPP infrastructure project by providing guarantee on contractual risk related with Government's action, improving quality of PPP transaction and supporting formal and accountable approach in PPP implementation with its presence as single provider for infrastructure guarantee provision.

In carrying out this function, IIGF is regulated to consider risk allocation. PPP implementation in Indonesia these years indicates that risk allocation becomes a very important factor in determining success of a PPP project. Failure of PPP project in identifying, measuring and allocating risks that brought previous PPP project failed to fulfill the expected target both related with purpose to improve service quality and price efficiency.

As a SOE, IIGF is committed to implement entire law and policy issued by Minsiter of SOE, including GCG implementation policy in SOE, among others, to implement Risk Managment appropriately. The risk management is done by identifying risk, perform risk eveluation, the risk mitigation as well as risk monitoring and reporting.

In corporate risk management function, IIGF established Risk and Compliance (RAC) Division under Chief Financial & Risk Management Officer who is responsible on formulation of policy, framework, guideline of the risk management implementation and



infrastruktur pengelolaan risiko, serta memastikan sosialisasi dan implementasi pengelolaan risiko tersebut di lingkungan Perusahaan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Divisi ini telah mengembangkan suatu Kerangka Pengelolaan Risiko PT PII (*Enterprise Risk Management/ERM Framework*) menggunakan acuan utama COSO *Enterprise Risk Management Framework* dan ISO 31000: 2009. Pada tahun 2016, PT PII juga telah menerbitkan buku Acuan Alokasi Risiko yang dapat digunakan Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) untuk menggunakannya dalam menyusun rencana mitigasi risiko dalam rangka penyediaan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Unit Kerja Terkait Penerapan ERM

Dalam penerapan *Enterprise Risk Management (ERM)*, unit kerja yang terkait diantaranya:

1. Direksi
Peran dan tanggung jawab Direksi dalam penerapan ERM, adalah:
 - Mengelola dan mengendalikan semua risiko Perusahaan;
 - Menentukan kebijakan Manajemen Risiko;
 - Memantau dan mengarahkan manajemen dalam implementasi Manajemen Risiko dan juga menjamin kecukupan alat, sistem, dan sumber daya untuk mendukung implementasi Manajemen Risiko;
 - Meninjau dan menyetujui tujuan, strategi, kerangka kerja, visi dan misi, struktur organisasi, *risk appetite*, *risk tolerance*, budaya risiko, dan alokasi sumber daya untuk Manajemen Risiko secara berkala;
 - Memantau dan mengevaluasi implementasi Manajemen Risiko;
 - Memfasilitasi proses mitigasi risiko;
 - Mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko; dan
 - Memastikan *review* independen yang komprehensif tentang pelaksanaan Manajemen Risiko.
2. Internal Audit
Direksi menetapkan fungsi Internal Audit atau Audit Internal (IA) yang bertugas memastikan penerapan ERM berjalan dengan lancar. IA bertindak sebagai *independent assurance function*. Peran dan tanggung jawab Audit Internal adalah:

infrastructure as well as ensure socialization and implementation of the risk management in the Company's circumstances. In its duty implementation, this Division has developed IIGF Risk Management Framework framework (*Enterprise Risk Management/ERM Framework*) using COSO *Enterprise Risk Management Framework* and ISO 31000:2009 as main frameworks. In 2016, IIGF has issued Risk Allocation Manual Book that can be used by Contracting Agent (CA) Supervisor to be applied in preparing risk mitigation plan in order to provider infrastructure that fulfills the public needs.

Working Unit Related with ERM Implementation

In the *Enterprise Risk Management (ERM)* implementation, the related units are among others:

1. Board of Directors
Role and responsibility of the Board of Directors in ERM implementation are:
 - Managing and controlling every risk of the Company;
 - Stipulating the Risk Management Policy;
 - Supervising and directing the management in Risk Management implementation and also ensuring sufficiency of tools, ssystem and resources to support Risk Management implementation;
 - Reviewing and approving objectives, strategy, framework, vision and mission, organization structure, risk appetite, risk tolerance, risk culture and resource allocation for Risk Mangement regularly;
 - Supervising and evaluating Risk Management implementation;
 - Facilitating risk mitigation process;
 - Evaluating Risk Management policy; and
 - Ensuring independent and comprehensive review on Risk Management implementation.
2. Internal Audit
The Board of Directors stipulated Internal Audit (IA) function who is in charge to ensure smooth ERM implementation. IA acts as *independent assurance function*. Role and responsibility of the Internal Audit are:



- Bekerja sama dengan manajemen senior dan/atau dewan mengenai kinerja dan implementasi Manajemen Risiko;
- Merasionalisasi dan mensistemasi penilaian risiko dan pelaporan atas tata kelola;
- Memberikan pengawasan pada konten/proses Manajemen Risiko, diikuti oleh garis pertahanan kedua (*second line of defense*);
- Memberikan keyakinan bahwa proses Manajemen Risiko yang memadai, sesuai dan memenuhi peraturan yang relevan; dan
- Memanfaatkan hasil proses Manajemen risiko dalam menjalankan audit yang berbasis risiko secara luas.

3. Fungsi *Central Risk Management*

Fungsi *Central Risk Management* saat ini berada di bawah Divisi *Risk and Compliance (RAC)*, mempunyai peran khusus diantaranya sebagai berikut:

- Mengembangkan kerangka kerja dan strategi Manajemen Risiko yang komprehensif;
- Meninjau dan memberikan masukan kepada Direksi terhadap kebijakan dan strategi Manajemen Risiko;
- Mempromosikan kesadaran dan pemahaman tentang proses Manajemen Risiko untuk menjamin kegiatan bisnis Perusahaan yang selaras dengan strategi Manajemen Risiko melalui pelatihan dan sesi komunikasi yang memadai;
- Memastikan bahwa semua divisi yang terkait secara aktif terlibat dan didukung dengan implementasi Manajemen Risiko, selaras dengan kerangka kerja dan kebijakan yang ditetapkan dengan mengoordinasikan dan memfasilitasi proses Manajemen Risiko di semua divisi;
- Memfasilitasi dan memantau proses pelaporan Manajemen Risiko dari semua divisi/fungsi
- Membangun budaya Manajemen Risiko di semua tingkatan dalam Perusahaan, termasuk komunikasi yang memadai tentang kerangka kerja Manajemen Risiko;
- Memfasilitasi proses Manajemen Risiko secara keseluruhan;
- Kaitan strategi dalam hal risiko untuk Perusahaan dengan memantau profil risiko yang terkonsolidasi sebagai Perusahaan secara keseluruhan;
- Memastikan Manajemen mengembangkan rencana mitigasi risiko yang memadai; dan
- Menilai risiko pada proyek ketika dibutuhkan.

- Working with the senior management and/or the Board regarding Risk Management performance and implementation;
- Rationalize and systemize risk assessment and governance reporting;
- Providing supervision on Risk Management contents/ process, followed by the second line of defense;
- Providing assurance that the Risk Management process has been sufficient, and complies with the prevailing Law and;
- Utilizing Risk Management process outcome to perform risk-based audit broadly.

3. Central Risk Management Function

Central Risk Management Function is under Risk and Compliance (RAC) Division, with special role is including:

- Developing comprehensive Risk Management framework and strategy;
- Supervising and providing recommendation to the Board of Directors on Risk Management policy and strategy;
- Promoting awareness and understanding on Risk Management process to guarantee the Company's business activity to be consistent with Risk Management strategy through sufficient training and communication sessions;
- Ensuring that every related divisions had been actively involved and supported by Risk Management implementation that is in line with framework and policy that were implemented by coordinating and facilitating Risk Management process in all divisions;
- Facilitating and supervising Risk Management reporting process in all divisions/functions
- Developing Risk Management Culture in every level of the Company, including sufficient communication on Risk Management Framework;
- Facilitating overall Risk Management process;
- Related strategy in terms of corporate risk by monitoring consolidated risk profile as a Company;
- Ensuring the Management has developed sufficient risk mitigation plan; and
- Risk assessment in the project, when necessary.



4. Unit Bisnis

Risiko, berdasarkan sifatnya, tertanam dalam setiap kegiatan di seluruh organisasi. Sebagai pemilik utama dari risiko, unit bisnis bertanggung jawab atas manajemen sehari-hari dari risiko yang timbul dari kegiatan mereka. Tugas dan tanggung jawab khusus mereka adalah:

- Memastikan implementasi dan pelaksanaan kerangka kerja *ERM* dalam fungsinya masing-masing;
- Menyelaraskan rencana bisnis dan strategi untuk kerangka kerja *ERM* secara keseluruhan;
- Menciptakan kesadaran risiko dan kontrol dalam fungsi masing-masing;
- Memastikan kecukupan dan efektivitas kontrol;
- Mengidentifikasi, menilai dan mengelola risiko dalam kegiatan sehari-hari dalam fungsinya masing-masing;
- Mengirimkan laporan kepada Fungsi Manajemen Risiko Pusat;
- Kepatuhan terhadap kerangka kerja *ERM*, kebijakan dan prosedur; dan
- Koordinasi dengan Fungsi Manajemen Risiko Pusat untuk mengidentifikasi dan memantau setiap perubahan pada lingkungan bisnis, proses atau kontrol yang mungkin berdampak terhadap eksposur risiko.

4. Business Unit

Based on its nature, risk is embedded in every activity in entire organization. As main risk owners, the business units are responsible on daily management of any risks occurred in their activities. Their special duty and responsibility are:

- Ensuring *ERM* framework implementation in each function;
- Adjustment business plan and strategy for overall *ERM* framework;
- Creating risk awareness and control in each function;
- Ensuring control sufficiency and effectiveness;
- Identifying, evaluating and managing risk in every daily activity in each function;
- Sending report to Central Risk Management Function;
- Compliance with *ERM* framework, policy and procedure; and
- Coordination with Central Risk Management Function to identify and supervise every change in business environment, process or control with possible impact on risk exposure.

Tujuan, Misi dan Filosofi Penerapan Sistem *ERM*

Tujuan Penerapan Sistem *ERM*

- Untuk mengembangkan PT PII menjadi *real resilient organization* dalam mencapai visi dan misi Perusahaan melalui evaluasi menyeluruh terhadap risiko yang melekat dalam semua kegiatan bisnis PT PII;
- Untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis risiko oleh manajemen dalam mencapai pertumbuhan bisnis yang sehat dengan mempertimbangkan risiko yang didefinisikan/pengembalian profil;
- Untuk memenuhi prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik dengan menciptakan strategi dan proses yang bijaksana; dan
- Untuk meningkatkan reputasi PT PII di mata para pemangku kepentingan.

Objectives, Mission and Philosophy of *ERM* System Implementation

Objectives of *ERM* System Implementation

- To develop IIGF as real resilient organization to achieve vision and mission of the Company through comprehensive evaluation on inherent risks in every business activity of IIGF;
- To support risk-based decision making by the Management to achieve healthy business growth by considering the defined risk/profile recovery;
- To fulfill good corporate governance principles by creating wise strategy and process; and
- To build reputation of IIGF among the Stakeholders.

Misi Penerapan Sistem ERM

Pernyataan misi Manajemen Risiko menetapkan "*tone at the top*" yang membimbing kegiatan Manajemen Risiko di seluruh organisasi. Pernyataan misi berfungsi untuk mengkomunikasikan visi, prinsip-prinsip dan mandat PT PII.

Pernyataan misi PT PII untuk Manajemen Risiko adalah "Untuk memahami risiko utama yang dihadapi organisasi dan untuk memfasilitasi proses Manajemen Risiko dengan menyediakan alat dan metodologi yang tepat dalam mengelola resiko secara eksplisit. Hal ini akan mencapai pendekatan yang konsisten dalam pengelolaan risiko dalam organisasi".

Filosofi Penerapan Sistem ERM

Untuk mendukung pernyataan misi Manajemen Risiko, ERM harus mewujudkan organisasi sadar risiko melalui:

- Pembentukan sistem manajemen berbasis risiko, yang mengelola semua risiko utama melalui praktik Manajemen Risiko yang terpasang dan melekat dalam semua kegiatan bisnis dan pengambilan keputusan.
- Pengelolaan risiko di semua tingkat dalam organisasi.
- Akuntabilitas yang jelas dan independensi dalam menjalankan tinjauan kepatuhan dan pemantauan seluruh kegiatan (semua pemilik proses bisnis).
- Adopsi standar internasional yang diterima secara luas.

Kerangka Kerja ERM PT PII

Penerapan kerangka kerja Manajemen Risiko pada PT PII melibatkan berbagai pihak, dimulai dari para Direksi, Satuan Pengawas Internal, fungsi *Central Risk Management*, serta para staf yang berada di divisi masing-masing. Tujuan keterlibatan semua pihak ini adalah timbulnya pemahaman serta sebagai bentuk dari tahapan implementasi dari rencana kerja yang telah dicanangkan.

Tujuan akhir dari penggunaan *framework* pada penerapan sistem ERM PT PII adalah sebagai pendukung dalam sistem ERM, sesuai dengan *milestones* yang telah dicanangkan. Berikut merupakan gambaran dari struktur Manajemen Risiko yang diterapkan PT PII.

Mission of ERM System Implementation

Risk Management mission statement stipulates "*tone at the top*" that guides Risk Management activity in entire organization. The mission statement is functioned to communicate the vision, principles and mandate of IIGF.

IIGF Risk Management mission statements is "To understand key risks of the organization and to facilitate Risk Management process by providing correct tools and methodology to manage the risk explicitly. This will achieve a consistent approach in the organizational risk management."

Philosophy of ERM System Implementation

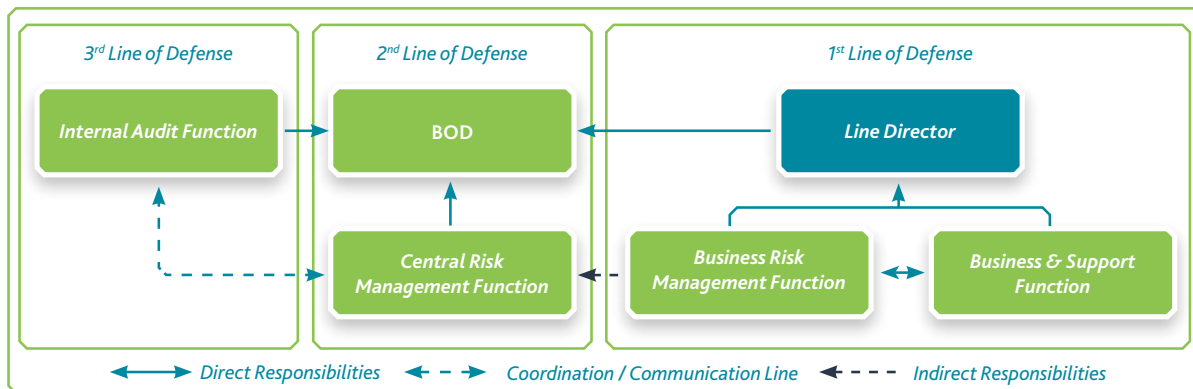
To support Risk Management mission statement, ERM shall establish risk-awareness organization, throughout:

- Establishment of risk-based management system that manages all of key risks through Risk Management practice that is installed and attached in every business activity and decision-making.
- Risk management in every level of the organization.
- Clear accountability and independency in conducting compliance review and monitoring all activities (all of business process owner).
- Adoption of international standard that is broadly accepted.

IIGF ERM Framework

Implementation of Risk Management Framework at IIGF involving every party, starting from the Board of Directors, Internal Audit Unit as well as the staffs assigned in each division. Purpose of all parties' involvement is to build understanding as well as manifestation of implementation stage of the stipulated working plan.

Final purpose of the application of framework in IIGF ERM system implementation is as supporting factor for ERM system, according to the stipulated milestones. Illustration of Risk Management structure that is implemented at IIGF is as follows:



Manajemen Risiko adalah proses berkesinambungan. Secara umum, proses Manajemen Risiko yang dijalankan PT PII tercermin pada gambaran berikut:

Risk Management is an on going process. In general, the Risk Management process implemented at IIGF is reflected in following illustration:



Evaluasi Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Evaluasi efektivitas pelaksanaan pengelolaan risiko PT PII dilaksanakan melalui beberapa mekanisme, diantaranya memasukkan aspek Manajemen Risiko dalam KPI Direksi, audit Manajemen Risiko, *review* implementasi dan *assessment risk maturity*, maupun pemantauan dan pelaporan kepada pemangku kepentingan.

Dalam pelaksanaannya, RAC secara berkala melakukan evaluasi efektivitas sistem Manajemen Risiko korporat dengan menggunakan *tools* profil risiko dan menyampaikan laporan profil risiko dimaksud kepada Direksi.

Evaluation on Effectiveness of Risk Management System

Evaluation on the effectiveness of risk management implementation at IIGF is carried out through several mechanisms, among others, including Risk Management aspect in Board of Directors KPI, Risk Management Audit, implementation review and risk maturity assessment as well as monitoring and reporting to the Stakeholders.

In its implementation, RAC evaluates corproate Risk Management system effectiveness periodically using risk profile tools and submits the risk profile report to the Board of Directors.

Upaya Mitigasi Risiko

Risiko Regulasi

Sebagai badan usaha milik negara, PT PII rentan terhadap perubahan status legalitas dan regulasi yang menjadi dasar kegiatan operasional Perusahaan. Perubahan tersebut bisa berbentuk pengurangan, perluasan, tidak berlakunya kewajiban, wewenang dan tanggung jawab PT PII dari yang sudah ditetapkan sebelumnya. Sebagai suatu risiko yang menjadi pemicu dan faktor risikonya berada di luar kendali PT PII, upaya mitigasi yang dapat dilakukan adalah membangun pemahaman yang lebih baik terhadap peran PT PII dalam percepatan pembangunan infrastruktur kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Risiko Keuangan

Risiko keuangan terutama timbul sebagai akibat ketidakmampuan PT PII mencapai sasaran pendapatan hasil usaha, kerugian dari penempatan dana investasi, serta ketidakmampuan PT PII memperoleh pendanaan baru dari pihak kreditor maupun Pemegang Saham. Mitigasi atas risiko tersebut diupayakan dengan:

- Mengamankan serta memastikan sumber-sumber pendapatan PT PII.
- Memilih investasi *portfolio* secara berhati-hati dengan faktor risiko yang minimal.
- Menjalin hubungan baik dengan berbagai lembaga keuangan, termasuk lembaga multilateral baik sebagai pihak kreditor maupun sebagai mitra dalam meningkatkan kapasitas penjaminan.

Risiko Penyediaan Penjaminan

Risiko penyediaan penjaminan merupakan risiko yang terkait dengan tugas PT PII sebagai Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI). Risiko ini meliputi terjadinya klaim atas penjaminan yang diberikan dan tidak efektifnya mekanisme regres yang menjadi dasar ganti rugi pembayaran klaim kepada PT PII, serta dipicu oleh cakupan dan tingkat risiko yang melekat pada setiap proyek yang dijamin oleh PT PII.

Risiko proyek tersebut antara lain terkait perubahan lanskap politik, pergantian Pemerintahan, perubahan peraturan dan perundang-undangan, wanprestasi kewajiban kontraktual PJPk yang dapat berdampak negatif terhadap kelayakan ekonomis proyek infrastruktur terkait.

Risk Mitigation

Regulation Risk

As a State-Owned Enterprise, IIGF is susceptible with changing legality status and regulation which based on the Company's operational activity. These changes may be implemented as reduction, extension, as well as waiver of obligation, authority and responsibility of IIGF which had been prior stipulated. As a trigger and risk factor beyond IIGF's control, the mitigation to this risk is developing better understanding on IIGF's role in infrastructure development acceleration to all Stakeholders.

Financial Risk

Financial risk is primarily occurred as the impact of IIGF's inability to achieve business revenue target, loss from investment funds placement, and inability of IIGF to acquire new financing from creditor or Shareholders. The risk mitigation is implemented throughout:

- Securing and ensuring IIGF source of revenues.
- Selecting portfolio investment prudently with minimum risk factors.
- Maintain harmonious relationship with various financial institutions, including multilateral institution both as creditor and partner to upgrade the guarantee capacity.

Guarantee Provision Risk

Guarantee provision risk is risk related with duty of IIGF as Infrastructure Guarantee Company (BUPI). The risk includes claim on provided guarantee and ineffectiveness of Recourse mechanism as basis of claim payment compensation to IIGF, as well as triggered by scope and level of inherent risk in every project that is guaranteed by IIGF.

The project risk, among others, relates with changing political landscape, Government reign, law and regulation, default on CA's contractual obligation that may cause negative impact to economic feasibility of related infrastructure project.



Upaya mitigasi terhadap risiko ini adalah:

- Melakukan analisis terhadap probabilitas dan eksposur dari setiap peristiwa risiko yang tercakup dalam perjanjian penjaminan

Penilaian Risiko

Penilaian risiko dilakukan terhadap keseluruhan risiko PT PII yang telah teridentifikasi sebelumnya sebagai bagian dari pengelolaan risiko.

Penjaminan infrastruktur oleh PT PII menjamin kewajiban finansial PJPK dalam suatu perjanjian KPBU, dimana kewajiban ini timbul akibat risiko yang disebabkan oleh peristiwa penyebab (*triggering events*) berikut:

- Tindakan atau tiadanya tindakan PJPK atau Pemerintah selain PJPK dalam hal-hal yang menurut hukum atau peraturan perundangan PJPK atau Pemerintah selain PJPK memiliki kewenangan atau otoritas untuk melakukan tindakan tersebut;
- Kebijakan PJPK atau Pemerintah selain PJPK;
- Keputusan sepihak dari PJPK atau Pemerintah selain PJPK; dan
- Ketidakmampuan PJPK dalam melaksanakan satu kewajiban yang ditentukan kepadanya oleh Badan Usaha berdasarkan Perjanjian Kerjasama (*breach of contract*).

Sesuai struktur organisasi PT PII Divisi *Risk and Compliance (RAC)* adalah divisi yang salah satu tugasnya memonitor pelaksanaan *ERM* Perusahaan. Sebagai pemilik kerangka pengelolaan risiko di PT PII, terhadap risiko penjaminan proyek, *RAC* memberikan masukan dari sudut pandang yang independen terhadap dampak dari risiko proyek dan potensi klaim penjaminan terhadap PT PII sebagai perusahaan. Secara khusus, *RAC* akan melakukan tinjauan independen terhadap kepatuhan proses penilaian dan memberikan komentar independen dari perspektif risiko institusi (baik batas-batas tertentu dilampaui, atau jika ada masalah institusi yang tidak ditangani, dan sebagainya) yang berasal dari tahap evaluasi proyek (*appraisal*) dan tahap penstrukturan penjaminan (*structuring*).

Risk mitigation plan includes:

- Analysis on probability and exposure of every risk event included in the guarantee agreement.

Risk Assessment

Risk assessment is done towards entire risks of IIGF that had been identified previously as part of risk management.

Infrastructure guarantee by IIGF secures CA's financial obligation in a PPP contract where the obligation is occurred due to the risks caused by triggering events, as follows:

- Action or unavailability of action by CA or Non-CA Government that have authority to administer the action under the Law or CA's Regulation;
- Policy of CA or Non-CA Government;
- Unilateral decision from the CA or Non-CA Government; and
- Inability of the CA in carrying out an obligation is determined by Enterprise based on MOU (breach of contract).

Based on IIGF's organization structure, Risk and Compliance (RAC) Division is a division with one of the duties is to monitor ERM implementation in the Company. As owner of risk management framework at IIGF, regarding the project guarantee risk, RAC provides recommendation from independent perspective towards impact of project risk and guarantee claim potential to IIGF as a Company. Particularly, RAC will perform independent review on assessment process compliance and provide independent opinion from institutional risk perspective (either violation of particular limit or unprocessed institutional issue and others) from project evaluation (*appraisal*) phase and guarantee restructuring phase.

Mekanisme pemantauan penjaminan proyek harus dijalankan untuk mengidentifikasi seluruh eksposur risiko, jika ada sebelum mereka berubah menjadi klaim. Dalam hal ini, PT PII melalui divisi *Project Monitoring and Claim (PMC)* akan memantau profil eksposur penjaminan secara periodik melalui pemantauan terhadap upaya PJP dalam melakukan mitigasi risiko dalam implementasi proyek. Dengan demikian, mekanisme pemantauan akan membantu PT PII untuk mengambil tindakan perbaikan dan membatasi terjadinya klaim.

PT PII sebagai sebuah institusi perlu memantau eksposur peristiwa risiko operasional, antara lain:

- a. Risiko personil utama
- b. Kecurangan internal
- c. Kecurangan eksternal
- d. Praktik kerja
- e. Kerusakan aset fisik
- f. Gangguan usaha
- g. Pengelolaan eksekusi, penyelesaian dan proses
- h. Keselamatan kerja

Terhadap risiko keuangan Perusahaan yang terkait dengan ketidakpastian pasar, PT PII melalui divisi *Treasury and Investment (TRI)* menerapkan kebijakan investasi yang bijaksana untuk pengelolaan dana dan untuk mencapai hasil optimal. Investasi dana yang belum dicadangkan untuk penjaminan proyek akan mengikuti norma-norma yang diatur dalam kebijakan internal Perusahaan. Norma-norma tersebut dirumuskan untuk memberikan fleksibilitas yang cukup untuk mengoptimalkan pengembalian investasi tanpa mengambil risiko yang berlebihan.

Penilaian Risiko Untuk Penjaminan Infrastruktur

Keputusan PT PII dalam penyediaan penjaminan risiko infrastruktur dalam suatu proyek KPBU dibuat setelah mengevaluasi, antara lain, kesesuaian draf perjanjian KPBU dengan prinsip alokasi risiko, seperti digambarkan dalam diagram berikut:

The project guarantee monitoring mechanism shall be implemented to identify entire risk exposure, if any, before turned into claim. In this course, through Project Monitoring and Claim (PMC) Division, IIGF will monitor guarantee exposure profile periodically by supervising CA's effort in conducting risk mitigation on the project implementation. Therefore, the monitoring mechanism will help IIGF to take improvement plan and limit the claim submission.

As an institution, IIGF shall oversee operational risk event exposure, among others:

- a. Key personnel risk
- b. Internal Fraud
- c. External Fraud
- d. Employment Practice
- e. Physical Assets Damage
- f. Business Disruption
- g. Management of execution, settlement and process
- h. Occupational Safety

In the course of financial risk related with market uncertainty, through Treasury and Investment (TRI) Division, IIGF implemented wise investment policy to manage funds and achieve optimum result. The unreserved fund investment for project guarantee will comply with norms that are regulated in internal policy of the Company. The norms are formulated to provide sufficient flexibility to optimize investment return without taking excessive risks.

Risk Assessment on Infrastructure Guarantee

IIGF Decision on provision of infrastructure risk guarantee in a PPP project is provided after the evaluation process, namely, consistency between PPP contract draft with risk allocation principle as illustrated in the chart below:



Aktivitas Appraisal Lainnya

Other Activities in Appraisal

Penilaian Risiko

Risk Assessment

Usulan Penjaminan (UP)
Guarantee Proposal (GP)

1.

Draft Perjanjian KPBU
Draft PPP Agreement

Dokumentasi Lainnya
Other Documentation

Sesuai Prinsip
Alokasi Risiko?
Based on the Risk Allocation
Principle

Ya
Yes

Risiko yang dipertimbangkan
untuk dijamin oleh PT PII
Risk coverage considered to be
guaranteed by IIGF

Ya
Yes

Tidak dapat dijamin
Not eligible for guarantee

2.

Acuan Risiko PT PII Kategori
Risiko KPBU & Matriks
Risiko KPBU
IIGF Risk Reference, PPP Risk Category &
PPP Risk Matrix

Kerangka Regulasi KPBU dan Penjaminan Infrastruktur

Regulatory Framework for PPP and infrastructure Guarantee

Perpres Nomor. 67/2005
jo 13/ 2012 (Infrastruktur
KPBU)
Presidential Regulation
Number. 67/ 2005 jo 13/
2012
(PPP Infrastructure)

Perpres Nomor.
78/2010 (Penjaminan
Infrastruktur)
Presidential Regulation
Number.78/ 2010
(Infrastructure Guarantee)

PMK Nomor. 260/2012
(Juklak Perpres 28/ 2012)
Ministry of Finance
Regulation Number. 260/
2012 (Implementing
Regulation on Presidentials
Regulation 28/ 2012)

Prinsip Alokasi Risiko
Principles of Risk Allocation

Tinjauan Tahun 2016

Di tahun 2016, Divisi *Risk and Compliance (RAC)* telah menjalankan beberapa program kerja dalam rangka membangun PT PII menjadi organisasi yang mampu mengelola risiko yang melekat dalam semua kegiatan bisnis PT PII dalam mencapai visi dan misi Perusahaan serta mendukung pengambilan keputusan berbasis risiko oleh Manajemen dalam mencapai pertumbuhan bisnis yang sehat dengan mempertimbangkan risiko maupun manfaat.

Fungsi Kepatuhan Prosedur

Selain fungsi Manajemen Risiko, Divisi *Risk and Compliance* PT PII juga mengelola Fungsi Kepatuhan prosedur sebagai bagian dari implementasi *GCG* dan *internal control*.

2016 Review

In 2016, Risk and Compliance (RAC) Division had implemented working programs to develop IIGF as an organization with capability to manage inherent risk in every business activity of IIGF to achieve vision and mission of the Company as well as to support risk-based decision making by the Management in pursuing healthy business growth and considering risk and benefit.

Procedure Compliance Function

Besides Risk Management function, the Risk and Compliance Division of IIGF also manages Procedure Compliance Function as part of GCG and internal control implementation.



Standar operasional prosedur yang berbasis risiko dibangun untuk mengelola risiko dalam operasional PT PII. Kajian atas kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur internal dilakukan untuk mengawasi dan mengelola isu kepatuhan dalam organisasi, serta memastikan bahwa Perusahaan dan karyawannya mematuhi kebijakan dan prosedur internal yang ada. Kajian ini dilakukan secara independen untuk memastikan isu kepatuhan dalam organisasi dievaluasi, diinvestigasi dan dilaporkan secara tepat.

Berbeda dengan fungsi internal audit yang ditempatkan setelah transaksi, kajian atas kepatuhan (*compliance review*) dirancang sebagai salah satu alat pengelolaan risiko sebelum transaksi. Unit Kepatuhan memberikan peringatan awal kepada manajemen dalam pengawasan isu kepatuhan.

Di tahun 2015, RAC telah menjalankan beberapa program kerja dalam rangka mengelola risiko kepatuhan prosedur dalam organisasi.

Risk-based standard operating procedure is developed to manage risk and operations of IIGF. Review on compliance with internal policy and procedure was done to oversee and manage compliance issue in the organization, and to ensure that the Company and employees comply with existing internal policy and procedure. The review is done independently to ensure compliance issue in the organization to be evaluated, investigated and reported accurately.

Unlike the internal audit function which was assigned after the transaction, the compliance review is designed as one of risk management tools before doing transaction. Compliance Unit provides early warning to the Management in monitoring the compliance issue.

In 2015, RAC had carried out working programs to manage procedure compliance risk in the organization.



Perkara Hukum dan Sanksi Administratif

Legal Case and Administrative Sanction

Pada periode tahun 2016, PT PII, anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT PII tidak terlibat dalam perkara hukum apa pun, baik berstatus sebagai pelapor maupun terlapor.

Pada periode tersebut, PT PII juga tidak menerima sanksi administratif apapun dari otoritas terkait.

2016 period, Board of Commissioners and Board of Directors members of IIGF were not involved in any legal case either as prosecutor or defendant.

During the period, IIGF was also not charged by any administrative sanction from related authority.

Kode Etik

Code of Conducts

Keberadaan Kode Etik

Kode Etik merupakan bagian dari budaya PT PII yang mencerminkan penjiwaan dari nilai-nilai dasar PT PII, yaitu In TIME (*Integrity, Teamwork, Think Big, Mutual Trust, dan Excellence*). Kode Etik ini juga merupakan bagian tak terpisahkan dari kebijakan-kebijakan yang terdapat dalam Peraturan PT PII. Karena itu, Kode Etik ini menjadi panduan untuk bersikap, berperilaku dalam menjalankan tugas sehari-hari, serta pedoman pada setiap pengambilan keputusan.

Segenap jajaran mulai dari Dewan Komisaris dan anggota Komite-Komite, Direksi, Pemimpin Unit Kerja, hingga seluruh karyawan, wajib menjunjung tinggi komitmen terhadap Kode Etik Perusahaan. Kode Etik Perusahaan disusun untuk menjadi panduan perilaku seluruh jajaran PT PII dalam menjalankan kegiatan bisnis dan operasional sehari-hari, tanpa memandang fungsi, pangkat atau posisi jabatan.

Isi Kode Etik

Pedoman Kode Etik Perusahaan PT PII terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. Pendahuluan
2. Pedoman Perilaku Perusahaan
3. Pelaporan Pelanggaran Kode Etik dan Pernyataan Kepatuhan

Existence of Code of Conducts

Code of Conducts is part of IIGF culture that reflects manifestation of IIGF core values, InTIME (*Integrity, Teamwork, Think Big, Mutual Trust and Excellence*). The Code of Conducts is integrated part of policies in the IIGF Regulation. Therefore, Code of Conducts becomes the guidelines for conducts, behavior in carrying out daily duties as well as guideline for every decision making.

Every management starting from the Board of Commissioners and members of the Committees, Board of Directors, Head of Working Unit up to all employees are regulated to uphold commitment on the Code of Conducts. The Code of Conducts is prepared to be applied as guideline of conducts for every part of IIGF in performing daily business and operational activities without discriminating the function, grade or position.

Code of Conducts Contents

IIGF Code of Conducts consists of 3 (three) sections, as follows:

1. Introduction
2. Code of Conducts
3. Code of Conducts Violation Reporting and Statements of Compliance

Intisari atau pokok-pokok isi kode etik Perusahaan adalah tentang:

- Penyalahgunaan jabatan
- Etika dalam berhubungan dengan pemangku kepentingan
- Kepedulian terhadap lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja
- Kesempatan kerja yang adil
- Standar etika hubungan antara Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan.
- Integritas Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan
- Hak atas kekayaan intelektual
- Kebijakan pengungkapan informasi
- Pemberian dan penerimaan hadiah dan donasi
- Informasi orang dalam keterlibatan aktivitas politik
- Perlindungan dan penggunaan aset secara efisien
- Citra Perusahaan
- Larangan kepemilikan dan penggunaan alkohol dan/atau narkoba, psikotropika dan zat aditif

Pengungkapan Kode Etik kepada Seluruh Level Organisasi

Kode Etik Perusahaan berlaku bagi setiap karyawan tanpa pengecualian. Setiap karyawan yang baru direkrut akan memperoleh dokumen Kode Etik Perusahaan dan menandatangani pernyataan untuk mentaati seluruh isi Kode Etik Perusahaan.

Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Pelanggaran terhadap Kode Etik Perusahaan akan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan Perusahaan dan hukum yang berlaku.

Pernyataan Mengenai Budaya Perusahaan

PT PII dituntut untuk dapat menerapkan prinsip-prinsip yang diyakini baik dan benar dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya. Prinsip-prinsip tersebut harus menjadi budaya yang hidup dalam organisasi PT PII. Saat ini PT PII telah memiliki nilai-nilai budaya yang dikenal sebagai InTIME, yakni *Integrity, Teamwork, Think Big, Mutual Trust*, dan *Excellence*.

Provisions or principal contents of the Code of Conducts are among others:

- Abuse of position
- Ethics in dealing with stakeholders
- Concern for the environment, health and safety working environment
- Fair job opportunities
- Ethical standards of relationship between the Board of Commissioners, Directors and Employees.
- Integrity of Board of Commissioners, Directors and employees.
- Intellectual property rights
- Policy on information disclosure
- Giving and receiving gifts and donations
- Information on politically exposed people
- Protection and efficient usage of assets
- Corporate Image
- Prohibition on possession and use of alcohol and/or drugs, psychotropic substances and additives

Code of Conducts Disclosure to All Levels of the Organization

Code of Conducts prevails for every employee without exception. Every newly-recruited employee will acquire Code of Conducts document and sign Integrity Statements to comply with entire provisions of the Code of Conducts.

Punishment to Code of Conducts Violation

Violation against the Code of Conducts will be punished in accordance with prevailing Law and Regulation.

Corporate Culture Statements

IIGF is expected to implement set of principles that are believed good and correct in exercising its role and responsibility. The principles shall be internalize as culture in the organization of IIGF. Currently, IIGF has formulated corporate culture values known as InTIME, Integrity, Teamwork, Think Big, Mutual Trust and Excellence.



Nilai-Nilai Utama: In TIME

Integrity/Integritas

1. Bekerja dengan standar etika tertinggi.
2. Jujur terhadap diri sendiri maupun orang lain dalam segala urusan.
3. Mengutamakan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi, golongan dan/atau pihak-pihak lain.
4. Menjaga komitmen dalam melaksanakan tugas.
5. Mentaati aturan Perusahaan.
6. Bertanggung jawab dalam seluruh tindakan.

Teamwork/Kerja Sama

1. Beroperasi sebagai sebuah tim.
2. Memberi kontribusi keterampilan dan pengetahuan demi kepentingan tim.
3. Mengutamakan kepentingan tim untuk mencapai tujuan Perusahaan.

Think Big/Berpikiran Luas

1. Memiliki pemikiran luas dan mutakhir.
2. Mempertimbangkan berbagai alternatif untuk hasil yang lebih baik bagi Perusahaan dan bagi pemangku kepentingan.
3. Menggali secara terus menerus ide-ide baru untuk perkembangan Perusahaan.
4. Terbuka terhadap berbagai perkembangan yang ada di lingkungan demi hasil terbaik tanpa meninggalkan prinsip tata kelola yang baik.

Mutual Trust /Saling Percaya

1. Memegang teguh etika bisnis bersama seluruh komponen internal Perusahaan maupun dengan mitra Perusahaan.
2. Konsisten memenuhi standar layanan yang dijanjikan.
3. Mempercayai dan menghormati satu sama lain dengan itikad baik untuk mendapatkan kepercayaan dari rekan-rekan kerja dan mitra bisnis.

Excellence/Keunggulan

1. Berkomitmen untuk menjadi yang terunggul dalam melaksanakan apapun yang dilakukan.
2. Berusaha untuk melakukan perbaikan yang terus menerus.
3. Memiliki pengetahuan mendalam guna mendukung kegiatan dan mendapatkan hasil yang melebihi harapan.

Core Values: In TIME

Integrity

1. To work with the highest standard of ethics.
2. To be honest with oneself or other persons in all interactions.
3. To uphold the interest of the Company above the interest of the individual, group and/or other parties.
4. To maintain the commitment in executing duties.
5. To always comply with company regulations.
6. To always be responsible in all actions.

Teamwork

1. To operate as a team.
2. To contribute in skills and knowledge for the benefit of the team.
3. To uphold the interest of the team in striving for company's objectives.

Think Big

1. To be broad-minded and cognizant of the latest issues.
2. To consider alternatives that can lead to improved results for the benefit of the company and stakeholders.
3. To continuously strive for innovation towards the Company's development.
4. To be receptive to various developments in the work environment that can lead to the best results while adhering to the principles of good governance.

Mutual Trust

1. To uphold the highest of business ethics with all components within the company as well as with business partners.
2. To consistently fulfill the agreed service level standard.
3. To trust and respect one another in good faith in order to earn the confidence of co-workers and business partners.

Excellence

1. To commit to be the best in all of one's endeavor.
2. To strive for continuous improvement.
3. To develop comprehensive and thorough knowledge that can support one's work and deliver results that are above expectation.

Sistem Pelaporan Pelanggaran

Whistle Blowing System

Hingga 31 Desember 2016, PT PII belum memiliki sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) yang didesain khusus untuk membantu mencegah terjadinya pelanggaran kode etik, tindak kejahatan *fraud* maupun korupsi. Namun, fungsi tersebut tetap berjalan dengan baik dengan cara mengintensikan mekanisme pengawasan dan pengendalian internal dengan melibatkan satuan yang ada, sehingga setiap potensi pelanggaran tersebut dapat terdeteksi dan dapat dicegah sejak dini.

As of December 31, 2016, IIGF has not established whistle blowing system that is especially designed to help preventing violation against code of conducts, fraud and corruption crimes. However, the function is implemented very well by concerning internal audit and internal control mechanism by involving existing units, therefore, every fraud potential will be early detected and prevented.

Penyimpangan Internal

Internal Fraud

Selama tahun 2016 tidak ada penyimpangan yang bersifat kecurangan yang dilakukan oleh karyawan PT PII.

Throughout 2016, there was no internal fraud committed by employees of IIGF.

Benturan Kepentingan

Conflict of Interest

Benturan kepentingan adalah suatu keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomi Perusahaan dengan kepentingan ekonomi pribadi Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham. Selama tahun 2016 tidak ada transaksi yang memiliki benturan kepentingan di PT PII, setiap transaksi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan selalu memperhatikan prinsip-prinsip GCG.

Conflict of interest refers to condition between conflicting economic interest of Company with personal economic interest of the Board of Directors, Board of Commissioners and Shareholders. Throughout 2016, there was no transaction with conflict of interest at IIGF where every transaction was conducted in compliance with the prevailing Law and always concerns the GCG principles.



Akses Data Dan Informasi Perusahaan

Access To Corporate Data And Information

Dalam rangka mendukung komitmen penerapan keterbukaan informasi, PT PII menyediakan berbagai akses informasi mengenai Perusahaan melalui Laporan Tahunan Perusahaan, *website* Perusahaan, media cetak dan siaran pers. Selain itu, informasi tentang Perusahaan dapat diakses secara langsung melalui telepon, faksimili, dan email.

Laporan Tahunan

Mengacu kepada Peraturan Kementerian BUMN Nomor: PER-01/ MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN, Perusahaan mengungkapkan informasi keuangan, informasi penting maupun hal-hal lainnya yang menyangkut Perusahaan dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan termasuk juga pelaksanaan pencapaian dan kegiatan usaha Perusahaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Laporan Tahunan tersebut dapat diunduh pada *website* Perusahaan.

Website dan Alamat Kontak Perusahaan

Melalui *website* Perusahaan www.iigf.co.id, pemangku kepentingan dan masyarakat umum juga dapat mengakses berbagai publikasi mengenai Perusahaan, termasuk Profil Perusahaan, Laporan Tahunan, dan dokumen-dokumen resmi lainnya. Publik juga dapat mengakses informasi langsung melalui:

- Telepon : 021-5795-0550
- Faksimili : 021-5795-0040
- Email : info@iigf.co.id

Media Cetak

PT PII juga menyiapkan informasi dalam bentuk media cetak yang disalurkan melalui beberapa media yaitu diantaranya melalui surat kabar nasional, company profile, dan brosur.

In order to support the commitment of disclosure of information, IIGF provides access to Corporate information through various media, including Annual Report, website, print media and press releases. Direct information, meanwhile, can be obtained via telephone, fax, and email.

Annual Report

Referring to Ministry of State Owned Enterprise Regulation No. PER-01/ MBU/2011 on Good Corporate Governance in SOEs, the Company discloses financial data, important information and other information concerning the Company in its Annual Report and Financial Report, including the execution of targets and activities throughout the preceding year. The Annual Report could be viewed on the Company's website.

Company Website and Contact Information

Through the Company's website www.iigf.co.id, Stakeholders and the general public can access various Company documents, including the Company Profile, Annual Report, and other official documents. The public can also access the information directly through:

- Telephone : 021-5795-0550
- Fax : 021-5795-0040
- Email : info@iigf.co.id

Print Media

IIGF also provides information in the various print media, including national newspapers, Company profiles, and brochures.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility





Melalui implementasi program CSR yang terencana, tepat sasaran, transparan dan berkelanjutan, PT PII ingin menciptakan manfaat atas kehadiran Perusahaan melalui upaya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Through a well-planned, effective, transparent and sustainable CSR program implementation, IIGF plans to create benefit on the Company's existence by improving living standard and welfare of the overall Indonesian people .

271 Dasar Acuan Pelaksanaan Program CSR
CSR Program Frameworks

271 Tujuan Pelaksanaan Program CSR
Objectives of CSR Program Implementation

272 Pengelolaan CSR PT PII
IIGF CSR Management

272 Perencanaan Program CSR
CSR Program Planning

273 Sumber Dana CSR
Source of CSR Budget

274 Alokasi dan Penggunaan Anggaran Dana CSR
CSR Budget Allocation and Disbursement

276 Tanggung Jawab Terhadap Pelestarian Lingkungan Hidup
Responsibility Towards The Preservation Of The Environment

277 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Yang Terkait Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Corporate Social Responsibility Related with Occupational Health, Safety and Employment

280 Tanggung Jawab Pengembangan Sosial Kemasyarakatan
Social Community Development Responsibility

283 Tanggung Jawab Kepada Pelanggan
Responsibility to Customers





PT PII meyakini bahwa Perusahaan dapat tumbuh dan berkembang dengan menjalankan praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab. Berlandaskan pada keyakinan tersebut, PT PII menempatkan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) dalam kerangka upaya perusahaan untuk mencapai keberlanjutan (*sustainability*) dalam jangka panjang.

Komitmen tersebut berlandaskan kesadaran perusahaan sebagai entitas bisnis yang bertanggung jawab yang senantiasa mengedepankan kinerja dan pencapaian yang tidak hanya diukur melalui perolehan laba semata.

Penerapan CSR merupakan salah satu bentuk kinerja dan investasi sosial PT PII kepada masyarakat. Melalui implementasi program CSR yang terencana, tepat sasaran, transparan dan berkelanjutan, PT PII ingin menciptakan manfaat atas kehadiran Perusahaan melalui upaya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

IIGF believes that the Company will grow and develop by exercising ethical and responsible business practice. Based on this confidence, IIGF treats Corporate Social Responsibility (CSR) in a framework of the Company's initiative to achieve long-term sustainability

The commitment also departed from the Company's awareness as a responsible business entity that always promotes performance and achievement and not only evaluated solely by profit gain.

CSR implementation is one of IIGF's social performance and investment to the society. Through a well-planned, effective, transparent and sustainable CSR program implementation, IIGF plans to create benefit on the Company's existence by improving living standard and welfare of the overall Indonesian people .



Dasar Acuan Pelaksanaan Program CSR

CSR Program Frameworks

Dasar Acuan Pelaksanaan Program CSR

Pelaksanaan CSR PT PII mengacu kepada peraturan sebagai berikut:

1. Undang - Undang Nomor. 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas pasal 74.
2. Undang - Undang Nomor. 19 Tahun 2003 pasal 88 tentang BUMN.
3. Peraturan Pemerintah Nomor. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Terbatas.

CSR Programs Frameworks

IIGF CSR implementation refers to set of regulation, as follows:

1. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company Article 74.
2. Law No. 19 of 2003 article 88 concerning SOE.
3. Government Regulation No. 47 of 2012 regarding Social and Environment Responsibility for Limited Company.

Tujuan Pelaksanaan Program CSR

Objectives of CSR Program Implementation

Program CSR merupakan bentuk komitmen dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap dampak yang diakibatkan oleh kebijakan dan kegiatan operasionalnya kepada masyarakat maupun lingkungan.

Pelaksanaan program CSR di PT PII dimaksudkan untuk:

- Eksternal:
 - a. Mewujudkan tanggung jawab sosial dan etika perusahaan dalam rangka peran serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan.
 - b. Memperkuat citra positif dan reputasi Perusahaan.
 - c. Meningkatkan kesempatan masyarakat untuk berkembang baik secara sosial masyarakat maupun pendidikan.
- Internal:
 - a. Sebagai salah satu langkah Perusahaan dalam memperkuat *awareness* dan *branding* kepada publik.
 - b. Sebagai langkah antisipatif atas risiko bisnis Perusahaan (mitigasi risiko) atas konflik yang timbul akibat aktivitas bisnis Perusahaan.

CSR Program is manifestation of commitment and Corporate Social Responsibility toward every impact occurring from its operational policy and activity tot he society and environment.

Objectives of CSR Program implementation in IIGF are as follows:

- External
 - a. Realization of corporate social responsibility and corporate ethics as participation to improve living standard of the society and environment.
 - b. Build the Company's positive image and reputation.
 - c. Increase opportunity to the society to grow in terms of social competency and education.
- Internal
 - a. As one of the Company's initiative in strengthening awareness and branding to the public.
 - b. As anticipatory plan on the Company's business risk (risk mitigation) due to any conflict occurred as the impact of the Company's business activity

Pengelolaan CSR PT PII

IIGF CSR Management

Tanggung jawab pengelolaan program CSR di PT PII dilakukan oleh Divisi *Corporate Secretary* yang berada di bawah pengawasan Direksi. Divisi *Corporate Secretary* menyusun program CSR yang dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan mitra kerja pihak ketiga, yaitu akademik, instansi pemerintah, lembaga kemanusiaan nasional dan lembaga sosial lokal sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas program. Adapun terkait dengan aspek ketenagakerjaan dan tanggung jawab terhadap konsumen, dalam hal ini dikoordinasi oleh unit SDM dan divisi terkait lainnya.

Responsibility of CSR program management in IIGF is under Corporate Secretary Division that is under supervision of the Board of Directors. The Corporate Secretary Division prepares CSR program which implementation is cooperated with third party partners such as academics, government institution, national humanitarian organization and local social organization based on needs by considering efficiency and effectiveness of the program. In terms of employment aspect and responsibility to the customers, coordination had been done among Human Resources Unit and other related divisions.

Perencanaan Program CSR

CSR Program Planning

Perencanaan atas program CSR di PT PII berikut implementasinya dapat dilaksanakan dengan mengacu pada:

1. Membangun Kemitraan dan Melibatkan Mitra dalam Pelaksanaan Program CSR.
PT PII dapat membangun kemitraan dan kerja sama dengan mitra kerja untuk memastikan program CSR dapat tepat sasaran. Adanya kriteria mitra dapat dipilih dan dilibatkan melalui:
 - a. Sinergi dengan IIGF Institute dan menjadi bagian dari komitmen kerja sama institusi dan lembaga pendidikan.
 - b. Lembaga Kemanusiaan dan Sosial atau Organisasi Kemasyarakatan yang kredibel.
 - c. Lembaga Pemerintah terkait.
 - d. Rekan Bisnis PT PII.
 - e. Media.

Dalam pemilihan mitra, unit kerja CSR dapat mengikuti peraturan/kebijakan/SOP *procurement* terkait.

2. Keterlibatan dan Partisipasi Karyawan.
Karyawan merupakan aset terbesar yang dimiliki Perusahaan. Untuk mencapai tujuan CSR, PT PII dapat menjalin hubungan baik dengan karyawan dan melibatkan karyawan sebagai salah satu upaya memotivasi karyawan agar peduli dengan lingkungan dan sosialnya. Bentuk kerja sama kegiatan CSR PT PII ini dapat dituangkan melalui kegiatan yang melibatkan karyawan melalui divisi *Corporate Service* ataupun organisasi yang melibatkan karyawan, contohnya seperti Koperasi Karyawan dan sebagainya.

CSR program planning in IIGF altogether with its implementation is referring to:

1. Partnership Development and Partner Involvement in CSR Program Implementation.
IIGF may develop partnership and cooperation with the partners to ensure that the CSR program is effective. Criteria of eligible partners to be appointed and involved throughout:
 - a. Synergy with IIGF Institute and being part of educational institution and agency partnership commitment.
 - b. Credible Humanitarian and Social Organizations or Non-Government Organization.
 - c. Related Government Bodies.
 - d. Business Partners of IIGF.
 - e. Press.

In the course of partner selection, CSR Unit shall comply with related procurement regulation/policy/SOP.

2. Employee Involvement and Participation
Employee is the greatest assets owned by the Company. To achieve CSR target, IIGF engaged in harmonious relationship with the employees and involve them as a way to motivate the employees to have awareness in environment and social aspects. Type of IIGF CSR partnership activity may be carried out as activity that involves the employees under Corporate Secretary Division or the organization which involves the employees, such as Employee Cooperatives and others.



3. Menjaring Masukan dan Dukungan dari Pemangku Kepentingan.

Masukan dari para Pemangku Kepentingan menjadi hal penting bagi PT PII untuk menyusun dan memperbaiki strategi CSR PT PII serta menentukan program prioritas yang perlu diimplementasikan sesuai kebutuhan *stakeholders* yang berkembang di masyarakat

3. Feedback Submission and Support From the Stakeholders

Feedback from the Stakeholders are important for IIGF to prepare and improve IIGF CSR Strategy and to determine priority program that shall be implemented based on growing needs of the stakeholders in the society.

Sumber Dana CSR

Source of CSR Budget

Untuk membiayai pelaksanaan program CSR, PT PII mengalokasikan sejumlah dana dari anggaran biaya operasional perusahaan yang diperuntukkan bagi keperluan program CSR perusahaan. Pengalokasian anggaran CSR dianggarkan setiap tahunnya sesuai dengan rencana kerja yang disusun setiap tahunnya. Pada tahun 2016, jumlah dana yang dianggarkan PT PII untuk menjalankan program CSR adalah sebesar Rp1.776.000.000. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan jumlah anggaran CSR tahun sebelumnya, yakni sebesar Rp620.000.000.

To finance implementation of CSR Program, IIGF had budgeted funds from the Company's operational cost that was dedicated for the Company's CSR program. Allocation of CSR funds is budgeted annually according to the working plan that is prepared in ever year. In 2016, total budget allocated by IIGF for CSR program amounted to Rp1,776,000,000. The amount was higher if compared with CSR budget in the previous year that was Rp620,000,000.



Alokasi dan Penggunaan Anggaran Dana CSR

CSR Budget Allocation and Disbursement

Dalam perencanaan program CSR dan penyaluran anggaran dana CSR, agar mempertimbangkan tiga prinsip sebagai berikut:

- Proximity**
Kedekatan program CSR tersebut dengan posisi geografis kegiatan bisnis Perusahaan.
- Relevance**
Sejauh mana kegiatan CSR tersebut relevan bisnis Perusahaan, meningkatkan *brand awareness* dan sebagai upaya mitigasi risiko Perusahaan terhadap aktivitas bisnisnya yang memberi dampak pada lingkungan dan sosial.
- Magnitude**
Bagaimana program CSR dapat memberikan efek/dampak yang paling besar kepada *stakeholders* yang terkena dampak program.

Titik berat pelaksanaan program CSR PT PII adalah pada pengembangan dan peningkatan kapasitas pada bidang pendidikan. PT PII meyakini bahwa pendidikan merupakan bentuk investasi jangka panjang bagi kemajuan masyarakat dan

In the CSR program implementation, CSR budget was disbursed by considering three principles, as follows:

- Proximity**
Proximity CSR Program related with geographical position of the Company's business activity.
- Relevance**
How far the CSR activity is relevant with the Company's business, to build brand awareness and becomes a risk mitigation effort on its business activity that brought impact in environment and social.
- Magnitude**
How the CSR Program may provide the most significant effect/impact to the Stakeholders.

Focus of IIGF CSR program implementation is the capacity development and improvement in education sector. IIGF believes that education is long-term investment for the State and Society. Therefore, capacity development for the teachers



bangsa. Karena itu, selain peningkatan kapasitas untuk guru maupun orang tua, pengembangan fisik dan prasarana pendidikan juga menjadi salah satu fokus kegiatan, untuk menunjang pengembangan kapasitas di bidang pendidikan tersebut.

Pemanfaatan alokasi dana CSR PT PII sesuai prioritas mengacu pada SOP sebagai berikut:

and parents, physical development and educational facilities were also focus of the activities to support the capacity building in education sector.

Realization of IIGF CSR budget allocation based on priority refers to SOP, as follows:

No.	Prioritas Bantuan Donation Priority	Alokasi Allocation
1.	Pendidikan (peningkatan kapasitas pengetahuan, sarana dan prasarana pendidikan) Education (knowledge capacity building, education facility and infrastructure)	45%
2.	Bantuan tanggap darurat bencana alam Natural disaster relief	10%
3.	Kesehatan Health	10%
4.	Keagamaan Religious	5%
5.	Sosial dan Budaya Social and cultural	5%
6.	Pemuda dan Olahraga Youth and Sport	5%
7.	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Public Economy Development	5%
8.	Pelestarian/Penghijauan Lingkungan Environment Preservation/Conservation	5%
9.	Donasi dan Sponsorship Donation and Sponsorship	5%
10.	Lain-lain Others	5%
	Total	100%

Tanggung Jawab Terhadap Pelestarian Lingkungan Hidup

Responsibility Towards The Preservation Of The Environment.

Kebijakan

Sekalipun kegiatan usaha PT PII memiliki dampak langsung yang relatif kecil terhadap lingkungan hidup, namun PT PII memiliki komitmen kuat untuk ikut terlibat pada upaya memelihara kelestarian lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung.

PT PII percaya, lingkungan hidup merupakan salah satu faktor utama dalam menunjang keberlangsungan bisnis Perusahaan. Karena itu, dalam setiap kegiatan bisnis PT PII senantiasa memastikan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Kebijakan PT PII terkait pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup diwujudkan dalam bentuk himbauan, maklumat dan Peraturan Perusahaan dalam rangka meminimalisir dampak operasional Perusahaan terhadap lingkungan hidup.

Selain kebijakan terkait pihak internal, PT PII juga telah menyusun kebijakan yang terkait dengan pihak eksternal, yaitu pihak pengembang infrastruktur yang akan memanfaatkan fasilitas penjaminan yang diberikan oleh PT PII. Terkait pihak eksternal, PT PII telah menyusun Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial (ESMF) sejak April 2012.

Pelaksanaan Program

Pada tahun 2016, PT PII melaksanakan kegiatan Reboisasi hutan yang berlokasi di Dataran Tinggi Dieng, Jawa Tengah. Pada kegiatan tersebut, PT PII melakukan penanaman 1.000 bibit pohon dan memberikan donasi dalam bentuk kantong sampah kepada masyarakat di sekitar lokasi kegiatan. Hal ini dimaksudkan agar kesadaran masyarakat di wilayah tersebut terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup dapat terus ditingkatkan.

Sertifikasi di Bidang Lingkungan Hidup

Hingga 31 Desember 2016, PT PII belum memiliki sertifikasi yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Hal ini dikarenakan lini bisnis utama PT PII yang tidak bersentuhan secara langsung dengan lingkungan hidup.

Policy

Despite business activity of IIGF that only imposed minor impact to the environment, IIGF has strong commitment to be involved in the environment preservation both directly and non-directly.

IIGF believes that environment is one of main factors to support business continuity. Therefore, every business activity of IIGF, the Company always ensures that the implemented business activity did not bring negative impact to the environment.

IIGF policy related with environment management and protection that is carried out as announcement, notice, declaration and Corporate Regulation to minimize the Company's operational impact on environment.

Besides policy related with internal party, IIGF has formulated policy by solely providing guarantee facilities provided by IIGF. In terms of external party, IIGF has prepared Environment and Social Management Framework (ESMF).

Program Implementation

In 2016, IIGF held reforestation activity at a Forest located in Dieng Highland, Central Java. In this event, IIGF planted 1,000 tree seeds and donated trash bag to the society live in the activity site. This aimed to maintain awareness of the society in the area concerning the importance of environment preservation to be continuously improved.

Environmental Certification

As of December 31, 2016, IIGF has not have any environmental certification related with the environment. This was due to main business of IIGF is not engaged directly with the environment.



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Yang Terkait Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Corporate Social Responsibility Related with Occupational Health, Safety and Employment

Ketenagakerjaan

PT PII patuh dan taat pada setiap peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, termasuk pada bidang ketenagakerjaan. Undang-undang Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta berbagai peraturan yang terkait dengan bidang ketenagakerjaan menjadi landasan PT PII dalam menjalankan hubungan industrial yang harmonis dengan tenaga kerja.

PT PII percaya bahwa hubungan industrial yang harmonis akan memberikan dampak yang besar terhadap kinerja perusahaan. Karena itu, PT PII memberikan perhatian dan komitmen yang tinggi dalam hal kesetaraan jenis kelamin dan kesempatan kerja, pelatihan kerja untuk meningkatkan profesionalisme pegawai serta sistem imbal jasa yang sepadan. Perhatian, sarana dan komitmen yang besar juga diberikan dalam bidang keselamatan kerja melalui berbagai program peningkatan kesadaran pegawai terhadap keselamatan dan kesehatan kerja.

Kesempatan Kerja yang Sama

PT PII memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang, baik pria maupun wanita, tanpa memandang perbedaan etnik, agama, ras, kelas, jender, ataupun kondisi fisik untuk mengikuti program rekrutmen pekerja. Hal ini dapat dilihat dari komposisi jumlah karyawan PT PII dengan perimbangan karyawan pria dan wanita yang cukup baik. Hingga akhir tahun 2016, jumlah karyawan PT PII adalah 91 orang, dengan komposisi 44 pria dan 47 wanita.

Kesejahteraan Karyawan

PT PII telah merancang paket remunerasi dan insentif yang menarik sebagai upaya untuk menciptakan tingkat kesejahteraan karyawan yang lebih baik. Paket remunerasi dan insentif tersebut juga dimaksudkan sebagai motivasi tambahan bagi karyawan untuk memberikan kontribusi terbaik bagi perusahaan.

Pada tahun 2016, *benefit* yang diberikan PT PII kepada karyawan antara lain meliputi:

1. Gaji Pokok.
2. Tunjangan Jabatan.
3. Tunjangan Transportasi.
4. Tunjangan Komunikasi.

Employment

IIGF is obey and faithful to every prevailing Law in Indonesia, including in employment sector. Law No. 13 of 2003 on Employment as well as other regulation related with employment sector as foundation for IIGF to maintain harmonious and industrial relationship with the employees.

IIGF believes that harmonious industrial relation will contribute major impact on the Company's performance. Therefore, IIGF paid very high attention and commitment on the equality of gender and career opportunity, work training to increase employee's professionalism as well as proportional reward system. The high attention, facilities and commitment were also provided through various employee awareness improvement program in occupational health and safety aspect.

Fair Working Opportunity

IIGF provided fair treatment for all employees in terms of male or female without considering different ethnicity, religion, race, class, gender or physical condition to participate in employee recruitment program. The condition is seen from composition of IIGF employees with balance of male and female for have been sufficient. By the end of 2016, total employees of IIGF was 91 members with composition of 44 males and 47 females.

Employee Welfare

IIGF had designed attractive remuneration and incentive package to achieve better welfare for all employees. The remuneration and incentive package is aimed to be the additional motivaton for employees to deliver excellent contribution to the Company.

In 2016, benefit from IIGF to the employees are including:

1. Basic Salary
2. Position Allowance
3. Transportation Allowance
4. Communication Allowance

5. Tunjangan Perumahan.
6. Tunjangan Cuti Tahunan.
7. Tunjangan Hari Raya.
8. Tunjangan Pakaian.
9. Bonus.
10. Tunjangan Pensiun.

Pengembangan Kompetensi Karyawan

PT PII memberikan kesempatan bagi seluruh karyawan untuk meningkatkan keahlian dan kapasitasnya. Untuk itu, PT PII melaksanakan program pendidikan dan pelatihan. Setiap karyawan PT PII memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti program pendidikan dan pelatihan baik yang dilakukan secara *in house* maupun oleh pihak ketiga. Namun, dalam pelaksanaannya, program pendidikan dan pelatihan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan rencana pengembangan Perusahaan.

Sepanjang tahun 2016, PT PII telah menyelenggarakan 15 judul *In house Training* yang diikuti oleh seluruh karyawan, dengan komposisi *training* berdasarkan Jenjang Jabatan, dan 70 *Workshop/Seminar/Public Training* yang diikuti oleh karyawan sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Turnover Karyawan

PT PII berupaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang profesional, nyaman dan bersifat kekeluargaan agar dapat menjadi tempat kerja idaman bagi karyawan dan calon karyawan. Upaya tersebut juga merupakan bagian dari strategi PT PII untuk mengelola tingkat *turnover* karyawannya.

PT PII secara berkala melakukan *review* terhadap kebijakan-kebijakan yang ada terkait remunerasi dan paket *benefit* bagi karyawan, serta hal-hal lain yang terkait dengan pengelolaan tenaga kerja. Selain hal-hal bersifat materi, perbaikan senantiasa dilakukan dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan menyenangkan bagi karyawan.

Dengan lingkungan kerja yang baik, membuat tingkat *turnover* karyawan diharapkan cenderung rendah. Pada tahun 2016, PT PII melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 11 karyawan, dengan perincian 3 karyawan habis masa kontrak, 1 karyawan pensiun dan 7 karyawan mengundurkan diri.

5. Housing Allowance
6. Annual Great Allowance
7. Eid al Fitr Donation
8. Clothing Allowance.
9. Bonus
10. Retirement Allowance

Employee Competency Development

IIGF provides equal opportunity to all employees to develop their skill and capacity. Therefore, IIGF had implemented education and training programs. Every employee of PT PII has equal opportunity to participate in the education and program both in-house and invited third party. However, in its implementation, education and training shall also be adjusted with needs of the society and Train development plan.

Throughout 2016, IIGF had organized 15 In House Trainings and participated by all employees with composition by training based on Position Level and 70 Workshop/Seminar/Public Trainign that will be participated by employees based on their particular need.

Employee Turnover

IIGF seeks to establish a professional, comfortable and friendly working environment as a dream working place for employees and employee candidates. This effort is also part of IIGF's strategy to manage employees turnover ratio.

IIGF also reviewed policies related with remuneration and benefit package for employees regularly as well as other issues related with human capital management. Besides material aspect, the improvement will be continuously done to establish conducive and pleasant working place for the employees.

With favorable working circumstances, employe turnover is expected to stay low. In 2016, IIGF terminated 11 employees where 3 employees encountered end of contract period, 1 retired employee and 7 resigned employees.



Hubungan Industrial

Perusahaan berupaya untuk menciptakan hubungan kerja antara Perusahaan dan karyawan yang harmonis, selaras dan berkeadilan. Karena itu, dalam operasionalnya Perusahaan berupaya untuk melakukan optimalisasi dalam pengelolaan SDM dengan tetap memperhatikan kepentingan pekerja.

Sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan pengelolaan SDM yang berkualitas dan memperhatikan kepentingan dua pihak, Perusahaan menerapkan pembinaan hubungan industrial karena menyadari bahwa keberhasilan bidang SDM selalu diawali dengan keberhasilan pembinaan Hubungan Industrial yang harmonis antara Perusahaan dan karyawan.

Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) merupakan salah satu perhatian utama PT PII. PT PII berusaha untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman untuk mendukung terciptanya kinerja yang optimal. Untuk itu, PT PII bertekad menciptakan lingkungan kerja yang sehat, bebas cedera dan melakukan kegiatan operasional sesuai kaidah yang berlaku.

Pada tahun 2016, pengelolaan K3 difokuskan untuk mencapai tingkat kecelakaan nihil atau *zero accident*. Program tersebut diselenggarakan berdasarkan pada peraturan ketenagakerjaan dan aturan K3 Dinas Tenaga Kerja, melalui Pengawasan oleh Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia.

Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT PII mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor. 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Peraturan ini mengatur sistem manajemen perusahaan dalam pengendalian risiko kegiatan kerja, termasuk pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Peraturan ini diharapkan membantu terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif.

Industrial Relation

The Company strive to create harmonious, balance and fair working relationship between the Company and employees. Therefore, in its operations, the Company seeks to optimize Human Capital Management by always considering interests of the workers.

As part of qualified Human Capital management policy implementation and concerning interests of both parties, the Company had implemented industrial relation financing due to the success of Human Capital Division was always started with achievement of harmonious Industrial Relation development between the Company and employees.

Occupational Health and Safety

Occupational Health and Safety (SHE) Aspect is one of major concern of IIGF. The Company strives to establish a safety and comfortable working environment to support optimum performance achievement. Therefore, IIGF is committed to establish healthy and zero accident working environment as well as exercising the operational activity in compliance with prevailing regulation.

In 2016, HSE Management focused on the achievement of zero accident record. The program was implemented pursuant to Employment and HSE Policies issued by Manpower Agency, under supervision from Ministry of Manpower Republic of Indonesia.

Implementation of Occupational Health and Safety Management (SMK3) in IIGF refers to Minister of Manpower No. 5 of 1996 concerning Occupational Health and Safety Management System as revised under Government Regulation No. 50 of 2012 regarding Occupational Health and Safety (HSE) Management System. The regulation governs the Company's management system to control working activity risk, including prevention of occupational accident and occupational disease. This regulation is expected to establish a safety, efficient and productive working place.

Tanggung Jawab Pengembangan Sosial Kemasyarakatan

Social Community Development Responsibility

PT PII merealisasikan program pengembangan sosial dan kemasyarakatan melalui pelaksanaan Program CSR yang berfokus pada 5 (lima) pilar kegiatan, yakni bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan masyarakat, keagamaan dan bantuan korban bencana alam.

Kelima pilar kegiatan tersebut sejalan dengan konsep *Good Corporate Citizen* yang dikembangkan Perusahaan. PT PII sangat menyadari bahwa keberadaannya merupakan bagian dari masyarakat, dimana pertumbuhan usaha yang diraih Perusahaan juga tak lepas dari peran serta masyarakat. Untuk itu, Perusahaan pun memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pengembangan sosial kemasyarakatan yang diwujudkan dalam berbagai kegiatan CSR yang berkaitan dengan sosial budaya masyarakat.

Kegiatan yang Dilaksanakan

Sepanjang tahun 2016, PT PII melaksanakan sejumlah kegiatan CSR yang berkaitan dengan pengembangan sosial kemasyarakatan, antara lain:

Pendidikan

- PT PII melakukan pembangunan ruang kelas baru di Yayasan Al Ghaniyah, Garut, Jawa Barat. Pembangunan ruang kelas baru ini adalah untuk meningkatkan sarana pendidikan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di Yayasan Al Ghaniyah.
- PT PII melaksanakan Program Pengembangan Kualitas Guru di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Program yang dilaksanakan bekerjasama dengan Yayasan Bait Al Kamil, dengan memberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan dan strategi untuk meningkatkan kualitas mengajar para siswa.
- **Beasiswa Mahasiswa**
PT PII menyerahkan donasi program beasiswa bagi mahasiswa berprestasi di Universitas Dharmas Indonesia, Muara Bungo, Sumatera Barat. Program beasiswa ini adalah untuk memacu mahasiswa untuk meraih nilai akademis yang lebih baik lagi.

IIGF implemented social community development program through the CSR program focusing on 5 (five) activity pillars including education, economy, public health, religious and natural disaster relief.

The five activity pillars are consistent with Good Corporate Citizen concept that is developed by the Company. IIGF is very aware that its existence is part of the society where the business growth achieved by the Company is also contributed from participation of the society. Therefore, the Company also put major concern on social community development that is carried out through various CSR activities related with social and cultural aspects of the society.

Activity Implementation

Throughout 2016, IIGF organized various CSR activities related with social community development, among others:

Education

- IIGF built new class rooms at Al Ghaniyah Foundation, West Java. This new class room construction was intended to improve educational facilities to support learning activity at Al Ghaniyah Foundation.
- IIGF implemented Teacher Quality Development Program in Batang Municipal, Central Java. The program was cooperated with Bait Al Kamil Foundation by providing skill, knowledge and strategic development trainings to improve learning quality of the students.
- **Scholarship for University Students**
IIGF supported scholarship program for outstanding students at Universitas Dharmas Indonesia, Muara Bungo, North Sumatera. This scholarship program aims to encourage the students to achieve higher academic grades.



- **Seminar Pendidikan Orang Tua**
Bekerjasama dengan Yayasan Bait Al Kamil, PT PII menyelenggarakan Seminar untuk memberikan wawasan dalam mendidik anak untuk menjadi pribadi yang cerdas dengan perilaku yang baik di Kabupaten Batang, Jawa Tengah.
- **Bantuan Pembangunan Sarana Pendidikan**
PT PII bekerjasama dengan PKPU memberikan bantuan untuk pembangunan sarana pendidikan di Jawa Timur.

Keagamaan

- PT PII melanjutkan pembangunan tahap II yang berlokasi di Tuban, Jawa Timur, yaitu dengan membangun tempat wudhu, toilet, dan langit-langit masjid. Dalam kegiatan ini, PT PII bekerjasama dengan PKPU.
- **Program Waqaf Qur'an dan Sajadah.**
PT PII melaksanakan program Waqaf Al Qur'an dan Sajadah di Kabupaten Bogor, tepatnya di Yayasan Insan Madani. Dalam kegiatan tersebut, PT PII mewakafkan 200 Al Qur'an dan 25 roll Sajadah.
- **Pembangunan Pondok Pesantren**
PT PII memberikan bantuan untuk pembangunan Pondok Pesantren yang dikelola oleh Yayasan Pondok Pesantren Tahfidz Al Qur'an Baaitul Hilmi di Tangerang, Banten.
- **Pembangunan Masjid di Jombang**
PT PII memberikan bantuan melalui Yayasan Masjid Darussalam dalam pembangunan masjid untuk masyarakat di Jombang, Jawa Timur.
- **Bantuan Dana Operasional Pesantren**
PT PII memberikan donasi untuk dana operasional kepada Pondok Pesantren Al Itqon Sukbayang berlokasi di Bekasi, Jawa Barat.

- **Parenting Education Seminar**
In collaboration with Bait Al Kamil Foundation, IIGF organized Seminar to develop parenting knowledge to become smart children with polite attitude in Batang Municipal, Central Java.
- **Education Facilities Construction Support**
IIGF cooperated with PKPU to give donation for educational facilities in East Java.

Religious

- IIGF continued 2nd phase development that is located in Tuban, East Java by building *wudhu* room, toilet and ceiling of the mosques. In this event, IIGF cooperated with PKPU.
- **Qor'an and Praying Mat Waqaf Program**
IIGF organized Qor'an and Praying Mat *Waqaf* Program in Bogor Municipal, precisely at Insan Madani Foundation. In this event, IIGF donated 200 Qor'an and 25 rolls praying mat.
- **Islamic Boarding School Construction**
IIGF donated for construction of Islamic Boarding School that is managed by Tahfidz Al Qur'an Baaitul Hilmi Islamic Boarding School Foundation in Tangerang, Banten.
- **Mosque Construction in Jombang**
IIGF donated via Darussalam Mosque Foundation for construction of mosque for the society in Jombang, East Java.
- **Operational Funds Support for Islamic Boarding School**
IIGF donated operational funds to Al Itqon Sukbayang Islamic Boarding School that is located in Bekasi, West Java.

Tanggap Darurat Bencana Alam

- **Bencana Banjir Garut**
PT PII berpartisipasi dalam kegiatan 5 BUMN di bawah Kementerian Keuangan, memberikan bantuan untuk korban bencana banjir di Garut. Dalam kegiatan yang bekerjasama dengan Aksi Cepat Tanggap (ACT), PT PII memberikan donasi uang tunai Rp100.000.000 (Seratus Juta Rupiah), pakaian bekas layak pakai dari seluruh karyawan masing-masing BUMN, susu, air mineral, perlengkapan bayi dan *hygiene kits*.
- **Bencana Gempa Aceh**
PT PII turut berpartisipasi dalam kegiatan donasi bagi korban bencana gempa Aceh di Pidie Jaya, Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam kegiatan ini PT PII berkoordinasi dengan PKPU. PT PII mendonasikan bantuan senilai Rp54.238.000 (Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) untuk pembuatan *prosmiling*, juga diberikan bahan pangan, pembangunan sarana umum, dan pendidikan kepada korban masyarakat akibat bencana gempa. Selain itu PT PII juga turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan program CSR di bawah naungan Kementerian Keuangan.

Donasi

- **Donasi Daging Qurban**
Dalam rangka perayaan Idul Adha, PT PII bekerjasama dengan PKPU membagikan daging *qurban* sebanyak 6 ekor sapi yang disembarkan di wilayah sekitar proyek PT PII, yaitu di Desa Ujungnegoro, Batang-Jawa Tengah, Desa Umbulan, Pasuruan-Jawa Timur, dan Desa Karangjoang, Balikpapan-Kalimantan Timur.

Kesehatan

- **Pembersihan Karang Gigi**
PT PII ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh BUMN di bawah Kementerian Keuangan dalam rangka memecahkan Pecah Rekor MURI Pembersihan Karang Gigi terbanyak. Pada kegiatan yang dilaksanakan bekerjasama dengan Yayasan Inspirasi Anak Bangsa (YIAB) dilakukan pembersihan karang gigi gratis.

Natural Disaster Relief

- **Garut Flood**
IIGF participated in activity of 5 SOEs under Ministry of Finance to donate for flood victims in Garut. The donation was also collaborated with Aksi Cepat Tanggap (ACT) where IIGF provided cash donation of Rp100,000,000 (one hundred million Rupiah), used clothes from all employees of every SOE, milk, mineral water, baby gears and hygiene kit.
- **Aceh Earthquake**
IIGF participated in donation activity for Aceh earthquake victim at Pidie Jaya, Nanggroe Aceh Darussalam. In this event, IIGF coordinated with PKPU. IIGF donated funds amounted to Rp54,238,000 (fifty four million two hundred and thirty eight thousand Rupiah) for *prosmiling* construction, and also donated groceries, public facilities construction and educational assistance to the earthquake victims. In addition, IIGF also participated in CSR program implementation under the Ministry of Finance.

Donation

- **Qurban Donation**
As the commemoration of Eid al Adha, IIGF cooperated with PKPU donated Qurban packages from 6 cows and distributed to operational area of IIGF's projects such as Ujungnegoro Village, Batang – Central Java, Umbulan Village, Pasuruan – East Java and Karangjoang Village, Balikpapan – East Kalimantan.

Health

- **Tartar (Plaque) Removal**
IIGF participated in an event organized by SOE under Ministry of Finance to break MURI Record in Highest Number of Tartar (Plaque) Removal. The event was also cooperated with Inspirasi Anak Bangsa Foundation (YIAB) to provide free tartar (plaque) removal treatment.



Tanggung Jawab Kepada Pelanggan

Responsibility to Customers

Selaku Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur, konsumen PT PII adalah pemerintah (Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah) dan BUMN yang ditugaskan selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dari proyek infrastruktur yang dikembangkan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). PT PII secara rutin melaksanakan program peningkatan kapasitas dalam bentuk kunjungan, pelatihan dan sosialisasi kepada segenap pemangku kepentingan utama dari pemerintah dan BUMN yang ditugaskan bekerja sama dengan IIGF Institute, sebagai pusat pengetahuan yang dibentuk untuk mendorong pengembangan skema KPBU dan infrastruktur nasional. Selain itu guna membina hubungan baik dengan konsumen, PT PII juga mengadakan acara dalam bentuk:

1. Seminar Peran PT PII dan UMKM dalam membangun ekonomi daerah di Sumedang
PT PII bekerjasama dengan Bappeda Sumedang menyelenggarakan kegiatan Seminar tentang peranan infrastruktur dalam membangun ekonomi daerah di Sumedang, Jawa Barat.
2. Seminar Peran PT PII dan UMKM dalam membangun ekonomi daerah di Tanah Karo
PT PII bekerjasama dengan Lembaga Pemuda Langkat Mandiri menyelenggarakan kegiatan Seminar tentang peranan infrastruktur dalam membangun ekonomi daerah di Tanah Karo, Sumatera Utara.

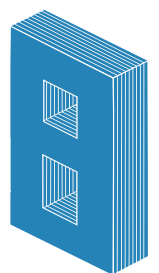
As an Infrastructure Guarantee Company, customer of IIGF is the Government (Ministry/Institution, Local Government) and SOE that is assigned as Contracting Agency (CA) of the infrastructure project developed under Public-Private Partnership (PPP) scheme. IIGF has periodically implemented capacity building program as visits, training and socialization for all Stakeholders, primarily from the Government and SOE circumstances that are assigned to cooperate with IIGF institute as center of knowledge that is established to drive PPP scheme and national infrastructure development. In addition, to develop harmonious relationship with the customers, IIGF also organized other events, among others:

1. Seminar Role of IIGF and SME in Developing Local Economy in Sumedang
IIGF cooperated with Bappeda Sumedang held Seminar on role of infrastructure in developing local economy in Sumedang, West Java.
2. Seminar Role of IIGF and SME in Developing Local Economy in Tanah Karo
In collaboration with Langkat Mandiri Youth, IIGF held Seminar on role of infrastructure in developing local economy in Tanah Karo, North Sumatera.

Laporan Keuangan

Financial Report





**PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA
(PERSERO)**

**LAPORAN KEUANGAN/
*FINANCIAL STATEMENTS***

**31 DESEMBER 2016/
*31 DECEMBER 2016***

**PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA
(PERSERO)**

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016 SERTA UNTUK
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016**

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Sinthya Roesly
Alamat Kantor : Capital Place Office Tower,
Lantai 7 dan 8, Jl. Jenderal Gatot
Subroto Kav. 18, Jakarta 12710
Alamat Rumah : Komplek Ex Timah No. 10-12
Jl. Gatot Subroto Jakarta
Selatan
Nomor Telepon : 021- 5795 0550
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Armand Hermawan
Alamat Kantor : Capital Place Office Tower,
Lantai 7 dan 8, Jl. Jenderal Gatot
Subroto Kav. 18, Jakarta 12710
Alamat Rumah : Jl. Pancoran Timur IX/11B
005/008 Pengadegan Pancoran
Jakarta
Nomor Telepon : 021- 5795 0550
Jabatan : Direktur Keuangan dan
Manajemen Risiko

menyatakan bahwa:

1. kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero);
2. laporan keuangan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia;
3. a. semua informasi dalam laporan keuangan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. laporan keuangan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

**PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA
(PERSERO)**

**DIRECTORS' STATEMENT
REGARDING
THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL
STATEMENTS AS AT 31 DECEMBER 2016 AND FOR
THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2016**

We, the undersigned:

1. Name : Sinthya Roesly
Office address : Capital Place Office Tower,
7th & 8th Floor Jl. Jenderal
Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta
12710
Residential address : Komplek Ex Timah No. 10-12
Jl. Gatot Subroto Jakarta
Selatan
Telephone : 021- 5795 0550
Title : President Director
2. Name : Armand Hermawan
Office address : Capital Place Office Tower,
7th & 8th Floor Jl. Jenderal Gatot
Subroto Kav. 18, Jakarta 12710
Residential address : Jl. Pancoran Timur IX/11B
005/008 Pengadegan Pancoran
Jakarta
Telephone : 021- 5795 0550
Title : Director of Finance and Risk
Management

declare that:

1. we are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero);
2. the financial statements of the PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
3. a. all information has been fully and correctly disclosed in the financial statements of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero);
b. the financial statements of the PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) do not contain any incorrect information or material fact, nor do they omit information or material fact;
4. we are responsible for the internal control system of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).

Thus this statement is made truthfully.

Jakarta, 3 Maret/March 2017

Atas nama dan mewakili Dewan Direksi/For and on behalf of the Board of Directors


Sinthya Roesly
Direktur Utama/
Chief Executive Officer


Armand Hermawan
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko/
Chief Financial Officer



**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

**INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
TO THE SHAREHOLDERS OF**

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) ("Perusahaan") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2016, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

We have audited the accompanying financial statements of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (the "Company"), which comprise the statement of financial position as of 31 December 2016, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan

Plaza 89, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-7 No.6 Jakarta 12940 - INDONESIA, P.O. Box 2473 JKP 10001

T: +62 21 5212901, F: + 62 21 52905555 / 52905050, www.pwc.com/id



Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) tanggal 31 Desember 2016, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) as of 31 December 2016, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

JAKARTA
3 Maret/March 2017

Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA
Surat Ijin Praktek Akuntan Publik/License of Public Accountant No. AP. 0222

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 1 - Schedule

LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
31 DESEMBER 2016

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2016</u>	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2015</u>	
ASET				ASSETS
Kas dan setara kas	2,895,544,651	5	1,616,841,306	Cash and cash equivalents
Investasi	5,785,731,155	6	5,522,138,542	Investments
Piutang usaha	68,688,721	7	72,248,324	Account receivables
Piutang lainnya	3,936,277		980,585	Other receivables
Biaya dibayar dimuka dan uang muka	4,685,283		8,316,925	Prepaid expenses and advances
Aset tetap	20,650,246	8	1,913,078	Fixed assets
Aset tak berwujud	1,690,184	9	2,375,850	Intangible assets
Beban tangguhan	57,940,731	10	74,593,127	Deferred expenses
Beban <i>front-end</i>	763,384		763,384	Front-end fee
Aset pajak tangguhan	77,009,792	12c	79,350,068	Deferred tax asset
Uang jaminan yang dapat dikembalikan	7,788,927		1,886,015	Refundable deposits
JUMLAH ASET	<u>8,924,429,351</u>		<u>7,381,407,204</u>	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
Utang usaha	4,960,273	11	9,510,253	Account payables
Utang pajak	2,482,673	12a	3,052,962	Taxes payable
Biaya yang masih harus dibayar, penyisihan dan utang lain-lain	37,597,384	13	27,992,746	Accrued expenses, provisions and other payables
Pendapatan tangguhan	5,384,667	14	22,312,500	Unearned income
Pinjaman penerusan	35,805,463	15	21,980,958	Two-step loans
Liabilitas imbalan kerja	14,335,409	16	9,444,848	Employee benefits obligation
JUMLAH LIABILITAS	<u>100,565,869</u>		<u>94,294,267</u>	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Modal saham - modal dasar, 9.000.000 lembar - ditempatkan dan disetor penuh 7.000.000 lembar (2015: 6.000.000 lembar), dengan nilai nominal Rp 1.000.000 (nilai penuh) per lembar saham	7,000,000,000	17	6,000,000,000	Share capital - authorised, 9,000,000 shares - issued and fully paid 7,000,000 shares (2015: 6,000,000 shares), with par value of Rp 1,000,000 (full amount) per share
Rugi belum direalisasi atas kepemilikan aset keuangan tersedia untuk dijual	(25,878,427)		(61,303,025)	Unrealised loss from available-for-sale financial assets
Kerugian aktuarial, setelah pajak	(1,713,853)		(593,035)	Loss from actuarial, net tax
Saldo laba				Retained earnings
Ditentukan penggunaannya - Cadangan wajib	67,800,000	18	50,800,000	Appropriated - Statutory reserve
Belum ditentukan penggunaannya	1,783,655,762		1,298,208,997	Unappropriated
JUMLAH EKUITAS	<u>8,823,863,482</u>		<u>7,287,112,937</u>	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	<u>8,924,429,351</u>		<u>7,381,407,204</u>	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 2 – Schedule

**LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali
dinyatakan lain)

**STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless
otherwise stated)

	<u>2016</u>	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2015</u>	
Pendapatan				Revenues
Pendapatan penjaminan	177,649,443	19	-	Revenue from guarantee
Pendapatan pengelolaan dana	<u>643,457,356</u>	19	<u>533,064,678</u>	Income from investments
Jumlah pendapatan	<u>821,106,799</u>		<u>533,064,678</u>	Total revenues
Beban usaha				Operating expenses
Beban pajak final	(126,933,586)		(102,306,909)	Final tax expense
Penjaminan	(80,561,192)	20	(41,216,713)	Guarantee
Administrasi dan umum	(92,484,427)	20	(59,720,405)	General and administrative
Pengembangan usaha	(9,408,604)	20	(7,577,707)	Business development
Penyusutan	(2,367,167)	8	(2,219,199)	Depreciation
Amortisasi	(1,008,525)	9	(971,216)	Amortisation
Penghasilan keuangan, kotor (Kerugian)/keuntungan	1,263,074		1,238,891	Finance income, gross
kurs, bersih	(1,215,964)		503,490	Foreign exchange
Lain-lain	<u>(3,229,761)</u>		<u>(1,703,438)</u>	(loss)/gain, net
Jumlah beban usaha	<u>(315,946,152)</u>		<u>(213,973,206)</u>	Others
Laba sebelum pajak penghasilan	505,160,647		319,091,472	Profit before income tax
(Beban)/manfaat pajak penghasilan	<u>(2,713,882)</u>	12b	<u>20,364,005</u>	Income tax (expenses)/benefits
Laba tahun berjalan	502,446,765		339,455,477	Profit for the year
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan:				Other comprehensive income for the year:
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				Items that will be reclassified subsequently to profit and loss:
Keuntungan/(kerugian) aset keuangan tersedia untuk dijual tahun berjalan	<u>35,424,598</u>		<u>(3,314,119)</u>	Available for sales financial asset gain/(loss) for the year
	<u>35,424,598</u>		<u>(3,314,119)</u>	
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				Items that will not be reclassified subsequently to profit and loss
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca-kerja	(1,494,424)		(790,714)	Remeasurement from post-employment benefits obligation
Pajak penghasilan terkait	<u>373,606</u>		<u>197,679</u>	Related income tax
	<u>(1,120,818)</u>		<u>(593,035)</u>	
Penghasilan/(beban) komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak	<u>34,303,780</u>		<u>(3,907,154)</u>	Comprehensive income/ (expenses) for the year, net of tax
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	<u>536,750,545</u>		<u>335,548,323</u>	Total comprehensive income for the year

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part
of these financial statements.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 3 - Schedule

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016**
(Expressed in thousand of Rupiah, unless
otherwise stated)

Catatan/ Notes	Modal saham/ Share capital	Rugi belum direalisasi atas kepemilikan aset keuangan tersedia untuk dijual/ Unrealised loss from available- for-sale financial assets	Rugi aktuarial/ Actuarial loss	Saldo laba/Retained earnings		Jumlah/ Total
				Ditentukan penggunaannya - Cadangan wajib/ Appropriated - Statutory reserve	Belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated	
Saldo 1 Januari 2015	4,500,000,000	(57,988,906)	-	33,300,000	976,253,520	5,451,564,614
Penambahan modal	17	-	-	-	-	1,500,000,000
Pencadangan saldo laba	18	-	-	17,500,000	(17,500,000)	-
Penghasilan komprehensif tahun berjalan:						
- Laba tahun berjalan	-	-	-	-	339,455,477	339,455,477
- Penghasilan komprehensif lain:						
- Aset keuangan tersedia untuk dijual	-	(3,314,119)	-	-	-	(3,314,119)
- Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca-kerja, setelah pajak	-	-	(593,035)	-	-	(593,035)
Saldo 31 Desember 2015	6,000,000,000	(61,303,025)	(593,035)	50,800,000	1,298,208,997	7,287,112,937
Penambahan modal	17	-	-	-	-	1,000,000,000
Pencadangan saldo laba	18	-	-	17,000,000	(17,000,000)	-
Penghasilan komprehensif tahun berjalan:						
- Laba tahun berjalan	-	-	-	-	502,446,765	502,446,765
- Penghasilan komprehensif lain:						
- Aset keuangan tersedia untuk dijual	-	35,424,598	-	-	-	35,424,598
- Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca-kerja, setelah pajak	-	-	(1,120,818)	-	-	(1,120,818)
Saldo 31 Desember 2016	7,000,000,000	(25,878,427)	(1,713,853)	67,800,000	1,783,655,762	8,823,863,482

Balance at 1 January 2015
Additional capital
Appropriation of retained earnings

Comprehensive income for the year:
Profit for the year -
Other comprehensive income: -
Available-for-sale financial assets -
Remeasurement of post-employment -
benefit liabilities, net of tax

Balance at 31 December 2015
Additional capital
Appropriation of retained earnings

Comprehensive income for the year:
Profit for the year -
Other comprehensive income: -
Available-for-sale financial assets -
Remeasurement of post-employment -
benefit liabilities, net of tax

Balance at 31 December 2016

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part
of these financial statements.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 4 - Schedule

**LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	
Arus kas dari aktivitas operasi			Cash flows from operating activities
Laba sebelum pajak penghasilan	505,160,647	319,091,472	<i>Profit before income tax</i>
Ditambah unsur yang tidak mempengaruhi arus kas:			<i>Add items not affecting cash flows:</i>
- Beban penyusutan	2,367,167	2,219,199	<i>Depreciation -</i>
- Beban amortisasi	1,008,525	971,216	<i>Amortisation -</i>
- Beban penyesuaian imbalan kerja	4,755,757	693,615	<i>Provision for employee benefits obligation -</i>
- Beban lain-lain	<u>727,632</u>	<u>-</u>	<i>Other expenses -</i>
Arus kas operasi sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi	<u>514,019,728</u>	<u>322,975,502</u>	<i>Operating cash flows before changes in operating assets and liabilities</i>
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:			<i>Changes in operating assets and liabilities</i>
Penurunan/(kenaikan) aset operasi:			<i>Decrease/(increase) in operating assets:</i>
- Piutang usaha	3,559,603	(48,153,307)	<i>Account receivables -</i>
- Piutang lainnya	(2,955,692)	(360,341)	<i>Other receivables -</i>
- Biaya dibayar dimuka dan uang muka	3,631,642	(4,894,102)	<i>Prepaid expenses and advances -</i>
- Beban tangguhan	16,652,396	(18,710,472)	<i>Deferred expenses -</i>
(Penurunan)/kenaikan liabilitas operasi:			<i>(Decrease)/increase in operating liabilities:</i>
- Utang usaha	(4,549,980)	2,621,366	<i>Account payables -</i>
- Utang pajak	(570,289)	304,508	<i>Taxes payable -</i>
- Biaya masih harus dibayar, penyesuaian dan utang lain-lain	8,877,006	8,290,300	<i>Accrued expenses, provisions, and other payables -</i>
- Pembayaran manfaat imbalan kerja	(1,359,620)	(293,600)	<i>Payment of employee benefit -</i>
- Pendapatan tangguhan	(16,927,833)	<u>-</u>	<i>Unearned income -</i>
- Pengembalian pajak dibayar dimuka	<u>-</u>	<u>11,619,069</u>	<i>Return for prepaid tax -</i>
	<u>6,357,233</u>	<u>(49,576,579)</u>	
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	<u>520,376,961</u>	<u>273,398,923</u>	Net cash flow provided from operating activities
Arus kas dari aktivitas investasi			Cash flows from investing activities
Penempatan investasi	(228,168,015)	(970,649,861)	<i>Placement for investments</i>
Pembelian aset tetap dan aset tak berwujud	(21,427,194)	(2,950,304)	<i>Acquisition of fixed assets and intangible assets</i>
Penempatan uang jaminan yang dapat dikembalikan	<u>(5,902,912)</u>	<u>(650,178)</u>	<i>Refundable deposit</i>
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	<u>(255,498,121)</u>	<u>(974,250,343)</u>	Net cash flow used in investing activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan			Cash flows from financing activities
Penerimaan modal saham	1,000,000,000	1,500,000,000	<i>Share capital received</i>
Pembayaran program kemitraan dan bina lingkungan	<u>-</u>	<u>(653,319)</u>	<i>Payment for corporate social responsibility programme</i>
Penerimaan dari pinjaman penerusan	<u>13,824,505</u>	<u>12,294,532</u>	<i>Proceeds from two-step loans</i>
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	<u>1,013,824,505</u>	<u>1,511,641,213</u>	Net cash flow provided from financing activities
Kenaikan bersih kas dan setara kas	<u>1,278,703,345</u>	<u>810,789,793</u>	Net increase in cash and cash equivalents
Kas dan setara kas awal tahun	<u>1,616,841,306</u>	<u>806,051,513</u>	Cash and cash equivalents at beginning of year
Kas dan setara kas akhir tahun	<u>2,895,544,651</u>	<u>1,616,841,306</u>	Cash and cash equivalents at end of year

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/1 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta Notaris Lolani Kurniati Irdham-Idroes, SH, LLM No. 29 tanggal 30 Desember 2009. Anggaran Dasar Perusahaan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-04444.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 27 Januari 2010.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir dengan Akta Notaris Arry Supratno, S.H. No.107 tanggal 29 Desember 2016 yang memuat mengenai perubahan maksud dan tujuan Perusahaan. Selanjutnya, Perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0002415.AH.01.02 Tahun 2017 pada tanggal 30 Januari 2017.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perusahaan adalah memberikan penjaminan Pemerintah di bidang infrastruktur.

Perusahaan adalah Badan Usaha Penjamin Infrastruktur (BUPI) yang beroperasi sebagai suatu entitas "single window" dalam melakukan proses, penilaian (*appraisal*) dan penyusunan struktur (*structuring*) untuk semua penjaminan yang diberikan Pemerintah Indonesia pada proyek infrastruktur yang diajukan oleh Penanggung Jawab Proyek Kerjasama ("PJPK"). Perusahaan dapat menerapkan berbagai jenis dan struktur penjaminan – yang disokong (*backstop*) oleh, bila diperlukan, neraca Perusahaan, Pemerintah Republik Indonesia, lembaga keuangan multilateral, atau kombinasinya – untuk mewujudkan fleksibilitas operasional yang lebih baik dalam penyediaan penjaminan infrastruktur.

Tujuan utama dari Perusahaan adalah untuk:

- a) Memberikan penjaminan finansial Pemerintah dalam perjanjian Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha ("KPBU") di bidang infrastruktur dengan memastikan proyek infrastruktur yang didukung memiliki struktur yang baik sehingga dapat meningkatkan kelayakan kredit dan proyek infrastruktur.
- b) Memberikan jaminan terhadap kewajiban pembayaran Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") dan/atau afiliasinya terkait penyediaan infrastruktur dalam hal pelaksanaan perjanjian pinjaman dengan lembaga keuangan dan penerbitan obligasi dan/atau instrumen keuangan lainnya.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT 31 DECEMBER 2016

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

1. GENERAL

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (the "Company") was established based on Notarial Deed of Lolani Kurniati Irdham-Idroes, SH, LLM No. 29 dated 30 December 2009. The Articles of Association were approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his decree No. AHU-04444.AH.01.01.Tahun 2010, dated 27 January 2010.

The Company's Articles of Association have been amended several times, the latest amendment was in accordance with Notarial Deed of Arry Supratno, S.H. No.107 dated 29 December 2016 concerning change of the purposes and objective of the Company. Subsequently, The amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republik of Indonesia through his decree No. AHU-0002415.AH.01.02 Year 2017 dated 30 Januari 2017.

In accordance with Article 3 of the Articles of Association, the Company's objective is to provide the Government guarantees in the infrastructure sector.

The Company operates as a "single window" entity for the processing, appraisal and structuring of all guarantees provided by the Government of Indonesia for infrastructure projects proposed by the Government's Contracting Agencies ("GCA"). The Company employs various types and structures of guarantees – back-stopped, as necessary, by the Company balance sheet, the Government of Indonesia ("GOI") balance sheet, a multilateral financing agency or a combination thereof – for greater operational flexibility in providing guarantees for infrastructure projects.

The primary objectives of the Company are:

- a) To provide Government of Indonesia financial guarantee for the Public Private Partnership ("PPP") projects in infrastructure sectors by ensuring the proper structuring of infrastructure projects in order to improve creditworthiness and quality of the respective infrastructure projects.
- b) To provide guarantee from payment obligations of State Owned Enterprises ("SOEs") and/or its affiliates related infrastructure sector in term of execution loan agreement with financial institution and issuance of bonds and/or other financial instruments.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/2 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

Tujuan utama dari Perusahaan adalah untuk:
(lanjutan)

- c) Pemberian penjaminan terhadap kewajiban finansial dari pihak lain.
- d) Memberikan dukungan fasilitasi persiapan proyek infrastruktur, penilaian kelayakan, dan pemantauan risiko serta hal lain terkait penyediaan penjaminan pemerintah dan jasa konsultasi terkait.

Perusahaan berdomisili di Indonesia, berkedudukan di Sampoerna Strategic Square, North Tower, Lantai 7 dan 14, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46, Jakarta. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2010.

Pada tanggal 3 Oktober 2016, Perusahaan telah berpindah lokasi ke Capital Place Office Tower, Lantai 7 dan 8, Jl. Gatot Subroto Kav.18, Jakarta.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

	2016
Komisaris Utama	Luky Alfirman
Komisaris	Ayu Sukorini Iskandar
Direktur Utama	Sinthya Roesly
Direktur	Armand Hermawan Salustra Satria*)

*) Berdasarkan akta notaris Arry Supratno, S.H. No. 138 tanggal 23 Juni 2016, Perusahaan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengangkat Salustra Satria sebagai Direktur Operasi Perusahaan menggantikan Yadi Jaya Ruchandi mulai tanggal 16 Juli 2016.

Pada tanggal 31 Desember 2016, Perusahaan memiliki 101 pegawai (2015: 86 pegawai) (tidak diaudit).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Laporan keuangan Perusahaan diotorisasi oleh Direksi pada tanggal 3 Maret 2017.

Berikut ini adalah ikhtisar kebijakan akuntansi penting yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
31 DECEMBER 2016**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

1. GENERAL (continued)

*The primary objectives of the Company are:
(continued)*

- c) To provide guarantee of other party's financial obligation.*
- d) To provide facilitation support of project preparation, feasibility assessment, and risk monitoring and other matters related to provision of government guarantee and the related project consultancy services.*

The Company is domiciled in Indonesia, its office is located at Sampoerna Strategic Square, North Tower, 7th and 14th Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46, Jakarta. The Company started its commercial operations in 2010.

On 3 October 2016, the Company has moved its office to Capital Place Office Tower, 7th and 8th Floor, Jl. Gatot Subroto Kav.18, Jakarta

As at 31 December 2016 and 2015, the members of the Company's Board of Commissioners and Directors were as follows:

	2015	
Luky Alfirman		<i>President Commissioner</i>
Ayu Sukorini		<i>Commissioners</i>
Iskandar		
Sinthya Roesly		<i>President Director</i>
Armand Hermawan		<i>Directors</i>
Yadi Jaya Ruchandi		

*) *Based on notarial deed No. 138 of Arry Supratno, S.H. dated 23 June 2016, the Company through General Meeting of Shareholders appointed Salustra Satria as Operational Director replacing Yadi Jaya Ruchandi starting date 16 July 2016.*

As at 31 December 2016, the Company has 101 employees (2015: 86 employees) (unaudited).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

These financial statements were authorised by the Directors on 3 March 2017.

Presented below are the principal accounting policies adopted in preparing the Company's financial statements.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/3 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Dasar penyusunan laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, adalah dasar akrual. Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan konsep harga perolehan, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode tidak langsung dan arus kas dikelompokkan atas dasar kegiatan operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas meliputi kas, kas di bank, deposito yang sewaktu-waktu bisa dicairkan dan investasi jangka pendek dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atau dibatasi penggunaannya.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan khusus, dibulatkan menjadi dan disajikan dalam ribuan Rupiah yang terdekat. Seluruh angka dalam mata uang selain Rupiah dinyatakan dalam jumlah penuh.

Kecuali dinyatakan di bawah ini, kebijakan akuntansi telah diterapkan secara konsisten dengan laporan keuangan tahunan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 yang telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan di Catatan 4.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT 31 DECEMBER 2016

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Basis of preparation of the financial statements

The financial statements of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

The financial statements, except for the statements of cash flows, are prepared under the accrual basis. The financial statements are prepared under the historical cost convention, as modified for certain accounts which are measured on the basis described in the related accounting policies.

The cash flows statement is prepared based on the indirect method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities. For the purpose of the cash flows, cash and cash equivalents include cash on hand, cash in banks, deposits held at call with banks and short-term investments with original maturities of three months or less, as long as they are not being pledged as collateral for borrowings or restricted.

Figures in the financial statements are rounded to and stated in thousands of Rupiah unless otherwise stated. Amounts in currencies other than Rupiah are stated in full amount.

Except as described below, the accounting policies applied are consistent with those of the annual financial statements for the year ended 31 December 2015, which conform to the Indonesian Financial Accounting Standards.

The preparation of financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates and assumptions. It also requires management to exercise its judgement in the process of applying the Company's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the financial statements are disclosed in Note 4.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/4 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan (lanjutan)

Perubahan pada pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi pernyataan standar akuntansi keuangan

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan standar baru, revisi dan interpretasi yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2016 sebagai berikut:

- PSAK 4 (revisi 2015): Laporan Keuangan Tersendiri;
- PSAK 5 (revisi 2015): Segmen Operasi;
- PSAK 7 (revisi 2015): Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi;
- PSAK 13 (revisi 2015): Properti Investasi;
- PSAK 15 (revisi 2015): Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama;
- PSAK 19 (revisi 2015): Aset Tak Berwujud;
- PSAK 22 (revisi 2015): Kombinasi Bisnis;
- PSAK 24 (revisi 2015): Imbalan Kerja;
- PSAK 25 (revisi 2015): Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan;
- PSAK 53 (revisi 2015): Pembayaran Berbasis Saham;
- PSAK 65 (revisi 2015): Laporan Keuangan Konsolidasian;
- PSAK 66 (revisi 2015): Pengaturan Bersama;
- PSAK 67 (revisi 2015): Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain;
- PSAK 68 (revisi 2015): Pengukuran Nilai Wajar;
- PSAK 110 (revisi 2015): Akuntansi Sukuk;
- ISAK 30 (revisi 2015): Pungutan; dan
- PSAK 70 Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak

PSAK dan ISAK tersebut di atas tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan pada tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
31 DECEMBER 2016**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Basis of preparation of the financial statements (continued)

Changes to the statements of financial accounting standards and interpretations of statement of financial accounting standards

Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountant (DSAK-IAI) has issued the following new standards, amendments and interpretations which were effective on or after 1 January 2016 as follows:

- SFAS 4 (revised 2015): Separate Financial Statement;
- SFAS 5 (revised 2015): Operating Segment;
- SFAS 7 (revised 2015): Related Party Disclosures;
- SFAS 13 (revised 2015): Investment Property;
- SFAS 15 (revised 2015): Investment in Associates and Joint Ventures;
- SFAS 19 (revised 2015): Intangible Assets;
- SFAS 22 (revised 2015): Business Combination;
- SFAS 24 (revised 2015): Employee Benefit;
- SFAS 25 (revised 2015): Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates, and Errors;
- SFAS 53 (revised 2015): Share Based Payment;
- SFAS 65 (revised 2015): Consolidated Financial Statement;
- SFAS 66 (revised 2015): Joint Arrangements;
- SFAS 67 (revised 2015): Disclosure of Interests in Other Entity;
- SFAS 68 (revised 2015): Fair Value Measurements;
- SFAS 110 (revised 2015): Accounting for Sukuk;
- IFAS 30 (revisi 2015): Levies; and
- SFAS 70 Accounting for Tax Amnesty Assets and Liabilities

The above SFAS and IFAS had no significant effect on the amounts reported for current year or prior year.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/5 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Penjabaran mata uang asing

a. Mata uang fungsional dan penyajian

Pos-pos yang disertakan dalam laporan keuangan Perusahaan diukur menggunakan mata uang yang sesuai dengan lingkungan ekonomi utama dimana Perusahaan beroperasi ("mata uang fungsional").

Laporan keuangan disajikan dalam Rupiah ("Rp") yang merupakan mata uang fungsional dan penyajian Perusahaan.

b. Transaksi dan saldo

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs penutup. Kurs yang digunakan sebagai acuan adalah kurs yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Keuntungan dan kerugian dari selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing, diakui pada laporan laba rugi.

c. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas meliputi kas, kas di bank, deposito yang sewaktu-waktu bisa dicairkan dan investasi jangka pendek dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atau dibatasi penggunaannya.

d. Aset dan liabilitas keuangan

Aset keuangan

Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori sebagai berikut: diukur pada nilai wajar melalui laporan laba atau rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo, atau yang tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan ini pada saat awal pengakuannya.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
31 DECEMBER 2016**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Foreign currency translation

a. Functional and presentation currency

Items included in the financial statements of the Company are measured using the currency of the primary economic environment in which the Company operates (the "functional currency").

The financial statements are presented in Rupiah ("Rp"), which is the functional and presentation currency of the Company.

b. Transactions and balances

Transactions denominated in foreign currency are converted into Rupiah using the exchange rates prevailing at the dates of the transactions. At the reporting date, foreign currency monetary assets and liabilities are translated using the closing exchange rate prevailing at that date. Exchange rate used as benchmark is the rate which is issued by Bank Indonesia. Foreign exchange gains and losses arising from transactions in foreign currencies and from the translation of foreign currency monetary assets and liabilities are recognised in the profit or loss.

c. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents includes cash on hand, cash in banks, deposits held at call with banks and short-term investments with original maturities of three months or less, as long as they are not being pledged as collateral for borrowings or restricted.

d. Financial assets and liabilities

Financial assets

The Company classifies its financial assets in the following categories: at fair value through profit or loss, loans and receivables, held-to-maturity investments, or available-for sale. The classification depends on the purpose for which the financial assets were acquired. Management determines the classification of its financial assets at initial recognition.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/6 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

- (i) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan, jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Perusahaan tidak memiliki aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

- (ii) Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Pinjaman yang diberikan dan piutang Perusahaan terdiri dari kas dan setara kas, investasi dalam deposito berjangka, piutang usaha dan uang jaminan yang dapat dikembalikan.

- (iii) Aset keuangan tersedia untuk dijual

Investasi dalam kelompok tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang ditentukan pada kategori ini atau tidak diklasifikasikan pada kategori yang lain. Setelah pengukuran awal, aset keuangan ini diukur pada nilai wajar dan keuntungan atau kerugiannya diakui dalam laporan perubahan ekuitas hingga dihentikan pengakuannya. Investasi pada obligasi tertentu diklasifikasikan dalam kategori ini.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
31 DECEMBER 2016**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

Financial assets (continued)

- (i) *Financial assets at fair value through profit or loss*

Financial assets at fair value through profit or loss are financial assets held for trading, which is acquired principally for the purpose of selling or repurchasing it in the short term. The Company has no financial assets at fair value through profit or loss.

- (ii) *Loans and receivables*

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. Loans and receivables are initially recognised at fair value plus transaction costs and subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate method. The Company's loans and receivables comprise cash and cash equivalents, investment in time deposits, account receivables and refundable deposits.

- (iii) *Available-for-Sale ("AFS") financial assets*

AFS financial assets are non-derivative financial assets that are either designated in this category or not classified in any other categories. After initial measurement, AFS financial assets are measured at fair value with unrealised gains or losses recognised in stockholders' equity until the financial assets are derecognised. The Company's investments in certain bonds are classified in this category.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/7 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

- (iv) Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo

Investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta manajemen mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Pada saat pengakuan awal, aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif. Investasi pada obligasi tertentu diklasifikasikan dalam kategori ini.

Liabilitas keuangan

Perusahaan mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam kategori (i) liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Pada tanggal pelaporan, Perusahaan tidak memiliki liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan klasifikasi liabilitas keuangan ini tidak diungkapkan.

Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dikategorikan dan diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi diakui pada nilai wajarnya dikurangi biaya transaksi (jika ada) dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Utang usaha, biaya yang masih harus dibayar, penyisihan dan utang lain-lain dan Pinjaman penerusan diklasifikasikan dalam kategori ini.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
31 DECEMBER 2016**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

Financial assets (continued)

- (iv) Held-to-Maturity ("HTM") investments

HTM investments are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturities that management has the positive intention and ability to hold them to maturity. These financial assets are initially recognised at fair value including transaction costs and subsequently measured at amortised cost, using the effective interest method. The Company's investment in certain bonds is classified in this category.

Financial liabilities

The Company classifies its financial liabilities in the category of (i) financial liabilities at fair value through profit or loss and (ii) financial liabilities measured at amortised cost.

At the reporting date, there are no financial liabilities classified as financial liabilities at fair value through profit or loss. Therefore, the accounting policies related to this classification are not disclosed.

Financial liabilities measured at amortised cost

Financial liabilities that are not classified as at fair value through profit or loss fall into this category and are measured at amortised cost.

Financial liabilities measured at amortised cost are initially recognised at fair value minus transaction costs (if any) and subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate method. Account payables, Accrued expenses, provisions and other payables and Two-step loans are classified in this category.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/8 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Penentuan nilai wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur (*orderly transaction*) antara pelaku pasar (*market participants*) pada tanggal pengukuran di pasar utama atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan dimana Perusahaan memiliki akses pada tanggal tersebut. Nilai wajar liabilitas mencerminkan risiko wanprestasinya.

Jika tersedia, Perusahaan mengukur nilai wajar instrumen keuangan dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif untuk instrumen tersebut.

Instrumen keuangan dianggap memiliki kuotasi di pasar aktif jika harga kuotasi tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang efek (*dealer*), perantara efek (*broker*), kelompok industri, badan pengawas (*pricing service* atau *regulatory agency*), dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Jika kriteria di atas tidak terpenuhi, maka pasar aktif dinyatakan tidak tersedia. Indikasi-indikasi dari pasar tidak aktif adalah terdapat selisih yang besar antara harga penawaran dan permintaan atau kenaikan signifikan dalam selisih harga penawaran dan permintaan dan hanya terdapat beberapa transaksi terkini.

Bukti terbaik atas nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal adalah harga transaksi, yaitu nilai wajar dari pembayaran yang diberikan atau diterima. Jika Perusahaan menetapkan bahwa nilai wajar pada pengakuan awal berbeda dengan harga transaksi dan nilai wajar tidak dapat dibuktikan dengan harga kuotasi di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang sejenis atau berdasarkan teknik penilaian yang hanya menggunakan data dari pasar yang dapat diobservasi, maka nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal disesuaikan untuk menanggulangi perbedaan antara nilai wajar pada saat pengakuan awal dan harga transaksi. Setelah pengakuan awal, perbedaan tersebut diamortisasi dan diakui dalam laba rugi sepanjang umur dari instrumen tersebut.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
31 DECEMBER 2016**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

Determination of fair value

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date in the principal market or, in its absence, the most advantageous market to which the Company has access at that date. The fair value of a liability reflects its non-performance risk.

When available, the Company measures the fair value of a financial instrument using the quoted price in an active market for that instrument.

A financial instrument is regarded as quoted in an active market if quoted prices are readily and regularly available from an exchange, dealer, broker, industry group, pricing service or regulatory agency, and those prices represent actual and regularly occurring market transactions on an arm's length basis. If the above criteria are not met, the market is regarded as being inactive. Indications that a market is inactive are when there is a wide bid-offer spread or significant increase in the bid-offer spread or there are few recent transactions.

The best evidence of the fair value of a financial instrument at initial recognition is normally the transaction price, i.e., the fair value of the consideration given or received. If the Company determines that the fair value at initial recognition differs from the transaction price and the fair value is evidenced neither by a quoted price in an active market for an identical asset or liability nor based on a valuation technique that uses only data from observable markets, then the financial instrument is initially measured at fair value, adjusted to defer the difference between the fair value at initial recognition and the transaction price. Subsequently, that difference is amortised and recognised in profit or loss on over the life of the instrument.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)****Penentuan nilai wajar (lanjutan)**

Untuk instrumen keuangan yang tidak mempunyai harga pasar, estimasi atas nilai wajar ditetapkan dengan mengacu pada nilai wajar instrumen lain yang substansinya sama atau dihitung berdasarkan arus kas yang diharapkan terhadap aset bersih efek-efek tersebut.

Nilai wajar untuk semua instrumen keuangan lainnya ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Dengan teknik ini, nilai wajar merupakan suatu estimasi yang dihasilkan dari data yang dapat diobservasi dari instrumen keuangan yang sama, menggunakan model-model untuk mendapatkan estimasi nilai kini dari arus kas masa depan yang diharapkan atau teknik penilaian lainnya menggunakan input (sebagai contoh *LIBOR yield curve*, nilai tukar mata uang asing, volatilitas, dan *counterparty spreads*) yang tersedia pada tanggal laporan posisi keuangan.

Saling Hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan. Hak saling hapus tidak kontingen atas peristiwa dimasa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan perusahaan atau pihak lawan.

Kontrak jaminan keuangan dan tagihan komitmen lainnya

Kontrak jaminan keuangan yang dimiliki Perusahaan adalah dalam bentuk Perjanjian Penjaminan, yang mengharuskan Perusahaan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban finansial sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama, yang tidak dapat dipenuhi oleh Penanggung Jawab Proyek Kerjasama ("PJPK") kepada Badan Usaha sebagai pihak terjamin.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
31 DECEMBER 2016**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**d. Financial assets and liabilities (continued)****Determination of fair value (continued)**

For financial instruments with no quoted market price, a reasonable estimate of the fair value is determined by reference to the current market value of another instrument which substantially have the same characteristic or calculated based on the expected cash flows of the underlying net asset base of the marketable securities.

For all other financial instruments, fair value is determined using valuation techniques. In these techniques, fair values are estimated from observable data in respect of similar financial instruments, using models to estimate the present value of expected future cash flows or other valuation techniques, using inputs (for example, *LIBOR yield curve*, foreign exchange rates, volatilities and counterparty spreads) existing at the dates of the statement of financial position.

Offsetting

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in the statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realise the asset and settle the liability simultaneously. The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default in solvency or bankruptcy of the company or the counterparty.

Financial guarantee contracts and other commitment receivables

Financial guarantee contracts that the Company has is in form of guarantee agreements, which requires the Company to make payments to the Investors when Government's Contracting Agencies ("GCA") is unable to fulfill its financial obligation, in accordance with the terms in a Cooperation Agreements

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/10 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
31 DECEMBER 2016**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

d. Financial assets and liabilities (continued)

Kontrak jaminan keuangan dan tagihan komitmen lainnya (lanjutan)

Financial guarantee contracts and other commitment receivables (continued)

Jaminan keuangan awalnya diakui dalam laporan keuangan sebesar nilai wajar pada tanggal jaminan diberikan. Nilai wajar dari jaminan keuangan pada saat dimulainya transaksi pada umumnya sama dengan provisi yang diterima untuk jaminan yang diberikan dengan syarat kondisi normal. Pendapatan provisi yang diperoleh diamortisasi selama jangka waktu jaminan dengan menggunakan metode garis lurus.

Financial guarantees are initially recognised in the financial statements at fair value on the date the guarantee was given. The fair value of a financial guarantee at inception is likely equal to the premium received because all guarantees are agreed on arm's length terms. The fee income earned is amortised over the period of guarantee using the straight line method.

Setelah pengakuan awal, kontrak jaminan keuangan dicatat pada nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar amortisasi dengan nilai kini atas pembayaran kewajiban yang diharapkan akan terjadi (ketika pembayaran atas jaminan menjadi *probable*), dan selisihnya dibebankan sebagai beban penjaminan pada laporan laba rugi.

Subsequently, financial guarantee contracts are measured at the higher of amortised amount and the present value of any expected payment (when a payment under the guarantee has become probable) and the difference is charged to guarantee expense in statement of profit or loss.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas kontrak jaminan keuangan yang memiliki risiko kredit dihitung berdasarkan analisa spesifik untuk masing-masing risiko dalam perjanjian penjaminan.

Allowance for impairment on financial guarantee contracts with credit risk are assessed based on each specific risk under the guarantee agreement.

Perusahaan juga memiliki perjanjian regres dengan PJPK, yang akan memberikan hak tagih kepada PJPK atas pembayaran yang dilakukan oleh Perusahaan kepada Badan Usaha akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban finansial PJPK kepada Badan Usaha.

The Company also has recourse agreement with GCA, which will give the Company the rights to claim or recourse back to GCA for any payment that have been made by the Company to the Investors, due to inability of GCA in fulfilling its financial obligations to the Investors.

e. Aset tetap

e. Fixed assets

Aset tetap diakui sebesar harga perolehan, dikurangi dengan akumulasi penyusutannya. Penyusutan aset tetap dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap, sebagai berikut:

Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation. Depreciation is computed using the straight-line method over the following estimated useful lives:

	<u>Tahun/Years</u>	
Prasarana kantor	4	Leasehold improvement
Peralatan kantor	4	Computer equipments
Peralatan kantor, perabotan dan perlengkapan	4	Office equipments, furnitures and fixtures

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
31 DECEMBER 2016**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**e. Aset tetap (lanjutan)**

Mulai tanggal 1 Januari 2016, Perusahaan mengubah masa manfaat ekonomis aset tetap menjadi 4 tahun.

Nilai sisa aset dan masa manfaat aset tetap ditelaah, dan disesuaikan bila perlu, pada setiap akhir periode pelaporan.

Biaya-biaya setelah perolehan awal diakui sebagai bagian dari nilai tercatat aset atau sebagai aset yang terpisah hanya apabila kemungkinan besar Perusahaan akan mendapatkan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan handal. Jumlah tercatat komponen yang diganti tidak lagi diakui. Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laporan laba rugi selama periode dimana biaya-biaya tersebut terjadi.

Nilai tercatat aset segera diturunkan sebesar jumlah yang dapat dipulihkan jika nilai tercatat aset lebih besar dari estimasi jumlah yang dapat dipulihkan.

Jika aset tetap yang sudah tidak dipergunakan lagi atau dijual, maka nilai tercatat dan akumulasi penyusutan yang berhubungan dengan aset tersebut dikeluarkan dari laporan keuangan, dan keuntungan atau kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi.

f. Aset tak berwujud

Biaya yang terkait dengan pemeliharaan program piranti lunak komputer diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang dapat secara langsung diatribusikan kepada desain dan pengujian produk piranti lunak yang dapat diidentifikasi dan unik yang dikendalikan oleh Perusahaan diakui sebagai aset tak berwujud.

Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dikapitalisasi sebagai bagian produk piranti lunak.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**e. Fixed assets (continued)**

Starting 1 January 2016, the Company changed its asset's useful lives to 4 years.

The assets' residual values and useful lives are reviewed, and adjusted if appropriate, at the end of each reporting period.

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognised as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Company and the cost of the item can be measured reliably. The carrying amount of the replaced part is derecognised. All other repairs and maintenance are charged to profit or loss during the financial period in which they are incurred.

An asset's carrying amount is written down immediately to its recoverable amount if the asset's carrying amount is greater than its estimated recoverable amount.

When fixed assets are retired or otherwise disposed of, their carrying values and the related accumulated depreciation are eliminated from the financial statements, and the resulting gains and losses on the disposal of fixed assets are recognised in the profit or loss.

f. Intangible assets

Costs associated with maintaining computer software programs are recognised as an expense as incurred. Development costs that are directly attributable to the design and testing of identifiable and unique software products controlled by the Company are recognised as intangible assets.

Directly attributable costs are capitalised as part of the software product.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/12 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Aset tak berwujud (lanjutan)

Pengeluaran pengembangan yang lain yang tidak memenuhi kriteria ini diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang sebelumnya diakui sebagai beban tidak dapat diakui sebagai aset pada periode berikutnya.

Aset tak berwujud diakui sebesar harga perolehan, dikurangi dengan akumulasi amortisasinya. Amortisasi aset tak berwujud dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis selama 4 tahun.

g. Perpajakan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di penghasilan komprehensif lain atau langsung diakui di ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas. Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan.

Pajak penghasilan tangguhan diakui dengan menggunakan metode *balance sheet liability*, untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya dalam laporan keuangan. Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak yang telah diberlakukan atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan dan diharapkan berlaku pada saat aset pajak penghasilan tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak penghasilan tangguhan diselesaikan.

Aset pajak penghasilan tangguhan diakui apabila besar kemungkinan bahwa jumlah penghasilan kena pajak di masa yang akan datang akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang dapat dimanfaatkan.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
31 DECEMBER 2016**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Intangible assets (continued)

Other development expenditures that do not meet these criteria are recognised as an expense as incurred. Development costs previously recognised as an expense are not recognised as an asset in a subsequent period.

Intangible assets are stated at cost less accumulated amortisation. Amortisation is computed using the straight-line method over the estimated useful lives of 4 years.

g. Taxation

Tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognised in the profit or loss, except to the extent it relates to items recognised in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is also recognised in other comprehensive income or directly in equity. The current income tax is calculated using tax rates that have been enacted at the reporting date.

Deferred income tax is recognised, using the balance sheet liability method, on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the financial statements. Deferred income tax is determined using tax rates that have been enacted or substantially enacted as at reporting period and is expected to apply when the related deferred income tax assets is realised or the deferred income tax liability is settled.

Deferred income tax assets are recognised to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilised.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/13 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

g. Perpajakan (lanjutan)

Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi di mana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

h. Liabilitas imbalan kerja

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terutang kepada karyawan.

Imbalan pensiun

Perusahaan diharuskan menyediakan imbalan pensiun minimum yang diatur dalam UU No. 13/2003, yang merupakan kewajiban imbalan pasti. Jika imbalan pensiun sesuai dengan UU No. 13/2003 lebih besar dari program pensiun yang ada, selisih tersebut diakui sebagai bagian dari liabilitas imbalan pensiun.

Liabilitas imbalan pensiun tersebut merupakan nilai kini liabilitas pasti pada tanggal pelaporan dikurangi dengan nilai wajar aset program yang berasal dari program pensiun yang ada. Liabilitas imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Nilai kini liabilitas imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas di masa depan dengan menggunakan tingkat bunga Obligasi Pemerintah jangka panjang pada tanggal pelaporan dalam mata uang Rupiah sesuai dengan mata uang di mana imbalan tersebut akan dibayarkan dan yang memiliki jangka waktu yang sama dengan liabilitas imbalan pensiun yang bersangkutan.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
31 DECEMBER 2016**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Taxation (continued)

Management periodically evaluates positions taken in tax returns with respect to situations in which applicable tax regulation is subject to interpretations. Where appropriate, it established provisions based on the amounts expected to be paid to the tax authorities.

h. Employee benefits obligation

Short-term employee benefits

Short-term employee benefits are recognised when they are accrued to the employees.

Pension benefits

The Company is required to provide a minimum pension benefit as stipulated in Law No.13/2003, which represents an underlying defined benefit obligation. If the pension benefits based on Law No. 13/2003 are higher, the difference is recorded as part of the overall pension benefits obligation.

The liability recognised in the statement of financial position in respect of defined benefit pension plans is the present value of the defined benefit obligation at the balance sheet date less the fair value of plan assets. The defined benefits obligation is calculated annually by an independent actuary using the projected unit credit method. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of reporting date of Government Bonds that are denominated in the Rupiah currency in which the benefit will be paid, and that have terms to maturity approximating the terms of the related pension liability.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/14 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

h. Liabilitas imbalan kerja (lanjutan)

Imbalan pensiun (lanjutan)

Untuk program iuran pasti, Perusahaan membayar iuran program pensiun baik karena diwajibkan, berdasarkan kontrak atau sukarela. Namun karena Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 mengharuskan Perusahaan membayar jumlah tertentu kepada para karyawan yang telah memasuki usia pensiun yang ditentukan berdasarkan masa kerja, Perusahaan rentan terhadap kemungkinan untuk membayar kekurangan apabila iuran kumulatif kurang dari jumlah tertentu. Sebagai akibatnya untuk tujuan pelaporan keuangan, program iuran pasti secara efektif diberlakukan seolah-olah sebagai program imbalan pasti.

Biaya jasa kini dibebankan pada saat terjadinya.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui pendapatan komprehensif lainnya pada saat terjadinya.

Biaya jasa lalu diakui segera dalam laporan laba rugi.

Biaya jasa lalu yang timbul dari amandemen atau kurtailmen program diakui sebagai beban dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Imbalan jangka panjang lainnya

Perusahaan memberikan manfaat imbalan cuti panjang. Hak atas imbalan ini pada umumnya diberikan kepada karyawan yang bekerja hingga mencapai masa waktu tertentu berdasarkan Peraturan Perusahaan. Estimasi biaya imbalan ini diakui sepanjang masa kerja karyawan dengan menggunakan metode akuntansi yang pada dasarnya sama dengan metode yang digunakan dalam perhitungan imbalan kerja lainnya.

i. Utang usaha dan lain-lain

Utang usaha dan lain-lain merupakan liabilitas keuangan. Utang usaha dan lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
31 DECEMBER 2016**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Employee benefits obligation (continued)

Pension benefits (continued)

For defined contribution plans, the Company pays contributions to pension plans on a mandatory, contractual or voluntary basis. However, since Labour Law No. 13 of 2003 requires an entity to pay to a worker entering into pension age a certain amount based on, the worker's length of service, the Company is exposed to the possibility of having to make further payments to reach that certain amount in particular when the cumulative contributions are less than that amount. Consequently for financial reporting purposes, defined contribution plans are effectively treated as if they were defined benefit plans.

Current service costs are expensed in the prevailing period.

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions charged or credited to equity in other comprehensive income in the period in which they arise.

Past-service costs are recognised immediately in profit or loss.

Past service costs arising from amendment of curtailment programs are recognised as expense in profit or loss when incurred.

Other long-term benefits

The Company provides long service leave. The entitlement to this benefit is usually based on the completion of a certain service period by the employee in accordance with the Company's regulations. The estimated costs of these benefits are recognised over the period of employment, using an accounting method similar to that for other post-employment benefits.

i. Account and other payables

Account and other payables are financial liabilities. Account and other payable is recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/15 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

j. Penyisihan

Provisi diakui saat Perusahaan memiliki kewajiban (hukum atau konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, terdapat kemungkinan besar penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya, dan jumlah liabilitas tersebut dapat diukur secara andal. Provisi tidak diakui untuk kerugian operasi masa depan.

k. Pendapatan dan beban

Pendapatan dari penjaminan terdiri dari pendapatan premi, dan pendapatan provisi dan komisi.

Pendapatan premi terdiri dari *guarantee fee* dan *processing fee*. Pendapatan dari *guarantee fee* diakui berdasarkan jangka waktu dari periode penjaminan tergantung dari pengaturan dalam kontrak. Pendapatan dari *processing fee* diakui pada saat pendapatan diperoleh.

(i) *Guarantee fee* merupakan pendapatan yang diterima atas jaminan yang diberikan kepada penerima manfaat berdasarkan jaminan *exposure* oleh Perusahaan.

(ii) *Processing fee* merupakan pendapatan yang diterima atas adanya aktivitas pemrosesan yang dilakukan jika klaim disampaikan kepada pihak penjamin.

Pendapatan provisi dan komisi terdiri dari *arranging fee*, *ceded commission*, *upfront fee* dan pendapatan provisi dan komisi lainnya. *Arranging fee* terdiri dari bagian yang dapat dikembalikan dan bagian yang tidak dapat dikembalikan. Pendapatan dari bagian yang tidak dapat dikembalikan dari *arranging fee* diakui pada saat kontrak penjaminan ditandatangani, sementara pendapatan dari bagian yang dapat dikembalikan dari *arranging fee* diakui pada saat proyek dimulai (*financial close*), terlepas dari kelangsungan penjaminan proyek itu sendiri di masa yang akan datang. *Ceded commission* adalah pendapatan dari peningkatan struktur penjaminan yang dilakukan dengan pihak penjamin lain. Pendapatan dari *ceded commission* dan pendapatan provisi dan komisi lainnya diakui pada saat diperoleh. *Upfront fee* adalah pendapatan yang diterima pada saat kontrak penjaminan ditandatangani dan tidak dapat dikembalikan.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
31 DECEMBER 2016**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Provisions

Provisions are recognised when the Company has a present obligation (legal or constructive) as a result of past events, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefit will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. Provisions are not recognised for future operating losses.

k. Revenue and expenses

Revenue from guarantee consists of premium income, and fees and commissions.

Premium income consists of guarantee fee and processing fee. Revenue from guarantee fee is recognised based on the duration of guarantee period depending on the arrangement in the contract. Revenue from processing fee is recognised when earned.

(i) *Guarantee fee is earned for guarantee provided to the beneficiaries on the basis of guarantee exposure of the Company.*

(ii) *Processing fee is earned for services process if there is a claim submitted to the guarantor.*

Fees and commissions consist of arranging fee, ceded commission, upfront fee and other fees and commissions. Arranging fee consists of a refundable and non-refundable fee portion. Revenue from a non-refundable portion of arranging fee is recognised upon signing of the guarantee contract, while revenue from a refundable portion of arranging fee is recognised upon the commencement of the project (financial close), regardless the continuance of the guarantee projects itself in the future. Ceded commission is revenue earned from the enhancement of guarantee structure with other guarantor/insurance parties. Revenue from ceded commission and other fees and commissions is recognised as incurred. Upfront fee is recognised upon signing of guarantee contract and non-refundable.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
31 DECEMBER 2016**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)****k. Pendapatan dan beban (lanjutan)****k. Revenue and expenses (continued)**

Pendapatan dari pendapatan bunga deposito dan investasi pendapatan tetap diakui dengan menggunakan metode bunga efektif.

Revenue from interest income of time deposits and investment in fixed income are recognised using the effective interest method.

Beban diakui pada saat terjadinya dengan menggunakan dasar akrual.

Expenses are recognised as incurred on an accrual basis.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan proses penjaminan, ditangguhkan terlebih dahulu. Biaya tersebut akan dibebankan pada laporan laba rugi Perusahaan, ketika Perusahaan mengakui pendapatan penjaminan.

Costs that are directly related to the guarantee process will be deferred. The costs will be expensed to the Company's profit or loss, when Company recognised revenue from guarantee.

l. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi**l. Transactions with related parties**

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 (revisi 2010), tentang "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi" yang didefinisikan antara lain:

The Company has transactions with related parties. The definition of related parties used is in accordance with Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) No. 7 (revised 2010), "Related Party Disclosures" which are defined, among others, as:

- i. perusahaan di bawah pengendalian Perusahaan;
- ii. perusahaan asosiasi;
- iii. investor yang memiliki hak suara, yang memberikan investor tersebut suatu pengaruh yang signifikan;
- iv. perusahaan di bawah pengendalian investor yang dijelaskan dalam catatan III di atas;
- v. karyawan kunci dan anggota keluarganya; dan
- vi. entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi secara signifikan oleh Pemerintah.

- i. entities under the control of the Company;
- ii. associated companies;
- iii. investors with an interest in the voting that gives them significant influence;
- iv. entities controlled by investors under note III above;
- v. key employees and family members; and
- vi. entity that is controlled, jointly controlled or significantly influenced by Government.

Semua transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi, telah diungkapkan pada Catatan 21.

All significant transactions with related parties have been disclosed in Note 21.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
31 DECEMBER 2016**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**m. Biaya pinjaman**

Biaya yang dibayar untuk memperoleh fasilitas pinjaman diakui sebagai biaya transaksi pinjaman sepanjang besar kemungkinan sebagian atas seluruh fasilitas akan ditarik. Dalam hal ini, biaya ditangguhkan sampai penarikan terjadi. Sepanjang tidak terdapat bukti bahwa besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik, biaya dikapitalisasi sebagai pembayaran dimuka dan diamortisasi selama periode fasilitas yang terkait.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**m. Borrowing fees**

Fees paid on the establishment of loan facilities are recognised as transaction costs of the loan to the extent that is probable that some or all of the facility will be drawn down. In this case, the fee is deferred until the draw-down occurs. To the extent that there is no evidence that it is probable that some or all the facility will be drawn down, the fee is capitalised as a pre-payment and amortised over the period of the facility to which it relates.

3. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN**a. Faktor risiko keuangan**

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Perusahaan adalah risiko pasar (termasuk risiko nilai tukar mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Manajemen menelaah dan menetapkan kebijakan untuk mengelola masing-masing risiko. Perusahaan menerapkan kebijakan manajemen risiko yang bertujuan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian pasar terhadap kinerja keuangan Perusahaan. Berikut ini ringkasan kebijakan dan pengelolaan manajemen risiko tersebut:

(1) Risiko pasar**(i) Risiko nilai tukar mata uang asing**

Perusahaan tidak mempunyai risiko yang signifikan terhadap nilai tukar mata uang asing karena transaksi utama Perusahaan dilakukan menggunakan mata uang fungsional. Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, Perusahaan tidak memiliki aset keuangan dan liabilitas keuangan dalam mata uang asing dalam jumlah yang material. Oleh karena itu perubahan nilai tukar dari mata uang asing terhadap mata uang fungsional pada tanggal pelaporan tidak akan berdampak signifikan terhadap laba rugi setelah pajak Perusahaan untuk tahun berjalan.

3. FINANCIAL RISK MANAGEMENT**a. Financial risk factors**

The main risks arising from the Company's financial instruments are market risk (including foreign exchange risk and interest rate risk), credit risk and liquidity risk. Management reviews and agrees policies for managing each of these risks. The Company applies the financial risk management policies to minimise the impact of the unpredictability of financial markets on the Company's financial performance. The summary of the financial risk management policies are as follows:

(1) Market risk**(i) Foreign currency exchange rate risk**

The Company has no significant foreign exchange risks since the Company's transactions are performed using the Company's functional currency. As at 31 December 2016 and 2015, the Company has no material financial assets and financial liabilities denominated in foreign currencies. Therefore, changes in foreign exchange against the Company's functional currency will not significantly impact to the Company's current year profit after tax.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/18 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
31 DECEMBER 2016**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

3. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Faktor risiko keuangan (lanjutan)

(1) Risiko pasar (lanjutan)

(ii) Risiko suku bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana arus kas atau nilai wajar di masa datang atas instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar.

Aset Perusahaan yang terekspos dengan risiko suku bunga adalah investasi. Investasi Perusahaan terutama terdiri dari deposito dan investasi dengan pendapatan tetap. Perubahan kenaikan atau penurunan tingkat suku bunga pasar tidak akan berpengaruh secara signifikan bagi pendapatan bunga Perusahaan, oleh karena deposito Perusahaan memiliki jatuh tempo kurang dari 1 tahun (jangka pendek), sementara pengelolaan dana investasi lainnya terutama merupakan investasi dengan pendapatan tetap (*fixed income*).

Lebih lanjut, perubahan tingkat suku bunga tidak akan berpengaruh terhadap laporan laba rugi Perusahaan karena investasi Perusahaan dikategorikan sebagai investasi tersedia untuk dijual dan investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo.

Liabilitas Perusahaan yang terekspos dengan risiko suku bunga adalah pinjaman penerusan dengan suku bunga variabel (*BI rate+1%*). Perubahan kenaikan atau penurunan tingkat suku bunga tidak akan berpengaruh secara signifikan bagi beban bunga Perusahaan.

(2) Risiko kredit

Perusahaan tidak mempunyai risiko kredit yang signifikan karena dalam tahun berjalan piutang Perusahaan dominan berasal dari pendapatan bunga dari penempatan deposito.

3. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

a. Financial risk factors (continued)

(1) Market risk (continued)

(ii) Interest rate risk

Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates.

The Company's financial assets which are exposed to interest rate risk are investments. The Company's investments mostly consist of time deposit and fixed income investment. The changes due to higher or lower interest rate in market will not significantly impact the Company's interest income, since the time deposit will mature within one year (short term), while most of the other investment are fixed rate investment.

Moreover, the changes in interest rate will not impact the Company's profit and loss due to the financial assets are classified as available-for-sale investments and held-to-maturity investments.

*The Company's financial liabilities which are exposed to interest rate risk are two-step loans with variable interest rate (*BI Rate+1%*). The changes due to higher or lower interest rate in market will not significantly impact the Company's interest expense.*

(2) Credit risk

The Company has no significant credit risk because in the current year the Company's receivables predominantly arise from interest income from placement of time deposits.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/19 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
31 DECEMBER 2016**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

3. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Faktor risiko keuangan (lanjutan)

(2) Risiko kredit (lanjutan)

Deposito dan kas di bank ditempatkan pada bank-bank domestik yang memiliki reputasi yang tinggi dengan rating AAA Rp 3.936.627.185; AA Rp 120.527.247 dan A Rp 1.994.123.000 pada tanggal 31 Desember 2016 (31 Desember 2015: 3.336.055.592; AA Rp 402.865.110 dan A Rp 745.221.000).

Untuk investasi yang ditempatkan pada efek hutang dengan pendapatan tetap, Perusahaan menempatkan investasinya pada surat berharga hutang dengan peringkat investasi.

Eksposur maksimum risiko kredit atas aset keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Kas dan setara kas	2,895,154,432	1,616,509,702
Investasi	5,785,731,155	5,522,138,542
Piutang usaha	68,688,721	72,248,324
Piutang lainnya	3,936,277	980,585
Uang jaminan yang dapat dikembalikan	<u>7,788,927</u>	<u>1,886,015</u>
	<u>8,761,299,512</u>	<u>7,213,763,168</u>

Semua aset keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai sehingga Perusahaan tidak membentuk cadangan kerugian penurunan nilai.

(3) Risiko likuiditas

Perusahaan tidak mempunyai risiko likuiditas yang signifikan. Risiko likuiditas timbul ketika Perusahaan mengalami kesulitan dalam memperoleh pendanaan. Manajemen pengelolaan risiko likuiditas termasuk di dalamnya menjaga kecukupan kas dan setara kas. Perusahaan mengelola risiko likuiditas dengan memantau arus kas perkiraan dan aktual dan menyesuaikan profil tanggal jatuh tempo dari aset keuangan dan liabilitas keuangan.

3. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

a. Financial risk factors (continued)

(2) Credit risk (continued)

Time deposits classified as cash and cash equivalent and investments are placed with highly reputable domestic banks which are rated AAA Rp 3,936,627,185; AA Rp 120,527,247 and A Rp 1,994,123,000 as at 31 Desember 2016 (31 December 2015: AAA Rp 3,336,055,592; AA Rp 402,865,110 dan A Rp 745,221,000).

For placement of investment in fixed income debt securities, the Company places its investments on debt securities with investment grade.

The maximum credit risk on the Company's financial assets as at 31 December 2016 and 2015 are as follows:

Cash and cash equivalents
Investments
Account receivables
Other receivables
Refundable deposits

All of the Company's financial assets as at 31 December 2016 and 2015 are neither past due nor impaired. Therefore, the Company has provided no allowances for impairment losses.

(3) Liquidity risk

The Company has no significant liquidity risk. Liquidity risk arises in situations where the Company has difficulties in obtaining funding. Prudent liquidity risk management implies maintaining sufficient cash and cash equivalents. The Company manages liquidity risk by continuously monitoring forecast and actual cash flows and matching the maturity profiles of financial assets and liabilities.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/20 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
31 DECEMBER 2016**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

3. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Faktor risiko keuangan (lanjutan)

(3) Risiko likuiditas (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, liabilitas keuangan Perusahaan terdiri dari utang usaha, biaya yang masih harus dibayar dan utang lain-lain dan pinjaman penerusan yang jumlahnya tidak material terhadap aset likuid Perusahaan. Perusahaan memiliki likuiditas yang tinggi dalam bentuk kas dan setara kas dan investasi.

b. Manajemen risiko modal

Tujuan Perusahaan dalam pengelolaan permodalan adalah untuk mempertahankan kelangsungan usaha Perusahaan guna memberikan imbal hasil kepada pemegang saham dan manfaat kepada pemangku kepentingan lainnya serta menjaga struktur modal yang optimal untuk mengurangi biaya modal.

Untuk mempertahankan atau menyesuaikan struktur modal, Perusahaan dapat menyesuaikan jumlah dividen yang dibayar kepada pemegang saham, mengembalikan modal kepada pemegang saham, menerbitkan saham baru atau menjual aset untuk mengurangi jumlah utang.

Perusahaan menelaah dan mengelola struktur permodalannya untuk memastikan struktur modal dan imbal hasil yang optimal bagi pemegang saham, dengan mempertimbangkan kebutuhan modal di masa yang akan datang dan efisiensi modal dari Perusahaan, keuntungan masa lalu dan proyeksi masa depan, proyeksi arus kas operasional, proyeksi pengeluaran modal dan proyeksi kesempatan investasi strategis. Untuk mempertahankan atau menyesuaikan struktur modal, Perusahaan dapat menggunakan pendanaan internal untuk mengurangi utang.

c. Estimasi nilai wajar

Aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar menggunakan hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Tingkat 1
Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;

3. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

a. Financial risk factors (continued)

(3) Liquidity risk (continued)

As at 31 December 2016 and 2015, the Company's financial liabilities consist of account payables, accrued expenses and other payables and two-step loans which are immaterial to the total Company's liquid assets. The Company is highly liquid as it has financial instruments in form of cash and cash equivalents and investments.

b. Capital risk management

The Company's objective when managing capital is to safeguard its ability to continue as a going concern in order to provide returns for shareholders and benefits for other stakeholders and to maintain an optimal capital structure to reduce the cost of capital.

In order to maintain or adjust the capital structure, the Company may adjust the amount of dividends paid to shareholders, return capital to shareholders, issue new shares or sell assets to reduce debt.

The Company periodically reviews and manages its capital structure to ensure optimal capital structure and shareholder returns, taking into consideration the future capital requirements and capital efficiency of the Company, prevailing and projected profitability, projected operating cash flows, projected capital expenditures and projected strategic investment opportunities. In order to maintain or adjust the capital structure, the Company may use internal funding to reduce debt.

c. Fair value estimation

Financial assets and liabilities measured at fair value use the following fair value hierarchy of:

- Level 1
Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities;

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/21 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
31 DECEMBER 2016**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

3. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

3. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

c. Estimasi nilai wajar (lanjutan)

c. Fair value estimation (continued)

Aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar menggunakan hirarki nilai wajar sebagai berikut: (lanjutan)

Financial assets and liabilities measured at fair value use the following fair value hierarchy of: (continued)

- Tingkat 2
Input diluar harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1, yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) maupun tidak langsung (misalnya derivasi harga); dan
- Tingkat 3
Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

- Level 2
Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities; either directly (that is, as prices) or indirectly (that is, derived from prices); and
- Level 3
Inputs for the assets or liabilities that are not based on observable market data (unobservable inputs).

Tabel berikut menyajikan aset dan liabilitas Perusahaan yang diukur sebesar nilai wajar pada 31 Desember 2016 dan 2015.

The following table presents the Company's asset and liabilities that are measured at fair value at 31 December 2016 and 2015.

31 Desember/December 2016					
	Nilai tercatat/ Carrying value	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3	Nilai wajar/ Fair value
Aset keuangan tersedia untuk dijual					Available-for-sale financial assets
Investasi pada instrumen utang	983.036.528	-	983.036.528	-	983.036.528
Jumlah	983.036.528	-	983.036.528	-	983.036.528
					<i>Debt investments</i>
					<i>Total</i>

31 Desember/December 2015					
	Nilai tercatat/ Carrying value	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3	Nilai wajar/ Fair value
Aset keuangan tersedia untuk dijual					Available-for-sale financial assets
Investasi pada instrumen utang	970.661.982	970.661.982	-	-	970.661.982
Jumlah	970.661.982	970.661.982	-	-	970.661.982
					<i>Debt investments</i>
					<i>Total</i>

Instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar

Financial instrument not measured at fair values

- (i) Kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lainnya dan uang jaminan yang dapat dikembalikan

- (i) *Cash and cash equivalents, account receivables, other receivables and refundable deposits*

Nilai wajar dari kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lainnya dan uang jaminan yang dapat dikembalikan ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga pasar uang yang berlaku untuk utang dengan risiko kredit dan sisa jatuh tempo yang serupa. Karena sisa jatuh tempo di bawah satu tahun, nilai tercatat dari kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lainnya adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar (level 2 – hirarki nilai wajar).

The fair value of cash and cash equivalents, account receivables, other receivables and refundable deposits were based on discounted cash flows using prevailing money market interest rates for debts with similar credit risk and remaining maturity. Since the maturity is below one year, the carrying amounts of cash and cash equivalents, account receivables and other receivables were a reasonable approximation of its fair value (level 2 – fair value hierarchy).

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/22 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
31 DECEMBER 2016**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

3. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

c. Estimasi nilai wajar (lanjutan)

Instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar (lanjutan)

(ii) Investasi pada instrumen utang

Nilai wajar dari investasi pada instrumen utang ditetapkan berdasarkan harga pasar atau harga kuotasi perantara (*broker*)/pedagang efek (*dealer*). Jika informasi ini tidak tersedia, nilai wajar diestimasi dengan menggunakan harga pasar kuotasi efek yang memiliki karakteristik kredit, jatuh tempo dan *yield* yang serupa atau dinilai dengan menggunakan metode penilaian internal (level 2 – hirarki nilai wajar).

(iii) Utang usaha, biaya yang masih harus dibayar dan utang lain-lain

Nilai wajar dari utang usaha, biaya yang masih harus dibayar dan utang lain-lain diperkirakan adalah sebesar nilai tercatatnya dikarenakan sisa jatuh tempo di bawah satu tahun (level 2 – hirarki nilai wajar).

(iv) Pinjaman penerusan

Nilai wajar dari pinjaman penerusan dinilai menggunakan diskonto arus kas berdasarkan tingkat suku bunga efektif yang dikenakan pada pemakaian terakhir (level 2 – hirarki nilai wajar).

4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING

Estimasi dan pertimbangan terus dievaluasi berdasarkan pengalaman historis dan faktor-faktor lain, termasuk ekspektasi peristiwa masa depan yang diyakini wajar berdasarkan kondisi yang ada. Hasil aktual dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi. Estimasi dan asumsi yang memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas diungkapkan di bawah ini.

Liabilitas imbalan kerja

Nilai kini kewajiban pensiun tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya/(penghasilan) pensiun neto mencakup tingkat diskonto dan kenaikan gaji di masa datang. Adanya perubahan pada asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat kewajiban pensiun.

3. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

c. Fair value estimation (continued)

Financial instrument not measured at fair values (continued)

(ii) Debt investments

The fair value of debt investments are based on the market prices or broker/dealer price quotations. When this information is not available, the fair value is estimated using quoted market prices for securities with similar credit, maturity and yield characteristics or using internal valuation model (level 2 – fair value hierarchy).

(iii) Account payables, accrued expenses and other liabilities

The fair value of account payables, accrued expenses and other liabilities are approximating their carrying amounts since the maturity is below one year (level 2 – fair value hierarchy).

(iv) Two-step loans

The fair value of two-step loans are estimated using discounted cash flows based on the effective interest rate charged by the lenders for the latest utilisation (level 2 – fair value hierarchy).

4. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS

Estimates and judgements are continually evaluated and are based on historical experience and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable under the circumstances. Actual results may differ from these estimates. The estimates and assumptions that have a significant effect on the carrying amounts of assets and liabilities are disclosed below.

Employee benefits obligation

The present value of the pension obligations depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. The assumptions used in determining the net cost/(income) for pensions include the discount rate and future salary increase. Any changes in these assumptions will have an impact on the carrying amount of pension obligations.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
31 DECEMBER 2016**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

**4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING (lanjutan)****Liabilitas imbalan kerja (lanjutan)**

Perusahaan menentukan tingkat diskonto dan kenaikan gaji masa datang yang sesuai pada akhir periode pelaporan. Tingkat diskonto adalah tingkat suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan nilai kini atas estimasi arus kas keluar masa depan yang diharapkan untuk menyelesaikan kewajiban pensiun. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Perusahaan mempertimbangkan tingkat suku bunga Obligasi Pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang imbalan akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu kewajiban pensiun yang terkait.

Untuk tingkat kenaikan gaji masa datang, Perusahaan mengumpulkan data historis mengenai perubahan gaji dasar karyawan dan menyesuaikannya dengan perencanaan bisnis masa datang.

Asumsi penting lainnya untuk liabilitas imbalan kerja sebagian didasarkan pada kondisi pasar saat ini.

Penyisihan atas kewajiban terkait perjanjian penjaminan

Pada setiap tanggal pelaporan Perusahaan menelaah kewajibannya, baik dalam bentuk potensi klaim dan/atau klaim atas risiko-risiko yang ditanggung Perusahaan dalam perjanjian penjaminan, untuk menilai apakah suatu liabilitas harus diakui dalam laporan keuangan. Perusahaan juga memiliki hak *recourse* kepada PJPK terkait segala pembayaran klaim yang akan dilakukan Perusahaan, akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban finansial PJPK kepada Badan Usaha.

Pada tanggal 31 Desember 2016, Perusahaan tidak mengakui liabilitas atas kontrak jaminan keuangan karena belum terdapat klaim dan/atau potensi klaim yang *probable* terhadap Perusahaan terkait dengan kewajibannya dari perjanjian penjaminan.

Beban tangguhan dan cadangan kerugian penurunan nilai

Perusahaan secara berkesinambungan mengevaluasi keseluruhan bukti obyektif bahwa proyek-proyek yang dibentuk dan memiliki beban tangguhan masih dapat direalisasikan sebagai pendapatan penjaminan pada setiap akhir periode pelaporan. Perusahaan menggunakan pertimbangan dalam menentukan apakah proyek-proyek yang sedang berlangsung dapat mencapai penandatanganan perjanjian, utamanya berdasarkan kondisi terkini dan informasi resmi mengenai kelanjutan proyek yang bersumber dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam pevelangan proyek pada akhir tiap periode pelaporan.

4. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS (continued)**Employee benefits obligation (continued)**

The Company determines the appropriate discount rate and future salary increase at the end of each reporting period. The discount rate is interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the pension obligations. In determining the appropriate discount rate, the Company considers the interest rates of Government Bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximating the terms of the related pension obligation.

For the rate of future salary increases, the Company collects all historical data relating to changes in base salaries and adjusts it for future business plans.

Other key assumptions for employee benefits obligation are based in part on current market conditions.

Claim provision related to guarantee agreement

At each reporting date the Company assess its obligations, in form of potential claim and/or claim on risks covered by the Company under guarantee agreements, to determine whether such liabilities should be recognized in the financial statements. The Company also has recourse to GCA in relation with any payments that would be made by the Company, due to inability of GCA in fulfilling its financial obligations to the Investors.

As at 31 December 2016, the Company did not recognise liability on financial guarantee contract as there were no claims and/or probable potential claims against the Company related to its obligations under the guarantee agreement.

Deferred charges and allowance for impairment losses

The Company continually evaluates objective evidences of projects that had deferred charges could be recognised as revenues as at the end of each reporting period. The Company uses its judgement to assess whether the project will achieve financial close that are mainly based on latest conditions and existing official information about the continuity of project issued by the stakeholders in regards to the tender process at the end of each reporting period.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/24 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
31 DECEMBER 2016**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Beban tangguhan dan cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Penyisihan penurunan nilai atas beban tangguhan dibentuk ketika terdapat keraguan atas realisasi proyek atau pemulihan dari beban tangguhan. Kondisi spesifik proyek, strategi penyelesaian dan estimasi arus kas dipertimbangkan dalam pembentukan penyisihan penurunan nilai berdasarkan estimasi terbaik manajemen.

4. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS (continued)

Deferred charges and allowance for impairment losses (continued)

Provision for impairment losses on deferred charges is provided when there is uncertainty on project realisation or recoverability of deferred charges. Specific condition on project, settlement strategy and estimated cash flow are considered in assessing the provision for impairment losses based on management's best estimates.

5. KAS DAN SETARA KAS

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	
Kas	390,219	331,604	Cash on hand
Bank	126,154,432	20,290,702	Cash in banks
Deposito	<u>2,769,000,000</u>	<u>1,596,219,000</u>	Time deposits
	<u>2,895,544,651</u>	<u>1,616,841,306</u>	

Deposito dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang menghasilkan pendapatan dengan tingkat suku bunga berkisar antara 6,75% - 9,00% per tahun di 2016 (2015: 9,25% - 9,75%).

Time deposits with original maturities of three months or less earned interest rates ranging between 6.75% - 9.00% per annum in 2016 (2015: 9.25% - 9.75%).

Informasi terkait pihak-pihak berelasi diungkapkan pada Catatan 21.

Information in respect of related parties is disclosed in Note 21.

6. INVESTASI

6. INVESTMENTS

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	
Deposito	3,156,123,000	2,867,632,000	Time deposits
Investasi dengan pendapatan tetap			Fixed income investments
- Investasi tersedia untuk dijual	983,036,528	970,661,982	Available-for-sale investments -
- Investasi dimiliki hingga jatuh tempo	1,596,931,436	1,635,045,991	Held-to-maturity investments -
- Investasi diukur pada biaya perolehan	<u>49,640,191</u>	<u>48,798,569</u>	Investments at cost -
	<u>5,785,731,155</u>	<u>5,522,138,542</u>	

Informasi terkait pihak-pihak berelasi diungkapkan pada Catatan 21.

Information in respect of related parties is disclosed in Note 21.

a) Deposito

Deposito dengan jangka waktu jatuh tempo lebih dari tiga bulan sampai dengan satu tahun menghasilkan pendapatan dengan tingkat suku bunga berkisar antara 7,25% - 9,50% per tahun di 2016 (2015: 8,50% - 10,75%).

a) Time deposits

Time deposits with original maturities more than three months and up to one year period earned interest rates ranging between 7.25% - 9.50% per annum in 2016 (2015: 8.50% - 10.75%).

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/25 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
31 DECEMBER 2016**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

6. INVESTASI (lanjutan)

6. INVESTMENTS (continued)

b) Investasi dengan pendapatan tetap

b) Fixed income investments

- Investasi tersedia untuk dijual

- Available-for-sale investments

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	
Obligasi Pemerintah	631,127,428	709,375,519	Government bonds
Obligasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	252,010,200	174,308,063	State-Owned Enterprise bonds
Obligasi korporasi	50,010,000	48,605,000	Corporate bonds
Obligasi bank dan subordinasi	<u>49,888,900</u>	<u>38,373,400</u>	Bank and subordinated bonds
	<u>983,036,528</u>	<u>970,661,982</u>	

- Investasi dimiliki hingga jatuh tempo

- Held-to-maturity investments

Investasi pada obligasi dengan periode jatuh tempo 1 - 17 tahun dan menghasilkan pendapatan dengan tingkat suku bunga berkisar antara 6,13% - 12,55% per tahun (2015: 6,13% - 12,55%).

Investments in bonds with 1 - 17 years maturities and earned interest rates ranging between 6.13% - 12.55% per annum (2015: 6.13% - 12.55%).

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	
Obligasi Pemerintah	1,023,740,226	1,044,280,095	Government bonds
Obligasi BUMN	335,181,811	350,488,313	State-Owned Enterprise bonds
Obligasi bank dan subordinasi	<u>238,009,399</u>	<u>240,277,583</u>	Bank and subordinated bonds
	<u>1,596,931,436</u>	<u>1,635,045,991</u>	

- Investasi diukur pada biaya perolehan

- Investments at cost

Investasi diukur pada biaya perolehan merupakan investasi pada obligasi Sukuk yang diklasifikasikan sesuai dengan PSAK 110 "Akuntansi Sukuk".

Investments at cost represents investments in Sukuk bonds which is recorded in accordance with SFAS 110 "Accounting for Sukuk".

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	
Obligasi Pemerintah	11,635,220	10,784,419	Government bonds
Obligasi BUMN	<u>38,004,971</u>	<u>38,014,150</u>	State-Owned Enterprise bonds
	<u>49,640,191</u>	<u>48,798,569</u>	

Manajemen berkeyakinan bahwa semua investasi dapat dipulihkan, dan tidak ada cadangan kerugian yang diperlukan atas penurunan nilai investasi pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

Management believes that all investments are recoverable, and no provision for impairment of investments is necessary as at 31 December 2016 and 2015.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/26 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
31 DECEMBER 2016**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

7. PIUTANG USAHA

Piutang usaha terutama terdiri dari piutang atas pendapatan bunga deposito dan obligasi yang belum diterima serta piutang penjaminan.

Informasi terkait pihak-pihak berelasi diungkapkan pada Catatan 21.

7. ACCOUNT RECEIVABLES

Account receivables mainly represent interest receivables from time deposits and bonds and guarantee receivables.

Information in respect of related parties is disclosed in Note 21.

8. ASET TETAP

8. FIXED ASSETS

2016						
	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pelepasan/ <i>Disposals</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassifications</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>	
Aset kepemilikan langsung:						Direct ownership assets:
Harga perolehan:						Acquisition cost:
Aset dalam penyelesaian	-	18,192,949	-	(18,160,389)	32,560	Construction in progress
Prasarana kantor	7,334,695	-	-	18,160,389	25,495,084	Leasehold improvement
Peralatan komputer	3,461,224	386,992	-	-	3,848,216	Computer equipments
Peralatan kantor, perabotan dan perlengkapan	616,185	2,524,394	-	-	3,140,579	Office equipments, furnitures and fixtures
	<u>11,412,104</u>	<u>21,104,335</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>32,516,439</u>	
Akumulasi penyusutan:						Accumulated depreciation:
Prasarana kantor	(6,793,556)	(1,676,165)	-	-	(8,469,721)	Leasehold improvement
Peralatan komputer	(2,182,408)	(492,732)	-	-	(2,675,140)	Computer equipments
Peralatan kantor, perabotan dan perlengkapan	(523,062)	(198,270)	-	-	(721,332)	Office equipments, furnitures and fixtures
	<u>(9,499,026)</u>	<u>(2,367,167)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(11,866,193)</u>	
Nilai buku	<u>1,913,078</u>				<u>20,650,246</u>	Net book value

2015						
	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pelepasan/ <i>Disposals</i>		Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>	
Aset kepemilikan langsung:						Direct ownership assets:
Harga perolehan:						Acquisition cost:
Prasarana kantor	6,246,154	1,088,541	-		7,334,695	Leasehold improvement
Peralatan komputer	2,282,146	1,192,481	(13,403)		3,461,224	Computer equipments
Peralatan kantor, perabotan dan perlengkapan	546,148	70,037	-		616,185	Office equipments, furnitures and fixtures
	<u>9,074,448</u>	<u>2,351,059</u>	<u>(13,403)</u>		<u>11,412,104</u>	
Akumulasi Penyusutan:						Accumulated depreciation:
Prasarana kantor	(5,264,705)	(1,528,851)	-		(6,793,556)	Leasehold improvement
Peralatan komputer	(1,601,530)	(594,281)	13,403		(2,182,408)	Computer equipments
Peralatan kantor, perabotan dan perlengkapan	(426,995)	(96,067)	-		(523,062)	Office equipments, furnitures and fixtures
	<u>(7,293,230)</u>	<u>(2,219,199)</u>	<u>13,403</u>		<u>(9,499,026)</u>	
Nilai buku	<u>1,781,218</u>				<u>1,913,078</u>	Net book value

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/27 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
31 DECEMBER 2016**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

9. ASET TAK BERWUJUD

9. INTANGIBLE ASSETS

2016						
	<u>Saldo awal/ Beginning balance</u>	<u>Penambahan/ Additions</u>	<u>Pelepasan/ Disposals</u>	<u>Reklasifikasi/ Reclassifications</u>	<u>Saldo akhir/ Ending balance</u>	
Harga perolehan:						Acquisition cost:
Piranti lunak	4,035,282	235,236	-	137,500	4,408,018	Software
Aset dalam penyelesaian	182,216	87,623	-	(137,500)	132,339	Construction in progress
	<u>4,217,498</u>	<u>322,859</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>4,540,357</u>	
Akumulasi amortisasi:						Accumulated amortisation:
Piranti lunak	(1,841,648)	(1,008,525)	-	-	(2,850,173)	Software
	<u>(1,841,648)</u>	<u>(1,008,525)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(2,850,173)</u>	
Nilai buku	<u>2,375,850</u>				<u>1,690,184</u>	Net book value
2015						
	<u>Saldo awal/ Beginning balance</u>	<u>Penambahan/ Additions</u>	<u>Pelepasan/ Disposals</u>	<u>Reklasifikasi/ Reclassifications</u>	<u>Saldo akhir/ Ending balance</u>	
Harga perolehan:						Acquisition cost:
Piranti lunak	3,583,878	451,404	-	-	4,035,282	Software
Aset dalam penyelesaian	34,375	147,841	-	-	182,216	Construction in progress
	<u>3,618,253</u>	<u>599,245</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>4,217,498</u>	
Akumulasi amortisasi:						Accumulated amortisation:
Piranti lunak	(870,432)	(971,216)	-	-	(1,841,648)	Software
	<u>(870,432)</u>	<u>(971,216)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(1,841,648)</u>	
Nilai buku	<u>2,747,821</u>				<u>2,375,850</u>	Net book value

10. BEBAN TANGGUHAN

10. DEFERRED EXPENSES

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	
Beban tangguhan	71,327,113	87,979,509	Deferred expenses
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(13,386,382)</u>	<u>(13,386,382)</u>	Allowance for impairment losses
	<u>57,940,731</u>	<u>74,593,127</u>	

Beban tangguhan terutama merupakan biaya *advisory* yang terkait langsung dengan kegiatan pemrosesan dan pengaturan penjaminan jangka panjang dan akan dibebankan pada saat pendapatan dari penjaminan tersebut diakui.

Deferred expenses mainly represent advisory costs which directly attributable to the processing and arranging activities in providing long-term guarantees and will be expensed upon the recognition of such fees.

Pada tahun 2016, beban tangguhan yang dibebankan pada saat bersamaan dengan pengakuan pendapatan dari penjaminan adalah terkait proyek CJPP, Palapa Ring Paket Barat, Tengah dan Timur, SPAM Umbulan, Jalan Tol Batang-Semarang, Jalan Tol Manado-Bitung, Jalan Tol Pandaan-Malang dan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda.

On 2016, deferred expenses that expensed upon the recognition of guarantee fee are CJPP, Palapa Ring Western, Central and Eastern packages, SPAM Umbulan, Batang-Semarang Toll Road, Manado-Bitung Toll Road, Pandaan-Malang Toll Road and Balikpapan-Samarinda Toll Road.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/28 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
31 DECEMBER 2016**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

10. BEBAN TANGGUHAN (lanjutan)

Manajemen berkeyakinan bahwa proyek-proyek yang sedang berlangsung, yang terkait dengan beban tangguhan, akan dapat mencapai penandatanganan perjanjian penjaminan. Oleh karena itu beban tangguhan terus diakui di laporan posisi keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai yang dibentuk telah memadai.

10. DEFERRED EXPENSES (continued)

Management believes that outstanding projects, related to deferred expenses, could achieve the signing of guarantee of the project. Therefore, the deferred expenses continue to be recognised in the Company's statement of financial position as at 31 December 2016 and 2015.

Management believes that the provision for impairment losses on deferred expenses is adequate.

11. UTANG USAHA

Utang usaha terutama merupakan pembayaran yang belum dilakukan untuk jasa konsultasi terkait dengan provisi penjaminan.

11. ACCOUNT PAYABLES

Account payables mainly represent payables for advisory related to the guarantee provision.

12. PERPAJAKAN

a. Utang pajak

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Pajak penghasilan badan	-	-
Pajak lain-lain:		
- Pasal 21	2,453,386	2,007,463
- Lainnya	<u>29,287</u>	<u>1,045,499</u>
	<u>2,482,673</u>	<u>3,052,962</u>

b. (Beban)/manfaat pajak penghasilan

(Beban)/manfaat pajak Perusahaan terdiri dari sebagai berikut:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Pajak kini	-	-
Pajak tangguhan	<u>(2,713,882)</u>	<u>20,364,005</u>
	<u>(2,713,882)</u>	<u>20,364,005</u>

Rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak penghasilan dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

12. TAXATION

a. Taxes payable

Corporate income tax
Other taxes:
Article 21 -
Others -

b. Income tax (expenses)/benefits

Tax (expenses)/benefits of the Company consist of the following:

Current tax
Deferred tax

A reconciliation between the tax expense and the amounts computed by applying the prevailing tax rates to profit before income tax is as follows:

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/29 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
31 DECEMBER 2016**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

12. PERPAJAKAN (lanjutan)

12. TAXATION (continued)

b. (Beban)/manfaat pajak penghasilan (lanjutan)	2016	2015	b. Income tax (expenses)/benefits (continued)
Laba sebelum pajak penghasilan	505,160,647	319,091,472	<i>Profit before income tax</i>
Beban pajak dihitung dengan tarif yang berlaku	(126,290,162)	(79,772,868)	<i>Tax calculated at applicable tax rate</i>
Pengaruh atas:			<i>Effects of:</i>
- Pendapatan yang sudah dikenakan pajak final	161,175,296	133,575,892	<i>Revenues subjected to - final income tax</i>
- Koreksi pajak	(73,400)	(5,009,517)	<i>Tax correction -</i>
- Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan	(37,525,616)	(28,429,502)	<i>Non-deductible expenses -</i>
(Beban)/manfaat pajak penghasilan	<u>(2,713,882)</u>	<u>20,364,005</u>	<i>Income tax (expenses)/benefits</i>

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan dan laba yang dikenakan pajak adalah sebagai berikut:

A reconciliation between profit before income tax and the Company's taxable income is as follows:

	2016	2015	
Laba sebelum pajak penghasilan	505,160,647	319,091,472	<i>Profit before income tax</i>
Beda waktu	9,008,332	8,848,100	<i>Timing differences</i>
Beda tetap	150,102,463	113,718,007	<i>Permanent differences</i>
Pendapatan yang sudah dikenakan pajak final	<u>(644,701,184)</u>	<u>(534,303,569)</u>	<i>Revenues subjected to final income tax</i>
Laba/(rugi) pajak berjalan	19,570,258	(92,645,990)	<i>Current tax income/(loss)</i>
Rugi pajak yang bisa dikompensasi	(274,572,906)	(201,964,985)	<i>Tax loss carry forward</i>
Penyesuaian rugi pajak yang bisa dikompensasi	<u>293,600</u>	<u>20,038,069</u>	<i>Adjustment tax loss carry forward</i>
Akumulasi kerugian pajak	<u>(254,709,048)</u>	<u>(274,572,906)</u>	<i>Accumulated tax losses</i>

Berikut ini adalah rincian akumulasi kerugian fiskal:

Below are details of accumulated fiscal losses:

	2016	2015	
Tahun fiskal:			<i>Fiscal year:</i>
2015	(92,352,390)	(92,645,990)	<i>2015</i>
2014	(85,990,646)	(85,990,646)	<i>2014</i>
2013	(53,017,199)	(53,017,199)	<i>2013</i>
2012	<u>(23,348,813)</u>	<u>(42,919,071)</u>	<i>2012</i>
	<u>(254,709,048)</u>	<u>(274,572,906)</u>	

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 di atas adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk tujuan akuntansi dan dapat berubah pada waktu Perusahaan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya.

The above corporate income tax calculation for the year ended 31 December 2016 was a preliminary estimate made for accounting purposes and is subject to revision when the Company lodges its Annual Corporate Tax Return.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/30 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
31 DECEMBER 2016**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

12. PERPAJAKAN (lanjutan)

12. TAXATION (continued)

**b. (Beban)/manfaat pajak penghasilan
(lanjutan)**

**b. Income tax (expenses)/benefits
(continued)**

Perusahaan telah melakukan perubahan atas perhitungan pajak tahun 2015 pada saat penyampaian SPT, yang menyebabkan kerugian fiskal di tahun 2015 menjadi Rp 92.352.390.

The Company has amended the corporate income tax calculation for fiscal year 2015 in its Annual Corporate Tax Return, which resulted fiscal loss in 2015 to become Rp 92,352,390.

c. Aset pajak tangguhan

c. Deferred tax asset

2016					
	1 Januari/ January 2016	(Dibebankan)/ dikreditkan ke laporan laba rugi/ (Charged)/ credited to statements of profit or loss	Dikreditkan ke ekuitas/ Credited to equity	31 Desember/ December 2016	
Rugi pajak yang bisa dikompensasi	68,643,227	(4,965,965)	-	63,677,262	<i>Tax loss carry forward</i>
Penyisihan gaji dan bonus	4,079,849	262,706	-	4,342,555	<i>Provision for salaries and bonus</i>
Beban penyisihan imbalan kerja	2,361,212	849,034	373,606	3,583,852	<i>Provision for employee benefits obligation</i>
Perbedaan antara buku dan pajak dari nilai buku bersih aset tetap	919,184	131,676	-	1,050,860	<i>Differences between accounting and tax fixed assets net book value</i>
Pendapatan tangguhan penjaminan	-	1,008,667	-	1,008,667	<i>Guarantee unearned revenue</i>
Penyisihan penurunan nilai	3,346,596	-	-	3,346,596	<i>Provision for impairment losses</i>
	<u>79,350,068</u>	<u>(2,713,882)</u>	<u>373,606</u>	<u>77,009,792</u>	
2015					
	1 Januari/ January 2015	Dikreditkan ke laporan laba rugi/ Credited to statements of profit or loss	Dikreditkan ke ekuitas/ Credited to equity	31 Desember/ December 2015	
Rugi pajak yang bisa dikompensasi	50,491,247	18,151,980	-	68,643,227	<i>Tax loss carry forward</i>
Penyisihan gaji dan bonus	2,679,203	1,400,646	-	4,079,849	<i>Provision for salaries and bonus</i>
Beban penyisihan imbalan kerja	2,063,529	100,004	197,679	2,361,212	<i>Provision for employee benefits obligation</i>
Perbedaan antara buku dan pajak dari nilai buku bersih aset tetap	207,809	711,375	-	919,184	<i>Differences between accounting and tax fixed assets net book value</i>
Penyisihan penurunan nilai	3,346,596	-	-	3,346,596	<i>Provision for impairment losses</i>
	<u>58,788,384</u>	<u>20,364,005</u>	<u>197,679</u>	<u>79,350,068</u>	

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
31 DECEMBER 2016**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

12. PERPAJAKAN (lanjutan)**c. Aset pajak tangguhan (lanjutan)**

Pada tanggal 31 Desember 2016, Perusahaan mempunyai akumulasi kerugian dari tahun-tahun pajak 2012-2015 senilai Rp 254.709.048 (2015: Rp 274.279.306, setelah penyesuaian pelaporan pajak penghasilan badan Perusahaan) dan diakui sebagai aset pajak tangguhan. Berdasarkan rencana bisnis yang telah disetujui, Manajemen berkeyakinan bahwa kemungkinan besar bahwa aset pajak tangguhan yang berasal dari rugi pajak dan perbedaan temporer dapat dikompensasi dengan penghasilan kena pajak di masa yang akan datang.

d. Pemeriksaan pajak**Tahun pajak 2013**

Pada tanggal 28 April 2015, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak penghasilan badan (PPH Badan) untuk tahun pajak 2013 sebesar Rp 11.619.069. Kelebihan pajak penghasilan badan tersebut telah diterima Perusahaan pada tanggal 8 Juni 2015.

12. TAXATION (continued)**c. Deferred tax asset (continued)**

As at 31 December 2016, the Company has an accumulated tax losses from 2012-2015 fiscal years amounting to Rp 254,709,048 (2015: Rp 274,279,306 after adjustment in accordance with the submission of the Company's corporate income tax) and recognised as deferred tax assets. On the basis of the approved business plans, the Company's management believes it is highly probable that the deferred tax arising from tax loss carry forward and temporary differences can be offset against future taxable profits.

d. Tax audit**Fiscal year 2013**

On 28 April 2015, the Company received Overpayment Tax Assessment Letter for Corporate Income Tax (CIT) for its 2013 fiscal year amounting to Rp 11,619,069. The overpayment on CIT has been collected by the Company on 8 June 2015.

13. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR, PENYISIHAN DAN UTANG LAIN-LAIN

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Beban <i>advisory</i>	17,479,558	10,254,780
Bonus dan gaji	17,370,218	16,319,394
Program kemitraan dan bina lingkungan	1,302,160	574,528
Lainnya	<u>1,445,448</u>	<u>844,044</u>
	<u>37,597,384</u>	<u>27,992,746</u>

13. ACCRUED EXPENSES, PROVISIONS AND OTHER PAYABLES

Advisory fees
Bonus and salary
Corporate social responsibility programme
Others

14. PENDAPATAN TANGGUHAN

Pendapatan tangguhan merupakan pendapatan premi *recurring* yang diterima dimuka dan akan diakui setiap bulannya sepanjang masa pertanggungan.

14. UNEARNED INCOME

Unearned income represents guarantee recurring income received in advance and will be recognised on monthly basis along the guarantee period.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
31 DECEMBER 2016**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

15. PINJAMAN PENERUSAN

Pada tanggal 27 Mei 2013, Perusahaan menandatangani perjanjian penerusan pinjaman dengan Pemerintah atas dana pinjaman dari *International Bank for Reconstruction and Development*.

Pinjaman penerusan adalah pinjaman yang diperoleh Pemerintah dari bank luar negeri yaitu Bank Dunia, yang kemudian diteruskan kepada Perusahaan. Pinjaman yang diperoleh dicatat dan terutang dalam Rupiah berdasarkan kurs pada tanggal penarikan pinjaman.

Pinjaman tersebut ditujukan untuk membiayai peningkatan kapasitas penjaminan Perusahaan dan pengadaan konsultan jasa atas proyek *Public Private Partnership (PPP)* di bidang infrastruktur. Pokok pinjaman akan dilunasi dengan angsuran semesteran setelah masa tenggang selama 9 (sembilan) tahun dan akan jatuh tempo pada berbagai tanggal sampai dengan tahun 2029.

Pada tanggal 22 Februari 2016, Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan surat No. S-1504/MK.5/2016 sebagai amandemen atas perjanjian penerusan pinjaman No. SLA-1251/DSMI/2013 antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Perusahaan, dengan perubahan pada tingkat suku bunga, yaitu menggunakan *SUN Benchmark* dengan tenor 20 tahun.

Pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah penarikan pinjaman penerusan adalah Rp 35.805.463 (2015: Rp 21.980.958). Pinjaman penerusan ini memiliki tingkat suku bunga variabel, yaitu *SUN Benchmark* (2015: *BI Rate* +1%).

PT PII telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian pinjaman tersebut di atas.

15. TWO-STEP LOANS

On 27 May 2013, the Company entered into a two-step loans agreement with the Government in regards to the fund provided by the *International Bank for Reconstruction and Development*.

Two-step loans are loans obtained by the Government from international bank which is World Bank, which are then re-loaned to the Company. The loans were recorded and payable in Rupiah based on the exchange rate at the date of drawdown.

The loans are intended for the development of underwriting capacity of the Company and procurement of service consultants on *Public Private Partnership (PPP)* in infrastructure projects. The loan principal are payable in semi-annual installments after grace period of 9 (nine) years and are due on various dates up to 2029.

On 22 February 2016, Ministry of Finance Republic of Indonesia issued an a letter No. S-1504/MK.5/2016 as an amendment of loan agreement No. SLA-1251/DSMI/2013 between the Government of Indonesia and the Company, with the amendment of interest rate using *SUN Benchmark* with 20 years tenor.

As at 31 December 2016, the withdrawal of two-step loans are amounting to Rp 35,805,463 (2015: Rp 21,980,958). This loan has a variable interest rate, which is *SUN Benchmark* (2015: *BI Rate* +1%).

PT PII has complied with the covenants in the borrowing agreements above.

16. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Liabilitas imbalan kerja diakui di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Imbalan pensiun dan pasca-kerja lainnya	9,644,490	6,838,280
Imbalan jangka panjang lainnya	4,690,919	2,606,568
	<u>14,335,409</u>	<u>9,444,848</u>

16. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION

Employee benefits obligations recognised in the statements of financial position are as follows:

*Pension and other post-employment benefits
Other long-term benefits*

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/33 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
31 DECEMBER 2016**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

16. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

**16. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION
(continued)**

Liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 dihitung oleh PT Towers Watson Purbajaga, aktuaris independen pada laporannya tertanggal 24 Februari 2017 dan 26 Februari 2016 menggunakan metode "Projected Unit Credit" dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

The employee benefits obligation as of 31 December 2016 and 2015 is computed by PT Towers Watson Purbajaga, an independent actuary whose reports dated 24 February 2017 and 26 February 2016 using the "Projected Unit Credit" method with the following assumptions:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	
Usia pensiun normal	56	55	<i>Retirement age</i>
Tingkat diskonto	8.00%	9.00%	<i>Discount rate</i>
Tingkat mortalita	TMI '11	TMI '11	<i>Mortality rate</i>
Tingkat kenaikan gaji	10.00%	10.00%	<i>Salary increment rate</i>
Tingkat pengunduran diri	5% dari usia sebelum 25 tahun dan menurun Secara bertahap sebesar 0% pada usia 56 tahun/ 5% from age before 25 and reduced to 0% at age 56	5% dari usia sebelum 25 tahun dan menurun Secara bertahap sebesar 0% pada usia 55 tahun/ 5% from age before 25 and reduced to 0% at age 55	<i>Resignation rate</i>

Beban bersih yang diakui pada laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

Net expense recognised in the profit or loss is as follows:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	
Imbalan pensiun dan pasca-kerja lainnya	2,358,802	1,387,514	<i>Pension and other post-employment benefits</i>
Imbalan jangka panjang lainnya	<u>2,396,955</u>	<u>(693,899)</u>	<i>Other long-term benefits</i>
	<u>4,755,757</u>	<u>693,615</u>	

Beban bersih yang diakui pada laporan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

Net expense recognised in the statement of other comprehensive income is as follows:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	
Imbalan pensiun dan pasca-kerja lainnya	1,494,424	1,619,384	<i>Pension and other post-employment benefits</i>
Imbalan jangka panjang lainnya	<u>-</u>	<u>-</u>	<i>Other long-term benefits</i>
	<u>1,494,424</u>	<u>1,619,384</u>	

Imbalan pensiun dan pasca-kerja lainnya

Pension and other post-employment benefits

Liabilitas imbalan kerja diakui di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

Employee benefits obligations recognised in the statements of financial position are as follows:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	
Liabilitas imbalan kerja pensiun dan pasca-kerja lainnya	9,644,490	6,838,280	<i>Pension and other post-employment benefits obligation</i>

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/34 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
31 DECEMBER 2016**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

16. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

**16. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION
(continued)**

**Imbalan pensiun dan pasca-kerja lainnya
(lanjutan)**

**Pension and other post-employment benefits
(continued)**

Beban bersih yang diakui pada laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

Net expense recognised in the profit or loss is as follows:

	2016	2015	
Biaya jasa kini	1,934,426	1,087,443	Current service cost
Biaya jasa lalu	(146,725)	-	Past service cost
Beban bunga	571,101	276,071	Interest cost
Penyesuaian sehubungan penerapan PSAK 24 (Revisi 2013)	-	24,000	Adjustment due to implementation of SFAS 24 (Revised 2013)
	<u>2,358,802</u>	<u>1,387,514</u>	

Mutasi liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

The movement in the employee benefits obligation is as follows:

	2016	2015	
Saldo awal tahun	6,838,280	4,660,053	Balance at the beginning of the year
Penyesuaian sehubungan penerapan PSAK 24 (Revisi 2013)	-	(804,671)	Adjustment due to implementation of SFAS 24 (Revised 2013)
Beban tahun berjalan	2,358,802	1,363,514	Employee benefit expense charged in the current year
Pengukuran kembali: Kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	1,494,424	1,619,384	Remeasurement: Loss from changes in financial assumptions
Pembayaran imbalan kerja	<u>(1,047,016)</u>	<u>-</u>	Benefit paid
	<u>9,644,490</u>	<u>6,838,280</u>	

Sensitivitas dari kewajiban imbalan pasti terhadap perubahan asumsi aktuarial yang signifikan pada imbalan pensiun dan pasca-kerja lainnya adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the defined benefit obligation to changes in significant actuarial assumptions on pension and post-employment benefits obligation are as follow:

31 Desember/December 2016			
Dampak atas kewajiban imbalan pasti/ Impact on defined benefit obligation			
Perubahan asumsi/ Change in assumption	Kenaikan asumsi/ Increase in assumption	Penurunan asumsi/ Decrease in assumption	
Tingkat diskonto	1.00%	(1,022,362)	1,202,771
Tingkat kenaikan gaji di masa depan	1.00%	1,501,155	(1,291,819)

Discount rate
Rate of salary increase
in the future

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/35 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
31 DECEMBER 2016**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

16. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

**16. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION
(continued)**

**Imbalan pensiun dan pasca-kerja lainnya
(lanjutan)**

**Pension and other post-employment
benefits (continued)**

31 Desember/December 2015			
Dampak atas kewajiban imbalan pasti/ Impact on defined benefit obligation			
Perubahan asumsi/ Change in assumption	Kenaikan asumsi/ Increase in assumption	Penurunan asumsi/ Decrease in assumption	
Tingkat diskonto	1.00%	(557,813)	646,336
Tingkat kenaikan gaji di masa depan	1.00%	802,525	700,436
			<i>Discount rate Rate of salary increase in the future</i>
Rata-rata durasi dari kewajiban imbalan pensiun dan pasca-kerja lainnya adalah 12,32 tahun.		<i>The weighted average duration of the pension and other post-employment benefit obligation is 12.32 years.</i>	

Imbalan jangka panjang lainnya

Other long-term benefits

Liabilitas imbalan kerja diakui di laporan posisi
keuangan adalah sebagai berikut:

*Employee benefits obligations recognised in the
statements of financial position are as follows:*

	2016	2015	
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya	4,690,919	2,606,568	<i>Other long-term benefits obligation</i>

Beban bersih yang diakui pada laporan laba rugi
adalah sebagai berikut:

*Net expense recognised in the profit or loss is
as follows:*

	2016	2015	
Biaya jasa kini	907,849	1,384,347	<i>Current service cost</i>
Biaya jasa lalu	515,849	-	<i>Past service cost</i>
Beban bunga	220,535	247,977	<i>Interest cost</i>
Biaya jasa lalu	-	(2,089,901)	<i>Past service cost</i>
Kerugian/(keuntungan) aktuarial	752,722	(236,322)	<i>Actuarial losses/(gains)</i>
	<u>2,396,955</u>	<u>(693,899)</u>	

Mutasi liabilitas imbalan kerja adalah sebagai
berikut:

*The movement in the employee benefits
obligation is as follows:*

	2016	2015	
Saldo awal tahun	2,606,568	3,594,067	<i>Balance at the beginning of the year</i>
Beban tahun berjalan	2,396,955	(693,899)	<i>Employee benefit expense charged in the current year</i>
Pembayaran imbalan kerja	(312,604)	(293,600)	<i>Paid benefit</i>
	<u>4,690,919</u>	<u>2,606,568</u>	

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/36 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
31 DECEMBER 2016**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

16. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

**16. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION
(continued)**

Imbalan jangka panjang lainnya (lanjutan)

Other long-term benefits (continued)

Sensitivitas dari kewajiban imbalan pasti terhadap perubahan asumsi aktuarial yang signifikan pada imbalan jangka panjang lainnya adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the defined benefit obligation to changes in significant actuarial assumptions on other long-term benefits obligation are as follow:

31 Desember/December 2016				
Dampak atas kewajiban imbalan pasti/ Impact on defined benefit obligation				
Perubahan asumsi/ Change in assumption	Kenaikan asumsi/ Increase in assumption	Penurunan asumsi/ Decrease in assumption		
Tingkat diskonto	1.00%	(276,552)	310,205	<i>Discount rate</i>
Tingkat kenaikan gaji di masa depan	1.00%	333,651	(304,947)	<i>Rate of salary increase in the future</i>
31 Desember/December 2015				
Dampak atas kewajiban imbalan pasti/ Impact on defined benefit obligation				
Perubahan asumsi/ Change in assumption	Kenaikan asumsi/ Increase in assumption	Penurunan asumsi/ Decrease in assumption		
Tingkat diskonto	1.00%	(141,022)	157,029	<i>Discount rate</i>
Tingkat kenaikan gaji di masa depan	1.00%	172,898	(159,231)	<i>Rate of salary increase in the future</i>

Rata-rata durasi kewajiban imbalan jangka panjang lainnya adalah 6,74 tahun.

The weighted average duration of the other long-term benefits obligation is 6.74 years.

Analisa jatuh tempo yang diharapkan dari imbalan pensiun dan pasca-kerja lainnya dan imbalan jangka panjang lainnya yang tidak terdiskonto adalah sebagai berikut:

Expected maturity analysis of undiscounted pension and other post-employment benefits and other long-term benefits are as follow:

	Kurang dari 1 tahun/ Less than a year	1 sampai 2 tahun/ Between 1-2 years	2 sampai 5 tahun/ Between 2-5 years	Lebih dari 5 tahun/ Over 5 years	Jumlah/ Total	
Imbalan pensiun dan pasca-kerja lainnya	81,710	115,963	3,358,086	183,116,667	186,672,426	<i>Pension and other post-employment benefits</i>
Imbalan jangka panjang lainnya	379,209	962,574	4,161,453	50,297,906	55,801,142	<i>Other long-term benefits</i>
	<u>460,919</u>	<u>1,078,537</u>	<u>7,519,539</u>	<u>233,414,573</u>	<u>242,473,568</u>	

17. MODAL SAHAM

17. SHARE CAPITAL

Komposisi pemegang saham Perusahaan pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

The composition of Company's shareholder as at 31 December 2016 and 2015 is as follows:

	2016			
	Jumlah saham/ Number of shares	Kepemilikan/ Ownership (%)	Nilai/ Value	
Pemerintah Republik Indonesia	<u>7,000,000</u>	<u>100</u>	<u>7,000,000,000</u>	<i>Government of the Republic of Indonesia</i>

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/37 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
31 DECEMBER 2016**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

17. MODAL SAHAM (lanjutan)

17. SHARE CAPITAL (continued)

	2015			
	Jumlah saham/ Number of shares	Kepemilikan/ Ownership (%)	Nilai/ Value	
Pemerintah Republik Indonesia	6,000,000	100	6,000,000,000	Government of the Republic of Indonesia

Pada tanggal 30 Desember 2016, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 79 tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan, telah disetorkan tambahan modal saham sebesar Rp 1.000.000.000 yang telah diterima oleh Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2016.

On 30 December 2016, in accordance with Government Regulation No. 79 Year 2016 regarding addition of investment on the Company's capital by Government of Indonesia, the payment for issuance of share capital amounting to Rp 1,000,000,000 had been received by the Company on 31 December 2016.

Pada tanggal 16 Desember 2015, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 94 tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan, telah disetorkan tambahan modal saham sebesar Rp 1.500.000.000 yang telah diterima oleh Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2015.

On 16 December 2015, in accordance with Government Regulation No. 94 Year 2015 regarding addition of investment on the Company's capital by Government of Indonesia, the payment for issuance of share capital amounting to Rp 1,500,000,000 had been received by the Company on 31 December 2015.

**18. SALDO LABA YANG DITENTUKAN
PENGGUNAANNYA - CADANGAN WAJIB**

**18. APPROPRIATED RETAINED EARNING -
STATUTORY RESERVE**

Berdasarkan Undang-undang Perusahaan Terbatas No. 40 Tahun 2007, Perusahaan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba setiap tahun buku untuk cadangan apabila saldo laba positif sampai cadangan tersebut mencapai paling sedikit 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.

Based on Limited Liability Company Law No. 40 Year 2007, the Company shall appropriate a certain amount of its profit in each year for general reserve if there are available retained earnings, until the general reserve has reached at least 20% of the issued and paid-up capital.

Pada tahun 2016, Perusahaan membentuk tambahan saldo laba yang ditentukan penggunaannya sebesar Rp 17.000.000, sehingga saldo cadangan menjadi sebesar Rp 67.800.000. Cadangan tersebut ditetapkan dalam Keputusan Sirkuler Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 24 Juni 2016.

In 2016, the Company has made additional appropriation of retained earnings, amounting to Rp 17,000,000, as the reserve balance became Rp 67,800,000. This general reserve was approved in the Circular Decision General meeting of Shareholders dated 24 June 2016.

Pada tahun 2015, Perusahaan membentuk tambahan saldo laba yang ditentukan penggunaannya sebesar Rp 17.500.000, sehingga saldo cadangan menjadi sebesar Rp 50.800.000. Cadangan tersebut ditetapkan dalam Keputusan Sirkuler Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 30 Juni 2015.

In 2015, the Company has made additional appropriation of retained earnings, amounting to Rp 17,500,000, as the reserve balance became Rp 50,800,000. This general reserve was approved in the Circular Decision General meeting of Shareholders dated 30 June 2015.

Manajemen bermaksud untuk meningkatkan cadangan tersebut di masa datang.

Management plans to increase the general reserve in the future.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/38 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
31 DECEMBER 2016**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

19. PENDAPATAN

19. REVENUES

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	
Pendapatan penjaminan			<i>Revenue from guarantee</i>
- Pendapatan provisi dan komisi	172,121,310	-	<i>Fees and commission -</i>
- Pendapatan premi	5,528,133	-	<i>Premium income -</i>
	<u>177,649,443</u>	<u>-</u>	
Pendapatan pengelolaan dana:			<i>Income from investments:</i>
- Deposito	398,921,005	439,344,827	<i>Time deposits -</i>
- Investasi dengan pendapatan tetap:			<i>Fixed income:</i>
- Pendapatan bunga	236,568,547	93,719,851	<i>Interest income -</i>
- Laba atas penjualan obligasi	7,967,804	-	<i>Gain on sale of bonds -</i>
	<u>643,457,356</u>	<u>533,064,678</u>	
	<u>821,106,799</u>	<u>533,064,678</u>	
Informasi terkait pihak-pihak berelasi diungkapkan pada Catatan 21.			<i>Information in respect of related parties is disclosed in Note 21.</i>

20. BEBAN USAHA

20. OPERATING EXPENSES

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	
Penjaminan:			<i>Guarantee:</i>
- Konsultan	42,367,486	6,488,417	<i>Consultancy -</i>
- Pegawai	31,303,717	31,847,300	<i>Employee cost -</i>
- Loka-karya	3,345,268	1,309,999	<i>Workshop -</i>
- Rapat dan konferensi	2,060,577	412,000	<i>Meeting and conference -</i>
- Perjalanan dinas	1,484,144	1,158,997	<i>Travelling -</i>
	<u>80,561,192</u>	<u>41,216,713</u>	
Administrasi dan umum:			<i>General and administrative:</i>
- Pegawai	40,929,006	29,960,579	<i>Employee cost -</i>
- Jasa profesional	19,656,277	7,565,556	<i>Professional fees -</i>
- Sewa	14,797,453	8,650,185	<i>Rent -</i>
- Rapat dan konferensi	3,179,170	1,599,487	<i>Meeting and conference -</i>
- Pelatihan	2,748,343	3,182,847	<i>Training -</i>
- Outsourcing	2,468,713	1,346,014	<i>Outsourcing -</i>
- Perlengkapan kantor	2,435,032	1,163,474	<i>Office equipment -</i>
- Perjalanan dinas	2,311,762	3,232,693	<i>Travelling -</i>
- Beban bina karyawan	2,162,005	1,769,868	<i>Employee development -</i>
- Pemeliharaan	647,313	349,839	<i>Maintenance -</i>
- Transportasi	512,517	516,190	<i>Transportation -</i>
- Komunikasi	219,134	246,357	<i>Communication -</i>
- Lainnya	417,702	137,316	<i>Others -</i>
	<u>92,484,427</u>	<u>59,720,405</u>	
Pengembangan usaha:			<i>Business development:</i>
- IIGF Institute	4,248,560	1,785,360	<i>IIGF Institute -</i>
- Loka-karya	3,166,691	4,640,225	<i>Workshop -</i>
- Iklan dan promosi	1,397,189	512,107	<i>Advertising and promotion -</i>
- Representasi	596,164	640,015	<i>Representation -</i>
	<u>9,408,604</u>	<u>7,577,707</u>	
Informasi terkait pihak-pihak berelasi diungkapkan pada Catatan 21.			<i>Information in respect of related parties is disclosed in Note 21.</i>

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/39 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
31 DECEMBER 2016**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

21. INFORMASI PIHAK-PIHAK BERELASI YANG SIGNIFIKAN

21. SIGNIFICANT RELATED PARTIES INFORMATION

Sifat pihak berelasi

Nature of relationship

- a. Pemerintah Republik Indonesia adalah pemegang saham Perusahaan.
- b. Direksi adalah orang-orang yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk perencanaan, pengarahan dan pengendalian aktivitas-aktivitas Perusahaan.
- c. Bank dan Badan Usaha Milik Negara merupakan entitas sepengendali dimana Perusahaan melakukan penempatan investasi dalam bentuk deposito dan obligasi.

- a. The Government of the Republic of Indonesia is a shareholder of the Company.
- b. The directors are persons who have authority and responsibility for planning, directing and controlling the Company's activities.
- c. Banks and State-Owned Enterprise are entities under common controls where the Company places its investments in time deposits and bonds.

Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Transaksi-transaksi tersebut meliputi antara lain:

In the normal course of business, the Company enters into certain transactions with related parties, including the following:

- a. Perusahaan menempatkan dana dalam bentuk deposito dan obligasi dari pihak pihak berelasi yang dilakukan dengan syarat dan kondisi yang disepakati. Rincian pendapatan pengelolaan dana kepada pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

- a. The Company invested their funds in time deposit and bonds from related parties which were made according to agreed terms and conditions. The details of investments income from related parties is as follows:

Saldo yang timbul dari transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Balances arising from related parties transactions

	2016	2015	
Kas dan setara kas	2,118,383,797	1,615,939,707	Cash and cash equivalents
Investasi	3,568,699,856	3,752,923,577	Investments
Piutang usaha	56,940,134	65,453,972	Account receivables
	<u>5,744,023,787</u>	<u>5,434,317,256</u>	
Persentase terhadap jumlah aset	<u>64.36%</u>	<u>73.62%</u>	Percentage of total assets

Pendapatan

Revenues

- Pemerintah Republik Indonesia	157,568,123	19,321,693	Government of Indonesia -
- PT Bank Rakyat Indonesia	37,811,444	130,665,953	PT Bank Rakyat Indonesia -
- PT BPD Jawa Tengah	24,152,519	14,501,743	PT BPD Jawa Tengah -
- PT Bank Mandiri	22,810,173	7,279,598	PT Bank Mandiri -
- PT Bank Negara Indonesia	17,430,765	17,103,701	PT Bank Negara Indonesia -
- PT BPD Sulselbar	11,960,154	10,303,746	PT BPD Sulselbar -
- PT Bank Nagari	9,313,838	25,094,550	PT Bank Nagari -
- PT Telekomunikasi Indonesia	9,232,467	5,901,638	PT Telekomunikasi Indonesia -
- PT BPD Riau Kepri	8,159,075	-	PT BPD Riau Kepri -
- PT Adhi Karya	6,780,794	6,252,259	PT Adhi Karya -
- PT Sarana Multigriya Finansial	6,273,278	6,034,652	PT Sarana Multigriya Finansial -
- PT Pembangkit Listrik Negara	5,845,713	6,928,375	PT Pembangkit Listrik Negara -
- PT Pembangunan Perumahan	5,288,705	5,143,321	PT Pembangunan Perumahan -
- PT BPD Sulawesi Utara	4,585,184	5,525,175	PT BPD Sulawesi Utara -
- PT Bank Tabungan Negara	4,345,000	4,158,791	PT Bank Tabungan Negara -
- PT Pegadaian	3,650,000	1,951,635	PT Pegadaian -
- PT Hutama Karya	3,549,000	3,416,961	PT Hutama Karya -
- PT Jasamarga	3,476,613	3,703,576	PT Jasamarga -

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/40 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
31 DECEMBER 2016**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

21. INFORMASI PIHAK-PIHAK BERELASI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

21. SIGNIFICANT RELATED PARTIES INFORMATION (continued)

Saldo yang timbul dari transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Balances arising from related party transactions (continued)

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	
Pendapatan (lanjutan)			Revenues (continued)
- PT Garuda Indonesia	2,312,500	2,280,985	PT Garuda Indonesia -
- PT Sarana Multi Infrastruktur	2,247,917	1,932,288	PT Sarana Multi Infrastruktur -
- PT Waskita Karya	1,665,000	342,250	PT Waskita Karya -
- PT BPD Sumatera Utara	1,286,024	15,358,068	PT BPD Sumatera Utara -
- PT Angkasa Pura	1,075,000	-	PT Angkasa Pura -
- PT Aneka Tambang	484,545	522,686	PT Aneka Tambang -
- PT Pelindo	216,563	-	PT Pelindo -
- PT BPD Jawa Timur	-	1,035,504	PT BPD Jawa Timur -
	<u>351,520,394</u>	<u>294,759,148</u>	
Persentase terhadap jumlah pendapatan	<u>42.81%</u>	<u>55.30%</u>	Percentage of total revenue

b. Perusahaan memberikan remunerasi dan fasilitas untuk keperluan tugas operasional Dewan Komisaris dan Direksi. Jumlah gaji dan tunjangan, bonus/tantiem untuk Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

b. The Company provides remuneration and facilities to support the operational duties of their Board of Commissioners and Directors. The total of salary and allowance, bonus/tantiem for Board of Commissioners and Directors for the years ended 31 December 2016 and 2015 are as follows:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	
Dewan Komisaris			Board of Commissioners
- Gaji dan imbalan kerja jangka pendek	4,553,608	3,678,665	Salary and short term - employee benefit
Dewan Direksi			Board of Directors
- Gaji dan imbalan kerja jangka pendek	12,190,978	11,492,680	Salary and short term - employee benefit
	<u>16,744,586</u>	<u>15,171,345</u>	
Persentase terhadap jumlah beban usaha	<u>5.30%</u>	<u>7.09%</u>	Percentage of total operating expenses

22. PERJANJIAN PENTING

22. SIGNIFICANT AGREEMENTS

Perjanjian Penjaminan

Guarantee Agreement

Hal-hal berikut adalah Perjanjian Penjaminan yang telah ditandatangani oleh Perusahaan pada 31 Desember 2016:

The following are the Guarantee Agreement entered by the Company as of 31 December 2016:

1. Proyek PLTU Batang Jawa Tengah (CJPP)

1. Batang East Java Power Plant Project (CJPP)

Pada tanggal 6 Oktober 2011, Perusahaan bersama dengan Pemerintah Republik Indonesia ("Pemerintah") menandatangani Perjanjian Penjaminan dengan PT Bhimasena Power Indonesia ("Bhimasena") selaku Badan Usaha.

On 6 October 2011, the Company together with the Government of the Republic of Indonesia (the "Government") entered into a Guarantee Agreement with PT Bhimasena Power Indonesia ("Bhimasena") as the Investor.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/41 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
31 DECEMBER 2016**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

22. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

**1. Proyek PLTU Batang Jawa Tengah (CJPP)
(lanjutan)**

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari Bhimasena berupa *arranging fee* dan *upfront fee* pada saat ditandatanganinya perjanjian dan perolehan pembiayaan, sedangkan *processing fee* dan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 21 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya perjanjian kerja sama ("PKS") antara Badan Usaha ("BU") dan PJPK.

Pada tanggal 6 Juni 2016, penandatanganan perolehan pembiayaan proyek dilakukan antara pemberi pinjaman dan Bhimasena. Pada saat yang bersamaan, penjaminan proyek sudah efektif.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah sebesar Rp 300 miliar (nilai penuh) kerugian pertama yang meliputi risiko politik dan terminasi.

2. Proyek Palapa Ring Barat

Pada tanggal 29 Februari 2016, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Palapa Ring Barat ("Palapa Barat") selaku Badan Usaha.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari Palapa Barat berupa *upfront fee* pada saat ditandatanganinya perjanjian dan tanggal efektif penjaminan, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 12 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJPK.

Pada tanggal 10 November 2016, penjaminan proyek telah efektif dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam Perjanjian Penjaminan.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah Rp 310 miliar (nilai penuh) yang meliputi kewajiban finansial atas *Availability Payment* dan 80% dari Biaya Pengakhiran yang ditanggung yang disetujui oleh Palapa Barat dan PJPK.

22. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Guarantee Agreement (continued)

**1. Batang East Java Power Plant Project
(CJPP) (continued)**

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to received fees from Bhimasena in form of *arranging fee* and *upfront fee* at the signing date and financial close date, while *processing fee* and *guarantee* are received on the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 21 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

On 6 June 2016, signing of financial close was held between lender and Bhimasena. At the same time, guarantee of the project has been effective.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to the first loss of Rp 300 billion (full amount) covering political risk and termination.

2. Western Package Palapa Ring Project

On 29 February 2016, the Company entered into a guarantee agreement with PT Palapa Ring Barat ("Palapa Barat") as the Investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to received fees from Palapa Barat in form of *upfront fee* at the signing date and effective date of guarantees, while *guarantee fee* is received on the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 12 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

On 10 November 2016, the guarantee of the project has been effective since all the requirements in the Guarantee Agreement have been fulfilled.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to Rp 310 billion (full amount) covering the financial liability of *Availability Payment* and 80% from termination cost approved by Palapa Barat and GCA.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/42 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

22. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

3. Proyek Palapa Ring Tengah

Pada tanggal 4 Maret 2016, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT LEN Telekomunikasi Indonesia ("LTI") selaku Badan Usaha.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari LTI berupa *upfront fee* pada saat ditandatanganinya perjanjian dan tanggal efektif penjaminan, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 12 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJPk.

Pada tanggal 30 Desember 2016, penjaminan proyek telah efektif dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam Perjanjian Penjaminan.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah Rp 336 miliar (nilai penuh) yang meliputi kewajiban finansial atas *Availability Payment* dan 80% dari Biaya Pengakhiran yang ditanggung yang disetujui oleh LTI dan PJPk.

4. Proyek Palapa Ring Timur

Pada tanggal 29 September 2016, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Palapa Timur Telematika ("Palapa Timur") selaku Badan Usaha.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari Palapa Timur berupa *upfront fee* pada saat ditandatanganinya perjanjian dan tanggal efektif penjaminan, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 12 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJPk.

Sampai dengan tanggal pelaporan, penjaminan proyek belum efektif.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
31 DECEMBER 2016**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

22. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Guarantee Agreement (continued)

3. Central Package Palapa Ring Project

On 4 March 2016, the Company entered into a guarantee agreement with PT LEN Telekomunikasi Indonesia ("LTI") as the Investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to received fees from LTI in form of upfront fee at the signing date and effective date of guarantees, while guarantee fee is received on the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 12 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

On 30 December 2016, the guarantee of the project has been effective since all the requirements in the Guarantee Agreement have been fulfilled.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to Rp 336 billion (full amount) covering the financial liability of *Availability Payment* and 80% from termination cost approved by LTI and GCA.

4. Eastern Package Palapa Ring Project

On 29 September 2016, the Company entered into a guarantee agreement with PT Palapa Timur Telematika ("Palapa Timur") as the Investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to received fees from Palapa Timur in form of upfront fee at the signing date and effective date of guarantees, while guarantee fee is received on the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 12 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

As of the reporting date, the guarantee of the project has not been effective.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/43 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

22. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

4. Proyek Palapa Ring Timur (lanjutan)

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah Rp 826 miliar (nilai penuh untuk sub-paket 1), Rp 570 miliar (nilai penuh untuk sub-paket 2) yang meliputi kewajiban finansial atas *Availability Payment* dan 80% dari Biaya Pengakhiran yang ditanggung yang disetujui oleh Palapa Timur dan PJPK.

5. Proyek Tol Batang - Semarang

Pada tanggal 27 April 2016, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Jasamarga Semarang Batang ("Jasamarga Semarang Batang") selaku Badan Usaha.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari Jasamarga Semarang Batang berupa *upfront fee* pada saat ditandatanganinya perjanjian dan tanggal efektif penjaminan, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 15 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJPK.

Pada tanggal 20 Juni 2016, penjaminan proyek telah efektif dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam Perjanjian Penjaminan.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah Rp 2.450 miliar (nilai penuh) yang meliputi penyesuaian tarif, risiko politik, keterlambatan pengadaan tanah, dan dana talangan tanah.

6. Proyek Tol Pandaan - Malang

Pada tanggal 9 Juni 2016, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Jasamarga Pandaan Malang ("Jasamarga Pandaan Malang") selaku Badan Usaha.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
31 DECEMBER 2016**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

22. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Guarantee Agreement (continued)

4. Eastern Package Palapa Ring Project (continued)

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to Rp 826 billion (full amount for sub-package 1), Rp 570 billion (full amount for sub-package 2) covering the financial liability of Availability Payment and 80% from termination cost approved by Palapa Timur and GCA.

5. Batang - Semarang Toll Road Project

On 27 April 2016, the Company entered into a guarantee agreement with PT Jasamarga Semarang Batang ("Jasamarga Semarang Batang") as the Investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to received fees from Jasamarga Semarang Batang in form of upfront fee at the signing date and effective date of guarantees, while guarantee fee is received on the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 15 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

On 20 June 2016, the guarantee of the project has been effective since all the requirements in the Guarantee Agreement have been fulfilled.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to Rp 2,450 billion (full amount) covering tariff adjustment, political risk, delay in land acquisition and land bailout fund.

6. Pandaan - Malang Toll Road Project

On 9 June 2016, the Company entered into a guarantee agreement with PT Jasamarga Pandaan Malang ("Jasamarga Pandaan Malang") as the Investor.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/44 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

22. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

6. Proyek Tol Pandaan – Malang (lanjutan)

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari Jasamarga Pandaan Malang berupa *upfront fee* pada saat ditandatanganinya perjanjian dan tanggal efektif penjaminan, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 15 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJPK.

Pada tanggal 3 Oktober 2016, penjaminan proyek telah efektif dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam Perjanjian Penjaminan.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah Rp 5,6 triliun (nilai penuh) yang meliputi penyesuaian tarif, risiko politik, keterlambatan pengadaan tanah, dana talangan tanah, dana likuiditas terbatas dan pengakhiran akibat keadaan kahar.

7. Proyek Tol Manado - Bitung

Pada tanggal 9 Juni 2016, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Jasamarga Manado Bitung ("Jasamarga Manado Bitung") selaku Badan Usaha.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari Jasamarga Manado Bitung berupa *upfront fee* pada saat ditandatanganinya perjanjian dan tanggal efektif penjaminan, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 15 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJPK.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
31 DECEMBER 2016**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

22. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Guarantee Agreement (continued)

6. Pandaan - Malang Toll Road Project (continued)

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to received fees from Jasamarga Pandaan Malang in form of upfront fee at the signing date and effective date of guarantees, while guarantee fee is received on the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 15 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

On 3 October 2016, the guarantee of the project has been effective since all the requirements in the Guarantee Agreement have been fulfilled.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to Rp 5.6 trillion (full amount) covering tariff adjustment, political risk, delay in land acquisition, land bailout fund, limited liquidity fund and termination due to force majeure.

7. Manado - Bitung Toll Road Project

On 9 June 2016, the Company entered into a guarantee agreement with PT Jasamarga Manado Bitung ("Jasamarga Manado Bitung") as the Investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to received fees from Jasamarga Manado Bitung in form of upfront fee at the signing date and effective date of guarantees, while guarantee fee is received on the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 15 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/45 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
31 DECEMBER 2016**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

22. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

7. Proyek Tol Manado - Bitung (lanjutan)

Pada tanggal 6 Oktober 2016, penjaminan proyek telah efektif dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam Perjanjian Penjaminan.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah Rp 3,4 triliun (nilai penuh) yang meliputi penyesuaian tarif, risiko politik, keterlambatan pengadaan tanah, dana talangan tanah, dana likuiditas terbatas dan pengakhiran akibat keadaan kahar.

8. Proyek Tol Balikpapan - Samarinda

Pada tanggal 9 Juni 2016, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Jasamarga Balikpapan Samarinda ("Jasamarga Balikpapan Samarinda") selaku Badan Usaha.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari Jasamarga Balikpapan Samarinda berupa *upfront fee* pada saat ditandatanganinya perjanjian dan tanggal efektif penjaminan, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 15 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJPk.

Pada tanggal 2 Desember 2016, penjaminan proyek telah efektif dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam Perjanjian Penjaminan.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah Rp 6,1 triliun (nilai penuh) yang meliputi penyesuaian tarif, risiko politik, keterlambatan pengadaan tanah, dana talangan tanah, dana likuiditas terbatas dan pengakhiran akibat keadaan kahar.

9. Proyek Sistem Penyediaan Air Minum ("SPAM") Umbulan

Pada tanggal 21 Juli 2016, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Meta Adhya Tirta Umbulan ("Meta") selaku Badan Usaha.

22. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Guarantee Agreement (continued)

7. Manado - Bitung Toll Road Project (continued)

On 6 October 2016, the guarantee of the project has been effective since all the requirements in the Guarantee Agreement have been fulfilled.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to Rp 3.4 trillion (full amount) covering tariff adjustment, political risk, delay in land acquisition, land bailout fund, limited liquidity fund and termination due to force majeure.

8. Balikpapan - Samarinda Toll Road Project

On 9 June 2016, the Company entered into a guarantee agreement with PT Jasamarga Balikpapan Samarinda ("Jasamarga Balikpapan Samarinda") as the Investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to received fees from Jasamarga Balikpapan Samarinda in form of upfront fee at the signing date and effective date of guarantees, while guarantee fee is received on the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 15 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

On 2 December 2016, the guarantee of the project has been effective since all the requirements in the Guarantee Agreement have been fulfilled.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to Rp 6.1 trillion (full amount) covering tariff adjustment, political risk, delay in land acquisition, land bailout fund, limited liquidity fund and termination due to force majeure.

9. Water Supply System Umbulan Project

On 21 July 2016, the Company entered into a guarantee agreement with PT Meta Adhya Tirta Umbulan ("Meta") as the Investor.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/46 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
31 DECEMBER 2016**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

22. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

**9. Proyek Sistem Penyediaan Air Minum
("SPAM") Umbulan (lanjutan)**

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari Meta berupa *upfront fee* pada saat ditandatanganinya perjanjian dan tanggal efektif penjaminan, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 15 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJPk.

Sampai dengan tanggal pelaporan, penjaminan proyek belum efektif. Namun kemudian, penjaminan proyek efektif pada tanggal 10 Februari 2017 saat seluruh persyaratan perjanjian penjaminan terpenuhi.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah Rp 180 miliar (nilai penuh) yang meliputi cicilan janji pembayaran bulanan dan 80% atas harga pembelian proyek yang wajib dibayar oleh PJPk ke BU sesuai PKS.

Atas semua perjanjian penjaminan yang dimiliki diatas, Perusahaan juga menandatangani perjanjian regres dengan para PJPk masing-masing proyek yang mengatur tata cara pengembalian hak regres pada saat pembayaran klaim dilakukan kepada Badan Usaha.

Pada tanggal 31 Desember 2016, Perusahaan tidak membentuk penyisihan atas kontrak jaminan keuangan karena belum terdapat klaim dan/atau potensi klaim yang probable terhadap Perusahaan terkait dengan kewajibannya dari perjanjian penjaminan.

Perjanjian sewa kantor dengan PT Mahkota Prima Properti

Pada tanggal 22 Agustus 2016 Perusahaan mengadakan perjanjian sewa dengan PT Mahkota Prima Properti. Periode sewa adalah untuk empat (4) tahun dimulai dari 1 September 2016 dan berakhir pada 31 Agustus 2020.

22. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Guarantee Agreement (continued)

**9. Water Supply System Umbulan Project
(continued)**

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to received fees from Meta in form of *upfront fee* at the signing date and effective date of guarantees, while *guarantee fee* is received on the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 15 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

As of the reporting date, the guarantee of the project has not been effective. Subsequently, the guarantee of the project is effective on 10 February 2017 when all the requirements in the Guarantee Agreement have been fulfilled.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to Rp 180 billion (full amount) covering the breach of monthly payment promise and 80% of project purchase price to be paid by GCA to Investor as agreed in cooperation agreement.

Upon the signing of guarantee agreements above, the Company also signed recourse agreement with GCA of each projects which stipulates term and conditions of recourse right when the Company make any claim payment to the Investors.

As at 31 December 2016, the Company did not provide impairment provision on financial guarantee contract as there were no claims and/or probable potential claims against the Company related to its obligations under the guarantee agreement.

Rent office agreement with PT Mahkota Prima Properti

On 22 August 2016, the Company entered into a lease agreement with PT Mahkota Prima Properti. The lease period is for four (4) years starting from 1 September 2016 and expires on 31 August 2020.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/47 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
31 DECEMBER 2016**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

22. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian sewa kantor dengan PT Mahkota Prima Properti (lanjutan)

Perjanjian sewa ini meliputi area yang digunakan untuk ruangan kantor. Berdasarkan perjanjian ini, Perusahaan mempunyai kewajiban untuk membayar sewa, jasa pemeliharaan dan biaya lainnya terkait sewa ke PT Mahkota Prima Properti. Pembayaran untuk seluruh jumlah sewa dan jasa pemeliharaan dibayarkan setiap bulan. Sebagai tambahan, Perusahaan juga membayar dimuka atas deposit sekuriti yang ditahan oleh PT Mahkota Prima Properti tanpa kewajiban untuk membayar bunga kepada Perusahaan. Seluruh deposit tersebut akan dikembalikan pada waktu berakhirnya perjanjian sewa ini, jika Perusahaan tidak berniat untuk melanjutkan sewa.

22. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Rent office agreement with PT Mahkota Prima Properti (continued)

This lease agreement covers an area that is used for office space. Based on this agreement, the Company has an obligation to pay rent, service charges and other charges to PT Mahkota Prima Properti. Payment for the full amount of rent and service charges was charged monthly. In addition, the Company also paid in advance for security deposit, which is held by the PT Mahkota Prima Properti without liability to the Company for interest. All deposits will be refunded on the expiration of this lease, if the Company does not intend to continue the lease.

23. LIABILITAS KONTINJENSI DAN KOMITMEN

Kecuali atas perjanjian penjaminan (lihat Catatan 3), Perusahaan tidak memiliki liabilitas kontinjensi dan komitmen yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

23. CONTINGENT LIABILITIES AND CAPITAL COMMITMENTS

Except for the guarantee contracts (refer to Note 3), the Company has no significant contingent liabilities and capital commitments as at 31 December 2016 and 2015.

24. TRANSAKSI NON-KAS

Transaksi non-kas yang penting adalah sebagai berikut:

	2016
Pencadangan saldo laba	17,000,000
Perubahan nilai pasar atas aset keuangan tersedia untuk dijual	35,424,598

24. NON-CASH TRANSACTIONS

The principal non-cash transactions are as follows:

	2015	
	17,500,000	<i>Appropriation retained earnings</i>
	(3,314,119)	<i>Changes in fair value of financial assets available for sale</i>

25. STANDAR AKUNTANSI BARU

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan beberapa standar baru, revisi dan interpretasi, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015 adalah sebagai berikut:

- PSAK 1 (Revisi 2015): Penyajian Laporan Keuangan
- PSAK 4 (Revisi 2015): Laporan Keuangan Tersendiri
- PSAK 5 (Revisi 2015): Segmen Operasi
- PSAK 7 (Revisi 2015): Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi

25. PROSPECTIVE ACCOUNTING PRONOUNCEMENT

Financial Accounting Standard Board of Indonesia Institute of Accountants (DSAK-IAI) issued several new standards, amendments and interpretations but not yet effective for the financial year beginning 1 January 2015 are as follows:

- SFAS 1 (Revised 2015): Presentation of Financial Statement
- SFAS 4 (Revised 2015): Separate Financial Statement
- SFAS 5 (Revised 2015): Operating Segment
- SFAS 7 (Revised 2015): Related Party Disclosures

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/48 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. STANDAR AKUNTANSI BARU (lanjutan)

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan beberapa standar baru, revisi dan interpretasi, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

- PSAK 13 (Revisi 2015): Properti Investasi
- PSAK 15 (Revisi 2015): Investasi Pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
- PSAK 16 (Revisi 2015): Aset Tetap
- PSAK 19 (Revisi 2015): Aset Takberwujud
- PSAK 22 (Revisi 2015): Kombinasi Bisnis
- PSAK 24 (Revisi 2015): Imbalan Kerja
- PSAK 25 (Revisi 2015): Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan
- PSAK 53 (Revisi 2015): Pembayaran Berbasis Saham
- PSAK 65 (Revisi 2015): Laporan Keuangan Konsolidasian
- PSAK 66 (Revisi 2015): Pengaturan Bersama
- PSAK 67 (Revisi 2015): Pengungkapan Kepentingan Dalam Entitas Lain
- PSAK 68 (Revisi 2015): Pengukuran Nilai Wajar
- ISAK 30 (Revisi 2015): Pungutan
- ISAK 31 (Revisi 2015): Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK 13: Properti Investasi

PSAK 1 and ISAK 31 berlaku untuk tahun buku yang dimulai sejak 1 Januari 2017 dan penerapan ini diperkenankan, sedangkan revisi dan standar baru lainnya akan berlaku efektif pada tahun buku yang dimulai 1 Januari 2016.

Pada saat penerbitan laporan keuangan, Perusahaan masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan Perusahaan.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
31 DECEMBER 2016**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

**25. PROSPECTIVE ACCOUNTING
PRONOUNCEMENT (continued)**

Financial Accounting Standard Board of Indonesia Institute of Accountants (DSAK-IAI) issued several new standards, amendments and interpretations but not yet effective for the financial year beginning 1 January 2015 are as follows: (continued)

- *SFAS 13 (Revised 2015): Investment Property*
- *SFAS 15 (Revised 2015): Investment in Associates and Joint ventures*
- *SFAS 16 (Revised 2015): Fixed Asset*
- *SFAS 19 (Revised 2015): Intangible Asset*
- *SFAS 22 (Revised 2015): Business Combination*
- *SFAS 24 (Revised 2015): Employee Benefit*
- *SFAS 25 (Revised 2015): Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors*
- *SFAS 53 (Revised 2015): Share Based Payment*
- *SFAS 65 (Revised 2015): Consolidated Financial Statement*
- *SFAS 66 (Revised 2015): Joint Arrangements*
- *SFAS 67 (Revised 2015): Disclosure of Interests in Other Entities*
- *SFAS 68 (Revised 2015): Fair Value Measurement*
- *IFAS 30 (Revised 2015): Collection*
- *IFAS 31 (Revised 2015): Interpretation of Scope SFAS 13: Investment Property*

SFAS 1 and IFAS 31 will become effective for annual period beginning 1 January 2017 and an early adoption is allowed, while the other new and revised standards will become effective for the annual period beginning 1 January 2016.

As at the authorisation date of this financial statements, the Company is still evaluating the potential impact of these new and revised standards to its financial statements.

Kriteria Annual Report Award 2016

Annual Report Award Criteria 2016

No.	Kriteria Criteria	Penjelasan	Description	Halaman Page
I. Umum/General Provisions				
1	Laporan tahunan disajikan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dan dianjurkan menyajikan juga dalam bahasa Inggris <i>The Annual Report shall be written in the good Indonesian, and also recommended to present this report in English.</i>			✓
2	Laporan tahunan dicetak dengan kualitas yang baik dan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca <i>The Annual Report shall be printed with a good quality and using readable font type and size</i>			✓
3	Laporan tahunan mencantumkan identitas perusahaan dengan jelas <i>The Annual Report shall present corporate identity obviously</i>	Nama perusahaan dan tahun <i>annual report</i> ditampilkan di: 1. Sampul muka; 2. Samping; 3. Sampul belakang; dan 4. Setiap halaman.	<i>Company's Name and Annual Report period shall be presented at:</i> 1. Front Cover; 2. Spine; 3. Back Cover; and 4. Every Page	✓
4	Laporan tahunan ditampilkan di <i>website</i> perusahaan <i>The Annual Report shall be uploaded at the Company's Website</i>	Mencakup laporan tahunan terkini dan paling kurang 4 tahun terakhir.	<i>Including recent and 4 recent years Annual Report.</i>	✓
II. Ikhtisar Data Keuangan Penting/Key Financial Highlights				
1	Informasi hasil usaha perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun <i>Information of comparatives statements of incomes within recent 3 (three) fiscal years or since the beginning of operation, if the Company commences its business activity less than 3 (three) years</i>	Informasi memuat antara lain: 1. Penjualan/pendapatan usaha; 2. Laba (rugi): a. Dibagikan kepada pemilik entitas induk; dan b. Dibagikan kepada kepentingan nonpengendali; 3. Penghasilan komprehensif periode berjalan; a. Dibagikan kepada pemilik entitas induk; dan b. Dibagikan kepada kepentingan nonpengendali; dan 4. Laba (rugi) per saham. Catatan: Apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, perusahaan menyajikan laba (rugi) dan penghasilan komprehensif periode berjalan secara total.	<i>The information includes:</i> 1. Revenue/Sales; 2. Earning (loss); a. Attributable to owner of parent entity; and b. Attributable to non-controlling interest 3. Comprehensive Income for the year; a. Attributable to owner of parent entity; and b. Attributable to non-controlling interest 4. Profit (loss) per share). <i>Notes: if the Company does not have subsidiary, the Company shall present total statements of profit (loss) and comprehensive income for current period.</i>	27

No.	Kriteria Criteria	Penjelasan	Description	Halaman Page
2	Informasi posisi keuangan perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun <i>Information of comparative financial positions within recent 3 (three) fiscal years or since the beginning of operation, if the Company commences its business activity less than 3 (three) years</i>	Informasi memuat antara lain: 1. Jumlah investasi pada entitas asosiasi; 2. Jumlah aset; 3. Jumlah liabilitas; dan 4. Jumlah ekuitas.	<i>The information includes:</i> 1. Total investment with associations; 2. Total assets; 3. Total liabilities; and 4. Total equity.	24-26
3	Rasio keuangan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun <i>Comparative financial ratio within recent 3 (three) fiscal years or since the beginning of operation, if the Company commences its business activity less than 3 (three) years</i>	Informasi memuat 5 (lima) rasio keuangan yang umum dan relevan dengan industri perusahaan.	<i>The information covers 5 (five) common financial ratio that are relevant with the Company's industry.</i>	28
4	Informasi harga saham dalam bentuk tabel dan grafik <i>Shares Price Information in Table and Chart</i>	1. Jumlah saham yang beredar; 2. Informasi dalam bentuk tabel yang memuat: a. Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; b. Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan c. Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan. 3. Informasi dalam bentuk grafik yang memuat paling kurang: a. Harga penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan b. Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan. Untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir.	1. Total Shares Outstanding 2. Information as table includes: a. Market capitalization based on price at the Stock Exchange where the shares are listed; b. The highest, lowest and closing shares prices based on price at the Stock Exchange where the shares are listed c. Shares trading volume at the Stock Exchange where the shares are listed. 3. Information in chart is at least including: a. Closing price based on price at the Stock Exchange where the shares are listed; b. Shares trading volume at Stock Exchange where shares trading is at the Stock Exchange where the Company's shares are listed. <i>For every quarter in the last 2 years.</i>	29

No.	Kriteria Criteria	Penjelasan	Description	Halaman Page
5	Informasi mengenai obligasi, sukuk atau obligasi konversi yang masih beredar dalam 2 (dua) tahun buku terakhir <i>Information on issued Bonds, Sukuk or Converted Bonds within recent 2 (two) fiscal years</i>	Informasi memuat: 1. Jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (<i>outstanding</i>); 2. Tingkat bunga/imbalan; 3. Tanggal jatuh tempo; dan 4. Peringkat obligasi/sukuk tahun 2015 dan 2016. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki obligasi/sukuk/obligasi konversi, agar diungkapkan.	<i>The information includes:</i> 1. Total bonds/sukuk/converted bonds outstanding; 2. Interest/yield rate; 3. Date of Maturity; and 4. Bonds/Sukuk Rating in 2015 and 2016 <i>Notes: if the Company did not have bonds/sukuk/converted bonds, the condition shall be reported.</i>	29

III. Laporan Dewan Komisaris dan Direksi/*Report from Board of Commissioners and Board of Directors*

1	Laporan Dewan Komisaris <i>Report from Board of Commissioners</i>	Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Penilaian atas kinerja Direksi mengenai pengelolaan perusahaan dan dasar penilaiannya; 2. Pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh Direksi dan dasar pertimbangannya; 3. Pandangan atas penerapan/ pengelolaan <i>whistleblowing system</i> (WBS) di perusahaan dan peran Dewan Komisaris dalam WBS tersebut; dan 4. Perubahan komposisi Dewan Komisaris (jika ada) dan alasan perubahannya.	<i>Contains the followings:</i> 1. Assessment on the Board of Directors Performance in the course of Company's management altogether with the assessment basis; 2. View on the Company's business prospect prepared by the Board of Directors and basis for the consideration; 3. View on Whistle Blowing System (WBS) implementation and role of the Board of Commissioners in the WBS practice; and 4. Change to Board of Commissioners composition altogether with the reason (if any).	32-41
2	Laporan Direksi <i>Report from Board of Directors</i>	Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Analisis atas kinerja perusahaan, yang mencakup antara lain: a. kebijakan strategis; b. perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan; dan c. kendala-kendala yang dihadapi perusahaan dan langkah-langkah penyelesaiannya; 2. Analisis tentang prospek usaha; 3. Perkembangan penerapan tata kelola perusahaan pada tahun buku; dan 4. Perubahan komposisi anggota Direksi (jika ada) dan alasan perubahannya.	<i>Contains the followings:</i> 1. Analysis on the Company's performance including : a. strategic policy; b. comparison between target and realization; and c. issues experienced by the Company and settlement plants; 2. Business prospect analysis; 3. Corporate governance practice; and 4. Change to Board of Directors composition altogether with the reason (if any).	42-50

No.	Kriteria Criteria	Penjelasan	Description	Halaman Page
3	Tanda tangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi <i>Signatures of the Board of Directors and Board of Commissioners Members</i>	Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Tanda tangan dituangkan pada lembaran tersendiri; 2. Pernyataan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan; 3. Ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan menyebutkan nama dan jabatannya; dan 4. Penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari yang bersangkutan dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan, atau penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari anggota yang lain dalam hal tidak terdapat penjelasan tertulis dari yang bersangkutan.	<i>Contains the following:</i> 1. <i>The signatures are disclosed in separated sheet;</i> 2. <i>Board of Directors and Board of Commissioners Responsibility Statement upon the Authenticity of the Annual Report Contents;</i> 3. <i>Signed by all Board of Directors and Board of Commissioners Members by declaring their name and position; and</i> 4. <i>Written explanation in a separated letter for any Board of Directors or Board of Commissioners member not signing the Annual Report, or: written explanation in a separated letter for other members if the written explanation from respective member is unavailable.</i>	51

IV. Profil Perusahaan/*Company Profile*

1.	Nama dan alamat lengkap perusahaan <i>Name and Full Address of the Company</i>	Informasi memuat antara lain: nama dan alamat, kode pos, no. Telp, no. Fax, email, dan website.	<i>The information includes name and address, zip code, phone number, fax number, email and website.</i>	54
2	Riwayat singkat perusahaan <i>Brief History of the Company</i>	Mencakup antara lain: tanggal/tahun pendirian, nama, perubahan nama perusahaan (jika ada), dan tanggal efektif perubahan nama perusahaan. Catatan: apabila perusahaan tidak pernah melakukan perubahan nama, agar diungkapkan	<i>Includes, among others: date/year of establishment, name and effective date of the Company's name change.</i> <i>Notes: if the Company's not doing any name changes, the condition shall be disclosed.</i>	55-60
3	Bidang usaha <i>Line of Business</i>	Uraian mengenai antara lain: 1. Kegiatan usaha perusahaan menurut anggaran dasar terakhir; 2. Kegiatan usaha yang dijalankan; dan 3. Produk dan/atau jasa yang dihasilkan.	<i>The description includes:</i> 1. <i>Business activity based on the latest Articles of Association;</i> 2. <i>Business activity that is operated; and</i> 3. <i>Products and services provided.</i>	61-71
4	Struktur Organisasi <i>Organization Structure</i>	Dalam bentuk bagan, meliputi nama dan jabatan paling kurang sampai dengan struktur satu tingkat di bawah direksi.	<i>In chart, including name and position at least until one level below the Board of Directors</i>	72-74

No.	Kriteria Criteria	Penjelasan	Description	Halaman Page
5	Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan <i>Vision and Mission</i>	Mencakup: 1. Visi perusahaan; 2. Misi perusahaan; 3. Keterangan bahwa visi dan misi tersebut telah direviu dan disetujui oleh Direksi/Dewan Komisaris pada tahun buku; dan 4. Pernyataan mengenai budaya perusahaan (<i>corporate culture</i>) yang dimiliki perusahaan.	<i>Includes:</i> 1. <i>Vision;</i> 2. <i>Mission; and</i> 3. <i>Explanation of the Vision and Mission Approval by the Board of Directors/ Board of Commissioners</i> 4. <i>Statements of Corporate Culture</i>	4-7
6	Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Dewan Komisaris <i>Identity and Brief Profile of Board of Commissioners Members</i>	Informasi memuat antara lain: 1. Nama; 2. Jabatan dan periode jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain); 3. Umur; 4. Domisili; 5. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan); 6. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi & Periode Menjabat); dan 7. Riwayat penunjukkan (periode dan jabatan) sebagai anggota Dewan Komisaris di Perusahaan sejak pertama kali ditunjuk.	<i>The information includes:</i> 1. <i>Name;</i> 2. <i>Position (including position in other companies or organizations);</i> 3. <i>Age;</i> 4. <i>Domicile;</i> 5. <i>Education (Major and Educational Institution)</i> 6. <i>Career History (Position, Institution & Serving Period); and</i> 7. <i>Appointment History (period and position) as member of Board of Commissioners in the Company since initial appointment.</i>	76-79
7	Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Direksi <i>Identity and Brief Profile of Board of Directors Members</i>	Informasi memuat antara lain: 1. Nama; 2. Jabatan dan periode jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain); 3. Umur; 4. Domisili; 5. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan); 6. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat); dan 7. Riwayat penunjukkan (periode dan jabatan) sebagai anggota Direksi di Perusahaan sejak pertama kali ditunjuk.	<i>The information includes:</i> 1. <i>Name;</i> 2. <i>Position (including position in other companies or organizations);</i> 3. <i>Age;</i> 4. <i>Domicile;</i> 5. <i>Education (Major and Educational Institution)</i> 6. <i>Career History (Position, Institution and Serving Period); and</i> 7. <i>Appointment History (period and position) as member of Board of Directors in the Company since initial appointment.</i>	80-83
8	Jumlah karyawan (komparatif 2 tahun) dan data pengembangan kompetensi karyawan yang mencerminkan adanya kesempatan untuk masing-masing level organisasi <i>Employee Demography (2 years comparative) and description of their competency development (i.e. employee education and training aspects)</i>	Informasi memuat antara lain: 1. Jumlah karyawan untuk masing-masing level organisasi; 2. Jumlah karyawan untuk masing-masing tingkat pendidikan; 3. Jumlah karyawan berdasarkan status kepegawaian; 4. Data pengembangan kompetensi karyawan yang telah dilakukan pada tahun buku yang terdiri dari pihak (level jabatan) yang mengikuti pelatihan, jenis pelatihan, dan tujuan pelatihan; dan 5. Biaya pengembangan kompetensi karyawan yang telah dikeluarkan pada tahun buku.	<i>The information includes:</i> 1. <i>Employee demography by organization level;</i> 2. <i>Employee demography by education level;</i> 3. <i>Employee demography by employment status;</i> 4. <i>Employee competency development program initiated in recent fiscal year consists of training participants (position level), type of training, and purpose of the training; and</i> 5. <i>Realization of employee competency development budget.</i>	102-115

No.	Kriteria Criteria	Penjelasan	Description	Halaman Page
9	Komposisi Pemegang Saham <i>Shareholders Composition</i>	Mencakup antara lain: 1. Rincian nama pemegang saham yang meliputi 20 pemegang saham terbesar dan persentase kepemilikannya; 2. Rincian pemegang saham dan persentase kepemilikannya meliputi: a. Nama pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham; dan b. Kelompok pemegang saham masyarakat dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5%. 3. Nama Direktur dan Komisaris serta persentase kepemilikan sahamnya secara langsung dan tidak langsung. Catatan: apabila Direktur dan Komisaris tidak memiliki saham langsung dan tidak langsung, agar diungkapkan.	<i>Contains the followings:</i> 1. <i>List of Top 20 Shareholders Name and Ownership Percentage;</i> 2. <i>Name of Shareholders and ownership percentage, including:</i> a. <i>Name of Shareholders with 5% or higher Shares Ownership; and</i> b. <i>Public shareholders with less than 5% shares ownership; and the ownership percentage.</i> 3. <i>Name of Director and Commissioner with Shares Ownership;</i> <i>Notes: If the Board of Directors and Board of Commissioners do not have direct shares ownership, the condition shall be disclosed.</i>	94
10	Daftar entitas anak dan/atau entitas asosiasi <i>List of subsidiary and/or association</i>	Dalam bentuk tabel memuat informasi antara lain: 1. Nama entitas anak dan/atau asosiasi; 2. Persentase kepemilikan saham; 3. Keterangan tentang bidang usaha entitas anak dan/atau entitas asosiasi; dan 4. Keterangan status operasi entitas anak dan/atau entitas asosiasi (telah beroperasi atau belum beroperasi).	<i>The information in tables includes:</i> 1. <i>Subsidiary and Association;</i> 2. <i>Shares ownership percentage;</i> 3. <i>Description of business line of the subsidiary and/or association; and</i> 4. <i>Description of operational status of the subsidiary and/or association (operating or not yet operated)</i>	95
11	Struktur Grup Perusahaan <i>Company Group Structure</i>	Struktur grup perusahaan dalam bentuk bagan yang menggambarkan entitas induk, entitas anak, entitas asosiasi, <i>joint venture</i>, dan <i>special purpose vehicle</i> (SPV).	<i>Group Structure as chart illustrating the subsidiary, association, joint venture and special purpose vehicle (SPV).</i>	95
12	Kronologi penerbitan saham (termasuk <i>private placement</i>) dan/atau pencatatan saham dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku <i>Shares Listing Chronology (including private placement) and/or shares listing since the initial issuance until end of fiscal year</i>	Mencakup antara lain: 1. Tahun penerbitan saham, jumlah saham, nilai nominal saham, dan harga penawaran saham untuk masing-masing tindakan korporasi (<i>corporate action</i>); 2. Jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi (<i>corporate action</i>); dan 3. Nama bursa di mana saham perusahaan dicatatkan. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kronologi pencatatan saham, agar diungkapkan.	<i>Includes the information, as follows:</i> 1. <i>Years of shares listing, total shares, shares par value and shares offering prices for each corporate action.</i> 2. <i>Total shares listed after each corporate action; and</i> 3. <i>Name of the stock exchange where the shares are listed.</i> <i>Notes: If the Company does not have shares listing chronology, the condition shall be disclosed.</i>	96

No.	Kriteria Criteria	Penjelasan	Description	Halaman Page
13	Kronologi penerbitan dan/atau pencatatan efek lainnya dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku <i>Other Securities Listing Issuance and/or Listing Chronology since the initial issuance until end of fiscal year</i>	Mencakup antara lain: 1. Nama efek lainnya, tahun penerbitan efek lainnya, tingkat bunga/imbalan efek lainnya, dan tanggal jatuh tempo efek lainnya; 2. Nilai penawaran efek lainnya; 3. Nama bursa di mana efek lainnya dicatatkan; dan 4. Peringkat efek. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kronologi penerbitan dan pencatatan efek lainnya, agar diungkapkan.	<i>Includes the information, as follows:</i> 1. <i>Name of other securities, other securities issuance date, interest/yield rate of other securities, and maturity date of other securities;</i> 2. <i>Other securities offering price;</i> 3. <i>Name of stock exchange where other securities are listed; and</i> 4. <i>Securities rating.</i> <i>Notes: if the Company does not have other securities listing chronology and issuance, the condition shall be disclosed.</i>	96
14	Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang <i>Name and address of stock market supporting institution and/or profession</i>	Informasi memuat antara lain: 1. Nama dan alamat BAE/pihak yang mengadministrasikan saham perusahaan; 2. Nama dan alamat Kantor Akuntan Publik; dan 3. Nama dan alamat perusahaan pemeringkat efek.	<i>Includes the information, as follows:</i> 1. <i>Name and address of Shares Registrar/ Company's Shares Administrator;</i> 2. <i>Name and Address of Public Accountant Firm; and</i> 3. <i>Name and address of rating company.</i>	96
15	Penghargaan yang diterima dalam tahun buku terakhir dan/atau sertifikasi yang masih berlaku dalam tahun buku terakhir baik yang berskala nasional maupun internasional <i>National and International scales awards received and/or valid certifications in recent fiscal year</i>	Penghargaan yang diterima dalam tahun buku terakhir dan/atau sertifikasi yang masih berlaku dalam tahun buku terakhir baik yang berskala nasional maupun internasional.	<i>National and International scales awards received and/or valid certifications in recent fiscal year.</i>	N/A
16	Nama dan alamat entitas anak dan/atau kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada) <i>Name and address of subsidiary or branch office or representative office (if any)</i>	Memuat informasi antara lain: 1. Nama dan alamat entitas anak; dan 2. Nama dan alamat kantor cabang/perwakilan. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, kantor cabang, dan kantor perwakilan, agar diungkapkan.	<i>Includes the information, as follows:</i> 1. <i>Name and address of the subsidiary; and</i> 2. <i>Name and address of branch/ representative office.</i> <i>Notes: if the Company does not have any subsidiary/branch office/representative office, shall be disclosed.</i>	98

No.	Kriteria Criteria	Penjelasan	Description	Halaman Page
17	Informasi pada Website Perusahaan <i>Information at Official Website</i>	Meliputi paling kurang: 1. Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu; 2. Isi Kode Etik; 3. Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan; 4. Laporan keuangan tahunan terpisah (5 tahun terakhir); 5. Profil Dewan Komisaris dan Direksi; dan 6. Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Unit Audit Internal.	<i>Includes the information, at least, as follows:</i> 1. <i>Shareholders information until individual end-owners;</i> 2. <i>Code of Conducts contents;</i> 3. <i>Information about General Meetings of Shareholders (GMS) at least including agenda discussed in the GMS, GMS Minutes of Meeting Summary and important date information, such as GMS announcement date, GMS invitation date, GMS Summary publication date;</i> 4. <i>Separated Financial Statements (5 recent years);</i> 5. <i>Profile of Board of Commissioners and Board of Directors; and</i> 6. <i>Charter of the Board of Commissioners, Committees and Internal Audit Unit</i>	97
18	Pendidikan dan/atau pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal <i>Education and/or training program participated by Board of Commissioners, Board of Directors, the Committees, Corporate Secretary and Internal Audit Unit</i>	Meliputi paling kurang informasi (jenis dan pihak yang relevan dalam mengikuti): 1. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Dewan Komisaris; 2. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Direksi; 3. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Audit; 4. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Nominasi dan Remunerasi; 5. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Lainnya; 6. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Sekretaris Perusahaan; dan 7. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Unit Audit Internal. yang diikuti pada tahun buku. Catatan: apabila tidak terdapat pendidikan dan/atau pelatihan pada tahun buku, agar diungkapkan.	<i>Includes the information, at least, as follows (type and person who is relevant to participate in):</i> 1. <i>Education and/or training program for Board of Commissioners;</i> 2. <i>Education and/or training program for Board of Directors;</i> 3. <i>Education and/or training program for Audit Committee;</i> 4. <i>Education and/or training program for Remuneration and Nomination Committee;</i> 5. <i>Education and/or training program for Other Committees;</i> 6. <i>Education and/or training program for Corporate Secretary; and</i> 7. <i>Education and/or training program for Internal Audit Unit.</i> <i>Notes: if there is no education and/or training program done in the fiscal year, the condition shall be disclosed.</i>	205 214-215 242 245

No.	Kriteria Criteria	Penjelasan	Description	Halaman Page
V. Analisa & Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan/ <i>Management's Discussion & Analysis on the Company's Performance</i>				
1	Tinjauan operasi per segmen usaha <i>Operational Review by Business Segment</i>	Memuat uraian mengenai: 1. Penjelasan masing-masing segmen usaha. 2. Kinerja per segmen usaha, antara lain: a. Produksi; b. Peningkatan/penurunan kapasitas produksi; c. Penjualan/pendapatan usaha; dan d. Profitabilitas.	<i>The information contains, as follows:</i> <i>1. Explanation about each business segment.</i> <i>2. Performance by business segment, including:</i> <i>a. Production;</i> <i>b. Increasing/decreasing production capacity;</i> <i>c. Sales/Revenue; and</i> <i>d. Profitability.</i>	127-145
2	Uraian atas kinerja keuangan perusahaan <i>Description on Financial Performance</i>	Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya dan penyebab kenaikan/penurunan suatu akun (dalam bentuk narasi dan tabel), antara lain mengenai: 1. Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset; 2. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang dan total liabilitas; 3. Ekuitas; 4. Penjualan/pendapatan usaha, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain & penghasilan komprehensif periode berjalan; dan 5. Arus kas.	<i>Financial performance analysis including comparison of financial performance in recent fiscal year with earlier year and the cause of increasing/decreasing performance (narrative explanation and table), includes the information, as follows:</i> <i>1. Current assets, non-current assets, and total assets;</i> <i>2. Current liabilities, non-current liabilities and total liabilities;</i> <i>3. Equity;</i> <i>4. Sales/Revenue, expense and profit (loss), comprehensive income & total comprehensive income (loss); and</i> <i>5. Cash flows.</i>	146-154
3	Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar utang dan tingkat kolektibilitas piutang perusahaan, dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan sesuai dengan jenis industri perusahaan <i>Discussion and analysis on solvency and receivables collectability by presenting calculation of ratio that are relevant with the Company's industry</i>	Penjelasan tentang : 1. Kemampuan membayar hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang; dan 2. Tingkat kolektibilitas piutang.	<i>Explanation on :</i> <i>1. Solvency, both short-term and long-term; and</i> <i>2. Receivables collectability ratio.</i>	154
4	Bahasan tentang struktur modal (<i>capital structure</i>) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (<i>capital structure policy</i>) <i>Discussion on capital structure and capital structure policy</i>	Penjelasan atas: 1. Rincian struktur modal (<i>capital structure</i>) yang terdiri dari utang berbasis bunga/sukuk dan ekuitas; dan 2. Kebijakan manajemen atas struktur modal (<i>capital structure policies</i>); dan 3. Dasar pemilihan kebijakan manajemen atas struktur modal.	<i>Explanation on:</i> <i>1. Capital structure description comprising of interest/sukuk based liabilities and equity; and</i> <i>2. Capital structure policies; and</i> <i>3. Basis for capital structure policy preference</i>	154-155

No.	Kriteria Criteria	Penjelasan	Description	Halaman Page
5	Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal (bukan ikatan pendanaan) pada tahun buku terakhir <i>Discussion on material commitment for capital expenditure</i>	Penjelasan tentang: 1. Nama pihak yang melakukan ikatan; 2. Tujuan dari ikatan tersebut; 3. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut; 4. Mata uang yang menjadi denominasi; dan 5. Langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait. Catatan: apabila perusahaan tidak mempunyai ikatan terkait investasi barang modal pada tahun buku terakhir agar diungkapkan.	<i>Explanation on:</i> 1. <i>Name of the committed party;</i> 2. <i>Purpose of the commitment;</i> 3. <i>Soruce of fund expected to fulfill the commitment;</i> 4. <i>Denomination currency; and</i> 5. <i>Initiatives plannedby the Company as protection from related foreign currency.</i> <i>Notes: if the Company does not have any commitment related with capital expenditure in the recent fiscal year, the condition shall be disclosed.</i>	156
6	Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan pada tahun buku terakhir <i>Discussion on capital expenditure realization in recent fiscal year</i>	Penjelasan tentang: 1. Jenis investasi barang modal; 2. Tujuan investasi barang modal; dan 3. Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan pada tahun buku terakhir. Catatan: apabila tidak terdapat realisasi investasi barang modal, agar diungkapkan.	<i>Explanation on:</i> 1. <i>Type of capital expenditure;</i> 2. <i>Purpose of capital expenditure; and</i> 3. <i>Value of capital expenditure realization in recent fiscal year.</i> <i>Notes: if there is no capital expenditure realization, the condition shall be disclosed.</i>	156
7	Informasi perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), dan target atau proyeksi yang ingin dicapai untuk satu tahun mendatang mengenai pendapatan, laba, dan lainnya yang dianggap penting bagi perusahaan <i>Information on comparison between target at beginning of fiscal year with the result (realization), and target or projection to be achieved within one upcoming period in terms of revenue, profit, capital structure or others considered necessary for the Company.</i>	Informasi memuat antara lain: 1. Perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi); dan 2. Target atau proyeksi yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun mendatang.	<i>The information includes:</i> 1. <i>Comparison between target at beginning of fiscal year and result (realization); and</i> 2. <i>Target or projection to be achieved within one upcoming period</i>	157
8	Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan <i>Subsequent material information and fact after accountant reporting date</i>	Uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang. Catatan: apabila tidak ada kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan, agar diungkapkan.	<i>Description on subsequent material event after accountant reporting date including its impact to future performance and business risk.</i> <i>Notes: If there is no subsequent material information after accountant reporting date, the condition shall be disclosed.</i>	N/A
9	Uraian tentang prospek usaha perusahaan <i>Description on business prospect</i>	Uraian mengenai prospek perusahaan dikaitkan dengan industri dan ekonomi secara umum disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya.	<i>Description on business prospect related with the industry and economics generally followed by quantitative supporting data from reliable sources.</i>	157-158

No.	Kriteria Criteria	Penjelasan	Description	Halaman Page
10	Uraian tentang aspek pemasaran <i>Description on marketing aspect</i>	Uraian tentang aspek pemasaran atas produk dan/atau jasa perusahaan, antara lain strategi pemasaran dan pangsa pasar.	<i>Description on marketing aspect of the Company's products and/or services, i.e. marketing strategy and market share.</i>	127-142
11	Uraian mengenai kebijakan dividen dan jumlah dividen kas per saham dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 (dua) tahun buku terakhir <i>Description on dividen policy and amount of cash dividend per share and total dividend per annum that is announced or paid within 2 (two) recent fiscal years</i>	Memuat uraian mengenai: 1. Kebijakan pembagian dividen; 2. Total dividen yang dibagikan; 3. Jumlah dividen kas per saham; 4. Payout ratio; dan 5. Tanggal pengumuman dan pembayaran dividen kas. Catatan: apabila tidak ada pembagian dividen, agar diungkapkan alasannya.	<i>The information includes:</i> 1. <i>Dividend policy;</i> 2. <i>Total dividend paid;</i> 3. <i>Total cash dividend per share;</i> 4. <i>Payout ratio; and</i> 5. <i>Cash dividend announcement and payment date in each year.</i> <i>Notes: If no dividend payment, the reason shall be disclosed.</i>	159
12	Program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan perusahaan (ESOP/MSOP) yang masih ada sampai tahun buku <i>Employee and/or management stock option plan (ESOP/MSOP)</i>	Memuat uraian mengenai: 1. Jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya; 2. Jangka waktu; 3. Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan 4. Harga exercise. Catatan: apabila tidak memiliki program dimaksud, agar diungkapkan.	<i>The information includes:</i> 1. <i>Amount of ESOP/MSOP shares and realization;</i> 2. <i>Maturity;</i> 3. <i>Requirement for eligible employee and/or management;</i> 4. <i>Exercise price.</i> <i>Notes: If the program is unavailable, the condition shall be disclosed.</i>	158
13	Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum (dalam hal perusahaan masih diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana) <i>Public offering proceeds realization (in the course of the Company has a mandatory to report proceeds realization)</i>	Memuat uraian mengenai: 1. Total perolehan dana; 2. Rencana penggunaan dana; 3. Rincian penggunaan dana; 4. Saldo dana; dan 5. Tanggal persetujuan RUPS/RUPO atas perubahan penggunaan dana (jika ada). Catatan: apabila tidak memiliki informasi realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, agar diungkapkan.	<i>The information includes:</i> 1. <i>Total proceeds;</i> 2. <i>Proceeds realization plan;</i> 3. <i>Detail of proceeds realization;</i> 4. <i>Outstanding; and</i> 5. <i>Date of GMS approval on the change of proceeds realization (if any).</i> <i>Notes: if the public offering proceeds realization information is not available, the condition shall be disclosed.</i>	159

No.	Kriteria Criteria	Penjelasan	Description	Halaman Page
14	Informasi transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi <i>Material information on investment, expansion, divestment, business merger/joint, acquisition and/or debt/capital restructuring</i>	Memuat uraian mengenai: 1. Nama pihak yang bertransaksi dan sifat hubungan afiliasi; 2. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi; 3. Alasan dilakukannya transaksi; 4. Realisasi transaksi pada periode tahun buku terakhir; 5. Kebijakan perusahaan terkait dengan mekanisme review atas transaksi; dan 6. Pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait. Catatan: apabila tidak mempunyai transaksi dimaksud, agar diungkapkan.	<i>The information includes:</i> 1. <i>Name of the transaction and nature of the affiliated relation;</i> 2. <i>Explanation about the transaction fairness;</i> 3. <i>Reason of the transaction;</i> 4. <i>Realization of the transaction during the recent fiscal year period;</i> 5. <i>Company policy related with transaction review mechanism; and</i> 6. <i>Compliance with related Law and regulation.</i> <i>Notes: if the transaction is unavailable, the condition shall be disclosed.</i>	158-159
15	Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan terhadap perusahaan pada tahun buku terakhir <i>Description on change in regulation in recent fiscal year.</i>	Uraian memuat antara lain: 1. Nama peraturan perundang-undangan yang mengalami perubahan; dan 2. Dampaknya (kuantitatif dan/atau kualitatif) terhadap perusahaan (jika signifikan) atau pernyataan bahwa dampaknya tidak signifikan. Catatan: apabila tidak terdapat perubahan peraturan	<i>The information contains information, as follows:</i> 1. <i>Name of changing regulation; and</i> 2. <i>Impacts (quantitative and/or qualitative) to the Company (if significant) or statements that the impact is less material.</i> <i>Notes: if there is no changing regulation, the condition shall be disclosed.</i>	160
16	Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan pada tahun buku terakhir <i>Impact to the Company</i> <i>Description on change in accounting policy implemented in recent fiscal years</i>	Uraian memuat antara lain: 1. Perubahan kebijakan akuntansi; 2. Alasan perubahan kebijakan akuntansi; dan 3. Dampaknya secara kuantitatif terhadap laporan keuangan. Catatan: apabila tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.	<i>Description includes:</i> 1. <i>Change in accounting policy;</i> 2. <i>Reason of the change to the accounting policy; and</i> 3. <i>Quantitative impact on the financial statements</i> <i>Notes: If there is no change in accounting policy, the condition shall be disclosed.</i>	160-161
17	Informasi kelangsungan usaha <i>Information on Business Sustainability</i>	Pengungkapan informasi mengenai: 1. Hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir; 2. <i>Assessment</i> manajemen atas hal-hal pada angka 1; dan 3. Asumsi yang digunakan manajemen dalam melakukan <i>assessment</i> .	<i>Disclosure of information, as follows:</i> 1. <i>Issues with potential significant impact towards the Company's business sustainability in the recent fiscal year.</i> 2. <i>Assessment form the management on issues explained at point 1; and</i> 3. <i>Assumption used by the Management in the assessment.</i>	161

No.	Kriteria Criteria	Penjelasan	Description	Halaman Page
		Catatan: apabila tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan asumsi yang mendasari manajemen dalam meyakini bahwa tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir.	<i>Notes: If there is no issue with potential significant impact towards the Company's business sustainability in the recent fiscal year, the underlying assumption of the management for ensuring that there is no with potential significant impact towards the Company's business sustainability in the recent fiscal year shall be disclosed.</i>	
VI. Tata Kelola Perusahaan/Good Corporate Governance				
1	Uraian Dewan Komisaris <i>Description on Board of Commissioners</i>	Uraian memuat antara lain: 1. Uraian tanggung jawab Dewan Komisaris; 2. Penilaian atas kinerja masing-masing komite yang berada di bawah Dewan Komisaris dan dasar penilaiannya; dan 3. Pengungkapan mengenai <i>Board Charter</i> (pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris).	<i>Description includes:</i> 1. <i>Description on Board of Commissioners' responsibility;</i> 2. <i>Evaluation to performance of each Committee under the Board of Commissioners and evaluation basis; and</i> 3. <i>Disclosure on Board Charter (Board of Commissioners Working Guideline and Procedure).</i>	192-206
2	Komisaris Independen (jumlahnya minimal 30% dari total Dewan Komisaris) <i>Information about Independent Commissioner (minimum 30% of total Board of Commissioners)</i>	Meliputi antara lain: 1. Kriteria penentuan Komisaris Independen; dan 2. Pernyataan tentang independensi masing-masing Komisaris Independen.	<i>Includes the information, as follows:</i> 1. <i>Independent Commissioner appointment criteria; and</i> 2. <i>Statement of Independency for every Independent Commissioner.</i>	206
3	Uraian Direksi <i>Description of Board of Directors</i>	Uraian memuat antara lain: 1. Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; 2. Penilaian atas kinerja komite-komite yang berada di bawah Direksi (jika ada); dan 3. Pengungkapan mengenai <i>Board Charter</i> (pedoman dan tata tertib kerja Direksi).	<i>The information includes:</i> 1. <i>Scope of individual duty and responsibility for every Board of Directors member;</i> 2. <i>Assessment on the Committees under the Board of Directors (if any); and</i> 3. <i>Disclosure on Board Charter (Board of Directors Working Guideline and Procedure).</i>	207-215
4	Penilaian Penerapan GCG untuk tahun buku 2015 yang meliputi paling kurang aspek Dewan Komisaris dan Direksi <i>GCG Assessment for Fiscal Year 2015 including, at least, Board of Commissioners and Board of Directors aspects</i>	Memuat uraian mengenai: 1. Kriteria yang digunakan dalam penilaian; 2. Pihak yang melakukan penilaian; 3. Skor penilaian masing-masing kriteria; 4. Rekomendasi hasil penilaian; dan 5. Alasan belum/tidak diterapkannya rekomendasi. Catatan: apabila tidak ada penilaian penerapan GCG untuk tahun buku 2015, agar diungkapkan.	<i>The information includes:</i> 1. <i>Assessment criteria;</i> 2. <i>Name of the Assessor;</i> 3. <i>Score for each criteria;</i> 4. <i>Assessment recommendation; and</i> 5. <i>Reason for recommendation that is not/not yet implemented.</i> <i>Notes: If there is no GCG Assessment in 2015, the condition shall be disclosed.</i>	172-174

No.	Kriteria Criteria	Penjelasan	Description	Halaman Page
5	Uraian mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi <i>Description on remuneration policy for Board of Commissioners and Board of Directors</i>	Mencakup antara lain: 1. Pengungkapan prosedur pengusulan sampai dengan penetapan remunerasi Dewan Komisaris; 2. Pengungkapan prosedur pengusulan sampai dengan penetapan remunerasi Direksi; 3. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Dewan Komisaris; 4. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Direksi; 5. Pengungkapan indikator untuk penetapan remunerasi Direksi; dan 6. Pengungkapan bonus kinerja, bonus non kinerja, dan/atau opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi (jika ada). Catatan: apabila tidak terdapat bonus kinerja, bonus non kinerja, dan opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, agar diungkapkan.	<i>The information includes:</i> 1. <i>Disclosure of Board of Commissioners remuneration proposal until stipulation procedure;</i> 2. <i>Disclosure of Board of Directors remuneration proposal until stipulation procedure;</i> 3. <i>Remuneration structure indicating remuneration component and amount per component for every Board of Commissioners member;</i> 4. <i>Remuneration structure indicating remuneration component and amount per component for every Board of Directors member;</i> 5. <i>Disclosure of Board of Directors remuneration indicator; and</i> 6. <i>Disclosure of performance and non-performance incentives and/or stock option received by every Board of Commissioners and Board of Directors member (if any).</i> <i>Notes: If the performance and non-performance incentives and/or stock option received by every Board of Commissioners and Board of Directors member are unavailable, the condition shall be disclosed.</i>	216
6	Frekuensi & Tingkat Kehadiran Rapat yang dihadiri mayoritas anggota pada rapat Dewan Komisaris (minimal 1 kali dalam 2 bulan), Rapat Direksi (minimal 1 kali dalam 1 bulan), dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi (minimal 1 kali dalam 4 bulan) <i>Meeting frequency & attendance list that is attended by majority of the members in Board of Commissioners meeting (minimum once in 2 months), Board of Directors meeting (minimum once in 1 month), and Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meeting (Management Meeting) (minimum once in 4 months)</i>	Informasi memuat antara lain: 1. Tanggal Rapat; 2. Peserta Rapat; dan 3. Agenda Rapat. untuk masing-masing rapat Dewan Komisaris, Direksi, dan rapat gabungan.	<i>The information includes:</i> 1. <i>Meeting date;</i> 2. <i>Meeting participants; and</i> 3. <i>Meeting agenda.</i> <i>for every Board of Commissioners meeting, Board of Directors meeting or Management Meeting</i>	199-203 212-214 203-204

No.	Kriteria Criteria	Penjelasan	Description	Halaman Page
7	Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu <i>Information about ultimate and controlling shareholders, both direct and non-direct shareholders until individual shareholder.</i>	Dalam bentuk skema atau diagram yang memisahkan pemegang saham utama dengan pemegang saham pengendali. Catatan: yang dimaksud pemegang saham utama adalah pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan, tetapi bukan pemegang saham pengendali.	<i>Presented as scheme or chart, with separation between ultimate and controlling shareholders.</i> <i>Notes: Ultimate shareholders refer to any party with direct and indirect shares ownership minimum 20% (twenty per cent) of voting rights from total shares with voting rights issued by a Company who are not controlling Shareholders.</i>	94
8	Pengungkapan hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali <i>Disclosure of affiliation among the Board of Directors members, Board of Commissioners and Ultimate/Controlling Shareholders</i>	Mencakup antara lain: 1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya; 2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; 3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali; 4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan 5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali. Catatan: apabila tidak mempunyai hubungan afiliasi dimaksud, agar diungkapkan.	<i>The information includes:</i> <i>1. Affiliation among the Board of Directors members;</i> <i>2. Affiliation between Board of Directors and Board of Commissioners members;</i> <i>3. Affiliation between Board of Directors members with Ultimate and/or Controlling Shareholders;</i> <i>4. Affiliation among the Board of Commissioners members; and</i> <i>5. Affiliation between Board of Commissioners members with Ultimate and/or Contrplling Shareholders.</i> <i>Notes: If the affiliation is unavailable, the condition shall be disclosed.</i>	217
9	Komite Audit <i>Audit Committee</i>	Mencakup antara lain: 1. Nama, jabatan, dan periode jabatan anggota komite audit; 2. Riwayat pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan) dan pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat) anggota komite audit; 3. Independensi anggota komite audit; 4. Uraian tugas dan tanggung jawab; 5. Uraian pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku; dan 6. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite audit.	<i>The information includes:</i> <i>1. Name and position of Audit Committee members;</i> <i>2. Educational background (Major and Institution) and career history (Position, Instituion, and tenure) of the Audit Committee members;</i> <i>3. Independency of Audit Committee members;</i> <i>4. Description of duty and responsibility;</i> <i>5. Description of Audit Committee working report in the fiscal year; and</i> <i>6. Audit Committee meeting frequency and attendance level.</i>	222-233

No.	Kriteria Criteria	Penjelasan	Description	Halaman Page
10	Komite Nominasi dan/atau Remunerasi <i>Nomination and/or Remuneration Committee</i>	Mencakup antara lain: 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite nominasi dan/atau remunerasi; 2. Independensi komite nominasi dan/atau remunerasi; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite nominasi dan/atau remunerasi pada tahun buku; 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite nominasi dan/atau remunerasi; 6. Pernyataan adanya pedoman komite nominasi dan/atau remunerasi; dan 7. Kebijakan mengenai suksesi direksi.	The information includes: 1. Name, position and brief profile of Nomination and/or remuneration committee members; 2. Independency of nomination and/or remuneration committee members; 3. Description of duty and responsibility; 4. Description of nomination and/or remuneration committee working report in the fiscal year; and 5. Nomination and/or remuneration committee meeting frequency and attendance level; 6. Statements of nomination and/or remuneration committee charter; and 7. Board of Directors succession policy.	234
				215
11	Komite-komite lain di bawah Dewan Komisaris yang dimiliki oleh perusahaan <i>Other Committees under the Board of Commissioners established by the Company</i>	Mencakup antara lain: 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite lain; 2. Independensi komite lain; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite lain pada tahun buku; dan 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite lain.	The information includes: 1. Name, position, and brief profile of the other committee's members; 2. Independency of other committee's members; 3. Description of duty and responsibility; 4. Description of working report by the other committees; and 5. Other committees meeting frequency and attendance level.	234-236
12	Uraian tugas dan Fungsi Sekretaris Perusahaan <i>Description of Corporate Secretary Duty and Function</i>	Mencakup antara lain: 1. Nama, dan riwayat jabatan singkat sekretaris perusahaan; 2. Domisili; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; dan 4. Uraian pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku.	The information includes: 1. Name and brief profile of Corporate Secretary; 2. Domicile; 3. Description of duty and responsibility; and 4. Corporate secretary working report in the fiscal year.	240-242

No.	Kriteria Criteria	Penjelasan	Description	Halaman Page
13	Uraian mengenai unit audit internal <i>Description on Internal Audit Unit</i>	Mencakup antara lain: 1. Nama ketua unit audit internal; 2. Jumlah pegawai (auditor internal) pada unit audit internal; 3. Sertifikasi sebagai profesi audit internal; 4. Kedudukan unit audit internal dalam struktur perusahaan; 5. Uraian pelaksanaan kegiatan unit audit internal pada tahun buku; dan 6. Pihak yang mengangkat dan memberhentikan ketua unit audit internal.	<i>The information includes:</i> 1. <i>Name of Internal Audit Unit Chief;</i> 2. <i>Total personnel (internal auditor) at Internal Audit Unit;</i> 3. <i>Certification as internal audit profession;</i> 4. <i>Position of internal audit unit in the organization structure;</i> 5. <i>Description of internal audit unit working report; and</i> 6. <i>Party who appointed and discharged Head of Internal Audit Unit.</i>	243-247
14	Akuntan Publik <i>Public Accountant</i>	Informasi memuat antara lain: 1. Nama dan tahun akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir; 2. Nama dan tahun Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir; 3. Besarnya fee untuk masing-masing jenis jasa yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik pada tahun buku terakhir; dan 4. Jasa lain yang diberikan Kantor Akuntan Publik dan akuntan publik selain jasa audit laporan keuangan tahunan pada tahun buku terakhir. Catatan: apabila tidak ada jasa lain dimaksud, agar diungkapkan.	<i>The information includes:</i> 1. <i>Name and period of public accountant auditing the annual financial statements for 5 recent years;</i> 2. <i>Name and period of Pulic Accountant Firm auditing annual financial statements for 5 recent years;</i> 3. <i>Amount of fee for each service provided by the public accountant in recent fiscal year; and</i> 4. <i>Other service provided by Public Accountant Firm besides annual financial statements audit service</i> <i>Notes: If there is no other service provided, the condition shall be disclosed.</i>	248-249
15	Uraian mengenai manajemen risiko perusahaan <i>Description on Risk Management</i>	Mencakup antara lain: 1. Penjelasan mengenai sistem manajemen risiko yang diterapkan perusahaan; 2. Penjelasan mengenai hasil reviu yang dilakukan atas sistem manajemen risiko pada tahun buku; 3. Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan; dan 4. Upaya untuk mengelola risiko tersebut.	<i>The information includes:</i> 1. <i>Explanation on risk management sytem implemented by the Company</i> 2. <i>Explanation on evaluation done to effectiveness of the risk management system;</i> 3. <i>Explanation on risks profile of the Company; and</i> 4. <i>Risk mitigation plan.</i>	252-262

No.	Kriteria Criteria	Penjelasan	Description	Halaman Page
16	Uraian mengenai sistem pengendalian intern <i>Description on internal control system</i>	Mencakup antara lain: 1. Penjelasan singkat mengenai sistem pengendalian internal, antara lain mencakup pengendalian keuangan dan operasional; 2. Penjelasan kesesuaian sistem pengendalian intern dengan kerangka yang diakui secara internasional (COSO – <i>internal control framework</i>); dan 3. Penjelasan mengenai hasil revidu yang dilakukan atas pelaksanaan sistem pengendalian internal pada tahun buku.	<i>The information includes:</i> 1. <i>Brief explanation on internal control system including financial and operational controlling;</i> 2. <i>Explanation of internal control system compliance with international-standard framework (COSO – internal control framework); and</i> 3. <i>Explanation on evaluation to the internal control system</i>	250-251
17	Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan lingkungan hidup <i>Description on corporate social responsibility related with environment</i>	Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Target/rencana kegiatan pada tahun 2016 yang ditetapkan manajemen; 2. Kegiatan yang dilakukan dan dampak kuantitatif atas kegiatan tersebut; dan terkait program lingkungan hidup yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan, seperti penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, sistem pengolahan limbah perusahaan, mekanisme pengaduan masalah lingkungan, pertimbangan aspek lingkungan dalam pemberian kredit kepada nasabah, dan lain-lain. 3. Sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki.	<i>The information includes:</i> 1. <i>Activity target/plan in 2016 as implemented by the management;</i> 2. <i>Activity realization and quantitative impact from the activity; and related with environmental initiative engaged with operational activity of the Company, such as environment-friendly and recycle material and energy consumption, waste treatment system, environment issue complaint mechanism, environmental aspect consideration in loans disbursement for the customers, and others</i> 3. <i>Environmental certification.</i>	276
18	Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja <i>Description on corporate social responsibility related with Employment, Occupational Health and Safety</i>	Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Target/rencana kegiatan pada tahun 2016 yang ditetapkan manajemen; dan 2. Kegiatan yang dilakukan dan dampak kuantitatif atas kegiatan tersebut terkait praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, seperti kesetaraan gender dan kesempatan kerja, sarana dan keselamatan kerja, tingkat turnover karyawan, tingkat kecelakaan kerja, remunerasi, mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan, dan lain-lain.	<i>The information includes:</i> 1. <i>Activity target/plan in 2016 as implemented by the management; and</i> 2. <i>Activity realization and quantitative impact from the activity related with employment, occupational health and safety practice such as equality of gender and job opportunity, employee turnover ratio, remuneration, occupational issue handling mechanism, and others.</i>	277-279

No.	Kriteria Criteria	Penjelasan	Description	Halaman Page
19	Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait dengan pengembangan sosial dan kemasyarakatan <i>Description on corporate social responsibility related with social and community development</i>	Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Target/rencana kegiatan pada tahun 2016 yang ditetapkan manajemen; 2. Kegiatan yang dilakukan dan dampak atas kegiatan tersebut; dan 3. Biaya yang dikeluarkan Terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan, seperti penggunaan tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan, perbaikan sarana dan prasarana sosial, bentuk donasi lainnya, komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi, pelatihan mengenai anti korupsi, dan lain-lain.	<i>The information includes:</i> 1. <i>Activity target/plan in 2016 as implemented by the management;</i> 2. <i>Activity realization and impact from the activity; and</i> 3. <i>Allocated budget</i> <i>Related with social and community development, such as local workers employment, community development in operational area, social facilities and infrastructures development, other types of donation, anti-corruption policy and procedure communication, anti-corruption training and others.</i>	280-282
20	Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait dengan tanggung jawab kepada konsumen <i>Description on corporate social responsibility related with responsibility to customers</i>	Mencakup antara lain: 1. Target/rencana kegiatan yang pada tahun 2016 ditetapkan manajemen; dan 2. Kegiatan yang dilakukan dan dampak atas kegiatan tersebut Terkait tanggung jawab produk, seperti kesehatan dan keselamatan konsumen, informasi produk, sarana, jumlah dan penanggulangan atas pengaduan konsumen, dan lain-lain.	<i>The information includes:</i> 1. <i>Activity target/plan in 2016 as implemented by the management; and</i> 2. <i>Activity realization and impact from the activity</i> <i>Related with product responsibility such as customer health and safety, product information, channel, customer complaint number and handling and others</i>	283
21	Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, serta anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang menjabat pada periode laporan tahunan <i>Litigation encountered by the Company, subsidiary, Board of Directors and/or Board of Commissioners members serving in the Annual Report period</i>	Mencakup antara lain: 1. Pokok perkara/gugatan; 2. Status penyelesaian perkara/gugatan; 3. Risiko yang dihadapi perusahaan dan nilai nominal tuntutan/gugatan; dan 4. Sanksi administrasi yang dikenakan kepada perusahaan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas terkait (pasar modal, perbankan dan lainnya) pada tahun buku terakhir (atau terdapat pernyataan bahwa tidak dikenakan sanksi administrasi). Catatan: dalam hal perusahaan, entitas anak, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi tidak memiliki perkara penting, agar diungkapkan.	<i>The information includes:</i> 1. <i>Case/lawsuit summary;</i> 2. <i>Case/lawsuit settlement status;</i> 3. <i>Risk encountered by the Company and value of the litigation/lawsuit; and</i> 4. <i>Administrative sanction charged to the Entity, Board of Commissioners and Board of Directors members by the authorized regulator (stock market, banking and other authorities) in recent fiscal year (or statements of free from any administrative sanction).</i> <i>Notes: In the course of the Entity, Board of Commissioners and Board of Directors members do not encounter any litigation, the condition shall be disclosed.</i>	263

No.	Kriteria Criteria	Penjelasan	Description	Halaman Page
22	Akses informasi dan data perusahaan <i>Corporate Information and Data Access</i>	Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misalnya melalui <i>website</i> (dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris), media massa, <i>mailing list</i> , buletin, pertemuan dengan analis, dan sebagainya.	<i>Description on the availability of corporate information and data access publicly, i.e via website (in Indonesian and English), mass media, mailing list, bulletin, analyst meeting and others</i>	267
23	Bahasan mengenai kode etik <i>Description on Code of Conducts</i>	Memuat uraian antara lain: 1. Pokok-pokok kode etik; 2. Pengungkapan bahwa kode etik berlaku bagi seluruh level organisasi; 3. Penyebarluasan kode etik; 4. Sanksi untuk masing-masing jenis pelanggaran yang diatur dalam kode etik (normatif); dan 5. Jumlah pelanggaran kode etik beserta sanksi yang diberikan pada tahun buku terakhir. Catatan: apabila tidak terdapat pelanggaran kode etik pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.	<i>The information includes:</i> 1. <i>Code of Conducts provisions;</i> 2. <i>Disclosure that Code of Conducts prevail for entire organization level;</i> 3. <i>Code of Conducts dissemination;</i> 4. <i>Punishment for every violation as stipulated in the Code of Conducts (normative);</i> 5. <i>Number of Code of Conducts violation, punishment administered in recent fiscal year</i> <i>Notes: If Code of Conducts violation is unavailable in recent fiscal year, the condition shall be disclosed.</i>	263-265
24	Pengungkapan mengenai <i>whistleblowing system</i> <i>Disclosure on Whistle Blowing System</i>	Memuat uraian tentang mekanisme <i>whistleblowing system</i> antara lain: 1. Penyampaian laporan pelanggaran; 2. Perlindungan bagi <i>whistleblower</i> ; 3. Penanganan pengaduan; 4. Pihak yang mengelola pengaduan; dan 5. Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses pada tahun buku terakhir; dan 6. Sanksi/tindak lanjut atas pengaduan yang telah selesai diproses pada tahun buku. Catatan: apabila tidak terdapat pengaduan yang masuk dan telah selesai diproses pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.	<i>The information includes Whistle Blowing System mechanism, as follows:</i> 1. <i>Fraud report submission;</i> 2. <i>Protection to the Whistle Blower;</i> 3. <i>Report handling;</i> 4. <i>Report Manager authority; and</i> 5. <i>Total report received and processed in recent fiscal year; and</i> 6. <i>Punishment/follow-up on the report that had been processed completely during the fiscal year.</i> <i>Notes: If neither incoming or processed report in recent fiscal year, the condition shall be disclosed.</i>	266
25	Kebijakan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi <i>Board of Commissioners and Board of Directors Composition Diversity Policy</i>	Uraian kebijakan tertulis Perusahaan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dalam pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, dan jenis kelamin. Catatan: apabila tidak ada kebijakan dimaksud, agar diungkapkan alasan dan pertimbangannya.	<i>Description of written policy of the Company on Board of Commissioners and Board of Directors composition diversity policy in terms of educational background (major), career history, age and gender.</i> <i>Notes: if the policy is unavailable, the condition shall be disclosed altogether with the consideration.</i>	219-221

No.	Kriteria Criteria	Penjelasan	Description	Halaman Page
VII. Informasi Keuangan/ <i>Financial Information</i>				
1	Surat Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan <i>Declaration from the Board of Directors and/or Board of Commissioners on Financial Statements Responsibility</i>	Kesesuaian dengan peraturan terkait tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan.	<i>Compliance with regulations related with Financial Statements Responsibility</i>	✓
2	Opini auditor independen atas laporan keuangan <i>Independent Auditor Opinion on the Financial Statements</i>			✓
3	Deskripsi Auditor Independen di Opini <i>Description of Independent Auditor in the Opinion</i>	Deskripsi memuat tentang: 1. Nama dan tanda tangan; 2. Tanggal Laporan Audit; dan 3. Nomor ijin KAP dan nomor ijin Akuntan Publik.	<i>Description includes information, as follows:</i> 1. <i>Name & signature;</i> 2. <i>Date of Audit Report; and</i> 3. <i>KAP and Public Accountant Registries.</i>	✓
4	Laporan keuangan yang lengkap <i>Complete Financial Statements</i>	Memuat secara lengkap unsur-unsur laporan keuangan: 1. Laporan posisi keuangan; 2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain; 3. Laporan perubahan ekuitas; 4. Laporan arus kas; 5. Catatan atas laporan keuangan; 6. Informasi komparatif mengenai periode sebelumnya; dan 7. Laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya (jika relevan).	<i>Full disclosure of financial statements parts, as follows:</i> 1. <i>Statements of financial position (balance sheet);</i> 2. <i>Statements of profit or loss;</i> 3. <i>Statements of equity change;</i> 4. <i>Statements of cash flows;</i> 5. <i>Note son the financial statements; and</i> 6. <i>Comparative statements on earlier period; and</i> 7. <i>Statements of financial position at beginning of earlier period when the entity implemented certain accounting policy retrospectively or restating the financial statement accounts, or when the entity reclassified the accounts in the financial statements (if relevant)</i>	290-293
5	Perbandingan tingkat profitabilitas <i>Comparison of profitability</i>	Perbandingan kinerja/laba (rugi) tahun berjalan dengan tahun sebelumnya.	<i>Comparative profit (loss) for the year and earlier year</i>	291

No.	Kriteria Criteria	Penjelasan	Description	Halaman Page
6	Laporan Arus Kas <i>Statements of Cash Flows</i>	Memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. Pengelompokan dalam tiga kategori aktivitas: operasi, investasi, dan pendanaan; 2. Penggunaan metode langsung (<i>direct method</i>) untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi; 3. Pemisahan penyajian antara penerimaan kas dan atau pengeluaran kas selama tahun berjalan pada aktivitas operasi, investasi dan pendanaan; dan 4. Pengungkapan transaksi non kas harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan.	<i>The information includes:</i> 1. <i>Classification of three activity categories: operating, investing and financing;</i> 2. <i>Implementation of direct method to report cash flows from operating activities;</i> 3. <i>Separation of disclosure between inflow and outflow cash in recent year on operating, investing and financing activities; and</i> 4. <i>Disclosure of non-cash transaction that shall be disclosed in the notes on financial statements.</i>	293
7	Ikhtisar Kebijakan Akuntansi <i>Summary of Accounting Policy</i>	Meliputi sekurang-kurangnya: 1. Pernyataan kepatuhan terhadap SAK; 2. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan; 3. Pajak penghasilan; 4. Imbalan kerja; dan 5. Instrumen Keuangan.	<i>The information, at least, includes:</i> 1. <i>Statement of compliance with the FAS;</i> 2. <i>Basis of Financial Statements measurement and preparation;</i> 3. <i>Recognition of income and expenses;</i> 4. <i>Employment benefits; and</i> 5. <i>Financial Instruments.</i>	295-310
8	Pengungkapan transaksi pihak berelasi <i>Disclosure of related party transaction</i>	Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. Nama pihak berelasi, serta sifat dan hubungan dengan pihak berelasi; 2. Nilai transaksi beserta persentasenya terhadap total pendapatan dan beban terkait; dan 3. Jumlah saldo beserta persentasenya terhadap total aset atau liabilitas terkait.	<i>The disclosure includes:</i> 1. <i>Name of related parties; and nature and relation with the related parties;</i> 2. <i>Amount of the transaction and percentage total related income and expenses; and</i> 3. <i>Amount of balance and percentage to total assets or liabilities.</i>	332-333

No.	Kriteria Criteria	Penjelasan	Description	Halaman Page
9	Pengungkapan yang berhubungan dengan perpajakan <i>Disclosure of taxation-related information</i>	Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Rekonsiliasi fiskal dan perhitungan beban pajak kini; 2. Penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi; 3. Pernyataan bahwa Laba Kena Pajak (LKP) hasil rekonsiliasi dijadikan dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan tahun 2016; 4. Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk setiap periode penyajian, dan jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan; dan 5. Pengungkapan ada atau tidak ada sengketa pajak.	<i>The disclosure shall present information as follows:</i> 1. <i>Fiscal reconciliation and current tax calculation;</i> 2. <i>Explanation on relationship between tax income (expense) and accounting income.</i> 3. <i>Statements of reconciliated Taxable Income (LKP) is placed as basis for the Entity Income Tax Annual SPT submission;</i> 4. <i>Detail of deferred tax assets and liabilities recognized in the financial statements for every presentation period, and total deferred tax income (expenses) recognized in statements of profit or loss if the amount is unrecognized in the total deferred tax assets or liabilities recognized in the statements of financial position; and</i> 5. <i>Disclosure of any tax dispute event</i>	321-324
10	Pengungkapan yang berhubungan dengan aset tetap <i>Disclosure related with fixed assets</i>	Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Metode penyusutan yang digunakan; 2. Uraian mengenai kebijakan akuntansi yang dipilih antara model revaluasi dan model biaya; 3. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar aset tetap (untuk model revaluasi) atau pengungkapan nilai wajar aset tetap (untuk model biaya); dan 4. Rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan aset tetap pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan: penambahan, pengurangan dan reklasifikasi.	<i>The disclosure shall present information as follows:</i> 1. <i>Depreciation method applied;</i> 2. <i>Disclosure on selected accounting policy between revaluation model and cost model;</i> 3. <i>Significant method and assumption applied to estimate fair value of the fixed assets (for revaluation model) or disclosure of fixed assets fair value (for cost model); and</i> 4. <i>Reconciliation of total fixed assets gross booked value and accumulative depreciation at beginning and end of period by presenting: addition, deduction and reclassification.</i>	319

No.	Kriteria Criteria	Penjelasan	Description	Halaman Page
11	Pengungkapan yang berhubungan dengan segmen operasi <i>Disclosure related with operation segment</i>	Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Informasi umum yang meliputi faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dilaporkan; 2. Informasi tentang laba rugi, aset, dan liabilitas segmen yang dilaporkan; 3. Rekonsiliasi dari total pendapatan segmen, laba rugi segmen yang dilaporkan, aset segmen, liabilitas segmen, dan unsur material segmen lainnya terhadap jumlah terkait dalam entitas; dan 4. Pengungkapan pada level entitas, yang meliputi informasi tentang produk dan/atau jasa, wilayah geografis dan pelanggan utama.	<i>The disclosure shall present information as follows:</i> 1. <i>General information including factors applied to identify the reported segment;</i> 2. <i>Information on profit or loss, assets and liabilities of the reported segment;</i> 3. <i>Reconciliation of total segment revenue, reported segment profit or loss, segment assets, segment liabilities and other material elements of the segments to total related in the entity; and</i> 4. <i>Disclosure at entity level, including information about product and/or service, geographical area and main customers.</i>	N/A
12	Pengungkapan yang berhubungan dengan Instrumen Keuangan <i>Disclosure related with Financial Instruments</i>	Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Rincian instrumen keuangan yang dimiliki berdasarkan klasifikasinya; 2. Nilai wajar dan hirarkinya untuk setiap kelompok instrumen keuangan; 3. Penjelasan risiko yang terkait dengan instrumen keuangan: risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas; 4. Kebijakan manajemen risiko; dan 5. Analisis risiko yang terkait dengan instrumen keuangan secara kuantitatif.	<i>The disclosure shall present information as follows:</i> 1. <i>Detail information of owned financial instruments by classification;</i> 2. <i>Fair value and its hierarchical level for every financial instrument group;</i> 3. <i>Explanation of risk related with the financial instrument; market risk, credit risk and liquidity risk;</i> 4. <i>Risk management policy; and</i> 5. <i>Quantitative risk analysis related with financial instrument.</i>	317-318
13	Penerbitan laporan keuangan <i>Financial Statements Publication</i>	Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit; dan 2. Pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan.	<i>The disclosure shall present information as follows:</i> 1. <i>Date of authorization for the financial statements publication; and</i> 2. <i>Authorized party of the financial statements.</i>	295



PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
Indonesia Infrastructure Guarantee Fund

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
Capital Place, 7th & 8th Floor
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 18
Jakarta 12710 - Indonesia

Laporan Tahunan 2016 Annual Report